



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritas untuk memberikan gambaran mengenai pembangunan diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, serta dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan Program Bupati serta Wakil Bupati periode 2019-2024;
 - b. bahwa selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dapat diubah apabila berdasarkan hasil perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI TEGAL,

Ttd.


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-70/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURHAPID JUNAEDI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 pada tanggal 5 Juli 2019 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati Tegal serta Wakil Bupati Tegal periode tahun 2019-2024. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memberikan rekomendasi untuk dilakukannya perubahan. Berikut ini hasil analisis dari pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 :

- a. Analisis kondisi perekonomian saat ini, target dan capaian atas indikator makro sehubungan adanya pandemi covid-19, serta kondisi pengelolaan keuangan daerah sebagai implikasi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Analisis kesesuaian kebijakan Nasional sebagai implikasi terbitnya beberapa Peraturan Perundangan antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

- c. Analisis cascading dan ketepatan indikator kinerja pembangunan daerah (Formulasi Indikator, Target, Jenis Indikator, Kondisi Akhir dan Penyesuaian Target);
- d. Analisis hasil pelaksanaan RPJMD untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi RPJMD;
- e. Merumuskan hasil evaluasi sebagai rekomendasi dan arahan bagi penyusunan dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar antara lain mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Berhubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, diantaranya adalah :

1. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2020.
2. Perubahan secara umum adalah pandemi covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus *direfocusing*

dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk Tahun 2022-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 147

BAB I

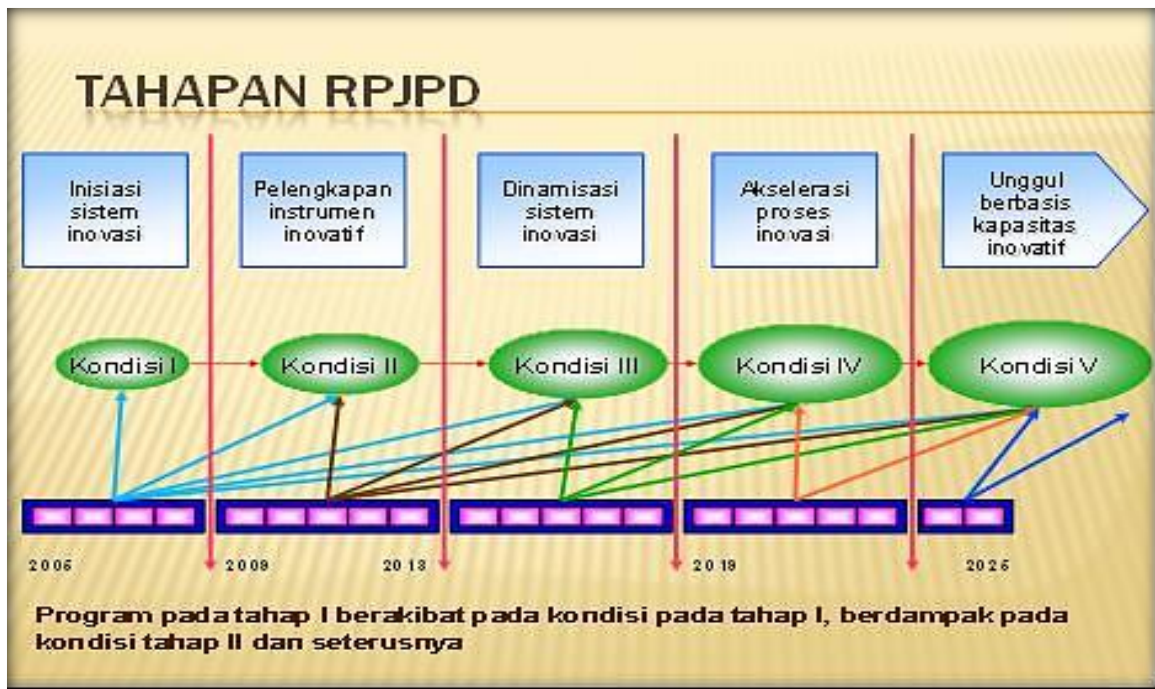
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)** yang berisi kebijakan dengan jangka waktu 20 tahun; dan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)** sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (iv) mengotimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Prinsip perencanaan pembangunan adalah terpadu dan berkelanjutan. Terpadu artinya ada korelasi perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan yang berkesinambungan dalam tahapan kurun waktu tertentu, saling terangkai, tidak terputus dan berjalan selalu pada koridor perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, meskipun pemegang kekuasaan atau pengambil kebijakan berganti.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKP diatur bahwa RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.



Gambar 1.1 Tahapan RPJPD Kabupaten Tegal

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun dengan prinsip keberlanjutan, maka Visi Misi Kepala Daerah Terpilih diterjemahkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang tentunya harus mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 yang disusun dengan prioritas pada **Akselerasi Proses Sistem Inovasi Daerah** dan merupakan lanjutan dari RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang merupakan tahap Dinamisasi Sistem Inovasi Daerah. Dinamisasi sistem inovasi yang telah berjalan dan mendorong proses pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019, perlu ditingkatkan sehingga terjadi akselerasi proses menuju daya saing daerah.

Akselerasi proses menuju daya saing daerah ini mensyaratkan kapasitas modal sosial yang mantap. Dengan meningkatnya kapasitas modal sosial, maka peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan menjadi dominan. Masyarakat memahami perlunya keberdayaan dan peran serta sebagai salah satu pilar *good governance* dalam mencapai tujuan pembangunan (tujuan bersama). Gotong royong sebagai salah satu kearifan lokal kembali menjadi budaya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu bentuk gotong royong para pelaku usaha di era ini. Penerapan bentuk-bentuk usaha-usaha ramah lingkungan dan menguntungkan secara ekonomis (*eco-efficiency*) yang diharapkan semakin meningkat ini menjadi indikator semakin mantapnya kapasitas inovatif. Akselerasi proses menuju daya saing ini harus mampu meningkatkan ekspor produk bernilai tambah yang tinggi. Peningkatan ekspor ini sudah barang tentu harus diikuti dengan peningkatan transaksi informasi intra Kabupaten Tegal, karena sebagaimana diketahui, bahwa dalam dunia usaha pelaku yang menguasai pasar adalah pelaku yang menguasai informasi. Oleh karena itu pemanfaatan TIK dalam tahap ini telah mutlak menjadi proses standar dalam penyelenggaraan usaha dan pemerintahan.

Selain itu RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 mengacu pada arahan pemanfaatan ruang (indikasi program utama) sebagaimana dokumen RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Berdasarkan tahapan pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024 mengacu pada Tahapan II (2017 – 2022) dan Tahapan III (2022 – 2027).

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 pada tanggal 5 Juli 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati serta Wakil Bupati Jawa Tengah periode tahun 2019-2024. Pada tahun 2021 ini, RPJMD Kabupaten Tegal telah memasuki tahun kedua.

Memasuki tahun pertama implementasi RPJMD, di awal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat global, termasuk Kabupaten Tegal. Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus positif covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, sedangkan kasus positif covid-19 di Jawa Tengah dilaporkan pertama kali pada tanggal 8 Maret 2020. Saat ini kasus covid-19 terkonfirmasi telah menyebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kejadian pandemi covid-19 berdampak krisis multisektor akibat penyebaran yang luas dan cepat dari tingkat global hingga domestik. Selain sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi besar pada ekonomi Kabupaten Tegal seperti industri pengolahan, perdagangan, UMKM, IKM, dan pariwisata. Pandemi ini juga berdampak pada penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi antara lain menurunkan daya beli masyarakat dan berimplikasi terhadap penurunan pendapatan daerah, bahkan diprediksi akan memunculkan penduduk miskin baru dan pengangguran baru akibat PHK. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian pandemi covid-19.

Selain itu adanya dinamika regulasi nasional yang ditetapkan paska penetapan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang bersifat mandatori berpengaruh juga pada kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tegal. Regulasi tersebut antara lain ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Regulasi lain adalah regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang -

Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2020.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional. Proses perubahan RPJMD dilakukan berdasarkan pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, pada Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam permendagri tersebut; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan permendagri tersebut; dan c) terjadi perubahan yang mendasar. Pada Pasal 342 ayat (3) disebutkan bahwa perubahan yang mendasar meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap RPJMD Tahun 2019-2024 menunjukkan capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Tegal yang berjumlah 326 indikator pada Tahun 2020 menunjukkan hasil yaitu a) pada aspek kesejahteraan masyarakat sebanyak 7 indikator (43,75%) telah tercapai melebihi atau sama dengan target akhir RPJMD, 5 indikator (31,25 %) *on the track* (≥ 30 persen sampai dengan kurang dari target akhir RPJMD), 1 indikator (6,25 %) perlu upaya keras dan 3 indikator (18,75%) NA (*not available*); b) pada aspek pelayanan umum sebanyak 105 indikator (34,77 %) telah tercapai melebihi atau sama dengan target akhir RPJMD, 129 indikator (42,72%) masih *on the track*, dan 68 indikator (22,52 %) perlu upaya keras (<30 persen dari target akhir RPJMD; c) pada aspek daya saing sebanyak 6 indikator (75 %) telah tercapai melebihi atau sama dengan target akhir RPJMD dan 2 indikator (25 %) masih *on the track*. Selanjutnya evaluasi juga dilakukan terhadap kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tegal yang dikaitkan dengan kondisi global dan regulasi nasional. Hasil dari evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Tegal merekomendasikan untuk melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 melalui melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: 1) Penyusunan Rancangan Awal; 2) Konsultasi Publik; 3) Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Awal dengan DPRD; 4) Konsultasi Rancangan Awal dengan Gubernur; 5) Penyusunan Rancangan; 6) Musrenbang RPJMD; 7) Penyusunan Rancangan Akhir; 8) Penyusunan Raperda Perubahan RPJMD; 9) Persetujuan Bersama Raperda Perubahan RPJMD oleh Bupati dan DPRD; 10) Evaluasi Raperda Perubahan RPJMD oleh Gubernur; dan 11) Penetapan Perubahan Perda RPJMD. Perubahan RPJMD

menjadi pedoman perangkat daerah dalam melakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan dijabarkan lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal tahun 2022 – 2024.

Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal setelah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar antara lain mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat dan dampak pandemi covid-19 tersebut diatas, maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen RPJMD melalui mekanisme perubahan RPJMD yang proses penyusunannya secara *mutatis mutandis*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal untuk kurun waktu 2019-2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
36. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
38. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, maupun provinsi. Dokumen Perubahan RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Tegal. Sekaligus terkait dengan KLHS yang mengintegrasikan didalamnya pelaksanaan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (SDGs), dan beberapa regulasi pusat lainnya (seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)).

Perubahan RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambaran keterkaitan RPJMD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber dan Ilustrasi : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Keselarasan amanat dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024, serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut.

a. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tegal

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Keselarasan Dokumen RPJPD dan RPJMD

	RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
V I S I		
	Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dilandasi Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
M I S I		
1.	Meningkatkan iklim kondusif bagi kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi ke 5 : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal

	RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
2.	Mewujudkan budaya belajar dan pendidikan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3.	Mewujudkan budaya hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat	Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
4.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan iklim yang produktif bagi tumbuhnya usaha	Misi ke 3 : Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan
5.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi ke 2 : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
6.	Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang aman dan bersatu yang dilandasi kearifan lokal	Misi ke 5 : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal
7.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik	Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

b. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Salah satu muatan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal adalah arahan pemanfaatan ruang yang diwujudkan dalam empat Tahapan Pembangunan Jangka Menengah. RPJMD adalah salah perangkat dalam melaksanakan tahapan rencana sebagaimana dalam matrik Indikasi Program Utama (IPU) RTRW. RPJMD Periode 2019 – 2024 mengacu pada IPU RTRW Tahapan II (2017 – 2022) dan Tahapan III (2022 – 2027). Keselarasan RPJMD dan RTRW Kabupaten dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Keselarasan Dokumen RTRW dan RPJMD

Indikasi Program Utama – Arah Pemanfaatan Ruang RTRW PJM II dan III	Indikasi Rencana Program RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
<p>Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Perwujudan Jaringan Jalan Kabupaten Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Penyediaan Sarana Angkutan Jalan Peningkatan Prasarana Lalu lintas Jalan Raya Intensifikasi Ketertiban Lalu Lintas melalui Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) 	<p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Peningkatan Proporsi Jembatan dalam kondisi baik <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Sarana Prasarana Layanan Angkutan Darat Peningkatan Pelayanan Ijin Trayek Peningkatan Persentase Kendaraan Angkutan yang Memiliki Uji Kelayakan Peningkatan Persentase Jalan memiliki Rambu sesuai Standar Peningkatan Persentase Lokasi Titik Parkir yang Terkelola Pelayanan Perijinan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
<p>Perwujudan Sistem jaringan prasarana lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengembangan sistem pengelolaan air Limbah (SPAL) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Pengembangan Sistem jaringan persampahan Pengembangan Jaringan Drainase 	<p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Cakupan Akses Layanan Air Minum <p>Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi/Limbah Domestik <p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan indikator Persentase Limbah B3 ditangani Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan indikator Persentase sampah terangkut ke TPA <p>Program Pengelolaan Sampah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Penanganan Sampah Peningkatan Pengurangan Sampah

<p style="text-align: center;">Indikasi Program Utama - Arah Pemanfaatan Ruang RTRW PJM II dan III</p>	<p style="text-align: center;">Indikasi Rencana Program RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024</p>
	<p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p> <p>a. Peningkatan Ketersediaan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten</p>

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

c. RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015-2019 dan dokumen perencanaan pembangunan Jawa Tengah jangka menengah tahun 2018-2023 yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Keselarasan RPJMD, RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD

No.	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	VISI	VISI	VISI
	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
	MISI	MISI	MISI
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi ke 4 : Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi ke 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Misi ke 4 : Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi ke 2 : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan Misi ke 3 : Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi ke 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Misi ke 2 : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan

No.	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi ke 4 :Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi ke 2 : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi ke 5 : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Misi ke 2 : Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten /Kota	Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi ke 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI	Misi ke 5 : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi ke 2 : Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten /Kota	Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi ke 2 : Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten /Kota	Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

d. RPJMD dengan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

Keselarasan RPJMD dan kabupaten/kota sekitar adalah pada isu strategis sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan masing-masing daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes dan RPJMD

No.	RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	ISU STRATEGIS	ISU STRATEGIS
1.	Pengurangan Kemiskinan	Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia
3.	Peningkatan Perekonomian Daerah	Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan
4.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
5.	Pembangunan Infrastruktur	
6.	Pembangunan dan Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Anak	Kualitas Sumber Daya Manusia
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi
8.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sementara keselarasan isu strategis RPJMD Kabupaten Pemalang dengan RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang dan RPJMD

No.	RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	ISU STRATEGIS	ISU STRATEGIS
1.	Kemiskinan yang masih tinggi	Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran
2.	Pengangguran masih tinggi	
3.	Kualitas pembangunan manusia masih rendah	Kualitas Sumber Daya Manusia
4.	Pertumbuhan ekonomi masih belum optimal	Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan
5.	Infrastruktur	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
	Bencana daerah	
6.	Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sementara keselarasan isu strategis RPJMD Kabupaten Banyumas dengan RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.6 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas dan RPJMD

No.	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	ISU STRATEGIS	ISU STRATEGIS
1.	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran	Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran
2.	Keterjangkauan dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam menunjang kualitas sumber daya manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia
3.	Ketersediaan infrastruktur daerah belum mampu mendukung pertumbuhan industri pariwisata dan pemerataan pusat pusat pertumbuhan ekonomi	Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sementara keselarasan isu strategis RPJMD Kota Tegal dengan RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.7 Keselarasan Dokumen RPJMD Kota Tegal dan RPJMD

No.	RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	ISU STRATEGIS	ISU STRATEGIS
1.	Kemiskinan	Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran
2.	Pengangguran	
3.	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Kualitas Sumber Daya Manusia
4.	Pembangunan Ekonomi	Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan
5.	Pembangunan Infrastruktur	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
6.	Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

e. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra PD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sehubungan dengan dilakukan Perubahan RPJMD, Renstra PD juga dilakukan perubahan terkait nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyesuaian indikator tujuan sasaran Renstra, indikator program, kegiatan dan sub kegiatan.

f. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan RPJMD menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022-2024.

g. RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 4) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 5) *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 6) Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah, 7) RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, dan 8) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah penyediaan penyesuaian dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Tegal sebagai penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun waktu tiga tahun yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kondisi daerah sebagai akibat pandemi covid-19.

Tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah:

- a. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2024;
- b. Menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta menjadi instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan perencanaan penganggaran;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD terhadap dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Tegal meliputi aspek demografi dan geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam tiga tahun ke depan.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat penjelasan mengenai kondisi kinerja keuangan lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan daerah selama periode RPJMD Tahun 2019-2024.

BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi penjelasan mengenai permasalahan pembangunan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun isu-isu strategis Kabupaten Tegal selama periode RPJMD Tahun 2019-2024 yang menjadi prioritas untuk diselesaikan selama tiga tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi daerah.

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2019-2024, serta tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya untuk setiap misi pembangunan.

BAB VI Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini memuat penjelasan mengenai strategi dan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi, arah kebijakan yang diambil pemerintah dalam pencapaian tujuan dari setiap misi pembangunan daerah, serta program pembangunan daerah sebagai instrumen setiap kebijakan selama periode RPJMD Tahun 2019-2024.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator program pembangunan daerah Kabupaten Tegal pada periode RPJMD Tahun 2019-2024 beserta kebutuhan pendanaan indikatif.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat berbagai indikator kinerja utama daerah Kabupaten Tegal dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja kunci.

BAB IX Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD yakni bahwa RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan digunakan dalam penyusunan RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 Km. secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km)
1	Adiwerna	21	27,0
2	Balapulang	20	86,2
3	Bojong	17	67,7
4	Bumijawa	18	109,2
5	Dukuhturi	18	17,1
6	Dukuhwaru	10	26,3
7	Jatinegara	17	109,5
8	Kedungbanteng	10	82,7
9	Kramat	20	43,9
10	Lebaksiu	15	47,0
11	Margasari	13	100,8
12	Pagerbarang	13	45,8
13	Pangkajene	23	37,6
14	Slawi	10	13,8
15	Suradadi	11	58,8
16	Talang	19	18,9
17	Tarub	20	28,0
18	Warureja	12	63,6
Jumlah		287	983,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

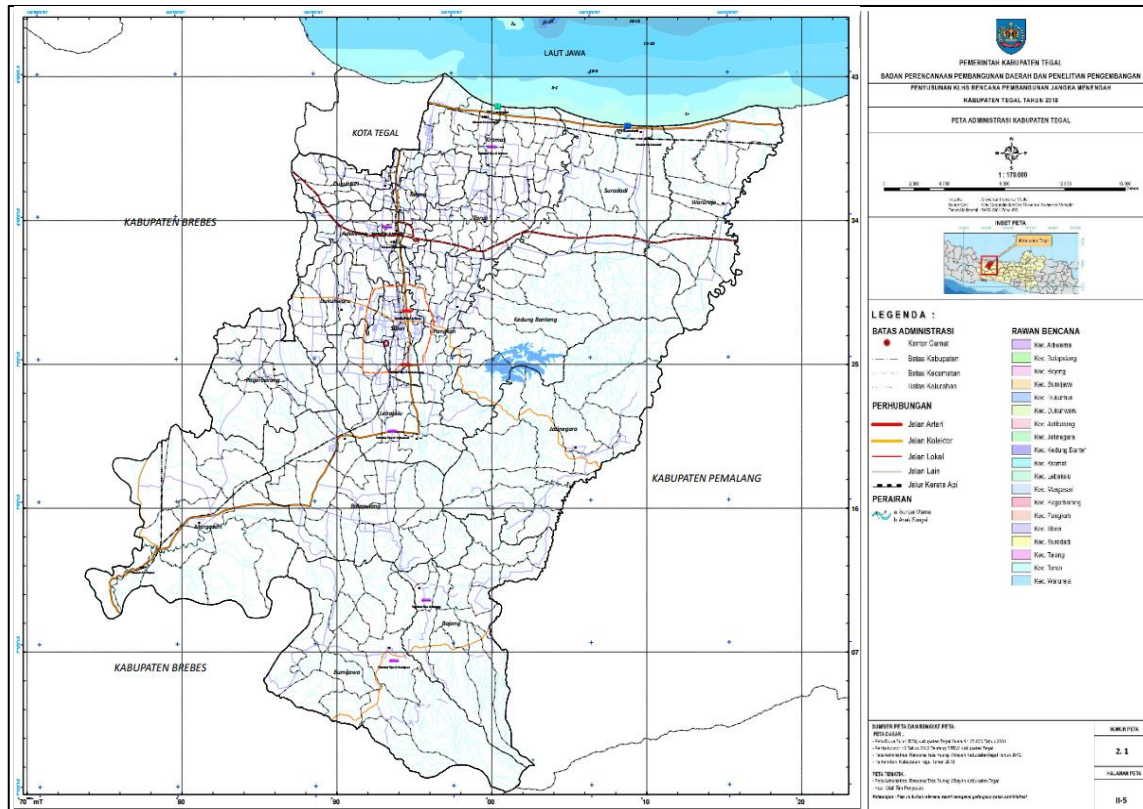
Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (109,2 Km), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (13,8 Km). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kab. Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

B. Letak dan Lokasi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukota Slawi dan terletak di : 108° 57'6" s/d 109° 21'30" BT dan antara 6° 50'41" s/d 7° 15'30" LS.

Gambar 2. 1. Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis di mana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :

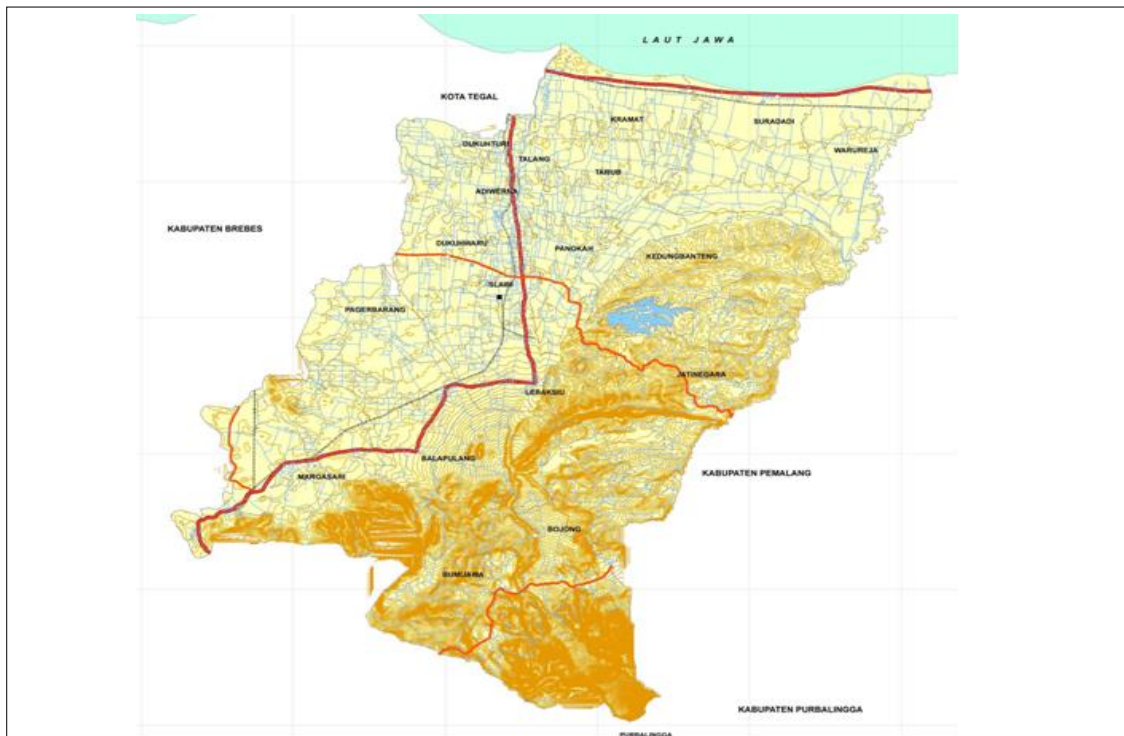
- Jalan Tol Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta – Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi – Purwokerto – Yogyakarta – Solo

C. Topografi

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
- Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) yaitu :

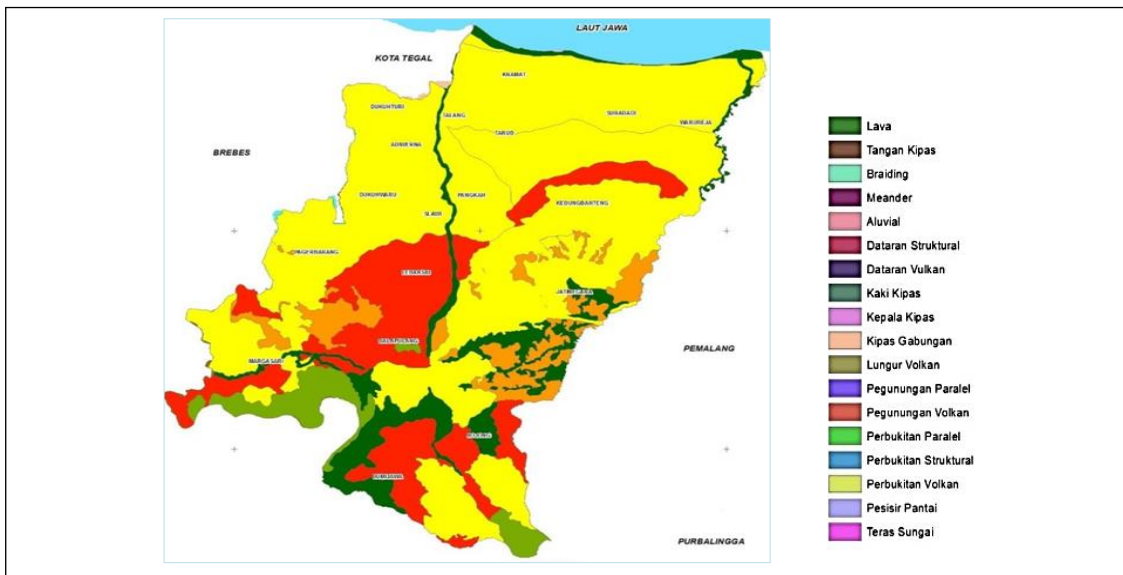
- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

D. Jenis Tanah dan Geologi

1) Jenis Tanah

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698 hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal



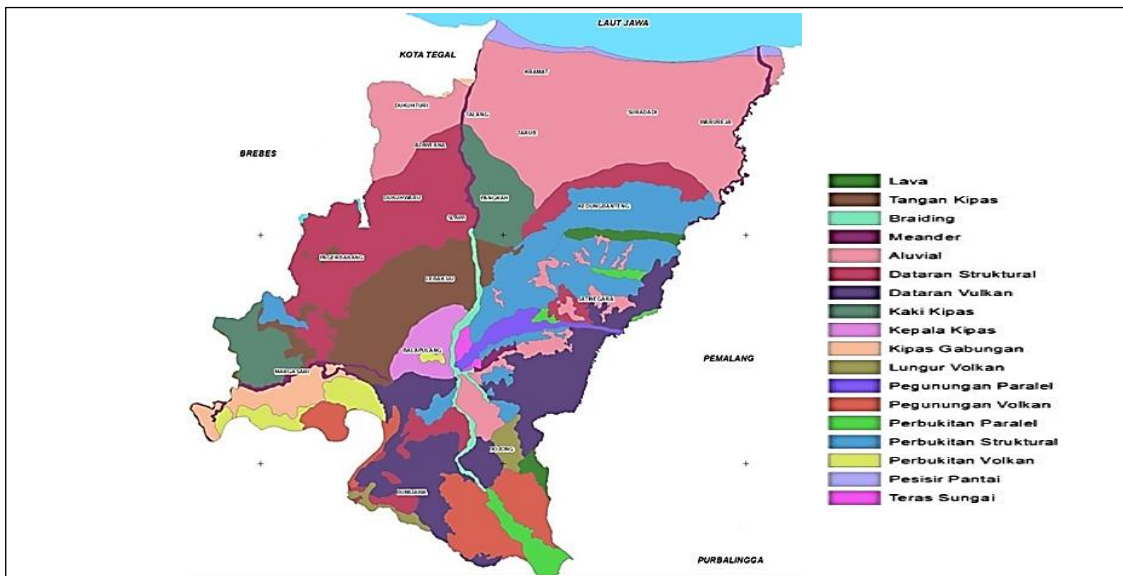
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

2) Geologi

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur vulkan, pegunungan paralel, pegunungan vulkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan vulkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

E. Hidrologi

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi *water storage* di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

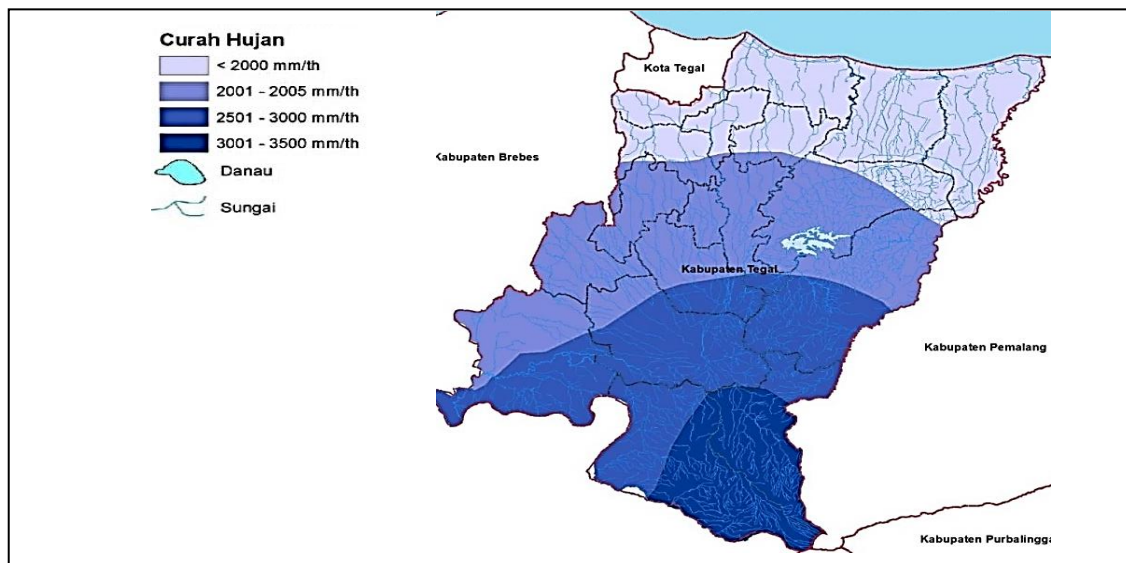
No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulng, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulng, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulng, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

F. Klimatologi

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan kelembaban 82 %, tekanan udara 1.008,4 hPa, kecepatan angin 4 knots, suhu udara rata-rata 26,9°C dan lama penyinaran matahari 113,4 jam serta penguapan air sebesar 131,2 mm. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan

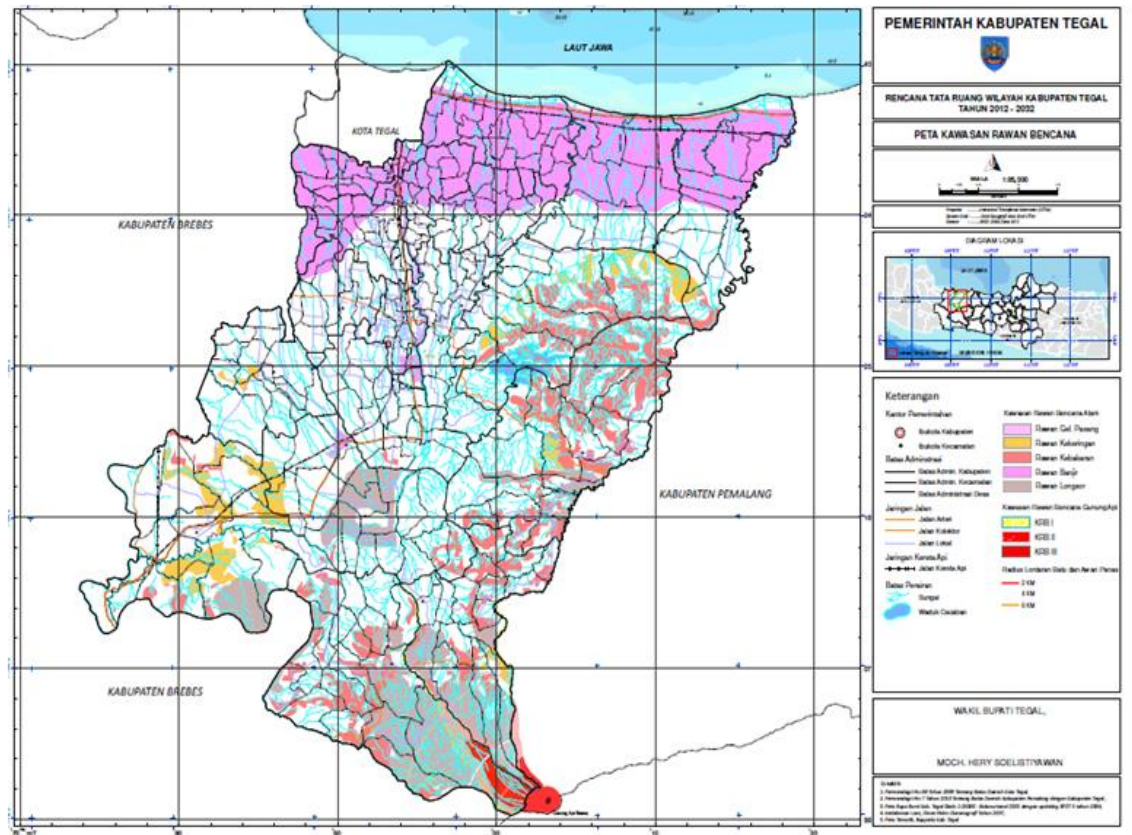


Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

G. Wilayah Rawan Bencana

Apabila dilihat kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan gunung slamet tegal merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah (tanah longsor), abrasi, angin topan dan dan kebakaran hutan.

Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Daerah Rawan Longsor; Daerah yang sering terjadi longsor adalah wilayah bagian selatan yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Pangkah. Hal ini lebih disebabkan karena secara topografis daerah tersebut merupakan daerah perbukitan dan kaki Gunung Slamet, serta daerah tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi, serta vegetasi tutupan lahan dan merupakan daerah patahan
- Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu kawasan di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupalelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun, dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir bandang, dan longsor material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya di daerah Kaki Gunung Slamet meliputi Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa.
- Daerah Rawan Banjir; yaitu kawasan yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai, serta tidak adanya/tidak berfungsinya drainase utama di wilayah permukiman khususnya di wilayah perkotaan. Daerah yang

rawan banjir adalah yang dilalui oleh Sungai Jembangan meliputi : Kecamatan Slawi, Adiwerna, Talang dan Dukuhturi, serta wilayah permukiman yang dilalui oleh Sungai Cacaban khususnya di wilayah Pantura yaitu Kecamatan Suradadi dan Kramat.

- d. Daerah Rawan Abrasi; Kabupaten memiliki wilayah Pantai Utara sepanjang sekitar 37 Km, beberapa tempat khususnya daerah – daerah yang berdekatan dengan muara sungai menjadi salah satu penyebab abrasi pantai. Wilayah yang sering terjadi abrasi meliputi Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat, Desa Maribaya Kecamatan Kramat, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Desa Demangharja Kecamatan Suradadi, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi, Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi, Purwahamba Kecamatan Suradadi;
- e. Daerah Rawan Angin Topan; angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kecamatan Balapulang, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa.
- f. Daerah Rawan Kekeringan; yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam yaitu khususnya pada daerah yang bukan merupakan Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Warureja.
- g. Daerah Rawan Gelombang Pasang; Untuk rawan gelombang pasang didasarkan pada jarak dengan pantai, karakteristik lahan (morfologi dan ketinggian wilayah) serta ada tidaknya penghalang baik alam maupun buatan, meliputi: Kecamatan Kramat (Desa Kramat dan Desa Maribaya), Kecamatan Suradadi (Desa Bojongsana, Desa Purwahamba, dan Desa Suradadi) dan Kecamatan Warureja (Desa Demangharja).
- h. Daerah Rawan Kebakaran Lahan adalah daerah yang merupakan kawasan hutan khususnya yang komoditas tanamannya tanaman jati yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Margasari, Jatinegara, Kedungbanteng dan Sebagian Warureja.

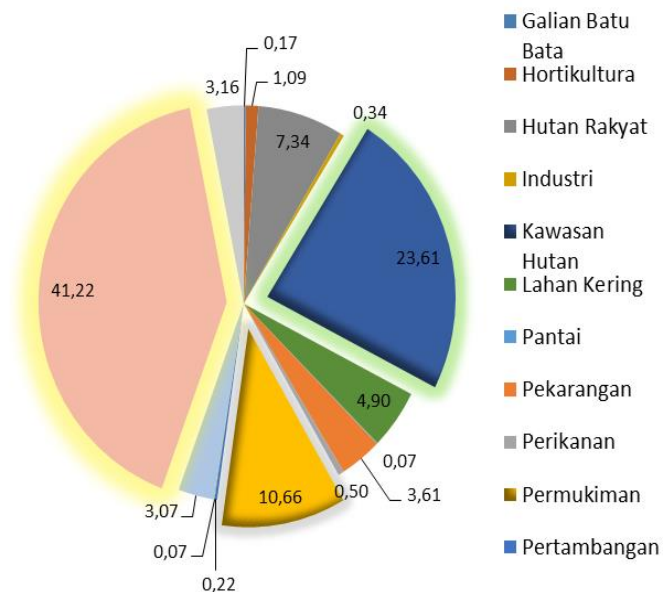
H. Penggunaan Lahan

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Berdasarkan interpretasi citra satelit resolusi tinggi liputan tahun 2016, kondisi penggunaan lahan di kabupaten tegal didominasi oleh penggunaan lahan sawah basah sekitar 41,22 % dari luas wilayah Kabupaten Tegal ini berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan, disusul kawasan hutan sekitar 23,61%.

Untuk lahan kering seluas 13.154 Ha komposisinya adalah tegalan, hutan rakyat dan hortikultura. Berdasarkan kondisi eksisting Bangunan permukiman seluas 10.529 Ha dan lahan pekarangan seluas 3.564 Ha di Kabupaten, apabila dibandingkan dengan data jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 1.596.996, dengan demikian secara kepadatan penduduk *netto* terkategori kepadatan tinggi 1.817 jiwa/km². Kondisi ini membutuhkan lahan yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan

Tataguna	Luas (Ha)
Galian Batu Bata	163
Hortikultura	1.073
Hutan Rakyat	7.247
Industri	334
Kawasan Hutan	23.313
Lahan Kering	4.835
Pantai	65
Pekarangan	3.564
Perikanan	491
Permukiman	10.529
Pertambangan	217
Peternakan	64
Sarana Prasana	3.032
Sawah	40.704
Tubuh Air	3.125
Jumlah	98.756



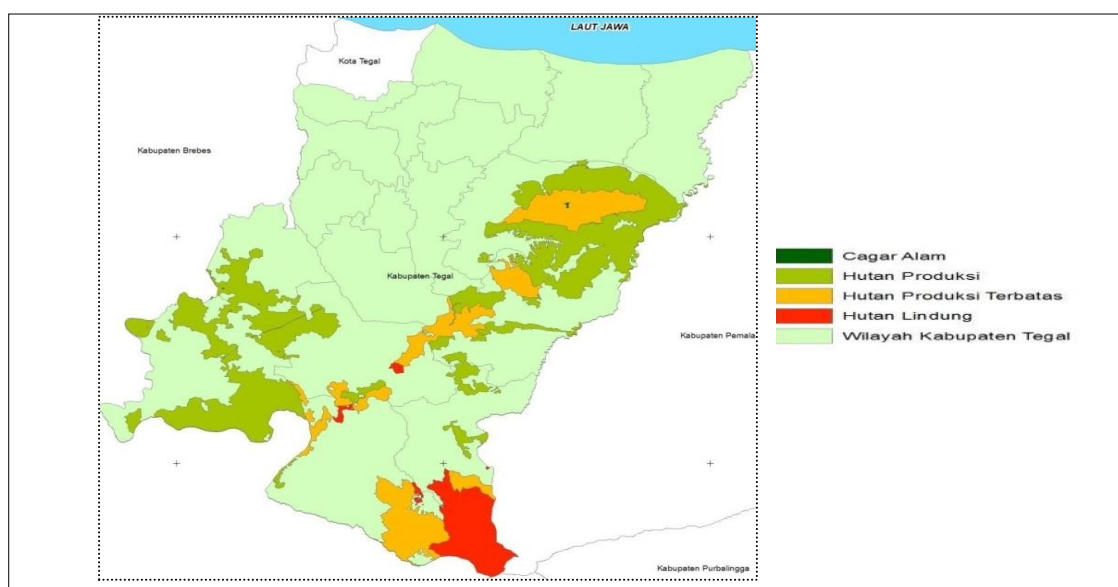
Sumber : Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Tahun 2016

I. Sumber Daya Hutan

1) Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, luas kawasan hutan di Kabupaten Tegal adalah 23.313 Ha atau setara dengan 27 % dari wilayah Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 7 Peta Sebaran Kawasan Hutan



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Tabel 2. 4 Status dan Fungsi Hutan

No	Status dan Fungsi hutan	Luas (Ha)	%
1	Areal Penggunaan Lain	74.686,25	73,01
2	Hutan Lindung	2.961,41	3,37
3	Hutan Poduksi Tebatas	6.672,40	7,58
4	Hutan Produksi	14.097,34	16,03
5	Cagar Alam	8,60	0,01
Jumlah		98.426,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

2) Pengelolaan Hutan

Perum Perhutani Unit I yaitu KPH Pemalang, KPH Balapulang, dan KPH Pekalongan Barat yang sebagian besar kawasannya berada di kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Bentuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) dengan komoditas tanamannya jati dan pinus. Selain itu Kabupaten Tegal juga memiliki kawasan Cagar Alam Guci yang saat ini telah berubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) dan merupakan salah satu objek wisata.

Tabel 2. 5 Pengelolaan Hutan

No	KPH	Luas Berdasarkan Fungsi (Ha)				Jumlah
		HL	HPT	HP	CA/TW A/SM	
1	KPH BALAPULANG					
	BH Linggapada	-	399,4	2.732,5	-	3.131,9
	BH Margasari	-	-	3.737,6		3.737,6
2	KPH PEMALANG					
	BH Jatinegara	-	2.649,9	5.844,4	6,6	8.500,9
3	KPH PEKALONGAN BARAT					
	BH Bumijawa	2.961,4	3.623,1	1.782,9	2,0	8.369,4
Jumlah		2.961,4	6.672,4	14.097,3	8,6	23.739,8

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, dengan mensinkronkan arah kebijakan pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

A. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari: kawasan

peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan lainnya.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi.

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan penanaman kembali ataupun hutan rakyat, maksudnya tanah rakyat yang ditanami dengan tanaman seperti halnya tanaman kehutanan namun sudah biasa ditanam rakyat dalam upaya konservasi tanah dan air.

Hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng seluas 6.672,4 ha. Hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pagerbarang, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah seluas 14.097,34 ha.

2) Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian meliputi: kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya peternakan, kawasan budidaya tanaman pangan meliputi: kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering (tanah ladang). Lokasi kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 39.045 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Sawah : Kecamatan Warurejo, Lebaksiu, Pagerbarang, Balapulang, Margasari, Dukuhturi, dan Dukuhwaru. Padi Ladang: Kecamatan Kedungbanteng, Bumijawa, Margasari, dan Bojong. Palawija: Kecamatan Suradadi, Kedungbanteng, Pangkah, Lebaksiu, Warurejo, dan Margasari.

3) Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Berdasarkan tempat pembudidayaan, dibedakan: perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan Pengembangan Perairan Umum, yaitu perikanan yang diusahakan di waduk, sungai, bendung, rawa dan sebagainya. Kawasan Pengembangan Budidaya Perikanan Kolam Air Tawar, dilaksanakan pada daerah yang mempunyai sumber air tawar dan benih yang mudah didapat. Budidaya ini dapat dilaksanakan pada daerah pegunungan dan dataran rendah. Tujuan Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan perairan darat agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah kawasan perikanan berupa kawasan tambak dan kolam seluas 321 Ha yang tersebar di Kecamatan Kedungbanteng, Pangkah, Kramat, Suradadi, Bumijawa, Lebaksiu dan Warureja. Rencana pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan daerah tangkapan antara 0-4 mil dari sepanjang pantai di Daerah di Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Warureja.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perkembangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Tegal masih membutuhkan beberapa tahapan sebelum sampai pada tahapan

eksploitasi. Hal tersebut karena masih belum diketahui mengenai kondisi volume kandungan bahan tambang yang ada. Meskipun sudah terindikasikan luasan hamparan tambang yang merata di wilayah kabupaten Tegal. Sedangkan sampai saat sekarang penguasaan dan pengusahaan bahan galian tambang yang ada masih ditangani oleh masyarakat umum awam dengan sistem pengelolaan informal. Lokasi yang sesuai dengan yang ditetapkan Departemen Pertambangan di mana mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi; meliputi Kecamatan Balapulang, Bojong, Bumijawa, Lebaksiu, Slawi. Pertambangan pasir dan batu gamping di Kecamatan Margasari.

5) Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri meliputi: industri besar; industri menengah; dan industri kecil dan mikro. Industri besar meliputi: kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari; kawasan Industri Pantura meliputi: Kecamatan Kramat; Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja.

Sentra kawasan industri berlokasi di Kecamatan Kramat dan Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, dan Warureja. Kawasan industri ini perlu diperhatikan pengolahan limbah industrinya. Khusus untuk kawasan industri di Kecamatan Kramat (yaitu industri perkayuan dan perikanan), agar diperhatikan kelestarian lingkungan pantai. Luas kawasan peruntukan industri 1.770 hektar.

6) Kawasan peruntukan pariwisata.

Kawasan pariwisata alam meliputi: Pantai Purwahamba Indah di Kecamatan Suradadi. Pada lokasi dilengkapi hotel, restoran & taman rekreasi. Pemandian air panas Guci di Kecamatan Bojong dan Bumijawa merupakan wisata alam di lereng Gunung Slamet dengan hawa yang sejuk dan panorama indah serta adanya sumber air panas alami. Keberadaannya dilengkapi dengan adanya hotel, restoran dan taman wisata; Telaga Putri di Kecamatan Bumijawa; Gua Lawa di Kecamatan Balapulang; Gua Santri di Kecamatan Balapulang; dan Telaga air Cenggini di Kecamatan Balapulang. Sedangkan Kawasan pariwisata budaya meliputi: Makam Amangkurat dan Makam Suroponolawen di Kecamatan Adiwerna; Makam Semedo di Kecamatan Kedungbanteng; dan Makam Syeh Maulana Magribi di Gunung Tanjung di Kecamatan Lebaksiu.

7) Kawasan peruntukan permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, meliputi Kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas sekitar 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, sedangkan Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan nasional. Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0712/ Tegal di Kecamatan Dukuhturi;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan;
- c. Brigade Infanteri (Brigif) 4/ Dewa Ratna di Kecamatan Slawi;

- d. Batalyon Infanteri (Yonif) 407/ Padma Kusuma di Kecamatan Adiwerna;
- e. Kompi A Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 4/ Tanpa Kawandya di Kecamatan Slawi; dan
- f. Satuan Radar (Satradar) di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja.

B. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tegal terdiri dari Hutan Lindung, Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan lindung geologi, Kawasan Lindung Lainnya.

1) Hutan Lindung.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan lindung dikelola oleh negara sangat penting dalam menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai flora dan fauna sepanjang Daerah Aliran Sungai termasuk peningkatan produktivitas lahan, terletak di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari seluas 2.961,41 ha.

2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya.

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 549 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 1.766 hektar;
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 319 hektar;
- Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 806 hektar
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 517 hektar.

3) Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. dengan luas kurang lebih 33.593 hektar tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten. Tujuannya adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Lokasi Sempadan Sungai Besar yaitu: Sungai Rambut, Sungai Cenang, Sungai Jimat, Sungai Cacaban, Sungai Gung, Sungai Kliwon, Sungai Gangsa, Sungai Pemali, Sungai-Sungai Besar lainnya.

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan luas kurang lebih 226 hektar. Tujuan melindungi pantai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem. Pada wilayah Kabupaten Tegal, kawasan yang dimaksud adalah kawasan sekitar Pantai Maribaya (Kecamatan Kramat), Desa Kedungkelor (Kecamatan Warureja), Desa Demangharjo, Suradadi, Purwahamba dan Bojongsana (Kecamatan Suradadi).

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air dengan luas kurang lebih 265 hektar. Tujuannya adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu, di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terletak di Waduk Cacaban. Tujuannya adalah melindungi waduk/danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Lokasi berada di sekitar kawasan Waduk Cacaban terutama terdapat di Kecamatan Kedungbanteng dan Jatinegara.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah luasan memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan yang mempunyai fungsi lindung atau konservasi adalah sesuai dengan RUTRK untuk masing-masing ibukota kecamatan yang bersangkutan. Dimana proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan di wilayah Daerah adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Pembagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 %. Distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah tersebar di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 5.714 (lima ribu tujuh ratus empat belas) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kawasan perkotaan

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suaka alam untuk melestarikan lingkungan dan melindungi keanekaragaman biota serta ekosistem. Gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pola umumnya. Kawasan suaka alam di Kabupaten Tegal terdiri dari:

- Cagar alam; Kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Lokasi berada di Kecamatan Bumijawa (Cagar Alam Guci) seluas ± 2 ha ; dan dan Kecamatan Jatinegara (Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara) seluas ± 6,6 ha.
- Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Lokasi Berupa Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk Kecamatan Kramat dengan luas ±10,635 ha.

- Pantai berhutan bakau, Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan. Tujuannya Memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan dengan tujuan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, pelindung pantai dari pengikisan air laut serta penunjang usaha budidaya lainnya. Selama itu juga dapat melindungi kawasan daratan disekitarnya dan bahaya rob dan pengikisan pantai. Pantai berhutan bakau berlokasi di Kecamatan Warureja.
- Cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berupa peninggalan bersejarah yang berguna bagi pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan.

5) Kawasan Lindung Lainnya.

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan lindung dilihat fisiografis seperti hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adalah kawasan yang sepenuhnya diperuntukan bagi konservasi hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan kesuburan tanah. dengan luas kurang lebih 1.389 hektar meliputi:

- Kecamatan Bumijawa dengan luas kurang lebih 852 hektar;
- Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 53 hektar;
- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 91 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 113 hektar;
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 229 hektar; dan
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 249 hektar.

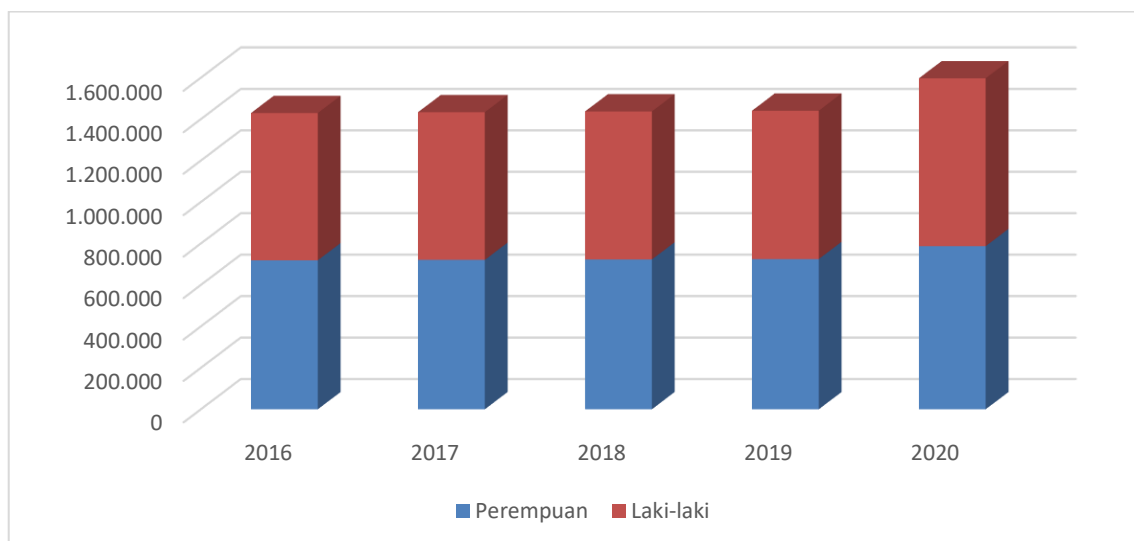
Pelestarian kawasan lindung di luar kawasan hutan berperan dalam memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir. Upaya pengelolaan kawasan sama dengan upaya pengelolaan kawasan hutan lindung. Tujuannya Memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir.

2.1.3. Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Gambar 2.8. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 adalah 1.596.996 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 809.884 jiwa dan perempuan 787.112 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 102,89 yang artinya terdapat **103** laki-laki untuk setiap **100** perempuan di Kabupaten Tegal pada 2020.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio

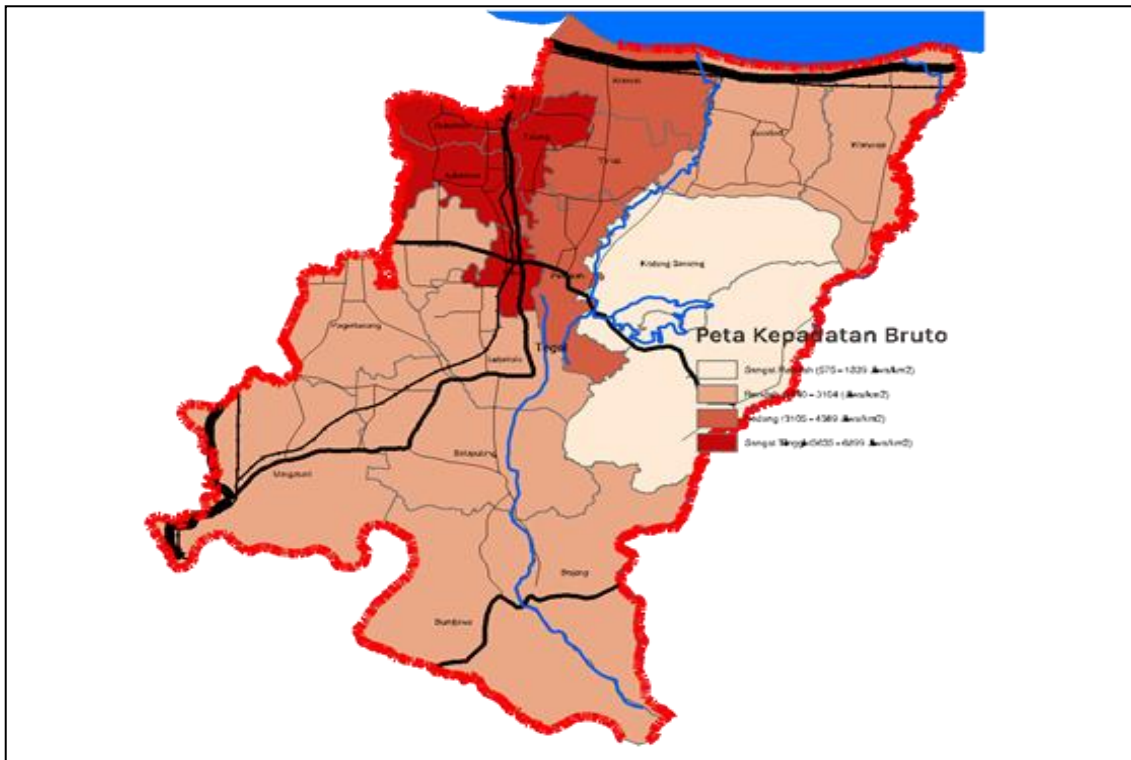
Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Margasari	55.147	54.261	109.408	101,6
Bumijawa	49.775	46.911	96.686	106,1
Bojong	37.277	36.116	73.393	103,2
Balapulang	46.750	45.940	92.690	101,8
Pagerbarang	31.269	30.901	62.170	101,2
Lebaksiu	46.750	47.075	93.825	99,3
Jatinegara	30.715	29.295	60.010	104,8
Kedungbanteng	22.714	22.082	44.796	102,9
Pangkah	57.995	56.211	114.166	103,1
Slawi	39.571	39.312	78.883	100,7
Dukuhwaru	34.527	33.822	68.349	102,1
Adiwerna	66.422	63.802	130.224	104,1
Dukuhturi	51.104	48.784	99.888	104,8
Talang	54.774	52.374	107.148	104,6
Tarub	43.477	42.455	85.932	102,4
Kramat	59.891	58.916	118.807	101,7
Suradadi	47.460	45.741	93.201	103,8
Warureja	34.306	33.114	67.420	103,6
Tahun 2020	809.884	787.112	1.596.996	102,9
Tahun 2019	715.887	724.811	1.440.698	98,77
Tahun 2018	714.305	722.920	1.437.225	98,81
Tahun 2017	712.511	721.004	1.433.515	99,00
Tahun 2016	710.513	718.873	1.429.386	98,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

B. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.570 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 462 jiwa/km² karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti infrastruktur tiap kecamatan.

Gambar 2. 9. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk



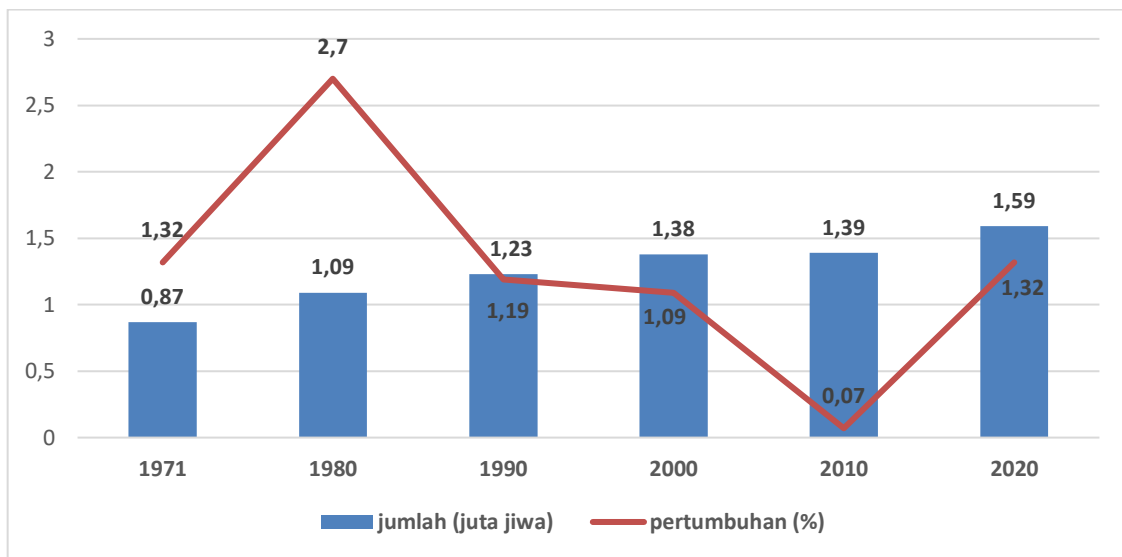
Sumber : *Selayang Pandang Kabupaten Tegal, 2021*

Dengan perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan tingkat pelayanan di setiap kecamatan. Oleh karena itu untuk kecamatan dengan kepadatan terendah perlu diperhatikan lagi agar tidak ada kesenjangan dalam pembangunan nantinya. Untuk melihat kepadatan penduduk secara riil terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/km²).

C. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat berupa peningkatan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk positif) atau juga penurunan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk negatif). Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tegal beberapa tahun yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memengaruhi berbagai potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Tegal baik berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 1971-2020.

Gambar 2. 10 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 1971-2020



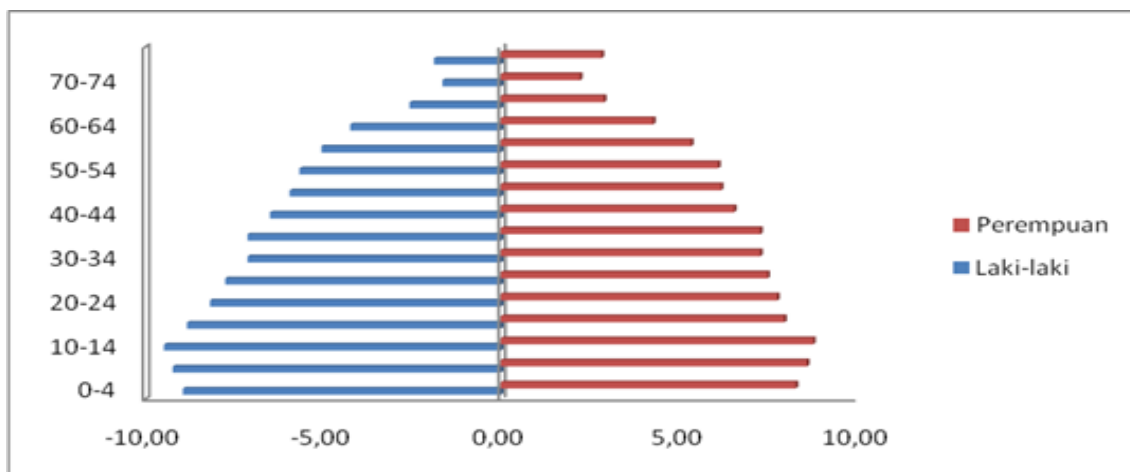
Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal cenderung linear dan meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Tegal selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal cenderung menurun, tetapi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal naik hingga 10,85% dari data tahun 2019.

D. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 adalah 1.596.996 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 809.884 jiwa dan perempuan 787.112 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 102,89 yang artinya terdapat **103** laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Tegal pada 2020. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2020 sebagai berikut.

Gambar 2.11 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tegal diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-59 tahun. Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami *bonus demografi*. Namun pada penduduk usia 10-29 mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut mengindikasikan bahwa adanya migrasi keluar Kabupaten Tegal. Jumlah kelahiran (fertilitas) di tahun tertentu akan berpengaruh pada demografi Kabupaten Tegal, sehingga penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal semakin banyak. Akan tetapi pertambahan usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang. Namun Angka kematian kasar di Kabupaten Tegal rata-rata dibawah angka 1 berarti kematian yang terjadi masih terbilang sedikit. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada piramida penduduk Kabupaten Tegal.

Piramida penduduk Kabupaten Tegal adalah bentuk piramida yang termasuk ke dalam piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Piramida ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bentuk piramida secara keseluruhan yang menyerupai kerucut;
- 2) Jumlah penduduk usia muda relatif banyak dan penduduk usia tua jauh lebih sedikit;
- 3) Menunjukkan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian (khususnya untuk penduduk berusia 0-4 tahun dan penduduk usia tua);
- 4) Piramida penduduk jenis ini umumnya merupakan piramida penduduk di daerah-daerah berkembang.

Piramida penduduk tersebut dengan jelas menggambarkan proporsi jumlah penduduk usia muda dan usia produktif di Kabupaten Tegal jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk ini juga memengaruhi angka rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten Tegal, dimana penduduk usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sangat sedikit, tetapi penduduk usia produktif harus menanggung penduduk usia muda yang cukup banyak.

E. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 980.258 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 616.738.

Darihal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 62,91 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 63 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Usia	2016	2017	2018	2019	2020
0 – 4	127.359	125.515	123.783	122.171	135.079
5 – 9	130.038	129.132	128.043	126.880	129.254
10 – 14	132.020	131.447	131.111	130.677	130.294
15 – 19	122.982	121.999	120.599	119.260	124.067
20 – 24	112.441	113.627	114.588	115.193	135.207
25 – 29	107.145	108.147	109.527	111.032	133.429
30 – 34	106.826	105.112	103.541	102.491	134.351
35 – 39	105.616	104.683	103.564	102.348	130.961
40 – 44	93.835	93.783	93.757	93.559	123.640
45 – 49	87.240	87.274	87.140	86.919	108.486
50 – 54	82.826	83.794	84.609	85.240	90.117
55 – 59	70.870	72.930	74.713	76.313	73.350
60 – 64	55.728	58.461	61.180	63.717	60.123
65 +	94.460	97.611	101.070	104.898	88.638
Jumlah	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.698	1.596.996

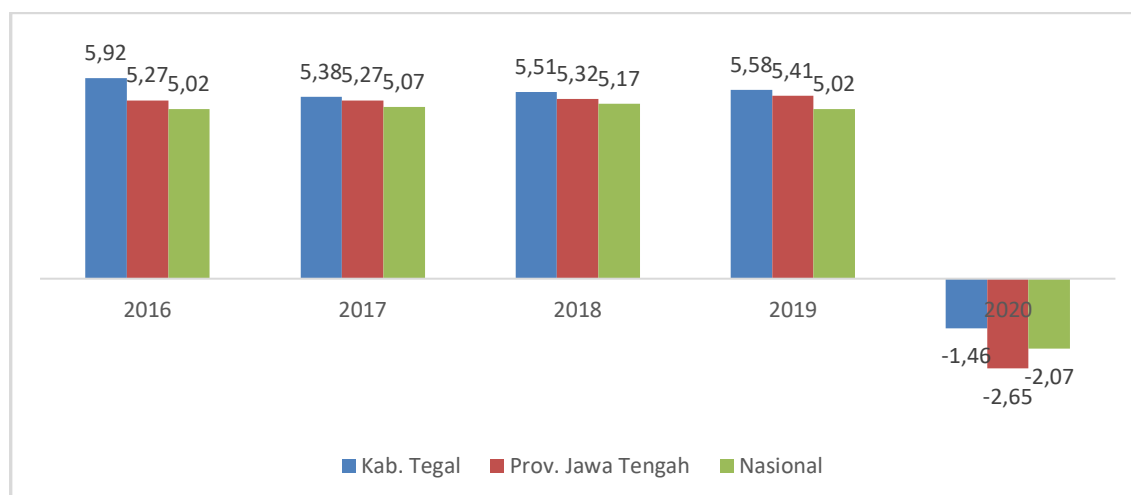
Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2021

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan secara rerata selalu di atas 5%, tetapi pada tahun 2020 mengalami kontraksi. menjadi -1,46. Pandemi *Covid-19* yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal.

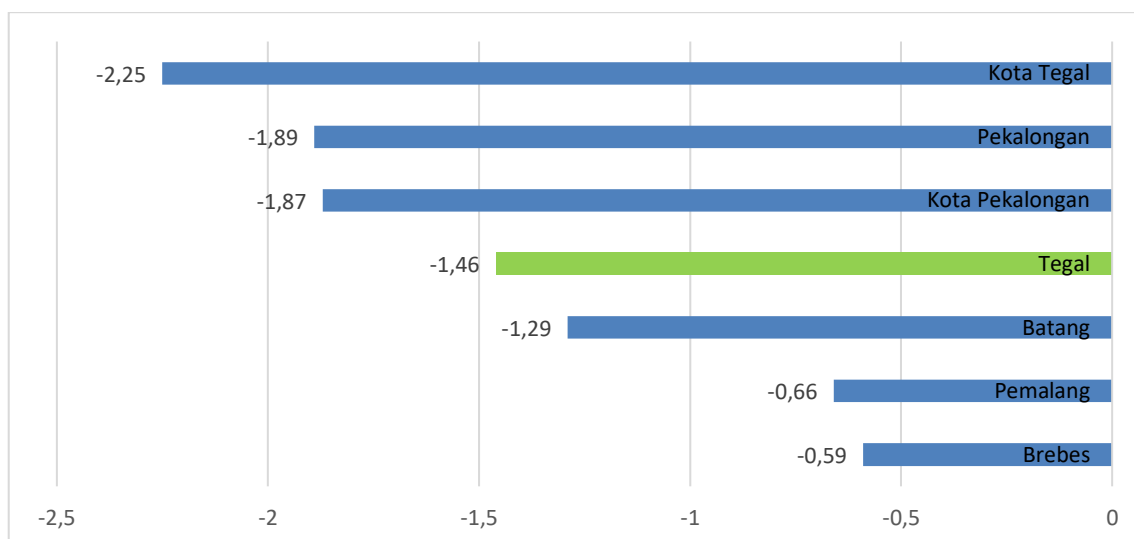
Gambar 2.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data Tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar -1,46% menduduki peringkat keenam dari 4 (empat) Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kota Tegal (-2,25%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (-0,59%).

Gambar 2. 13. Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Sepuluh kategori lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya tujuh kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -29,97 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -5,02 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -5,45 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 14,96 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran *online* serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,06	1,35	1,44	-0,69	2,18
B Pertambangan dan Penggalian	6,75	6,50	5,19	3,55	2,05
C Industri Pengolahan	7,27	6,95	6,66	6,44	-0,46
D Pengadaan Listrik dan Gas	1,65	5,65	4,78	5,74	0,77
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,35	4,09	4,30	5,74	2,40
F Konstruksi	5,35	7,22	5,85	3,40	-3,02
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,19	3,80	4,43	5,21	-4,20
H Transportasi dan Pergudangan	6,85	6,09	6,50	6,81	-29,97

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019	2020
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.10	6.33	6.74	7,13	-5,45
J	Informasi dan Komunikasi	7.60	7.50	9.51	8,68	14,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	6.86	5.09	4.24	10,70	2,32
L	Real Estat	7.83	4.50	4.07	3,90	-0,73
M	Jasa Perusahaan	8.43	6.50	6.14	4,99	-5,33
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.96	3.25	3.46	8,44	-0,91
O	Jasa Pendidikan	7.08	6.57	8.40	3,61	-0,42
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.93	6.10	8.78	6,02	3,02
Q	Jasa lainnya	4.37	5.43	7.70	6,74	-5,02
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		5,92	5,38	5,51	5,58	-1,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.2. PDRB

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2020 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.35.319,84 miliar dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2020 mencapai Rp.24.502,62 miliar. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya kluster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthon, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat dan teh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah

seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, di mana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun.

Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.097,19	14,62	4.191,18	13,79	4.435,64	13,29	4.495,44	12,76	4.675,15	13,24
B	Pertambangan dan Penggalian	1.253,01	4,47	1.365,81	4,50	1.451,67	4,54	1.521,87	4,32	1.561,87	4,42
C	Industri Pengolahan	9.604,95	34,27	10.504,77	34,91	11.241,13	35,35	12.189,63	34,60	12.454,64	35,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,34	0,06	19,38	0,06	21,02	0,06	22,36	0,06	22,24	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,24	0,37	10,79	0,36	11,32	0,03	11,78	0,03	12,25	0,03
F	Konstruksi	2.071,86	7,56	2.272,53	7,48	2.524,33	7,60	2.740,43	7,78	2.677,42	7,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.276,01	15,26	4.573,69	15,12	4.966,94	14,94	5.449,56	15,47	5.274,29	14,93
H	Transportasi dan Pergudangan	735,05	2,62	820,72	2,70	901,58	2,72	993,90	2,82	718,03	2,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.194,15	4,27	1.288,91	4,28	1.426,15	4,24	1.567,01	4,45	1.496,20	4,24
J	Informasi dan Komunikasi	708,87	2,53	811,45	2,60	935,79	2,61	1.046,92	2,97	1.204,87	3,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	643,37	2,30	700,35	2,29	752,38	2,27	793,39	2,25	817,74	2,32
L	Real Estat	452,38	1,61	485,88	1,60	530,85	1,62	562,97	1,60	560,24	1,59
M	Jasa Perusahaan	114,79	0,41	126,29	0,42	137,50	0,43	153,32	0,44	147,50	0,42
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	618,45	2,21	659,25	2,19	695,06	2,10	731,14	2,08	732,71	2,07
O	Jasa Pendidikan	1.424,10	5,08	1.565,27	5,18	1.736,45	5,34	1.888,35	5,36	1.915,90	5,42
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215,36	0,77	236,31	0,77	259,42	0,78	282,37	0,80	297,55	0,84
Q	Jasa lainnya	586,51	2,09	645,95	2,07	712,60	2,07	781,25	2,22	751,23	2,13
	Total	28.025,64	100	30.278,51	100	32.769,83	100	35.231,69	100	35.318,84	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016- 2020 atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

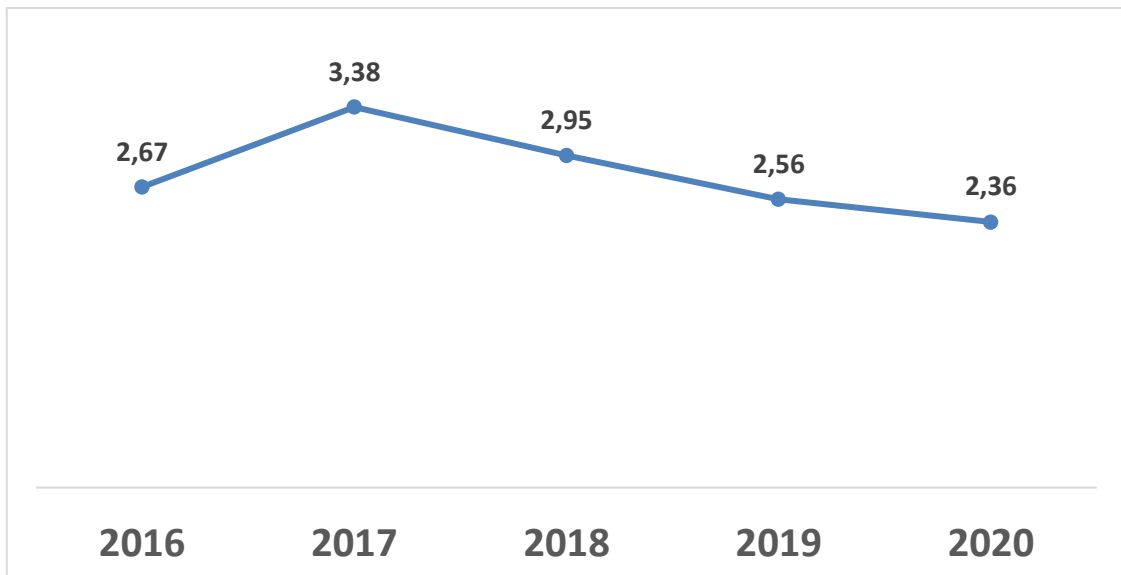
No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.919,35	13,78	2.958,75	13,25	3.032,39	12,87	3.011,43	12,11	3.077,10	12,56
B	Pertambangan dan Penggalian	848,47	4,01	903,63	4,05	950,49	4,04	1004,34	4,04	1.004,34	4,10
C	Industri Pengolahan	6.782,53	32,02	7.221,20	32,35	7.502,88	31,86	7.985,86	32,11	7.949,32	32,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,68	0,07	16,56	0,07	17,35	0,07	18,35	0,07	18,49	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,51	0,04	9,90	0,04	10,33	0,04	10,68	0,04	10,94	0,04
2	Konstruksi	1.648,47	7,78	1.767,54	7,92	1.882,51	7,99	1.980,60	7,96	1.920,79	7,84
F											
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.648,22	17,22	3.796,30	17,01	4.033,06	17,12	4.307,73	17,32	4.126,59	16,84
H	Transportasi dan Pergudangan	640,96	3,03	680,00	3,05	724,91	3,08	776,58	3,12	543,84	2,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	962,87	4,55	1.023,82	4,59	1.117,85	4,75	1.214,94	4,89	1.148,76	4,69
J	Informasi dan Komunikasi	745,34	3,52	821,24	3,68	947,42	4,02	1.048,77	4,22	1.205,67	4,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,38	2,23	491,85	2,20	509,33	2,16	529,18	2,13	541,46	2,21
L	Real Estat	393,99	1,86	411,72	1,84	438,50	1,86	460,39	1,85	457,04	1,87
M	Jasa Perusahaan	91,05	0,43	96,97	0,43	102,92	0,44	111,61	0,45	105,66	0,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450,07	2,12	459,70	2,06	475,79	2,02	492,99	1,98	488,49	1,99
O	Jasa Pendidikan	911,28	4,30	964,63	4,32	1.044,73	4,44	1.107,66	4,45	1.102,98	4,50
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166,75	0,79	180,42	0,81	195,46	0,83	208,64	0,84	214,95	0,88
Q	Jasa lainnya	477,00	2,25	517,89	2,32	566,63	2,41	617,14	2,48	586,18	2,38
	Total	21.182,92	100	22.322,10	100	23.552,55	100	24.866,73	100	24.502,62	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.3. Laju Inflasi

Selama tahun 2020 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mengikuti hasil penghitungan angka Inflasi sister city yaitu Kota Tegal sebagai salah Kota yang ikut dalam penghitungan Standar Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi Kota Tegal Tahun 2020 adalah sebesar 2,36 persen. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 5,56 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,93 persen. Berikutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,25 persen dan memberikan andil inflasi 0,73 persen. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; yang pada tahun 2018 memberikan andil inflasi terbesar, selama tahun kalender 2019 mengalami inflasi sebesar 0,86 persen dan memberikan andil inflasi yang cukup besar, yakni 0,26 persen. Kelompok yang lain, yakni kelompok sandang memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen; kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,14 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0,13 persen; dan terakhir kelompok kesehatan 0,12 persen.

Gambar 2.14. Perkembangan Inflasi



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal; BPS Kota Tegal, 2021

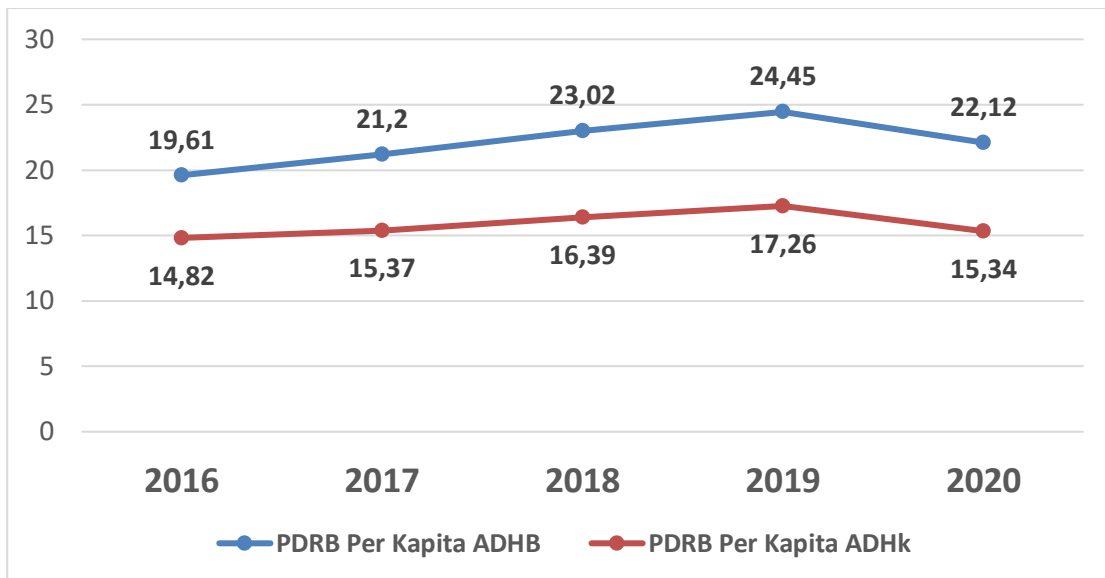
Kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Bumbu-Bumbuan yang mengalami inflasi sebesar 42,88 persen; sub kelompok Sayur-sayuran sebesar 13,21 persen; dan sub kelompok Buah-buahan sebesar 7,84 persen. Sedangkan sub kelompok lainnya mengalami inflasi dibawah 5 persen, bahkan sub kelompok daging dan hasil-hasilnya mengalami deflasi sebesar 0,18 persen; yang utamanya disebabkan penurunan harga daging ayam ras. Secara keseluruhan, sub kelompok yang mengalami penurunan indeks cukup besar yakni sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan dan Air; yang turun sebesar 0,34 persen; di mana hal tersebut utamanya dikarenakan penurunan harga bensin dan tarif listrik.

2.2.4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal, sehingga PDRB per kapita Tahun 2020 turun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,45 juta rupiah. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Perdagangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat.

Gambar 2. 15. PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2016-2020

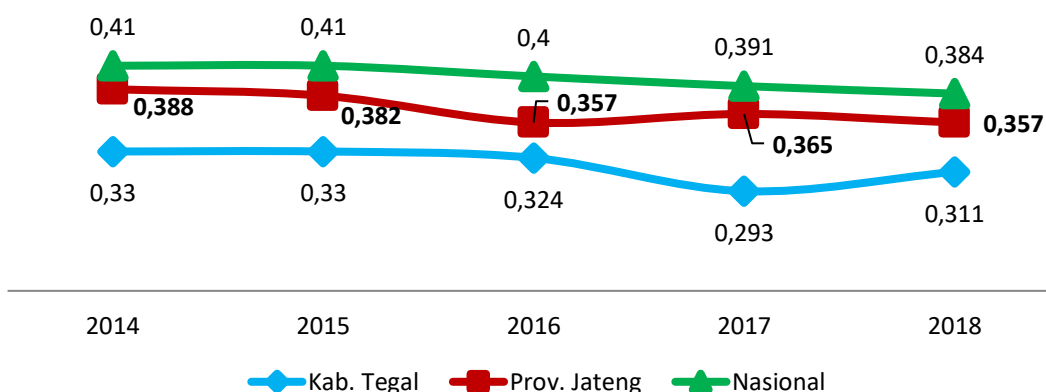


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.5. Indeks Gini

Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2018 sebagaimana tersaji dalam gambar grafik indeks gini.

Gambar 2. 16. Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional



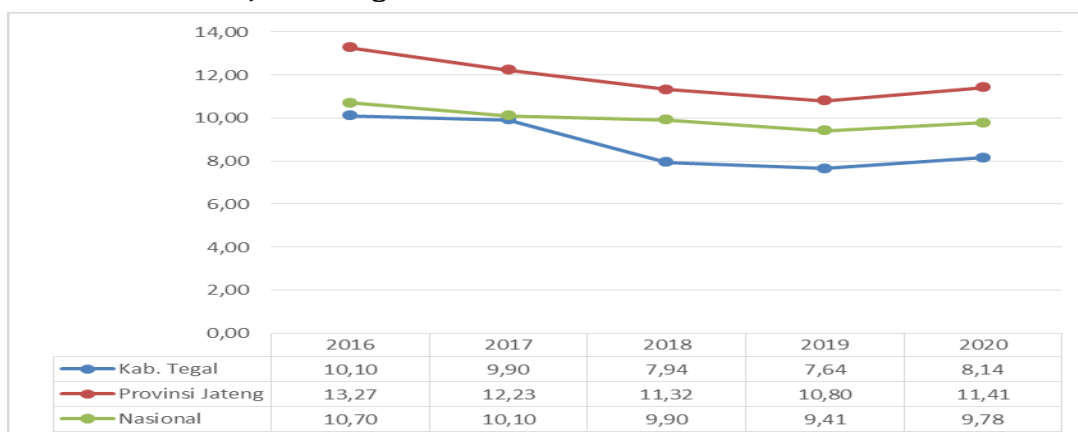
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila $G < 0,35$ ketimpangan taraf rendah; bila G antara $0,35 - 0,5$ ketimpangan taraf sedang; dan bila $G > 0,5$ ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal dibawah $0,35$ sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah, dan dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah maupun Gini Nasional maka Gini Kabupaten Tegal masih di bawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Namun ketimpangan rendah belum bisa menampilkan kondisi lebih baik, karena akan menjadi permasalahan berikutnya bila homogen kondisi sama-sama miskin atau kondisi sama-sama kaya belum bisa ditentukan.

2.2.6. Penduduk Miskin

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 117.500 jiwa (bertambah 7.560 jiwa) atau 8,21% dari total jumlah penduduk. Jumlah ini naik sebesar 0,57% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2019 mencapai 109.940 jiwa atau 7,64%. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016-2020 lebih rendah dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 17. Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2016-2020. Jumlah penduduk yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk hasil proyeksi yang dirilis BPS, bukan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 11 Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin	144.220	141.800	114.060	109.940	117.500
2.	Jumlah Penduduk	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.671	1.435.147
3.	Persentase (%)	10,10	9,90	7,94	7,64	8,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

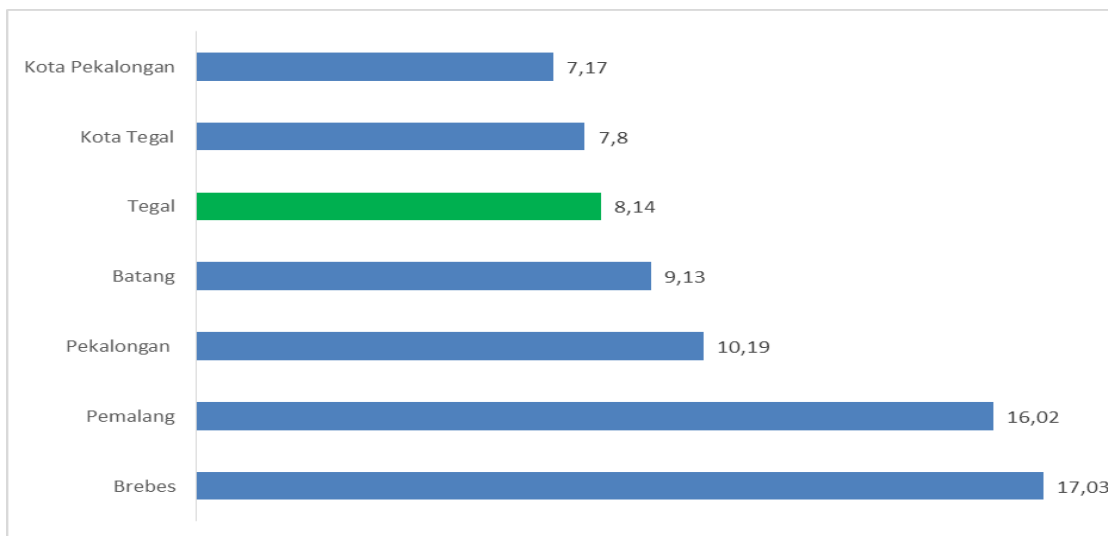
Namun demikian, pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Tegal meningkat dari sebelumnya 7,64% pada tahun 2019 menjadi 8,14% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan kondisi pandemi covid-19 yang mulai dirasakan dampaknya sejak awal tahun 2020 oleh masyarakat Indonesia. Data kemiskinan per Maret 2020 (dirilis November 2020) telah menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan di semua level. Meskipun Pandemi covid-19 di Indonesia bermula sejak Maret 2020, namun kontraksi komoditas makanan dan non makanan sudah terjadi dalam bentuk:

- a. Kontraksi permintaan-penawaran, produksi lemah, ekspor-impor terhambat;
- b. *panic buying*,
- c. menahan *spending* (pengeluaran);
- d. mengatur *saving* (tabungan/investasi);
- e. pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penanganan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kabupaten/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks Karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 19. Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan

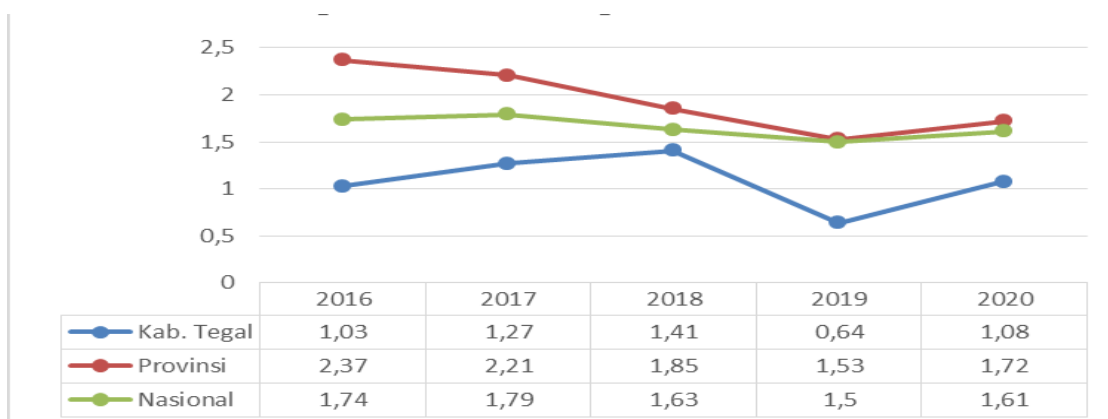


Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 8,14% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (7,17%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (17,03%).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2016 – 2020 angkanya cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 adalah 1,27, tahun 2018 naik menjadi 1,41 selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 0,64 namun meningkat lagi menjadi 1,08 pada tahun 2020. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

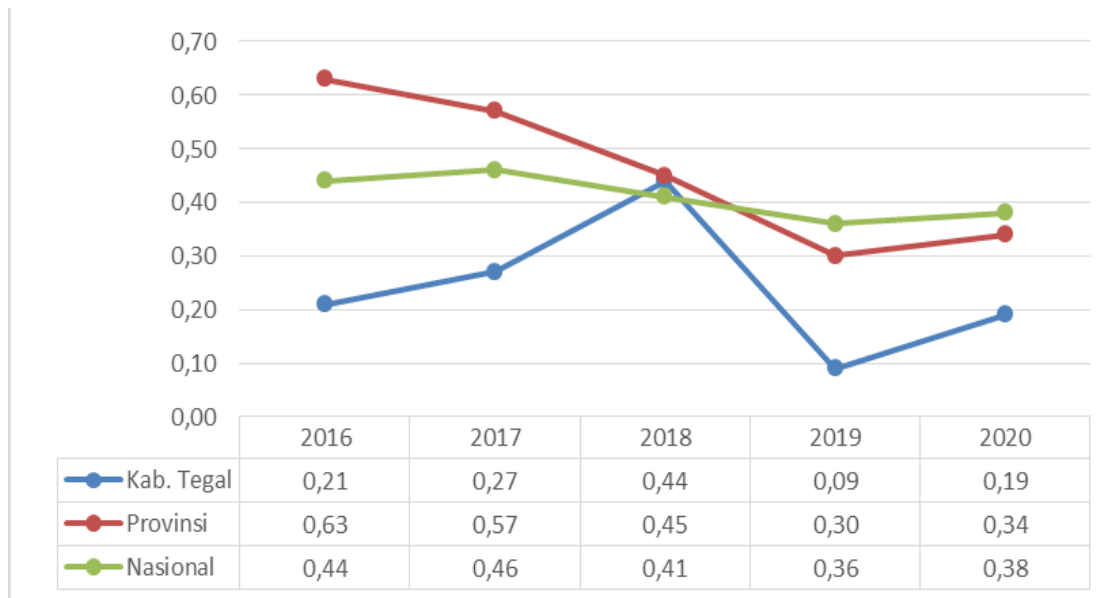
Gambar 2. 20. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2016). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 2. 21. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020

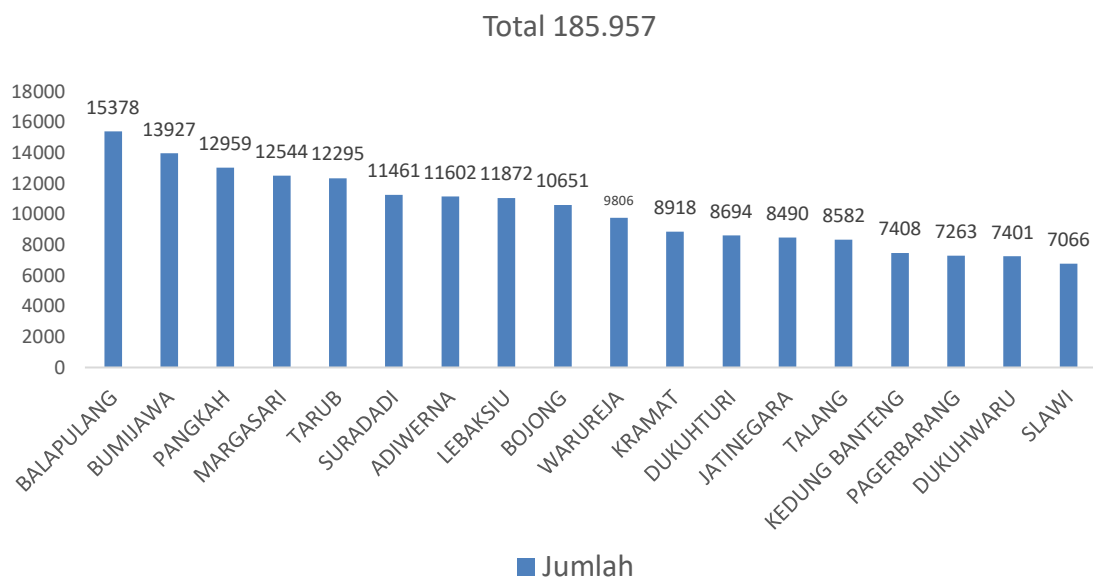


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaen Tegal dari tahun 2016 – 2020 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung naik. Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin tinggi. Penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin homogen kasus/karakter/keadaannya. Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin heterogen kasus/karakter/keadaannya. Dari hasil Basis Data Terpadu Tahun 2019 dapat diketahui jumlah 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah, yaitu Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 184.070 Rumah tangga. Untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 15.396 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 6.756 Rumah Tangga. Sebaran data untuk 18 (delapan belas) Kecamatan dapat dicermati pada gambar berikut ini.

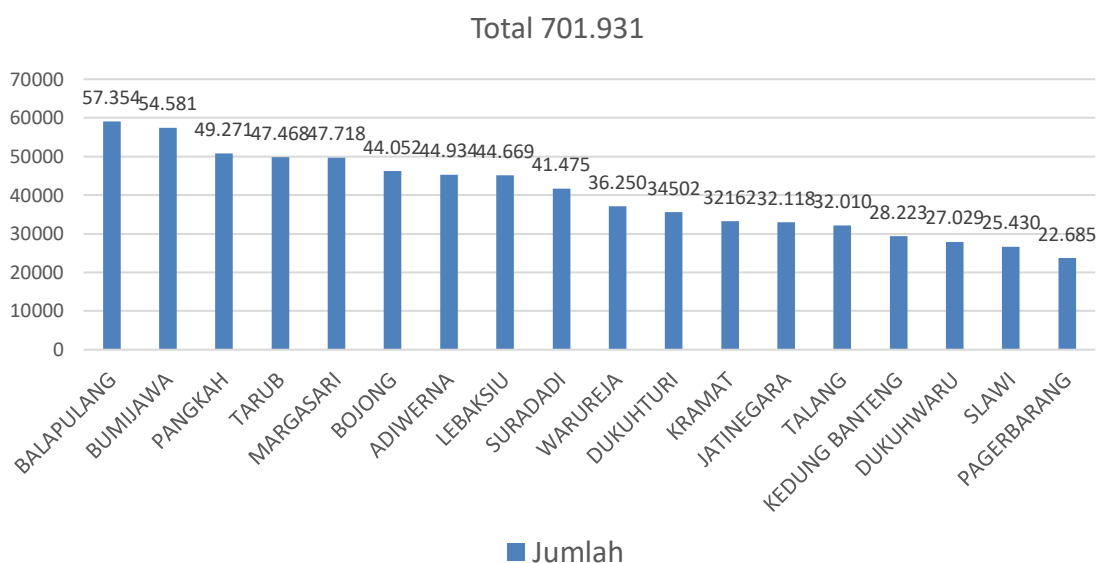
Gambar 2. 22. Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan



Sumber: DTKS, 2021

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil Penetapan Bulan Oktober 2020 Rekap DTKS SK No.146/HUK/2020 adalah sejumlah 701.931 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebesar 57.354 individu yang kedua yaitu Kecamatan Bumijawa sebanyak 54.581 individu dan urutan yang ke tiga adalah Kecamatan Pangkah sebanyak 49.271 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah Kecamatan Pagerbarang yaitu sejumlah 22.685 individu. Sebaran data jumlah individu miskin di seluruh kecamatan berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 23. Jumlah individu Miskin per Kecamatan



Sumber: DTKS, 2021

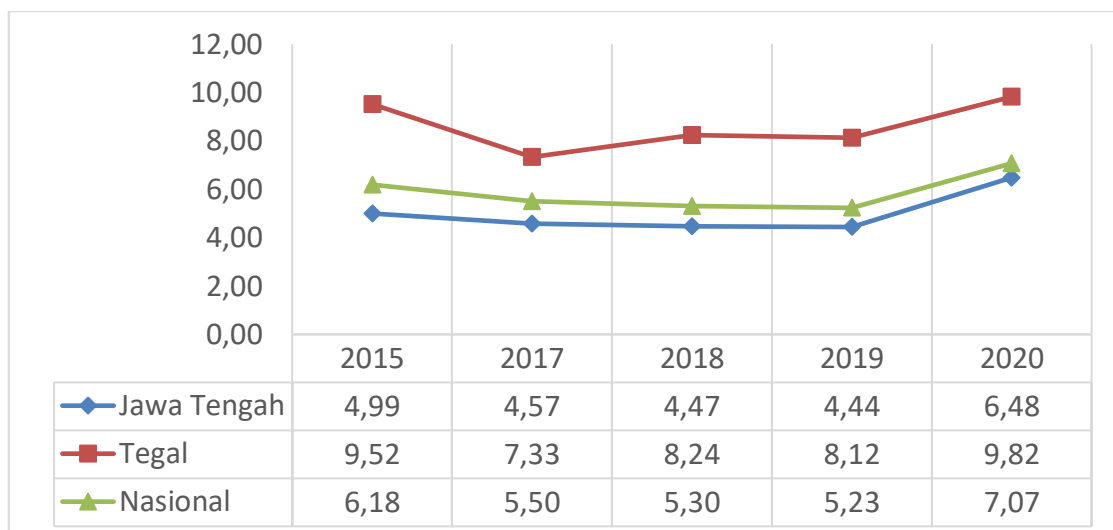
Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 57.742 orang atau 8,12%. Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 70.246 orang atau 9,82%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat pada Triwulan pertama tahun 2020. Peningkatan terjadi pada karakteristik: pengangguran karena covid-19, Bukan Angkatan Kerja karena covid-19, Sementara tidak bekerja karena covid-19, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19. Jenis lapangan usaha yang paling terdampak covid-19 diantaranya industri pengolahan, konstruksi dan administrasi pemerintahan. Sementara jenis lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; serta perdagangan besar dan eceran. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 2. 24. TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020



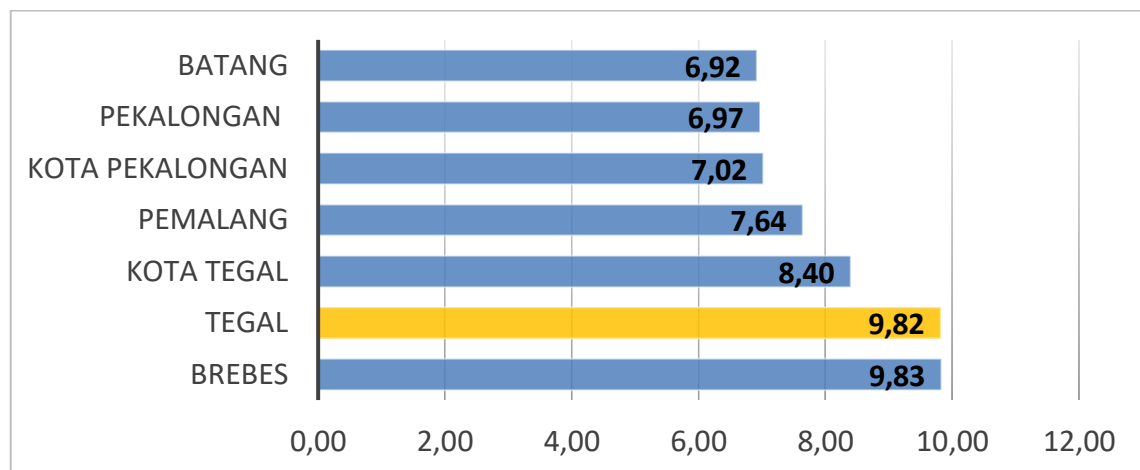
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Angka pengangguran pada tahun 2016 dan 2015 menunjukkan angka yang tetap, yaitu 9,52%. Hal ini disebabkan oleh kondisi makro ekonomi tahun 2016 dan 2015 di Kabupaten Tegal relatif tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Angka TPT di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 8,12% bahkan meningkat menjadi 9,82% tahun 2020. Di luar kondisi *Covid-19*, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tegal terjadi karena karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal relatif berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan. Data kinerja TPT Tahun 2020 disandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 25. TPT Kabupaten /Kota se Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 9,82% merupakan TPT yang cukup tinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Batang (6,92%). Jika dibandingkan dengan data kinerja TPT di seluruh Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah eks Karesidenan Pekalongan secara umum termasuk kategori tinggi TPT nya, hanya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang relatif rendah. Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator

penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

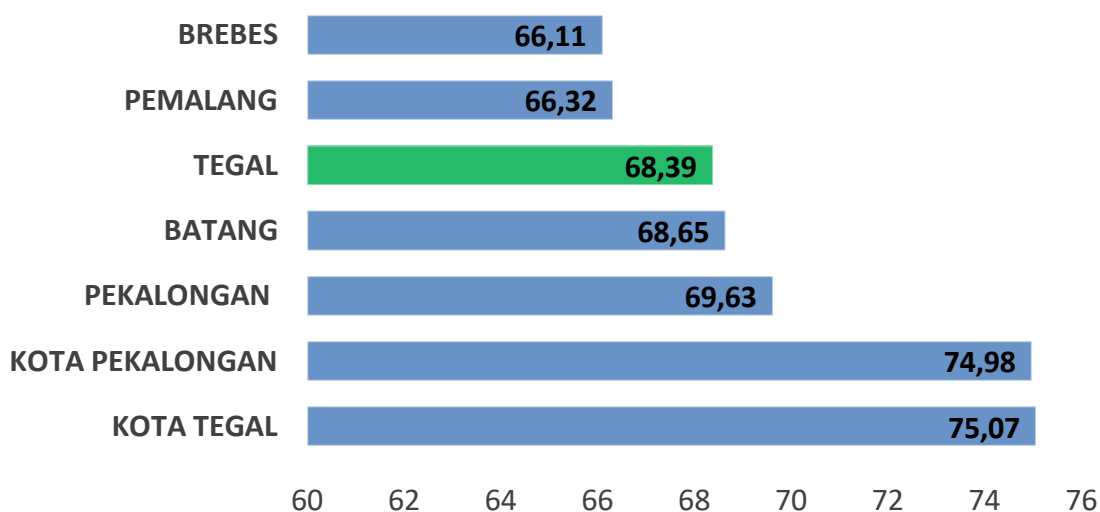
Tabel 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IPM :	65,84	66,44	67,33	68,24	68,39
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,02	71,14	71,28	71,40	71,60
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,01	12,06	12,34	12,58	12,67
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,54	6,55	6,70	6,86	6,98
Pengeluaran (Ribuan Rupiah/orang/tahun)	8.709	9.136	9.433	9.798	9.612

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Tegal sebesar 68,39 % menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (66,11) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (75,07).

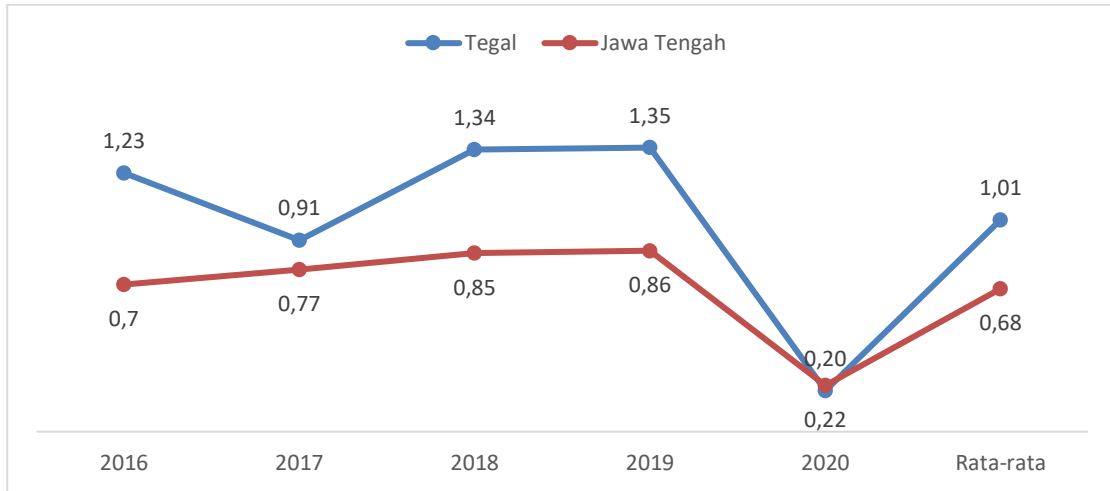
Gambar 2. 26. IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Gambar 2. 27. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah

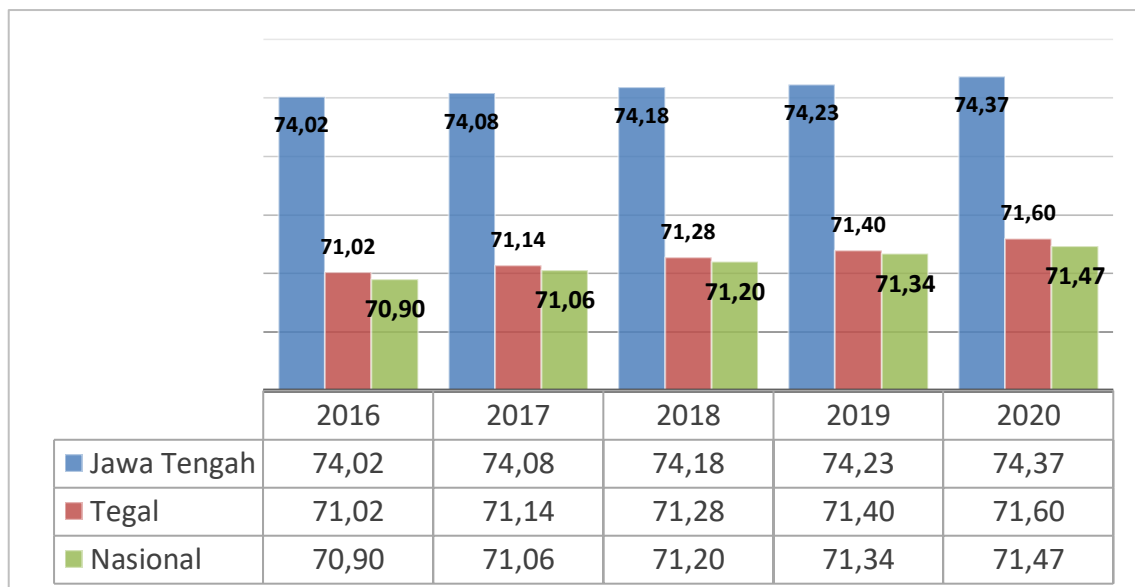


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.9. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2020 angkanya menunjukkan 71,60 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,40 tahun pada tahun 2019 atau 71,28 tahun pada tahun 2018. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi AHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban *dependensi rasio* bagi penduduk usia.

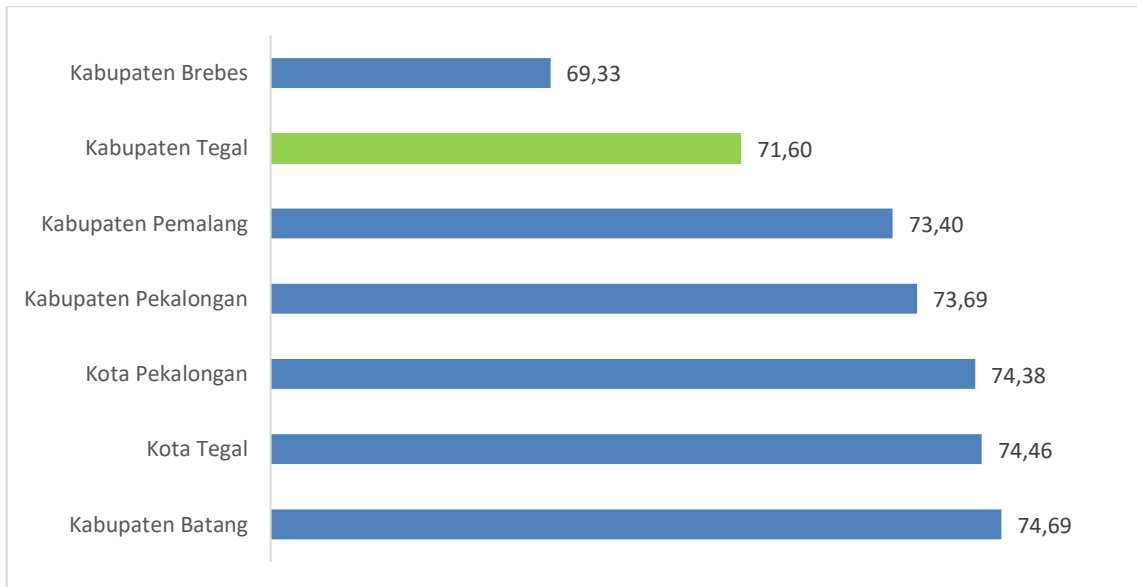
Gambar 2. 28. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, AHH Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 71,60 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Angka Harapan Hidup (AHH) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (69,33 tahun) sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,69 tahun).

Gambar 2. 29. Perbandingan Angka Harapan Hidup di eks Karisidenan Pekalongan

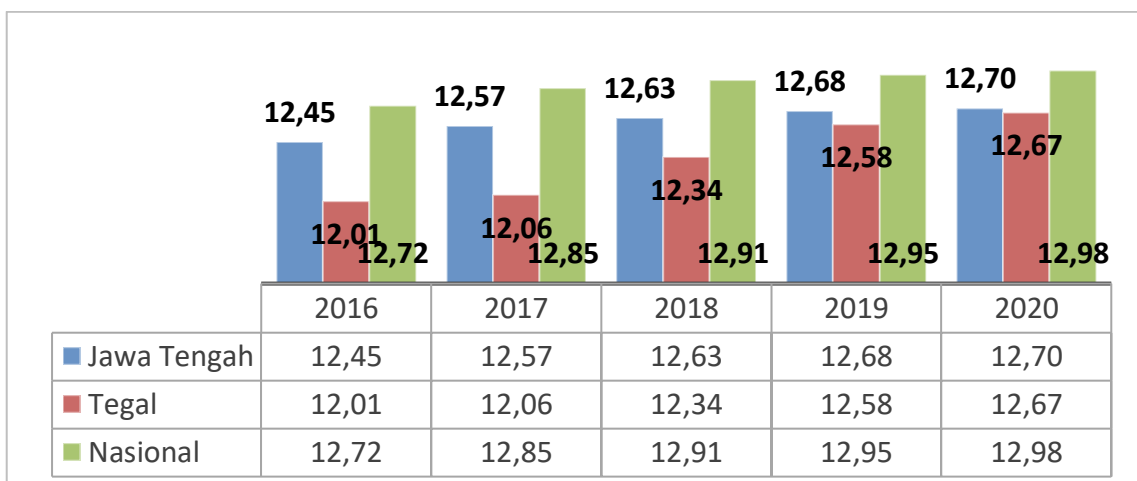


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.10. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2018 angkanya 12,34 tahun, tahun 2019 telah menjadi 12,58 tahun dan tahun 2020 sebesar 12,67 tahun.

Gambar 2. 30. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 - 2020

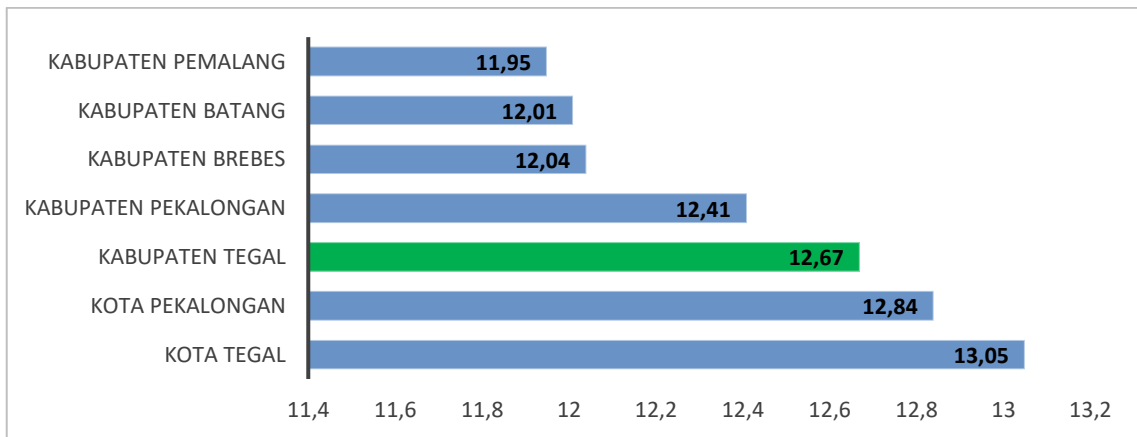


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 12,67 tahun menduduki peringkat ketiga tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,95 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,05 tahun).

Gambar 2. 31. Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan

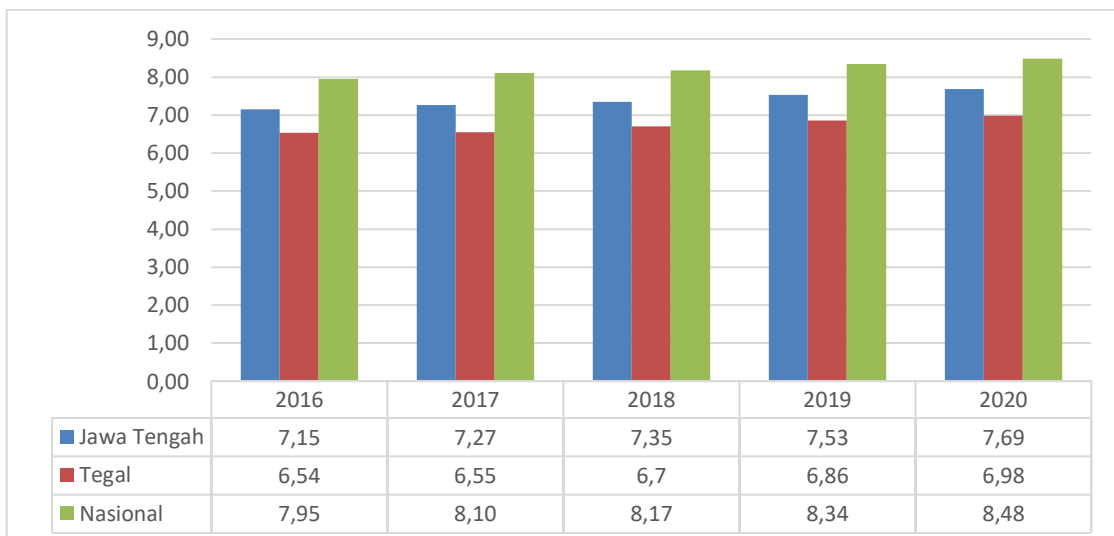


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

2.2.11. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2018 menunjukkan angka 6,70 tahun, meningkat menjadi 6,86 tahun pada tahun 2019. tahun 2020 angkanya menjadi 6,98 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:

Gambar 2. 32. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016 -2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

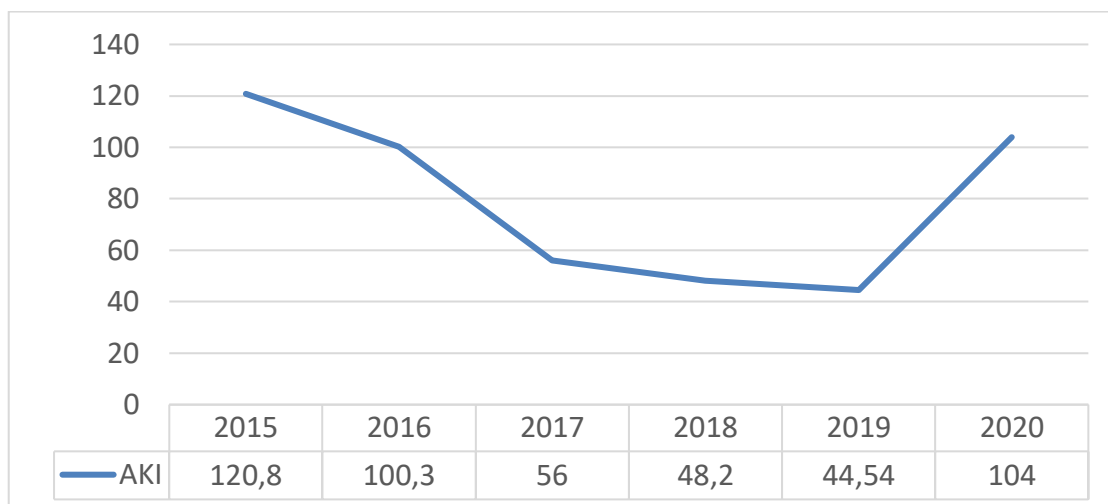
Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

2.2.12. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu dari setiap 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan angka kematian ibu disebabkan oleh keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan, utamanya pelayanan kepada ibu hamil dan persalinan ibu.

Gambar 2. 33. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2015 -2020



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Upaya yang sudah dilakukan menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan PONED, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), data ibu hamil terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan ibu dan anak (SIKIA), puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian Makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, pemberian TTD (Tablet Tambah Darah),

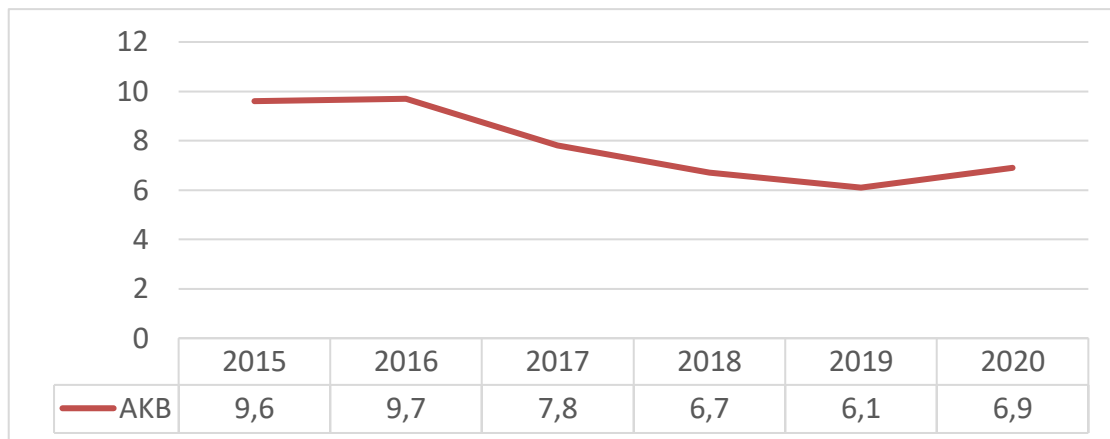
Pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, Pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil, kerja sama lintas sektor tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (tomas), sekolah, Perangkat Daerah lain), pelaksanaan program Gubernur Jawa Tengah 5NG (Jateng *Gayeng Nginceng Wong Meteng*).

2.2.13. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan.

Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Tegal dari tahun 2015 sampai dengan 2020 fluktuatif namun cenderung **menurun** setiap tahunnya. Angka kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 ke tahun 2016 angka kematian bayi **meningkat**, namun pada tahun 2017 dan tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2020 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tegal mengalami peningkatan pada angka 6,9. Dengan kondisi yang relatif berfluktuatif, meskipun cenderung mengalami penurunan, tentu hal ini menjadi keprihatinan dan perlu upaya keras untuk terus menurunkan kembali angka kematian bayi di Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 34. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2015 -2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

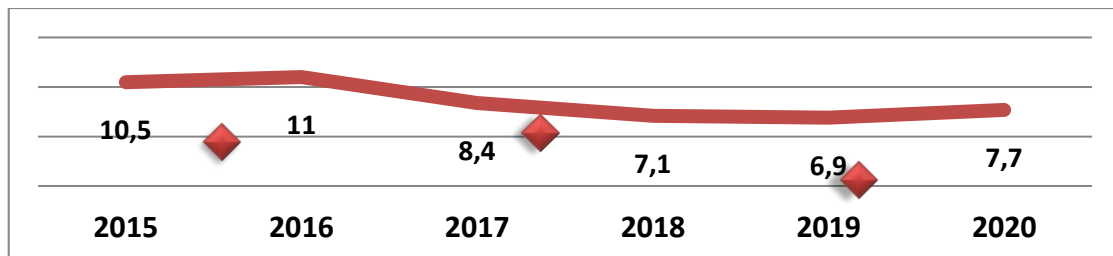
Upaya yang sudah dilakukan yaitu mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK, puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), mengadakan rumah tunggu kelahiran, Konseling IMD dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, konseling ASI Eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, Pengadaan alkes ,obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, kerja sama lintas sektor (toga, toma, sekolah, OPD lain), Pelatihan Kader Motivator ASI.

Dengan upaya yang dilakukan mulai dari *screening* oleh bidan dokter dan dokter spesialis serta pemantauan ibu hamil risti melalui program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di mana semua ibu hamil risiko tinggi (risti) dipantau. Selain itu dengan klarifikasi dan Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian menjadi pembelajaran dlm penanganan ibu hamil risti.

2.2.14. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKB dan Akaba tahun 2015-2016 naik disebabkan karena Kasus BBLR dan asfiksia di Kabupaten Tegal masih cukup banyak. BBLR dan asfiksia menjadi penyumbang kematian terbanyak. Hal ini disebabkan karena riwayat kehamilan ibu yang mengidap Kurang energi Kronis (KEK) atau proses persalinan tidak normal. Perlu intervensi terhadap ibu hamil KEK dengan pemberian PMT ibu hamil, untuk petugas perlu update skill penanganan BBLR dan asfiksia. AKABA menggambarkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 KH. Angka kematian balita di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2015 sampai 2020 menunjukkan tren fluktuatif.

Gambar 2. 35. Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2015 -2020



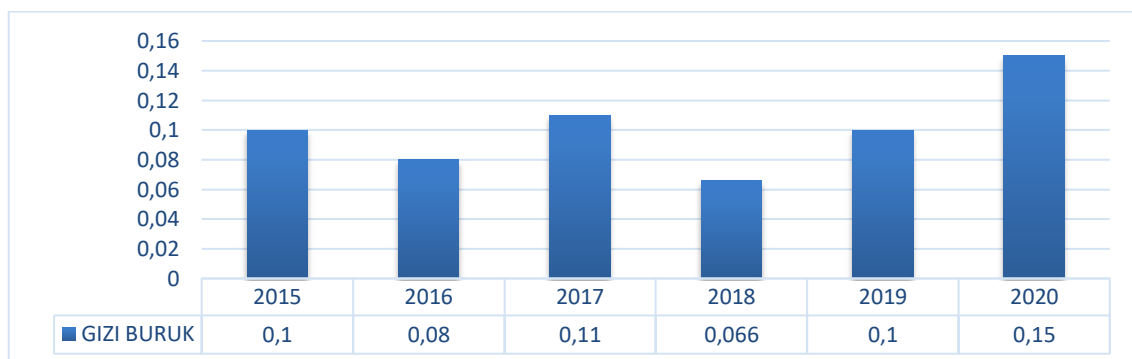
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Data menunjukkan angka kematian balita usia 5 tahun per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

2.2.15. Gizi Buruk dan Stunting

Balita yang mengalami gizi buruk sejak Tahun 2015 hingga tahun 2020 bersifat fluktuatif. Cakupan balita gizi buruk menurun dari tahun 2015 ke tahun 2016. Kemudian naik pada tahun 2017, turun lagi pada tahun 2018, dan naik lagi pada tahun 2019 dan 2020 . Untuk lebih jelasnya dapat dicermati gambar berikut.

Gambar 2. 36. Kasus Gizi Buruk Kabupaten Tegal Tahun 2015 -2020



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, sebagian besar karena faktor kemiskinan, sedangkan penyebab lainnya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena pengetahuan orang tua tentang pemberian makanan pada bayi dan balita dengan menu gizi seimbang yang masih kurang. Kemudian kurangnya pengawasan orang tua dalam hal pola asuh/tumbuh kembang balita, karena mempercayakan pengasuhan anak pada asisten rumah tangga atau orang terdekat lain. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kurang gizi pada balita.

Cakupan balita stunting di kabupaten tegal dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh mobilitas sasaran (balita) yang cukup tinggi, belum memadainya alat antropometri di posyandu, belum semua kader terampil melakukan pengukuran antropometri dengan benar, dan belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanggulangan balita stunting.

Tabel 2. 13 Kasus Stunting Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	6.98	7.63	5.39	5.9	9.74	8,9

Sumber: Hasil operasi timbang tahun 2015 – 2018, ePPGBM tahun 2019 - 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Dari data hasil Operasi Timbang pada tahun 2016, angka stunting mengalami kenaikan dibanding angka tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh penanganan stunting yang belum menjadi isu strategis nasional berpengaruh terhadap pelaporan dan penanganan kejadian stunting di masyarakat. Pada tahun 2017 kasus stunting sudah mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 grafik kasus stunting meningkat lagi disebabkan antara lain karena mobilitas sasaran (Balita) cukup tinggi, belum memadainya alat antropometri di posyandu, belum semua kader terampil dalam melakukan pengukuran antropometri dengan benar dan belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.

Mulai tahun 2019, hasil Operasi Timbang dientry ke aplikasi *e-PPGBM* (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dimana angka stuntingnya mengalami peningkatan. Peningkatan angka stunting lebih disebabkan karena proses identifikasi/ penemuan kasus stunting dan masalah gizi lain yang semakin baik, sehingga rencana intervensi lebih tepat sasaran.

2.2.16. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2016 - 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender	86,76	86,76	86,95	86,74	86,79

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Selama tahun 2020 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 86,79 naik 0,05 poin dibanding IPG tahun 2019. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

2.2.17. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan fluktuasi kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Angka tahun 2020 sampai saat ini belum dirilis dan akan dirilis paling cepat bulan Juli tahun 2021.

Tabel 2. 15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2016 - 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pemberdayaan Gender	Tidak rilis data	51,15	68,90	69,25	Belum rilis data

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Data yang dirilis BPS dari tahun 2017-2019. Data tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Data tahun 2020 belum dirilis dan akan dirilis bulan juli tahun 2021.

2.2.18. Pemuda dan Olahraga

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Selanjutnya banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Jumlah Organisasi Pemuda sejak Tahun 2016 – 2020 sebanyak 33 organisasi, sementara jumlah Gelanggang / Balai Remaja sebanyak 273 buah.

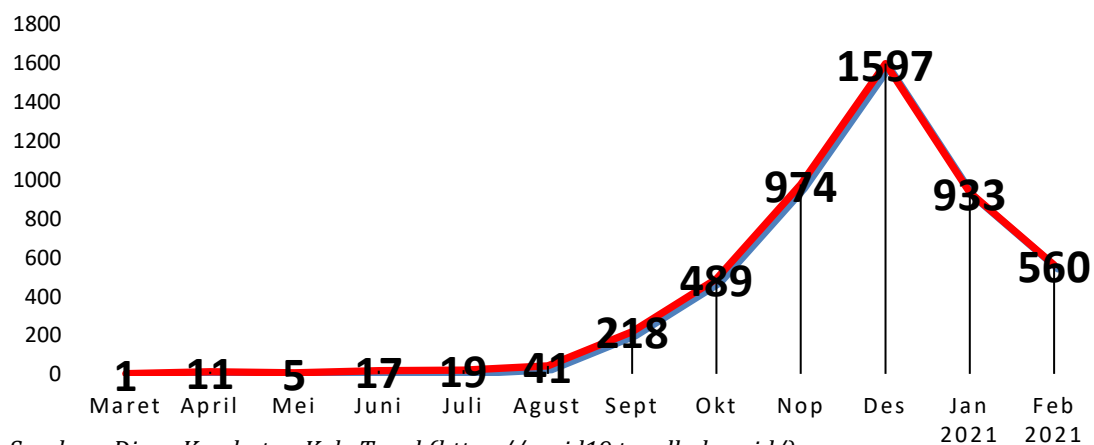
Salah satu upaya pemberdayaan pemuda melalui penumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis. penumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis dilakukan sejak tahun 2019 dengan skema kompetisi. Pada tahun 2019 jumlah pendaftar wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis sebanyak 401 orang dan tahun 2020 sebanyak 398 orang. Dari jumlah itu diseleksi sebanyak 100 orang untuk mendapatkan fasilitasi pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana bisnis. Dari 100 orang yang menyusun rencana bisnis dipilih 50 orang untuk melakukan presentasi rencana bisnis. Dari 50 orang yang melakukan presentasi rencana bisnis ditetapkan 28 orang mendapatkan insentif masing-masing Rp.15 juta untuk pengembangan usaha.

2.2.16. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 di Indonesia dimulai ketika awal maret 2020. Tepatnya pada 2 Maret 2020, pemerintah melaporkan 2 orang yang terkonfirmasi covid-19. Pemerintah menetapkan covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian disusul Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa wabah covid-19 sebagai bencana nasional.

Kabupaten Tegal juga tidak lepas dari pandemik covid-19. Sampai bulan Februari tahun 2021 tercatat sebanyak 4.865 orang terkonfirmasi covid-19. Situasi covid-19 terkini di Kabupaten Tegal selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 37 Trend Bulanan Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Tegal Bulan Maret 2020 – Februari 2021



Dengan melihat trend kasus covid-19 diatas, maka Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Percepatan Penanganan covid-19 di Kabupaten Tegal yaitu dengan upaya penyembuhan pasien covid-19 dengan tetap melakukan tindakan preventif. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini telah melakukan langkah *preventif* yang terukur, jelas dan objektif seperti penerapan PHBS (Perilaku hidup bersih dan sehat) dengan selalu cuci tangan dan penyediaan tempat cuci tangan / *hand sanitizer*, kewajiban penggunaan masker, penyemprotan desinfektan, tetap di rumah dan larangan bepergian, *social distancing*, *physical distancing* dll.

Secara umum pencegahan penularan *covid-19* adalah *physical and social distancing* (pembatasan fisik dan sosial). Dampak ikutan dari kebijakan *physical and social distancing* adalah berkurangnya aktivitas masyarakat. Pengurangan aktivitas masyarakat ini berkorelasi dengan perlambatan ekonomi yang sedang terjadi. Akibatnya masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar (subsisten/pangan). Masyarakat rentan miskin juga dihadapkan pada situasi berkurang atau hilangnya pendapatan sehingga daya beli menurun. Sehubungan dengan hal tersebut dibuthkan kebijakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) kepada warga miskin dan warga rentan miskin berupa bantuan pangan.

Dalam situasi covid-19 ini, jumlah penduduk yang terdampak yang kemudian miskin atau rentan miskin dimungkinkan bertambah. Kelompok ini tergabung sebagai kelompok penduduk di luar DTKS atau penduduk miskin terdaftar DTKS yang belum mendapat fasilitasi program.

Dalam hal perekonomian masyarakat di Kabupaten Tegal, berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal, dari skala besar hingga kecil melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Banyak pelaku usaha mengalami gangguan rantai pasok baik di level domestik maupun internasional (ekspor/impor), serta penurunan drastis permintaan akan barang-barang non-esensial (*durable*), yang selanjutnya bisa mengganggu neraca keuangan perusahaan bahkan bisa berujung kebangkrutan. Hal tersebut memaksa banyak perusahaan merumahkan bahkan mem-PHK karyawannya. Pada sektor (perdagangan) informal, pelaku usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi mengalami dampak yang cukup berat dari berkurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrem kehilangan mata pencaharian. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek online, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang sebagian besar beroperasi di Kecamatan Slawi dan Adiwerna dengan jumlah tidak kurang dari 2.765 orang dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%. Bahkan ada risiko kenaikan harga kebutuhan pokok karena distribusinya terganggu. Selain itu sektor-sektor di Kabupaten Tegal yang juga diperkirakan terpuakul dengan kondisi ini diantaranya industri pariwisata (perhotelan, agen perjalanan, bisnis hiburan, dan usaha kuliner), industri manufaktur khususnya yang padat karya dan bergantung pada ekspor-impor, dan sektor konstruksi.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu: fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1) Akreditasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Di era berkembang sekarang ini pendidikan sangat memiliki peran sangat penting terhadap perkembangan seseorang, pendidikan di arahkan dengan berbagai segala macam kemudahan untuk mengasah pengetahuan setiap peserta didik, artinya bahwa peningkatan mutu pendidikan itu sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, sebagai bagian dari tujuan pendidikan itu sendiri mengedepankan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang diharapkan mengacu pada hasil kelulusan dari setiap peserta didik, untuk mendapatkan hasil lulusan yang baik, diperlukan berbagai macam terobosan baru untuk mengantar peserta didik lebih unggul dalam berbagai pengetahuan. Artinya kemajuan peserta didik harus diwujudkan dengan proses pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, profesional, unggul, berpandangan jauh kedepan (visioner) memiliki percaya dan harga diri yang tinggi. Mutu pendidikan merupakan hasil dari penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 standar. Kedelapan standar tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Untuk melihat penerapan SNP masing-masing satuan pendidikan, maka perlu dilakukan akreditasi masing-masing satuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional baik BAN S/M maupun BAN PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Tabel 2.16 Peringkat Akreditasi Jenjang Pendidikan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase Ter Akreditasi	Persentase Akreditasi
			Negeri	Swasta			
2016	PAUD	A	1	1	2	2,95	54,09
		B	1	14	15		
		C		6	6		
		TT		757	757		
	SD	A	229	8	237	98,47	
		B	435	6	441		
		C	26	3	29		
		TT	4	7	11		
	SMP	A	38	10	48	94,12	
		B	6	23	29		
		C	2	17	19		
		TT	1	5	6		

Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase Ter Akreditasi	Persentase Akreditasi
			Negeri	Swasta			
	KESETARAAN	A	1		1	20,83	
		B		3	3		
		C		1	1		
		TT		19	19		
2017	PAUD	A	1	1	2	3,77	57,52
		B	1	17	18		
		C		10	10		
		TT		765	765		
	SD	A	215	9	224	98,14	
		B	430	6	436		
		C	24	3	27		
		TT	6	7	13		
	SMP	A	38	9	47	90,65	
		B	6	22	28		
		C	3	19	22		
		TT	1	9	10		
	KESETARAAN	A	1		1	37,50	
		B		6	6		
		C		2	2		
		TT		15	15		
2018	PAUD	A	1	2	3	7,79	62,01
		B	1	45	46		
		C		13	13		
		TT		734	734		
	SD	A	218	9	227	98,57	
		B	433	6	439		
		C	21	3	24		
		TT	3	7	10		
	SMP	A	38	9	47	91,67	
		B	6	22	28		
		C	3	21	24		
		TT	2	7	9		
	KESETARAAN	A	1	2	3	50,00	
		B		8	8		
		C		1	1		
		TT		12	12		
2019	PAUD	A	2	6	8	10,84	66,66
		B		59	59		
		C		21	21		
		TT		724	724		
	SD	A	219	9	228	98,72	
		B	442	6	448		
		C	13	3	16		
		TT	1	8	9		

Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase Ter Akreditasi	Persentase Akreditasi
			Negeri	Swasta			
	SMP	A	38	9	47	94,59	
		B	6	26	32		
		C	3	23	26		
		TT	2	4	6		
	KESETARAAN	A	1	3	4	62,50	
		B		10	10		
		C		1	1		
		TT		9	9		
2020	PAUD	A	2	6	8	10,73	73,30
		B		59	59		
		C		21	21		
		TT		732	732		
	SD	A	222	13	235	99,29	
		B	439	7	446		
		C	13	2	15		
		TT	1	4	5		
	SMP	A	39	7	46	83,19	
		B	6	26	32		
		C	2	14	16		
		TT	2	17	19		
	KESETARAAN	A	1	6	7	100,00	
		B	0	12	12		
		C	0	5	5		
		TT	0	0	0		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

2) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal. Adapun data tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Tabel berikut ini.

Tabel 2.17 Tingkat Partisipasi PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM PAUD	59,64	25,34	54,66	25,76	69,54
2.	Tingkat Partisipasi PAUD	N/a	N/a	N/a	N/a	79,86
3.	Tingkat Kelulusan PAUD	100	100	100	100	100
4.	Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	N/a	N/a	N/a	N/a	97,25
5.	Tingkat Kelulusan :					
	~ Paket A	99,99	100	99,99	100	100
	~ Paket B	99,98	99,97	99,96	99,96	99,77
	~ Paket C	99,98	N/a	N/a	N/a	99,76

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat partisipasi PAUD tahun sebelumnya mempunyai kriteria yang berbeda dengan tahun 2020 yaitu di tahun sebelumnya rentang usia partisipasi PAUD adalah 3-6 tahun sedangkan tahun 2020 adalah 5-6 tahun. Tingkat kelulusan PAUD realltif stabil yaitu 100% dari tahun ke tahun. Tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan baru di hitung mulai tahun 2020 yaitu sebesar 97,25%. Tingkat kelulusan Paket A, B dan C dari tahun ke tahun relatif stabil.

Sebagai dukungan terhadap prioritas provinsi terkait penanganan anak tidak sekolah, maka Kabupaten Tegal menyelenggarakan kebijakan Yuh Sekolah Maning. Kegiatan Yuh Sekolah Maning sudah dilaksanakan sejak tahun 2019. Pendataan dilakukan oleh unsur kecamatan hingga unsur desa. Hasil dari pendataan tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah yang kemudian di daftarkan ke sekolah non formal melalui pendidikan yang ada di satuan pendidikan nonformal melalui PKBM. Pada tahun 2019 tercatat ada 341 siswa Paket A dan 796 siswa Paket B. Pada tahun 2020 tercatat ada 99 siswa Paket A dan 306 siswa Paket B. Penurunan jumlah siswa Yuh Sekolah Maning di tahun 2020 karena adanya wabah pandemi covid-19 yang mempunyai dampak secara global sehingga di dunia pendidikan pun terkena dampak yang cukup signifikan.

3) Pembinaan Sekolah Dasar

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pembinaan Sekolah Dasar (SD) dapat terlihat dari beberapa uraian indikator. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18 Tingkat Partisipasi SD dan Kelulusan Tahun 2016-2020

No	Uraian Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD/MI	92,36	101,01	98,27	96.49	102.83
2	APK SD/MI	105.90	111.52	105.67	104.40	109.66
3	Tingkat Partisipasi SD	N/a	93.04	93.03	87.47	107.03
4	Angka Putus Sekolah SD	0,12	0,03	0,04	0,06	0.48
5	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	99,99	100	99,99	100	77.12
6	Sarana Prasarana SD baik	78,50	70,68	70,78	135,59	99.76

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar SD/MI yang fluktuatif dari tahun ke tahun akan tetapi menunjukkan semakin tingginya APK dan APM SD/MI. Tingkat partisipasi SD juga fluktuatif tetapi menunjukkan hasil yang semakin baik tingkat partisipasinya. Angka putus sekolah SD dari tahun 2016 - 2019 mengalami penurunan akan tetapi di tahun 2020 mengalami kenaikan hal ini terjadi karena di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga berpengaruh pada semua aspek kehidupan terutama dalam hal kemampuan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah SD. Rata-rata nilai kelulusan SD cenderung stabil di tahun 2016 - 2019 namun terjadi penurunan di tahun 2020. Penurunan rata-rata nilai kelulusan SD terjadi sama halnya dengan angka putus sekolah karena di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan terutama dalam bidang ekonomi. Sarana prasarana SD Baik dari tahun ke tahun sudah semakin baik hal ini berarti ketersediaan sarana dan prasaran yang mendukung proses belajar mengajar di tingkat SD. Pengukuran Sarpras di tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana di tahun sebelumnya dihitung dari presentase ruang kelas dan presentase perpustakaan sedangkan di tahun 2020 dihitung dari presentase ruang kelas dan MCK.

4) Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat terlihat dari beberapa uraian indikator. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19 Tingkat Partisipasi SMP dan Kelulusan Tahun 2016-2020

No	Uraian Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SMP/MTs	97,80	96,23	83.60	95.69	89.25
2	APK SMP/MTs	117,28	111,51	94,71	119.78	132.78
3	Tingkat Partisipasi SMP	N/a	91.18	77.37	78.29	105.99
4	Angka Putus Sekolah SMP	0,06	0,03	0,10	0,13	0.86
5	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	99,98	99,97	99,96	99,96	78.46
6	Sarana Prasarana SMP baik	77,50	89,33	89,33	73,92	99.22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs cenderung fluktuatif, akan tetapi di tahun 2020 terjadi penurunan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs juga fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat partisipasi SMP juga semakin baik. Angka putus sekolah dari tahun 2016-2019 semakin baik hal ini ditandai dengan angka putus sekolah yang mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 2020 terjadi kenaikan angka putus sekolah. Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan sehingga ekonomi masyarakat menjadi lemah yang kemudian berpengaruh pada presentase anak putus sekolah. Rata-rata nilai kelulusan SMP sama halnya dengan angka putus sekolah di tahun 2016-2019 semakin baik akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan hal ini juga terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan sehingga ekonomi masyarakat menjadi lemah yang kemudian berpengaruh pada rata-rata nilai kelulusan SMP. Sarana prasarana SMP baik dari tahun ke tahun juga fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat. Pengukuran Sarpras di tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana di tahun sebelumnya dihitung dari presentase ruang kelas dan presentase perpustakaan sedangkan di tahun 2020 dihitung dari presentase ruang kelas dan MCK.

5) Pengembangan Kurikulum

Tabel 2.20 Persentase Muatan Lokal Tahun 2016 - 2020

No	Uraian Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase muatan lokal dalam KBM	5.26	5.26	5.26	5.26	5.00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan Tabel di atas maka persentase muatan lokal dalam KBM cenderung stabil sejak tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 di jenjang SD terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 36 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP terdapat muatan

lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 38 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 40 jam pelajaran.

Penanaman jiwa kewirausahaan pada siswa dapat membentuk karakter wirausaha. Sehingga setiap siswa mempunyai pola pikir wirausaha sejak dini dimana dari pola pikir wirausaha tersebut siswa dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Secara jangka panjang ke depan jika bisa menjadi wirausaha maka akan memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat. Penanaman jiwa kewirausahaan dalam bentuk pembuatan soal-soal/materi yang menunjukkan adanya jiwa wirausaha.

6) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan atau pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan (sekolah). Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Suatu program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dan tuntutan organisasi, atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan ini yaitu:

1. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional maupun tenaga teknis penyelenggara pendidikan.
2. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan professional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing.
3. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah; dan menyediakan bentuk- bentuk penghargaan, kesejahteraan dan insentif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial-psikologi.
4. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan/posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan/posisi di masa yang kan datang.
5. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja dan ketahanan organisasi pendidikan. Menyangkut pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Meskipun demikian, dapat saja berjalan karir seseorang menempuh puncak karirnya.

Output program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan salah satunya adalah terpenuhinya rasio antara guru dan jumlah murid. Adapun perhitungan rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Adapun perkembangan jumlah guru dan murid serta rasio ketersediaan guru dengan siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Tegal tahun 2016 sd 2020 dengan catatan jumlah guru disini adalah guru PNS yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	3.070	2.885	2.641	3.783	3.395
1.2.	Jumlah Murid	127.430	126.809	126.072	131.269	159.481
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:41,51	1:43,95	1:47,74	1:34,70	1:46,98
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	1.253	1.276	1.228	1.235	1.447
2.2.	Jumlah Murid	36.712	31.715	35.590	46.303	79.764
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:29,30	1:24,86	1:28,98	1:37,49	1:55,12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa perbandingan antara guru dengan jumlah murid semakin membaik, untuk tingkat SD pada tahun 2016 perbandingan jumlah guru dan murid sebesar 1 : 41,51 (jumlah guru 3.070 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 127.430 murid) sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun mencapai 1: 46,98 (jumlah guru 3.395 sedangkan jumlah murid 159.481) sedangkan rasio ideal guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD adalah 1 : 29. Dengan kata lain bahwa ketersediaan guru jenjang pendidikan SD di Kabupaten Tegal masih jauh di bawah ideal. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan jumlah guru diantaranya banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan kematian sedangkan pengadaan guru baru (CPNS) jumlahnya terbatas.

Adapun untuk tingkan SMP pada tahun 2016 perbandingan jumlah guru dan murid sebesar 1 : 29,30 (jumlah guru 1.253 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 36.712 murid) menurun tajam pada tahun 2020 menjadi 1 : 55,12 (jumlah guru 1.447 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 79.764 murid, sedangkan rasio ideal guru dan murid untuk jenjang pendidikan SMP adalah 1 : 24. Dengan kata lain bahwa ketersediaan guru jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Tegal sangat jauh dibawah ideal. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan jumlah guru diantaranya banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan kematian sedangkan pengadaan guru baru (CPNS) jumlahnya terbatas.

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru perkelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di

Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2016-2020 dengan catatan menghitung jumlah guru PNS, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2.22 Rasio Guru per Kelas dan Rasio Guru per Mapel Tahun 2016 -2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Rasio guru/Kelas	1:0,2	1:0,25	1:0,3	1:0,8	1:1,29
2.	SMP/MTs					
	Rasio guru/Mapel	1:1:29	1:1:31	1:1:32	1:1:28	1:1:25,73

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Dari isian tabel tersebut diatas bahwa untuk Rasio Guru Per Kelas, Rasio Guru per mata pelajaran. Rasio guru per kelas jenjang SD di tahun 2020 adalah 1 banding 1,29 ini berarti 1 guru memegang 1 kelas. Hal ini berarti sudah memenuhi kriteria ideal 1 guru 1 kelas. Rasio guru per mapel jenjang SMP adalah 1 banding 25,73 jam pelajaran. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2020 walaupun masih belum ideal yaitu idealnya 1 guru 24 jam pelajaran.

7) Pengendalian Perizinan

Setiap satuan pendidikan sebelum menyelenggarakan pendidikan harus mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa sekolah yang bernaung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dari tahun 2016-2020 sudah mempunyai izin operasi.

Tabel 2.23 Perizinan Sekolah Tahun 2016-2020

No	Jenjang	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	2	778	2	793	2	794	2	810	2	820
2	SD	694	24	675	25	675	25	675	26	675	26
3	SMP	47	55	48	59	49	59	49	62	49	64
4	KESETARAAN	1	23	1	23	1	23	1	23	1	23

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

8) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap budaya-budaya di Indonesia terutama budaya yang ada di Jawa pada siswa merupakan salah satu langkah untuk dapat memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengembangan Bahasa dan Sastra. Berikut ini adalah Tabel Penggunaan Bahasa Daerah yang digunakan di sekolah:

Tabel 2.24 Penggunaan Bahasa Daerah di Sekolah

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
2	SMP	5.26	5.26	5.26	5.26	5.00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2016-2020 penggunaan Bahasa Daerah di sekolah cenderung stabil artinya program penggunaan Bahasa Daerah masih terus berjalan. Pada jenjang SD dalam 1 minggu terdapat 36 jam pelajaran ditambah dengan 2 jam pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah sehingga totalnya ada 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP dalam 1 minggu ada 38 jam pelajaran ditambah dengan 2 jam pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah.

B. Kesehatan

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Berikut capaian kinerja pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dari tahun 2016 – 2020:

Tabel 2. 25 Capaian Kinerja Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,062%	0,069%	0,077%	0,087%	0,092%
2.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	14,3%	57,1%	71,4%	66,7%	88,9%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	-	92%	100%	100%	93,3%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	-	96,3%	96%	100%	98,2%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	100%	100%	100%	99%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-	95,3%	100%	93,1%	73,7%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	98,3%	99%	97,8%	38,9%
8.	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	0,58%	10,07%	21,3%	15,4%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	22,4%	35,79%	49%	33,6%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	23,8%	46,3%	29,9%	10,1%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	24,1%	32,9%	100%	74,5%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	100%	100%	64,9%	57,3%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	-	100%	70%	86,3%	57,1%
14.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-	94,2%	97%	99,3%	90,5%
15.	Cakupan balita stunting	7.63%	5.39%	5.9%	9.74%	12,5%
16.	Persentase Fasyankes tingkat pertama terakreditasi	33%	35%	41%	41%	42%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Beberapa indikator pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK). Dinas Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian SPM-BK antara lain dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, mengoptimalkan anggaran yang ada, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan telah menambah jumlah puskesmas mampu persalinan. Puskesmas mampu persalinan memberi pelayanan ibu melahirkan selama 24 jam. Puskesmas PONED dan mampu persalinan dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terstandar, mengingat masih banyak ibu melahirkan di dukun bayi yang belum memenuhi standar pelayanan ibu melahirkan.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi dan perijinan yang sesuai dengan standar. Indikator – indikator pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100	100	100	100	100
2.	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	-	-	52	52	82,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Kabupaten Tegal terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas SDMK sesuai dengan standar. Pemerataan distribusi SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan juga terus diupayakan.

3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Capaian kinerja pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman antara lain:

Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pangan yang tidak memenuhi syarat	30,53	23,08	7,95	9,09	18,99
2	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal terus berupaya memenuhi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dalam hal kuantitas maupun kualitas. Tugas pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan menjadi tugas Dinas Kesehatan, sedangkan pendistribusian dilakukan oleh UPTD Gudang Farmasi. Selama ini kebutuhan obat di puskesmas sudah tercukupi. Kendala yang dihadapi adalah pada proses pengadaan yang bersifat teknis. Namun kendala – kendala tersebut dapat diatasi dan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan di puskesmas dapat terpenuhi.

Belum semua makanan dan minuman yang beredar di Kabupaten Tegal memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dinas Kesehatan sebagai salah satu anggota Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) Kab. Tegal terus berupaya dalam menjaga kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat. Tim SKPT mengambil sampel makanan di sejumlah tempat kemudian dilakukan pemeriksaan, apakah terdapat kandungan zat berbahaya di dalamnya. Jika terdapat zat berbahaya pada makanan yang diperiksa, akan dilakukan pembinaan terhadap penjual makanan dan minuman tersebut.

4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator – indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 28 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	81,2	80	81	81	95,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD dr Soeselo)

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah melakukan pelayanan dan pengelolaan penunjang medis dan non medis sesuai dengan indikator yang ada. Ada beberapa indikator yang sudah tercapai akan tetapi masih ada juga beberapa indikator yang perlu di tingkatkan. Berikut capaian kinerja pelayanan penunjang di RSUD dr. Soeselo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang RSUD dr. Soeselo Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Standar	Hasil Perhitungan				
			2016	2017	2018	2019	2020
A Mutu Pelayanan							
1	<i>Emergency Respon Time</i>	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	≤ 3 menit	≤ 3 menit	2 menit	2.33 menit	4.5 menit
2	Angka Kematian IGD	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,015	0,2	0,5	0,095	0,38
3	NDR (Angka Kematian Netto)	≤ 0.24 %	2,67%	2,80%	2,95%	3,12%	3,09
4	Jumlah Pasien Rawat Inap yang Dirujuk		133 Pasien	196 Pasien	257 Pasien	252 Pasien	146 Pasien
5	<i>Post Operative Death Rate</i>	≤ 1 %	< 1 %	0	0	0	0
6	Angka Infeksi Nosokomial	< 1.5 %	-	-	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	≤ 30 menit	44.5 menit	39.98 menit	36.4 menit	41.44 menit	42.80 menit
8	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	< 2 hari	1.4 hari	1 hari	1.4 hari	1.5 hari
B Kepedulian Kepada Masyarakat							
1	Pembinaan Kepada Puskesmas						
2	PKRS		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Rasio Tempat Tidur Kelas III		0,51	0,54	0,58	0,59	0,59
4	Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III	75-85 %	80,25%	107,11%	90,96%	107,96%	80,58%
5	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu di rawat jalan	-	33.628	28.456	21.012	21.990	25.997
C Kepuasan Pelanggan							
1	Prosentase Komplain		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Standar	Hasil Perhitungan				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Lama waktu tunggu di poliklinik	≤ 60 menit	75 menit	133 menit	152 menit	111.71 menit	-
3	Kemudahan Pelayanan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
D	Kepedulian Terhadap Lingkungan						
1	Hasil uji AMDAL		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal, 2021

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD Suradadi)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit yang dilaksanakan sesuai standar. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data pelayanan Rumah Sakit mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar.

Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	Standar	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Mutu Pelayanan						
1	<i>Emergency respon time</i>	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang (0 >30 menit), 1=16-30 menit, 2=8-15 menit, 3= <8 menit)	NA	NA	NA	3	2
2	Angka Kematian UGD	≤ 2% (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 0=>10% 1=8-10% 2=5-7% 3=<5%)	NA	NA	NA	3	3
3	NDR (Angka Kematian Netto)	≤ 0,24 % (jumlah kematian pasien ≥48 jam setelah dirawat / jumlah pasien yang dirawat x 1000 ‰) 0=>65% 1=41-65 2=25-40 3=<25%	NA	NA	NA	3	3

No	Indikator	Standar	2016	2017	2018	2019	2020
4	Prosentasi pasien rawat inap yg dirujuk	jumlah pasien rawat inap yang dirujuk / jumlah pasien rawat inap x 100% 0=>10% 1=8-10% 2=5-7% 3=<5%	NA	NA	NA	3	2
5	Post operative death rate	≤ 1% (jumlah operasi pasien meninggal / jumlah pasien dioperasi x 100%) 0=>10% 1=6-10% 2=2-7% 3=<2%	NA	NA	NA	3	3
6	Angka Infeksi Nosokomial	< 1.5 % (jumlah psaien dirawat yang terinfeksi nosokomial / jumlah pasien dirawat x 100 0=>15% 1=10-15% 2=2-9% 3=<2%	NA	NA	NA	3	2
7	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	≤ 30 menit (rata-rata pelayanan resep obat jadi dalam menit) 0=<60 menit 1=31-60 menit 2=8-30 menit 3=<8 menit	NA	NA	NA	2	2
8	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari (rata rata waktu tunggu sebelum operasi dalam hari) 0=>5 hari 1=3-5 hari 2=2-3 hari 3=< 24 jam	NA	NA	NA	3	3
B	Kepedulian Kepada Masyarakat						
1	Pembinaan Kepada Puskesmas	0 tidak ada program, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	NA	NA	0.5	0.5

No	Indikator	Standar	2016	2017	2018	2019	2020
2	PKRS	0 tidak ada program, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	NA	NA	0.5	0.5
3	Rasio tempat tidur kelas 3	0 ≤10%, 0,25 =10-20, 0,5 =21-30,1= > 30%	NA	NA	NA	1	1
4	Pemanfaatan TT (BOR(kelas) 3	60-80% (Depkes, 2005) 0=>40% 0,25=40-59% 0,5=60-58% 1=<85%	NA	NA	NA	1	1
5	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu (Pbi/ total pasien rajal dan ranap)	0 ≤10%, 0,25 =10-20, 0,5 =21-30,1= > 30%	NA	NA	NA	0.5	0.5
C	Kepuasan Pelanggan						
1	Prosentase complain	0 tidak ada program penanganan complain, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	NA	NA	0.5	0.5
2	Lama Waktu Tunggu di poliklinik	≤ 60 menit (0 >120 menit, 0,75 61-120 menit, 1,5 30-60 menit 2,00 < 30 menit)	NA	NA	NA	1.5	2,0
3	kemudahan pelayanan	0 = tidak ada petunjuk, 1 = ada petunjuk tidak lengkap, 2 = tidak ada petunjuk	NA	NA	NA	1	1,0

No	Indikator	Standar	2016	2017	2018	2019	2020
D	Kepedulian terhadap lingkungan						
1	kebersihan lingkungan	0 tidak ada program, 0,75 ada program dan sop, 1,5 sop dilaksanakan sebagian, 2 sop dilaksanakan semua	NA	NA	NA	1.5	1.5
2	hasil uji AMDAL	0 tidak ada Amdal, 0,75 tidak ada tindak lanjut hasil amdal 1,5 ada tindak lanjut belum selesai 2,00 ada tindak lanjut sampai selesai	NA	NA	NA	0	0
Total Skor Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat			0	0	26,00	25,00	25,50

Sumber : RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, 2021

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tegal berdasarkan kewenangannya meliputi :

1) Infrastruktur Bangunan Sumber Daya Air (SDA)

Infrastruktur sumberdaya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Pengembangan wilayah sungai yang merupakan WS strategis nasional adalah WS Pemali Comal terdiri atas Pengelolaan sumber daya air sungai, Pengembangan waduk; dan Pengembangan embung. Terkait dengan pengembangan waduk dan embung, Di Kabupaten Tegal terdapat Waduk Cacaban yang mempunyai kapasitas yang saat ini mempunyai kapasitas 49,02 juta m³ dan dapat mengalir lahan sawah seluas 17.481 Ha. Sedangkan jumlah embung atau waduk lapang di Kabupaten Tegal sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 31 Jumlah dan Luas Embung

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (m2)
1	Adiwerna	6	39.315
2	Dukuhturi	2	9.778
3	Dukuhwaru	10	52.209
4	Kedungbanteng	1	15.535
5	Kramat	17	88.872

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (m2)
6	Lebaksiu	28	134.637
7	Pangkah	9	34.609
8	Slawi	10	47.298
9	Talang	3	18.557
10	Tarub	17	83.538
11	Suradadi	5	21.600
12	Warureja	3	5.800
	Total	111	551.748

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Jaringan irigasi di Kabupaten Tegal terdiri dari jaringan teknis (primer, sekunder, tersier) dan jaringan non teknis. Kedua jaringan ini hampir tersebar merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tegal. Kondisi saluran-saluran irigasi ini perlu perawatan karena sebagian dari saluran-saluran ini, terutama saluran teknis mengalami kerusakan pada fisik bangunannya. Selain itu perlu juga adanya peningkatan terhadap saluran non teknis dan semi teknis lainnya agar berfungsi lebih optimal untuk mengairi seluruh persawahan areal persawahan yang ada di Kabupaten Tegal.

Lahan sawah di Kabupaten Tegal sekitar 40.133 Ha. Untuk komoditas padi pada Tahun 2017 luas tanam mencapai 61.995 Ha dan luas panen mencapai 65.660 Ha, sedangkan untuk produksinya mencapai 373.524 Ton, dengan produktivitas rata-rata 5,69 Ton/Ha. Dilihat dari distribusi per kecamatan, kecamatan Warureja menjadi penyumbang lahan tanam padi tersebar di Kabupaten Tegal yaitu sekitar 7.102 Ha.

Berdasarkan jenis pengairan di Kabupaten Tegal, sebagian besar sawah tersebut merupakan sawah irigasi teknis yaitu sekitar 32.600 Ha. Berdasarkan kewenangan irigasi, Daerah irigasi (DI) untuk lahan pertanian di Kabupaten Tegal terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan DI yaitu:

Tabel 2. 32 Panjang Irigasi Kabupaten Tegal

Kewenangan	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Luas Daerah Irigasi (Ha)
Kabupaten	208	276,02	9.281
Provinsi	11	84.597	6.956
Pusat	3	240.686	24.083
Total	222	325.559	40.320

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumberdaya air berupa jaringan irigasi di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat dari beberapa kondisi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 33 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Per Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	146	50,05	155	53,1	164,5	56,39	160,58	58,17	162,47	58,86
2.	Sedang	49	16,8	52	17,8	67,2	22,97	44,82	16,24	44,83	16,15
3.	Rusak Ringan	23,74	8,138	21,69	7,44	44,85	15,37	59,00	21,37	59,00	20,93
4.	Rusak Berat	72,98	25,02	63,03	21,6	15,43	5,26	11,62	4,21	11,20	4,06
	Total	291,72	100	291,72	100	291,7	100	276,02	100	276,02	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan kewenangannya, Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sebanyak 208 DI dengan luas 9.281 hektare. Kebutuhan air Daerah irigasi Kabupaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi. Panjang Saluran irigasi saat ini mencapai 276,02 km, dengan kondisi jaringan irigasi yang mantap sepanjang 207,30 km (75,01%). Sedangkan yang mengalami kerusakan ringan dan rusak berat (tidak mantap) sepanjang 70,02 km (24,99%). Sedangkan kondisi cakupan daerah irigasi kewenangan kabupaten tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 34 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2016-2020

Kondisi DI	Kondisi Daerah Irigasi Per Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Daerah Irigasi (Ha)	15.497	15.497	15.497	9.281,00	9.281,00
Luas Daerah Irigasi Baik (Ha)	10.360	10.987	12.298	5.302,49	5.374,93
Persentase Luas DI Baik	66,85	70,90	79,36	58,17	58,86

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, 2021

Peningkatan kondisi Daerah Irigasi (DI) kabupaten, dikarena alokasi anggaran yang stabil untuk perbaikan infrastruktur irigasi baik saluran maupun bangunan bendung. Selain itu secara lokasi sebagian besar Daerah Irigasi Kabupaten berada di daerah atas yaitu Kecamatan Bojong, Jatinegara, Margasari dan Bumijawa, serta bangunan irigasinya letaknya jauh dari permukiman penduduk.

2) Infrastruktur Air Minum

Infrastruktur sistem jaringan bersih di Kabupaten Tegal dibagi menjadi jaringan perpipaan dan non perpipaan. Jaringan air minum perpipaan untuk wilayah perkotaan sampai pada akses layanan rumah tangga dilayani oleh oleh PDAM. Sedangkan untuk perpipaan wilayah perdesaan difasilitasi melalui program Pamsimas. Untuk jaringan non perpipaan masyarakat di Kabupaten Tegal dipenuhi dari layanan sumur dan mata air. Data layanan air minum sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 35 Data Layanan Air Minum Tahun 2016-2020

Uraian	Capaian Layanan Air Minum				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Total (jiwa)	1,425,998	1,428,884	1,431,375	1,433,464	1,435,147
Jumlah Penduduk wilayah Teknis PDAM (jiwa)	664,694	664,694	659,655	669,141	768,153
Jumlah Penduduk Perdesaaan Teknis PAMSIMAS (jiwa)	40,454	638,111	745,005	878,629	980,694
Target Capaian PDAM dr Total Penduduk (%)	46.65	21.53	23.18	24.72	22.92
Target Capaian Pamsimas dr Total Penduduk (%)	28.39	22.92	19.89	17.86	17.68
Layanan PDAM (SR)	36,363	40,619	42,742	45,648	48,150
Layanan PDAM (Jiwa)	121,981	143,121	152,927	165,442	176,097
Layanan Pamsimas (Jiwa)	N/A	146,272	148,149	156,898	173,339
Non Perpipaian (Sumur dan Mata Air)	N/A	N/A	503,878	503,878	527,336
Capaian Air Minum PDAM (%)	8.55	10.02	10.68	11.54	12.27
Capaian Air Minum Pamsimas (%)	N/A	10.24	10.35	10.95	12.08
Capaian Akses Air Minum Keseluruhan (%)	N/A	N/A	56.24%	57.64%	61.09%

Sumber : Hasil Analisa Berbagai Sumber, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara teknis jangkauan jaringan air minum perpipaian PDAM seharusnya dapat mencapai 46,5% wilayah Kabupaten Tegal. Capaian layanan PDAM meningkat dalam kurun waktu 5 tahun dari 8,55% menjadi 12,27%. Untuk Layanan Pamsimas saat ini baru dapat melayani wilayah di Kabupaten Tegal sebesar 12.08%. Secara keseluruhan terdapat peningkatan layanan akses air minum selama 5 tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 61,09%.

3) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.36 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPSS (unit)	72	113	118	124	129
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	141,92	222,75	240,66	206,43	242,50

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.566.587	1.599.432
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,099	0,155	0,082	0,155	0,151

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

Sebelum sampah diangkut / dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 129 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 242,50 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill* sehingga perlu ditingkatkan ke sistem *sanitary landfill*, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 37 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi TPA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Volume Sampah (m ³)	104.359	124.708	137.883	146,604	148,425
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m ²)	41.691	41.691	41.691	41.691	41,691

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

4) Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat.

Tabel 2. 38 Rumah Berjamban Tahun 2015 - 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)				KK yg belum berjamban layak	
			2015	2018	2019	2020	Unit	%
1	Margasari	37.624	65	98,8	N/A	100	521	1,75
2	Bumijawa	32.722	71,9	98,2	N/A	100	62	0,24
3	Bojong	24.710	96,3	98	N/A	100	2008	11,01
4	Balapulang	32.705	85,4	97,3	N/A	100	623	3,41
5	Pagerbarang	21.727	66,8	96,7	N/A	100	1482	6,05
6	Lebaksiu	32.846	42,9	95,5	N/A	100	1816	5,96
7	Jatinegara	20.897	70,3	93,7	N/A	100	2653	10,01
8	Kedungbanteng	15.989	45,3	92,7	N/A	100	1004	2,90
9	Pangkah	37.554	51,5	87,1	N/A	100	1122	6,13
10	Slawi	26.082	61,5	87	N/A	100	2483	11,44
11	Adiwerna	44.273	56,2	86,8	N/A	100	1024	6,07
12	Talang	34.264	54,6	85,8	N/A	100	2387	11,10
13	Dukuhturi	33.234	33,8	83,6	N/A	100	3166	8,64
14	Tarub	28.781	33,2	82,8	N/A	100	1652	12,20

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)				KK yg belum berjamban layak	
			2015	2018	2019	2020	Unit	%
15	Kramat	38.150	49,7	81,5	N/A	100	1292	3,57
16	Suradadi	30.677	48,2	81,5	N/A	100	2513	8,65
17	Warureja	22.760	42,2	79	N/A	100	986	2,85
18	Dukuhwaru	23.165	46,8	73,4	N/A	100	1350	5,45
	Total	538.160	55,8	88,7		100	28.144	5,23

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Dari data tabel di atas diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 5 tahun (2016-2020). Hal tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi namun masih menyisakan 5,23% KK yang masih belum memiliki akses jamban yang layak.

Tabel 2.39 IPAL Domestik Skala Komunal Kabupaten Tegal

No	Kecamatan	Kapasitas (m3)	Jumlah KK Tersambung
1	Pangkajene	230,16	130
2	Jatinegara	107,25	60
3	Bojonegara	290,92	188
4	Lebaksumi	106,20	64
5	Balapulang	217,22	132
6	Adiwerna	109,97	62
7	Dukuhwaru	240,75	136
8	Tarub	188,14	125
	Total	1490,61	897

Sumber: Program Sanimas, 2021

Dari data tabel Rumah Berjamban Tahun 2016 – 2020 diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 5 tahun (2016-2020). Hal tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi namun masih menyisakan 5,23% KK yang masih belum memiliki akses jamban yang layak.

5) Infrastruktur Drainase

Berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Kebutuhan drainase jalan di Kabupaten Tegal adalah sekitar 490,15 km, sampai dengan akhir tahun 2020 telah terbangun sekitar 286,35 km atau 58,42%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun sebagaimana tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2. 40 Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
		Km	Km	Km	Km	Km
a	Jalan Kabupaten	847,27	847,27	847,27	847,3	847,27
b	Jalan yg harus berdrainase	477,46	477,46	477,46	490,2	490,15

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
		Km	Km	Km	Km	Km
c	Jalan yg tidak harus berdrainase	147,83	137,02	115,40	79,17	70,77
d	Jalan yg berdrainase	221,98	232,79	254,41	278	286,35
	Persentase Jalan berdrainase (d/b)	46,49	48,76	53,28	56,71	58,42

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

6) Bangunan Gedung Negara

Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah. Rumah negara dan pagar bangunan gedung negara/rumah negara termasuk dalam kategori bangunan gedung negara. Data bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 41 Data Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Tegal Tahun 2020

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	228
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	133
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	35
5	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	947
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	130
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	42
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	22
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	42
11	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1
12	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	19
13	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	10
14	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	1
15	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	6
16	Bangunan Gedung Pematangan Hewan Lain-lain (dst)	1
17	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	29
18	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	1
19	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	31
21	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	16
22	Bangunan Stasiun Permanen	1
23	Bangunan Tempat Parkir	109
24	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1
25	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1
26	Bangunan Klinik/Puskesmas	210
27	Bangunan Rumah Sakit Umum	53
28	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	4
29	Bangunan Rumah Sakit Hewan	3
30	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	26

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
31	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1
32	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1
33	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	2
34	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	27
35	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	6
36	Bangunan Untuk Kandang	8
37	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	1
38	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	6
39	Bangunan Gedung Musium Permanen	1
40	Hotel Permanen	2
41	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	6
42	Candi	1
43	Gedung Garasi/Pool Darurat	2
44	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	6
45	Gedung Garasi/Pool Permanen	45
46	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	5
47	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	61
48	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1
49	Gedung Pos Jaga Permanen	44
50	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1
51	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	7
52	Gedung Pemetong Hewan Permanen	13
53	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	6
54	Gedung Menara Peninjau Permanen	3
55	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	2
56	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1
57	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2
58	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2
59	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	93
60	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2
61	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1
62	Flat/rumah Lain-lain (dst)	7
63	Flat/Rumah Susun Permanen	3
64	Asrama Permanen	1
65	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat	1
66	Pagar Permanen	204
Total Bangunan Gedung Negara		2.677

Sumber : Hasil Analisa Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bangunan gedung pendidikan permanen merupakan jenis bangunan gedung negara yang paling dominan di Kabupaten Tegal dengan persentase sebesar 35.38%. Dari total 947 bangunan gedung pendidikan permanen, 632 bangunan diantaranya merupakan bangunan sekolah dasar negeri. Data bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

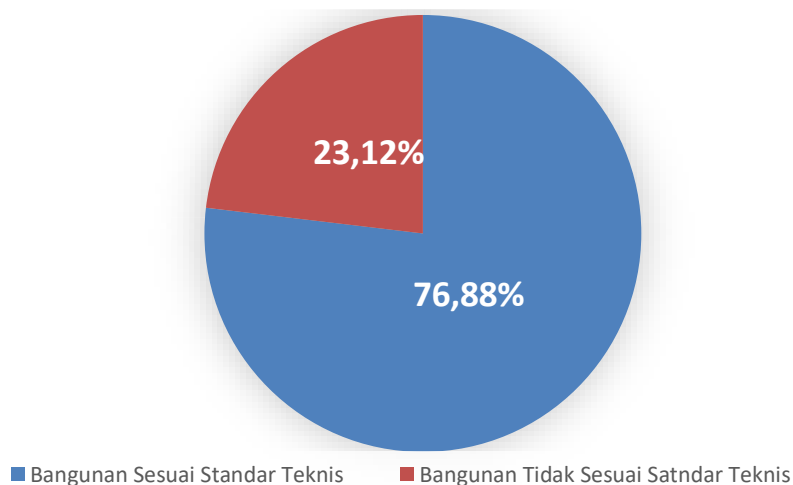
Tabel 2. 42 Data Bangunan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tegal Tahun 2020

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Bangunan Ruang Kelas	Jumlah dan Kondisi Bangunan SD		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Dukuhwaru	28	202	85	73	44
2	Adiwerna	50	359	175	116	68
3	Tarub	38	273	103	88	82
4	Pangkah	52	330	122	156	52
5	Margasari	32	224	83	91	50
6	Balapulung	35	232	77	91	64
7	Slawi	37	249	71	140	38
8	Bojong	31	204	77	77	50
9	Bumijawa	50	327	137	127	63
10	Suradadi	30	253	106	88	59
11	Dukuhturi	27	186	77	83	26
12	Lebaksiu	37	262	99	91	72
13	Kedungbanteng	17	110	41	26	43
14	Kramat	39	280	108	135	37
15	Pagerbarang	32	217	56	63	98
16	Talang	36	269	90	103	76
17	Warureja	28	210	87	73	50
18	Jatinegara	33	216	91	72	53
	Jumlah	632	4.403	1.685	1.693	1.025

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Permasalahan utama dalam pengelolaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal adalah masih banyaknya bangunan gedung negara yang tidak sesuai dengan standar teknis. Bangunan yang sesuai standar teknis diartikan sebagai bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta hanya mempunyai tingkat kerusakan bangunan antara 0% s.d 25%. Data bangunan gedung yang sesuai dengan standar teknis di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Gambar 2. 38 Data Bangunan Gedung Negara Sesuai Standar Teknis di Kabupaten Tegal Tahun 2020



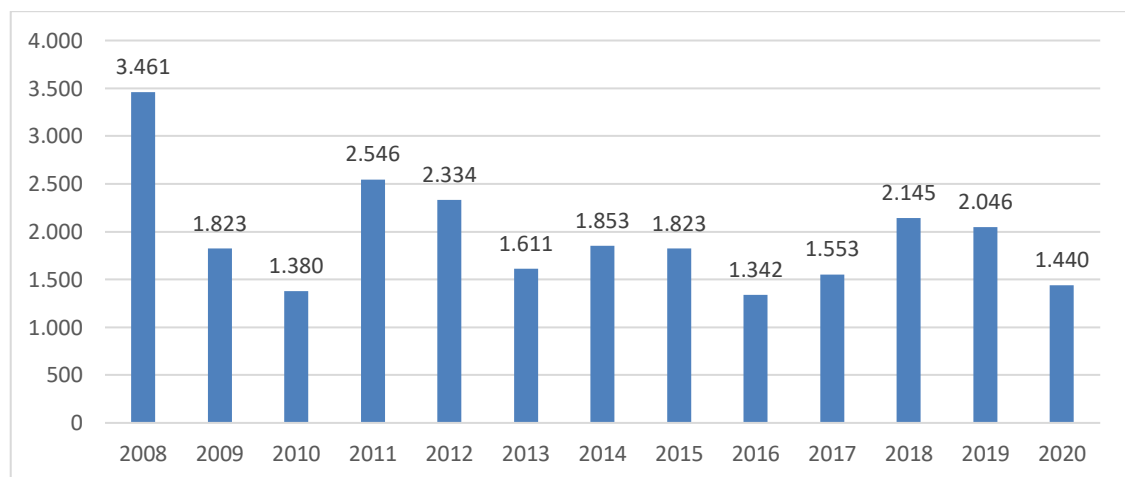
Sumber : Hasil Analisa berbagai Sumber, 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis adalah sebesar 76,88% atau sebanyak 2.058 bangunan gedung negara, sedangkan bangunan gedung negara yang tidak sesuai standar teknis adalah sebesar 23,12% atau sebanyak 619 bangunan gedung negara. Peningkatan rasio bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis dapat dilakukan dengan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal dengan memprioritaskan bangunan-bangunan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan sedang.

7) Izin Mendirikan Bangunan

Berdasarkan Permen PUPR No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PermenPUPR No 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Tegal diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kecuali IMB rumah tinggal sederhana dengan luas bangunan maksimal 100 m² oleh Kecamatan. Data penerbitan IMB di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

Gambar 2. 39 Data Data Penerbitan IMB di Kabupaten Tegal Tahun 2020



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal, 2021

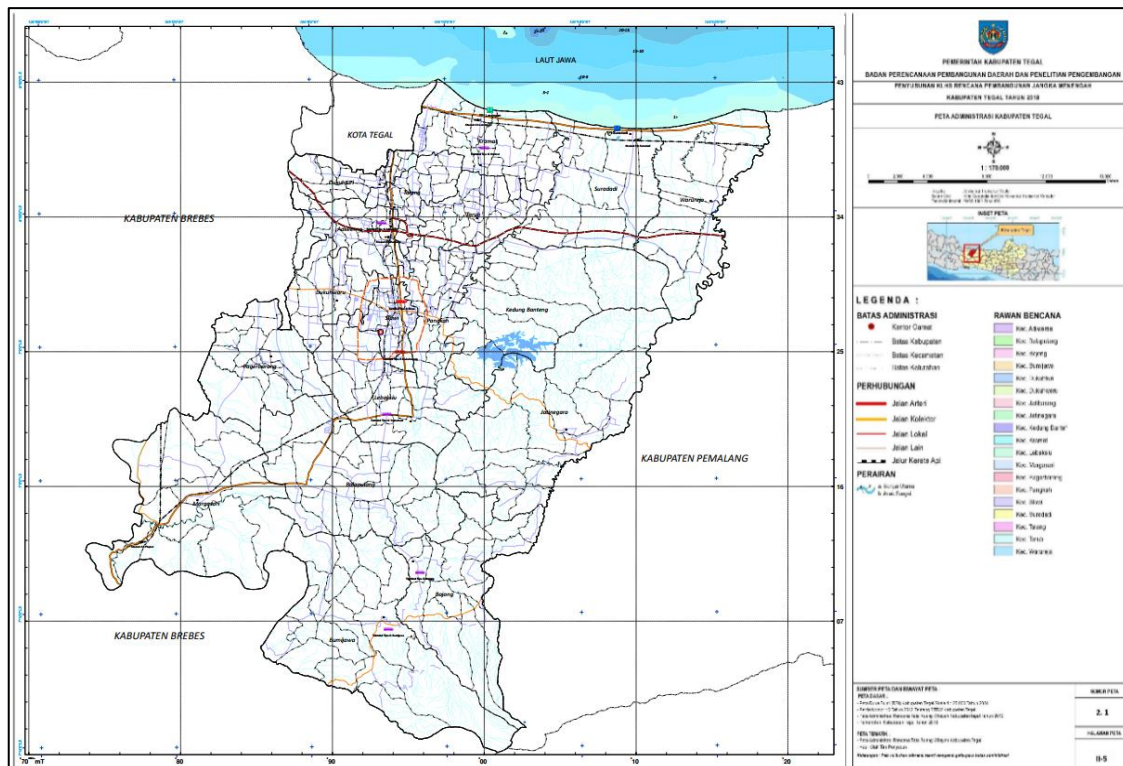
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa tren penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) cenderung tidak stabil. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2011 s.d 2020) penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbanyak dalam waktu satu tahun anggaran terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 2.546. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, rata-rata penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam waktu satu tahun anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah 1.869.

8) Infrastruktur Jalan

Secara kewilayahan Kabupaten Tegal mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis dan terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan dimana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km, sedangkan Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 km, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 km, Jalan Desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km serta Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang yang melintasi wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 30,7 km.

Kabupaten Tegal secara kewilayahan regional Bregasmalang meliputi di bagian Utara terlntasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlntasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes). Berikut ini peta jalan Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 40 Peta Jalan Kabupaten



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 90,81 km atau sekitar 10,72%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangkan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai

jalan strategis akan menjadi prioritas dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang. Berikut ini data kondisi jalan Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	374,11	44,15	377,94	44,6	528,9	62,42	576,24	68,01	582,69	68,77
2.	Sedang	117,37	13,85	170,34	20,1	118,7	14,00	105,73	12,48	104,56	12,34
3.	Rusak Ringan	150,93	17,81	139,51	16,5	82,98	9,79	70,94	8,37	69,22	8,17
4.	Rusak Berat	204,86	24,18	159,48	18,8	116,8	13,78	94,355	11,14	90,81	10,72
	Total	847,27	100	847,27	100	847,3	100	847,27	100	847,27	100
								Mantap		687,25	81,11
								Tidak Mantap		160,02	18,89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan tabel di atas Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 90,81 km atau sekitar 10,72%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangkan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai jalan strategis akan menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Untuk menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruktur jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik dan sedang, secara dimensi dan konstruksinya serta kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

Tabel 2. 44 Kondisi Lebar Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2020

Kondisi Jalan	Lebar Jalan (Meter)						
	Lebar yang tidak memenuhi standar (< 4m)		Lebar yang memenuhi standar (> 4m)				
	< 4m	Jumlah (Km)	4 - 5 m	6 - 8 m	9 - 11 m	12 m - keatas	Jumlah (Km)
Baik	220,28	220,28	327,10	28,69	3,60	3,03	362,42
Sedang	33,48	33,48	68,23	1,59	1,26	0	71,08
Jumlah Jalan Mantap yang tidak memenuhi standar		253,76	Jumlah Jalan Mantap yang memenuhi standar				433,50
Rusak ringan	30,24	30,24	41,09	0,5	2,37	0	43,96
Rusak berat	43,07	43,07	46,54	1,2	0	0	47,74
Jumlah jalan tidak mantap yang tidak memenuhi standar		73,305	Jumlah jalan tidak mantap yang memenuhi standar				91,7
Jumlah Total (Km)							847,27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Kemantapan jalan secara dimensi dapat dilihat dari lebar minimal jalan sesuai standar, yaitu sama dengan dan lebih dari 4 (empat) meter, dimana kondisi jalan kabupaten secara umum baru mencapai 51,16% atau sekitar 433,50 km yang memiliki lebar sesuai standar, sedangkan sisanya sekitar 413,77 km memiliki dimensi lebar jalan kurang dari 4 (empat) meter, sehingga salah satu target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah meningkatkan dimensi jalan sesuai standar, dan sampai dengan tahun 2020 kondisi Jalan mantap (Kondisi baik dan sedang) adalah 81,11% atau sekitar 687,25 km.

9) Infrastruktur Jembatan

Data infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 berjumlah 436 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2020 berjumlah 460 unit. Hal ini selama kurung waktu 5 tahun terakhir terdapat pembangunan jembatan baru dan *updating* data jembatan.

Tabel 2. 45 Jumlah Jembatan Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jembatan	Jumlah Jembatan Per Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
1.	Baik	266	61,01	282	64,7	298	67,12	301	67,79	316	68,7
2.	Sedang	50	11,47	69	15,8	93	20,95	91	20,5	89	19,35
3.	Rusak Ringan	52	11,93	57	13,1	30	6,76	30	6,76	33	7,17
4.	Rusak Berat	68	15,6	28	6,42	23	5,18	22	4,95	22	4,78
	Total	436	100	436	100	444	100	444	100	460	100
										Mantap	88,05
										Tidak Mantap	11,95

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data tersebut di atas, kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin baik di mana jembatan yang baik sebanyak 316 unit (68,7%), sedangkan yang masih dalam kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat adalah 144 unit (31,3%) dari jumlah keseluruhan jembatan di Kabupaten Tegal, yaitu sebanyak 160 unit jembatan dengan panjang keseluruhan mencapai 5.553,27 meter. Dari jumlah jembatan yang tercatat, tergambar jumlah jembatan dengan lebar sebagai berikut.

Tabel 2. 46 Jumlah Jembatan Berdasarkan Lebar Jembatan Tahun 2020

Kondisi Jembatan	Lebar Jembatan (Unit)					Jumlah (Unit)
	1 - 2 m	3 - 5 m	6 - 8 m	9 - 11 m	12 m keatas	
Baik	9	186	94	18	7	314
Sedang	2	63	22	1	1	89
Rusak ringan	0	25	8	0	1	34
Rusak berat	2	20	1	0	0	23
Jumlah	13	294	125	19	9	460

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Sebagaimana infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti infrastruktur jalan, dimana kedepan Kondisi Jembatan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya, dan kemandapan jembatan di Kab. Tegal pada tahun 2020 telah mencapai 88,05%.

10) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal mengawasi pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Jasa konstruksi dengan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal mengamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan Urusan tersebut namun demikian belum dapat memberikan anggaran guna pelaksanaan program Jasa Konstruksi, dikarenakan program tersebut tidak/belum terakomodirasi dalam RPJMD 2019-2024 dan Renstra DPU Kab. Tegal 2019-2024, yang kemudian disusun Renstra Terbatas DPU Kab. Tegal 2019-2024 guna menyusun indikator dan sasaran Program Jasa Konstruksi pada tahun-tahun selanjutnya.

Terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Jasa Konstruksi pada Bidang Jasa Konstruksi, Laboratorium, Monitoring, dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal di tahun 2020, baru sebatas layanan pemberian rekomendasi kepada para pemohon perpanjangan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari para penyelenggara Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal. Sampai dengan akhir tahun 2020 DPU Kab. Tegal telah menerima permohonan penerbitan rekomendasi dari 124 Badan Usaha dan telah diterbitkan rekomendasi sebanyak 122 buah rekomendasi atau 98,40% dari keseluruhan pemohon, 2 (dua) Badan Usaha tidak dapat diberikan rekomendasi dikarenakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki tidak dapat diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan pada akhir tahun 2019 DPU Kab. Tegal mendasari Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional telah memberikan layanan tersebut kepada 5 (lima) Badan usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meerojuk pada Pasal 9 ayat (1) yang disebutkan bahwa "Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; c. penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. Pada pasal (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

11) Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa nilai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

a. Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Beberapa dokumen RTR yang harus dan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 47 Jumlah Dokumen RTR Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Sampai 2020
1	RTR Wilayah (RTRW)	1						1
2	RTR Kawasan Strategis Kab (KSK)							
	KSK Ekonomi	9	0	0	0	0	0	0
	KSK Sosial Budaya	4	0	0	0	0	0	0
3	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)							
	Dok RDTR	18	4	5	5	0	0	18
	Perda RDTR	18	0	0	0	0	0	0
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	10	0	0	0	0	0	3

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Hanya 1 (satu) dokumen RTR yang sudah mendapatkan legalisasi hukum yaitu Perda 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang diperdakan, karena mengacu proses legalisasi Perda Revisi RTRW.

b. Pemanfaatan Ruang

Terbitnya Perda Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 bertujuan sebagai pedoman pemanfaatan ruang di Kabupaten Tegal agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdayaguna serasi selaras seimbang dan berkelanjutan, serta mampu mensejahterakan masyarakat. Sehingga walaupun dalam skala makro RTRW ini dijadikan sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khusus di Pemerintah Kabupaten indikator yang digunakan adalah pemanfaatan ruang dalam pengajuan permohonan Informasi Tata Ruang, agar tingkat ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang dapat tetap terkendali.

Tabel 2. 48 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tahun 2014-2020

Uraian	s/d 2019	2020
Total Pengajuan Permohonan ITR	n/a	1114
Pengajuan ITR yang Diperbolehkan	n/a	862
Pengajuan ITR yang Diperbolehkan Separuhnya	n/a	57
Pengajuan ITR yang Tidak Diperbolehkan	n/a	195
Persentase Ketaatan	n/a	79,93%

Sumber : Dokumen Penijauan Kembali (Dinas Perkimtaru), 2021

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 75% tingkat ketaatan tata ruang, di mana kondisi eksisting lahan tersebut merupakan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan oleh masyarakat yang telah sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang Perda RTRW ditunjukkan dengan jumlah pengajuan ITR yang tidak diperbolehkan sebesar 17,5%, sedangkan pengajuan ITR yang diperbolehkan separuh adalah pengajuan ITR dengan bidang tanah yang jatuh pada dua Zonasi Tata Ruang yang berbeda, dan persentase pembolehan pembangunan diberikan mengikuti luas bidang tanah yang sesuai dengan rencana peruntukan pembangunan yang ditentukan oleh masyarakat.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Kerusakan tempat tinggal merupakan salah satu dampak dari adanya bencana alam. Untuk tetap menjaga kualitas hidup masyarakat korban bencana maka pemerintah berupaya untuk menyediakan atau melakukan perbaikan rumah bagi para korban bencana. Data penyediaan dan rehab rumah bagi korban bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 49 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani pada Tahun n	N/A	27	N/A	5	11
Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n	N/A	27	N/A	5	11
% Capaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	N/A	100%	N/A	100%	100%

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Sumber dana bantuan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun 2017 dan 2019 berdasarkan data pada tabel diatas merupakan dari *corporate social responsibility (CSR)* dari Bank Jateng, sedangkan pada tahun 2020 bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2) Perumahan

Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat sangatlah penting, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena dapat mengurangi *backlog* di Kabupaten Tegal. Melalui pembangunan maupun pengembangan perumahan juga dapat meningkatkan lingkungan yang tertata. Data pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Setiap Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	17	24	29	29	62
Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	17	24	29	29	62
% Capaian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Dari data tabel diatas dapat terlihat jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Tegal selalu mengalami kenaikan. Dengan hal tersebut maka angka *backlog* di Kabupaten Tegal dapat berkurang.

3) Kawasan Kumuh

Luas dan sebaran lokasi kumuh di Kabupaten Tegal telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 484 Tahun 2015 yang telah direvisi dengan Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal, berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya pengurangan lahan kumuh tersebut, luas dan sebaran pengurangan Kawasan kumuh di Kabupaten Tegal tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 51 Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas sesuai SK 239/2016	Kondisi Sampai 2020				Kondisi Sampai 2020
			2017	2018	2019	2020	
1	Adiwerna	166,5	166,5	166,5	97,74	120,55	45,95
2	Dukuhturi	53,2	53,2	53,2	1,32	14,87	38,33
3	Jatinegara	18,4	18,4	18,4	0	0,19	18,21
4	Kedungbanteng	30,4	30,4	30,4	0	-27,96	58,36
5	Kramat	18,5	18,5	18,5	6,72	6,54	11,96
6	Lebaskiu	68,9	68,9	68,9	0	21,17	47,73
7	Slawi	28,5	28,5	28,5	4,2	16,11	12,39
8	Suradadi	48,6	48,6	48,6	0	-4,53	53,13
9	Talang	32,5	32,5	32,5	2,2	23,79	8,71
10	Tarub	9,88	9,88	9,88	0	0,92	8,96
11	Warureja	12,4	12,4	12,4	0	1,36	11,04
	Total	487,78	487,78	487,78	112,18	173,01	314,77

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Dari luasan kawasan kumuh 487,78 Ha telah terjadi penurunan luas kawasan kumuh seluas 205,50 Ha (42%). Hal tersebut dilakukan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa, sehingga sampai dengan akhir Tahun 2020 luas kumuh di kabupaten Tegal menjadi 314,77 Ha.

4) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mendasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten tercatat sebesar 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT) terdiri dari:

- a. Prioritas Utama adalah Kelompok Rumah Tangga yang mempunyai tingkat keparahan (7 Indikator) tidak layak sebanyak : 1.331 KRT
- b. Prioritas 1,10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT
- c. Prioritas 2,10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT

Tabel 2. 52 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah RTLH Komulatif setiap Tahun (KRT)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Data RTLH 40% desil terendah	42.675	42.675	42.675	42.675	42.675
Kumulatif Realisasi RTLH	437	845	2.323	4.585	5.575
% Capaian RTLH	1,02	1,98	5,44	10,74	13,06

Sumber : Olah data SIMAS, 2021

Untuk prioritas utama RTLH di Kabupaten telah ditangani secara tuntas pada Tahun 2015, sedangkan 2016 – 2020 sasaran RTLH adalah KRT yang berada pada prioritas I yaitu 10 persen kelompok termiskin dari PBDT. Besaran Anggaran alokasi RTLH Kabupaten Tegal mulai tahun 2016 sebesar Rp. 20 Juta per KRT. Angka ini lebih tinggi dari alokasi Pemerintah Pusat sebesar Rp. 17,5 Juta dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 10 Juta.

5) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi.

Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap jaringan PSU berupa jaringan jalan, jaringan listrik, Ruang Terbuka Hijau/Non Hijau, serta akses terhadap jaringan air minum dan sanitasi. Dari jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal yang berjumlah 387.253 unit, capaian ketersediaan PSU tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 53 Capaian Akses PSU Tahun 2016 - 2020

Uraian	Capaian Akses PSU									
	2016		2017		2018		2019		2020	
		%		%		%		%		%
Jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	387.253	-	387.253	-
Jumlah rumah tangga/KK di Kabupaten Tegal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	499.489	-	534.004	-
Jumlah rumah yang difasilitasi air minum (unit)	N/A	N/A	N/A	N/A	194.068	50,11	198.032	51,13	213.228	55,06
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses sanitasi (KK)	N/A	N/A	N/A	N/A	347.335	77,83	423.229	83,7	379.818	84
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses listrik (KK)	N/A	N/A	335.635	N/A	355.124	N/A	367.421	94,87	367.421	94,87
Capaian Akses PSU Keseluruhan (%)	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	76,56	-	77,97

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Dari data tersebut, dapat disimpulkan tidak meratanya ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal. Maka dari itu diperlukan suatu upaya mencapai ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal, salah satunya dengan melakukan perencanaan pengembangan PSU yang berkualitas.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah untuk meningkatkan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga diseluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam dan PKL yang berjualan disepanjang bahu jalan, sesuai SPM patroli dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2016 hanya 41 % sedangkan tahun 2020 sebesar 72%

Tabel 2. 54 Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	444	630	767	730	730

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	41	58	70	67	67
4.	Persentase Laporan Pengaduan Gangguan Trantibum yang tertangani	65%	76%	81%	84%	82%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga untuk periode yang akan datang agar bisa meningkat.

2) Penegakan Perundang-undangan Daerah

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2016-2020 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 55 Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penegakan Perda					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	293	503	108	110	129
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	192	371	82	96	107
	c. Penyelesaian Penegakan Perda (%)	65,53	73,76	76	87,2	83
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	597	1.756	1673	1.623	1669
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	180	1.688	1603	1.587	1604
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	88,23	96,13	96	97,7	96
3	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2016 dibandingkan sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga perlu ada penanganan yang lebih intensif dan perlu kerjasama yang baik agar penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat, serta perlunya dukungan tenaga PPNS dan

anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi. Perda yang ditegakkan di tahun 2020 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Penegakan Trantibum dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan.

Penegakan peraturan perundang-undangan dan patroli dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum merupakan upaya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari tabel di atas dapat di diskripsikan bahwa antara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan jumlah warga negara yang akan terlayani dan mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada adalah sama yaitu 100 % (seratus persen).

3) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kenaikan sejalan dengan upaya-upaya pembinaan, dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah rawan bencana. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman pada masyarakat.

Tabel 2. 56 Pelayanan Informasi Penanganan Bencana Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	293.904	309.372	325.655	342.795	360.837
Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	50,30	52,94	55,73	58,66	61,75

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2021

4) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyiapan kesiapsiagaan masyarakat dalam bentuk pembinaan, pelatihan, simulasi dan gladi kesiapsiagaan dan sosialisasi. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan khususnya bagi masyarakat di daerah rawan bencana

Tabel 2. 57 Persentase Peraturan Penanganan Bencana

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah warga negara yang ikut pembinaan	6.244	6.573	6.919	7.283	7.666
Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase warga negara yang ikut pembinaan penanggulangan bencana	1,07	1,12	1,18	1,25	1,31

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2021

5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyelamatan dan pemberian bantuan peralatan dan logistik. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas personal, bantuan material, peralatan dan logistik bagi korban bencana.

Tabel 2. 58 Persentase Penanganan Bencana

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi	40.238	42.356	44.585	46.932	49.402
Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	233.597	233.597	233.597	233.597	233.597
Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	17,23	18,13	19,09	20,09	21,15

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2021

Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tegal antara lain kekeringan di kecamatan-kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Berikut disajikan data kebencanaan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 59 Kondisi Kebencanaan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Tangguh Bencana	0	2	2	2	2
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Milyar)	4,1	4,5	6,5	5,7	6,8
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten	1	1	1	1	1
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,21	0,15	0,2	0,3	0,4

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2021

Desa tangguh bencana saat ini masih belum menyeluruh di desa-desa kawasan rawan bencana. Desa tangguh bencana masih merupakan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun yang akan datang diharapkan desa tangguh bencana dapat meningkat dengan memanfaatkan penganggaran melalui APBDesa.

Terkait dengan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum aspek kebencanaan memiliki (3) tiga indikator yaitu pelayanan informasi rawan bencana yang capaiannya pada tahun 2020 sebesar 65% dari 379.828 dari 584.336 penduduk yang berhak informasi rawan bencana telah mendapatkan informasi tersebut. Indikator kedua yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capaiannya masih rendah hanya 1,38% pada tahun 2020 yaitu baru 8070 penduduk dari 584.336 penduduk yang berhak mendapat layanan. Dan yang ketiga adalah penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 22,26% dari 52.002 penduduk yang telah mendapat atau ditolong dan dievakuasi dari perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana sebanyak 233.597 jiwa.

6) Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran antara lain untuk meningkatkan rasio Linmas per RT dan penanganan kebakaran di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2020 rasio tersebut mencapai 1 : 1,06. Hal ini berarti bahwa untuk setiap RT di Kabupaten Tegal tersedia jumlah Linmas sebanyak 1 orang lebih. Rasio ini lebih besar bila dibandingkan dengan yang ada dalam Permendagri Nomor : 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menargetkan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 orang setiap RT. Rasio Linmas Terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 576 orang sedangkan jumlah Linmas sebanyak 7.295 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebesar 1:12. Jumlah penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mencapai 42 kebakaran, kebakaran yang tertangani 100%. Pada tahun 2020 terjadi kebakaran sebanyak 56 kejadian kebakaran jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 yaitu 193 kejadian kebakaran. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal. Penanganan bencana kebakaran akan bertambah baik apabila Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terpenuhi yaitu ada 9 WMK, maka perlu penambahan mobil pemadam kebakaran (1 pos WMK 1 mobil Damkar), mobil yang dimiliki sekarang berjumlah 5 unit sehingga masih kurang 4 unit mobil Damkar. Juga perlu ada penambahan SDM pemadam kebakaran (1 pos WMK membutuhkan 18 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. 60 Rasio Jumlah Linmas per RT Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.206	7.234	7.295	7.295
2.	Jumlah RT	6.860	6.875	6.889	6.889	6.889
3.	Rasio jumlah Linmas per RT	1:1,05	1:1,05	1:1,06	1:1,06	1:1,06

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Rasio jumlah Linmas per RT dari tahun ke tahun cenderung tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas per RT mengalami kenaikan.

Tabel 2. 61 Rasio Jumlah Linmas Terlatih Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.206	7.234	7.295	7.295
2.	Jumlah Terlatih	180	240	320	480	576
3.	Rasio jumlah Linmas Terlatih	1:40	1:30	1:22	1:15	1:12

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Rasio jumlah Linmas terlatih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun belum semua melaksanakan pelatihan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas terlatih mengalami kenaikan.

Tabel 2. 62 Kasus Kebakaran Tertangani Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kebakaran	78	99	153	193	56
2.	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate 15 Menit</i>)	42	56	88	169	44
3.	Persentase Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate 15 Menit</i>)	54%	57%	58%	88%	79%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, ini merupakan usaha yang harus ditingkatkan agar untuk tahun-tahun mendatang semua jenis kebakaran bisa ditangani secara maksimal, sehingga resiko kebakaran bisa ditekan sekecil mungkin.

F. Sosial

1) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perseorangan, lembaga, kelompok, keluarga dan masyarakat agar memiliki daya guna untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hasil Pemberdayaan Sosial dapat dilihat dalam Tabel berikut, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan dapat meningkatkan kapasitas PSKS.

Tabel 2. 63 Data Layanan Pemberdayaan Sosial PSKS Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial.	2.025	2.025	1.925	1.875	1.763
2.	Jumlah Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang sudah dibina dan diberdayakan	0	572	572	572	572
3.	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	0	28,25	29,71	30,51	32,44
4.	Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang seharusnya diberdayakan	2.050	2.050	2.145	2.145	2.100
5.	Cakupan Pemberdayaan Sosial	98,78	98,78	89,74	87,41	85,71

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2021

Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Sumber Dana Sosial yang diberdayakan semakin berkurang, hal ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Sosial terhadap PSKS belum optimal dikarenakan :

- 1) Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum Simultan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 2) Belum semua LKSA melaksanakan Standar Nasional Pelayanan Anak (SNPA);
- 3) Belum semua LKS melaksanakan Standar Pelayanan Sosial yang telah ditetapkan/Terakreditasi;
- 4) Ijin Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan secara prosedural.

Adapun Upaya yang harus dilakukan :

1. Meningkatkan peran dan fungsi Pilar-pilar Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, termasuk Dunia Usaha yaitu dengan meningkatkan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum simultan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna (Katar), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), Dunia Usaha dan Kelompok-kelompok Sosial Berbasis Masyarakat diantaranya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat WKSBM (Kelompok Arisan, Pengajian, Usaha Kecil) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.
3. Melakukan bimbingan manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak / agar tertib administrasi dan meningkatnya pengelolaan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai Standar Nasional Pelayanan Anak .
4. Melakukan bimbingan manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial agar tertib administrasi dan meningkatnya pengelolaan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai Standar Pelayanan Sosial.

Pengenalan dan sosialisasi kepada petugas (Perbankan dan Dunia Usaha) yang melakukan/menghimpun sumber dana yang berasal dari masyarakat agar tertib dalam perijinan dan usaha pengumpulan sumber dana yang berasal dari masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan sosial.

2) Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan

Warga Migran adalah Warga negara Indonesia yang sedang atau akan melaksanakan suatu pekerjaan di luar Wilayah Indonesia dengan mendapatkan upah, namun karena sesuatu hal kadang mereka menjadi korban tindak kekerasan di negara lain , mulai dari kekerasan fisik maupun mental sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi para migran dari korban kekerasan.

Tabel 2.64 Data Warga Migran Korban Kekerasan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang ditangani	20	-	9	-	11

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang seharusnya ditangani	20	-	9	-	11
3.	Cakupan Penanganan Warga Migran Korban kekerasan	100	-	100	-	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2021

Kasus kekerasan terhadap warga migran yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 Tahun cukup menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, Meski kasusnya tidak terlalu banyak namun hal ini terjadi hampir setiap tahun, sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial perlu memfasilitasi pemulangan warga migran hingga ke tempat asalnya serta melakukan pendampingan kepada warga migran yang mengalami trauma akibat kekerasan, meski pelayanan penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan dirasa belum optimal dan masih ditemukan banyak kendala diantaranya :

1. Adanya status migran ilegal menjadikan kesulitan dalam penanganan.
2. Belum adanya sistem penanganan Warga Migran yang menjadi korban kekerasan.
3. Belum adanya anggaran sehingga menjadi kendala dalam penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan.

Upaya yang harus dilakukan :

1. Memberikan Edukasi kepada masyarakat tentang prosedur menjadi Tenaga Kerja di luar negeri.
2. Dibangunnya sistem atau prosedur Penganganan warga migran yang menjadi korban kekerasan.
3. Di anggaran melalui APBD II.

3) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, yang terdiri dari Rehabilitasi Sosial Dasar yaitu upaya yang dilakukan untuk melakukan fungsi sosial seseorang dan Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang. Rehabilitasi Dasar diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu Anak Terlantar, Usia Lanjut, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yang dilakukan dalam bentuk memberikan dukungan pelayanan dan pendampingan kepada PPKS dan memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Lembaga yang telah ditetapkan Pemerintah dan / atau Pusat Kesejahteraan Sosial. Layanan tersebut berupa data dan pengaduan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Rehabilitasi Sosial Lanjut dilaksanakan oleh UPT setingkat eselon II yaitu di Balai Besar Rehabilitasi Sosial dan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional

Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial dilakukan pada rumah singgah atau pusat kesejahteraan sosial. Dalam pengembangan Layanan

Sosial Kabupaten Tegal telah memiliki Rumah Perlindungan Sosial Sementara / Rumah Singgah cukup representative yang terletak di Kecamatan Pangkah, dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan sosial terkait dengan penanganan PPKS yang memerlukan tempat perlindungan sementara, karena kondisi atau Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Pusat, Provinsi atau Masyarakat belum mampu menerima secara keseluruhan karena over kapasitas. Pusat kesejahteraan Sosial, saat ini ada 12 (dua belas) telah terbentuk di desa/ kelurahan, dan adanya dukungan aksesibilitas sebagai upaya untuk membantu PPKS sehingga memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai jenis layanan diantaranya sosialisasi, advokasi sosial dan fasilitasi.

Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten Tegal, telah memiliki Gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan / atau pertanyaan yang disampaikan masyarakat, mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasar

Layanan kedaruratan, merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan kepada PPKS yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang meliputi : permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan NIK, KK, akta kelahiran, surat nikah, KTA, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan rujukan, diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan/ atau atau relawan sosial, Kabupaten Tegal dalam Program *Three J* (Tiga Jaminan : Jaminan Kesehatan, Jaminan Rumah dan Jaminan Hidup), tengah menangani Program Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia.

Hasil dari upaya penanganan dapat dilihat dalam data Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti pada tabel, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun terdapat peningkatan keberfungsian sosial PPKS.

Tabel 2. 65 Layanan PPKS Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS	1.875	1.925	1.925	1950	1975
2.	Jumlah PPKS yang seharusnya direhabilitasi Sosial	1.982	2.000	2.000	2025	2050
3.	Cakupan Rehabilitasi Sosial PMKS	94,60	96,25	96,25	96,29	96,34

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

Cakupan akses layanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak terlantar, Usia Lanjut terlantar, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial masih perlu ditingkatkan Hal ini disebabkan karena :

1. Keterbatasan SDM bidang Kesejahteraan Sosial yang berpengaruh terhadap kecepatan dan Ketepatan Penanganan Masalah Sosial.
2. Terbatasnya Kuota layanan di Panti / Balai Rehabilitasi Sosial sebagai penerima rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) milik.
3. Masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan layanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial termasuk pemenuhan alat bantu Pemerintah Provinsi /Kementrian Sosial.

4. Belum adanya Identitas kependudukan menjadikan kendala dalam mengakses layanan sosial.

Adapun Upaya yang harus dilakukan :

1. Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang kesejahteraan sosial melalui formasi ASN.
2. Melakukan Kerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial baik milik Pemerintah Provinsi /Kementerian Sosial.
3. Menyiapkan Anggaran untuk Fasilitasi atau rujukan, penjangkauan dan pemenuhan alat bantu.
4. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4) Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Fakir miskin, beresiko sosial, rentan sosial dan anak terlantar , adapun upaya yang telah dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta Pendataan Fakir Miskin tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 66 Layanan Perlindungan Sosial

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kelompok Beresiko Sosial	63.450	63.825	63.824	74.292	141.368
2.	Jumlah Penanganan Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial	63.725	63.845	63.850	72.898	169.739
3.	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,57	99,97	99,96	101,91	83,28

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 2. 67 Data Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	623.456	688.943	697.893	723.590	701.931
2.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang seharusnya ditangani	698.425	714.497	722.124	741.879	776.209
3.	Cakupan Penanganan Fakir Miskin	89,26	96,42	96,64	97,50	90,43

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel di atas menggambarkan bahwa sasaran program perlindungan dan Jaminan Sosial semakin meningkat , sehingga akses Cakupan layanan Sosial harus semakin ditingkatkan mengingat belum semua masyarakat yang layak dan kategori pra sejahtera mendapatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial secara komprehensif, dengan melalui Pendataan Fakir Miskin secara berkala.

Ketidakkuratan data sasaran antara lain disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya SDM IT Operator Data di Tingkat Desa.Kelurahan sehingga proses ekspor Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG menjadi terhambat.
2. Masih Terbatasnya sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pepadanan Data membutuhkan waktu lama karena Sarana Pengolah Data (Spesifikasi Perangkat *Hardware*) kurang mendukung.
3. Masih adanya *inclusion error* dan *exclusion error* dimana masyarakat yang sudah tidak layak /mampu masih masuk di DTKS sebagai penerima Bansos sementara masyarakat yang layak mendapatkan Program penanganan Fakir Miskin namun belum Masuk DTKS.

Adapun Upaya yang harus dilakukan :

1. Melakukan Bimbingan Teknis tentang bagaimana proses expot Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG di Desa se Kabupaten Tegal.
2. Mengajukan Anggaran Pengadaan sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pepadanan Data lebih optimal dan akurat.
3. Melakukan Koordinasi dari tingkat Desa sampai tingkat Pusat guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
4. Pembuatan Akses data kependudukan melalui *website sidanik.tegalkab.go.id* sebagai sarana operator Desa dalam melakukan Pepadanan NIK dan pencocokan data Kependudukan.

5) Penanganan Bencana

Bencana merupakan peristiwa alam yang tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi, yang berdampak besar terhadap masyarakat baik materiil maupun korban jiwa serta menimbulkan trauma kepada masyarakat korban bencana sehingga perlu adanya penanganan yang tepat dan cepat. berdasarkan Data tiga tahun terakhir Mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dapat kita lihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 68 Data Korban Bencana Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Korban Bencana yang ditangani	-	-	540	915	506
2.	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya ditangani	-	-	540	915	506
3.	Cakupan Penanganan Korban Bencana	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

Dari data tersebut diatas menggambarkan bahwa kasus kebencanaan di Kabupaten Tegal terjadi setiap Tahun dengan cenderung meningkat jumlah korbannya. Di tahun 2020 terjadi lonjakan yang sangat tinggi hal ini diakibatkan adanya Bencana Alam (Tanah longsor, Banjir, Puting beliung) serta Bencana Sosial (Kebakaran, Pandemi covid-19), Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial penanganan korban Bencana adalah dengan memberikan pemenuhan Kebutuhan Dasar (SPM) yang meliputi kebutuhan permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Namun Penanganan Kebencanaan di Kabupaten Tegal masih belum optimal Hal ini disebabkan karena :

1. Bantuan yang diberikan kepada korban bencana masih belum memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal.
2. Kapasitas pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana belum maksimal.
3. Koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu belum optimal.
4. Sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana belum representatif.
5. Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
6. Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bagi anak sekolah.

Adapun upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Meningkatkan persediaan barang kebutuhan logistik penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas SDM pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penanggulangan bencana.
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
5. Melakukan pembentukan dan pengembangan Kampung Siaga Bencana.
6. Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bagi anak sekolah.

6) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan Pura Kusuma merupakan lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional, anggota militer dan Pejabat Tinggi di wilayah Kabupaten Tegal.

Taman Makam Pahlawan Pura Kusuma juga dijadikan sebagai tempat ziarah ataupun kegiatan oleh masyarakat dan anak generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, sehingga akan muncul semangat patriotisme di kalangan generasi muda, untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan secara terus menerus untuk menjaga sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan supaya tetap berfungsi dengan baik.

Namun demikian pengelolaan Taman Makam Pahlawan dirasa belum optimal hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan
2. Taman Makam Pahlawan belum representatif
3. Kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
4. Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuang

2.3.2. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Perencanaan Tenaga Kerja

Peranan sumber daya manusia dalam pembangunan di berbagai bidang pada suatu negara tidak dapat terbantahkan. Sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan modal/kapital serta teknologi secara bersama-sama dan bersinergi berkontribusi terhadap terbentuknya Produk Domestik/Regional Bruto (PDB/PDRB). Besaran PDB/PDRB merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator makro ekonomi ini sekaligus dipandang sebagai tingkat kesejahteraan suatu wilayah/Negara. SDM secara makro merupakan penduduk suatu negara/wilayah yang sudah memasuki usia kerja, baik yang belum maupun yang sudah bekerja. Berdasarkan definisi menurut BPS, penduduk usia kerja yang siap memproduksi atau melakukan aktivitas ekonomi (*economically active population*) disebut angkatan kerja (*labor force*). Termasuk dalam penduduk golongan ini adalah mereka yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disebutkan pada Pasal 7, bahwa:

- 1) Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
- 2) Perencanaan Tenaga Kerja meliputi Perencanaan Tenaga Kerja Makro, dan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro.
- 3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja.

Pada prinsipnya pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini karena tenaga kerja selain penting peranannya dalam proses produksi juga merupakan subyek dari objek pembangunan suatu wilayah. Sebagai subyek pembangunan, tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai obyek pembangunan, tenaga kerja merupakan sasaran akhir bagi peningkatan kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pembangunan bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan secara konsisten dan terarah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tenagakerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan perlindungan tenaga kerja melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efektif.

2) Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja yaitu rasio antara jumlah produk domestik regional bruto dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai tingkat produktivitas semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Tabel 2.69 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDRB Kabupaten (juta)	21.182,92	22.322,10	23.552,55	24.866,73	24.502,62
2	Total Penduduk yang bekerja	569,566	645,162	630,593	645,698	644,978
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (ribu)	37.190	34.599	37.349	38.510	37.990

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

3) Kompetensi Tenaga Kerja

Mendasari data pencari kerja dan penempatan tenaga kerja pada tahun 2016-2020, diketahui bahwa pencari kerja di Kabupaten Tegal masih tinggi sedangkan angka penempatan tenaga kerja masih relatif rendah, hal ini salah satunya dikarenakan keterbatasan dalam keahlian (*low skilled*) dari tingkat pendidikan dan /atau keterampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Permasalahan ini yang diduga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja. Berikut ini data terkait lowongan tenaga kerja yang dapat menggambarkan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja salah satunya menurut golongan lapangan usaha.

Tabel 2.70 Lowongan Kerja yang Terdaftar, Ditempatkan dan Dihapuskan Menurut Golongan Lapangan Usaha Kabupaten Tegal Bulan Januari - Desember Tahun 2020

Golongan Pokok Lapangan Usaha	Sisa akhir bulan lalu		Lowongan terdaftar bulan ini		Lowongan dipenuhi bulan ini		Lowongan dihapuskan bulan ini		Sisa lowongan akhir bulan ini	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12	-	22	-	22	-	-	-	12	-
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	369	247	717	755	882	945	-	-	204	57
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah Dan Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	120	120	85	211	85	211	-	-	120	120

Golongan Pokok Lapangan Usaha	Sisa akhir bulan lalu		Lowongan terdaftar bulan ini		Lowongan dipenuhi bulan ini		Lowongan dihapuskan bulan ini		Sisa lowongan akhir bulan ini	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Transportasi dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	216	564	64	53	64	53	-	-	216	564
<i>Real Estate</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	300	144	1	1	1	1	-	-	300	144
Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48
Jasa Pendidikan	648	180	-	-	-	-	-	-	648	180
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	552	348	-	-	-	-	-	-	552	348
Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Jasa Lainnya	24	-	-	12	-	12	-	-	24	-
Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	12	24	3	53	3	53	-	-	12	24
Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.253	1.675	896	1.085	1.061	1.275	-	-	2.088	1.485

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

4) Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 sangat bervariasi, pada kurun waktu Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan hal ini karena didukung adanya pelaksanaan *Job fair* dan Penempatan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) namun pelaksanaannya tidak rutin setiap tahun, sehingga pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Secara rinci persentase pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.71 Data Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

Tahun	Jumlah Pencaker	Penempatan					Total Penempatan	Persentase Penempatan
		AKL	AKAD	AKAN	BKK	<i>Job Fair</i>		
2016	11,788	129	91	493	-	-	713	6,04
2017	16,077	124	231	653	3,537	10	4,555	28,33
2018	15,464	942	1,589	1,866	3,116	870	8,383	54,21
2019	10,432	1,179	932	669	-	-	2,780	26,65
2020	15,189	1,493	1,020	193	-	-	2,706	17,82

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

5) Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja, namun adakalanya dalam pelaksanaannya sering terjadinya perselisihan, beberapa indikator dalam pelaksanaan Hubungan Industrial antara lain:

a. Tingkat Peraturan Perusahaan yang Disahkan

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki peraturan perusahaan dengan total perusahaan wajib lapor.

Tabel 2.72 Perusahaan Wajib Lapor Memiliki Peraturan Perusahaan di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	433	667	667	468	382
2	Perusahaan Wajib lapor memiliki peraturan perusahaan	433	667	667	468	382

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

b. Tingkat Perjanjian Kerja Bersama

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan total perusahaan wajib lapor.

Tabel 2.73 Perusahaan Wajib Lapo Memiliki Perjanjian Kerja Bersama di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapo	433	667	667	468	382
2	Perusahaan Wajib lapo memiliki Perjanjian Kerja Bersama	6	6	4	4	5

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

c. Tingkat LKS Bipartit

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapo yang memiliki LKS Bipartit dengan total perusahaan wajib lapo.

Tabel 2.74 LKS Bipatrit di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapo	433	667	-	-	-
2	Perusahaan Wajib lapo memiliki LKS Bipartit	13	14	15	21	24

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

d. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial

Merupakan rasio antara jumlah perselisihan Hubungan Industrial dengan total perusahaan wajib lapo.

Tabel 2.75 Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapo	433	667	-	-	-
2	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	6	8	14	16	27

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai capaian kinerja pemberdayaan perempuan 2016-2020. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 -2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	350	400	700	700	940
2.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS (Jiwa)	5.388	5.926	5.341	4862	4859
3.	Jumlah Perempuan sebagai Anggota DPRD (Jiwa)	10	10	10	12	12
4.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif (%)	20	20	20	24	24

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi.

Perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) menduduki posisi manajer cukup mendapat tempat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Tegal. Kondisi kinerja selalu meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dicermati dalam gambar berikut.

Tabel 2. 77 Perempuan ASN sebagai Manajer Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	26.13	26.75	27.95	28.69	28,83

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2021

Keberadaan perempuan ASN menduduki posisi manajer dimungkinkan karena kapasitas ASN perempuan tidak kalah bersaing dengan ASN laki-laki dari segi kapasitas, kompetensi dan kepemimpinan. Sehingga penempatan jabatan ASN perempuan dapat diterapkan, meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan yang dilaksanakan harus berpijak pada perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Sebagai bentuk upaya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah ditunjukkan dengan anggaran responsif gender (ARG). Berikut ini Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 78 Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Persentase ARG				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD			36.547. 450.000	248.727. 027.000	491.396. 436.000
2.	Belanja operasi APBD	1.546.321. 787.664	1.611.513. 759.083	1.704.320. 211.333	1.776.181. 411.040	1.830.927. 981.000

No.	Uraian	Persentase ARG				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Persentase ARG terhadap belanja Operasi APBD	NA	NA	2,14	14,00	26,84

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

2) Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi Negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga.

Tabel 2. 79 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan	59	90	42	54	40
2.	Jumlah Penduduk Perempuan	718.873	721.004	722.920	753.718	774.913
3.	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	8,21	12,48	5,81	7,16	5,16

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

3) Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun yang memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi dan selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/ memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kemen PPPA telah menyiapkan program unggulan PUSPAGA untuk mengatasi masalah tersebut.

Program peningkatan kualitas keluarga merupakan program yang baru dilaksanakan mulai tahun 2020 di Kabupaten Tegal berupa pelayanan konseling kepada keluarga, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 80 Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan konseling	-	-	-	-	203

No.	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah keluarga	428.261	-	517.914	534.392	538.160
3.	Persentase pelayanan peningkatan kualitas keluarga	NA	NA	NA	NA	0,04

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

4) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Tujuan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data informasi gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun program/kegiatan yang responsife gender dan peduli hak anak. Berikut pencapaian pengelolaan sistem data gender dan anak di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

Tabel 2.81 Pencapaian Pengelolaan Data Gender dan Anak Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lembaga/ instansi yang menyediakan atau memberikan data gender dan anak	15	15	15	15	15
2.	Jumlah lembaga/ instansi	48	48	48	48	48
3.	Persentase penyediaan dan pengelolaan data gender dan anak	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

5) Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati Tabel berikut.

Tabel 2. 82 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	300	400	500	550	570
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	4,18	5,22	6,62	20,6	20,64
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	1,33	1,39	1,39	4,9	4,88
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	2	5	5	5,1	9

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	50	100	100	120	75
6.	Persentase Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk. Kecamatan	0	2	2	27,8	28

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

6) Perlindungan Khusus Anak

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2. 83 Persentase Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Tegal 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Anak yang mengalami kekerasan	65	78	19	46	36
Jumlah Anak seluruhnya	493.169	488.628	483.936	479.168	474.291
Persentase kekerasan terhadap anak	0,0132	0,0160	0,0039	0,0096	0,0076

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2021

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penanganan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2016 jumlah laporan cukup tinggi, dan pada tahun-tahun selanjutnya jumlah laporan menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum.

C. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Ketersediaan pangan suatu wilayah didasarkan pada ketersediaan pangan utama, jumlah konsumsi pangan dan jumlah penduduk. Tabel berikut memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 84 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama(ton)	214.863	221.533	221.928	222.421	223.568
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.440.698	1.596.996
3.	Jumlah Komsumsi Pangan Utama(ton)	133.156	133.155	134.588	135.987	136.481
4.	Ketersediaan Pangan Utama (ton) terhadap Jumlah Komsumsi Pangan Utama	161,36	166,37	164,89	163,56	163,80

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal terus meningkat dapat dilihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Jumlah ketersediaan pangan utama 223.568 ton dan jumlah penduduk 1.596.996 Jiwa, secara otomatis konsumsi pangan utama meningkat menjadi 136.481 dengan ketersediaan pangan utama mencapai 163.80 persen.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan pangan dihitung dengan mempertimbangkan dari 1) sisi permintaan (*demand*) dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk, indeks konsumsi beras penduduk pertahun dan 2) sisi ketersediaan (*supply*) dengan mempertimbangkan produksi padi, produksi beras dan tingkat produktifitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras.

Kebutuhan total beras di tahun 2031 sebesar 187.820,44 ton sedangkan ketersediaan padi di tahun 2031 sebesar 1.440.981,12 ton dan ketersediaan beras di tahun 2013 sebesar 936.637, 65 ton. Dari hasil perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Tegal, dapat diketahui bahwa Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat. Sedangkan untuk posisi daya dukung lahan sawah sampai akhir tahun perencanaan mempunyai nilai $\alpha > 1$, berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

2) Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal

Pangan merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas serta perbaikan kualitas penduduk. Distribusi dan akses pangan memiliki peranan yang sangat strategis karena mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan. Tabel berikut menjelaskan tentang Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Tabel 2. 85 Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Distribusi dan Akses Pangan					
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	48,28	49,95	77,68	104,22	105,23
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	87,07	85,14	98,67	91,64	93,52

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan					
	Skor pola pangan harapan	83,8	83,6	72,1	78,6	80,4,
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	73,58	-	-	-
3.	Penanganan kerawanan pangan					
	Penanganan daerah rawan pangan	7	16	9	15	11

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Indikator dari jenis pelayanan Distribusi dan Akses Pangan adalah Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. Target komoditas yang wajib dipantau untuk diketahui informasi pasokan, harga dan akses adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah.

Indikator dari jenis pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

Indikator dari Penanganan Kerawanan Pangan pada Tahun 2018 sebanyak 15 Desa, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 11 Desa. Dukungan untuk pencapaian jenis pelayanan ini antara lain dengan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Kabupaten Tegal.

3) Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

D. Pertanian

Urusan pertanian berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanian maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanian serta memfasilitasi kegiatan pemetaan dan identifikasi penggunaan bidang – bidang yang dimiliki oleh masyarakat, serta identifikasi/pemetaan bidang tanah milik pemerintah dan pengurusan sertifikasi tanah – tanah tersebut.

Tabel 2. 86 Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan bidang tanah (penggunaan lahannya)	0	0	0	0	0
2	Jumlah Bidang tanah masy yang difasilitasi Pemerintah untuk sertifikat / Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	3.250	5.000	25.000	45.000	28.000
3	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan tanah asset milik pemerintah	NA	NA	NA	NA	3
4	Jumlah Bidang Tanah Milik Kabupaten	1.593	1.593	1.593	1950	1925
	a. Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	567	1077
	b. Belum Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	1383	848
	Persentase Tanah Milik Kabupaten yang bersertifikat				29,08	55,95
5	Persentase Penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPN dan Dinas Perkimtaru Kab. Tegal, 2021

Pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dengan BPN/ATR Kabupaten Tegal untuk memetakan semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Tegal hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan nilai zona masing – masing bidang tanah. Selanjutnya bidang – bidang tanah tersebut difasilitasi oleh BPN/ATR untuk proses sertifikat kepemilikannya melalui program PTSL.

Selain itu juga memetakan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Yang selanjutnya khusus untuk tanah milik pemerintah kabupaten akan dilakukan percepatan dalam pengurusan sertifikat kekanya. Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir hanya mampu menyelesaikan hak atas tanah milik Pemda dengan jumlah 1052 bidang atau sekitar 53,9 % dari jumlah total bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Urusan penyelesaian ganti rugi / santunan tanah untuk pembangunan atau untuk kepentingan umum. Dari hasil identifikasi paling tidak dibutuhkan tanah untuk pembangunan pembangunan jalan baru, pasar, tempat pembuangan sampah, fasilitas kesehatan dan balai benih ikan dengan luasan sekitar 5,9 hektar. Sedangkan sampai tahun 2020 baru tercapai 11%.

E. Lingkungan Hidup

1) Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup

Sampai dengan tahun 2020 dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup baru tersusun 2 dokumen.

2) Tata Lingkungan

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal sudah mengacu pada wawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini sudah ditunjukkan mulai tahun 2018 dalam berbagai kegiatan seperti penyusunan KLHS

pada Perda RTRW 1 paket, penyusunan RDTR Kecamatan 1 Paket dan penyusunan KLHS RPMJD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Lingkungan (Kerusakan Biomassa) telah dilakukan sejak Tahun 2017 dan 2018 untuk 2 lokasi, sedangkan Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran limbah B3 tahun 2018 untuk 1 lokasi. Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan untuk selama 5 tahun terakhir tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2. 87 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)	64	70	55	72	57
2.	SPPL (usaha kecil/mikro)	107	140	151	364	506

Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2021

Kondisi tersebut diatas diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dari semula sebesar 63,78 (kurang) menjadi bernilai cukup (66,00 s/d 74,00) serta seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan perizinannya harus layak sesuai dengan lingkungan hidup.

3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi meningkatnya jumlah pemantauan lingkungan, meningkatkannya jumlah kampung iklim yang terbentuk, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meningkatnya jumlah usaha dan/kegiatan yang memiliki IPLC, dan menurunnya tingkat kerusakan lingkungan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

Tabel 2. 88 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemantauan lingkungan	65	54	55	68	0
2	Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair	4	9	3	4	8
3	Jumlah Pembinaan usaha	15	20	20	50	0
4	Jumlah Wilayah yang terkena Kerusakan Lingkungan	6	8	10	4	9

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2021

Perhitungan dari keenam jenis kajian dihasilkan rata-rata Pengendalian Kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal.

4) Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan

Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan pelaku

usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani melalui pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Beberapa raihan kinerja dalam bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan, termasuk di tingkat provinsi juara lomba kelurahan bersih hijau 1 kelurahan tahun 2017, juara Proklim 1 Kelurahan tahun 2016, Penerima Penghargaan Kalpataru 1 orang di tahun 2013 dan 2 orang di tahun 2015, Penerima Penghargaan Pelestari Sumber Daya Genetik 1 orang di Tahun 2015. Terkait penerapan sanksi administrasi di tahun 2015 sebanyak 21 buah, Tahun 2016 sebanyak 6 buah, Tahun 2017 sebanyak 18 buah terbanyak, dan Tahun 2018 mulai menurun menjadi 4 buah. Perusahaan yang mengikuti PROPERNAS sebanyak 2 di tahun 2013, 8 perusahaan di Tahun 2014, 11 Perusahaan di Tahun 2017 dan 2 perusahaan di tahun 2018. Properda diikuti sebanyak 5 perusahaan di Tahun 2015, 7 perusahaan di Tahun 2016, 10 Perusahaan di tahun 2017 dan 3 Perusahaan di tahun 2018. Penanganan dan / atau penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 3 ditahun 2017, 9 di tahun 2017 dan 7 di tahun 2018.

Tabel 2. 89 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Sekolah Adiwiyata					
	- Tingkat Nasional				2	-
	- Tingkat Provinsi	5	7	2	4	-
	- Tingkat Kabupaten	22	24	2	9	-
	Denominator : Sekolah	44	60	10	59	-
	potensi minat adiwiyata (dikali %)					
2.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan	30,3%	47,2 %	50,38 %	61,25	26,31
	Denominator : Total Perusahaan (dikali %)	(63 dri 208)	(110 dri 233)	(1310 dri 233)	(147 dari 240)	(15 dari 57)
3.	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Denominator :	6	18	4	1	7
	Hasil mapping sanksi administrasi (dikali %)					

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2021

5) Sampah Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.90 Volume Sampah Yang Terangkut per Hari Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (m ³)	289,89	347,00	512,37	566	578
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	458,00	496,00	640,46	573,41	583,79
3	Sampah terangkut	63,29	70,00	80,00	98,00	99,00

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

Dalam penanganan sampah menggunakan pendekatan berbasis *3R* yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) telah dibentuk Bank Sampah melalui komunitas sebanyak 120 unit di tahun 2018 ini. Dengan jumlah tersebut di harapkan dapat meningkat di tahun 2024, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.91 Bank Sampah Tahun 2016 - 2020

No.	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bank Sampah (unit)	86 unit	86 unit	120 unit	130 unit	140 unit
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit)	100 unit	100 unit	129 unit	135 unit	140 unit
3.	Bank Sampah yg dibentuk (%)	86	86	93	96	100

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah layanan pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan kependudukan.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan terlihat dari bertambahnya angka kepemilikan KK, KTP-el dan KIA. Hal ini berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan. Dukungan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan sangat penting dalam mewujudkan pelayanan dokumen kependudukan yang berkualitas.

Data jumlah kepemilikan KTP el, KK dan KIA mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 yang secara signifikan meningkat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 92 Kepemilikan KTP Elektronik, KK dan KIA Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kartu Keluarga (KK)	78,52	83,75	88,68	90,86	91,67
2.	Kepemilikan KTP el	84,21	73,42	84,13	97,08	99,68
3.	Kepemilikan KIA	-	7.415	-	9,68	21,80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kepemilikan dokumen kependudukan KK dan KTP-el setiap tahunnya meningkat. Namun demikian peningkatan hasil pelayanan pendaftaran penduduk di atas belum merata untuk seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Terutama untuk penduduk pada wilayah-wilayah yang jauh dari tempat pelayanan atau faktor lain seperti memiliki kebutuhan khusus, difable dan lain-lain. Oleh karena itu agar pelayanan pendaftaran penduduk tetap sampai kepada masyarakat, dibutuhkan pula dukungan dari perangkat daerah untuk menuntaskan target kepemilikan identitas penduduk bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Sementara itu pelayanan penerbitan KIA di Kabupaten Tegal dimulai pada tahun 2017, kemudian di tahun 2018 terhenti karena terkendala sarana dan prasarana pencetakan KIA. Tahun 2019 penerbitan KIA dapat berlangsung kembali karena telah tercukupinya kelengkapan dan peralatan yang mendukung, walaupun secara bertahap.

Dalam pelayanan pendaftaran penduduk dari segi Kualitas Layanan dan Responsibilitas masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pemberian informasi kepada masyarakat seperti sosialisasi belum maksimal sehingga masih ada masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan juga masih terdapat masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dengan tidak mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan, kurangnya optimalisasi akurasi dan validasi database kependudukan sehingga ada penduduk yang belum mendapatkan NIK secara Nasional atau masih memiliki NIK ganda, Letak geografis (tempat tinggal masyarakat dengan kecamatan menyulitkan masyarakat untuk melakukan perekaman KTP Elektronik.

2) Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan Catatan Sipil adalah pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk dalam register pencatatan sipil kemudian diterbitkan akta-akta Catatan Sipil. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Namun penggunaan akta-akta catatan sipil sering terabaikan karena penggunaannya kurang terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial maupun ekonomi. Sehingga perlu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya akta-akta pencatatan sipil. Angka kepemilikan akta kelahiran dan kematian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 93 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
Tahun 2016 - 2020**

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran	48,21	63,29	63,3	64,11	93,10
2.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kematian	N/A	N/A	N/A	N/A	68,54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah angka kepemilikan akta kelahiran cukup tinggi pada akhir tahun 2020. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melibatkan para stake holder, melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, melakukan kerja sama dengan perangkat daerah pendukung, pengembangan aplikasi SIAK melalui inovasi pelayanan on line dan inovasi layanan dengan sistem paket seperti LOAK (Lahir Olih Akta Kelahiran/Akta Kematian dan KK).

Upaya yang sama akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meningkatkan capaian kepemilikan akta kematian. Selama ini kendala utama dalam merumuskan capaian kepemilikan akta kematian adalah tidak tersedianya angka pembagi yaitu jumlah penduduk yang meninggal secara akurat. Data kematian selama ini diperoleh dari Laporan Kematian yang dikirim beberapa Kecamatan atau Desa/Kelurahan, tetapi tidak rutin dilaporkan dan informasi data penduduk meninggal tidak lengkap.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengembangan aplikasi SIREP (Sistem Registrasi Penduduk), sehingga Petugas Registrar Desa/Kelurahan dapat melaporkan peristiwa kematian penduduk cukup melalui aplikasi. Penggunaan aplikasi cukup efektif karena dalam tahun 2020 bisa dirumuskan capaian angka kepemilikan akta kematian dengan bilangan pembagi data kematian yang telah masuk dalam aplikasi SIREP. Data jumlah penduduk yang meninggal masih bisa terus bertambah, mengingat belum semua data kematian tercatat dalam aplikasi.

3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan, memiliki peran penting dalam mengelola informasi Administrasi Kependudukan. dengan menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan pada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. SIAK digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Agar pelayanan dapat berlangsung setiap waktu, SIAK perlu

didukung oleh sarana dan prasarana pendu yang memadai. Sarana dan prasarana pendukung SIAK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 94 Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK di Dinas Dukcapil dan Rumah Paten Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Layanan SIAK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Aplikasi pokok SIAK (unit)	3	3	3	3	7
2.	Aplikasi pendukung SIAK (unit)	2	2	3	4	4
3.	Jaringan SIAK (unit)	22	22	22	22	26
4.	Perangkat Keras SIAK (user)	26	29	33	34	72
5.	SDM IT SIAK (org)	2	2	3	4	4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa telah tersedia aplikasi pokok pelayanan administrasi kependudukan yaitu SIAK (Data Penduduk), *BCard* (Aplikasi Pencetakan KTP el) dan *Benroll* (Aplikasi Perekaman KTPel) dan aplikasi pendukung berupa Suplemen SMS *Gateway*, *Website*, Jaringan SIAK untuk setiap bidang dan 18 Rumah Paten. Aplikasi diatas hanya dapat digunakan dengan dukungan peralatan lain berupa personal komputer, printer, printer KTPel, jaringan kabel, *server*, kelengkapan internet dan lain-lain. Mengingat intensitas penggunaan peralatan yang sangat tinggi, maka sangat rawan terjadi kerusakan. Sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan IT.

Hasil dari pengelolaan informasi kependudukan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pemanfaat data yaitu OPD dan instansi lainnya (pemerintah dan swasta). Inovasi pada semua jenis produk layanan Adminduk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan/pelayanan Adminduk bagi Petugas selaku pengelola layanan dan Masyarakat selaku penerima layanan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan sinergitas semua bidang pada Disdukcapil dan OPD yang terkait.

Pemanfaatan data telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mulai tahun 2017 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pemanfaatan data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 95 Data Lembaga Pemanfaat Data, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dan Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah OPD pemanfaat data	-	20	20	20	20
2.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	-	3	7	13	14
3.	Jumlah Inovasi Pelayanan	-	2	3	3	4

NO	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah OPD pemanfaat data berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS)	-	-	1	2	3
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	-	-	5%	10%	15%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dapat disajikan tahun 2017 karena bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan baru terbentuk pada Januari 2017. Data rincian penduduk dapat diberikan dalam bentuk hak akses data yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selama ini lembaga terbanyak pemanfaat data adalah Desa.

Dalam perkembangannya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan terbitnya ketentuan yang baru ini, maka perjanjian kerja sama dan pemanfaatan data yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Desa seperti Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa serta Administrasi Pemerintahan Desa lainnya. Pada tahun 2015, Desa hanya memperoleh Dana ADD (Alokasi Dana Desa) antara Rp. 81.000.000 – 115.000.000. Salah satu faktor penting dalam Undang-Undang Desa adalah adanya Dana Transfer besar untuk pembangunan di desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Adapun alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan di Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 96 Alokasi Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Alokasi DD Dan ADD (X Rp 1.000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	DD - APBN	183.211.736	234.026.299	282.703.163	340.458.369	358.311.953
2.	ADD - APBD	120.409.105	120.521.520	118.087.607	122.510.452	125.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dana Transfer tersebut diatas tersalur 100% dari RKUD ke RKD, namun demikian penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu RKPDes dan APBDes sebagai syarat penyaluran dana transfer yang telah ditentukan batas waktu penyusunannya, yaitu RKPDes paling lambat disusun Akhir Oktober tahun berjalan dan APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun Berjalan dalam pelaksanaannya belum mematuhi ketentuan batas waktu. Adapun data Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut:

Tabel 2. 97 Dokumen Perencanaan Tingkat Desa Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	Jumlah Desa yg memiliki Dok Perencanaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	RKPDes;					
	1. Desember s/d Januari	75	100	125	150	281
	2. Pebruari s/d Maret	206	181	156	131	0
2.	APBDes					
	1. Januari s/d Pebruari	75	100	125	150	278
	2. Maret s/d April	206	181	156	131	3

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPdes dan APBdes disamping karena adanya peraturan yang baru juga karena kapasitas SDM di Pemerintah Desa yang masih minim dalam memahami sistem pemerintahan desa sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang baru, tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Berikut adalah Data penyampaian LPPD.

Tabel 2. 98 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Desa Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	Jumlah Desa yang Menyusun LPPD				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/LPPD					
	1) Januari –Maret	90	115	120	127	276
	2) > Maret	191	166	161	154	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa masih belum sesuai ketentuan. Pemerintah Desa masih dalam tahap awal inventarisir aset desa, belum dalam bentuk neraca aset desa. Dikarenakan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminstrasi Pemerintahan Desa di Ketentuan Bagian Kedua Adminstrasi Umum Pasal 5 Ayat 2 huruf c. Masalah Buku Inventaris dan Kekayaan Desa belum dilaksanakan dan baru dilaksanakan tahun 2017.

Tabel 2. 99 Data Pengelolaan Asset Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Desa yang Menyusun Data Aset Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Neraca Aset	0	5	10	15	20
2	KIB/KIR	0	25	50	65	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa ditandai jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya bertambah/meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan koordinasi semua *stake holder* yang terkait dengan Apartur Pemerintahan Desa. Mulai Tahun 2016 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan

kepala desa. Sebagai ilustrasi berikut tersaji data hasil kegiatan mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun terjadi perubahan/ peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

Tabel 2. 100 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Kapasitas Aparatur Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya (%)	15,75	38,17	50,15	55,19	56,25
1.	Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki kompetensi (%)	15,42	22,53	32,74	33,15	34,00
1.1	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	650	950	1380	1.680	1.780
1.2	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa	4215	4215	4215	4.232	2.439

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun semakin bertambah/meningkat. Dari kondisi awal pada tahun 2016 sebesar 15,75% semakin meningkat hingga pada tahun 2020 sebesar 56,25%.

Untuk mencapai kondisi tersebut telah dilakukan kerja keras semua stake holder yang terkait dengan Apartur Pemerintahan Desa mulai Tahun 2016 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut dengan telah dilaksanakannya berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa sebagaimana tersaji dalam tabel diatas.

Tabel 2. 101 Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemlihan Kepala Desa Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib (%)	0	100	100	60,57	0
2.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib	0	48	115	117	0
2.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	281	48	115	281	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pemilihan Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan serentak bergelombang, dengan dibagi pelaksanaannya menjadi 3 (tiga) gelombang berdasarkan masa bhakti/jabatan kepala desa pada setiap desa. Pelaksanaan gelombang I dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 48 desa, gelombang II pada tahun 2018 sebanyak 115 desa dan gelombang III tahun 2019 sebanyak 117 desa, sehingga total 281 desa telah terpilih kepala desa baru.

Tabel 2. 102 Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengadaan Perangkat Desa Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib (%)	0	100	100	95	96
3.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib	0	281	23	17	20
3.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan	281	281	23	281	20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pengadaan Perangkat Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pada tahun 2017 sebanyak 281 desa melaksanakan pengadaan perangkat desa guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru tentang SOTK Desa, tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 23 desa dan 17 desa, sedangkan tahun 2020 sebanyak 20 desa yang dilaksanakan dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang lowong karena purna tugas atau berhenti menjadi perangkat desa.

Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Desa ini dilaksanakan berdasarkan usulan permintaan dari desa bersangkutan dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan jumlah penduduk yang disesuaikan dengan SOTK Desa.

Tabel 2. 103 Jumlah Desa Yang Menyusun Peraturan Desa Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Desa tertib penyusunan Perdes (%)	8,54	9,60	11,03	11,07	11,15
4.1	Jumlah Desa yang menyusun Perdes sesuai Peraturan	24	27	31	33	35
4.2	Jumlah Desa yang melaksanakan penyusunan Perdes	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyusun peraturan desa dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 desa yang menyusun peraturan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan trend yang semakin baik.

Tabel 2.104 Jumlah Desa yang Menyediakan Data Perkembangan Desa Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Desa tertib menyediakan data perkembangan Desa (%)	48,04	60,49	80,07	90,15	98,93
5.1	Jumlah Desa yang menyajikan data perkembangan Desa dengan benar	135	170	225	253	278
5.2	Jumlah Desa yang dievaluasi data perkembangan Desanya	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyediakan data perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 desa yang menyediakan data perkembangan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan trend yang semakin baik.

Tabel 2. 105 Jumlah Perkembangan Desa Tahun 2015 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
6	Peningkatan Desa kurang berkembang menjadi berkembang (%)	22,50	19,35	28,00	100	81,25
6.1	Jumlah Desa kurang berkembang meningkat menjadi Desa berkembang	9	6	7	25	26
6.2	Jumlah Desa kurang berkembang	40	31	25	0	32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang semakin baik, namun untuk tahun 2020 perkembangan desa kurang menggembarakan, hal ini dikarenakan pembangunan di desa lebih difokuskan pada penanganan dampak pandemi covid-19.

Tabel 2. 106 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke Desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Monitoring dan evaluasi pemilihan kepala desa (desa)	-	48	115	117	-
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang menejemen Pemerintahan Desa (org)	650	950	1380	1.680	-
3.	Monitoring dan Evaluasi pengadaan perangkat Desa	0	281	23	17	20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana dengan baik.

Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDes dan pengembangan desa di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan.

Kondisi data jumlah Bumdes. jumlah kawasan pedesaan, jumlah kerjasama desa mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel di bawah. Data tersebut menjadi landasan untuk mencapai sasaran program selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

Tabel 2. 107 Kondisi BUM Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi BUM Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
	BUMDES tumbuh dan berkembang (%)	33	40	12	30	60,12
	Jumlah BUMDES	15	25	35	65	168
1.	Status Bumdes Dasar	15	15	20	47	67
2.	Status Bumdes Tumbuh	5	10	15	15	69
3.	Status Bumdes Berkembang	0	0	0	0	32
4.	Status Bumdes Maju	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Pada akhir tahun 2020, jumlah BUMDesa yang telah berdiri di Kabupaten Tegal sebanyak 168 BUMDesa, meningkat secara signifikan sejak tahun 2016. Berdasarkan statusnya terdiri dari BUMDesa dasar sebanyak 67, BUMDesa tumbuh sebanyak 69 dan BUMDesa berkembang sebanyak 32.

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kemasyarakatan Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang ditandai Lembaga Kemasyarakatan Aktif dan LEM Yang Berdaya. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat. Hasil dari pembinaan tersebut dapat dilihat dalam data pengelolaan aset dan kelompok desa binaan mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 108 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lembaga Ekonomi Masyarakat					
	Jml UED-SP	36	39	41	41	41
	Jml Kelp UP2K-PKK	635	397	397	738	287
	Jml CPPD	4	5	5	5	5
	Jml Pasar Desa	3	3	3	24	24
	Jml Pokmas TTG	5	5	33	46	46
	Jml KUB	8	8	8	8	8
2.	Lembaga Kemasyarakatan					
	Jml KPMD	281	281	281	281	281
	Jml Posyandu	1405	1064	1248	1518	1381
	Jml kelompok PKK RW	1397	1990	1990	1360	1329
	Jml kelompok PKK RT	6537	9546	9546	6337	6296

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari Data tersebut dapat diketahui Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat yang ada mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan *trend* yang semakin baik.

Tabel 2. 109 Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	a. Jumlah Kelompok PKK RW	1397	1990	1990	1.360	1329
	b. Jumlah Kelompok PKK RW Aktif	1397	1990	1990	1.360	1329
	c. PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	33	33	33	33	33
3.	Jumlah Desa binaan dengan jumlah Desa	11,49	11,49	11,49	11,49	11,74

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data di atas menggambarkan semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sekaligus dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK, dengan Jumlah Desa binaan PKK setiap tahun sebanyak 33 Desa. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari: Posyandu, BKB UP2K-PKK, Pos PAUD, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. tiap tahun 11,74 % dari jumlah Desa di Kabupaten Tegal.

3) Penataan Desa

Dengan mendasari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan desa, maka perlu melaksanakan kegiatan Perdes Tata Ruang Desa, Perdes Kewenangan Desa dan Infrastruktur Desa, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel 2. 110 Jumlah Perdes Tata Ruang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Perdes Tata Ruang				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perdes Tata Ruang	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas, tidak terdapat Perdes Tata Rang, dikarenakan Dispermasdes baru melaksanakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2. 111 Jumlah Perdes Kewenangan Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Perdes Kewenangan Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perdes Kewenangan Desa	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas, menunjukan semua desa sudah mempunyai Perdes Kewenangan Desa. Dari tabel diatas menunjukan Perdes Kewenangan Desa sudah ada sejak 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2. 112 Jumlah Infrastruktur Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Infrastruktur Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	TMMD & Karya Bhakti	7	7	8	8	9

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan kegiatan infrastruktur desa, dikarenakan dari tahun 2018 kegiatan TMMD yang semula 2 desa menjadi 3 desa, sedangkan Karya Bhakti untuk Perkotaan 2 desa dan Karya Bhakti Perdesaan 2 desa. Pada Tahun 2020 ada penambahan kegiatan Karya Bhakti sehingga untuk Karya Bhakti Perkotaan menjadi 3 desa dan Karya Bhakti Perdesaan menjadi 3 desa.

4) Peningkatan Kerja Sama

Dengan mendasari Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Dispermasdes melaksanakan kegiatan tersebut sesuai amanat Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 dengan hasil tabel sebagai berikut :

Tabel 2.113 Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Desa Tertinggal				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Desa Tertinggal	0	0	0	41	31

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data tersebut diatas menunjukkan peningkatan kegiatan kerjasama desa, dengan penurunan desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal didapat dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2019 dan 2020, yang menunjukkan penurunan jumlah desa tertinggal, dari 41 desa di tahun 2019 menjadi 31 desa di tahun 2020.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya *Zero Growth*. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur. Data Laju Pertumbuhan Penduduk mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel di bawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi penurunan LPP Kabupaten Tegal sebesar 0,01 tiap tahunnya sehingga target LPP Tahun 2024 sebesar 0,219 bisa tercapai.

Tabel 2. 114 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.698	1.579.432
2.	LPP	0,32	0,289	0,260	0,241	0,120
	Penurunan LPP	0,02	0,031	0,029	0,019	0,121

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2021

Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Tegal dalam dekade 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 115 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2016-2020

No	Tahun	TFR
1	2016	2.28
2	2017	2.42
3	2018	2.47
4	2019	2,24
5	2020	2,28

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa TFR Kabupaten Tegal fluktuatif. Kenaikan TFR perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Secara umum penyebab naiknya TFR adalah bertambahnya pasangan usia subur (PUS) sehingga perlu adanya perhatian yang lebih terhadap mereka untuk mengendalikan tingkat kehamilan dan kelahiran.

2) Keluarga Berencana

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup mengembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak perkeluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 186.867 peserta dari 275.625 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017. Adapun persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) selama kurun waktu tahun 2016-2020 masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 116 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	210.584	207.923	203.349	205.527	186.867
2.	Jumlah PUS	293.088	293.674	297.296	302.652	275.625
3.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	71.85	70.80	68.40	67.91	67.80

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 186.867 peserta dari 275.625 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2020 mencapai 67,80%, sedangkan pada tahun 2016 – 2019 terus mengalami penurunan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 186.867 peserta dari 275.625 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Persentase pemakaian alat kontrsepsi pada tahun 2020 mencapai 67,80.

Kepesertaan KB Aktif mulai tahun 2016 – 2020 terus mengalami penurunan, yang dipengaruhi oleh makin tingginya angka *drop out* KB serta angka *unmeet need*. *Unmet need* KB merupakan kebutuhan PUS untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut (tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya) tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi. Berikut ditampilkan persentase *unmeet need* KB di Kabupaten Tegal tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 117 Persentase Unmeet Need KB Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Persentase <i>Unmeet need</i>				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PUS <i>Unmetneed</i>	39.200	39.496	42.283	47.563	42.095
2.	Jumlah PUS	293.088	293.674	297.296	302.652	275.625
3.	Prosentase PUS <i>Unmetneed</i>	13,37	13,45	14,22	15,72	15,27

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Berdasar tabel di atas, persentase *Unmeet Need* dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan :

1. Banyak Akseptor KB di Kabupaten Tegal yang *drop out* (putus pakai kontrasepsi) terutama pada kontrasepsi suntik dan *implant* yang disebabkan karena suami merantau sehingga istri berhenti/putus memakai kontrasepsi.
2. Banyak PUS usia tua (45 – 49 tahun) yang sudah tidak memakai alat kontrasepsi karena merasa sudah tidak mungkin mempunyai anak lagi.
3. Adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 menyebabkan banyak PUS yang tidak melakukan kontrasepsi ulang (Suntik dan *implant*) serta tidak terlayannya PUS yang akan melakukan pemasangan KB (peserta KB baru) karena takut terpapar covid-19.

Sementara itu, kepesertaan KB pada keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (yang dipersepsikan sebagai keluarga miskin) dari tahun 2016-2020 bila dilihat dari persentase kepesertaan KB cukup baik yaitu rata-rata 68,62% namun mengalami penurunan di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19 sehingga masyarakat takut untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi baik peserta baru maupun ulang yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 118 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	75.199	78.560	72.375	79.061	79.144
2.	Jumlah PUS	108.368	114.199	106.034	114.127	117.481
3.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	69.39	68.79	68.26	69.27	67.37

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

3) Keluarga Sejahtera

Untuk Pelaksanaan dan memantapkan Ketahanan Keluarga diperlukan peranan dari berbagai aspek didalamnya melalui program Tribina yakni Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. Melalui kegiatan ini setiap kelompok Tribina akan memperoleh sekaligus dapat memantapkan setiap program dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Tribina merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak baik secara fisik, motorik, kecerdasan, emosional, sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja disamping itu tribina juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan masa lanjut usia (Lansia) yang produktif, mandiri dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.

Tabel 2. 119 Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian	BKB	BKR	BKL	Total
2016	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	59117	65247	50742	175106
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17162	11193	11947	40302
	<i>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</i>	29,03	17,15	23,54	23,02
2017	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	54881	73287	52146	180314
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	16211	9912	12022	38145
	<i>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</i>	29,54	13,52	23,05	21,15
2018	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	53096	71068	49307	173471
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	16217	9137	10810	36164
	<i>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</i>	30,54	12,86	21,92	20,85
2019	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	58087	66051	52890	177028
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17935	9597	11286	38818
	<i>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</i>	30,88	14,53	21,34	21,93
2020	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	58843	67322	58347	184512
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17365	10844	11616	39825
	<i>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</i>	29,51	16,11	19,91	21,58

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

I. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat – pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain itu menunjang konektifitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan.

a) Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas

Dengan Program Lalu Lintas diharapkan pelayanan lalu lintas pada masyarakat semakin meningkat dilihat dari Persentase pemasangan rambu – rambu lalu lintas sesuai Standar. Fungsi dari Rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

Tabel 2.120 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kab. Tegal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kebutuhan Rambu	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429
2	Rambu Terpasang	8.694	13.624	13.944	16.320	16.958	16.958
	Persentasi Rambu (%)	21,5	33,7	34,49	40,37	41,95	41,95

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Berikut ini data-data jumlah ketersediaan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, yang meliputi: *guardrail*, LPJU, RPPJ, APILL, *warninglight*, marka selain rambu lalu lintas sebagai berikut :

Tabel 2.121 Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Guardrail</i>	15	53	129	129	167
2	Marka	894	3567	3567	4311	5052
3.	Rambu Lalu Lintas	128	434	434	582	696
4.	APILL	1	3	3	6	6
5.	<i>Warninglight</i>	5	15	19	41	41
6.	RPPJ	46	46	46	66	121

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum disamping digunakan sebagai penerang jalan, lampu ini juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan

lingkungan jalan. Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan dalam pelayanan pemasangan Lampu Penerangan Jalan dimulai sejak tahun 2018, karena sebelum SOTK baru, pemasangan LPJU dilaksanakan oleh Dinas Perkimtaru. Gambaran pemasangan LPJU lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.122 Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kebutuhan LPJU	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
2	LPJU Terpasang	-	-	7.328	9618	10.142	10.142
	Persentase LPJU (%)	-	-	43,22	56,73	59,82	59.82

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Sampai dengan Tahun 2020 jumlah LPJU sebanyak 10.142 titik (59,82%) dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal (16.954 titik)

b) Lokasi Parkir

Aktifitas yang terjadi pada pusat – pusat kegiatan seperti pusat perdagangan jasa, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, seringkali berdampak pada munculnya titik – titik kemacetan akibat kantong – kantong parkir yang belum teratur dan dikelola dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, gambaran sebaran. Gambaran pengelolaan lokasi parkir di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.123 Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Lokasi yg berpotensi untuk pengelolaan Parkir	300	300	300	300	300	300
2	Jumlah Lokasi Parkir yg telah dikelola	144	157	171	203	269	269
	Persentase lokasi parkir (%)	48,0	52,3	57,0	67,0	89,67	89,67

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun lokasi parkir yang terkelola di Kabupaten baru mencapai 67%. Sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan masih berpotensi pada munculnya titik kemacetan dan rawan pencurian kendaraan bermotor.

c) Pelanggaran Operasional Lalu Lintas dan Angkutan

Tabel 2.124 Data Pelanggaran Kendaraan Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah kendaraan diperiksa	Jumlah kendaraan kena tilang	Persentase
1	2016	1.249	652	52,20
2	2017	1.261	498	39,49
3	2018	1.254	488	38,92
4	2019	420	56	13,33
5	2020	174	35	20,11

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel di atas, pelanggaran kendaraan (Angkutan Umum penumpang/barang) dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan penggunaan kendaraan angkutan umum semakin baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Sampai dengan Tahun 2020 jumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran sebesar 20,11 % diharapkan lima tahun ke depan akan lebih menurun lagi. Pada tahun 2019 jumlah kendaraan yang diperiksa mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya wabah covid-19 sehingga diberlakukan protokol kesehatan yang secara tidak langsung menyebabkan dibatasinya angkutan umum penumpang/barang beroperasi.

d) Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasi nya. Misalnya pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, industri, permukiman dan infrastruktur akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut.

Tabel 2.125 Analisa Dampak Lalu Lintas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Usaha Besar yg berpotensi pada perubahan sistem transportasi	-	-	12	12	12	12
2	Jumlah andalin yang disetujui	-	-	7	9	5	5
	Persentasi jumlah Andalalin (%)	-	-	58,3	75	41,67	41,67

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Kebijakan implementasi Andalalin diterapkan sejak Tahun 2015 sebagai amanat Permen Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 dan Nomor 11 Tahun 2017. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal baru melaksanakan amanat Andalalin pada tahun 2018, sebelumnya tidak pernah dilakukan dikarenakan tidak terdapat anggaran monitoring dan evaluasi terhadap perubahan guna lahan yang berakibat pada berubahnya sistem transportasi.

Jumlah usaha besar yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi tiap tahun jumlahnya selalu sama yaitu sejumlah 12, karena dalam menerbitkan ijin andalalin bergantung pada ada tidaknya perkembangan melalui jumlah investor yang ikut berinvestasi yang kemudian mengajukan surat permohonan di Kabupaten Tegal sehingga sulit untuk diprediksi. Kecil kemungkinan andalalin dapat disetujui karena adanya pandemi covid-19.

e) **Infrastruktur Terminal, Shelter dan Halte**

Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Tegal dilayani oleh 5 Terminal yang terdiri atas 3 terminal penumpang dan 2 terminal barang. 3 terminal penumpang dengan pola pelayanan tipe c yaitu terminal Dukuh Salam Slawi, terminal Trayeman dan terminal Adiwerna. 2 terminal barang yaitu terminal/*rest area* Klonengan dan Maribaya. Sedangkan jumlah fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum (*halte*) yang telah terpasang sebanyak 25 unit.

Tabel 2.126 Jumlah Terminal/Shelter dan Halte

No	Uraian	Jumlah Sampai Tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kebutuhan Terminal/ <i>Shelter</i> dan Halte	102	102	102	102	102	102
2	Halte	10	16	25	30	30	30
3	Terminal/ <i>Shelter</i>	5	5	5	5	5	5
4	<i>Rest Area/Shelter</i>	3	3	3	3	3	3
	Persentase Terminal/ <i>Shelter</i> (%)	21,7	30,4	30,4	29,4	32,3	32,3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

f) **Trayek Angkutan Lalu Lintas**

Seluruh angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Sejak tahun 2017 jumlah angkutan turun sebanyak 972 unit (angkutan penumpang) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena banyak yang tidak aktif. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengemudi angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 384.

Tabel 2.127 Jumlah Trayek Lalu Lintas

No.	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Angkutan Umum	981	972	972	972	904	904
2	Jumlah Ijin Trayek	394	516	640	650	384	384
	Rasio Ijin Trayek	0,4	0,53	0,66	0,66	0,42	0,42

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Penyebab penurunan dan stagnansi juga perlu diuraikan lebih rinci tidak hanya karena banyak yang tidak aktif tapi dicari lagi penyebab kenapa banyak yang tidak aktif. Apakah karena mendapatlan kendaraan bermotor secara kredit sekarang sangat mudah atau karena mungkin kehadiran angkutan *on-line* atau terdapat faktor penyebab lain. Akar masalah ini yang harus dapat diselesaikan melalui program upaya untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Penyebab turunnya bisnis angkutan umum ini karena dua hal. Pertama, trayek atau rute angkutan tersebut sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, kedua yaitu masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan. Selain itu, banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya, hal ini dikarenakan kondisi fisik kendaraan misalnya umur kendaraan, sudah tidak layak jalan, serta tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan peremajaan. Dan yang terakhir karena semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi seperti taksi *online* dan *ojek online*. Hal ini dinilai membuat bisnis angkutan umum konvensional di Kabupaten Tegal semakin tergerus karena tak mampu bersaing.

Program upaya terkait penyelesaian turunnya jumlah trayek lalu lintas:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin angkutan umum. Izin angkutan umum sendiri dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal, dalam hal ini Dinas Perhubungan hanya melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi angkutan.
- b. Perlu dilakukan langkah atau upaya penyusunan kembali rencana umum jaringan trayek angkutan pedesaan dan perbatasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sehingga diperoleh riil kebutuhan jumlah angkutan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Perlu kami informasikan data tersebut terakhir disusun pada tahun 1996 dan sampai sekarang tidak tersedia anggaran, sebagai diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
- c. Perlu adanya inovasi dalam hal pemberian subsidi angkutan, kemudahan dalam melakukan perizinan angkutan serta perbaikan dalam kualitas pelayanan.

g) Kelayakan Kendaraan

Seluruh angkutan umum di Kabupaten Tegal yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji KIR pada tahun 2020 sebanyak 7.937 unit kendaraan dari 9.857 unit kendaraan (angkutan penumpang dan angkutan barang). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2.128 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Tegal
Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KB Wajib Uji	8.393	9.002	9.618	10.268	10.959
2	Jumlah KB yang melakukan Wajib Uji	7.733	8.237	8.760	9.472	8.191
3	Jumlah KB tidak melakukan Wajib Uji	660	765	858	796	2768
	% Kendaraan Bermotor Wajib Uji	92,14	91,5	91,08	92,25	74,74

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Adanya selisih angka jumlah angkutan penumpang dan barang dengan jumlah uji KIR angkutan umum sangat jauh perbedaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, dan melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota lain.

h) Perlintasan Sebidang

Apabila ditinjau dari sistem jaringan kereta api, Kabupaten terlantasi oleh 3 jalur rel kereta api yaitu 1) Jalur Jakarta – Tegal- Semarang – Surabaya di bagian utara yang melewati Kecamatan Kramat, Surdadi dan Warureja, 2) Jalur Tegal – Purwokerta di bagian tengah yang melewati Kecamatan Dukuhturi, Talang, Adiwerna, Slawi, Lebaksiu, Balapulang dan Margasari, serta 3) Jalur Jakarta – Cirebon – Purwakarta di bagian barat yang hanya melintasi Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Keberadaan jalur kereta api banyak yang *crossing* dengan jalan kabupaten, sehingga perlu difasilitasi pengamanan perlintasan sebidang.

**Tabel 2.129 Jumlah Perlintasan sebidang Kabupaten Tegal
Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Perlintasan Sebidang	53	53	53	53	53	53
2	Jumlah Gardu Pengaman	12	14	17	18	18	18
	Persentase Gardu Pengaman (%)	22,64	26,42	32,08	33,96	33,96	33,96

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Dari jumlah 53 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Tegal, Sampai dengan saat ini baru dibangun gardu pengaman mencapai 18 unit atau sekitar 33,96%. Tidak ada perlintasan di jalan nasional dan provinsi, karena yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal hanya menangani perlintasan yang ada di jalan kabupaten dan jalan desa.

i) Fatalitas Korban Kecelakaan

Tabel 2.130 Angka Kecelakaan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban			Penurunan
		MD	LB	LR	
2016	631	172	1	723	-9,74
2017	487	156	0	512	22,82
2018	476	152	0	509	2,26
2019	619	170	0	629	-30,04
2020	500	134	0	506	19,22

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Keterangan:

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

Tabel di atas menggambarkan 5 tahun terakhir terjadi penurunan angka kecelakaan dari 631 kejadian menjadi 500 Kejadian atau penurunan sekitar 19,22%. Harapannya angka kecelakaan ini terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk menurunkan angka kecelekaan lalu lintas, maka diperlukan upaya – upaya terkait dengan sektor perhubungan.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena:

1. Faktor manusia atau pengendara/ pengemudi kendaraan. Penyebabnya utama karena kondisi fisik yang kurang fit, mengantuk, kondisi mental yang tidak stabil, melaju cepat, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengemudi, pengaruh buruk obat-obatan atau alkohol serta pengalihan perhatian.
2. Kendaraan yang digunakan bisa menjadi penyebab kecelakaan, bisa karena sistem rem, kemudi, mesin yang tidak berfungsi, dimodifikasi tidak sesuai dengan aturan keselamatan dan lain sebagainya. Ada banyak komponen yang terdapat pada kendaraan dan semuanya berpotensi mengalami kerusakan. Apalagi jika umur kendaraan sudah cukup tua, ada banyak komponen yang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik.
3. Faktor jalan diantaranya seperti: kondisi permukaan jalan yang tidak memenuhi syarat (berlubang, benjolan), fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak memadai, *layout* jalan yang tidak sesuai, pencahayaan yang tidak memadai, kondisi lingkungan atau cuaca yang buruk, seperti hujan atau berkabut seringkali menjadi penyebab kecelakaan kendaraan.

J. Komunikasi dan Informatika

1) Informasi dan Komunikasi Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan Pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka untuk masyarakat karena setiap orang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Badan publik yang dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan serta hasil kegiatan dalam pembangunan dapat diakses oleh publik dan masyarakat sejauh informasi tersebut adalah bukan informasi yang dikecualikan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Tabel 2. 131 Data Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Badan Publik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai KIP Badan Publik	NA	NA	41,6	68,55	83,96
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	18%	18%	19%	19%	51,60%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dari Tahun 2016 sampai 2020 telah melakukan klarifikasi Nilai KIP Badan Publik dan telah mengidentifikasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 capaian kedua indikator tersebut mengalami peningkatan.

2) Aplikasi Informatika

Berdasarkan Lampiran Huruf P Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Aplikasi Informatika.

Sub urusan Aplikasi Informatika ini terbagi atas Pengelolaan Domain/Sub Domain dan Pengelolaan *e-Government* lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks pengelolaan *e-Government*, maka pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Indeks SPBE terbagi atas 4 (empat) *domain*, yaitu pertama, Domain Kebijakan Internal SPBE, kedua, *domain* Tata Kelola SPBE. ketiga, *domain* Manajemen SPBE dan keempat, *domain* Layanan SPBE.

Tabel 2. 132 Program Aplikasi Informatika dan Indeks SPBE Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	NA	1,8	2,82	3,11
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	NA	2,2
2	Indeks <i>Domain</i> Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	NA	1,65	2,18	3,53
	Indeks <i>Domain</i> Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	NA	2
3	Indeks <i>Domain</i> Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	NA	2,14	2,57	2,29
	Indeks <i>Domain</i> Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	NA	2
4	Indeks <i>Domain</i> Manajemen SPBE	NA	NA	NA	NA	1
5	Indeks <i>Domain</i> Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	NA	3,09	3,15	3,39
	Indeks <i>Domain</i> Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	NA	2,8
6	Persentase Perangkat Daerah yang Terpenuhi Kebutuhan TIK Dalam <i>Digitalisasi</i> Pemerintahan	NA	12,5 %	12,5 %	16,67 %	16,67 %
7	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Dinas Kominfo	NA	12,50 %	12,50 %	16,67 %	16,67 %
8	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara <i>Online</i> dan Terintegrasi	5%	15,00 %	25,00 %	30,00 %	45,00 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks SPBE terbagi atas 2 (dua) hal, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks SPBE dari tahun 2018-2020 mengalami kenaikan jika berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kemudian, dari tabel tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa terdapat kenaikan persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan, perangkat daerah yang terhubung akses Internet dan layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi. Kenaikan tersebut memberikan indikasi bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sedikit demi sedikit dapat tercapai sebagaimana tertuang dalam tujuan perangkat daerah yang membidangi urusan wajib non pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika.

3) Sumber Daya TIK

Tujuan pengembangan Sumber Daya TIK adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap tugas-tugasnya di bidang TIK. Dalam pengembangan sumber daya TIK pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung *e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* dilaksanakan berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam tahap selanjutnya, implementasi SPBE/*e-Government* akan berkembang menjadi *Smart City* yang membutuhkan sumber daya TIK yang dapat memahami dan menjalankannya Program Smart City, dimana Pemerintah Kabupaten Tegal juga sudah memiliki sebanyak 20 PNS fungsional Pranata Komputer. Berkaitan dengan bimbingan teknis TIK, berikut data jumlah ASN yang telah mengikuti bimtek di Kabupaten Tegal sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 133 Jumlah Aparatur Pemerintah Yang Mengikuti Bimtek TIK Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bimtek Internet Sehat Bagi Masyarakat	0	0	100	100	100
2	Bimtek TIK untuk Aparatur Pemerintah	0	0	0	100	100
3	Bimtek TIK untuk Aparatur Pemerintah Desa	0	0	100	100	100
4	Bimtek TIK untuk Pranata Komputer Penilaian Angka Kredit	0	0	20	40	50
5	Bimtek TIK untuk Kompetensi Pengelola <i>Smart City</i>	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas terlihat bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 bimbingan teknis berkaitan dengan pengembangan sumber daya TIK telah dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk masyarakat,aparaturn pemerintah desa dan pranata komputer di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tegal berjumlah 20 orang pranata komputer dimana bimtek berkaitan dengan penilaian angka kredit.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sebuah unit layanan pengadaan yang memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal secara efisien dan efektif dan dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pememerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP/JP).

Untuk peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pelaku pengadaan sangat dibutuhkan bimtek *e-procurement* secara berkala dan kontinyu dan peningkatan standarisasi LPSE Kabupaten Tegal kepada standar yang telah ditetapkan oleh LKPP hingga ke standar ideal 17. Poin tabel berikut menggambarkan Penyelenggaraan LPSE dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020.

Tabel 2. 134 Jumlah Bimtek Pelaku Pengadaan dan Tingkat Standarisasi LPSE Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bimtek <i>e-Procurement</i> Bagi Pelaku Pengadaan	0	118	238	340	350
2	Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	0	7	10	12	12

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Bimtek *e-Procurement* Bagi Pelaku Pengadaan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2017. Pada Bimtek Tahun 2019 Pelaku Pengadaan berjumlah 340 orang berasal dari OPD dan Bagian (60), Kelompok Kerja (30) dan Penyedia (40). Pada Tahun 2018 berjumlah 238 orang dimana jumlah pelaku di Tahun 2017 ditambah dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 60 orang dan Pejabat Pengadaan (PP) sejumlah 60 orang, dan terlihat pula bahwa proses Standarisasi LPSE telah dimulai sejak Tahun 2016 ketika LPSE masih unit bagian dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Tabel 2. 135 Koperasi Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koperasi aktif	146	152	252	256	256
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	497	292	183	183	182
3.	Jumlah koperasi	643	444	435	439	438
	Koperasi Aktif (%)	22,93	22,71	34,23	57,93	58,31

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

Perkembangan jumlah koperasi aktif pada tahun 2020 secara rinci adalah adanya 3 koperasi aktif binaan kabupaten yang berubah status menjadi koperasi binaan provinsi, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif mengalami penurunan karena ada 1 koperasi tidak aktif binaan kabupaten yang berubah status menjadi koperasi binaan propinsi. dan pada tahun 2020, terdapat tambahan 3 koperasi baru yang ditambahkan pada jumlah koperasi aktif. kemudian pada tahun 2017 terdapat penurunan jumlah koperasi yang disebabkan karena proses pembubaran koperasi pada tahun 2017.

Tabel 2. 136 Koperasi Sehat Tahun 2016-2019

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sehat	5	12	17	8	8
2	Cukup Sehat	75	76	73	73	61
3	Dalam Pengawasan	6	15	8	28	28
4	Dalam Pengawasan Khusus	0	3	1	2	2
5	Jumlah Koperasi DP & DPK	86	106	99	111	111
	Jumlah koperasi	643	444	435	439	439
	Persentase Koperasi DP & DPK	6,98	16,98	9,09	27,03	27,03
	Persentase Koperasi Sehat	5,81	11,32	17,17	7,21	7,21
	Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	93,02	83,02	90,91	72,97	72,97

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

Dilihat dari tingkat kesehatan, koperasi yang berpredikat Dalam Pengawasan (DP) dan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) pada tutup buku tahun 2019 masih sebesar 27,03 %. jika dibandingkan jumlah seluruh koperasi yang dinilai. Hal ini disebabkan karena sebagian koperasi tersebut masih belum memenuhi standar penilaian kesehatan yang terdiri dari aspek permodalan, aspek *likuiditas*, aspek manajemen, aspek efisiensi, hingga aspek jatidiri koperasi. Selain itu adanya perubahan regulasi dalam penilaian kesehatan koperasi oleh pusat juga berpengaruh pada tingkat kesehatan koperasi, dimana beberapa koperasi belum mampu menyesuaikan standar penilaian kesehatan yang semakin ketat.

Tabel 2. 137 Koperasi Yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2016-2020

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Mengikuti Pelatihan	92	83	50	304	165
2	Jumlah Koperasi Tidak Mengikuti Pelatihan	551	361	385	135	273
3	Jumlah Koperasi	643	444	435	439	438
4	Jumlah Koperasi Mengikuti Pelatihan	14,31	18,69	11,49	69,25	37,67
Persentase Koperasi ikut Pelatihan		14,31	18,69	11,49	69,25	37,67

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

Dilihat dari Jumlah Koperasi yang sudah mengikuti diklat atau pembinaan, pada tahun 2020, persentasenya masih rendah (37,67%). Hal ini disebabkan karena kebijakan Penganggaran secara umum mengalami penurunan akibat *refocusing* untuk Penanganan covid-19, sehingga berpengaruh pada volume Peserta Pembinaan maupun Diklat Perkoperasian.

Tabel 2. 138 Data Anggota Koperasi yang sudah Mengikuti Diklat dan Pembinaan Tahun 2016-2020

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peserta Diklat / Pembinaan Perkoperasian	120	86	60	466	275
2	Jumlah Seluruh Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi	4.501	3.108	3.045	3.073	3.066
Persentase		2,7	2,8	2,0	15,2	9,0

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

Dilihat dari Jumlah SDM Koperasi yang sudah mengikuti Diklat atau Pembinaan, pada tahun 2020, Persentasenya masih rendah (7,8%) jika dibandingkan dengan seluruh SDM Pengurus / Pengawas / Pengelola Koperasi. Hal ini disebabkan karena kebijakan Penganggaran secara umum mengalami penurunan akibat *Refocusing* untuk penanganan covid-19, sehingga berpengaruh pada volume peserta pembinaan maupun piklat perkoperasian.

2) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020, jumlah UKM di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu dari 33.520 unit menjadi 172.761 unit. Sedangkan jumlah UKM yang mempunyai legalitas mengalami kenaikan yaitu dari 3.941 unit menjadi 7.368 unit. Perkembangan Jumlah dan UKM yang mempunyai legalitas di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 139 Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh UKM	33.520	33.530	142.412	166.092	172.761
2	UKM formal	3.941	4.193	5.060	5.916	7.368
3	UKM non Formal	29.579	29.337	137.352	160.176	165.393

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Kenaikan jumlah UKM harusnya dibarengi dengan upaya pembinaan dan akses kemudahan dalam perijinan dan permodalan ke perbankan, karena jumlah UKM yang besar ini mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

3) Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perkonomiannya. Jumlah BPR pada tahun 2016 berjumlah 13, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan 7,69% yaitu menjadi 11. Untuk jumlah LKM non Koperasi pada tahun 2016 berjumlah 557, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017, namun tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 140 Jumlah BPR/LKM Non Koperasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR	13	11	11	11	11
2	Jumlah LKM Non Koperasi	572	618	207	6	6

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

L. Penanaman Modal

1) Program Penanaman Modal

Penanaman Modal dilakukan untuk mendorong meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi tersebut dengan menarik para investor lokal maupun Luar Negeri untuk menanamkan modalnya di kabupaten Tegal. Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 141 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 - 2020

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi
2016	5.628	656.376.500.000	5	1.107.984.000.000
2017	5.266	566.881.900.000	4	1.243.150.000.000
2018	7.257	1.073.862.531.863	3	480.800.000.000
2019	7.072	1.418.065.799.693	8	820.334.969.198
2020	11.457	9.073.688.922.252	5	291.626.969.198

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5.266 investor. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 7.257 investor dengan nilai investasi mencapai 1.073.862.531.863, sedangkan tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 11.457 dengan nilai investasi sebesar 9.073.688.922.252. Dengan Peningkatan jumlah investasi PMDN mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan.

2) Peningkatan Calon Investor

Tabel 2. 142 Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen	N/A	N/A	3	3	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

3) Indek Kepuasan Masyarakat Perizinan

Pelayanan perizinan yang optimal dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 143 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perijinan	72,38	73,87	75,32	77,61	78,08

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

Dengan melihat Tabel di atas pada tahun 2016 – 2020 selalu terjadi peningkatan kepuasan masyarakat dalam pengurusan izin, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memperoleh pelayanan perizinan yang cukup baik.

4) Persentase Data Layanan Termanfaatkan

Tabel 2. 144 Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan	3,6	4,2	4,5	5,4	6,29

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

5) Pengendalian PMPTSP

Kepatuhan Perusahaan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal. Pengendalian PMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para investor yang dilaksanakan melalui Tim Pengendali Perangkat Daerah yang terkait. Kondisi kepatuhan perusahaan yang berizin mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 145 Kepatuhan Perusahaan Berizin Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan berizin	5.270	5.475	755	771
2	Jumlah Perusahaan	11.714	11.714	1678	1682
3	Persen Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin	45	46,73	45	61,28

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah Perusahaan Berizin pada tahun 2017 sebanyak 5.270 meningkat pada tahun 2018 menjadi 5.475 dengan Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin meningkat 1,73% dari 45 % pada tahun 2017 menjadi 46,73% tahun 2018, pada tahun 2019 menjadi 45% dan pada tahun 2020 menjadi 61,28 %.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.

Tabel 2. 146 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	N/A	0,011	0,022	0,038	0,073
2.	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	N/A	N/A	0,061	0,058	0,067

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Banyaknya jumlah atlet berprestasi menggambarkan pembinaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bidang olahraga. Selanjutnya dalam rangka menyongsong bonus demografi, meningkatkan ekonomi lokal dan pembangunan manusia maka akan dilaksanakan program penumbuhan wirausaha pemuda untuk meningkatkan persentase wirausaha pemuda. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Kegiatan olahraga yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal yaitu POPDA, PORDA, Kejuaraan cabang sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, catur, renang, bola voli.

Tabel 2. 147 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan Prestasi Olahraga	3	5	6	7	61
2.	Persentase Cabang Olahraga yang Dibina	N/A	N/A	75	75	75

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

N. Statistik

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan program Satu Data Kabupaten Tegal dengan menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral pada pusat data yang terintegrasi dari setiap OPD dalam aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Data Statistik Sektoral yang *reliable, up to date* dan relevan memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara umum, pemanfaatannya

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM *Open Data*, OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta kebutuhan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 148 Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM *Open Data*, OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta kebutuhan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM <i>Open Data</i>	NA	NA	NA	NA	10.000
2	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kebutuhan Data Statistik yang Tersedia	NA	NA	NA	NA	38,15 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2016 sampai 2020 seluruh perangkat daerah sudah menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, sedangkan jumlah pemanfaat dan kebutuhan sata statistik teridentifikasi mulai tahun 2020.

O. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 149 Indeks Keamanan Informasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Keamanan Informasi	NA	NA	147	147	262
2	Tingkat Keamanan Informasi	NA	NA	22,80 %	22,80 %	40,62 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Keamanan Inforamsi Kabupaten Tegal baru dilaksanakan tahun 2018 dengan tingkat keamanan informasi yang meningkat di tahun 2020.

P. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Kebudayaan adalah seluruh sistem yang kompleks dimana di dalamnya terkandung sebuah pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kesenian, adat istiadat disertai juga kemampuan-kemampuan lainnya yang dimiliki oleh seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat. Proses pengembangan budaya adalah suatu upaya meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Adapun kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dapat berupa gerak suara atau wujud. Kesenian ini mempunyai suatu penekanan yaitu adanya unsur estetika yang dipentingkan dalam setiap produk kebudayaan. Namun kesenian dapat dengan mudah mengalami perubahan-perubahan karena adanya tuntutan kebutuhan dari masing-masing individu dalam masyarakat yang mempunyai orientasi tertentu terhadap seni itu sendiri. Sehingga pengembangan budaya masyarakat juga harus mengembangkan kesenian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

Tabel 2. 150 Kondisi Budaya Tahun 2016- 2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Kebudayaan dan Tradisi yang Dikembangkan	24	39	45	50	61,11
2.	Persentase Seni dan Kesenian yang Dibina	Pelaku seni : 600 Sanggar Seni : 327	Pelaku seni : 625 Sanggar Seni : 331	Pelaku seni : 775 Sanggar Seni : 360	Pelaku seni : 1060 Sanggar Seni : 459	57,50
3.	Persentase Sejarah yang Terdokumentasi	N/A	N/A	N/A	N/A	76.47
4	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	N/A	N/A	N/A	N/A	45.83
5	Persentase Museum yang Dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	65

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Bahasa dan Sastra Lokal telah masuk dalam pembelajaran di satuan pendidikan baik di SD dan SMP dengan komposisi 2 jam pelajaran di setiap minggunya. Harapannya kedepan siswa dapat mengetahui dan melestarikan budaya daerah Kabupaten Tegal. Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu berupaya meningkatkan perkembangan budaya dan kesenian. Baik itu revitalisasi maupun pelestarian adat dan budaya. Rehabilitasi cagar budaya juga terus dan pengelolaan museum juga dikembangkan. Hanya saja pada tahun 2020 yang lalu terkendala dengan adanya Pandemi covid-19. Semua anggaran yang sudah di sediakan harus di realokasi ke kegiatan penanganan Pandemi covid-19.

Kurun waktu 2016-2020 pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Program pengembangan kebudayaan yang dihitung melalui proporsi kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan terhadap tradisi yang ada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini berarti menandakan semakin baiknya pengembangan kebudayaan. Program pengembangan kesenian tradisional juga mengalami kenaikan yang dihitung dari proporsi seni dan kesenian yang dibina terhadap seni dan kesenian yang ada. Persentase sejarah yang terdokumentasi, cagar budaya yang dilestarikan baru dihitung di tahun 2020 dengan angka persentase sebesar 76,47% untuk sejarah yang terdokumentasi dan 45,83% untuk cagar budaya yang dilestarikan. Nilai cagar budaya masih rendah dikarenakan di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga anggaran untuk cagar budaya di *refocushing* untuk penanganan covid-19. Persentase museum yang dikelola yaitu 65%. Adapun museum yang baru dibangun yaitu museum semedo dimana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan dan sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Dalam hal ini untuk memujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal mempunyai sasaran untuk mengembangkan dan meningkatkan penumbuhan perpustakaan serta minat baca masyarakat. Adapun hasil Indikator Perpustakaan selama Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 151 Indikator Perpustakaan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan pemustaka	31.926	24.667	31.243	35.909	20.898
2.	Peningkatan koleksi judul	3.692	4.786	6.038	6.289	2.401
3.	Peningkatan perpustakaan berbasis TIK	0	0	0	0	20

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Capaian kinerja pada tahun 2016-2020 selengkapnya sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. 152 Jumlah Perpustakaan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah (milik Pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah mobil perpustakaan keliling	3	3	3	3	3

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	34	36	56	64	63
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	8	16	19	21	21
5.	Jumlah Perpustakaan OPD	16	43	43	26	26
6.	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	15	16	16	31	26
	Total Perpustakaan (1+2+3+4)	77	115	138	146	140

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2016-2020 tidak mengalami perubahan yaitu Kabupaten Tegal memiliki 1 perpustakaan daerah milik Pemda dan perpustakaan yang dikelola oleh desa/kelurahan 63 unit, perpustakaan tempat ibadah 21 unit, perpustakaan ekstensi 26 unit dan perpustakaan OPD 26 unit. Secara total jumlah perpustakaan di tahun 2019 ada 140 unit.

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung. Data jumlah pengunjung Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 153 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	26.646	15.777	14.319	21.780	16.741
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	5.280	8.890	16.924	14.129	4.157
3.	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda	42.186	43.586	47.331	50.631	88.864

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah pengunjung di perpustakaan milik Pemda Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sebanyak 42.186 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 16.741 orang, sedangkan pengunjung perpustakaan keliling mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 5.280 orang, pada tahun 2020 sebanyak 4.157 orang. Koleksi buku di perpustakaan Pemda juga terus mengalami peningkatan dari 42.186 buku di tahun 2016 hingga 88.864 buku di tahun 2020.

R. Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi.

1) Audit Kearsipan

Audit kearsipan merupakan penilaian tata kelola kearsipan yang dilaksanakan oleh LKD dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 48 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa yang ada di Kabupaten Tegal. Baik atau tidaknya hasil audit dapat dilihat dari nilai LAKE (Laporan Audit Kinerja Eksternal) LKD, Desa dan Ormas, dan nilai LAKI (Laporan Audit Kinerja Internal) Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD yang ada di Kabupaten Tegal. Berikut data Penilaian LAKE dan LAKI di Kabupaten Tegal:

Tabel 2. 154 Penilaian LAKE dan LAKI Kearsipan Tahun 2016- 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan Nilai LAKE LKD	Blm dilakukan penilaian	27	33	52	73
2.	Peningkatan jumlah OPD dengan Nilai LAKI Cukup	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian
3.	Peningkatan jumlah Desa dan Ormas dengan Nilai LAKE Cukup	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tegal, 2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal belum melaksanakan audit kearsipan terhadap 48 OPD, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa.

2) Pengelolaan Arsip

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/ kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan kearsipan yang baik. Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 2. 155 Kondisi Pengelolaan Arsip Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah OPD yang telah mengelola Kearsipan dengan baik	54	48	48	48	48
2.	Persentase jumlah OPD yang telah mengelola kearsipan dengan baik	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik	49	63	77	113	113
4.	Persentase jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	17,44	22,41	27,40	40,21	40,21
5.	Jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik	5	13	48	48	48
6.	Persentase jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik	9,26	27,08	100	100	100

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Mendasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2020 seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah mengelola arsip dengan baik hal ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2015 dimana jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengolah arsip dengan baik sebanyak 7,4%. Persentase jumlah desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebanyak 10,32% menjadi 40,21% pada tahun 2019. Sama halnya dengan jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik dari tahun 2015-2019 juga terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 mencapai 100 Persen.

2.3.3 Fokus Layanan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan mencakup produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya serta produksi pengolahan hasil perikanan. Secara rinci produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan hasil perikanan dan persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.156 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perikanan Tangkap						
	Produksi (kg)	796.631	1.315.879	1.441.201	1.343.621	1.664.974	1.964.378
	Nilai (Rp 000)	7.447.623	9.436.612	10.603.486	11.343.111	12.887.350	13.608.184
2.	Perikanan Budidaya						
	Produksi(kg)	2.059.158	1.874.041	1.933.115	2.047.818	2.511.329	2.730.262
	Nilai (Rp 000)	36.926.775	40.937.539	75.021.353	86.814.081	127.440.566	145.642.227

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, 2021

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebesar 1.964.378 kg. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2016-2019), hanya saja di tahun 2018 mengalami penurunan jumlah produksi dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh cuaca ekstrem berupa gelombang laut yang tinggi dan angin kencang diawal dan akhir tahun, yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan melakukan aktivitas penangkapan ikan serta menjadi musim paceklik bagi nelayan.

Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 2.730.262 Kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2016-2019), hanya saja ada penurunan produksi antara tahun 2015 ke tahun 2016, disebabkan adanya efek cekaman panas yang panjang, sehingga banyak kolam pembudidayaan yang tidak berproduksi maksimal, terutama kolam lele dan nila.

Isu strategis dan permasalahan beserta dampak potensialnya yang dihadapi oleh perikanan budidaya sehingga menyebabkan belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Pertama yaitu besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan, Sebagian besar bahan baku pakan masih harus didatangkan dari

negara lain (import), Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik, Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan, Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas, sehingga akan berdampak pada ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar, usaha budidaya ikan skala kecil akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan. Kedua, skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar sehingga biaya produksi menjadi tidak efisien sedangkan akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas berdampak pada daya saing produk rendah. Ketiga, Sistem logistic kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien sehingga kualitas produk dan harga jual tidak menentu. Kemudian tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang dan umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan atau sistem semi-intensif.

Tabel 2.157 Produksi dan Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengolahan hasil perikanan						
	Produksi (kg)	5.668.973	3.603.151	3.125.680	3.409.674	4.514.145	5.478.639
	Nilai (Rp.000)	191.120.735	86.007.100	74.337.204	129.470.577	171.409.044	131.189.142

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, 2021

Pada tahun 2020 produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 5.478.639 Kg. Jumlah produksi ini cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2017-2019). Terjadi penurunan pada tahun 2015 – 2016, disebabkan kekurangan pasokan ikan untuk bahan baku pindang, sehingga mempengaruhi produksi serta nilainya. Sementara di tahun 2020 nilai produksi pengolahan menurun, selain disebabkan daya beli masyarakat turun, juga karena jenis ikan yang diolah kebanyakan jenis ikan yang berharga lebih murah misalnya saja ikan salem, serta adanya tambahan produksi dari olahan ikan segar dan olahan ikan lainnya yang secara jumlah produksi menjadi bertambah namun dengan nilai lebih kecil.

Kurang optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan disebabkan oleh beberapa hal Antara lain; kurangnya sarana pendukung pengolahan (dalam hal ini peralatan pengolahan yang masih kurang); penguasaan teknologi bagi pengolah masih kurang; tingkat serapan usaha masih rendah.

Tabel 2.158 Perairan Umum Daratan (PUD) yang Bebas dari Kegiatan *Destructive Fishing* di Kabupaten Tegal Tahun 2015–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perairan Umum Daratan (PUD) di Kabupaten Tegal	-	3,70	7,41	11,11	11,11

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, 2021

Kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD) mulai dilaksanakan sejak tahun 2017, sehingga realisasi di tahun 2015-2016 tidak ada. Pada tahun 2015 – 2016, kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan di perairan laut Kabupaten Tegal, berfokus pada ilegal, *unregulated* dan *unreported fishing* (IUU Fishing).

Kegiatan *detructive fishing* menjadi permasalahan yang muncul di perairan umum daratan (PUD) Kabupaten Tegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan berimplikasi pada produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan (PUD). Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan *detructive fishing* yaitu melalui kegiatan penebaran benih ikan dan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD). Kemudian maraknya praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (menggunakan racun dan listrik/setrum), hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan pengawasan penangkapan ikan di PUD, masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Selain itu faktor rendahnya kesadaran masyarakat akan kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries*). Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (menggunakan racun dan listrik/setrum).

B. Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah pada urusan bidang pariwisata mencakup:

- (1). Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan: pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/ kota;
- (2). Pemasaran pariwisata, dengan kewenangan: pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota;
- (3). pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kewenangan: penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota; dan
- (4). pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kewenangan: pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tegal Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

1) Jumlah Kunjungan Wisata

Tabel 2. 159 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah obyek wisata(obyek)	37	37	37	37	60
2.	Jumlah Usaha Pariwisata memiliki TDUP	n/a	56/256	102/256	128/256	138/256

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	905.829	1.053.957	950.771	1.189.877	466.668
	Wisatawan Manca Negara	1.721	1.470	3.805	3.247	137
	Wisatawan Nusantara	904.108	1.052.487	946.966	1.186.630	466.531
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kodisi baik	n/a	50%	50%	45%	25%
5.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	301.943	351.319	315.655	297.469	155.556
6.	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	n/a	n/a	n/a	n/a	5,55

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2016-2019 sebanyak 37 DTW. Jumlah kunjungan ke-3 Daerah Tujuan Wisata (DTW) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tersebut sebanyak 466.668 orang pada tahun 2020 yang terdiri dari wisatawan nusantara 466.531 dan wisatawan mancanegara sebesar 137 orang, hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya akibat dampak covid-19.

PAD sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD unggulan di Kabupaten Tegal. Berikut data 5 tahun terakhir PAD sektor pariwisata di Kabupaten Tegal.

2) PAD Sektor Pariwisata

Tabel 2. 160 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Tahun	PAD Pariwisata terhadap PAD
1	2016	2,74
2	2017	2,20
3	2018	2,40
4	2019	3,24
5	2020	1,85

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Capaian tahun 2018 sedikit menurun dibanding capaian tahun 2017. Hal ini disebabkan karena jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pemerintah menurun. Destinasi obyek wisata yang dikelola masyarakat berkembang sehingga menjadi alternatif daerah kunjungan wisata bagi masyarakat di samping obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.

3) Destinasi Pariwisata

Tabel 2.161 Persentase Destinasi Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang dipromosikan	56,67	56,67	56,67	56,67	61,67

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

4) Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Tabel 2.162 Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	N/A	56	102	128	138

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

5) Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata

Tabel 2.163 Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	N/A	20	20	20	100

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

C. Pertanian

1) Produksi Daging, Telur, Susu

Produksi daging di Kabupaten Tegal mencakup produksi daging ternak ruminansia besar (Sapi, Kerbau), ternak ruminansia kecil (Kambing, Domba), Unggas dan aneka ternak lainnya. Produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya, sedangkan produksi susu meliputi produksi susu sapi dan susu kambing. Secara rinci data produksi daging, produksi telur, produksi susu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.164 Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Tegal Tahun 2016– 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Daging					
	Produksi (kg)	9.675.621	9.784.502	10.057.415	10.167.793	11.284.734
2.	Telur					
	Produksi (kg)	10.203.264	10.249.993	10.258.158	10.261.185	10.760.493
3.	Susu					
	Produksi (kg)	713.192	713.428	713.890	686.651	604.664

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah produksi daging di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 mencapai 11.284.734 Kg. Produksi daging ini cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya (2016-2019). Pada tahun 2020 produksi telur mencapai 10.760.493 Kg. Jumlah produksi telur ini juga cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2016-2019).

Produksi susu pada tahun 2020 mencapai 604.664 Kg. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019), hal ini disebabkan karena populasi sapi perah sebagai penghasil susu semakin menurun, sehingga berpengaruh terhadap produksi susu secara total, sedangkan produksi susu kambing yang diharapkan mem-backup penurunan produksi susu sapi, produksinya belum cukup optimal.

2) Pengendalian Kesehatan Ternak dan Produk Hasil Ternak yang ASUH

Tabel 2.165 Persentase Ternak Terkendali Status Kesehatan dan Pengawasan Produk Hasil Ternak yang ASUH di Kabupaten Tegal Tahun 2016- 2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ternak Terkendali Status Kesehatan (%)	11,73	15,57	21,11	16,61	31,37
2	Pengawasan Peredaran Produk Hasil Ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH (jenis)	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

Dalam rangka pengendalian kesehatan ternak, dilaksanakan pengobatan ternak kepada peternak rakyat di Kabupaten Tegal. Setiap tahun persentase status kesehatan ternak yang terkendali di Kabupaten Tegal semakin meningkat. Sedangkan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), maka dilakukan pemeriksaan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH dengan 2 jenis indikator yaitu menjamin produk daging lebih terjamin kualitasnya, melalui pemotongan hewan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pemeriksaan sampel air susu baik susu kambing maupun susu sapi ditujukan agar terjamin kualitas air susu yang ASUH dan juga dalam rangka mencegah terjadinya praktek pemalsuan air susu, misal dengan di tambah air tajin atau santan. Pengawasan Kesmavet ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan produk hasil ternak yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal).

Jumlah ternak yang dipotong di RPH baik ternak besar (Sapi, Kerbau) maupun ternak kecil (Domba, Kambing) pada tahun 2016 – 2020 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.166 Jumlah Ternak yang Dipotong di RPH (Rumah Potong Hewan) di Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemotongan (ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	3701	3113	3983	4113	1653
2	Kerbau	97	81	107	88	26
3	Kambing	1844	894	1630	1514	377
4	Domba	2577	1505	2195	2427	668
	Jumlah Total	8219	5593	7915	8142	2724

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

Data jumlah sampel air susu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dari tahun 2016-2020 secara rinci ada pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.167 Jumlah Pemeriksaan Sampel Air Susu di Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No.	Jenis Air Susu	Jumlah Sampel Air Susu Yang Diperiksa (Liter)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	14	18	14	14	10
2	Kambing	30	35	33	33	25
	Jumlah Total	44	53	47	47	35

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

3) Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh di Kabupaten Tegal sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2. 168 Jumlah Penyuluh Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyuluh PNS :					
	a. Pertanian	88	88	108	108	108
	b. Perikanan	6	-	-	-	-
	c. Kehutanan	15	-	-	-	-
2.	Penyuluh THL - TBPP	81	77	49	49	49
		81	81	81	81	81
3.	Penyuluh Swadaya :					
	a. Pertanian	132	-	-		
	b. Perikanan	11	-	-		
	c. Kehutanan	30	-	-		
	Jumlah	363	165	238	238	238

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Berdasarkan peraturan perundangan baru yang berlaku maka pada tahun 2017 penyuluh pertanian menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penyuluh PNS di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 93 orang penyuluh, maka di Tahun 2016 menjadi 88 orang penyuluh. Demikian pula Penyuluh Kehutanan dari PNS, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 20 orang penyuluh menjadi 15 orang penyuluh pada Tahun 2016. Adapun penyuluh pertanian relatif tetap.

4) Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Perkembangan sektor pertanian dipengaruhi oleh produktivitas dari masing-masing komoditi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain luas tanam, luas panen serta hasil produksi. Pada tabel berikut menjelaskan tentang produktivitas komoditi pertanian, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal tahun 2016 - 2020.

Tabel 2. 169 Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Padi					
	Luas Tanam (ha)	64.819	76.761	64.297	61.149,9	56.050
	Luas Panen (ha)	62.628	65.499	65.660	64.037	57.620
	Produksi (ton)	382.161	394.023	373.525	377.924	360.431
	Produktivitas (ton/ha)	6,10	6,02	5,69	5,90	6,25

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jagung					
	Luas Tanam (ha)	0/S	12.799	10.028	16.348,9	21.238
	Luas Panen (ha)	16.141	15.699	7.982	16.465	17.506
	Produksi (ton)	121.994	118.288	45.069	124.200	117.236
	Produktivitas (ton/ha)	7,55	7,53	5,65	7,54	6,69
3.	Kedelai					
	Luas Tanam (ha)	92	68	151	419,7	119
	Luas Panen (ha)	90	60	104	308	75
	Produksi (ton)	166	108	154	173	81
	Produktivitas (ton/ha)	1,86	1,81	1,48	5,62	1,07
4.	Ketela Pohon					
	Luas Tanam (ha)	387	292	286	201	299
	Luas Panen (ha)	501	287	259	222	238
	Produksi (ton)	9.122	6.710	5.928	1.623	4.377
	Produktivitas (ton/ha)	18,22	23,35	22,89	73,11	18,37
5.	Ketela Rambat					
	Luas Tanam (ha)	83	50	38	79,8	88
	Luas Panen (ha)	95	55	35	72	82
	Produksi (ton)	933	637	346	1.066	663
	Produktivitas (ton/ha)	10,51	11,56	9,89	14,80	8,03
6.	Kacang Tanah					
	Luas Tanam (ha)	199	126	66	130,6	168
	Luas Panen (ha)	197	135	75	117	106
	Produksi (ton)	494	363	90	147	141
	Produktivitas (ton/ha)	2,51	2,69	1,20	1,25	1,3
7.	Kacang Hijau					
	Luas Tanam (ha)	55	11	9	36,8	7
	Luas Panen (ha)	58	14	0	32,9	3
	Produksi (ton)	60	16	0	48	3
	Produktivitas (ton/ha)	1,04	1,20	0	1,47	1,2
	Sayuran dan Buah Semusim					
1.	Bawang Merah					
	Luas Tanam (ha)	1.783	1.926	2.414	1.901	1.666
	Luas Panen (ha)	2.091	1.884	2.323	1.901	1.741
	Produksi (ton)	212.204	19.828	248.276	161.966	168.797
	Produktivitas (ton/ha)	10.15	10,52	106,86	85,20	72,27
2.	Cabe					
	Luas Tanam (ha)	303	327	360	495	592
	Luas Panen (ha)	353	328	397	418	628
	Produksi (ton)	3.130	3.581	38.705	25.185	41.827
	Produktivitas (ton/ha)	8,87	10,92	97,49	74,08	79,39
3.	Kentang					
	Luas Tanam (ha)	418	459	409	400	1.950
	Luas Panen (ha)	348	548	406	338	413
	Produksi (ton)	3.761	11.866	87.160	80.205	96.540
	Produktivitas (ton/ha)	10,81	21,65	214,68	74,08	79,39
4.	Kubis					
	Luas Tanam (ha)	1.179	1.162	1.090	975	1.950
	Luas Panen (ha)	1.276	1.202	1.108	948	761
	Produksi (ton)	21.313	26.190	195.015	169.360	99.982

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Produktivitas (ton/ha)	16,70	18,82	177,81	132,43	131,38
5.	Semangka					
	Luas Tanam (ha)	109	123	72	42	135
	Luas Panen (ha)	109	123	72	42	113
	Produksi (ton)	1.389	1.689	7.185	5.562	19.358
	Produktivitas (ton/ha)	12,74	13,73	99,79	132,43	171.31
	Tanaman Hias					
1.	Melati					
	Luas Tanam (ha)	1	-	10.000	0	2.000
	Luas Panen (ha)	337	341	3.419.250	2.095.440	2.182.390
	Produksi (ton)	5.807	4.796	5.263.728	2.585.981	3.142.270
	Produktivitas (ton/ha)	17,23	14,07	1,54	1,23	3,04
	Perkebunan Rakyat					
1.	Kelapa Dalam					
	Luas Tanam (ha)	4.186	3.665	3.370,66	3.180,76	2.905
	Luas Panen (ha)	2.283	2.123	2.027,40	1.903,4	1.638
	Produksi (ton)	2.155	1.887	1.807,94	1.814	1.296
	Produktivitas (ton/ha)	0,94	0,89	891,75	0,953	0,791
2.	Cengkeh					
	Luas Tanam (ha)	1.282	1.325	1.323,48	1.821.32	1.851,42
	Luas Panen (ha)	768	765	764,17	768,40	742,2
	Produksi (ton)	85	140	140,31	110	63,64
	Produktivitas (ton/ha)	0,11	0.18	183,61	0,143	0,085
3.	Teh					
	Luas Tanam (ha)	163	163	164,73	165,73	170,93
	Luas Panen (ha)	121	129	128,43	135,35	135,30
	Produksi (ton)	35	35	35,06	56,39	33,49
	Produktivitas (ton/ha)	0,29	0,27	273,02	0,41	0,247
4.	Tebu					
	Luas Tanam (ha)	3.548	3.265	2.687,30	1.809,857	1.856,029
	Luas Panen (ha)	3.548	3.265	2.669,18	1.804,857	1.856
	Produksi (ton)	15.872	14.299	30.912,06	7.104,132	7.066
	Produktivitas (ton/ha)	4,47	4,38	11,58	3.925	3.807

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2010–2014 pergerakannya tidak stabil. Ditahun 2012 produktivitas mencapai 5,94 ton/ha dan mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 5.76 ton/ha. Sedangkan untuk produktivitas tanaman hias melati pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011-2012. Pada tahun 2014 produktivitas tanaman hias mencapai 25,16 ton/ha sedangkan pada tahun 2011, 2012 masing-masing mencapai 3,50 ton/ha, 3,07 ton/ha.

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas.

Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ($\{\sum (P_i \times H_i)\}$).

Tabel 2. 170 Perhitungan Nilai Produksi Total Kabupaten Tegal

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum 2012	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
1	Bahan Makanan			
	Padi	373.524	409.900	153.107.487.600
2	Sayuran			-
	Kangkung	3.026	7.500	22.695.000
	Sawi/Cesim	35.020	14.000	490.280.000
	Bawang Merah	248.239	16.069	3.988.952.491
3	Buah-Buahan			
	Pisang	96.629	20.000	1.932.580.000
	Mangga	31.024	25.000	775.600.000
	Jambu Biji	9.153	25.000	228.825.000
	Jambu Air	3.905	50.000	195.250.000
	Pepaya	10.242	10.000	102.420.000
	Nangka	18.263	45.000	821.835.000
	Belimbing	2.243	40.000	89.720.000
4	Peternakan			
	Sapi Potong (ekor=250kg)	1.315.845	101.750	133.887.228.750
	Kerbau (ekor=250kg)	26.593	110.000	2.925.230.000
	Domba/Kambing (ekor=20kg)	930.958	65.000	60.512.270.000
	Kambing (ekor=20kg)	493.740	100.000	49.374.000.000
	Ayam Kampung (ekor=2kg)	6.500.169	57.357	372.830.193.333
	Ayam Buras (16 telur=1kg)	237.802	50.000	11.890.100.000
	Itik (ekor=1,5kg)	162.154	70.000	11.350.780.000
	Lainnya (puyuh, kelinci, angsa)	117.241	30.000	3.517.230.000
	Burung Dara	2.289	30.000	68.670.000
	Telur Ayam Kampung	7.144.390	2.000	14.288.780.000
	Telur Itik	912.840	2.000	1.825.680.000
	Telur Puyuh	43.642	500	21.821.000
	Susu	713.428	4.000	2.853.712.000
	Jumlah Total			827.101.340.174

Sumber : Data KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, 2021

Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2017 sebesar 104.908,85 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk yang dilihat dari dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan lahan di Kabupaten Tegal di tahun 2017 adalah sebesar 215.027,25 Ha dan di tahun 2031 diproyeksikan sebesar 225.583,05 Ha.

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dapat ditentukan status daya dukung lahan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa :

- Untuk Tahun 2017 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L , (215.027,25 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.
- Untuk Tahun 2031 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L , (225.583,05 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.

5) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 13,29 %. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah daripada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 171 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:					
	- ADH Berlaku	4.097.190,91	4.191.180,91	4.435.640,80	4.495.443,15	4.675.153,15
	- ADH Konstan	2.935.344,86	2.657.779,26	3.001.385,12	3.011.429,74	3.077.109,74
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	28.025.642,98	30.278.512,28	32.769.834,10	35.231.694,10	35.318.844,10
	- ADH Konstan	21.182.927,23	22.322.107,23	23.552.548,37	24.866.738,37	24.502.628,37
3.	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	14,84	12,50	13,29	12,76	13,24
	- ADH Konstan	13,78	13,25	12,87	12,11	12,56

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2021

D. Perdagangan

1) Sarana dan Prasarana Pasar

Tabel 2. 172 Kondisi Pasar Kabupaten Tegal Tahun 2016- 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Ribuan)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasar Kondisi Baik	2	2	5	4	4
2	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Ringan	0	0	3	5	4
3	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Sedang	4	4	6	5	5
4	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Berat	24	20	12	12	13
5	Jumlah Seluruh Pasar	30	26	26	26	26
	Persentase Pasar dalam kondisi Baik	6,67	7,69	19,23	15,38	15,38

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Pada Tahun 2020, jumlah Pasar dalam Kondisi Baik masih sebanyak 4 Pasar (15,38 %). Sedangkan sisanya merupakan Pasar dengan Kondisi kerusakan yang beragam, dari yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga yang mengalami kerusakan berat pada atap (bocor), kios, saluran air, lantai pasar yang masih becek, dan sarana lainnya.

Penerapan *e-Retribusi* pada pasar rakyat mulai diterapkan pada tahun 2020 di 2 (dua) Pasar, yaitu Pasar Pepedan dan Pasar Kupu. Tujuan dari penerapan *e-Retribusi* pada Pasar Rakyat adalah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi pada Pasar Rakyat melalui transaksi *non* tunai. Penerapan *e-Retribusi* ini direncanakan untuk diterapkan pada seluruh Pasar Rakyat secara bertahap.

Tabel 2. 173 Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Ribuan)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Operasi Pasar oleh Pemerintah Kabupaten	18	18	18	18	18
2	Operasi Pasar Oleh Pemerintah Provinsi	18	18	18	18	0
	Jumlah Operasi Pasar	36	36	36	36	18

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Pada Tahun 2020, jumlah Pasar dalam Kondisi Baik masih sebanyak 4 Pasar (15,38 %). Sedangkan sisanya merupakan Pasar dengan Kondisi kerusakan yang beragam, dari yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga yang mengalami kerusakan berat pada atap (bocor), kios, saluran air, lantai pasar yang masih becek, dan sarana lainnya.

2) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal dari tahun 2016 sampai tahun 2017 meningkat tetapi tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 174 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2016– 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Ribuan)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Ekspor	209.619.490.505	228.638.224.198	169.760.204.000	205.000.000.000	144.000.000.000
2.	Nilai Impor	16.312.612.489	54.801.884.058	0	0	0
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor)	193.306.878.015	173.836.380.139	199.306.877.015	102.000.000.000	144.000.000.000

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Tabel 2. 175 Jumlah Pelaku Ekspor Tahun 2016– 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Ekspor	6	7	8	9	11

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

3) Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua. Pada tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan mencapai 15,47% dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 17,37%. Perbedaan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor ini relatif mengalami inflasi yang cukup tinggi. Ditopang dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, perkembangan kota kecamatan yang cukup pesat, dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan yang signifikan, maka pada dasarnya sektor perdagangan dapat berkembang tanpa adanya campur tangan pemerintah secara masif. Tugas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sektor ini adalah menerapkan regulasi yang menjamin keadilan dalam berusaha, serta menyediakan infrastruktur pendukung sektor perdagangan yang dapat diakses oleh semua orang. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 176 Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor):					
	- ADH Berlaku	2.101.862,50	4.725.986,05	4.942.943,53	5.449.555,30	5.274.290,34
	- ADH Konstan	1.648.467,47	3.872.572,30	3.954.562,55	4.307.730,96	4.126.594,65
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	27.727.792,98	30.044.412,28	33.079.234,10	35.231.687,56	35.318.843,56
	- ADH Konstan	21.265.717,23	21.265.717,23	23.552.548,37	24.806.727,91	24.502.623,91
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)thd PDRB					
	- ADH berlaku	15,63	15,42	15,73	15,47	14,93
	- ADH Konstan	17,35	17,16	17,31	17,37	16,84

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal dari tahun 2016 sampai tahun 2017 meningkat tetapi tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 177 Jumlah Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang ditera Tahun 2017 - 2020

No.	Uraian	Jumlah per Unit			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	2422	2295	5509	2108
2.	Jumlah UTTP yang tidak ditera/tera ulang	4949	5076	2032	5433

No.	Uraian	Jumlah per Unit			
		2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah total UTTP	7371	7371	7541	7541
	Persentase Alat UTTP yang Ditera	32,86	31,14	73,05	27,95

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Dalam rangka mencapai terwujudnya perlindungan terhadap konsumen, dunia usaha dan masyarakat dalam hal kebenaran pengukuran dan penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam industri dan perdagangan, meningkatkan daya saing produk daerah dalam negeri maupun luar negeri, serta terciptanya tertib ukur di berbagai bidang, maka perlu peningkatan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, kegiatan metrologi legal berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsumen menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa. Sedangkan dalam perdagangan luar negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada bulan Oktober tahun 2016 telah membagi kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen khususnya penyelenggaraan metrologi legal dimana setiap Kota/Kabupaten diberi kewenangan dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, maka kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi akan diserahkan ke Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini yang mendasari Pemerintah Kabupaten Tegal mendirikan UPTD di akhir tahun 2016.

UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mulai operasional sejak tahun 2017. Namun dikarenakan belum memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) dari Kementerian Perdagangan maka di dua tahun pertama (2017 -2018) kegiatan metrologi legal dilaksanakan melalui kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal. Pada tahun 2019 akhirnya UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal dapat beroperasi secara mandiri setelah mendapatkan SKKPTTU di awal tahun 2019.

Persentase UTTP yang ditera/tera ulang meningkat pesat sejak UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal operasional secara mandiri. Pada tahun 2017 dan 2018 pada saat masih kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal persentase UTTP yang ditera/tera ulang masih berkisar 30% nan namun di tahun 2019 naik signifikan ke 73,05%.

Pada tahun 2020 semula ditargetkan persentase UTTP yang ditera/tera ulang dapat mencapai 85% , namun dengan adanya pandemi covid-19 dimana terjadi *refocushing* anggaran, pelaksanaan Sidang Tera Ulang yang direncanakan akan diselenggarakan di 25 pasar Pemerintah Kabupaten tidak terealisasi. Dengan anggaran terbatas pelayanan metrologi legal tetap dilaksanakan dengan memprioritaskan pelayanan di kantor. Dengan segala keterbatasan persentase UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun 2020 turun menjadi 27,95%.

4) Pemasaran Produk Dalam Negeri

Tabel 2. 178 Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pameran Tingkat Nasional	2	2	2	2	-
2	Pameran Tingkat Regional	2	1	1	1	-
3	Pameran Tingkat Lokal	1	1	1	1	-
4	Jumlah Seluruh Pameran yang Diikuti	5	4	4	4	-

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Pada tahun 2020, tidak ikut serta Pameran Promosi Produk dikarenakan *Refocushing* Anggaran untuk penanganan covid-19.

E. Perindustrian

1) Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang meliputi beberapa aspek dalam menciptakan struktur ekonomi yang kukuh sebagai penggerak ekonomi daerah yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Berikut beberapa aspek pembangunan industri antara lain :

a Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan wilayah yang ditujukan untuk berkembangnya kegiatan industri harus ditunjang dengan akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan pemerintah, infrastruktur tersebut meliputi jaringan energi dan listrik, sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi dan transportasi. Adapun infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan dan tempat pembuangan sampah. Rencana pengembangan perwilayahan industri telah dimasukkan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.

Tabel 2.179 Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tegal

No	Jenis Kawasan Peruntukan Industri	Lokasi Kecamatan
1	Industri Besar dan Menengah	
	KPI Margasari	Margasari
	KPI Pantura	Kramat, Suradadi dan Warureja
2	Industri Kecil dan Industri RumahTangga	Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulung, Dukuhturi, MargasaridanWarureja

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

b Pembangunan Sumber Daya Industri

UPTD laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian dalam rangka peningkatan daya saing daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah peningkatan kualitas (*quality*) mutu produk industri melalui pengujian dan pemesinan serta pelaksanaan sertifikasi pesonil dimana UPTD Laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian sejak tahun 2008 sudah teregistrasi / terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (ISO/IEC 17025;2017) LP-396 - IDN dan sejak Tahun 2017 terakreditasi/teregrestasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia (LSP-LMI) sebagai TUK Mandiri SP3 (Tempat Uji Kompetensi Personil) terverifikasi ulang nomor 002/SK-LSP-LMI/TUK-LM/X/2020 tanggal 9 oktober 2020 dengan skema Operasi mesin dan proses, Menggambar merencana dan mendesain, Fabrikasi, *Quality*.

Tabel. 2.180 Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Kategori (Pelanggan)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Kabupaten Tegal	141	263	336	365	300
Luar Kabupaten Tegal	47	51	136	150	136
Pendidikan	91	97	64	110	100
Total/Tahun	249	411	536	625	536

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa hal diantaranya sertifikasi produk dan standarisasi IKM dalam upaya meningkatkan daya saing industri daerah. Berikut data sertifikasi produk dan standarisasi IKM :

Tabel 2.181 Sertifikasi Produk IKM di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Ikm Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	Uji Nutrisi	39	2		2019-2020
2	Uji Kadaluarsa	7			2018-2019
3	PIRT	82	-	-	2018-2020
4	Halal	30	11		2018-2020
5	Pendaftaran Merk	96	3		2015-2020
6	BKI	-	-	4	2018-2019
7	SNIi			2	2018

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian kegiatan fasilitasi sertifikasi produk IKM dibiayai oleh APBD I kemudian APBD II dan APBN. Kegiatan fasilitasi yang biayai oleh APBN cenderung pada kegiatan yang lebih besar dan membutuhkan proses lebih lama daripada proses sertifikasi yang lainnya. Selain sertifikasi produk IKM juga dilakukan standarisasi IKM sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.182 Standarisasi IKM di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Standarisasi	Jumlah IKM Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	Dokumen Mutu	3	3		2018-2019
2	ISO 9001 : 2000			1	2008
3	ISO 9001 : 2008			1	2011
4	ISO 9001 : 2015			6	2017-2019
5	ISO 14001 : 2015		1		2019

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

f. Pengendalian Izin Usaha Industri

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha industri di Kabupaten Tegal perlu dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Izin Usaha Industri (IUI), dalam penerbitan IUI perlu adanya pengendalian melalui penerbitan Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, berikut data Rekomtek IUI yang telah diterbitkan :

Tabel 2.183 Rekomendasi Teknis Penerbitan IUI

No.	Nama Perusahaan	KBLI / Jenis Usaha	Tanggal Terbit
1.	CV Dok Abadi	33151 – Reparasi Kapal, Perahu dan Banguna Terapung	18 Juni 2020
2.	PT Citra Bahari Shipyard	30111 – Industri Kapal dan Perahu	19 Maret 2020
3.	PT Gopek Cipta Utama	10763 – Industri Pengolahan The	26 Agustus 2020
4.	PR Harjanti	10771 – Industri Kecap	26 Oktober 2020

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

g. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Tabel 2.184 Perusahaan SIINas dan IUI

No.	Uraian	Jumlah IKM	Keterangan
1.	Perusahaan yang sudah memiliki akun SIINas	66	IUI yang dimiliki belum Efektif
2.	Perusahaan yang sudah mengajukan Permohonan Verifikasi Teknis IUI	10	4 perusahaan telah diterbitkan rekomendasi teknis oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

F. Transmigrasi

Salah satu upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan Program Transmigrasi dalam rangka penyerapan lapangan kerja, namun penyerapan lapangan kerja melalui transmigrasi belum optimal dikarenakan pelaksanaan pelatihan, pengiriman dan penempatan transmigran merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam memberikan kuota calon transmigran dari Kabupaten Tegal. Berikut ini data rekapitulasi transmigran dari Kabupaten Tegal yang diberangkatkan pada tahun 2016 – 2020 :

Tabel 2. 185 Rekapitulasi Transmigran dari Kabupaten Tegal yang Diberangkatkan pada Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Jiwa	Tujuan
1	2016	3	8	Sandalan Kabupaten Pahuwoto Provinsi Gorontalo
		4	14	Bukit Aren Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
2	2017	2	13	Tangaona Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
		2	8	Bukit Aren Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	2018	3	13	Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
5	2019	3	16	Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
6	2020	0	0	-
Jumlah		27	110	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

1) Perencanaan Penganggaran Pogram

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top-down and bottom-up*. Perencanaan dan penganggaran program adalah untuk memastikan penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sesuai tahapan. Adapun pencapaian penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dan diharapkan 5 tahun kedepan dengan target 100% dapat diwujudkan.

Tabel 2. 186 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Disusun Tepat Waktu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data diatas maka penyusunandokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik tahapan maupun waktunya. Hal ini perlu dipertahankan dan secara kualitas masih diperlukan adanya peningkatan di masa mendatang.

2) Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui koordinasi stakeholder rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Pencapaian keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial sesuai tahapan dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 187 Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Keselarasn Dokumen Perencanaan Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial (%)	95	96	96	97	97

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial dengan dokumen perencanaan OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial belum mencapai 100% dikarenakan masih adanya kegiatan inisiatif dari OPD yang muncul setelah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat adanya dinamika dalam pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

3) Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur

Perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD di bidang perekonomian dan infrastruktur dapat menghasilkan kondisi perekonomian dan infrastruktur daerah yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen RKPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan Renja OPD pada rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur. Dengan keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan ekonomi dan kondisi infrastruktur di kabupaten Tegal. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perangkat daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur sesuai tahapan dapat dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel 2. 188 Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Keselarasn Dokumen Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur (%)	94	94	95	96	96

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Keselarasn dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur belum dapat mencapai 100% dikarenakan terdapat perbedaan dalam penerapan detail teknis kegiatan khususnya yang menyangkut konstruksi bangunan.

4) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan adalah untuk mengendalikan kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan dan mengevaluasi capaian indikator pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian operasional kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan serta evaluasi kinerja pembangunan. Hasil pencapaian kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan serta capaian indikator pembangunan sesuai target dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 189 Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata - Rata Deviasi Capaian Kinerja Fisik (%)	20,88	17,21	13,75	15,05	3,80
2.	Rata - Rata Deviasi Capaian Kinerja Keuangan (%)	34,80	28,59	22,73	21,86	11,63
3.	Rata - Rata Deviasi (%)	27,84	22,90	18,24	18,46	7,72
4	Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan (%)	72,16	77,1	81,76	81,54	92,28

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat kesesuaian rencana dan Realisasi Kegiatan dicerminkan dengan adanya rata-rata deviasi kegiatan yang dicapai. Semakin kecil deviasi antara rencana dan realisasi kegiatan semakin baik kinerja kegiatan pembangunan. Berdasarkan Tabel diatas, tingkat kesesuaian antara rencana dan realiasi kegiatan dalam 5 tahun terakhir semakin membaik. Tahun 2020 rata - rata deviasi kegiatan mencapai 7,72% dan merupakan yang terbaik selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan realisasi kegiatan tahun 2020 mencapai 92,28 %.

Tabel 2. 190 Tingkat Capaian Indikator Pembangunan Sesuai Target Tahun 2016-2020

No	Indikator Pembangunan	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Indikator sasaran tercapai	123	132	159	178	161
	Jumlah Indikator sasaran	200	200	200	200	200
	<i>Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)</i>	61,50	66,00	79,50	89,00	83,85
2.	Jumlah Indikator Program Tinggi/Sangat Tinggi	323	335	357	402	444
	Jumlah Indikator Program	518	518	518	518	518
	<i>Tingkat Capaian Tinggi/Sangat Tinggi (%)</i>	62,36	64,67	68,92	77,61	85,71
3.	Jumlah IKD tercapai	153	177	196	253	219
	Jumlah IKD	315	307	307	307	307
	<i>Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)</i>	48,57	57,65	63,84	82,41	71,33
4.	<i>Tingkat Capaian Indikator Sesuai Target (%)</i>	57,48	62,78	70,75	83,01	80,30

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat capaian indikator pembangunan sesuai target dapat dijadikan ukuran kinerja pembangunan yang dicerminkan dengan rata-rata indikator pembangunan yang tercapai baik indikator sasaran, indikator program maupun indikator kinerja daerah. Dengan tingkat ketercapaian > 80% menunjukkan kinerja yang cukup baik dan harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan di masa mendatang.

B. Keuangan dan Aset Daerah

1) Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Dalam Pengelolaan Keuangan daerah terdapat fungsi Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan yang antara lain mempunyai tugas mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, berikut data capaian 5 tahun terakhir terkait indikator capaian Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan.

Tabel 2. 191 Indikator Capaian Kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu (%)	93	95	95	100	100
2	Persentase ketersediaan Dana kasda terhadap kebutuhan anggaran kas per bulan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Capaian kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam tahun 2019 dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya. Namun untuk ketepatan penerbitan SP2D secara tepat waktu belum bisa mencapai 100%. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan administrasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar semua pihak agar persyaratan administrasi dalam penerbitan SP2D dapat dipenuhi.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tegal yang semakin baik, kondisi tersebut merupakan pencapaian dari Indikator sasaran RPJMD tahun 2016-2020, berikut data capaian 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 192 Capaian Kinerja Keuangan Daerah atas Audit LKDP BPK Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini WTP atas Audit LKPD BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berhasil mempertahankan WTP sejak Tahun 2016 atau sudah 3 kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, BPK masih menemukan beberapa permasalahan namun dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset tetap, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

2) Penyusunan Anggaran Daerah

APBD harus disusun mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana APBD harus disusun tepat waktu. Berikut capaian kinerja Program Penyusunan Anggaran Daerah 5 tahun Tahun 2016 - 2019.

Tabel 2. 193 Capaian Indikator Program Penyusunan Anggaran Daerah Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
APBD tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
APBD-P tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
SKPD yang mengumpulkan RKA SKPD tepat waktu sesuai SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA (%)	15	20	25	30	35
RKA SKPD yang sesuai dengan SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA (%)	60	65	70	75	80

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat kegiatan pembangunan dan menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas. Salah satu sanksinya, kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan.

3) Pengelolaan Barang Milik / Aset Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 Jenis/bentuk Pengelolaan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dari 11 tersebut maka dirata-rata menjadi indikator Pengelolaan BMD yang baik dan benar, berikut capaian 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 194 Indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik/Aset Daerah Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah OPD yang telah mengelola BMD yang baik dan benar	22	24	24	26	30
Jumlah seluruh OPD	56	48	48	48	48
Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	40	50	60	55	62,5

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Dalam 5 tahun terakhir, OPD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 62,5%. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik /aset daerah negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah.

4) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dalam APBD yang perlu ditingkatkan pencapaian target oleh perangkat daerah pengampu. Berikut data kinerja pencapaian PAD selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 195 Capaian Kinerja Realisasi PAD Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasa Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PAD	316.051.189.734	375.631.165.351	372.282.676.055	436.003.392.413	437.354.766.316
Jumlah APBD	2.161.161.059.588	2.450.766.552.130	2.524.365.919.815	2.755.677.484.152	2.608.651.547.250
Rasio PAD	14,6%	15,1%	14,7%	15,8%	16,7%

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

Sistem pengelolaan data dan penetapan pajak daerah belum optimal ditandai persentase potensi pajak yang ditetapkan masih kurang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak didalam membayar pajaknya. Untuk itu diperlukan *updating* data pajak secara menyeluruh dan komprehensif.

Tabel 2. 196 Capaian Kinerja PAD Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasa Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi PAD	316.051.189.734	375.631.165.351	372.282.676.055	436.003.392.413	437.354.766.316
Target PAD	312.688.892.000	370.096.012.000	418.830.489.000	499.974.699.000	408.838.286.000
Deviasi PAD	101%	101%	88,9%	96,9%	106,98%

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

5) Pengelolaan Pajak Daerah

Pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 197 Capaian Kinerja Hasil Pajak Daerah yang tertagih Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasa Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pajak Daerah	69.810.605.561	96.425.287.892	107.035.473.258	112.808.450.157	125.226.436.076
Jumlah PAD	316.051.189.734	375.531.165.351	372.282.676.055	436.003.392.413	437.354.786.316
Rasio Pajak	22 %	26 %	29 %	28 %	29 %

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

Penerimaan pajak daerah belum maksimal, faktornya adalah Kurangnya kesadaran warga masyarakat atas pembayaran pajak, dan sosialisasi, penyuluhan dan ke Wajib Pajak, *Spot-spot* pelayanan dan sarana pembayaran pajak melalui perbankan dan pihak swasta/PPOB masih kurang, dan sarana prasarana yang dimiliki belum memadai, seperti mobil pelayanan pajak yang bersifat *mobile online*, ruang pelayanan pajak yang terkoneksi dengan perbankan.

Pendataan terhadap potensi pajak belum dapat dilakukan secara maksimal, antara lain pendataan obyek baru, pendataan dan penilaian ulang obyek yang sudah ada.

6) Pengelolaan Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam Undang - Undang Perpajakan belum dilunasi hingga periode laporan keuangan

Pengelolaan piutang pajak masih sangat terbatas, hal ini disebabkan data pajak bermasalah seperti obyek pajak tidak ditemukan, double nomor obyek pajak, obyek pajak dalam sengketa, obyek pajak berubah fungsi dan kepemilikan, masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 2. 198 Hasil Pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih Tahun 2017 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Piutang Tertagih non PBB dan BPHTB	38.110.360	56.712.923	4.542.294.640	-
Jumlah Piutang non PBB dan BPHTB	86.641.925	109.807.788	4.592.638.505	4.010.011.558
Rasio Piutang Pajak	43,98 %	51,65 %	98,90 %	-

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

Keterangan : Bappenda (BP2D) berdiri tahun 2017 jumlah Piutang tahun 2017 adalah akumulasi tahun 2015-2016

Tabel 2. 199 Capaian Kinerja Hasil Pajak PBB yang tertagih Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Piutang Tertagih PBB	1.607.038.261	1.880.095.681	2.069.387.830	1.444.135.173	
Jumlah Piutang PBB	4.178.906.369	6.212.145.007	6.828.477.052	7.791.584.519	9.442.475.891
Rasio Piutang Pajak	38,5 %	30,3 %	30,3 %	18,5 %	

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

C. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepegawaian Daerah

Dengan Program Kepegawaian Daerah diharapkan persentase ASN mendapatkan hukuman disiplin akan menurun secara signifikan, persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya, persentase jabatan fungsional (non guru dan kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya, rasio pegawai dengan pendidikan perguruan tinggi dan menengah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio pegawai fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20 jam/tahun, dan persentase PNS mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan bertambah secara signifikan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras BKD Kabupaten Tegal selaku perangkat daerah yang bertugas dalam bidang kepegawaian. Sebagai ilustrasi tersaji data kepegawaian mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu sampai dengan tahun 2024 diharapkan akan bertambah.

Tabel 2. 200 Kepegawaian Daerah

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Hukuman Disiplin	0.32	0.20	0.54	0.15	0.12
2	Persentase Jabatan Struktural yang Diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	92.89	91.11	84.62	77.30	87.97
3	Persentase Jabatan Fungsional yang Diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	43.10	42.77	40.46	38.50	35.76

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Rasio Pegawai (PNS) (Berpendidikan Perguruan Tinggi)	0.64	0.68	0.73	1.03	1.10
5	Rasio Pegawai (PNS) Fungsional Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	9.07	9.99	8.13	8.61	9.87
6.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	93.68	94.29	92.00	93.36	93.50

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bahwa persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin jumlahnya relatif kecil, namun dengan masih terbatasnya jumlah PNS dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, diharapkan PNS yang sudah ada dapat bekerja secara maksimal dan memiliki tingkat disiplin tinggi yang diwujudkan dengan tidak adanya PNS yang mendapatkan hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun tingkat berat.

Persentase jabatan struktural terisi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pada periode tersebut terkendala adanya larangan mutasi dan promosi sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal lainnya adalah penyederhanaan birokrasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, ditargetkan selesai pada akhir Desember 2020 sehingga pemerintah daerah tidak melaksanakan pengisian jabatan struktural yang kosong.

Minat PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional non guru/kesehatan mulai tahun 2015-2018 jumlahnya semakin bertambah, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan. Adanya moratorium melalui Surat Menpan & RB Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015 merupakan kendala utama dalam pengisian jabatan fungsional mengingat penambahan pegawai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.

Rasio pegawai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi meliputi diploma, sarjana dan pasca sarjana dibandingkan dengan pegawai dengan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan dasar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti diketahui bahwa formasi pengadaan CPNS tahun 2018 dan tahun 2019 adalah diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan tenaga teknis lainnya sehingga dipersyaratkan pendidikan sarjana dan diploma.

Pegawai fungsional diluar guru dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah pegawai selain guru dan tenaga kesehatan rasionya masih sangat rendah walaupun setiap tahunnya mengalami penambahan. Hal ini selain masih rendahnya minat PNS untuk menduduki jabatan fungsional juga karena formasi kebutuhan jabatan fungsional belum dilakukan penyesuaian sehubungan dengan adanya perubahan perangkat daerah dan *zero growth* dalam hal penambahan pegawai yang disesuaikan dengan jumlah PNS pensiun.

Jabatan fungsional non guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi jumlahnya *relative* tinggi mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Untuk menduduki jabatan fungsional terdapat persyaratan-persyaratan antara lain lulus uji kompetensi jabatan fungsional, mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jabatan fungsional serta memiliki pendidikan yang linier sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 93.50% pejabat fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun, dan PNS yang mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan meningkat secara signifikan. Adanya kewajiban PNS untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun diharapkan akan memberikan motivasi kepada PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara klasikal maupun nonklasikal. persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 20 jam dalam setahun dan pegawai yang telah mengikuti seminar/*workshop* minimal dalam 2 tahun terakhir selama kurun waktu 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 201 Data Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah per Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PNS yang mengikuti diklat 20 jam dalam setahun	-	-	-	19.75	58.80	47.49
2	Persentase PNS mengikuti seminar/ <i>workshop</i> /sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	-	-	-	16.50	29.10	33.40

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan secara umum mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penambahan secara signifikan. Dimensi kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan memiliki bobot yang cukup besar dalam indeks profesionalitas ASN. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki strategi peningkatan kompetensi salah satunya adalah bahwa seluruh pejabat struktural pada perangkat daerah diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan melalui metode *coaching* dan *mentoring* kepada pegawainya. Selain itu pelatihan melalui bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya melalui *daring* merupakan salah satu alternatif lain.

D. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan fungsi perencanaan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil-hasil dari penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Kinerja penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu persentase hasil kelitbangan yang

termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Implementasi hasil kelitbangan dalam pembangunan daerah merupakan hasil penelitian dilakukan sesuai kebutuhan maupun hasil kajian strategis terhadap permasalahan actual yang dihadapi daerah. Berdasarkan upaya yang telah berjalan maka hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2019 semakin meningkat, meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 202 Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasa Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	91,18	92,21	93,76	94,42	58,64

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dimasa mendatang. Sistem pendataan dan pelaporan kelitbangan yang belum terintegrasi dalam satu lembaga dimanamasing-masing lembaga/instansi yang melakukan fungsi kelitbangan belum sepenuhnya melakukan koordinasi dan sinergi menjadi salah satu kendala yang perlu dibenahi. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, maka pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui jaringan penelitian dan inovasi, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan Perguruan Tinggi, serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

E. Pengawasan

1) Pengawasan oleh Inspektorat

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk *audit*, *reviu*, *monitoring*, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator program Persentase penyelesaian TLHP BPK, Itprov, dan Itkab. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara reguler. Kegiatan-kegiatan dalam program ini menghasilkan analisis dan rekomendasi terhadap perbaikan kinerja pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun Aparatus Sipil Negara (ASN). Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/pengawasan dapat menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menunjukkan sejauhmana rekomendasi terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja dan keuangan telah dilakukan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh pihak yang terkait, baik Inspektorat selaku APIP maupun perangkat daerah selaku pelaksana rekomendasi atas temuan LHP. Sebagai ilustrasi tersaji data tingkat penyelesaian tindak lanjut LHP baik dari pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pengawas internal (APIP) mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 203 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	67,90	83,97	90,08	90,38	91,67
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi	27,66	68,46	68,35	100	59,26
3	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten	47,27	71,17	63,99	35,65	8,94

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK mengalami peningkatan, namun penyelesaian atas tindak lanjut temuan APIP yaitu justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perangkat daerah belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pada LHP Inspektorat Provinsi dan Kabupaten tahun 2018 tidak segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk penyelesaian temuan hasil Pemeriksaan Khusus menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator program, yaitu : (1) Persentase Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Indikator, (2) Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah, dan (3) Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel. Masing masing indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja Inspektur Pembantu yang akan datang sesuai draf hasil perubahan kelembagaan Inspektorat,

dengan nomenklatur masing-masing Inspektur Pembantu secara jelas berdasarkan bidang tugas, dan tidak lagi berdasarkan wilayah /audit. Nomenklatur Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus.

Indikator Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Indikator dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi untuk mengakselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Program ini bertujuan untuk menghasilkan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh instansi terkait yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data unit kerja yang telah ditetapkan menuju WBK/WBBM sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2. 204. Unit Kerja Ditetapkan Menuju WBK/WBBM

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit kerja	2	2	6	6	8
2	Persentase	4,16	4,16	12,48	12,48	16,67

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan.

Indikator Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan melaksanakan asistensi dan pendampingan dalam rangka pengawalan pencapaian tujuan organisasi, baik pada level perangkat daerah maupun pemerintah daerah. Program ini merupakan implementasi dari pengawasan intern berbasis risiko yang mengamankan hasil pengawasan intern harus dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang menunjukkan perbaikan budaya kinerja menuju penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. Selama ini capaian IKU masing-masing perangkat daerah secara umum belum menunjukkan capaian yang diharapkan, yang tercermin dari akumulasi hasil penilai kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB dengan skor 60,10 atau dengan kategori Baik (B batas bawah).

Indikator Persentase Perangkat Daerah menyajikan laporan keuangan secara akuntabel yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan melaksanakan asistensi dan pendampingan pada perangkat daerah, agar dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan data dukung yang sah dan memadai. Atas pencapaian indikator ini, secara umum perangkat daerah telah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, terbukti pada lingkup laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dinilai baik oleh BPK dengan predikat WTP. Namun demikian, disadari masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang perlu didorong terus agar mampu menyajikan laporan keuangan secara akuntabel. Perangkat daerah tersebut adalah jajaran kecamatan, yang pada saat uji petik pemeriksaan BPK pada tahun 2020 atas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 masih ditemukan beberapa temuan. Kondisi ini menuntut perhatian lebih dari APIP untuk lebih intensif melakukan asistensi/pendampingan.

F. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara padainstansi Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Gambaran umum mengenai capaian di Sekretariat daerah sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah difokuskan pada indikator Persentase Indeks reformasi birokrasi, OPD rumpun pemerintahan skor LKJIP B, Nilai SAKIP Kabupaten, Persentase IKM Kecamatan, dan Persentase IKM Kabupaten. Indikator-inidkator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum yang menjadi tanggungjawab koordinasi Sekretariat Daerah. Berikut digambarkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 205 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	44,56	45,01	45,25	63,69	63,69
2	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Skor LKJIP B + (%)	53,87	54,74	55,41	66,66	72,91
3	Nilai SAKIP Kabupaten	56,9	57,0	60,01	61,36	61,36
4	Persentase IKM Kecamatan (%)	69,04	69,22	71,28	77,77	80,41
5	Persentase IKM Kabupaten (%)	70,8	71,4	71,8	78,37	80,85

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2021

Capaian kinerja Pemerintah Daerah difokuskan pada indikator Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 63,69, persentase OPD rumpun pemerintahan sebesar skor LKJIP B +, sebesar 72,91%, Nilai SAKIP Kabupaten sebesar 61,36, Persentase IKM Kecamatan sebesar 77,77 dan Persentase IKM

Kabupaten sebesar 78,37. Indikator-inidkator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum yang menjadi tanggungjawab koordinasi Sekretariat Daerah. Peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah tersebut memerlukan upaya-upaya tertentu untuk dapat meningkatkannya. Salah satunya mengoptimalkan peran koordinasi, asistensi dan fasilitasi Asisten Sekda yang mengampu semua OPD di Kabupaten Tegal.

2) Koordinasi Implementasi Peraturan-Peraturan Pemerintah

Kabupaten Tegal sebagai wilayah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia wajib melaksanakan atau mengimplementasikan peraturan pemerintah yang ada. Di samping itu, Kabupaten Tegal juga memerlukan kerjasama daerah atau kerjasama antara daerah untuk akselerasi kinerja pembangunan. Berikut digambarkan kondisi implementasi peraturan pemerintah dan kerjasama daerah.

Tabel 2. 206 Koordinasi Implementasi Peraturan-Peraturan Pemerintah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peraturan Pemerintahan yang Diimplementasikan	89,9	91,2	92,6	92,8	75
2.	Persentase Kerjasama antar Pemerintah Daerah yang Terealisasi	100	100	100	120	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2021

Capaian presentase peraturan pemerintahan yang diimplementasikan yang semakin baik dari tahun 2016 sebesar 89,9 menurun setiap tahun dan pada tahun 2020 tercapai sebesar 75. Kabupaten Tegal juga memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah untuk akselerasi kinerja pembangunan, untuk Tahun 2019 dari target 20 terealisasi sebanyak 24 (120%), kerjasama antar pemerintah daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa koordinasi Setda dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah dan kerjasama antar pemerintah daerah relatif telah berlangsung optimal meskipun ke depan perlu dilakukan upaya-upaya koordinasi lebih sinergis agar peraturan pemerintah yang ada semua dapat diimplementasikan dalam bentuk peraturan pelaksanaan di daerah maupun pelaksanaan melalui program dan kegiatan yang ada.

3) Layanan Bidang Hukum, Pengadaan Barang Jasa dan Kehumasan Kepala Daerah

Pembentukan Perda merupakan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Daerah di samping layanan di bidang penyebaran informasi kehumasan kepala daerah. Berikut capaian kinerja bidang hukum, pengadaan barang dan jasa serta kehumasan lima tahun terakhir.

**Tabel 2. 207 Layanan Bidang Hukum, Pengadaan Barang Jasa dan
Kehumasan Kepala Daerah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	100	100	100	100	100
2.	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	100	100	100	300	100
3	Persentase OPD lelang selesai	99,5	99,7	99,8	96	74,47
4.	Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara <i>on-line (e- procurement)</i>	100	100	100	100	100
5	Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2021

Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan sebesar 100% (target 8 Perda), sedangkan penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi sebanyak 21 dari 7 target (300%).

Persentase OPD yang melakukan lelang selesai tidak terpenuhi dari 126 total yang ditenderkan ada 5 gagal tender (96%). Namun proses selesai yang ada seringkali tidak di awal waktu hal ini terjadi karena terlambatnya OPD dalam mengumumkan paket pekerjaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pelelangan (SIRUP) di awal tahun.

Kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat telah optimal. Hal ini menggambarkan upaya mendiseminasikan informasi pembangunan kepada masyarakat telah berlangsung sesuai SOP.

G. Sekretariat DPRD

1) Peningkatan Fungsi Legislasi

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi dimana DPRD memiliki kekuasaan untuk menyusun peraturan daerah. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya menggunakan indikator penganggaran raperda, jumlah prolegda dan jumlah perda yang ditetapkan dalam 1 tahun. Data selama kurun waktu 5 tahun dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 208 Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk
Melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	49,51	51,11	52,31	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2021

Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah ada disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal belum sepenuhnya terarah dan akuntabel.

Tabel 2. 209 Data Raperda yang Dianggarkan, Prolegda, dan Perda yang di tetapkan dari Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pembahasan Perda yang dianggarkan	7	7	7	8	5
2.	Jumlah Prolegda	10	22	13	15	12
3.	Jumlah Perda ditetapkan	14	13	7	8	17

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2021

2) Peningkatan Fungsi Pengawasan

Sesuai fungsinya DPRD sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka melalui program ini diharapkan adanya optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menggambarkan jalannya fungsi pengawasan DPRD maka menggunakan indikator persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 210 Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan	52,97	53,21	54,22	100	90

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2021

Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupnya anggaran.

H. Kecamatan

Basis pembangunan kecamatan sebagai koordinator, asistensi dan fasilitasi desa adalah model Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya mendorong *stakeholders* di kecamatan untuk mewujudkan desa mandiri sebagai indikator keberhasilan pembangunan di level desa yang pada akhirnya menggambarkan pembangunan di seluruh kecamatan pada umumnya. Kondisi kinerja indeks pembangunan desa di wilayah kecamatan dapat dicermati dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 211 Indeks Desa Membangun Wilayah Kecamatan Tahun 2020

Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun 2020						
Kecamatan	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Jumlah
Margasari	0	2	17	2	0	21
Bumijawa	0	10	9	1	0	20
Bojong	0	2	10	5	0	17
Balapulang	0	3	14	1	0	18
Pagerbarang	0	0	17	1	0	18
Lebaksiu	0	0	10	0	0	10
Jatinegara	0	5	11	1	0	17
Kedung Banteng	1	5	4	0	0	10
Pangkah	0	0	16	3	0	19
Slawi	0	0	12	2	1	15
Dukuhwaru	0	0	6	6	1	13
Adiwarna	0	0	13	0	0	13
Dukuhturi	0	1	21	1	0	23
Talang	0	0	3	2	0	5
Tarub	0	0	19	0	0	19
Kramat	0	0	16	4	0	20
Suradadi	0	0	10	1	0	11
Warureja	0	3	8	1	0	12

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

IPD terdiri dari 5 Dimensi, 12 variabel dan 42 indikator yang hasil akhirnya berupa kategori desa mandiri, berkembang dan tertinggal. 5 dimensi IPD adalah dimensi pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kami memandang kelima dimensi ini cukup strategis untuk menjadi panduan pembangunan pemerintah desa yang diasistensi dan difasilitasi pemerintah kecamatan. Posisi desa tertinggal Kab. Tegal sebanyak 31 desa (11,03%) dibanding 281 desa se-Kab. Tegal.

I. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) tercapai 100% (sangat tinggi) dari Tahun 2015-2019. Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Tabel 2. 212 Kondisi Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi Trantibum				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah LSM Aktif	75	75	79	79	80
2.	Persentase Laporan Ipoleksosbudhankam lengkap	100	100	100	100	100
3.	Persentase Dialog Umat Beragama Dialogis	100	100	100	100	100
4.	Media Komunikasi Umat Beragama Aktif	1	1	1	1	2
5.	Persentase Siskamling terintegrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, 2021

Dengan naiknya jumlah LSM yang mendaftar di Kesbangpol setiap tahun menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah meningkatkan. Kinerja merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu.

Pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 1 kali dialog yang terdiri dari dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dan dialog antara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dengan Masyarakat Kabupaten Tegal. Dialog Kerukunan Umat Beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur/pamphlet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 1 kali. Kecamatan dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argumen bahwa telah ditangkapnya salah satu warga setempat sebagai pelaku aksi teror dan tahun 2017 telah dipulangkan eks warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekirangan Kecamatan Talang. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menangani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal.

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa.

Pendidikan politik masyarakat dengan indikator pertama yaitu ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat sampai saat ini di tahun 218 terdapat 92 buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam system database ormas Kabupaten Tegal.

2) ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

a. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya, walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar kabupaten/kota khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Tegal yaitu sebesar Rp 1.014.808,- yang terdiri dari rata-rata pengeluaran untuk komoditas makanan sebesar Rp 531.480,- dan pengeluaran untuk komoditas non makanan sebesar Rp 483.328,-.

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Oleh karena itu pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok.

Tabel 2. 196 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tegal, 2019 dan 2020

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2019	2020
Makanan/Food		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	51 416	51 160
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	3 309	3 409
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	18 193	19 902
Daging/ <i>Meat</i>	15 975	19 622
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	21 791	25 932
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	26 773	34 192
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	13 223	15 968
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	23 162	25 603
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	10 010	10 982
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	15 546	17 876
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	10 380	12 735
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	9 216	9 750
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	193 159	225 984
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	55 151	58 365
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	467 303	531 480

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2019	2020
Bukan makanan/<i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	180 596	218 356
Aneka komoditas dan jasa/ <i>Goods and services</i>	100 016	127 773
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	23 669	28 599
Komoditas tahan lama/ <i>Durable goods</i>	46 965	50 779
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	24 145	34 137
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	25 389	23 684
Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i>	400 780	483 328
Jumlah/<i>Total</i>	868 083	1 014 808

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

Konsumsi makanan penduduk Kabupaten Tegal mencapai Rp 531.480,- atau 52,78% dari total pengeluaran. Dari total pengeluaran makanan sebesar 9,63% digunakan untuk padi-padian. Pengeluaran makanan terbesar lainnya adalah konsumsi makanan/minuman jadi dan rokok masing-masing sebesar 42,52% dan 10,98% dari total pengeluaran konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran konsumsi paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 0,64%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 197 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tegal, 2019 dan 2020

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2019	2020
Makanan/<i>Food</i>		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	11,00	9,63
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	0,71	0,64
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	3,89	3,74
Daging/ <i>Meat</i>	3,42	3,69
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	4,66	4,88
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	5,73	6,43
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	2,83	3,00
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	4,96	4,82
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	2,14	2,07
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	3,33	3,36
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	2,22	2,40
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	1,97	1,83
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	41,33	42,52
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	11,80	10,98
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	100	100
Bukan makanan/<i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	45,06	45,18
Aneka komoditas dan jasa/ <i>Goods and services</i>	24,96	26,44
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	5,91	5,92
Komoditas tahan lama/ <i>Durable goods</i>	11,72	10,51
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	6,02	7,06
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	6,33	4,90
Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i>	100	100
Jumlah/<i>Total</i>	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

b. Sumber Daya Manusia

Tingkat ketergantungan penduduk atau Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang menunjukkan jumlah kelompok usia non produktif (0-15 tahun dan di atas 65 tahun) yang ditanggung oleh kelompok usia produktif (diatas 15-65 tahun). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2016-2020 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 198 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk Produktif	945.509	949.810	953.218	956.072	1.113.809
2.	Penduduk Non Produktif	483.877	483.705	484.007	484.626	438.430
3.	Rasio Ketergantungan	51,17	50,92	50,77	50,69	39,36

Sumber; Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Rasio ketergantungan Kabupaten Tegal dalam 5 tahun terakhir relatif berimbang, proporsi penduduk produktif dan nonproduktif relatif sama. Hal ini mengindikasikan bonus demografi belum terjadi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan angka kelahiran masih di atas rata-rata 2 kelahiran/per keluarga. Di samping itu jumlah penduduk lansia semakin bertambah yang menyumbang angka penduduk non produktif yang tinggi. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 199 Rasio Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang ditamatkan 2019-2020

No	Tingkat Pendidikan	2019 Jumlah (Jiwa)	%	2020 Jumlah (Jiwa)	(%)
1	SD/lebih rendah	532.320	50,44	470.540	44,31
2	SMP/ sederajat	234.740	22,24	246.786	23,24
3	SMA Umum	108.708	10,30	93.621	8,82
4	SMA Kejuruan	111.044	10,52	196.658	18,52
5	Diploma I/II/III	16.084	1,52	18.183	1,71
6	Universitas	52.514	4,98	36.224	3,41
	J U M L A H	1.055.410	100	1.062.011	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021 (diolah)

* Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Sementara itu penduduk yang tidak/belum sekolah semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi sekolah penduduk meningkat setiap tahunnya. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 200 Rasio Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020

No	Lapangan Pekerjaan	2020 Jumlah (Jiwa)*	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	107.929	17,12
2	Pertambangan dan Penggalian	7.490	1,19
3	Industri Pengolahan	149.754	23,75
4	Listrik, Gas dan Air	1.524	0,24
5	Bangunan	47.779	7,58
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel	184.184	29,21
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	29.785	4,72
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanaha	13.362	2,12
9	Jasa Kemasyarakatan	88.786	14,08
	JUMLAH	630.593	100

Sumber : Bappeda dan Litbang, 2021 (diolah)

*Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Angka sektor pertanian menunjukkan penurunan pada tahun-tahun terakhir. Hal ini karena sektor pertanian semakin tidak menarik bagi keluarga petani, utamanya anak muda. Untuk itu diperlukan strategi agar kaum muda tertarik menjadi petani dan menggeluti usaha pertanian.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015-2020

Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%) Tahun 2015- 2019	Pertumbuhan (%) Tahun 2019-2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*)		
1	PENDAPATAN	2.097.095.623.983	2.161.161.059.588	2.450.766.552.130	2.524.365.919.815	2.755.677.484.152	2.649.974.183.284	7,07	(3,84)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	304.000.970.135	316.051.189.734	375.531.165.351	372.282.676.055	436.003.392.413	438.541.666.699	9,43	0,58
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	64.737.082.699	69.810.605.561	96.425.287.892	107.035.473.258	122.808.450.157	125.236.006.697	17,36	1,98
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.220.835.174	21.313.939.246	20.047.124.895	17.833.906.345	25.207.739.921	19.290.694.924	8,45	(23,47)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.236.793.181	11.403.678.765	25.475.140.654	12.576.924.389	22.395.196.773	14.185.195.523	24,78	(36,66)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	211.806.259.081	213.522.966.162	233.583.611.910	234.836.372.063	265.592.005.562	279.829.769.555	5,82	5,36
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.787.067.853.123	1.835.602.482.074	1.921.568.586.197	2.008.586.726.208	2.178.562.532.180	2.056.187.504.939	5,08	(5,62)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.619.100.911.696	1.676.695.687.400	1.739.698.106.702	1.830.906.493.271	1.972.204.226.336	1.900.438.144.445	5,06	(3,64)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	32.554.722.696	40.792.559.417	38.360.380.613	29.421.275.289	22.161.572.062	36.287.432.768	(9,17)	63,74
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.085.549.293.000	1.162.102.111.000	1.141.687.714.000	1.144.494.182.000	1.198.561.641.000	1.086.704.382.000	2,51	(9,33)
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	68.489.256.000	290.589.280.983	325.623.713.089	339.287.872.985	365.945.635.277	354.722.997.677	52,04	(3,07)
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0	0	0	35.000.000.000	44.577.009.000	64.411.379.000	27,36	44,49
1.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	350.887.481.000	0	0	0	0	0	(100)	0
1.2.1.6	Dana Desa	81.620.159.000	183.211.736.000	234.026.299.000	282.703.162.997	340.958.368.997	358.311.953.000	42,96	5,09

NO	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%) Tahun 2015-2019	Pertumbuhan (%) Tahun 2019-2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*)		
1.2.2	Transfer antar-daerah	167.966.941.427	158.906.794.674	181.870.479.495	177.680.232.937	206.358.305.844	155.749.360.494	5,28	(24,52)
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	140.539.246.005	138.509.897.674	164.221.871.495	167.207.542.937	173.568.253.580	151.186.151.494	5,42	(12,90)
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	27.427.695.422	20.396.897.000	17.648.608.000	10.472.690.000	32.790.052.264	4.563.209.000	4,57	(86,08)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.026.800.725	9.507.387.780	153.666.800.582	143.496.517.552	141.111.559.559	155.245.011.646	119,97	10,02
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.026.800.725	9.507.387.780	153.666.800.582	143.496.517.552	141.111.559.559	155.245.011.646	119,97	10,02
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BELANJA	1.934.297.115.658	2.422.128.524.079	2.453.004.538.262	2.575.620.503.042	2.717.431.598.854	2.505.375.151.695	8,87	(7,80)
2.1	BELANJA OPERASI	1.472.162.882.985	1.546.321.787.664	1.611.513.759.083	1.705.253.631.133	1.776.068.220.040	1.683.501.969.665	4,80	(5,21)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.065.429.884.593	1.141.972.425.691	1.062.190.303.509	1.108.018.481.665	1.133.760.553.898	1.068.550.795.583	1,57	(5,75)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	333.743.691.056	370.521.780.473	477.065.476.668	484.494.743.000	578.593.810.142	571.044.664.082	14,75	(1,30)
2.1.3	Belanja Bunga	10.570.714	0	0	0	0	0	(100)	0
2.1.4	Belanja Hibah	50.433.376.631	17.959.153.500	55.420.678.906	92.476.109.948	39.818.765.000	38.230.180.000	(5,74)	(3,99)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22.545.360.000	15.868.428.000	16.837.300.000	20.064.800.000	23.895.091.000	5.676.330.000	1,46	(76,24)
2.2	BELANJA MODAL	255.207.688.302	516.642.310.814	437.758.902.809	417.983.021.935	434.393.482.658	248.884.723.850	14,22	(42,71)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.305.450.000	7.237.394.227	7.691.783.916	4.136.076.000	1.500.000	78.317.293.331	(84,03)	5.221.052.89
2.4	BELANJA TRANSFER	204.621.094.371	351.927.031.374	396.040.092.454	448.247.773.974	506.968.396.156	494.671.164.849	25,46	(2,43)

NO	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%) Tahun 2015-2019	Pertumbuhan (%) Tahun 2019-2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*)		
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	7.736.422.556	8.906.448.453	9.980.183.500	9.012.448.100	8.243.113.740	10.151.562.329	1,60	23,15
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	196.884.671.815	343.020.582.921	386.059.908.954	439.235.325.874	498.725.282.416	484.519.602.520	26,16	(2,85)
	DEFISIT	162.798.508.325	(260.967.464.491)	(2.237.986.132)	(51.254.583.227)	38.245.885.298	144.599.031.589	(30,38)	278,08
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	249.830.040.963	380.637.664.744	109.163.079.628	111.098.862.487	50.685.997.599	73.192.725.652	(32,89)	44,40
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	263.448.674.165	413.198.664.744	133.104.079.628	119.976.862.487	60.034.997.599	89.041.725.652	(30,91)	48,32
3.1.1	Penggunaan SILPA	263.255.866.829	412.628.549.288	119.670.200.253	106.925.093.496	59.879.097.966	88.931.882.897	(30,94)	48,52
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	13.159.458.900	12.840.541.100	0	0	(100)	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.000.000	0	0	0	0	0	(100)	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	142.807.336	570.115.456	274.420.475	211.227.891	155.899.633	109.842.755	2,22	(29,54)
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.618.633.202	32.561.000.000	23.941.000.000	8.878.000.000	9.349.000.000	15.849.000.000	(8,98)	69,53
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	118.633.202	0	0	0	0	0	(100)	0
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.500.000.000	16.561.000.000	13.941.000.000	8.849.000.000	9.349.000.000	15.849.000.000	(8,78)	69,53
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0	16.000.000.000	10.000.000.000	0	0	0	(100)	0

NO	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%) Tahun 2015- 2019	Pertumbuh an (%) Tahun 2019-2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*)		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	29.000.000	0	0	(100)	0
	PEMBIAYAAN NETTO	249.830.040.963	380.637.664.744	109.163.079.628	111.098.862.487	50.685.997.599	73.192.725.652	(32,89)	44,40
	SILPA TAHUN BERKENAAN	412.628.549.288	119.670.200.253	106.925.093.496	59.844.279.260	88.931.882.897	217.791.757.241	(31,86)	144,90

*) Realisasi APBD Tahun 2020 unaudited
Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

a. Pendapatan Daerah

Struktur APBD Kabupaten Tegal secara umum terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah yang semula terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berubah menjadi (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas (1) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan (2) Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas (1) Pendapatan Hibah, (2) Dana Darurat, serta (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Pendapatan Daerah dapat didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam periode 2015-2019 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7,07% sebesar Rp2.097.095.623.983,00 menjadi Rp2.755.677.484.152,00. Terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang melanda Indonesia khususnya Kabupaten Tegal telah menyebabkan penurunan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan realisasi pendapatan dalam periode tahun 2019 dan realisasi pendapatan tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 3,84% dari Rp2.755.677.484.152,00 menjadi Rp2.649.974.183.284,00.

Pendapatan daerah tahun 2021 pada dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disandingkan dengan Penetapan APBD Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp235.467.913.060,00 atau sebesar 7,83%. Pada Dokumen RPJMD pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3.006.924.636.060,00 sedangkan pada Penetapan APBD Tahun 2021 pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.771.456.723.000,00. Hal tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian pendapatan daerah akibat adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penyesuaian terhadap penetapan pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah maupun transfer antar daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil. Disamping itu, Instruksi Pemerintah terkait pembatasan aktivitas mengakibatkan berbagai sektor yang menjadi sumber pendapatan asli daerah berjalan lambat atau cenderung stagnan

yang menjadi salah satu penyumbang penurunan penerimaan pendapatan daerah. Secara umum persandingan Pendapatan Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Pendapatan Tahun 2021 berdasarkan RPJMD 2019-2024 dan Penetapan APBD Tahun 2021

No	Uraian	Proyeksi 2021 (RPJMD Tahun 2019-2024)	Penetapan APBD 2021	Tambah/ (Kurang)	Pertum buhan (%)
1.	PENDAPATAN	3.006.924.636.060	2.771.456.723.000	(235,467,913,060)	(7,83)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	484.816.183.060	433.822.920.000	(50,993,263,060)	(10,52)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	139.663.850.000	133.050.000.000	(6,613,850,000)	(4,74)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	51.599.830.000	23.583.855.210	(28,015,974,790)	(54,29)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.355.000.000	13.470.000.000	(2,885,000,000)	(17,64)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	277.197.503.060	263.719.064.790	(13,478,438,270)	(4,86)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.370.661.653.000	2.185.804.003.000	(184,857,650,000)	(7,80)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.152.334.903.000	1.984.603.809.000	(167,731,094,000)	(7,79)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	28.870.017.000	30.110.971.000	1,240,954,000	4,30
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.262.810.455.000	1.112.675.840.000	(150,134,615,000)	(11,89)
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	483.696.062.000	463.620.414.000	(20,075,648,000)	(4,15)
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	36.000.000.000	18.742.708.000	(17,257,292,000)	(47,94)
1.2.1.5	Dana Desa	340.958.369.000	359.453.876.000	18,495,507,000	5,42
1.2.2	Transfer antar-daerah	218.326.750.000	201.200.194.000	(17,126,556,000)	(7,84)
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	198.326.750.000	181.202.194.000	(17,124,556,000)	(8,63)
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	20.000.000.000	19.998.000.000	(2,000,000)	(0,01)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.446.800.000	151.829.800.000	383,000,000	0,25
1.3.1	Pendapatan Hibah	151.446.800.000	151.829.800.000	383,000,000	0,25
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	0	0	0

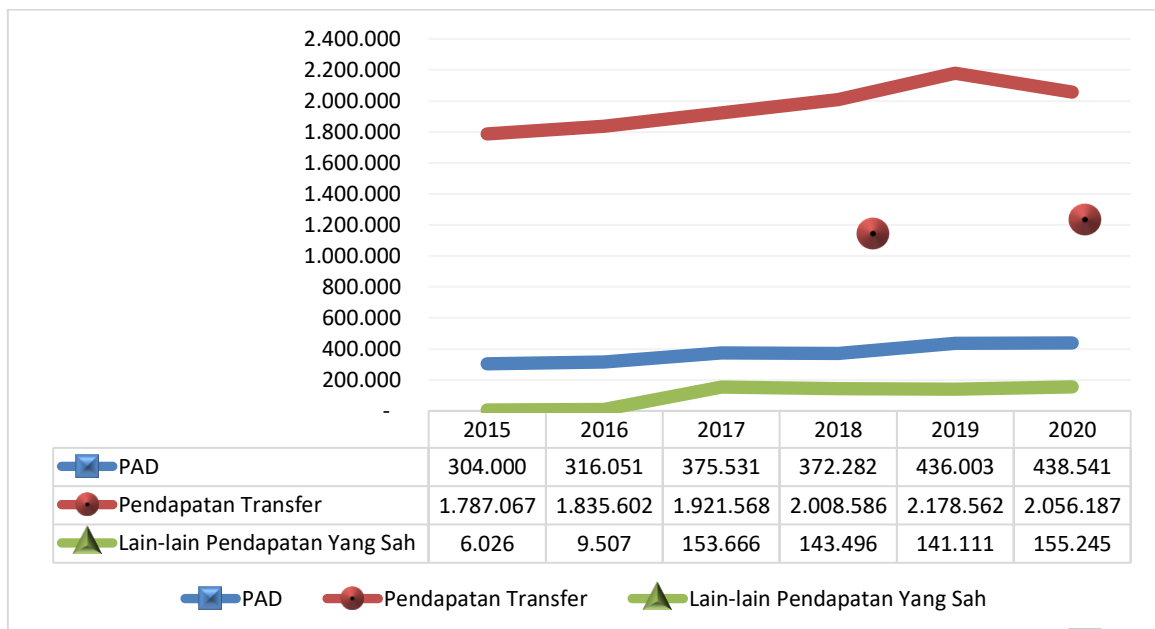
Sumber : BPKAD dan Bappenda Kabupaten Tegal, 2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

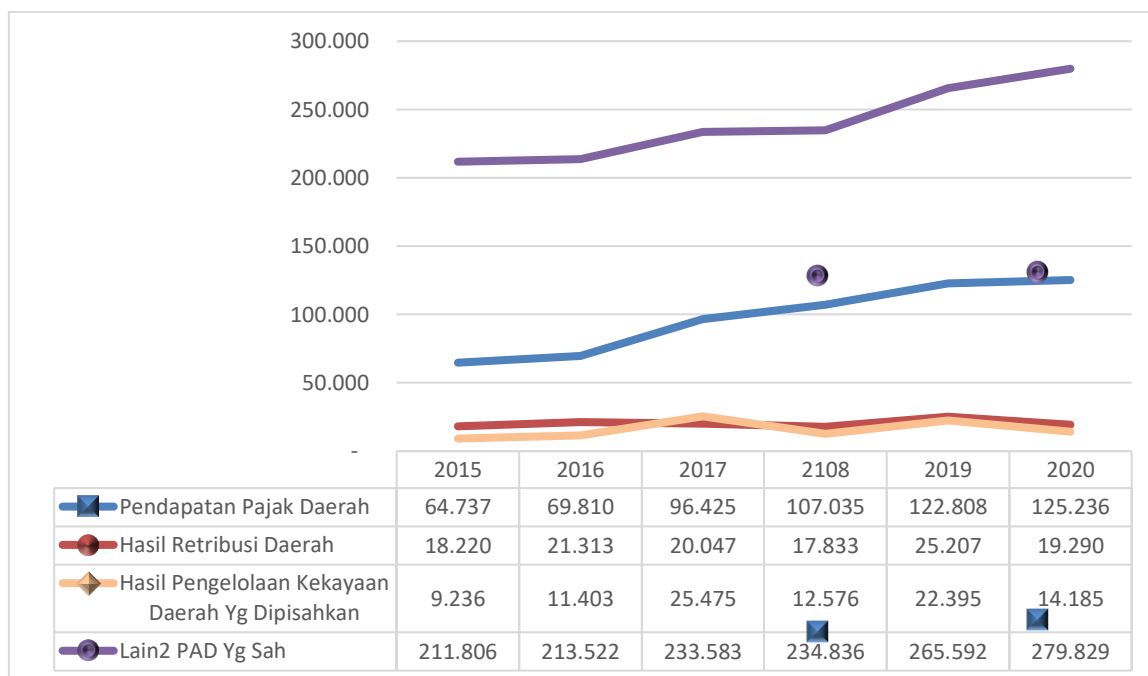
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk mengetahui *trend* dan proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

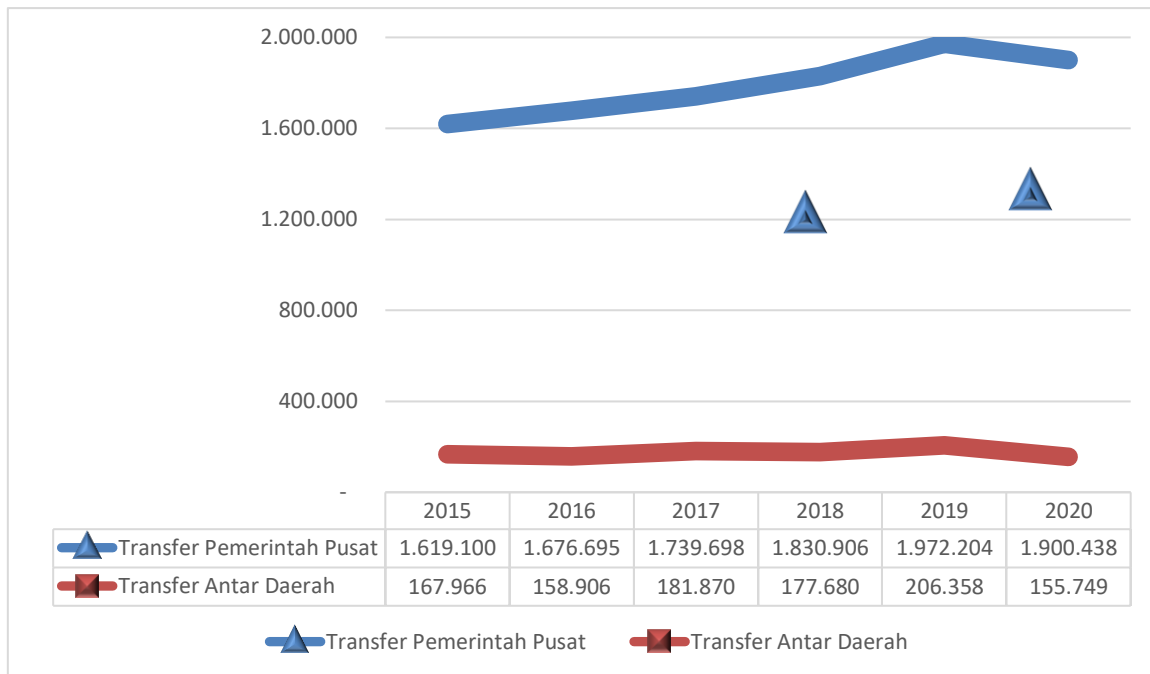
Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. PAD dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 9,43% dari sebesar Rp304.000.970.135,00 menjadi Rp436.003.392.413,00 sedangkan dalam kurun waktu tahun 2019-2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19, rata-rata peningkatan hanya sebesar 0,58% dari sebesar Rp436.003.392.413,00 menjadi Rp438.541.666.699,00.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

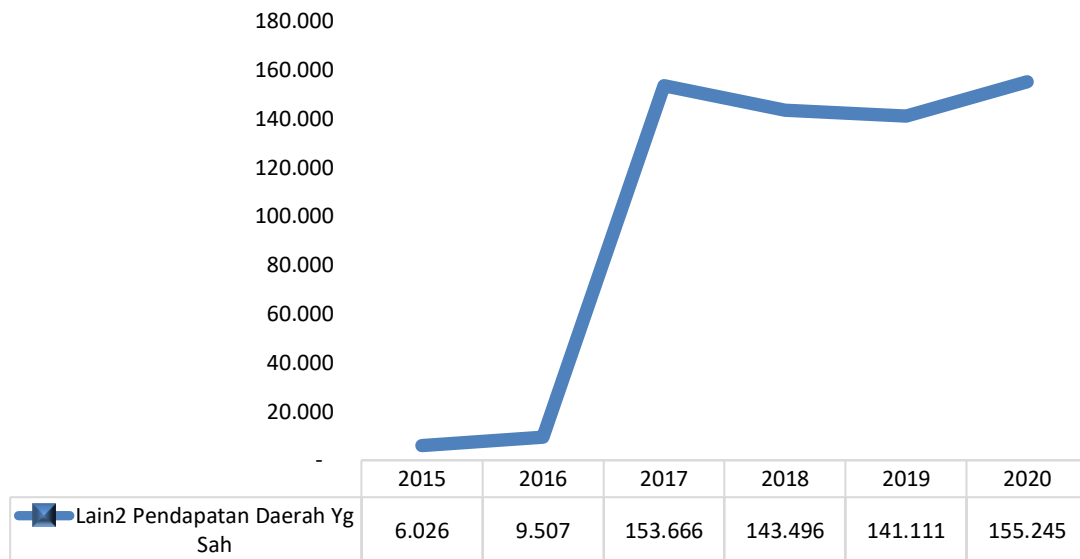
Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (2) Dana Alokasi Umum (3) Dana Alokasi Khusus (4) Dana Insentif Daerah (5) Dana Otonomi Khusus dan (6) Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah Terdiri dari : (1) Pendapatan Bagi Hasil dan (2) Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 5,08% dari sebesar Rp1.787.067.853.123,00 menjadi Rp2.178.562.532.180,00. Sedangkan dalam kurun waktu tahun 2019-2020 rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 5,62% dari Rp2.178.562.532.180,00 menjadi Rp2.056.187.504.939,00 akibat adanya penyesuaian pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.4 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari (1) Pendapatan hibah dan (2) Dana Darurat dan (3) Lain-lain Pendapatan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2015-2019 mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 119,97% dari sebesar Rp6.026.800.725,00 menjadi Rp141.111.559.559,00. Sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 10,02% dari sebesar Rp141.111.559.559,00 menjadi Rp155.245.011.646,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan sebesar 1.516,26% yang semula Rp9.507.387.780,00 menjadi Rp153.666.800.582,00. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.5 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

b. Belanja Daerah

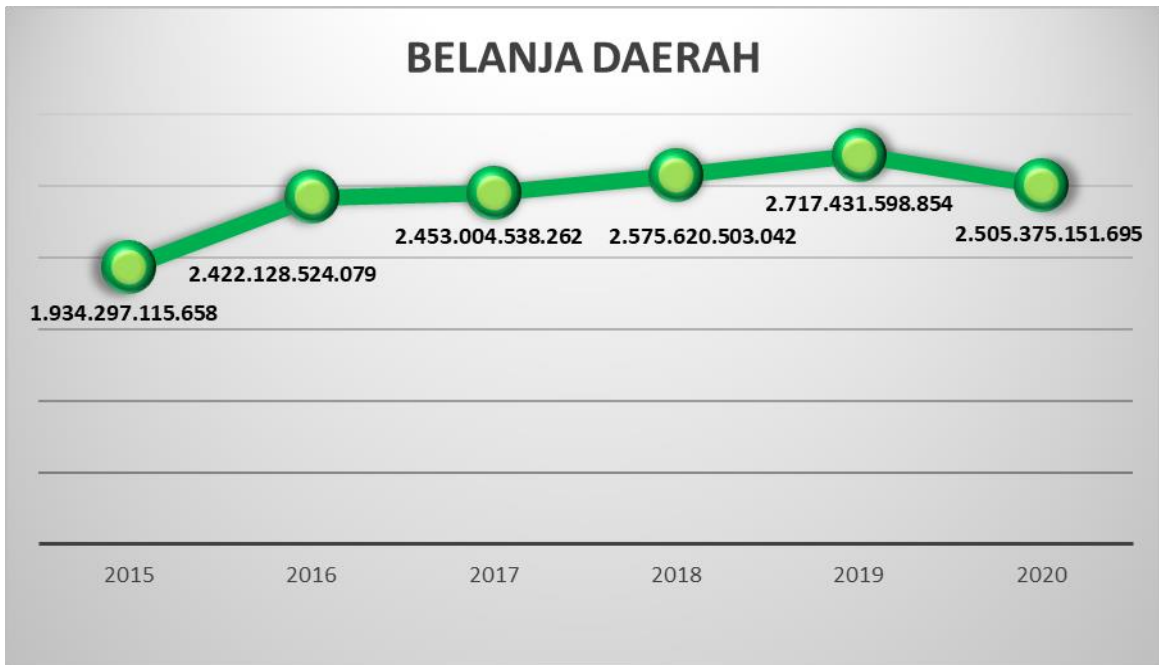
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komposisi Belanja Daerah mengalami perubahan yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Struktur belanja daerah menjadi sebagaimana berikut :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah;
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Daerah dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 8,87% dari Rp1.934.297.115.658,00 menjadi Rp2.717.431.598.854,00. Seperti halnya penurunan pendapatan daerah, pandemi covid-19 pada tahun 2020 juga mempengaruhi penurunan belanja daerah pada tahun 2020. Pertumbuhan realisasi belanja tahun 2019 dan realisasi belanja tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,80% dari Rp2.717.431.598.854,00 menjadi Rp2.505.375.151.695,00.

Belanja Operasi mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 4,80% dari Rp1.472.162.882.985,00 menjadi Rp1.776.068.220.040,00 untuk kurun waktu tahun 2015-2019. Sedangkan tahun 2019-2020 rata-rata pertumbuhan belanja operasi mengalami penurunan sebesar 5,21% dari Rp1.776.068.220.040,00 menjadi Rp1.683.501.969.665,00. Selain Belanja Operasi, Belanja Modal dalam kurun waktu tahun 2015-2019 juga mengalami rata-rata peningkatan pertumbuhan pertahun sebesar 14,22% dari Rp255.207.688.302,00 menjadi Rp434.393.482.658,00 sedangkan pada kurun waktu tahun 2019-2020 mengalami rata-rata penurunan sebesar 42,71% dari Rp434.393.482.658,00 menjadi Rp248.884.723.850,00. Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Terduga dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami penurunan sebesar 84,03% dari Rp2.305.450.000,00 menjadi Rp1.500.000,00 sedangkan untuk kurun waktu tahun 2019-2020 rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 5.221.052,89% dari Rp1.500.000,00 menjadi Rp78.317.293.331,00. Peningkatan tersebut disebabkan alokasi anggaran penanganan covid-19 dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga. Selain itu, Belanja Transfer mengalami rata-rata peningkatan pertumbuhan pertahun sebesar 25,46% dari Rp204.621.094.371,00 menjadi Rp506.968.396.156,00 untuk kurun waktu tahun 2015-2019 dan rata-rata pertumbuhan tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 2,43% dari sebesar Rp506.968.396.156,00 menjadi Rp494.671.164.849,00.

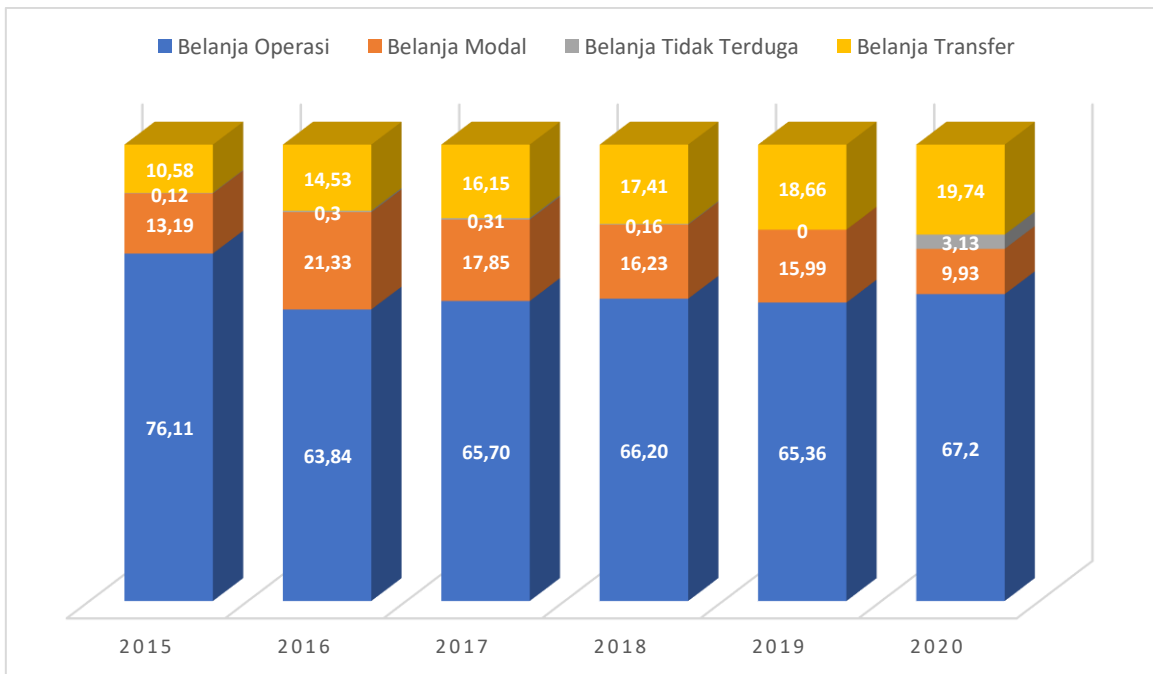
Belanja Daerah pada tahun 2020 mengalami perubahan kebijakan akibat adanya pandemi covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan covid-19, serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran ke Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan dalam rangka upaya peningkatan penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi dan penanganan masalah sosial. Hal ini berdampak pada realisasi baik pada Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Sedangkan realisasi pada Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan akibat adanya *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai upaya penanganan covid-19.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.6 Realisasi Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

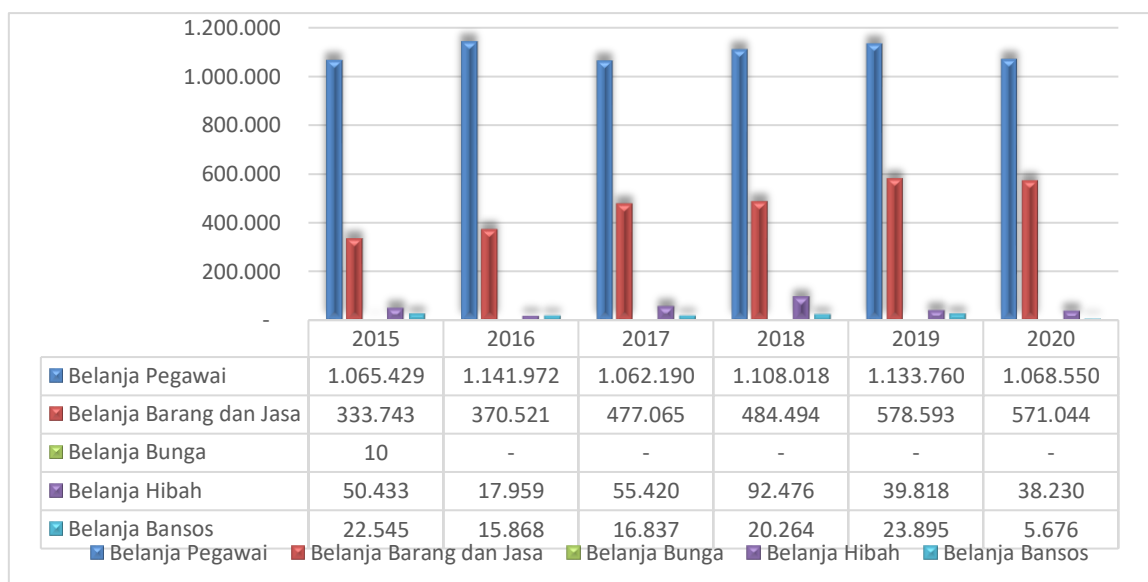
Proporsi masing-masing unsur belanja daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.7 Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer terhadap Total Belanja Tahun 2015-2020

Kelompok Belanja Operasi terdiri dari : (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang dan Jasa (3) Belanja Bunga (4) Belanja Hibah, dan (5) Belanja Bantuan Sosial. Proporsi alokasi Belanja Operasi paling besar pada alokasi belanja pegawai yang diantaranya untuk alokasi gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan pegawai, insentif, uang lembur, honorarium dan belanja pegawai BLUD dan BOS. Sedangkan rata-rata peningkatan pertumbuhan paling besar pada alokasi Belanja Barang dan Jasa. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 Belanja Pegawai mengalami rata-rata peningkatan per tahun sebesar 1,57% dari Rp1.065.429.884.593,00 menjadi Rp1.133.760.553.898,00 sedangkan rata-rata peningkatan pertahun paling besar pada Belanja Barang dan Jasa sebesar 14,75%. Sedangkan dalam kurun waktu tahun 2019-2020, pada Belanja Operasi rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan pada semua belanja. Penurunan rata-rata pertumbuhan terbesar pada Belanja Bantuan Sosial yaitu sebesar 76,24% dari Rp23.895.091.000,00 menjadi Rp5.676.330.000,00.

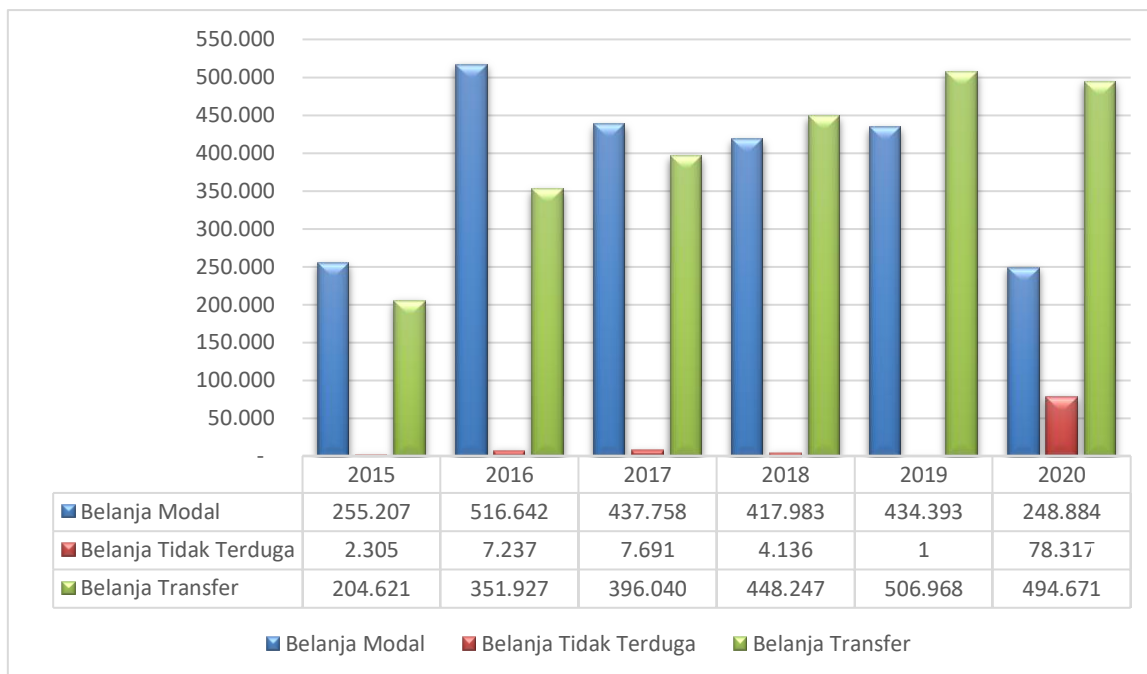


Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.8 Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

Belanja Barang dan Jasa dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami rata-rata peningkatan per tahun sebesar 14,75% dari Rp333.743.691.047,00 menjadi Rp578.593.810.142,00. Sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 1,30% dari sebesar Rp578.593.810.142,00 menjadi Rp571.044.664.082,00.

Komponen Belanja selain Belanja Operasi adalah Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Transfer terdiri dari (1) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan (2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa. Belanja Modal dan Belanja Transfer dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 14,22% dan 25,46%, sedangkan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 42,71% dan 2,43%. Dalam kurun waktu 2015-2019, jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa rata-rata peningkatan pertahun Modal hampir sama yaitu di angka 14%. Akan tetapi, jumlah pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa lebih besar jika dibandingkan pagu anggaran Belanja Modal.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

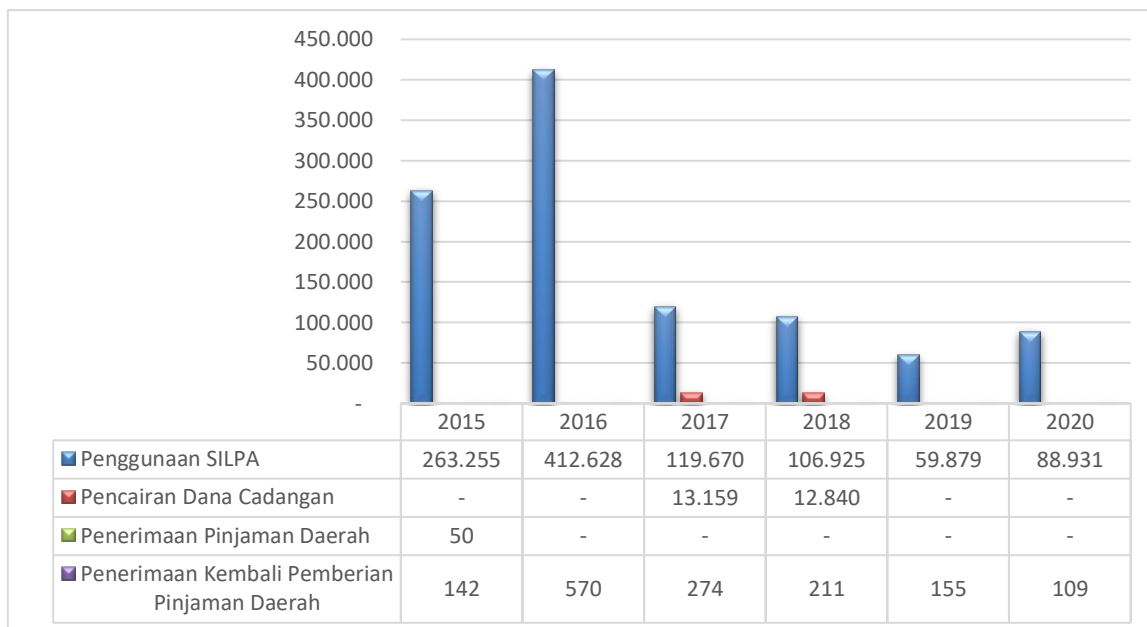
Gambar 3.9 Realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Kebijakan anggaran pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2015-2020 mengacu pada kebijakan anggaran defisit dimana anggaran belanja lebih besar dari pada anggaran pendapatan. Dengan demikian pembiayaan netto diarahkan untuk dapat menutup defisit APBD. Namun dalam realisasinya terjadi surplus anggaran yang secara umum dikarenakan efisiensi penyerapan belanja daerah sehingga pembiayaan netto dapat menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Penerimaan Pembiayaan dari rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung atau kewajiban lain yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

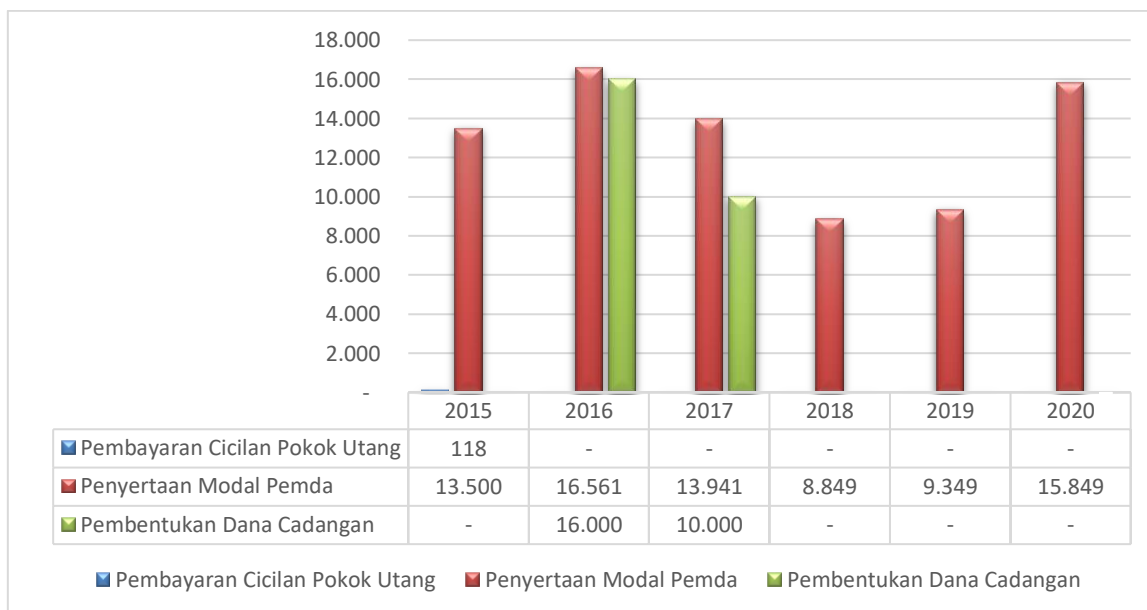
Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2015-2020 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.10 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) dan Pembentukan Dana Cadangan. Untuk mengetahui realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.11 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

3.1.2. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). Neraca Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.
Neraca Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET							
ASET LANCAR							
Kas di Kas Daerah	176.541.187.247,00	86.150.190.721,00	82.457.061.138,00	41.645.810.899,00	51.565.336.774,00	149.021.313.468	(3.33)
Kas di Bendahara Pengeluaran	50.343.790,00	-	41.177.553,00	20.199.984,00	100.899.992,00	23.433.500	(14.18)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	392.454.200,00	282.728.100,00	67.378.256,00	48.359.266	0
Kas di BLUD	53.092.218.534,00	33.549.009.531,60	21.043.264.770,80	16.039.492.195,82	34.146.113.382,96	67.841.618.971,02	5,03
Kas JKN	-	-	-	-	-	-	0
Kas Lainnya	-	9.775.511.701,83	3.022.801.141,00	2.087.440.687,00	4.548.989.792,00	1.205.864.232	0
Setara Kas	183.000.000.000,00	-	-	-	21.210.117,00	-	(100)
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan	55.577.877.215,00	67.063.815.524,00	85.858.253.380,00	128.743.618.730,00	137.411.387.460,00	111.496.058.819	14.94
Piutang Lainnya	11.842.617.959,00	11.253.891.801,00	10.975.611.326,00	10.303.269.051,00	10.313.531.368,00	10.012.074.563	(3.30)
Penyisihan Piutang	(38.595.301.937,05)	(40.792.138.605,91)	(54.329.647.191,61)	(61.433.213.106,04)	(75.083.870.450,72)	(66.685.461.609,94)	11.56
Beban Dibayar Dimuka	5.701.015,00	-	-	-	-	-	(100)
Persediaan	79.649.080.461,89	28.099.549.296,02	30.855.387.371,98	29.118.837.940,25	27.924.682.592,13	43.456.563.303,43	(11,41)
Jumlah Aset Lancar	521.163.724.284,84	195.099.829.969,54	180.316.363.689,18	166.808.184.481,03	191.015.659.283,37	316.419.824.512,51	(9,50)
INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-	0
Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-	-	0

URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-	0
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-	0
	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	0
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	-	0
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-	0
	Investasi Non permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-	-	0
	Investasi Permanen	-	-	-	-	-	-	0
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	120.021.873.907,50	148.021.722.955,12	172.877.114.875,85	187.420.693.303,04	201.362.819.011,09	222.356.153.912,81	13,12
	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah Investasi Permanen	120.021.873.907,50	148.021.722.955,12	172.877.114.875,85	187.420.693.303,04	201.362.819.011,09	222.356.153.912,81	13.12
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	120.021.873.907,50	148.021.722.955,12	172.877.114.875,85	187.420.693.303,04	201.362.819.011,09	222.356.153.912,81	13.12
ASET TETAP								
	Tanah	236.444.026.117,00	637.353.841.778,00	661.991.402.211,00	658.586.320.676	632.032.486.448	632.636.791.793,63	21,75
	Peralatan dan Mesin	479.229.426.403,89	546.484.854.131,09	504.541.413.485,80	549.694.166.077,80	651.864.319.992,80	723.036.779.494,80	8,57
	Gedung dan Bangunan	838.885.381.224,00	946.556.922.025,00	1.050.064.517.465,00	1.109.711.114.618	1.236.209.273.796	1.318.518.694.975	9,47
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.183.776.265.374,00	1.460.850.835.723,00	1.642.639.132.175,00	1.851.964.429.286	2.026.763.797.255	2.118.196.878.796	12,34
	Aset Tetap Lainnya	76.664.032.277,00	92.205.365.867,99	87.406.387.745,92	111.580.782.721,46	138.350.549.563,42	151.408.850.860,42	14,58
	Konstruksi dalam Pengerjaan	6.428.579.438,00	7.254.197.137,00	7.001.248.037,00	14.898.078.786	2.832.453.031	2.986.314.781	(14,22)
	Akumulasi Penyusutan	(1.214.950.835.532,00)	(1.325.849.891.290,27)	(1.408.494.339.352,09)	(1.584.783.318.412,54)	(1.803.425.444.877,04)	(1.801.633.772.317,04)	8,20

URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Jumlah Aset Tetap	1.606.476.875.301,89	2.364.856.125.371,81	2.545.149.761.767,63	2.711.651.573.752,72	2.884.627.435.209,18	3.145.150.538.383,81	14,38
DANA CADANGAN		-	-	-	-	-	-	0
	Dana Cadangan	-	16.486.246.571,00	14.641.716.729,00	-	-	-	0
	Jumlah Dana Cadangan	-	16.486.246.571,00	14.641.716.729,00	-	-	-	0
ASET LAINNYA								
	Tuntutan Ganti Rugi/Tagihan Jangka Panjang	394.647.291,61	336.147.291,61	335.147.291,61	335.147.291,61	397.205.000	232.155.000	10,07
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.450.167.025,00	9.450.167.025,00	9.450.167.025,00	14.758.457.006	41.395.340.506	38.814.810.482	32,65
	Aset Tak Berwujud	394.182.576,46	1.039.388.854,13	335.147.291,61	2.413.753.740	2.515.207.575	3.061.740.257	50,68
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	(1.594.242.238,58)	(2.073.679.946,28)	(2.338.634.318,14)	0
	Aset lain-lain	355.440.756,00	59.914.947.974,36	159.808.724.302,23	204.932.698.263,33	86.535.858.494,67	83.361.858.494,67	197,88
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	(102.535.785.983,71)	(28.208.370.047)	(25.034.370.047)	0
	Jumlah Aset Lainnya	10.594.437.649,07	70.740.651.145,10	78.084.280.924,98	118.310.028.051,65	100.561.561.581,39	98.097.559.868,53	56,07
	JUMLAH ASET	2.258.256.911.143,30	2.795.204.576.012,58	2.991.069.237.986,63	3.377.567.475.085	3.184.190.479.588,44	3.782.024.076.677,65	10,86
KEWAJIBAN								
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK								
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55.200.283,00	34.072.978,00	31.665.307,00	77.031.600	44.643.617	44.716.275	(4.13)
	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-	0
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	0
	Pendapatan Diterima Dimuka	1.737.383.684,00	2.518.231.585,00	2.562.086.430,00	1.756.392.705	4.057.675.610	3.462.749.691	14,79
	Utang Beban	29.144.471.103,00	18.617.048.014,99	31.330.911.598,00	30.655.827.546	29.683.465.608	32.424.537.040	2,16
	Utang Jangka Pendek Lainnya	41.119.270.636,00	24.195.762.571,00	449.432.684,00	5.760.000	1.473.401.800	(4.441.563.000)	0

URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	72.056.325.706,00	45.365.115.148,99	34.374.096.019,00	32.495.011.851	35.259.186.635	31.490.440.006	(15,26)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG								
	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	0
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	72.056.325.706,00	45.365.115.148,99	34.374.096.019,00	32.495.011.851	35.259.186.635	31.490.440.006	(15,26)
EKUITAS								
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.186.200.585.437,30	2.749.839.460.863,58	2.956.695.141.967,63	3.151.695.467.737,44	3.342.308.288.450,03	3.401.973.799.336,65	9,25
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.258.256.911.143,30	2.795.204.576.012,58	2.991.069.237.986,63	3.184.190.479.588,44	3.377.567.475.085,03	3.433.464.239.342,65	8,74

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas* serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel 3.4.
Analisis Rasio Keuangan

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	7,232	4,300	5,275	5,133	5,417	10,048
2.	Rasio utang terhadap ekuitas	0,033	0,016	0,012	0,010	0,010	0,009
3.	Rasio utang terhadap total aktiva	0,032	0,016	0,012	0,010	0,010	0,009
4.	Rasio perputaran aktiva tetap	0,189	0,133	0,147	0,136	0,151	0,139
5.	Rasio perputaran total aktiva	0,134	0,113	0,218	0,116	0,129	0,116

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Tegal bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.5.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020*)
A	Belanja Operasi	1.065.429.884.593	1.141.972.425.691	1.062.190.303.509	1.108.018.481.665	1.133.760.553.898	1.068.550.795.583
1	Belanja Pegawai	1.065.429.884.593	1.141.972.425.691	1.062.190.303.509	1.108.018.481.665	1.133.760.553.898	1.068.550.795.583
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	720.773.042.688	745.234.822.486	671.073.838.505	881.149.734.192	902.539.312.611	843.770.542.858
1.2	Tambahan Penghasilan PNS	315.894.218.963	331.087.370.488	287.778.921.745	108.118.575.026	104.745.316.976	85.846.520.615
1.3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.361.100.000	4.380.000.000	5.417.400.000	6.679.500.000	9.420.000.000	9.430.000.000
1.4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	438.444.883	393.689.395	270.838.796	197.364.969	163.123.418	0
1.5	Insentif pemungutan Pajak Daerah	2.639.126.411	3.291.757.519	3.961.086.477	3.237.345.887	4.803.371.020	4.499.289.869
1.6	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	556.826.804	638.465.038	657.731.888	580.112.180	701.200.779	570.341.741
1.7	Uang Lembur	2.236.021.000	2.197.039.500	2.608.492.700	2.608.756.600	2.909.738.200	1.604.087.000
1.8	Honorarium PNS	18.531.103.844	20.819.918.342	23.433.824.450	24.782.046.075	24.399.232.950	15.791.287.856
1.9	Honorarium Non PNS			28.960.791.100	43.472.695.394	40.032.040.113	40.557.739.276
1.10	Belanja Pegawai BLUD			17.853.327.819	18.190.661.066	24.650.759.753	28.527.138.868
1.11	Belanja Pegawai BOS			20.174.050.029	19.001.690.276	19.396.458.078	37.953.847.500
B	Belanja Barang dan Jasa	91.665.825.229	75.648.411.631	46.894.093.211	51.370.797.937	58.014.023.585	35.947.689.968
1	Belanja Makan Minum	16.705.653.130	16.082.882.210	19.105.678.296	22.422.912.890	24.843.567.951	11.718.675.245
2	Belanja Perjalanan Dinas	17.698.746.363	22.518.886.498	27.788.414.915	28.947.885.047	33.170.455.634	24.229.014.723
3	Honorarium Non PNS	22.012.450.979	26.577.679.050				
4	Belanja Pegawai BLUD	35.248.974.757	10.468.963.873				
	Total Kebutuhan Aparatur	1.157.095.709.822	1.183.691.474.399	1.109.084.396.720	1.159.389.279.602	1.191.774.577.483	1.104.498.485.551

*) Realisasi APBD Tahun 2020 unaudited
Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Surplus Riil Anggaran Kabupaten Tegal terjadi pada tahun 2015, tahun 2019 dan tahun 2020 sedangkan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 terjadi Defisit Riil Anggaran, perhitungan secara rinci terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6.
Defisit/Surplus Riil Anggaran Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020*)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.097.095.623.983	2.161.161.059.588	2.450.766.552.130	2.524.365.919.815	2.755.677.484.152	2.649.974.183.284
	Dikurangi						
2.	Realisasi Belanja Daerah	1.934.297.115.658	2.422.128.524.079	2.453.004.538.262	2.575.620.503.042	2.717.431.598.854	2.505.375.151.695
3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13.618.633.202	32.561.000.000	23.941.000.000	8.878.000.000	9.349.000.000	15.849.000.000
	Surplus/Defisit	149.179.875.123	(293.528.464.491)	(26.178.986.132)	(60.132.583.227)	28.896.885.298	128.750.031.589
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	263.448.674.165	413.198.664.744	133.104.079.628	119.976.862.487	60.034.997.599	89.041.725.652
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berjalan	412.628.549.288	119.670.200.253	106.925.093.496	59.844.279.260	88.931.882.897	217.791.757.241

*) Realisasi APBD Tahun 2020 unaudited

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.7.
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA)
Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No	Rincian SiLPA	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rekening Giro BUD	176.541.187.247	86.150.190.721	57.457.061.138	41.645.810.899	51.565.336.774	149.021.313.468
2	Deposito	183.000.000.000	-	25.000.000.000	-	-	0
3	Saldo Kas RSUD dr. Soesilo pada Bank Jateng Cabang Slawi	36.989.313.418	21.320.419.099	16.140.643.115	12.403.163.875,02	29.424.850.029	63.163.058.310
4	Kas BLUD Dinkes	14.681.614.566	10.784.807.098	4.679.264.849	3.633.482.849,80	3.676.723.824	3.795.568.743
5	Kas BLUD RSUD Suradadi	1.421.290.550	1.443.783.335	223.356.807	2.845.471	1.044.539.530	882.993.729
6	Kas BOS	-	-	3.022.801.141	2.087.440.687	4.548.989.792	1.184.581.457
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	50.313.790	-	38.512.246	20.199.984	77.466.492	-
8	Kas Bendahara Penerimaan	-	-	392.454.200	205.696.500	67.378.256	48.359.266
9	Utang PFK BLUD Dinkes yang belum disetor	(29.000.000)	(29.000.000)	(29.000.000)	(29.000.000)	-	-
10	Utang PFK yang belum disetor	(26.170.283)	-	-	-	-	-
	Koreksi Utang BLUD RSUD Suradadi	-	-	-	-	-	(60.781.324)
11	Koreksi Kas	-	-	-	(3.818.706,40)	-	37.972
12	Lebih Salur Dana BOS	-	-	-	(5.760.000)	(22.720.000)	(640.000)
	Setor Sumbangan Covid	-	-	-	-	-	(242.734.380)
13	Utang BOK Dinkes	-	-	-	(115.782.300)	-	-
14	Utang BLUD RSUD Suradadi	-	-	-	-	(1.450.681.800)	-
		412.628.549.288	119.670.200.253	106.925.093.496	59.844.279.260	88.931.882.897	217.791.757.241

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

3.2.3 Analisis Fiskal

a. Belanja Pegawai Pada Belanja Operasi

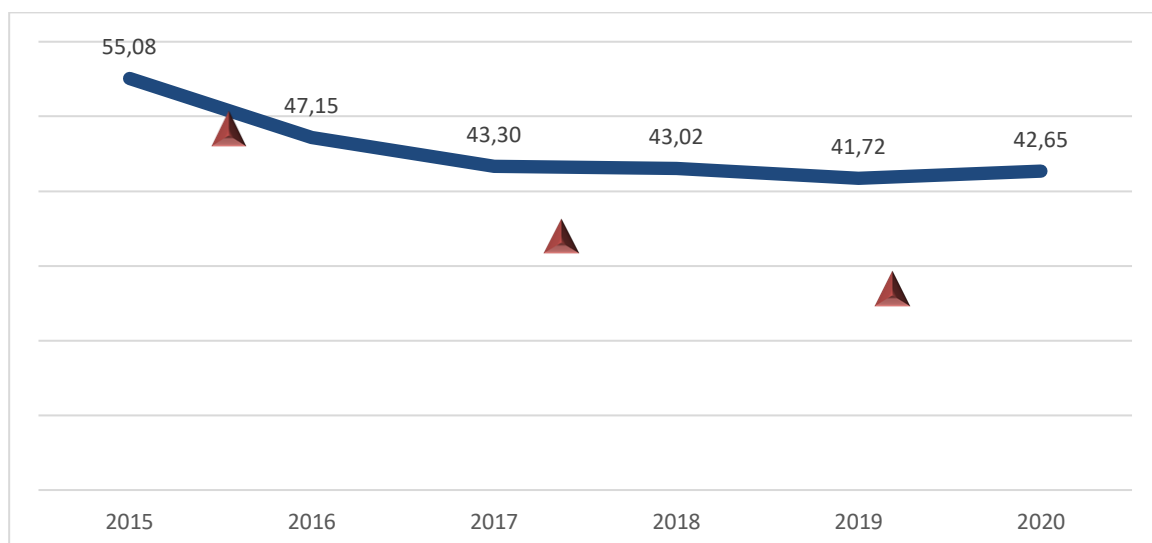
Rasio Belanja pegawai pada Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tegal mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, hal ini baik untuk kondisi keuangan daerah dimana persentase belanja pegawai semakin lebih kecil daripada belanja. Belanja pegawai pada tahun 2015 sebesar 55,08%, tahun 2016 sebesar 47,15%, tahun 2017 sebesar 43,30%, tahun 2018 sebesar 43,02%, dan tahun 2019 sebesar 41,72%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,93% dari tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 42,65%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi, efektifitas dan profesionalisme sumber daya aparatur ke depan perlu untuk semakin di tingkatkan utamanya pada sisi peran sebagai keperantaraan dan *enterpreneur*, dengan demikian maka selain peran sebagai regulator, pelayanan dan pelaksana pembangunan tetapi juga ikut berupaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Rincian belanja pegawai pada Belanja Operasi Kabupaten Tegal tahun 2015-2020 sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Belanja Pegawai pada Belanja Operasi (%)
2015	1.065.429.884.593	1.934.297.115.658	55,08
2016	1.141.972.425.691	2.422.128.524.079	47,15
2017	1.062.190.303.509	2.453.004.538.262	43,30
2018	1.108.018.481.665	2.575.620.503.042	43,02
2019	1.133.760.553.898	2.717.431.598.854	41,72
2020*)	1.068.550.795.583	2.505.375.151.695	42,65

*) Realisasi APBD Tahun 2020 unaudited

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021



Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.12 Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

b. Ruang Fiskal Daerah

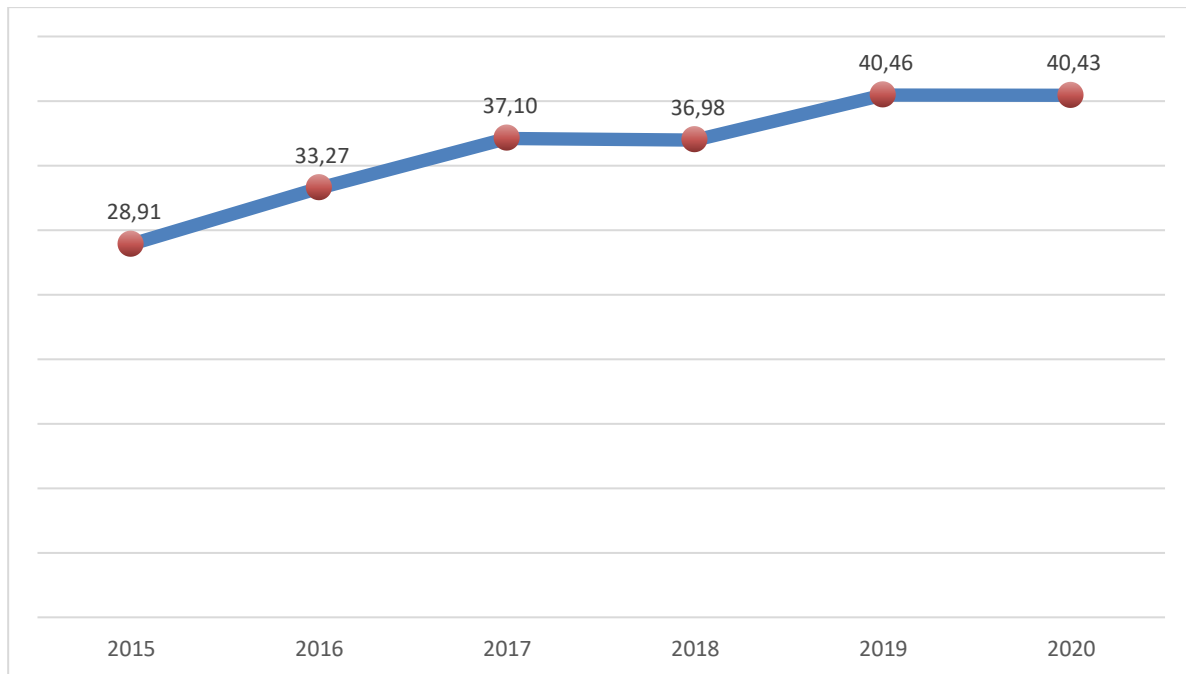
Ruang Fiskal (*fiscal space*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2015-2017 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kabupaten Tegal mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2018 kondisi ruang fiskal mengalami penurunan dibanding tahun 2017 dan penurunan ruang fiskal pada tahun 2020 jika dibanding tahun 2019 yang tidak signifikan. Data Ruang Fiskal Kabupaten Tegal yaitu sebagai berikut pada tahun 2015 sebesar 28,91%, tahun 2016 sebesar 33,27%, tahun 2017 sebesar 37,10%, tahun 2018 sebesar 36,98%, tahun 2019 sebesar 40,46% dan tahun 2020 sebesar 40,43%. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh alokasi Belanja Pegawai dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami perubahan baik kenaikan ataupun penurunan alokasi. Sehubungan itu ke depan perlu lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Tegal. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Kabupaten Tegal tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.
Ruang Fiskal Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiskal (%)
1	2	3	4	5	6	7 (2-(3+4+5+6))	8 (7/2)
2015	2.097.095.623.983	6.026.800.725	68.489.256.000	350.887.481.000	1.065.429.884.593	627.029.326.509	28,91
2016	2.161.161.059.588	9.507.387.780	290.589.280.983	-	1.141.972.425.691	776.038.285.899	33,27
2017	2.450.766.552.130	153.666.800.582	325.623.713.089	-	1.062.190.303.509	1.002.316.221.048	37,10
2018	2.524.365.919.815	143.496.517.552	339.287.872.985	-	1.108.018.481.665	1.040.682.175.380	36,98
2019	2.755.677.484.152	141.111.559.559	365.945.635.277	-	1.133.760.553.898	1.226.247.964.512	40,46
2020*)	2.649.974.183.284	155.245.011.646	354.722.997.677	-	1.068.550.795.583	1.071.449.159.954	40,43

**) Realisasi APBD Tahun 2020 unaudited*

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021



Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.13 Ruang Fiskal Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

c. Kemampuan Membiayai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan yaitu tahun 2015 sebesar 1,21, tahun 2016 sebesar 1,05, tahun 2017 sebesar 1,04, tahun 2018 sebesar 1,02 dan pada tahun 2019 sebesar 1,03. Sedangkan pada tahun 2020 kemampuan mendanai Belanja Daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,09.

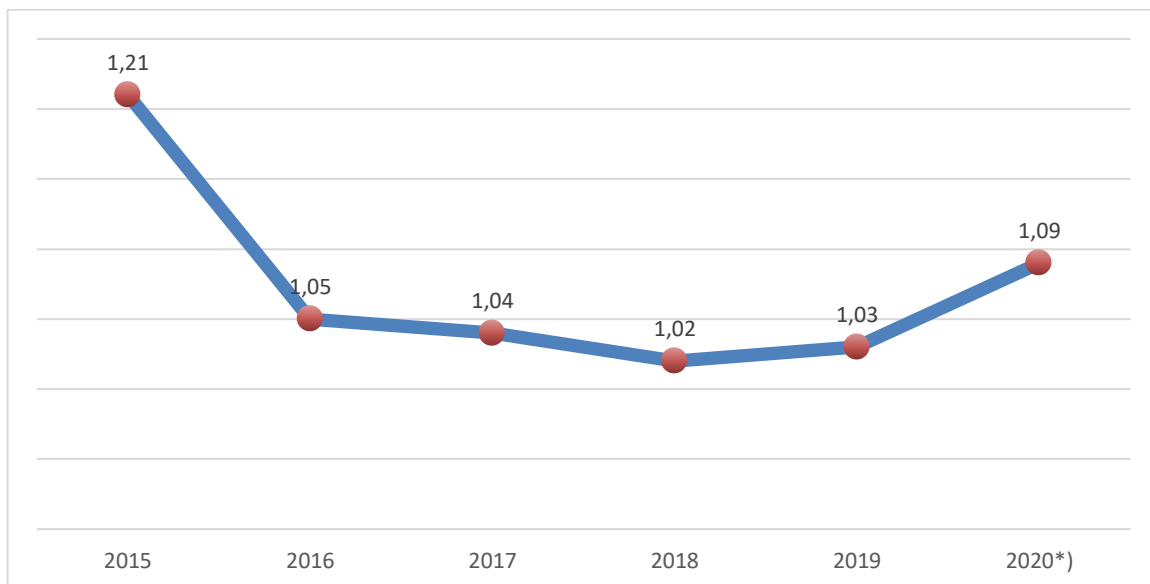
Dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi pinjaman daerah/ obligasi ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Tegal tahun 2015- 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10.
Kemampuan Membiayai Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
					6 (2+3)	7 (4+5)	
1	2	3	4	5	6 (2+3)	7 (4+5)	8 (6/7)
2015	2.097.095.623.983	263.448.674.165	1.934.297.115.658	13.618.633.202	2.360.544.298.148	1.947.915.748.860	1,21
2016	2.161.161.059.588	413.198.664.744	2.422.128.524.079	32.561.000.000	2.574.359.724.332	2.454.689.524.079	1,05
2017	2.450.766.552.130	133.104.079.628	2.453.004.538.262	23.941.000.000	2.583.870.631.758	2.476.945.538.262	1,04
2018	2.524.365.919.815	119.976.862.487	2.575.620.503.042	8.878.000.000	2.644.342.782.302	2.584.498.503.042	1,02
2019	2.755.677.484.152	60.034.997.599	2.717.431.598.854	9.349.000.000	2.815.712.481.751	2.726.780.598.854	1,03
2020*)	2.649.974.183.284	89.041.725.652	2.505.375.151.695	15.849.000.000	2.739.015.908.936	2.521.224.151.695	1,09

*) Realisasi APBD Tahun 2020 unaudited

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021



Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.14 Kemandirian Membiayai Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

d. Belanja Modal

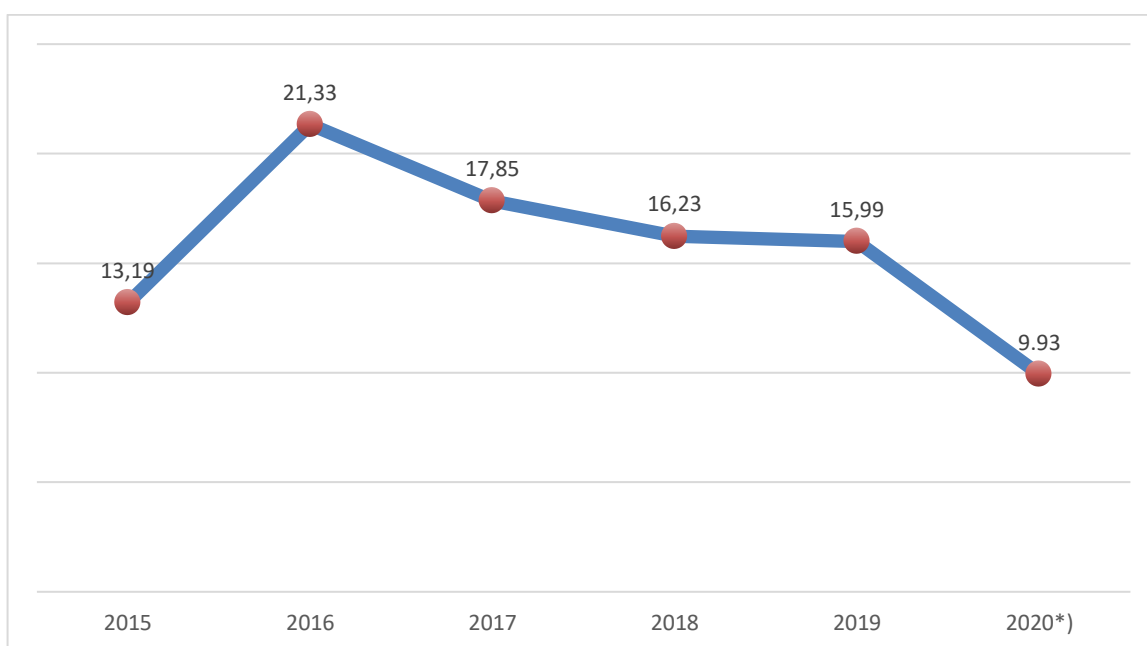
Kondisi rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Tegal berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun nonfisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Alokasi belanja modal dapat bersumber dari berbagai pendapatan dan pembiayaan. Dari sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, alokasi belanja modal dipengaruhi oleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sejalan dengan dengan tujuan pengalokasian DAK yaitu untuk mendanai program-program nasional di daerah khususnya dalam upaya untuk memenuhi akan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan juga dipengaruhi oleh SiLPA. Kenaikan alokasi belanja pegawai juga mempengaruhi alokasi belanja modal. Dengan kenaikan alokasi belanja pegawai akan mengakibatkan alokasi belanja modal mengalami penurunan. Rasio belanja modal naik dari tahun 2015-2016 yaitu sebesar 8,14% menjadi 21,33% kemudian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 turun dari 17,85% menjadi 16,23% pada tahun 2018, 15,99% pada tahun 2019 dan tahun 2020 turun menjadi 9,93%. Penurunan rasio belanja modal juga dapat disebabkan peningkatan belanja Rincian rasio belanja modal Kabupaten Tegal tahun 2015-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11.
Belanja Modal Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Modal terhadap Total Belanja
2015	255.207.688.302	1.934.297.115.658	13,19
2016	516.642.310.814	2.422.128.524.079	21,33
2017	437.758.902.809	2.453.004.538.262	17,85
2018	417.983.021.935	2.575.620.503.042	16,23
2019	434.393.482.658	2.717.431.598.854	15,99
2020*)	248.884.723.850	2.505.375.151.695	9,93

*) Realisasi APBD Tahun 2020 unaudited

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021



Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.15 Belanja Modal Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

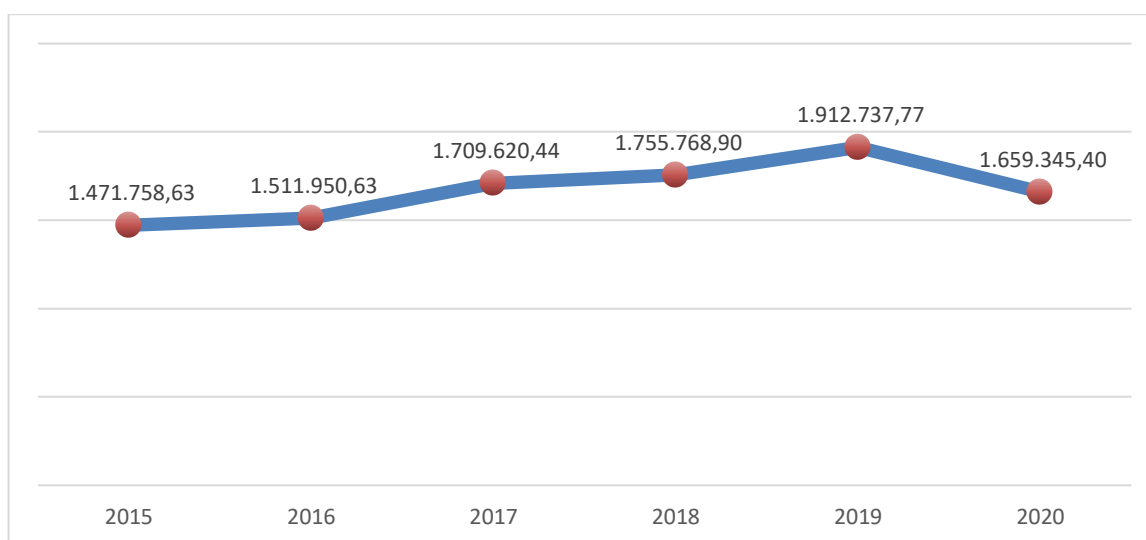
e. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan *trend* positif dimana selalu mengalami peningkatan yaitu 1.471.758,63 pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.912.737,77 pada tahun 2019, dikarenakan terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar 7,07% dari tahun 2015 ke tahun 2019. Peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2020 dengan rata-rata sebesar 2,31%. Gambaran pendapatan per kapita Kabupaten Tegal tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.12.
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita (Rupiah)
2015	2.097.095.623.983	1.424.891	1.471.758,63
2016	2.161.161.059.588	1.429.386	1.511.950,63
2017	2.450.766.552.130	1.433.515	1.709.620,44
2018	2.523.434.958.171	1.437.225	1.755.768,90
2019	2.755.677.484.152	1.440.698	1.912.737,77
2020	2.649.967.964.860	1.596.996	1.659.345,40

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021



Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Gambar 3.16 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan mencakup Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, Proyeksi pendapatan, proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, dan Penghitungan Kerangka Pendanaan. Analisis kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan untuk menghitung pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan memperhitungkan kebutuhan yang bersifat periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Tahun 2021-2024

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tegal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian pendapatan dalam lima tahun kedepan berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima

tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum tersebut adalah :

- a. Meningkatkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui revaluasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) secara berkala di wilayah-wilayah yang secara signifikan mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi peningkatan nilai jual sesuai dengan harga pasar. Peningkatan penerimaan PBB-P2 juga diproyeksikan akan didapat dari adanya Jalan Tol yang melintas di wilayah Kabupaten Tegal dan adanya Depo Pertamina yang dibangun di Kecamatan Kramat. Jalan Tol memiliki karakteristik khusus serta memiliki keluasan dan nilai yang tinggi, demikian pula dengan Depo Pertamina.
- b. Meningkatkan target penerimaan dari komponen retribusi daerah melalui penyesuaian atas tarif pada beberapa obyek retribusi, peningkatan lingkup dan cakupan layanan pada wajib retribusi khususnya untuk retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, serta peningkatan kualitas layanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan tujuan menjaring sebanyak-banyaknya kepemilikan bangunan yang belum ber-IMB, sehingga berdampak pada peningkatan perolehan PBB. Sebagai upaya peningkatan target penerimaan tersebut akan dilakukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur terkait tarif retribusi daerah.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari komponen pajak dan retribusi daerah.
- d. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
- e. Peningkatan kapasitas manajemen layanan kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana pendukung RSUD Dr. Soeselo, RSUD Suradadi dan seluruh Puskesmas dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat dan peningkatan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- f. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah. Optimalisasi manajemen kas daerah dilakukan dengan penempatan deposito/ giro pada Bank yang telah ditunjuk dengan mempertimbangkan kondisi kas daerah dan perkiraan transaksi yang kemungkinan terjadi. Sedangkan dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah, upaya Pemerintah daerah yaitu dengan melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang berlebih terhadap aset yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pemanfaatan BMD dengan cara melakukan perjanjian sewa yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah. Salah satu upaya inventarisasi BMD dilaksanakan dengan pelaksanaan sensus asset yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali.

- g. Mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional serta memperhatikan kebijakan dana transfer Pemerintah Pusat setiap tahunnya dalam penentuan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer.
- h. Memperhitungkan asumsi penerimaan Pajak Daerah dan proyeksi bagi hasil Pajak Pemerintah Provinsi dalam penentuan proyeksi pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan perekonomian Kabupaten Tegal pada masa pandemi covid-19 yang diprediksikan mulai membaik.

Kebijakan umum belanja daerah didasarkan pada pendekatan *Money Follow Program* yang memberikan prioritas pada bobot program/kegiatan sesuai dengan pencapaian target tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Program-program yang memberikan manfaat yang besar dan luas bagi masyarakat menjadi prioritas utama untuk mendapatkan alokasi anggaran yang tinggi.
- b. Belanja daerah diprioritaskan pula dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan. Disamping itu, belanja daerah untuk masa RPJMD 2019-2024 diprioritaskan untuk mendukung program nasional yaitu pemulihan di sektor ekonomi, kesehatan dan sosial sebagai dampak pandemi covid-19 yang belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir.
- c. Mendorong terlaksananya kolaborasi program dan kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kesamaan kelompok sasaran sehingga target tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- d. Peningkatan alokasi anggaran untuk kesejahteraan pegawai dalam rangka menumbuhkan produktifitas kinerja layanan kepada masyarakat dan menghilangkan budaya rente di kalangan birokrasi pemerintah daerah.
- e. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten.
- g. Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kapasitas fiskal Pemerintah Daerah untuk 3 (tiga) tahun ke depan akan mengalami penyesuaian dikarenakan pendapatan transfer yang sangat bergantung pada Pemerintah Pusat tidak dapat diproyeksikan secara pasti akibat dampak pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Selain akan mengalami kesulitan dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran yang besar, akan adanya kebutuhan alokasi anggaran yang harus dipersiapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan jika diwajibkan dilakukan vaksinasi covid-19 kepada

seluruh masyarakat. Anggaran untuk kegiatan vaksinasi harus dialokasikan sebagai upaya antisipasi jika pendanaan vaksinasi tidak dianggarkan oleh Pemerintah Pusat.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal untuk saat ini hanya fokus dari pemanfaatan SiLPA sebagai sumber utama penerimaan, namun diupayakan SiLPA yang terpasang 2021-2024 diperhitungkan lebih rendah dibandingkan SiLPA yang dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya silpa yang diproyeksikan merupakan upaya dalam optimalisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk:

1. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
2. Pembentukan Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pilkada.
3. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Bank Milik Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai upaya pemulihan ekonomi dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang akan disalurkan sebagai KURDa (Kredit Usaha Rakyat Daerah) Kabupaten Tegal. Pemberian pinjaman dengan mendasari Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong dengan jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 3 (tiga) tahun sejak pinjaman diterima.

Berdasarkan pertimbangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan memperhatikan dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan Jawa Tengah serta Kabupaten Tegal khususnya berdampak pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi turun, semakin banyaknya masyarakat terdampak covid-19 yang berdampak pada kepatuhan pembayaran pajak serta menurunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat, maka dapat diperhitungkan proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Tegal tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut. Dari sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pendapatan pajak daerah diproyeksikan mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 1,06%, hasil retribusi diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 6,19% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan 0,71%. Pendapatan transfer diproyeksikan mengalami rata-rata penurunan sebesar 0,30%, dengan pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 0,01% dengan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diproyeksikan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,66%, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa diproyeksikan tetap sampai dengan tahun 2024 dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat untuk alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi tidak menjadi komponen dalam proyeksi pendapatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan pertimbangan belum adanya kepastian akan program dan alokasi tersebut dari Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.13.
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024

NO	URAIAN	2021*)	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	PENERIMAAN PENDAPATAN	2.901.606.723.000	2.845.214.366.000	2.847.046.290.000	2.914.712.700.000	0,15
4	PENDAPATAN DAERAH	2.771.456.723.000	2.754.588.635.000	2.757.091.565.000	2.761.290.092.000	(0,12)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	433.822.920.000	436.952.832.000	439.455.762.000	443.052.070.000	0,70
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	133.050.000.000	133.365.000.000	134.823.500.000	137.333.600.000	1,06
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	23.583.855.210	26.110.767.200	27.155.197.000	28.241.405.000	6,19
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.470.000.000	13.758.000.000	13.758.000.000	13.758.000.000	0,71
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	263.719.064.790	263.719.064.800	263.719.065.000	263.719.065.000	0
4.2	Pendapatan Transfer	2.185.804.003.000	2.165.806.003.000	2.165.806.003.000	2.166.408.222.000	(0,30)
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.984.603.809.000	1.984.603.809.000	1.984.603.809.000	1.985.206.028.000	0,01
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	30.110.971.000	30.110.971.000	30.110.971.000	30.713.190.000	0,66
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.112.675.840.000	1.112.675.840.000	1.112.675.840.000	1.112.675.840.000	0
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	463.620.414.000	463.620.414.000	463.620.414.000	463.620.414.000	0
4.2.1.4	Dana Insentif Daerah	18.742.708.000	18.742.708.000	18.742.708.000	18.742.708.000	0
4.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
4.2.1.6	Dana Desa	359.453.876.000	359.453.876.000	359.453.876.000	359.453.876.000	0
4.2.2	Transfer Antar Daerah	201.200.194.000	201.200.194.000	181.202.194.000	181.202.194.000	0
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	181.202.194.000	181.202.194.000	181.202.194.000	181.202.194.000	0
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	19.998.000.000	19.998.000.000	0	0	(100)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	151.829.800.000	151.829.800.000	151.829.800.000	151.829.800.000	0
4.3.1	Pendapatan Hibah	151.829.800.000	151.829.800.000	151.829.800.000	151.829.800.000	0
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan	0	0	0	0	0
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.150.000.000	90.625.731.000	89.954.725.000	153.422.608.000	5,64
7.1.1	SiLPA	130.150.000.000	90.625.731.000	89.954.725.000	90.922.608.000	(11,27)
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	60.000.000.000	(100)
7.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	2.500.000.000	(100)

*) Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021

Sumber : Hasil Analisis Bappenda, BPKAD dan Bappenda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama termasuk didalamnya adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sedangkan belanja hibah ataupun belanja bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Akan tetapi, dengan masuknya belanja pegawai pada program dan kegiatan perangkat daerah, maka belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat tidak mencantumkan belanja pegawai sebagai bagian dari belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat. Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 4 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Perincian belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tegal tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.14.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama

NO	URAIAN	2021*)	2022	2023	2024
1	Belanja Transfer	503.665.660.000	504.613.236.000	504.863.530.000	505.223.160.000
1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	15.000.000.000	15.947.576.000	16.197.870.000	16.557.500.000
1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	488.665.660.000	488.665.660.000	488.665.660.000	488.665.660.000
2	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000	42.500.000.000	40.000.000.000	10.000.000.000
3.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0
3.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3.3	Pembentukan Dana Cadangan	0	30.000.000.000	30.000.000.000	0
3.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000		
Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Belanja		520.665.660.000	557.113.236.000	554.863.530.000	525.223.160.000

*) Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Hasil penghitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2021-2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024

NO	URAIAN	2021*)	2022	2023	2024
A	PENERIMAAN DAERAH	2.901.606.723.000	2.845.214.366.000	2.847.046.290.000	2.914.712.700.000
1	Pendapatan Daerah	2.771.456.723.000	2.754.588.635.000	2.757.091.565.000	2.761.290.092.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	433.822.920.000	436.952.832.000	439.455.762.000	443.052.070.000
1.2	Pendapatan Transfer	2.185.804.003.000	2.165.806.003.000	2.165.806.003.000	2.166.408.222.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	151.829.800.000	151.829.800.000	151.829.800.000	151.829.800.000
2	Penerimaan Pembiayaan	130.150.000.000	90.625.731.000	89.954.725.000	153.422.608.000
2.1	SiLPA	130.150.000.000	90.625.731.000	89.954.725.000	90.922.608.000
2.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	60.000.000.000
2.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	2.500.000.000
B	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Belanja Serta Prioritas Utama Belanja	520.665.660.000	557.113.236.000	554.863.530.000	525.223.160.000
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	2.380.941.063.000	2.288.101.130.000	2.292.182.760.000	2.389.489.540.000

*) Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Proyeksi kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja SKPD. Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat dilihat proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.16.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2021- 2024

No	Uraian	Proyeksi			
		2021*)	2022	2023	2024
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	2.380.941.063.000	2.288.101.130.000	2.292.182.760.000	2.389.489.540.000
1	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I	162.000.000.000	216.000.000.000	296.500.000.000	166.500.000.000
	Program Unggulan Bupati	162.000.000.000	216.000.000.000	296.500.000.000	166.500.000.000
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	142.700.000.000	153.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000
	a. Kebijakan Aspirasi Masyarakat	125.700.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
	b. Kebijakan Kewilayahan	17.000.000.000	53.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
3	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III	2.076.241.063.000	1.919.101.130.000	1.855.682.760.000	2.082.989.540.000
	Belanja SKPD	2.076.241.063.000	1.919.101.130.000	1.855.682.760.000	2.082.989.540.000

*) Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan permasalahan dan isu strategis sangat menentukan *alternative* / solusi yang bisa diambil sebagai dasar penentuan kebijakan. Untuk itu analisis permasalahan dan isu strategis harus mampu mengidentifikasi pokok suatu permasalahan / isu sekaligus mengenali faktor penentu keberhasilannya berdasarkan akar masalahnya. Kemudian perlu ditentukan prioritas masalah / isu yang akan diselesaikan dalam kerangka pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan satu kesatuan yang harus dijadikan dasar pemikiran untuk merumuskan kebijakan mulai dari tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas.

4.1. PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian visi-misi RPJMD. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengakajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Berkaitan dengan perubahan RPJMD Kab. Tegal 2019-2024, fokus identifikasi dan analisis permasalahan dilakukan terhadap permasalahan yang mempengaruhi dan mengakselerasi terhadap pencapaian visi-misi yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD.

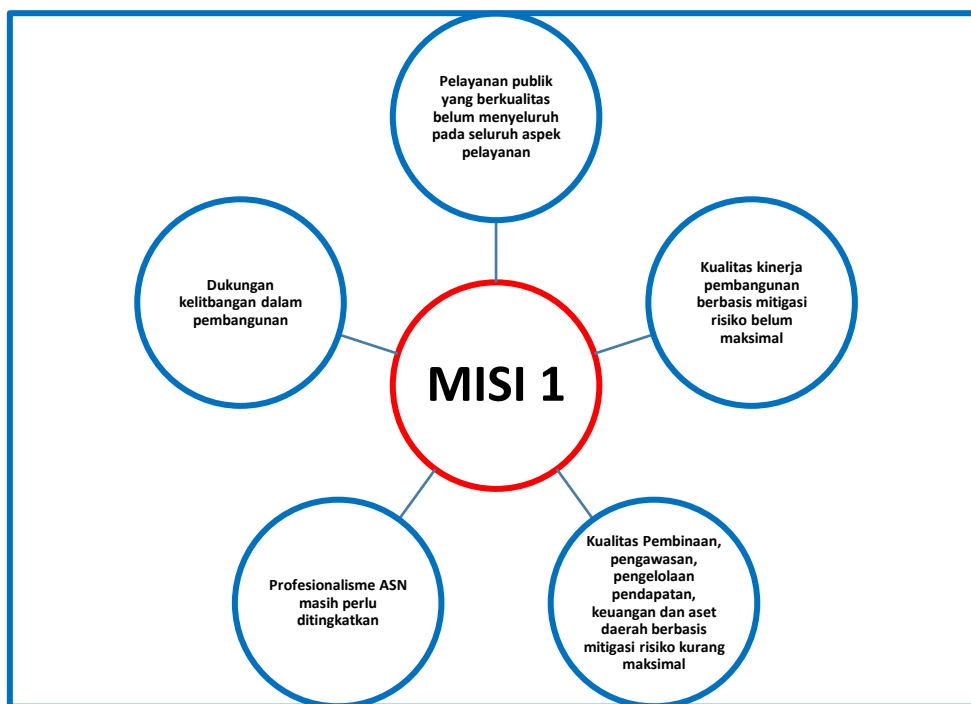
4.1.1 Permasalahan Pencapaian Misi

a. Permasalahan Pencapaian Misi Ke-1

Hasil identifikasi dan analisis terhadap Misi 1 RPJMD 2019-2024 **“Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat”** terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

- ✓ Pelayanan publik yang berkualitas belum menyeluruh pada seluruh aspek pelayanan
- ✓ Kualitas kinerja pembangunan belum maksimal
- ✓ Dukungan kelitbangan dalam pembangunan masih rendah
- ✓ Kualitas pembinaan, pengawasan, pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah kurang maksimal
- ✓ Profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan

Gambar 4. 1
Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi Pertama



Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang Kab. Tegal, 2021

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan **MISI PERTAMA**, faktor penentu keberhasilan harus mampu teridentifikasi secara jelas. Untuk itu akar masalah prioritas pada tiap-tiap pokok permasalahan harus dapat dirumuskan secara tepat karena berpengaruh pada pilihan program dan kegiatan prioritas apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal secara efektif dan efisien. Adapun identifikasi akar masalah masih-masing pokok permasalahan pada Misi Pertama sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan MISI PERTAMA

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
Misi I: “Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel Dan Efektif Melayani Rakyat”				
	Pelayanan Publik yang Berkualitas Belum Menyeluruh pada Seluruh Aspek Pelayanan	Keamanan Informasi untuk Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Belum Memadai	Belum Keseluruhan System Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik	Persandian
		Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pemerintahan yang	Sarana dan Prasarana Disejumlah Perangkat Daerah Masih Terbatas	Kominfo

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Efektif dan Efisien Belum Memadai		
		Terbatasnya Layanan Publik yang Terintegrasi dan Dapat Diakses Secara <i>Online</i>	Tidak Semua Layanan Publik Dapat Terintegrasi	Kominfo
		Penyebarluasan Informasi Tentang Pelayanan Publik Masih Terbatas	Belum Semua Informasi Tentang Layanan Publik Terintegrasi	Kominfo
		Ketersediaan Data dan Informasi yang Dibutuhkan Dalam Pelayanan Publik Masih Rendah dan Kurang Berkualitas	Belum Keseluruhan Sistem Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik	Statistik
		Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kecamatan	Belum Optimalnya Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintahan yang Baik	Unsur Kecamatan
		Kurang Optimalnya Kemandirian Desa/ Kelurahan dalam Mengelola Pembangunan Kewilayahan	Kurang Maksimalnya Kordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Unsur Kecamatan
			Belum Aktifnya Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di Desa	Unsur Kecamatan
			Masih Rendahnya Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Unsur Kecamatan
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Belum Optimal	Pelayanan Publik Belum Sesuai dengan SPM	Unsur Sekretariat Daerah
			Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Belum Terbina dengan Baik	Unsur Sekretariat Daerah
			Banyak Produk Hukum Yang Belum Difasilitasi Secara Maksimal.	Unsur Sekretariat Daerah
			Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Sosial Keagamaan	Unsur Sekretariat Daerah
			Layanan Administrasi Keuangan OPD Belum Maksimal	Unsur Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekda Belum Optimal	Unsur Sekretariat Daerah

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Struktur Organisasi OPD Masih Banyak yang Tumpang Tindih dan Belum Ideal	Unsur Sekretariat Daerah
			Kegiatan Kepala Daerah dan Forkopimda yang Belum Optimal	Unsur Sekretariat Daerah
		Tata Kelola Keuangan dan Asset Desa Kurang Optimal	Tata Kelola Administrasi dan Pelaporan Keuangan Masih Sangat Rendah	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pengelolaan Manajemen Pemerintahan Desa yang Belum Sesuai Standar	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			Kapasitas SDM di Pemerintah Desa yang Masih Minim Dalam Memahami Sistem Pemerintahan Desa Sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undang yang Baru	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Layanan dan Pengelolaan Penyediaan Data Kependudukan Belum Semuanya Memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Pendataan Kurang Maksimal	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Masyarakat Kurang Optimal	Kecepatan dan Kemudahan Penerbitan Dokumen Kependudukan Masih Belum Optimal	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kualitas Layanan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat Kurang Optimal	Kecepatan dan Kemudahan Permohonan Pencatatan Sipil masih Belum Optimal	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kualitas Kinerja Pembangunan Berbasis Mitigasi Risiko Belum Maksimal	Belum Maksimalnya Kualitas Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Sinkronisasi Penganggaran	Banyaknya Muatan Materi yang Harus Diakomodasi pada Setiap Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Berbatas Waktu	Perencanaan
		Manajemen Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal OPD Belum Efektif	Hasil Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Belum Maksimal	Perencanaan
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah Belum Maksimal	Hasil Koordinasi Perencanaan Sektoral Belum Maksimal	Perencanaan

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Pembangunan Desa Belum Semuanya Tertib Adminstrasi	Kurangnya Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan di Desa	Unsur Kecamatan
		Maturitas UKPBJ Belum Optimal	Fungsi Koordinasi Belum Optimal	Unsur Sekretariat Daerah
			Kemampuan SDM Pengelola LPSE yang Tidak Merata	Unsur Sekretariat Daerah
		Standarisasi LPSE Belum Merata	Kemampuan SDM Pengelola LPSE yang Tidak Merata	Unsur Sekretariat Daerah
		Integrasi Pengawasan DPRD Dalam Pembangunan Belum Optimal	Kebijakan Anggaran yang Dibahas Tidak Tepat Waktu	Unsur Sekretariat DPRD
			Kurang Maksimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Unsur Sekretariat DPRD
			Aspirasi Masyarakat Belum Terakomodir Semua di Pokir DPRD	Unsur Sekretariat DPRD
	Dukungan Kelitbangan Dalam Pembangunan Masih Rendah	Pemanfaatan Hasil-Hasil Penelitian dan Inovasi yang Dapat Mendukung Secara Langsung Pelaksanaan Berbagai Sektor Pembangunan Derah Belum Optimal	Hasil Kelitbangan Belum Optimal dan Selaras dengan Pemecahan Isu Pembangunan	Litbang
	Kualitas Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Berbasis Mitigasi Risiko Kurang Maksimal	Belum Optimalnya Pengelolaan APBD	Belum Optimalnya Input Data dalam Penyusunan RAPBD	Keuangan
			Belum Konsistennya Terhadap Jadwal Tahapan Penganggaran Anggaran	Keuangan
			Belum Optimalnya Pelaksanaan <i>E-Planning</i> dan <i>E-Budgeting</i> Saat Penyusunan Perencanaan	Keuangan
		Pungutan Pajak Belum Optimal	Belum <i>Update</i> -nya Nilai Obyek Pajak	Keuangan

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Wajib Pajak Belum Seluruhnya Teridentifikasi	Keuangan
		Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Belum Optimalnya Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan BMD	Keuangan
			Belum Adanya Aplikasi Laporan Barang Milik Daerah	Keuangan
		Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip Penting Daerah Khususnya Arsip Keuangan dan Aset	Belum Dimilikinya Pedoman Tata Kerja Kearsipan yang Diberlakukan Secara Baku di Perangkat Daerah	Kearsipan
			Pengelola Kearsipan Banyak yang Belum Memahami Pedoman Audit Kearsipan	Kearsipan
			Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kearsipan	Kearsipan
		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Perlu Ditingkatkan	Kualitas Koordinasi dan Supervisi Kurang Maksimal	Pengawasan
		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itprov Perlu Dioptimalkan	Kualitas Koordinasi dan Supervisi Kurang Maksimal	Pengawasan
		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itkab Masih Rendah	Kualitas Koordinasi dan Supervisi Kurang Maksimal	Pengawasan
			Kualitas Koordinasi dan Supervisi Kurang Maksimal	Pengawasan
		Predikat WBK/WBBM Berdasarkan Penilaian Internal Belum Optimal	Kualitas Koordinasi dan Supervisi Kurang Maksimal	Pengawasan
	Profesionalisme ASN Masih Perlu Ditingkatkan	Tingkat Kedisiplinan ASN Masih Kurang	Usulan Formasi CPNS Tidak Seluruhnya Disetujui	Kepegawaian
		Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional (Non Guru Non Kesehatan) Belum Terisi Secara Maksimal Berdasarkan Kompetensinya.	Data Kepegawaian Kurang Tertata	Kepegawaian
			Informasi Layanan Kepegawaian yang Terintegrasi dengan SIMPEG Belum Optimal	Kepegawaian
			Pembinaan Kedisiplinan yang Kurang Efektif	Kepegawaian

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Sistem Penilaian Kinerja yang Belum Optimal	Kepegawaian
		Masih Banyak ASN yang Belum Mengikuti Pelatihan Teknis 20 Jam/Tahun	Terbatasnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Umum, Inti dan Pilihan Masih Rendah	Pendidikan dan Pelatihan
		Masih Banyak ASN yang Belum Mengikuti Seminar/Workshop/Sejenis Sesuai dengan Tupoksi Jabatan	Terbatasnya Penyelenggaraan Pelatihan JF Non Pendidikan dan Non Pengawasan yang Belum Mengikuti Pelatihan Fungsional	Pendidikan dan Pelatihan
			Pemantauan dan Evaluasi Peserta Diklat Prajabatan dan Latsar Belum Optimal	Pendidikan dan Pelatihan
			Belum Adanya Rencana Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan/Latsar (Analisa Kebutuhan Diklat Kepemimpinan dan Latsar)	Pendidikan dan Pelatihan
			Layanan Sertifikasi ASN Belum Merata	Pendidikan dan Pelatihan

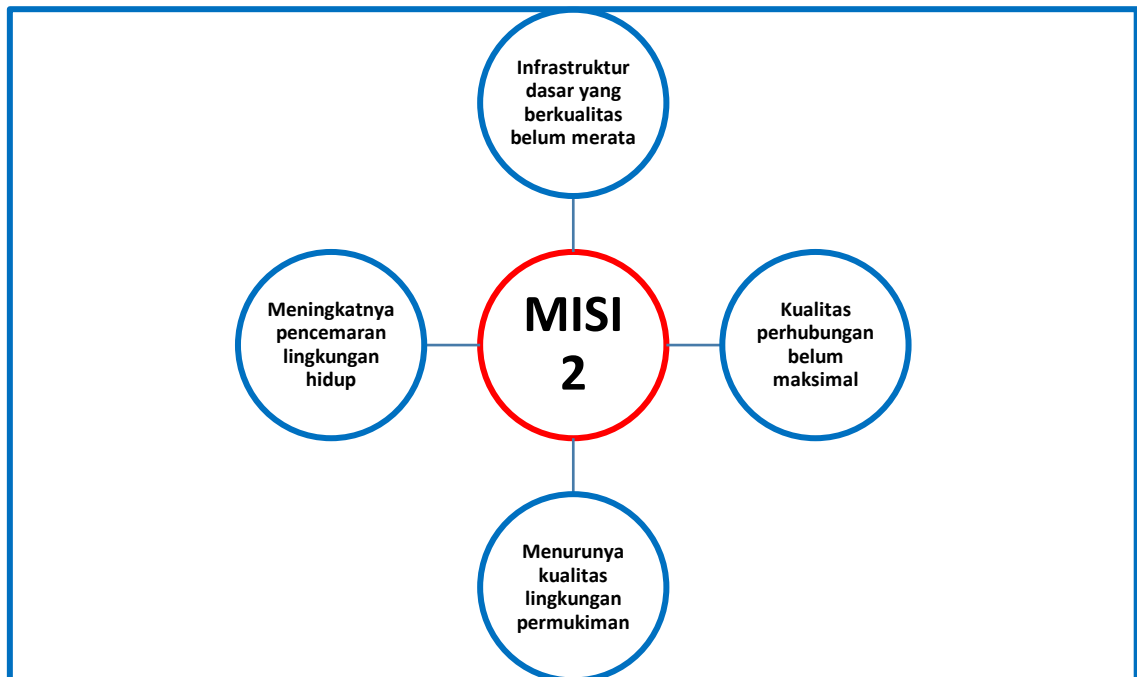
Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

b. Permasalahan Pencapaian Misi Ke-2

Hasil identifikasi dan analisis terhadap Misi 2 RPJMD 2019-2024 “**Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan**” terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

- ✓ Layanan infrastruktur dasar yang berkualitas belum merata
- ✓ Menurunnya kualitas lingkungan permukiman
- ✓ Kualitas perhubungan belum maksimal
- ✓ Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup

Gambar 4. 2
Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi Kedua



Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

Adapun identifikasi akar masalah masih-masing pokok permasalahan pada Misi Kedua sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan MISI KEDUA

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
Misi II: Memperkuat Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur Yang Andal, Berkualitas Dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan				
	Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Belum Merata	Cakupan Irigasi Berkualitas Tidak Menjangkau Seluruh Wilayah	Sarpras Irigasi Masih Kurang	PUPR
			Banyak Sarpras Irigasi yang Sudah Tidak Layak	PUPR
			Pengelolaan Irigasi Kurang Maksimal	PUPR
		Terbatasnya Layanan Air Minum Berkualitas Secara Merata	Sarpras SPAM Masih Terbatas	PUPR
			Banyak Sarpras SPAM yang Sudah Tidak Layak	PUPR
			Pengelolaan SPAM Kurang Maksimal	PUPR

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Belum Semua Ruas Jalan Kabupaten Memiliki Drainase Jalan	Kurangnya Evaluasi Sistem Drainase Saat Ini	PUPR
			Masterplan Drainase Belum Merata Diseluruh	PUPR
		Penataan Bangunan dan Fisik Perkotaan yang Kurang Maksimal dan Tidak Sesuai Standar	Kurang Berkualitasnya Pemberian IMB	PUPR
			Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Gedung yang Terbangun	PUPR
			Pengendalian dan Pembangunan yang Tidak Optimal	PUPR
		Penyedia Jasa Konstruksi yang Sesuai Standar dan Bersertifikat Belum Tersedia dan Dievaluasi Berkala	Perencanaan Pengembangan Tata Kota Belum Tersedia	PUPR
			Terbatasnya Tenaga Jasa Kontruksi Terlatih	PUPR
		Kualitas Jalan dan Jembatan yang Baik Tidak Merata	Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang Belum Optimal	PUPR
		Belum Memiliki RDTR yang Dilegalisasi	RTRW Masih Dalam Proses Penetapan	PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Tataruang Kurang Maksimal	PUPR
			Kurang Optimalnya Proses Penataan Ruang	PUPR
		Terdapat Masalah Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pembangunan Kurang Optimal	Pertanahan
		Sertifikasi Lahan Milik Pemda Masih Rendah	Ketersediaan Data Aset Lahan yang Kurang Baik	Pertanahan
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kurang Makasimal	Kurangnya Kesadaran Bersama Akan Pentingnya Nilai Makam Pahlawan	Sosial
		Dukungan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Belum Optimal	Belum Ada Pengaturan Tentang Tata Ruang Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Belum Ada Pengaturan Tentang Kewenangan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Cakupan Kerjasama Desa Dalam Pengentasan Desa Tertinggal Belum Optimal	Sinkronisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kurang Terkoordinasi Dengan Baik	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Menurunnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Penyediaan Permukiman yang Layak Khususnya Korban Bencana Tidak Merata	Adanya Dampak Bencana yang Menyebabkan Kerusakan Rumah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masih Banyak Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang Tidak Memiliki Izin	Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kurang Optimal	Rendahnya Partisipasi Masyarakat Golongan Bawah Untuk Memiliki Rumah yang Layak	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Belum Optimal	Kurang Terpantaunya Pengembangan Permukiman yang Ada	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Kurangnya Evaluasi Atas Pengembangan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Kutangnya Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Kawasan Kumuh	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Tidak Meratanya Layanan PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	Belum Adanya Perencanaan Pengembangan PSU yang Berkualitas	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kualitas Perhubungan Belum Maksimal	Layanan Keselamatan Berkendara Belum Optimal	Belum Semua Jalan Memiliki LPJU	Perhubungan
		Layanan Angkutan Transportasi Belum Optimal	Kondisi Perlengkapan Jalan Banyak yang Rusak dan Belum Tertangani	Perhubungan
		Layanan Keselamatan Berkendara Belum Optimal	Kurang Maksimalnya Pemeliharaan Prasarana Jalan	Perhubungan
			Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin	Perhubungan
			Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	Perhubungan

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Kebijakan untuk Jalan Masih Kurang	
			Jumlah Titik Parkir yang Belum Dikelola dengan Baik, Sehingga Sering Menimbulkan Kecelakaan	Perhubungan
			Belum Semua Terminal Tipe C Memiliki Sarana dan Prasarana Lengkap Sesuai Ketentuan	Perhubungan
			Belum Semua Jalan Terlayani Angkutan Umum	Perhubungan
			Pengelolaan Trayek Angkutan Orang Belum Maksimal	Perhubungan
			Pengawasan Kelayakan Kendaraan Angkutan Masih Kurang	Perhubungan
	Meningkatnya Pencemaran Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Belum Terencana Dengan Maksimal	Belum Tersusunnya Dokumen/Kajian tentang LH di Kabupaten Tegal	Lingkungan Hidup
		Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Khususnya Air Sungai Belum Efektif	Kurangnya Optimalnya Koordinasi Pencegahan, Penanggulangan, Kerusakan Lingkungan	Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Lahan Kehati Belum Optimal	Pengelolaan dan Pengembangan RTH Kurang Maksimal	Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Bahan Dan Limbah Berbahaya, Beracun Kurang Maksimal	Kurangnya Optimalnya Koordinasi dan Fasilitas Pengelolaan Bahan dan Limbah B3	Lingkungan Hidup
		Cakupan Layanan Limbah Rumah Tangga Kurang Maksimal	Masih Terdapat Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik yang Belum Sesuai Standar	PUPR
			Belum Optimalnya Strategi Kebijakan Pengelolaan Limbah Domestik	PUPR
		Belum Optimalnya Cakupan Penanganan Sampah Dimasyarakat.	Kurang Optimalnya Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah yang Ada	Lingkungan Hidup
			Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Sampah	Lingkungan Hidup
			Kurangnya Koordinasi Pengelolaan Sampah	Lingkungan Hidup

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	PUPR
			Banyak Sarpras Pengelolaan Sampah yang Sudah Tidak Layak	PUPR
			Terbatasnya Daya Tampung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	PUPR
		Pelaku Usaha Berkomitmen Dalam Pengelolaan Lingkungan Belum Maksimal	Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Pengelolaan Lingkungan	Lingkungan Hidup
		Kapasitas Masyarakat dan Penyuluh Dalam Mengelola Lingkungan Masih Belum Maksimal	Kurangnya Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat	Lingkungan Hidup
		Masyarakat Kurang Terstimulasi untuk Mengelola Lingkungan Hidup	Kurangnya Penghargaan Kepada Masyarakat yang Dapat Mengelola Lingkungan Hidup dengan Baik	Lingkungan Hidup
		Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait LH Belum Maksimal	Terbatasnya SDM Penanganan Aduan	Lingkungan Hidup

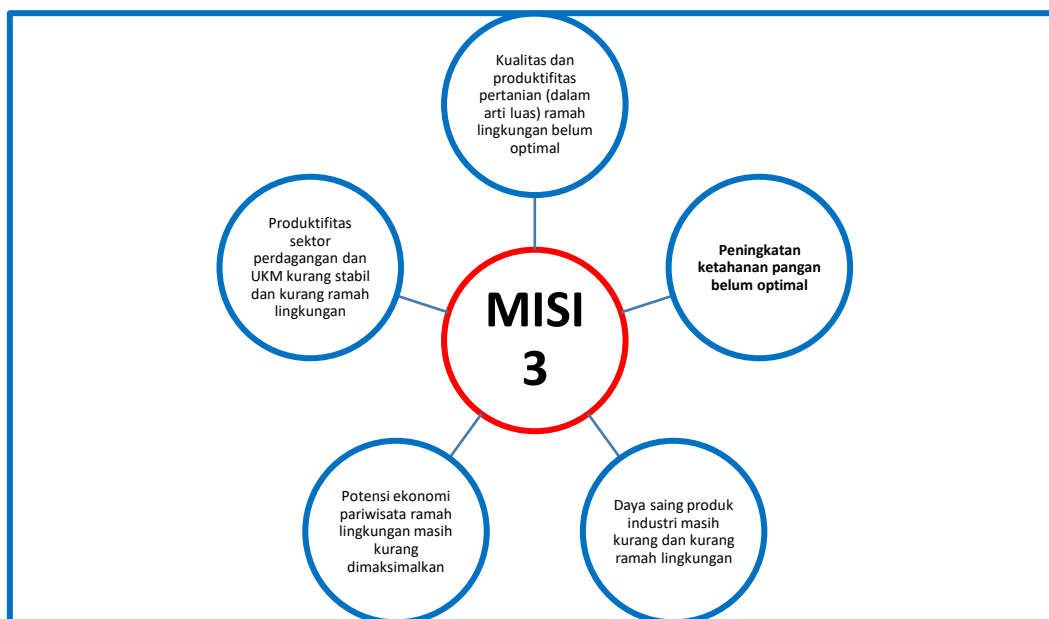
Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

c. Permasalahan Pencapaian Misi Ke-3

Hasil identifikasi dan analisis terhadap Misi 3 RPJMD 2019-2024 **“Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan”** terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

- ✓ Kualitas dan produktifitas pertanian (dalam arti luas) ramah lingkungan belum optimal
- ✓ Peningkatan ketahanan pangan belum optimal
- ✓ Daya saing produk industri masih kurang dan kurang ramah lingkungan
- ✓ Potensi ekonomi pariwisata ramah lingkungan masih kurang dimaksimalkan
- ✓ Produktifitas sektor perdagangan dan UKM kurang stabil dan kurang ramah lingkungan

Gambar 4. 3
Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi Ketiga



Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

Adapun identifikasi akar masalah masing-masing pokok permasalahan pada Misi Ketiga sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan MISI KETIGA

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
Misi III: Membangun Perekonomian Rakyat Yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan				
	Kualitas dan Produktifitas Pertanian (Dalam Arti Luas) Ramah Lingkungan Belum Optimal	Belum Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap.	Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Masih Kurang Efektif	Kelautan dan Perikanan
			Kurangnya Kapasitas Nelayan	Kelautan dan Perikanan
			Kualitas Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Belum Maksimal	Kelautan dan Perikanan
			Kurang Optimalnya Layanan/Fasilitas Aktifitas Penangkapan Ikan Nelayan	Kelautan dan Perikanan
		Praktek Penangkapan Ikan Ilegal di PUD (Menggunkan Racun dan Listrik/Setrum) Masih Marak	Kurangnya Pengawasan Standar Keamanan Penangkapan Ikan	Kelautan dan Perikanan

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Belum Optimalnya Produksi Perikanan Budidaya	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Masih Kurang Efektif	Kelautan dan Perikanan
			Kurangnya Kapasitas Nelayan Pembudidaya	Kelautan dan Perikanan
			Kurang Optimalnya Layanan/Fasilitas Aktifitas Budidaya Ikan Nelayan	Kelautan dan Perikanan
		Belum Optimalnya Kemanfaatan Pengolahan Hasil Perikanan.	Belum Semua Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tersertifikasi	Kelautan dan Perikanan
			Kurangnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan
			Fasilitas Pemasaran Hasil Perikanan Belum Maksimal	Kelautan dan Perikanan
		Belum Optimalnya Produksi Pertanian Dan Peternakan	Perencanaan Pertanian yang Komprehensif dan Berkualitas Belum Tersedia	Pertanian
			Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Berkualitas Belum Merata	Pertanian
			Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan yang Berkualitas Belum Merata	Pertanian
			Terbatasnya Lahan Pertanian Tananam Pangan Khususnya Pertanian Organik	Pertanian
			Kurang Maksimalnya Aksesibilitas Jalan Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian
			Kurangnya Bibit Ternak yang Berkualitas	Pertanian
			Lokasi Pengembalaan Ternak Terbatas dan Tidak Merata	Pertanian
		Kurangnya Antisipasi Penanggulangan Bencana Pertanian	Kurangnya Antisipasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan	Pertanian
		Pengawasan Produksi Hasil Peternakan Yang Aman Dan Sehat Belum Optimal	Kurang Maksimalnya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian
			Pengawasan Kesehatan Hewan Ternak Belum Maksimal	Pertanian
			Layanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Belum Maksimal	Pertanian

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Kualitas Kelembagaan Kelompok Tani Belum Optimal	Terbatasnya Pembinaan Kelompok Tani	Pertanian
		Kapasitas Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan yang Berkualitas Belum Merata	Terbatasnya Pelatihan Penyuluh	Pertanian
	Peningkatan Ketahanan Pangan Belum Optimal	Penguatan Cadangan Pangan Mengalami Tren Menurun	Kurangnya Diversifikasi Pangan di Masyarakat	Pangan
	Daya Saing Produk Industri Masih Kurang Dan Kurang Ramah Lingkungan	Pengembangan Sektor Industri Yang Belum Maksimal	Belum Tersedianya Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Perindustrian
			Masih Banyak IKM Dan Produk IKM Yang Belum Bersertifikasi	Perindustrian
			Masih Terbatasnya Jumlah TPL	Perindustrian
		Masih Rendahnya Data/Informasi Industri Yang Terverifikasi	Terbatasnya SDM Dalam Menginventarisasi Data Industri Kabupaten Tegal	Perindustrian
	Potensi Ekonomi Pariwisata Ramah Lingkungan Masih Kurang Dimaksimalkan	Destinasi Tujuan Wisata Kurang Dioptimalkan/Dikembangkan/Terkelola	Tidak Optimalnya Pengelolaan Sarana Prasarana Yang Ada	Pariwisata
		Belum Semua Usaha Pariwisata Yang Memiliki/Memperpanjang Ijin Usaha	Sarana Dan Prasarana Untuk Obyek Wisata Sangat Terbatas	Pariwisata
			Pengembangan Obyek Wisata Eksisting Belum Terstruktur	Pariwisata
			Terbatasnya Kemampuan Masyarakat Dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata	Pariwisata
			Kurangnya Pembinaan Untuk Sadar Wisata	Pariwisata
			Layanan Sertifikasi Kepada Pelaku Usaha Pariwisata Tidak Optimal	Pariwisata
			Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Pariwisata	Pariwisata
		Kurang Maksimalnya Pemasaran Destinasi Tujuan Wisata Yang Ada	Strategi Dan Cakupan Pemasaran Yang Kurang Tepat	Pariwisata

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Belum Maksimal.	Belum Adanya Pembinaan Dan Pendampingan Terhadap SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
	Produktifitas Sektor Perdagangan Dan UKM Kurang Stabil Dan Kurang Ramah Lingkungan	Rendahnya Kualitas /Standarisasi Pasar Serta Pengelolaannya.	Sarana Dan Prasarana Pasar Kurang Memadai	Perdagangan
			Kurangnya Pembinaan Pengelola Pasar	Perdagangan
		Masih Terdapat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Tidak Standar	Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Dan Pengawasan Metrologi	Perdagangan
		Pengendalian Harga Barang Kurang Maksimal	Kurang Optimalnya Koordinasi Dan Pengawasan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Perdagangan
			Kurang Optimalnya Pelaksanaan Operasi Pasar	Perdagangan
		Produktifitas Penjualan Produk Belum Optimal	Lemahnya Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan	Perdagangan
			Kurang Maksimalnya Promosi Dan Pemasaran Produk Lokal	Perdagangan
		Belum Optimalnya Nilai Bersih Ekspor Produk Lokal	Kurangnya Promosi Dagang Secara Luas	Perdagangan
		Masih Ada KSP/USP Yang Kondisinya Tidak Sehat	Fasilitasi Dan Pembinaan Koperasi Kurang Maksimal	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Layanan Penilaian Kesehatan Koperasi Belum Menyeluruh	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Masih Kurangnya Kualitas SDM Perkoperasian	Layanan Peningkatan Kapasitas SDM Perkoperasin Masih Kurang	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Masih Kurangnya Kemitraan Perkoperasian	Pemberdayaan Untuk Peningkatan Produktifitas Koperasi Masih Kurang Maksimal	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Masih Rendahnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.	Ketersediaan Data UMKM Yang Valid Masih Kurang	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Kurangnya Fasilitas Dan Pemberdayaan Kemitraan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Peningkatan Skala Usaha UMKM Kurang Maksimal	Kurangnya Fasilitas Pengembangan Skala Usaha UMKM	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

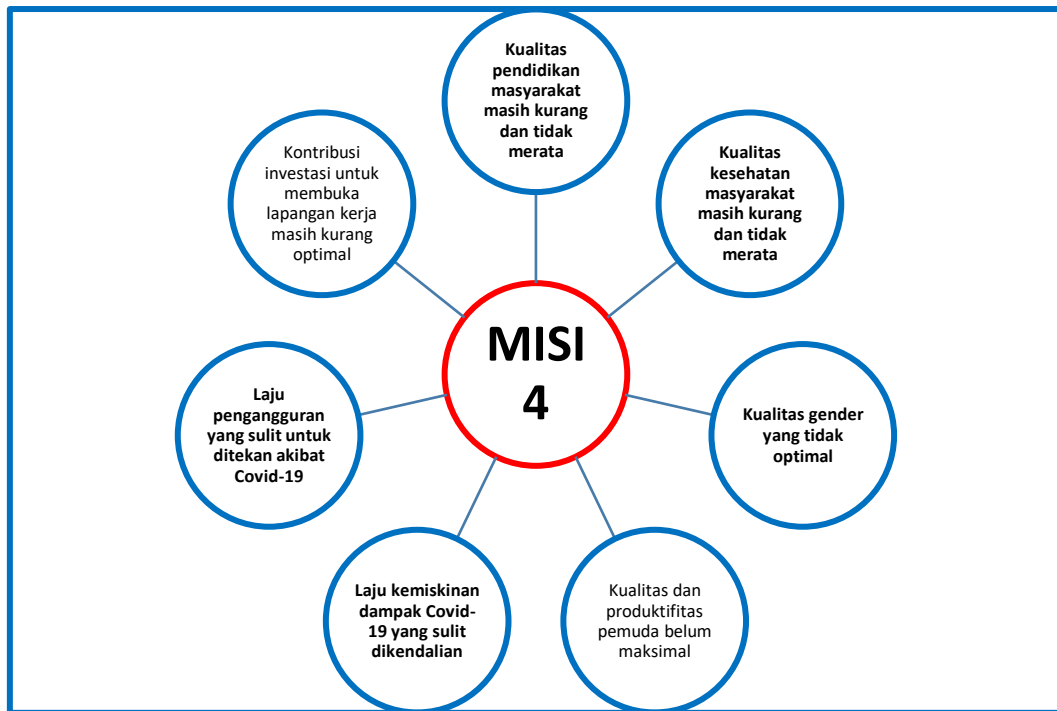
d. Permasalahan Pencapaian Misi Ke-4

Hasil identifikasi dan analisis terhadap Misi 4 RPJMD 2019-2024 **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”** terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

- ✓ Kualitas pendidikan masyarakat masih kurang dan tidak merata
- ✓ Kualitas kesehatan masyarakat masih kurang dan tidak merata
- ✓ Kualitas gender yang tidak optimal
- ✓ Kualitas dan produktifitas pemuda belum maksimal
- ✓ Laju kemiskinan dampak Covid-19 yang sulit dikendalikan
- ✓ Laju pengangguran yang sulit untuk ditekan akibat Covid-19
- ✓ Kontribusi investasi untuk membuka lapangan kerja masih kurang optimal

Gambar 4. 4

Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi Keempat



Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

Adapun identifikasi akar masalah masih-masing pokok permasalahan pada Misi Keempat sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan MISI KEEMPAT

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
MISI IV: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial Dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi				
	Kualitas Pendidikan Masyarakat Masih Kurang Dan Tidak Merata	Mutu Layanan Pendidikan Masyarakat Belum Optimal	Sarpras Pendidikan PAUD Dan Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Non-Formal Masih Kurang Memadai Dan Kurang Merata	Pendidikan
			Belum Semua Tenaga Pengajar PAUD, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Non Formal Bersertifikat	Pendidikan
			Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Non Formal Belum Terakreditasi Seluruhnya Atau Belum Sesuai Standar	Pendidikan
		Pengembangan Kurikulum Lokal Yang Berkualitas Belum Optimal	Kemampuan Menyusun Kurikulum Lokal Masih Terbatas	Pendidikan
			Pengelolaan Dan Pengajaran Kurikulum Lokal Belum Maksimal	Pendidikan
			Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pembelajaran Kurikulum Lokal	Pendidikan
		Kebutuhan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Belum Merata	Kebutuhan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Belum Terpetakan Secara Maksimal	Pendidikan
			Distribusi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Belum Merata	Pendidikan
		Pengendalian Mutu Satuan Pendidikan Swasta Belum Maksimal	Kurangnya Pengendalian Izin Pendidikan	Pendidikan

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Tingkat Literasi Masyarakat Kabupaten Tegal Masih Tergolong Rendah	Masih Ada Wilayah Yang Belum Mendapat Layanan Perpustakaan	Perpustakaan
			Jumlah Perpustakaan Belum Sesuai Dengan Jumlah Penduduk.	Perpustakaan
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Elektronik Masih Sangat Terbatas	Perpustakaan
			Belum Semua Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Berkompeten	Perpustakaan
			Jumlah Ketersediaan Judul Buku Dan Kebutuhan Masyarakat Masih Belum Sesuai	Perpustakaan
			Kurangnya Sosialisasi Gemar Membaca Dan Layanan Perpustakaan Yang Menyebabkan Perilaku Budaya Baca Di Masyarakat Rendah	Perpustakaan
			Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Perpustakaan
	Kualitas Kesehatan Masyarakat Masih Kurang Dan Tidak Merata	Belum Maksimalnya Pengelolaan Fasilitas Dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Masih Belum Optimalnya Mutu Pelayanan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Puskesmas	Kesehatan
			Adanya Mobilitas Penduduk Sehingga Pemantauan Kesehatan Kurang Optimal	Kesehatan
			Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	Kesehatan
			Kurang Meratanya Sarana Dan Sarana Yang Berkualitas Di Puskesmas	Kesehatan

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Kurang Meratanya Sarana Dan Sarana Yang Berkualitas Di Rumah Sakit	Kesehatan
			Kurang Meratanya Sarana Dan Sarana Yang Berkualitas Di Rumah Sakit	Kesehatan
			Masih Belum Optimalnya Mutu Pelayanan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Kesehatan
		Kualitas Sumberdaya Kesehatan Terbatas Dan Tidak Merata	Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata Di Puskesmas	Kesehatan
			Manajemen Pengelolaan SDM Yang Masih Kurang Optimal Di Puskesmas	Kesehatan
			Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata Di Rumah Sakit	Kesehatan
			Manajemen Pengelolaan SDM Yang Masih Kurang Optimal Di Rumah Sakit	Kesehatan
		Belum Semua Makanan Dan Minuman Yang Beredar Di Kabupaten Tegal Memiliki Kualitas Yang Sesuai Dengan Yang Diperkirakan	Pengawasan Obat Dan Makanan Belum Maksimal	Kesehatan
			Pengawasan Kelayakan Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan Belum Maksimal	Kesehatan
		Peran Serta Masyarakat Dalam Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Belum Maksimal	Kurangnya Pembinaan Penerapan PHBS Di Masyarakat	Kesehatan
			Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menerapkan PHBS di setiap Aktifitas	Kesehatan

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
	Kualitas Gender Yang Tidak Optimal	Prioritas Anggaran Pembangunan Berbasis Gender Belum Maksimal	Minimnya Peraturan, Pemahaman Dan Pengetahuan Tentang Pengarusutamaan Gender	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Belum Efektifnya Kelembagaan PUG Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Masih Rendahnya Pemahaman Mengenai Konsep Dan Isu Gender Serta Manfaat PUG Dalam Pembangunan,	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Rendahnya Peran Dan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Jabatan-Jabatan Publik, Dan Di Bidang Ekonomi	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Belum Memadainya Kapasitas Kelembagaan Dalam Pelaksanaan PUG	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Masih Rendahnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan	Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Optimal	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Layanan Fisik Dan Psikis Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan Belum Optimal	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Masih Belum Memadainya Jumlah Dan Kualitas Tempat Pelayanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Karena Banyaknya Jumlah Korban Yang Harus Dilayani Dan Luasnya Cakupan Wilayah Yang Harus Dijangkau	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Belum Optimalnya Peran Kelembagaan Perlindungan Hak Perempuan.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Kualitas Pelayanan Konseling Keluarga Berbasis Gender Belum Optimal	Kurangnya Pembinaan Dan Stiumulan Peningkatan Hidup Keluarga	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Belum Adanya Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Ketersediaan Dan Kualitas Data Gender Dan Anak Kurang Optimal	Data Gender Dan Anak Tidak Mutakhir	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Desa Kurang Optimal	Minimnya Peraturan, Pemahaman Dan Pengetahuan Tentang Hak Anak Di Desa	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Belum Efektifnya Kelembagaan Forum Anak Dan Pemberdayaan Anak Di Desa	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Belum Ada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Di Desa	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Belum Optimalnya Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak	Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Kurang Optimal	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Layanan Fisik Dan Psikis Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Belum Optimal	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Masih Belum Memadainya Jumlah Dan Kualitas Tempat Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan, Karena Banyaknya Jumlah Korban Yang Harus Dilayani Dan Luasnya Cakupan Wilayah Yang Harus Dijangkau	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Layanan Pemenuhan Kebutuhan KB Belum Optimal	Advokasi Dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi)	Pengendalian Penduduk Dan

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Tentang Program KB Belum Optimal	Keluarga Berencana
			Kurangnya Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana Dibandingkan Dengan Luas Wilayah	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Pengembangan Dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Dalam Program KB Belum Optimal	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Penyediaan Jaminan Ketersediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Belum Memadai.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Tingkat Kesertaan Ber KB PUS (Pasangan Usia Subur) Belum Optimal, Masih Banyak Tidak Memakai Kontrasepsi (<i>Unmet Need</i>) Masih Cukup Tinggi Terutama Yang Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Pemahaman Dan Kesadaran Tentang Hak Dan Kesehatan Reproduksi Remaja Masih Rendah	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Pengendalian Kelahiran Penduduk Khususnya Warga Miskin Belum Optimal	Belum Terpadu Dan Tersinkronkannya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Data Kependudukan Kurang Mutakhir Dan Akurat	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Kualitas Dan Produktifitas Pemuda Belum Maksimal	Fasilitasi Kemandirian Wirausaha Pemuda Belum Optimal	Cakupan Pelatihan Dan Pembinaan Wirausaha Pemuda Belum Menjangkau Seluruh Masyarakat	Kepemudaan Dan Olah Raga

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Produktifitas Pemuda Dalam Organisasi Belum Optimal	Rendahnya Layanan Konseling Pemuda	Kepemudaan Dan Olah Raga
			Terbatasnya Layanan Pelatihan Dan Pembinaan Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olah Raga
			Kurang Maksimalnya Pemberdayaan Dan Pembinaan	Kepemudaan Dan Olah Raga
		Kualitas Pengembangan Olah Raga Belum Optimal	Terbatasnya Layanan Pelatihan Dan Pembinaan Organisasi Olahraga Dan Atlet	Kepemudaan Dan Olah Raga
			Fasilitasi Kompetisi Olahraga Di Masyarakat Yang Terbatas	Kepemudaan Dan Olah Raga
			Ketersediaan Sarpras Olah Raga Di Masyarakat Yang Kurang	Kepemudaan Dan Olah Raga
	Laju Kemiskinan Dampak Covid-19 Yang Sulit Dikendalikan	PSKS Perseorangan Keluarga Dan Kelembagaan Belum Diberdayakan Secara Maksimal	Terbatasnya Jumlah Pendamping Sosial	Sosial
			Kualitas Tenga Pendamping Belum Optimal	Sosial
		Penanganan Dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas, Anak Terlantar Dan Lanjut Usia Belum Maksimal	Layanan Bantuan Sosial Yang Belum Maksimal	Sosial
			Layanan Bantuan Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasara Belum Maksimal	Sosial
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial Khususnya Bagi Masyarakat Miskin Belum Maksimal	Penanganan Anak Terlantar Belum Optimal	Sosial
		Masyarakat / Gelandangan Khususnya Korban Tindak Kekerasan Belum Tertangani Dengan Maksimal	Pengelolaan Data Kemiskinan Belum Optimal	Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Sosial

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Keluarga Belum Optimal	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sosial
			Rendahnya Peran Aktif Lembaga Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Khususnya Dalam Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Masih Rendahnya Pembinaan Untuk Peningkatan Keberdayaan Keluarga	Kurangnya Pemberdayaan Untuk Meningkatkan Kemampuan Keluarga Untuk Mengelola Sumber Daya	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Kurangnya Pembinaan Fisik-Material Dan Psikis Mental Spiritual Keluarga Untuk Mandiri, Dan Mengembangkan Diri	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Laju Pengangguran Yang Sulit Untuk Ditekan Akibat Covid-19	Penanganan Pengangguran Tidak Terencana Secara Sistematis	Tidak Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	Tenaga Kerja
		Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Masih Rendah	Kualitas Dan Kuantitas Pelatihan Tenaga Kerja Yang Belum Optimal	Tenaga Kerja
			Kualitas Lemabaga Pelatihan Tenaga Kerja Yang Kurang Optimal	Tenaga Kerja
		Kurang Optimalnya Pelayanan Dan Penyaluran Tenaga Kerja Lokal	Terbatasnya Layanan Informasi Pasar Kerja	Tenaga Kerja
			Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja
		Hubungan Industrial Yang Kurang Harmonis Serta Terbatasnya Tata Kelola Kerja Perusahaan Secara Layak	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial Yang Kurang Optimal	Tenaga Kerja
			Monitoring Dan Evaluasi Perusahaan Yang Belum Maksimal	Tenaga Kerja

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Penyerapan Lapangan Kerja Melalui Program Transmigrasi Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal	Kuota Dan Minat Transmigrasi Masyarakat Masih Relatif Rendah	Transmigrasi
	Kontribusi Investasi Untuk Membuka Lapangan Kerja Masih Kurang Optimal	Potensi Obyek Investasi Kurang Terpetakan Dan Terprofilkan Dengan Baik	Kualitas Materi Dan Media Promosi Belum Mampu Menarik Dan Menjangkau Calon Investor Potensial	Penanaman Modal
		Kurang Maksimalnya Strategi Promosi Untuk Menarik Calon Investor Berkomitmen	Bahan Promosi Investasi Kurang Memadai	Penanaman Modal
		Kualitas Pelayanan Modal Belum Optimal	Prosedur Pelayanan Perijinan Yang Belum Optimal	Penanaman Modal
			Belum Semua Pengaduan Masyarakat Telah Ditindaklanjuti.	Penanaman Modal
		Belum Semua Perusahaan Mematuhi Ketentuan Perizinan Yang Berlaku	Belum Semua Pelaku Usaha Telah Dilakukan Pemantauan	Penanaman Modal
		Data Profil Peluang Investasi Belum <i>Up to Date</i> Sehingga Kurang Termanfaatkan	Belum Optimalnya Sistem Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.	Penanaman Modal

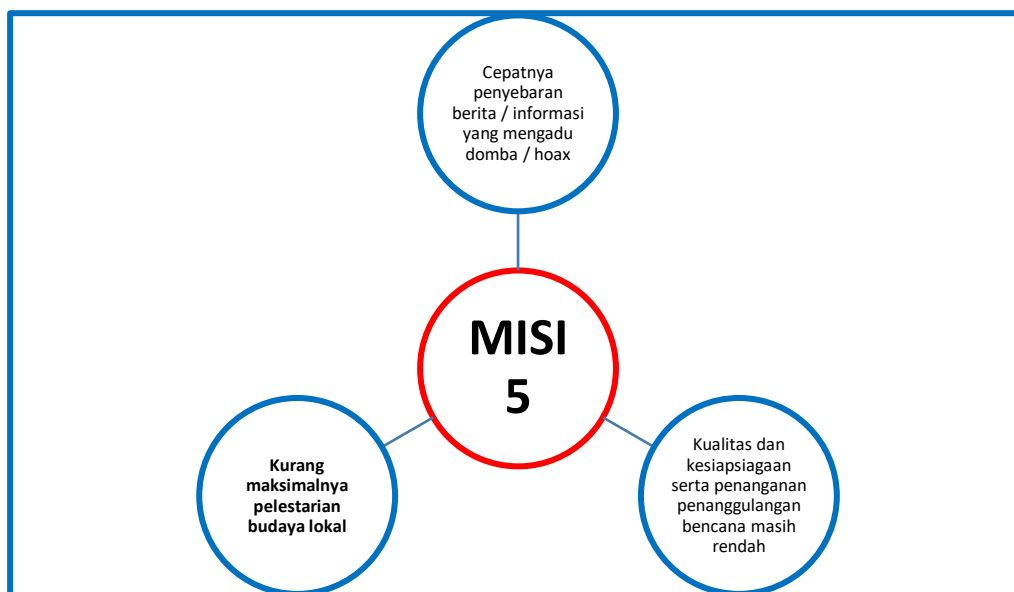
Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

e. Permasalahan Pencapaian Misi Ke-5

Hasil identifikasi dan analisis terhadap Misi 5 RPJMD 2019-2024 “**Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal**” terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

- ✓ Cepatnya penyebaran berita/informasi yang mengadu domba / hoax
- ✓ Kualitas dan kesiapsiagaan serta penanganan penanggulangan bencana masih rendah
- ✓ Kurang maksimalnya pelestarian budaya lokal

Gambar 4. 5
Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi



Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

Adapun identifikasi akar masalah masing-masing pokok permasalahan pada Misi Kelima sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan MISI KELIMA

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
Misi V: Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Tenram Dan Nyaman Dengan Tetap Menjaga Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Serta Kearifan Lokal				
	Cepatnya Penyebaran Berita / Informasi Yang Mengadu Domba / Hoax	Pembinaan Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila Dan Wasbang Masih Kurang	Kurang Maksimalnya Pembinaan Karakter Masyarakat	Unsur Kesbangpol
		Kesadaran Masyarakat Politik Kurang Optimal	Kurang Maksimalnya Pendidikan Politik Masyarakat	Unsur Kesbangpol
		Organisasi Masyarakat (Ormas) Belum Terbina Dengan Baik Optimal	Kurang Luasnya Cakupan Pembinaan Ormas	Unsur Kesbangpol
		Gangguan Kantibmas Belum Terdeteksi Secara Optimal	Kurang Maksimalnya Kerjasama Dan Fungsi Organisasi Umat Beragama	Unsur Kesbangpol

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
		Fasilitasi Dan Koordinasi Penguatan Kerukunan Dan Toleransi Di Masyarakat Belum Optimal	Partisipasi Masyarakat Masih Rendah	Unsur Kecamatan
		Potensi Konflik SARA Masih Terjadi Di Masyarakat	Pemberdayaan Kerukunan Masyarakat Kurang Maksimal	Unsur Kesbangpol
		Penanganan Gangguan Trantibum Di Masyarakat Belum Optimal	Kurangnya Koordinasi Trantibum Di Masyarakat	Unsur Kecamatan
		Belum Semua Kasus Trantibum Yang Tertangani	Cakupan Patroli Siaga Dalam Menjaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Belum Optimal.	Trantibumlinmas
		Tingkat Penyelesaian Penegakan Perda Belum Maksimal.	Masih Terbatasnya Personil Patroli Siaga	Trantibumlinmas
			Rasio Linmas Per RT Belum Merata Terutama Pada Jumlah Linmas Per RT Dan Rasio Linmas Terlatih Belum Optimal	Trantibumlinmas
			Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Standar	Trantibumlinmas
			Belum Efektifnya SOP Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Trantibumlinmas
			Masih Banyaknya Perda/Perbup Yang Belum Tersosialisasi	Trantibumlinmas
	Kualitas Dan Kesiapsiagaan Serta Penanganan Penanggulangan Bencana Masih Rendah	Pelayanan Dan Respon Penanganan Kasus Kebakaran Sesuai Standar Belum Maksimal.	Masih Kurangnya Sosialisasi Tentang Bahaya Kebakaran	Trantibumlinmas

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Trantibumlinmas
			Masih Kurangnya SDM Pemadam Kebakaran Terlatih	Trantibumlinmas
			Belum Ada Data Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Trantibumlinmas
			Belum Adanya Tenaga Investigasi	Trantibumlinmas
			Masih Sedikitnya Pemberdayaan Masyarakat Tentang Penanggulangan Kebakaran	Trantibumlinmas
		Layanan Informasi Rawan Bencana Kurang Memadai	Masih Kurangnya Kajian Resiko Bencana Yang Tepat	Trantibumlinmas
		Cakupan Pelayanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Daerah Belum Optimal	Belum Adanya Strategi Penanggulangan Bencana	Trantibumlinmas
			Masih Kurangnya Relawan Dan ASN Yang Terlatih	Trantibumlinmas
			Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Belum Berstandar	Trantibumlinmas
			Masih Kurangnya SDM TRC Terlatih	Trantibumlinmas
			Masih Banyaknya Wilayah Rawan Bencana	Trantibumlinmas
		Layanan Pembinaan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Belum Optimal	Partisipasi Masyarakat Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Sosial

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
			Terhadap Bencana Masih Rendah	
			Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Bencana Belum Optimal	Sosial
	Kurang Maksimalnya Pelestarian Budaya Lokal	Bahasa Dan Sastra Lokal Masih Kurang Diajarkan Di Sekolah	Aplikasi Bahasa Dan Sastra Lokal Dalam Dunia Pendidikan Masih Kurang	Kebudayaan
		Banyak Kebudayaan Lokal Tidak Dikelola Dan Dikembangkan Dengan Baik	Kurangnya Even-Even Yang Dapat Menarik Minat Masyarakat Dalam Memahami Sejarah	Kebudayaan
			Kurangnya Pembinaan Nilai Budaya Kepada Masyarakat	Kebudayaan
			Kekayaan Kebudayaan Lokal Tidak Terdata Dengan Baik	Kebudayaan
		Banyak Potensi Kesenian Lokal Tidak Dikelola Dan Dikembangkan Dengan Baik	Kurangnya Pembinaan Kesenian Kepada Masyarakat Pelaku Seni	Kebudayaan
		Banyak Potensi Sejarah Lokal Tidak Dikelola Dan Dikembangkan Dengan Baik	Kurangnya Pembinaan Sejarah Lokal Kepada Masyarakat	Kebudayaan
		Pelestarian Cagar Budaya Belum Maksimal	Inventarisasi Dan Register Cagar Budaya Lokal Tidak Maksimal	Kebudayaan
			Kurangnyasosialisasi Dan Promosi Cagar Budaya Lokal Kepada Masyarakat Luas	Kebudayaan
		Pengelolaan Museum Belum Maksimal	Sarana Dan Prasaran Pendukung Museum Masih Kurang	Kebudayaan
			Kualitas Museum Yang Representatif Kurang Merata	Kebudayaan

Sumber: Analisis Bappeda dan Litbang, 2021

4.2.1 Permasalahan Berdasarkan Urusan

Setelah dijabarkan permasalahan pada tiap-tiap pencapaian Misi, kemudian akan ditampilkan secara singkat pengelompokan permasalahan berdasarkan urusan sebagai berikut:

1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

- Mutu layanan pendidikan masyarakat belum optimal. Hal ini tercermin dari Tingkat Partisipasi PAUD yang baru 79,86%, Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan baru 97,25%, rata-rata nilai kelulusan SD sebesar 77,12 dan rata-rata nilai kelulusan SMP sebesar 78,46.
- Pengembangan kurikulum lokal yang berkualitas belum optimal di mana persentase muatan local dalam KBM ditahun 2020 hanya sebesar 5% dengan total 38 jam pelajaran ditingkat SD dan 2 jam pelajaran di tingkat SMP.
- Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan belum merata di mana rasio guru-murid SD 1:46,98 dan rasio guru-murid SMP sebesar 1:55,12.
- Pengendalian mutu satuan pendidikan swasta belum maksimal. Hal ini tercermin dari sekolah swasta PAUD yang terakreditasi baru mencapai 10,73%, sekolah swasta SD yang terakreditasi baru mencapai 99,29%, dan sekolah swasta SMP terakreditasi baru sebesar 83,19% ditahun 2020.

b. Urusan Kesehatan

- Belum maksimalnya pengelolaan fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat. Hal tersebut belum tercermin dari RS rujukan yang terakreditasi baru 88,9%, persentase fasyankes tingkat pertama yang terakreditasi baru 42%. Selain itu layanan kesehatan belum adan yang mencapai 100% bahkan rata-ratanya baru mencapai 58,01% antara lain layanan ibu hamil, layanan persalinan, layanan kesehatan bayi baru lahir, layanan balita sesuai standar, pemeriksaan lansia sesuai standar, layanan penderita DM, layanan penderita hipertensi, layanan penderita ODGJ berat, layanan terduga TBC, layanan orang beresiko HIV.
- Kualitas sumberdaya kesehatan terbatas dan tidak merata di mana cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis baru mencapai 82,8%.
- Belum semua makanan dan minuman yang beredar di Kabupaten Tegal memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dipersyaratkan di mana ditahun 2020 masih ada 18,99% pangan yang tidak memenuhi syarat.
- Peran serta masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum maksimal di mana cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS baru 95,4% ditahun 2020.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Cakupan layanan irigasi berkualitas tidak menjangkau seluruh wilayah. Dari 162,47 jaringan irigasi yang hanya 58,86% yang kondisinya baik ditahun 2020.
- Terbatasnya layanan air minum berkualitas secara merata. Hingga tahun 2020 cakupan akses air minum berkualitas baru mencapai 61,09%.
- Belum semua ruas jalan kabupaten memiliki drainase jalan. Dari 847,27 km panjang jalan kabupaten ditahun 2020 baru 58,42% yang dilengkapi system drainase.
- Penataan bangunan dan fisik perkotaan yang kurang maksimal dan tidak sesuai standar. Hingga tahun 2020 bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis baru mencapai 76,88%.

- Penyedia jasa konstruksi yang sesuai standar dan bersertifikat belum tersedia dan belum dievaluasi berkala. Hingga tahun 2020 belum ada jasa konstruksi yang bersertifikat dan belum dilakukan dievaluasi terhadapnya.
 - Kualitas jalan dan jembatan yang baik tidak merata. Rasio panjang jalan dengan kondisi baik baru mencapai 81,11%, sedangkan unit jembatan dalam kondisi baik baru mencapai 68,7%.
 - Belum terdapat RDTR yang dilegalisasi. Saat ini RDTR masih dalam tahap penyusunan dengan mengacu revisi RTRW yang saat ini masih dalam proses untuk ditetapkan.
 - Infrastruktur penanganan sampah belum maksimal sementara volume sampah terus meningkat. Dari tahun ketahun volume sampah terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 148,425 m³ sementara Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah yang hanya menggunakan sistem *controlled landfill*.
 - Cakupan layanan limbah rumah tangga kurang maksimal. Meskipun akses sanitasi ditahun 2020 sudah mencapai 100% namun masih ada 5,23% rumah tangga yang tidak memiliki jamban yang layak.
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Penanganan rumah tidak layak huni kurang optimal. Hingga tahun 2020 masih ada 13,06% rumah yang tidak layak huni yang perlu untuk ditangani.
 - Penanganan lingkungan permukiman kumuh belum optimal. Dari 487,78 Ha kawasan kumuh yang ada hingga tahun 2020 masih tersisa 314,77 Ha.
 - Tidak meratanya layanan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) di mana tahun 2020 capaian akses PSU baru mencapai 77,97%.
- e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Belum semua kasus trantibum dapat tertangani. Ditahun 2020 hanya 82% kasus trantibum yang tertangani bahkan menurun dibandingkan capaian tahun 2019.
 - Tingkat penyelesaian penegakan perda belum maksimal. Dari 129 kasus pelanggaran perda ditahun 2020 hanya 83% yang terselesaikan.
 - Pelayanan dan respon penanganan kasus kebakaran sesuai standard belum maksimal. Dari 56 kasus kebakaran ditahun 2020 hanya 79% kasus yang tertangani sesuai standard.
 - Layanan informasi rawan bencana kurang memadai. Persentase masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan memperoleh informasi ancaman bencana baru 61,75%.
 - Layanan pembinaan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum optimal di mana persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan penanggulangan bencana baru 1,31%
 - cakupan pelayanan perlindungan sosial korban bencana daerah belum optimal di mana korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana ditahun 2020 baru mencapai 21,15 dari total korban bencana.
- f. Urusan Sosial
- PSKS perseorangan keluarga dan kelembagaan belum diberdayakan secara maksimal. Hingga tahun 2020 baru 85,71% yang telah diberdayakan.
 - Penanganan dan rehabilitasi sosial disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia belum maksimal di mana hingga tahun 2020 baru 96,34% yang direhabilitasi.
 - Perlindungan dan Jaminan Sosial khususnya bagi masyarakat miskin belum maksimal di mana cakupan perlindungan sosial ditahun 2020 hanya mencapai 83,28%. Sedangkan khusus warga miskin cakupan penanganannya baru mencapai 90,43%.

- Masyarakat / gelandangan khususnya korban tindak kekerasan belum tertangani dengan maksimal. Meskipun cakupan penanganannya sudah 100% namun secara kualitas belum optimal karena: adanya status migran ilegal menjadikan kesulitan dalam penanganan; Belum adanya sistem penanganan Warga Migran yang menjadi korban kekerasan; Belum adanya anggaran sehingga menjadi kendala dalam penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan.
- Kualitas pelayanan perlindungan sosial korban bencana daerah belum optimal. Meskipun cakupan penanganan korban bencana telah 100% namun masih banyak yang perlu ditingkatkan karena: Bantuan yang diberikan kepada korban bencana masih belum memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal; Kapasitas pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana belum merata; Koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu sinkron; Sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana belum representative; dan Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
- Pengelolaan taman makam pahlawan kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena: Kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan; Taman Makam Pahlawan belum representatif; Kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Warakawuri dan Veteran Pejuang.

2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

g. Urusan Tenaga Kerja

- Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis. Hal ini disebabkan karena belum adanya *grand desain* perencanaan tenaga kerja.
- Tingkat produktivitas tenaga kerja masih rendah dan belum stabil di mana 2020 setiap tenaga kerja rata-rata hanya menghasilkan Rp. 37,989 juta pertahun turun dibandingkan produktivitas tahun 2018 yang mencapai Rp.38,510 juta pertahun.
- Kurang optimalnya pelayanan dan penyaluran tenaga kerja lokal di mana dari 15.189 pencari kerja hanya 17,82% yang ditempatkan.
- Hubungan industrial yang kurang harmonis serta terbatasnya tata kelola kerja perusahaan secara layak. Setidaknya ditahun 2020 baru 7,08% perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak serta jumlah perselisihan industrial yang meningkat tiap tahun hingga tahun 2020 mencapai 27 kasus.

h. Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

- Prioritas anggaran pembangunan berbasis gender belum maksimal di mana tahun 2020 baru 26,84% anggaran pembangunan yang berbasis gender
- Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan di mana masih ada 5,16% penduduk perempuan yang mengalami kekerasan ditahun 2020.
- Kualitas pelayanan konseling hidup keluarga berbasis gender belum optimal di mana tahun 2020 baru 0,04% keluarga yang mendapatkan pelayanan konseling.
- Ketersediaan dan kualitas data gender dan anak kurang optimal di mana ditahun 2020 dari 48 OPD baru 31,25% OPD yang menyediakan data gender dan anak.
- Pemenuhan hak tumbuh kembang anak di desa kurang optimal di mana baru 20,6% desa layak anak.
- Belum optimalnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan di mana masih ada 36 anak ditahun 2020 yang mengalami kekerasan.

- i. Urusan Pangan
 - Penguatan cadangan pangan berpotensi menurun. Meskipun masih 163,80% ditahun 2020 namun sudah terlihat data penurunannya dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 166,37%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah konsumsi yang tidak seimbang dengan peningkatan ketersediaan pangan yang ada.
- j. Urusan Pertanahan
 - Sertifikasi lahan milik pemda masih rendah baru mencapai 53,9 persen lahan pemda bersertifikat.
- k. Urusan Lingkungan Hidup
 - Pengelolaan lingkungan hidup belum terencana dengan maksimal. Setidaknya ditahun 2020 baru terdapat 2 dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan yang bisa dimanfaatkan dari 18 produk.
 - Pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum efektif di mana masih ada 7,08% sungai yang tercemar sehingga perlu untuk ditekan. Selain itu Persentase Luas Lahan/area yang dilakukan upaya pengendalian pencemaran dan/kerusakan melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan baru mencapai 1,08% ditahun 2020.
 - Pengelolaan lahan kehati belum optimal baru mencapai 50,55% ditahun 2020.
 - Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, beracun kurang maksimal baru 60% yang tertangani ditahun 2020.
 - Belum optimalnya cakupan penanganan sampah di masyarakat. Persentase penanganan sampah ditahun 2020 baru mencapai 30% dan persentase pengurangan sampah baru 14%.
 - Pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan belum maksimal di mana baru mencapai 30%. Selain itu pelaku usaha yang berkaitan lingkungan hidup yang dilakukan pengawasan baru 60%.
 - Masyarakat kurang terstimulasi untuk mengelola lingkungan hidup di mana baru ada 20 penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat ditahun 2020
 - Penanganan pengaduan masyarakat terkait LH belum maksimal di mana baru 90% pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
- l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Layanan dan pengelolaan penyediaan data kependudukan belum semuanya memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari 89 lembaga pemanfaat akses data kependudukan baru 15,73% yang memiliki PKS.
 - Kualitas Layanan pendaftaran penduduk masyarakat kurang optimal di mana hingga tahun 2020 belum semua penduduk/anak memiliki KK, KTP-Elektronik dan KIA. Kepemilikan KTP-Elektronik baru 99,68%, Kepemilikan KK baru 91,67% dan kepemilikan KIA baru 21,80%.
 - Kualitas Layanan pencatatan sipil kepada masyarakat kurang optimal di mana hingga tahun 2020 belum semua penduduk memiliki akta kelahiran (93,10%) dan baru 68,54% penduduk yang meninggal diterbitkan akta kematian.
- m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa Kurang optimal di mana baru 35% desa yang tertib dan baik administrasi ditahun 2020.
 - Dukungan sarana dan prasarana pemerintah desa belum optimal di mana rata-rata sarana dan prasarana desa yang terpenuhi baru 55,23% ditahun 2020.

- Cakupan kerjasama desa dalam pengentasan desa tertinggal belum optimal di mana ditahun 2020 baru 69,40% desa yang melakukan kerjasama pengentasan desa tertinggal
- n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Layanan pemenuhan kebutuhan KB belum optimal di mana persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) tahun 2020 baru mencapai 67,8% dari pasangan usia subur (PUS) dan khusus masyarakat miskin baru 67,37% bahkan rasionya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Bersamaan itu diperburuk dengan persentase PUS *Unmetneed* yang masih relatif tinggi 15,27% ditahun 2020.
 - Pengendalian kelahiran penduduk khususnya warga miskin belum optimal di mana nilai *Total Fertility Rate* (TFR) ditahun 2020 mencapai 2,28 bahkan naik dibandingkan tahun sebelumnya.
 - Masih rendahnya pembinaan untuk peningkatan keberdayaan keluarga di mana ditahun 2020 baru 21,58% keluarga yang mendapatkan pembinaan dari total 184.512 sasaran keluarga.
- o. Urusan Perhubungan
- Layanan keselamatan berkendara belum optimal di mana hingga tahun 2020 kebutuhan kelengkapan rambu lalu lintas penunjang keselamatan yang terpenuhi baru mencapai 41,95%. Selain itu untuk kebutuhan lampu penerangan jalan umum baru terpenuhi 59,82%.
 - Layanan angkutan transportasi belum optimal di mana hingga tahun 2020 pemenuhan kebutuhan terminal, *shelter*/halte baru mencapai 32,2% dari kebutuhan yang ada serta cakupan angkutan umum yang telah melakukan uji KIR baru mencapai 74,74%.
 - Rekayasa lalulintas dan pengelolaan parkir belum optimal di mana sampai dengan tahun 2020 cakupan andalalin sebagai dasar rekayasa lalulintas baru mencapai 41,67% dari total potensi usaha yang berdampak pada perubahan sistem transportasi, serta belum semua lokasi parkir dikelola baru mencapai 89,67% yang terkelola.
- p. Urusan Komunikasi dan Informatika
- Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien belum memadai di mana sampai dengan tahun 2020 baru 16,67% kebutuhan TIK yang terpenuhi.
 - Penyebarluasan Informasi tentang pelayanan publik masih terbatas baru mencapai 51,6% masyarakat yang terakses informasi publik ditahun 2020
 - Terbatasnya layanan publik yang terintegrasi dan dapat diakses secara *online* yang baru mencapai 45% ditahun 2020.
- q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Masih ada KSP/USP yang kondisi koperasinya tidak sehat di mana ditahun 2020 persentase koperasi sehat hanya mencapai 7,21% dan jika digabungkan dengan jumlah koperasi cukup sehat rasionya menjadi 72,9%.
 - Masih kurangnya kualitas SDM perkoperasian di mana SDM Koperasi ditahun 2020 yang kompeten hanya sebesar 9% dari seluruh pengurus/pengawas/pengelola koperasi.
 - Masih kurangnya kemitraan perkoperasian di mana koperasi yang bermitra ditahun 2020 hanya sebesar 1,04%

- Masih rendahnya kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di mana KUKM yang bermitra ditahun 2020 hanya sebesar 2,63%
 - Peningkatan skala usaha UMKM kurang maksimal di mana ditahun 2020 belum ada usaha mikro yang meningkat skala usahanya
- r. Urusan Penanaman Modal
- Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofilkan dengan baik di mana hingga tahun 2020 belum dibuat profil potensi obyek investasi
 - Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomitmen di mana baru 97% calon investor yang berkomitmen.
 - Kualitas pelayanan modal belum optimal terlihat dari IKM yang baru mencapai 78,08 sehingga masih bisa dan perlu untuk ditingkatkan
 - Belum semua perusahaan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku baru 61,28% perusahaan ditahun 2020 yang berizin.
 - Data profil peluang investasi belum *up to date* sehingga kurang termanfaatkan di mana baru 6,29% data profil yang update dan termanfaatkan.
- s. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- Fasilitas kemandirian wirausaha pemuda belum optimal di mana hingga tahun 2020 rasio pemuda yang difasilitasi untuk berwirausaha baru mencapai 0,073% dari total pemuda yang ada.
 - Produktifitas pemuda dalam organisasi belum optimal di mana hingga tahun 2020 rasio pemuda yang aktif berorganisasi hanya mencapai 0,067% dari total pemuda yang ada.
 - Kualitas pengembangan olah raga belum optimal di mana persentase cabang olah raga yang dibangun baru mencapai 75% dari total cabang olah raga yang ada.
- t. Urusan Statistik
- Ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik masih rendah dan kurang berkualitas di mana hingga tahun 2020 baru terdapat 38,15% kebutuhan data statistik yang tersedia.
- u. Uruasan Persandian
- Keamanan informasi untuk pelayanan publik berbasis elektronik belum memadai di mana tingkat keamanan informasi baru mencapai 40,62% ditahun 2020
- v. Urusan Kebudayaan
- Bahasa dan sastra lokal masih kurang diajarkan di sekolah hanya sebanyak 2 jam mata pelajaran dalam seminggu.
 - Banyak kebudayaan lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik di mana ditahun 2020 baru 61,11% kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan.
 - Banyak potensi kesenian lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik di mana tahun 2020 baru 57,5% seni dan kesenian lokal yang mendapat pembinaan.
 - Banyak potensi sejarah lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik di mana hingga tahun 2020 baru 76,47% sejarah yang terdokumentasikan.
 - Pelestarian Cagar budaya belum maksimal di mana baru 45,83% ditahun 2020
 - Pengelolaan museum belum maksimal di mana hingga tahun 2020 baru 65% yang terkelola.

- w. Urusan Perpustakaan
 - Tingkat literasi masyarakat Kabupaten Tegal masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari tingkat kegemaran membaca masyarakat yang baru mencapai 47,91% ditahun 2020. Selain itu jika dilihat dari indeks pembangunan literasi masyarakat baru mencapai 9,09%
- x. Urusan Kearsipan
 - Belum optimalnya pengelolaan Arsip penting daerah khususnya arsip keuangan dan asset di mana nilai Laporan Audit Kinerja Eksternal (LAKE) tahun 2020 baru mencapai 73.

3) Urusan Pemerintahan pilihan

- y. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - Belum optimalnya produksi perikanan tangkap. Meskipun mengalami peningkatan namun nilai produksi terakhir ditahun 2020 baru mencapai Rp. 13,6 miliar.
 - Praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (Menggunkan racun dan Listrik/setrum) masih marak. Dari 27 lokasi penangkapan hanya 3 lokasi yang bebsar dari penangkapan ikan illegal.
 - Belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Meskipun mengalami peningkatan namun nilai produksi terakhir ditahun 2020 baru mencapai Rp. 145,6 miliar.
 - Belum optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan. Nilai produksi pengolahan hasil perikanan baru mencapai Rp. 131,1 miliar bahkan turun dibandingkan nilai produksi tahun 2019 yang mencapai Rp. 171,409 miliar.
- z. Urusan Pariwisata
 - Destinasi tujuan wisata (DTW) kurang dioptimalkan/dikembangkan/terkelola. Dari seluruh destinasi tujuan wisata yang ada baru 56,67% ditetapkan secara legal.
 - Belum semua usaha pariwisata yang memiliki / memperpanjang ijin usaha. Ditahun 2020 baru 138 usaha pariwisata yang memiliki/memperpanjang tanda daftar usaha pariwisata TDUP dari 256 usaha pariwisata terdaftar.
 - Kurang maksimalnya pemasaran destinasi tujuan wisata yang ada. Rata-rata DTW yang dipromosikan beberapa tahun terakhir hanya 61,67% dari total DTW terdaftar.
 - Pembinaan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif belum maksimal. Dalam 5 tahun terakhir kapasitas kemampuan pembinaan SDM pariwisata hanya terbanyak 100 orang.
- aa. Urusan Pertanian
 - Produksi pertanian dan peternakan masih perlu dioptimalkan. Ditahun 2020 produksi daging baru mencapai 11.284 ton, telur mencapai 10.760 ton dan susu 0,604 ton. Sedangkan produktifitas padi baru 6,25 ton/ha, jagung 6,69 ton/ha, kedelai 1,07 ton/ha, ketela pohon 18,37 ton/ha, ketela rambat 8,03 ton/ha, kacang tanah 1,3 ton/ha, kacang hijau 1,2 ton/ha, kelapa 0,79 ton/ha, cengkeh 0,08 ton/ha, the 0,24 ton/ha.
 - Kurangnya antisipasi penanggulangan bencana pertanian di mana ditahun 2020 baru 89,90% area yang bebas dari serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
 - Pengawasan produksi hasil peternakan yang aman dan sehat belum optimal. Dari total populasi ternak ditahun 2020 baru 31,37% yang terkendali status kesehatannya.
 - Kualitas kelembagaan kelompok tani belum optimal di mana baru 2 kelompok yang meningkat statusnya dari pemula jadi maju/mandiri.

bb. Urusan Perdagangan

- Rendahnya kualitas /standarisasi pasar serta pengelolaannya. Hal ini tergambar dari persentase pasar dalam kondisi baik baru mencapai 15,38% dari total 26 pasar yang ada.
- Masih terdapat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tidak standar di mana ditahun 2020 baru 27,95% alat UTTP pedagang yang ditera Kembali.
- Pengendalian harga barang kurang maksimal di mana dalam satu tahun hanya dilakukan 18 kali operasi pasar atau tiap kecamatan 1 kali operasi pasar tiap tahun.
- Belum optimalnya nilai ekspor bersih produk lokal di mana nilai ekspor produk lokal ditahun 2020 baru mencapai Rp. 144 miliar bahkan lebih rendah dibandingkan angka 2016 yang mencapai Rp. 193 miliar.

cc. Urusan Perindustrian

- Pengembangan sektor industri yang belum maksimal di mana sertifikasi produk IKM dan PIRT baru sebanyak 82 produk sejak tahun 2018-2020, sertifikasi nutrisi 41 produk sejak tahun 2019-2020, uji kadaluarsa 7 produk sejak tahun 2018-2019, sertifikasi halal sebanyak 41 produk sejak 2018-2020, pendaftaran merk 99 produk sejak 2015-2020, sertifikasi BKI sebanyak 4 produk sejak tahun 2018-2019, dan sertifikasi SNI baru sebanyak 2 produk ditahun 2018 saja.
- Masih rendahnya data/informasi industri yang terverifikasi di mana ditahun 2020 baru 20% industry yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap.

4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

dd. Sekretariat Daerah

- Fasilitasi peningkatan pelayanan publik belum optimal di mana rata-rata IKM kecamatan baru mencapai 80,41
- Maturitas UKPBJ belum optimal di mana tahun 2020 baru mencapai level 1.
- Standarisasi LPSE belum merata di mana baru 12% tingkat standarisasi LPSE yang terpenuhi.

ee. Sekretariat DPRD

- Integrasi pengawasan DPRD dalam pembangunan belum optimal di mana baru 90% hasil pengawasan DPRD yang terintegrasi dalam pembangunan.

5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

ff. Unsur Perencanaan

- Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran. Meskipun seluruh dokumen perencanaan telah disusun sesuai tahapan namun masih terdapat substansi yang perlu disempurnakan seperti ketepatan indikator, dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah yang belum 100%.
- Manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD belum efektif di mana tingkat kesesuaian rencana dan realisasi terakhir baru mencapai 92,8%.

gg. Unsur Keuangan

- Belum Optimalnya Pengelolaan APBD di mana tahun 2020 RKA yang dikumpulkan tepat waktu baru mencapai 35% serta RKA OPD yang sesuai dengan pedoman penyusunan baru mencapai 80%.
- Pungutan pajak belum optimal di mana tahun 2020 kontribusi pajak terhadap PAD baru 29%.

- Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah di mana hingga tahun 2020 baru 62,5% OPD yang mengelola BMD dengan baik dan benar.

hh. Unsur Kepegawaian

- Tingkat kedisiplinan ASN masih kurang di mana ditahun 2020 masih ada 0,12% ASN yang mendapat hukuman disiplin.
- Jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) belum terisi secara maksimal berdasarkan kompetensinya di mana persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi baru mencapai 87,97% serta persentase jabatan fungsional yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi baru mencapai 35,76%.

ii. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- Masih banyak ASN yang belum mengikuti pelatihan teknis 20 jam/tahun baru sekitar 47,49% ASN yang telah mengikuti diklat 20 jam dalam setahun.
- Masih banyak ASN yang belum mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan baru sekitar 33,40% ASN yang telah mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan.

jj. Unsur Penelitian dan Pengembangan

- Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan inovasi yang dapat mendukung secara langsung pelaksanaan berbagai sektor pembangunan daerah belum optimal. Tahun 2020 hanya 58,64 hasil kelitbangan yang dapat dimanfaatkan dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.

6) Unsur Pengawasan

- Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI perlu ditingkatkan di mana tahun 2020 baru mencapai 91,67% penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK
- Tindak lanjut hasil pengawasan itprov perlu dioptimalkan di mana tahun 2020 baru mencapai 59,26% temuan yang ditindaklanjuti
- Tindak lanjut hasil pengawasan ItKab masih rendah baru mencapai 8,94% yang terselesaikan.
- Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal belum optimal di mana baru sekitar 16,67% unit kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM.

7) Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

- Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan di mana rata-rata nilai IKM kecamatan baru 80,41 dan paling rendah adalah Kecamatan Talang dengan nilai 73,2
- Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan di mana masih ada 31 desa tertinggal dan 216 desa berkembang.
- Pembangunan desa belum semua tertib administrasi baru 37,67 persen yang tertib administrasi

8) Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

- Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih kurang di mana persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan baru 80,42%
- Organisasi Masyarakat (ormas) belum terbina dengan baik optimal, hingga tahun 2020 baru 80% ormas yang terbina
- Gangguan Kamtibmas belum terdeteksi secara optimal yang menyebabkan tidak konflik dapat tertangani, baru 97% konflik ditahun 2020 yang tertangani.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Dengan kata lain isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diantisipasi dengan tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Tegal, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Tegal, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

4.2.1 Isu Strategis Global

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal antara lain: penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), ancaman krisis ekonomi global, penerapan green economic global (ekonomi ramah lingkungan), penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, serta era industri 4.0.

a. SDG's (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai agenda pembangunan global tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang

melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
- 4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
- 6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
- 11) Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
- 14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 15) Melindungi, memperbaiki serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
- 16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
- 17) Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam implementasi TPB, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan TPB. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari 319 indikator TPB, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator. Adapun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota memiliki wewenang pencapaian indikator TPB masing-masing sebanyak 235, 220, dan 222 indikator.

Di Kabupaten Tegal terdapat 222 indikator yang tersebar dalam 16 tujuan TPB. Adapun Tujuan 14 “Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim” bukan merupakan kewenangan kabupaten. Sebanyak 207 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan indikator TPB sebanyak 44 indikator dalam RPJMD, sebanyak 27 indikator (12%) di antaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, sisanya yaitu 17 indikator (8%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Sebanyak 127 indikator (58%) belum menjadi indikator dalam RPJMD, namun 68 indikator diantaranya (31%) telah tercapai sesuai target nasional. Sisanya 51 indikator (23%) tidak terdapat data dengan rincian 15 indikator tidak sesuai karakteristik Kabupaten Tegal dan sisanya 36 data tidak tersedia.

Berikut proporsi capaiannya seperti dalam tabel dan gambar di bawah.

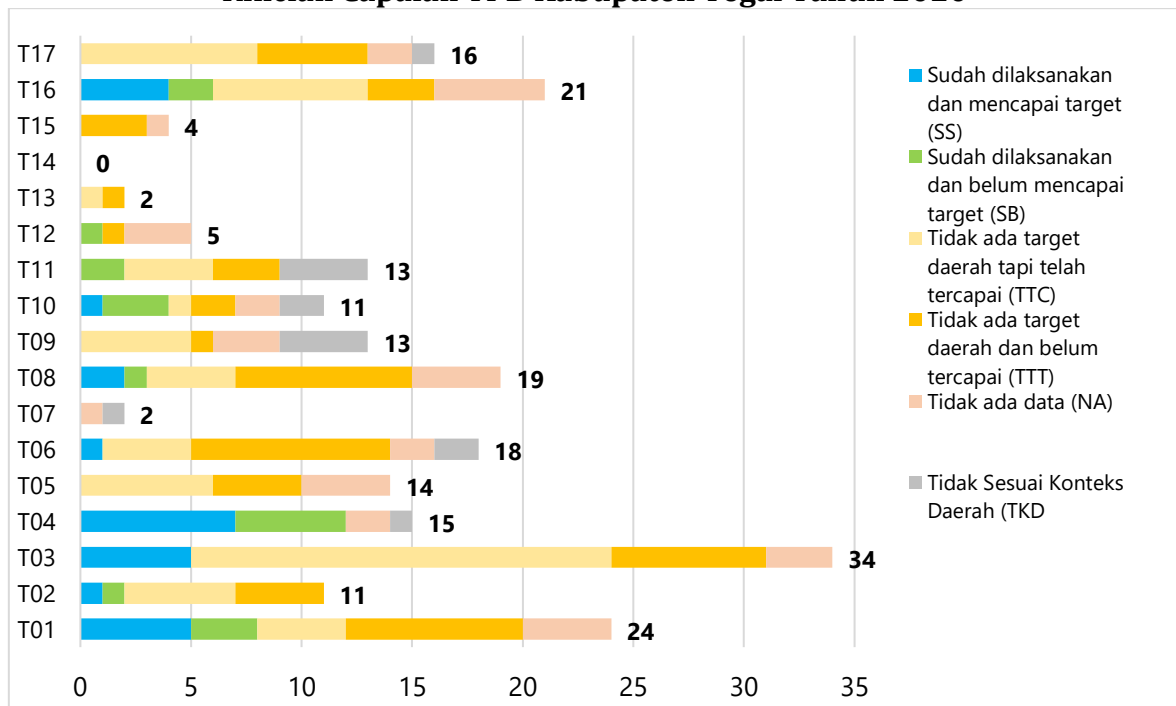
Tabel 4. 6
Capaian TPB Kabupaten Tegal Terhadap Target Nasional

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR	SS	SB	TTC	TTT	NA	TKD
T01	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	24	5	3	4	8	4	0
T02	Menghilangkan kelaparan, pencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	11	1	1	5	4	0	0
T03	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	34	5	0	19	7	3	0
T04	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	15	7	5	0	0	2	1
T05	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	14	0	0	6	4	4	0
T06	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	18	1	0	4	9	2	2
T07	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	2	0	0	0	0	1	1
T08	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	19	3	0	4	8	4	0
T09	Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	13	0	0	5	1	3	4
T10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	11	1	3	1	2	2	2
T11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan	13	0	2	4	3	0	4

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR	SS	SB	TTC	TTT	NA	TKD
T12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	5	0	1	0	1	3	0
T13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	2	0	0	1	1	0	0
T14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	0	0	0	0	0	0	0
T15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	4	0	0	0	3	1	0
T16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	21	4	2	7	3	5	0
T17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	16	0	0	8	5	2	1
JUMLAH		222	27	17	68	59	36	15
			12%	8%	31%	27%	16%	7%

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024, 2021

Gambar 4. 6
Rincian Capaian TPB Kabupaten Tegal Tahun 2020



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024, 2021

Beberapa catatan berkaitan dengan progress pencapaian target TPB di Kabupaten Tegal yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang memiliki indikator SB, TTT, dan NA yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut.

Berdasarkan distribusi skenario pencapaian TPB Kabupaten Tegal tahun 2024 tanpa upaya tambahan menunjukkan bahwa sebanyak 104 indikator atau 50,2 % akan tercapai pada tahun 2024 sesuai dengan laju perubahan pada tahun 2018 – 2020. Indikator 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia merupakan tujuan dengan kontribusi pencapaian indikator terbanyak yaitu 24 indikator dari total 34 indikator. Sedangkan rata-rata indikator pilar lingkungan yaitu tujuan 12, tujuan 13, tujuan 15, memiliki indikator capaian yang relatif kecil. Dengan melihat capaian tanpa upaya tambahan di atas maka secara umum pilar sosial serta pilar hukum dan tata kelola memiliki kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan pilar lingkungan dan pilar ekonomi.

Secara keseluruhan berdasarkan telaah terhadap permasalahan dari capaian TPB yang membutuhkan upaya tambahan serta pendataan indikator yang belum terdapat data, maka dihasilkan 8 isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tegal berdasarkan kelompok pilar yaitu:

1. **Pilar Sosial** : (1) Penekanan laju kemiskinan dan pengangguran; (2) Kualitas dan daya saing sumber daya manusia; (3) Kualitas derajat kesehatan masyarakat; (4) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. **Pilar Ekonomi** : (5) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
3. **Pilar Lingkungan** : (6) Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA;
4. **Pilar Hukum dan Tata Kelola** : (7) Tata kelola pemerintah yang baik; (8) Keamanan dan ketertiban wilayah.

b. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)* merupakan agenda pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh ASEAN sebagai salah satu bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Untuk itu telah dibuat komitmen bersama, yaitu Masyarakat ASEAN 2025 yang telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar

dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a) Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b) ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c) Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d) ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e) ASEAN Global.

Memasuki akhir era MEA 2025, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus Kabupaten Tegal baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat produksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun juga sekaligus sebagai produsen sehingga terbuka peluang bagi pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Resesi Ekonomi / Krisis Ekonomi Global

Banyak negara (bahkan negara maju) tengah menghadapi ancaman resesi ekonomi bahkan sudah ada yang telah masuk kedalam jurang resesi ekonomi imbas pandemi Covid-19. Sebut saja Singapura, Australia, Jepang, Argentina, Turki, Venezuela, Brazil dan lainnya. Beberapa negara di Asia seperti China, Singapura, India, Thailand dan Malaysia juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena efek negatif dari *trade war*, Brexit, geopolitik seperti demo di Hong-Kong dan tensi AS - Korea Utara masih panas. Kondisi tersebut kemudian diperparah oleh pandemi Covid-19. Sebagai contoh aktivitas ekonomi di negara-negara maju diperkirakan menyusut 7 persen pada tahun 2020 karena permintaan dan penawaran domestik, perdagangan, dan keuangan yang sangat terganggu. Begitu juga dengan ekonomi negara-negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDE) diperkirakan akan menyusut 2,5 persen tahun ini. Ini menjadi kontraksi pertama dalam setidaknya enam puluh tahun. Pendapatan per kapita diperkirakan turun 3,6 persen, yang akan membuat jutaan orang jatuh miskin tahun ini.

Secara umum memang pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa tahun belakangan sudah dalam kategori kurang cemerlang bahkan menunjukkan perlambatan atau sudah lampu kuning menuju resesi global. IMF menamai krisis saat ini sebagai "*Great Lockdown*" yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk itu perlambatan ekonomi global ini harus diantisipasi lebih dini. Agar perekonomian tak terus memburuk dan benar-benar menuju resesi.

d. Perubahan iklim global (Global Warming/Climate Change)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam, bahkan kepunahan masal spesies yang hidup di bumi termasuk manusia jadi pertaruhannya,

Secara global, untuk mencegah pemanasan global menjadi semakin parah, berbagai negara di dunia ini membuat kesepakatan bersama salah satunya adalah Paris Agreement atau Perjanjian Paris 2015. Perjanjian Paris merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat 188 negara dengan tujuan utama untuk mengurangi emisi karbon. Perjanjian Paris melahirkan empat kesepakatan utama yang mengikat 188 negara termasuk AS seperti berikut:

- Menjaga temperatur tetap berada < 2C di atas era pre-Industri
- Membatasi emisi gas rumah kaca akibat aktivitas antropogenik pada batas yang masih dapat diserap oleh tumbuhan, tanah dan laut dalam keadaan normal
- Melakukan peninjauan terhadap kontribusi masing-masing negara dalam menurunkan emisi setiap lima tahun sekali
- Mendorong negara-negara maju untuk menyediakan suplai keuangan bagi negara berkembang untuk beralih ke energi terbarukan

Namun ditengah efektifitas perjanjian paris ini masih dipertanyakan, justru negara besar adi kuasa AS menarik diri dari perjanjian tersebut. Mundurnya Amerika Serikat tentu saja akan membuat semakin sulit bagi dunia untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh kesepakatan Paris. Padahal Amerika Serikat menyumbang sekitar 15-16% emisi karbon global dan merupakan negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia setelah China. Disisi lain AS mempunyai peran yang penting dalam hal sumber keuangan dan teknologi bagi negara-negara berkembang dalam upaya mengatasi peningkatan temperatur.

Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir bersamaan dengan tetap terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

e. Kemajuan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Revolusi Industri

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. *Delay* konektifitas jaringan komunikasi saat ini telah mendekati *real time* diberbagai aspek. Apalagi perkembangan teknologi jaringan komunikasi saat ini sudah melampaui 5G dinegara-negara maju. Dengan perkembangan yang sangat pesat ini, telah mengubah wajah perekonomian, khususnya di sektor industri dan perdagangan.

Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Industrial Revolution 4.0* yang merupakan salah satu pelaksanaan proyek Strategi Teknologi Modern Jerman 2020 (*Germany's High-Tech Strategy 2020*). Strategi tersebut diimplementasikan melalui peningkatan teknologi sektor manufaktur, penciptaan kerangka kebijakan strategis yang konsisten, serta penetapan prioritas tertentu dalam menghadapi kompetisi global

Dalam salah satu studinya, *the World Economic Forum* (WEF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologi. Dengan bahasa yang lebih sederhana bisa dikatakan bahwa pembauran teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional, dalam mencapai tujuan.

Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang

secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata-mata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen (*World Economic Forum*).

Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab. *The United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) menekankan agar kehadiran industri 4.0 bisa meningkatkan perekonomian negara-negara miskin dan berkembang, sekaligus mendorong terwujudnya agenda-agenda pembangunan seperti yang tertuang dalam the *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun demikian UNIDO juga mengkhawatirkan terjadinya gap yang semakin besar diantara negara-negara maju yang mampu mengaplikasikan teknologi modern, dengan negaranegara miskin dan berkembang yang tertinggal dalam pengembangan teknologi. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Masalah yang tidak kalah penting adalah dampak penerapan teknologi terhadap peran tenaga kerja serta pemerataan kesejahteraan.

f. Transportasi Berkelanjutan

Sistem transportasi yang berkelanjutan sebagai suatu sistem yang menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar individu atau masyarakat secara aman dan dalam cara yang tetap konsisten dengan kesehatan manusia dan ekosistem, dengan keadilan masyarakat saat ini dan masa datang. Terjangkau secara finansial beroperasi secara efisien, menyediakan alternatif pilihan moda dan mendukung laju perkembangan ekonomi. Membatasi emisi dan buangan sesuai dengan kemampuan absorpsi alam, meminimumkan penggunaan energi dari sumber yang tak terbarukan, menggunakan komponen yang terdaur ulang, dan meminimumkan penggunaan lahan serta memproduksi polusi suara yang sekecil mungkin.

Terdapat beberapa isu global dalam usaha menuju terciptanya sistem transportasi berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan sosial (*social equity*); meliputi masalah transportasi bagi si miskin, penggusuran, wanita dan transpor, mobilitas anak-anak, dan penyandang cacat.
- 2) Keberlanjutan dari aspek lingkungan; meliputi kehilangan ruang hijau dan habitat, polusi air, permintaan bahan bakar minyak, polusi udara, kebisingan, pemanasan global, dan sampah kendaraan.
- 3) Kesehatan dan keselamatan; meliputi kematian akibat lalulintas, polusi udara dan kesehatan, bahaya gaya hidup pasif (tidak aktif), dan bahaya di jalan.

- 4) Kualitas hidup dan komunitas; meliputi pemisahan (*severance*) komunitas, invasi ruang, kerusakan peninggalan bersejarah, dan kejahatan.
- 5) Ekonomi dan biaya murah.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Beberapa isu/kebijakan nasional yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis di Kabupaten Tegal antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; Pandemi Covid-19, dan industri 4.0.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan **lima arahan** yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam **7 (tujuh) agenda pembangunan**, yakni:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
- Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- Moderasi beragama; dan
- Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- Pembangunan Rendah Karbon.

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

- Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

2. Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Nasional

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran Covid-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda. Meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti ke seluruh provinsi telah menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Adapun beberapa kebijakan pemerintah pusat (peraturan perundang-undangan) dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- 3) Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- 10) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19.

- 11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 12) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.
- 13) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Covid-19.
- 14) Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor SE-6/KD2/2020 tentang Tata Cara Reviu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ttas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- 15) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
- 16) Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 (Selain Bidang Kesehatan Dan Bidang Pendidikan).
- 17) Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 905/2622/SJ tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 (Selain Bidang Kesehatan Dan Bidang Pendidikan).
- 18) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perspektif Pembangunan, adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “tekanan” efek penyebaran Covid-19. Hal ini terbukti dengan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke II tahun 2020, minus 5,32 persen. Dengan catatan ini artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia terus turun sejak 2018 silam. Sementara di kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi sudah tersungkur di angka 2,97 persen. Terakhir rilis BPS menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi -2,07 persen.

Secara umum, beberapa kebijakan umum yang sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian adalah adanya kebijakan *Work from Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Beberapa kebijakan tersebut berpengaruh pada kinerja beberapa sektor ekonomi yang menurun bahkan memiliki capaian negative, seperti sektor transportasi, pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dari 17 sektor lapangan usaha yang menopang perekonomian, hanya sektor pertanian yang masih bisa tumbuh, lainnya mengalami kontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan mencapai -15,04% sebagai dampak pembatasan sosial.

Kondisi perekonomian yang seperti ini bisa menyebabkan terjadinya resesi ekonomi level mikro hingga makro yang efeknya bersifat domino pada seluruh kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, ketika investasi anjlok saat resesi, sejumlah lapangan pekerjaan secara otomatis akan berkurang bahkan hilang. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pun naik signifikan. Produksi atas barang dan jasa juga merosot sehingga menurunkan PDB nasional. Jika tak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor. Sebut saja, mulai dari macetnya kredit perbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tak bergerak. Kemudian, neraca perdagangan bakal minus dan berimbas langsung pada cadangan devisa. Dalam skala riilnya, banyak orang bisa kehilangan rumah karena tak sanggup membayar cicilan, bersamaan pula terjadi pelemahan daya beli, lalu banyak bisnis terpaksa gulung tikar. Adapun dampak sosial yang akan menjadi muaranya adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas. Untuk mengatasi masalah ekonomi agar tidak bertambah parah, pemerintah perlu melakukan terobosan untuk pemulihan ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melihat urgensinya, harus ada langkah terobosan dan bahkan jika diperlukan bisa memformat ulang berbagai kebijakan ekonomi jangka pendek hingga jangka panjangnya.

3. Industri 4.0

Mulai tahun 2020 saat ini dunia industri mulai memasuki tahapan yang disebut era Industri 4.0. "Industrie 4.0" dicetuskan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2011 yang lalu. Industri 4.0 adalah tren automasi industri dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur yang mana didalamnya termasuk teknologi *cloud computing*, *cyber-physical system* dan *Internet of Things (IoT)*. Istilah "smart factory" akan menjadi hal yang lumrah kita dengar di era Industri 4.0 sebagaimana saat ini kita mendengar istilah *smartphone*, *smartcard* dan istilah-istilah lain yang ditambahkan prefiks *smart*.

Sebagian orang membandingkan Industri 4.0 dengan Revolusi Industri Generasi Keempat (*Fourth Industrial Revolution*). Revolusi Industri Generasi Keempat sendiri merupakan transformasi sistemik yang lebih luas cakupannya daripada Industri 4.0, yang mana didalamnya mencakup dampak terhadap masyarakat, struktur pemerintahan dan peranan manusia itu sendiri dalam struktur ekonomi dan manufaktur. Jadi, bisa disimpulkan Industri 4.0 adalah subset dari Revolusi Industri Generasi Keempat. Beberapa poin penting terkait perkembangan industry 4.0, yakni:

- a. industri 4.0 diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan manusia, lingkungan, dan kesejahteraan bersama.
- b. industri 4.0 diharapkan mampu mendorong pengembangan kapasitas manusia, sehingga menjadi semakin terdidik dan terampil.
- c. akses terhadap teknologi diharapkan terjangkau dengan mudah, sehingga bisa diterapkan di semua negara.
- d. kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi.
- e. kemajuan teknologi diharapkan bisa menggeser paradigma lama, dari persaingan (*competition*) menjadi koneksi (*connection*) dan kerjasama (*collaboration*).
- f. penerapan teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan.

Sementara upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0, antara lain:

- a. Mengidentifikasi area strategis dalam rangka meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas output.
- b. menganalisa dampak pemanfaatan teknologi dalam jangka panjang, terutama terhadap serapan tenaga kerja dan lingkungan hidup.
- c. mempersiapkan infrastruktur, serta program pendidikan dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi.

Dirangkum dari *World Economic Forum* (WEF), pada tahun 2020 di mana era Revolusi Industri Generasi Keempat dimulai ada **sepuluh soft skill** yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri. Soft skill tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (*Complex Problem Solving*), berpikir kritis (*Critical Thinking*), kreatifitas (*Creativity*), manajemen SDM (*Human Resources Management*), koordinasi (*Coordinating*), kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*), pengambilan keputusan (*Judgment and Decision Making*), orientasi pada layanan (*Service Orientation*), negosiasi (*Negotiation*) dan kelenturan berpikir (*Cognitive Flexibility*).

Dalam menyikapi tantangan dan persaingan industry 4.0 seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Tegal selain harus menguasai hard skill (penguasaan teknologi) juga harus memiliki 10 (sepuluh) *soft skill tersebut*. Pemerintah harus mampu mendorong dan memfasilitasi masyarakat khususnya pelaku industri agar memiliki soft dan hard skill tersebut disamping juga pemerintah sendiri harus menguasai kedua skill tersebut atau bisa disebut sebagai *governance 4.0*. Oleh karena itu tantangan pemerintah saat ini yaitu bagaimana caranya harus mampu memasyarakatkan automasi industry melalui difusi teknologi secara luas baik dalam kegiatan pemerintahan maupun berbagai aktifitas masyarakat.

4. Pembangunan Infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta Sangihe Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan Munnell, 1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60% (Suyono Dikun, 2003). Bahkan studi dari *World Bank* (1994) disebutkan elastisitas PDB (*Produk Domestik Bruto*) terhadap infrastruktur di suatu

negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Dalam RPJMN 2019-2024 pembangunan infrastruktur menjadi guideline dan prioritas arah pembangunan nasional. Fokus pembangunan infrastruktur difokuskan pada infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital.

Adapun target infrastruktur pelayanan dasar meliputi:

- 70% rumah tangga menempati hunian layak
- 100% akses air minum layak
- 90% hunian dengan akses sanitasi layak
- 30% hunian dengan akses air minum perpipaan.

Target infrastruktur ekonomi antara lain:

- KA Kecepatan tinggi pulau Jawa Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung
- Kereta api Makassar-Parepare
- Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- 43 Rute Jembatan Udara
- 2.500 Km jalan tol baru dan/atau beroperasi
- 3000 Km jalan nasional baru
- 97% kondisi mantap jalan nasional
- 1,9 jam/100 km waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau
- 27% rute pelayaran saling terhubung

Target infrastruktur perkotaan antara lain:

- Sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan
- 80% penanganan hunian dengan akses sampak terkelola baik
- 20% pengurangan hunian dengan akses sampak terkelola baik

Target infrastruktur energi dan ketenagalistrikan antara lain:

- 1.400 kWh konsumsi listrik Per Kapita Nasional
- 100% rasio elektrifikasi
- 4 juta sambungan rumah baru jaringan gas kota
- unit pembangunan dan pengembangan kilang minyak (2 *Grass Root Refinery* dan 4 *Refinery Development Master Plan*)

Target Infrastruktur transformasi digital antara lain:

- 95% desa terjangkau infrastruktur jaringan bergerak pita lebar
- 60% cakupan jaringan tetap pita lebar di kecamatan
- 80% populasi terjangkau siaran digital
- 3 *start up* unicorn baru

Permasalahan pembangunan infrastruktur di Indonesia secara umum bukan hanya disebabkan oleh faktor internal, seperti minimnya anggaran pemerintah di sektor pembangunan, namun juga berasal dari faktor-faktor eksternal. Seringkali kita mendengar kasus pembangunan infrastruktur yang terancam gagal karena terganjal oleh pembebasan tanah. Dengan adanya alokasi waktu dan dana yang terbatas, maka banyak proyek pembangunan infrastruktur yang terbengkalai dan gagal akibat terhambat proses pembebasan tanah, bahkan untuk infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan ditujukan bagi kepentingan umum sekalipun.

Sebenarnya permasalahan dalam pembangunan infrastruktur bukan saja datang dari faktor pembebasan tanah, namun secara keseluruhan tetap saja terfokus pada kompleksitas pertanahan, baik dari aspek perizinan maupun penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sebagai contohnya, infrastruktur yang berupa jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dapat menjadi masalah karena melintasi kawasan permukiman, apalagi yang padat penduduknya, sehingga akhirnya memerlukan biaya yang besar untuk relokasi sekaligus penyediaan tanah pengganti.

Selain memiliki dimensi ruang yang luas, pembangunan infrastruktur juga menghadapi tiga dimensi permasalahan. Pertama, membutuhkan investasi yang cukup besar, waktu pengembalian modal yang panjang, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu. Kedua, pembangunan menjadi prasyarat bagi berkembangnya kesempatan dan peluang baru di berbagai bidang kehidupan. Ketiga, adanya persaingan global dan sekaligus memenuhi permintaan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Melihat begitu banyaknya peran maupun dimensi permasalahan serta tantangan dalam pembangunan infrastruktur, maka perlu diupayakan pencegahan guna meminimalisir munculnya permasalahan.

Secara keseluruhan dalam RPJMN 2019-2024 terdapat 41 (empat puluh satu) proyek prioritas strategis antara lain:

- 1) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
- 2) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, LombokMandalika, Labuan Bajo, ManadoLikupang, Wakatobi, Raja Ampat, BromoTengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai
- 3) 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter
- 4) Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
- 5) Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit
- 6) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
- 7) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional
- 8) Pembangunan Wilayah Batam – Bintan
- 9) Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar
- 10) Ibu Kota Negara (IKN)
- 11) Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong
- 12) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay
- 13) Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

- 14) Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke
- 15) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*
- 16) Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas)
- 17) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
- 18) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
- 19) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung
- 20) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)
- 21) Kereta Api Makassar-Pare Pare
- 22) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- 23) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar
- 24) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
- 25) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
- 26) Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
- 27) Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
- 28) 18 Waduk Multiguna
- 29) Jembatan Udara 37 Rute di Papua
- 30) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, terluar, dan Terdepan
- 31) Jalan Trans Papua Merauke – Sorong
- 32) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- 33) Akses Air Minum Perpipa (10 Juta Sambungan Rumah)
- 34) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
- 35) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
- 36) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis
- 37) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)
- 38) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
- 39) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
- 40) Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
- 41) Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Dalam pembangunan ekonomi nasional, pengembangan setiap kawasan memiliki proporsi dan peran yang berbeda-beda dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan kawasan di Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan kawasan yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kondisi fisiografis dan geografis kewilayahan, karakter dan potensi wilayah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan 8 (delapan) kawasan, yaitu Kedungsepur, Wanarakuti, Banglor, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Bregasmalang, Barlingmascakeb, dan Petanglong. Pengelompokan kawasan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Adapun kebijakan pengembangan kawasan di Jawa Tengah adalah sebagaimana berikut:

- 1) Poros pengembangan utara-utara yang membentang dari Bregasmalang - Petanglong - Kedungsepur - Wanarakuti Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi kawasan di Jawa Tengah;
- 2) Poros pengembangan selatan-selatan yang membentang dari Barlingmascakeb - Purwomanggung - Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan di koridor selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan;
- 3) Poros pengembangan utara-selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, serta Wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan;
- 4) Poros pengembangan bagian tengah Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan fungsi konservasi di kawasan bagian tengah Jawa Tengah (Hulu Daerah Aliran Sungai) pada daerah Gunung Slamet - Sindoro - Sumbing - Merbabu - Merapi - Lawu; dan
- 5) Pengembangan wilayah kelautan diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan.

Kabupaten Tegal masuk dalam Kawasan Bregasmalang yang terdiri dari Kabupaten Brebes, kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemasang. Pengembangan sector unggulan di Kawasan bregasmalang terdiri dari: Industri, Perdagangan dan Jasa, Pertanian, Pariwisata, Perikanan, Kehutanan, dan Pertambangan.

4.2.3. Isu Strategis Regional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 antara lain:

a. Penanggulangan Kemiskinan

Isu penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah menitik beratkan pada perbedaan kondisi kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan di mana dominasi penduduk miskin berada di wilayah pedesaan sejumlah 2,229 juta jiwa (13,20%) sedangkan penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 1,89 juta jiwa (10,57%. Jika ditelaah lebih detail, maka kemiskinan pedesaan di Jawa Tengah berporfesi sebagai petani (buruh tani, petani gurem, dan pekerja serabutan) dan nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil). Selain itu Sebagian besar (40%) penduduk berpendapatan rendah terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset

produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi, serta munculnya gejala kultur komodifikasi data di masyarakat, dengan memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.

Dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, ketidaktepatan sasaran program menjadi pemicu utama kurang optimalnya penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Selain itu miskin juga dipengaruhi dimensi politik yang dikarenakan struktur politik dan ekonomi yang timpang, serta tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pondasi masyarakat miskin yang kokoh, dalam dimensi politik yang lebih luas, dengan menciptakan ruang aspirasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan, dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan **tahun 2020 IPM Jawa Tengah mulai membaik yaitu sebesar 71,87** dan masuk dalam kategori tinggi. Namun demikian angka ini masih dibawah angka nasional **sebesar 71,94**. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Aspek pendidikan perlu diperhatikan, karena rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jawa Tengah cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. **Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 12,70 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,69 tahun.** Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di Jawa Tengah hanya bersekolah sampai dengan SMP kelas II atau kelas VIII.

c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil, namun kondisi ekonomi global dan regional yang tidak dapat diprediksi tepat, harus diantisipasi karena akan memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Jawa Tengah kedepan. Kondisi perekonomian daerah yang stabil akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Akan tetapi persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah berdampak pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

e. Kedaulatan pangan dan energi

Produksi pertanian akan mempengaruhi pada penyediaan pangan bagi masyarakat. Perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah saat ini secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras nasional. Namun tidak demikian dengan produksi pertanian lainnya seperti kedelai dan jagung, yang masih harus ditingkatkan kedepan. Isu lain adalah terkait dengan kedaulatan energi. Kebutuhan energi masyarakat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pemakaian energi menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang.

f. Kesenjangan wilayah

Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belumlah merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 di tahun 2016. Selain itu masih cukup banyak kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima.

4.2.4 Isu Umum Kabupaten Tegal

Isu strategis Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan isu internasional, isu nasional, isu regional, isu jangka panjang RPJPD Kab. Tegal, pokok permasalahan pembangunan eksisting dan isu lokal yang actual. Oleh karena itu sebelum dirumuskan dan ditentukan isu strategis Kabupaten Tegal 2019-2024 setidaknya perlu dijabarkan isu Perpres 79 tahun 2019, RPJPD Kab. Tegal 2005-2025 pada periode yang berkenaan serta gambaran dampak Covid-19 di Kabupaten Tegal saat ini.

4.2.4.1. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 adalah *“Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”*. Tersusunnya visi tersebut dilatarbelakangi dari adanya Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu (1) Reformasi Birokrasi; (2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); (4) Budaya Kreatif Inovatif; (5) Kesetaraan dan Keadilan Gender; (6) Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (7) Krisis Pangan dan Air; (8) Krisis Energi; (9) Kerjasama Antar Daerah; dan (10) Penguatan Wilayah Tertinggal dan Kapasitas Masyarakat.

Secara khusus Tahap IV RPJPD yang menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 mempunyai penekanan **pada Akselerasi Proses Inovasi**.

Pada RPJPD tahap IV, budaya kreasi, inovasi dan kewirausahaan perlu meresap pada tiap kehidupan masyarakat. Pembangunan manusia harus lebih berkualitas. Oleh karena itu IPM Kabupaten Tegal pada tahap ini sudah selayaknya di atas rata-rata IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah. Dengan meningkatnya kapasitas sumberdaya masyarakat Kabupaten Tegal, maka peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan harus semakin dominan. Masyarakat harus mempunyai pemahaman terkait keberdayaan dan peran serta sebagai salah satu pilar *good governance* dalam mencapai tujuan pembangunan (tujuan bersama). Selain itu gotong royong sebagai salah satu kearifan lokal kembali menjadi budaya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu bentuk gotong royong para pelaku usaha pada tahap ini. Pada tahap ini kapasitas inovatif harus semakin mantap. Untuk itu bentuk-bentuk usaha-usaha ramah lingkungan dan menguntungkan secara ekonomis (*eco-efficiency*) harus ditingkatkan. Akselerasi proses menuju daya saing ini harus mampu meningkatkan ekspor produk bernilai tambah yang tinggi. Peningkatan ekspor ini sudah barang tentu harus diikuti dengan peningkatan transaksi informasi intra Kabupaten Tegal, karena sebagaimana diketahui, bahwa dalam dunia usaha pelaku yang menguasai pasar adalah pelaku yang menguasai informasi. Oleh karena itu pemanfaatan TIK dalam tahap ini telah mutlak menjadi proses standart dalam penyelenggaraan usaha dan pemerintahan.

Hingga berakhirnya RPJMD IV diharapkan berbagai capaian dapat diwujudkan, yaitu:

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi relatif sudah tercapai dengan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Instrumen hukum sebagai pijakan atau fondasi reformasi birokrasi, guna mengarahkan dan memaksakan birokrasi pemerintahan ke arah pencapaian *good governance* telah diterapkan secara konsekwen dan konsisten. Hal ini ditandai dengan pertama : terbentuknya birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berkurangnya perilaku koruptif; kedua : birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (*man, money, material, methode, and time*); ketiga : birokrasi yang transparan, yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah; Keempat : birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat; kelima : birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan.

b. Ekonomi Kreatif Masyarakat

Karakter masyarakat Kabupaten Tegal yang kreatif dan berjiwa wira usaha semakin berkembang menjadi industri kreatif, yang mampu menghasilkan karya-karya inovatif, yang berpengaruh di tingkat nasional. Banyaknya karya-karya inovatif ini membuat persaingan usaha semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kesadaran yang kuat terhadap perlindungan karya intelektualnya. Kesadaran masyarakat untuk menghargai HKI telah menjadi budaya, ditandai dengan banyaknya masyarakat mendapatkan HKI. Hal ini tidak terlepas dari adanya penegakkan hukum bagi

pelanggar HKI dan optimalnya peran lembaga-lembaga konsultasi HKI, sehingga masyarakat dengan mudah untuk memperoleh penjelasan tentang HKI. Kompetensi dan kapasitas inovatif UMKM telah berkembang pesat, sehingga UMKM menjadi rumpun usaha pelaku industri kreatif yang berdaya saing dan modern berbasis pengetahuan (*knowledge-based enterprise*).

c. Pembangunan Gender

Penerapan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan, dengan memperhatikan masalah kontekstual dan situasional perlu diwujudkan. Porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki harus setara, serasi, seimbang dan harmonis. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender ini antara lain berupa: Akses, kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan; Partisipasi, perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan; Kontrol, perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan; Manfaat, pembangunan mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

d. Kelestarian Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan semakin terjaga kelestariannya. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran dan upaya nyata dari masyarakat maupun dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan, disamping semakin efektifnya penegakan hukum di bidang lingkungan.

Konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya terkendali yang didukung dengan pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*), sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air. Sehingga Daerah tangkapan air dan sumber-sumber mata air tetap terjaga kelestariannya. Dengan kondisi tersebut, maka produktivitas lahan terjaga dan kemandirian pangan terwujud. Pemanfaatan energi terbarukan telah dilaksanakan secara berkelanjutan antara lain pemanfaatan biogas, biomassa, energi matahari, dan pemanfaatan panas bumi (*geothermal*).

e. Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah

Kerjasama antar daerah perlu dilaksanakan secara terpadu berdasarkan prinsip: kepedulian (*care*), saling berbagi dengan adil (*share*), dan jujur (*fair*), sehingga tujuan dari kerjasama antar daerah dapat terwujud, antara lain terselesaikannya dengan cepat dan adil. Selain itu dengan adanya Kerjasama yang berkualitas maka akan meminimalisir konflik dan berkurangnya kesenjangan antar daerah,

f. Kesenjangan Kesejahteraan, Infrastruktur Dasar dan Kualitas SDM

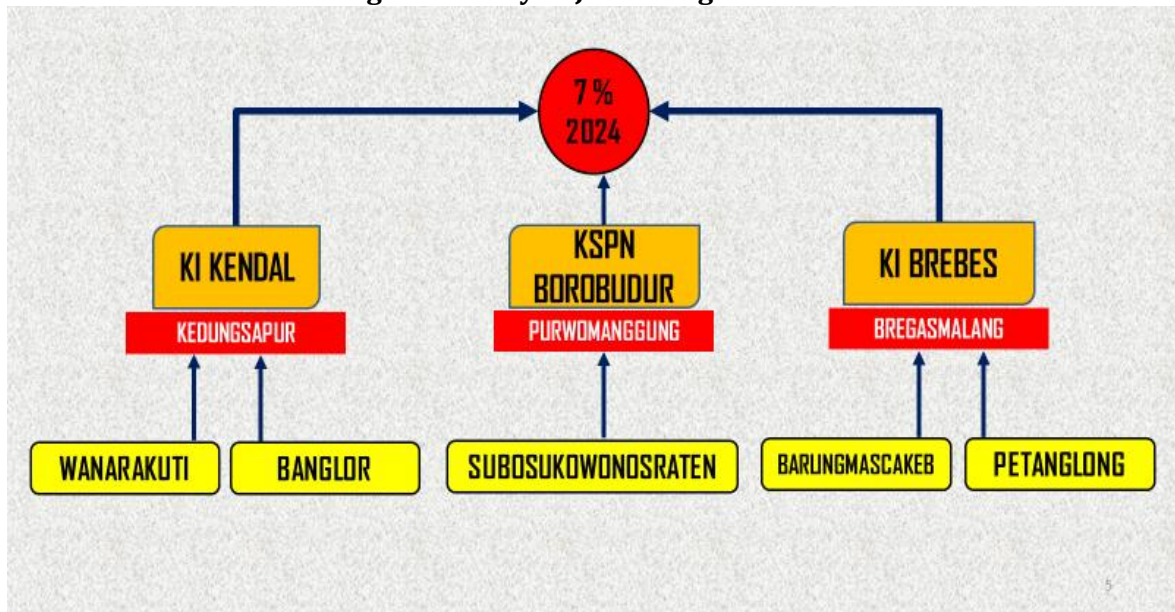
Pemerataan pembangunan khususnya wilayah tertinggal dan kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan secara efektif. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan terentaskannya sebagian besar masyarakat dari kemiskinan; setiap anak, laki-laki dan perempuan, telah menyelesaikan tahap pendidikan dasar; tingkat kematian balita pada kondisi minimal; meningkatnya kesehatan ibu, yang ditandai dengan berkurangnya angka kematian ibu dalam proses melahirkan; penyakit menular diare, malaria, DB, TBC, kusta, HIV/AIDS, flu burung dan lain-lain dalam kondisi minimal; dan meningkatnya akses masyarakat wilayah tertinggal terhadap air minum.

4.2.4.2. Kolaborasi Wilayah Dalam Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang

Perpres 79 tahun 2019 mempunyai peran strategis sebagai payung regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan regulasi ini diharapkan dapat mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan yang kemudian dapat mengungkit perekonomian lokal, regional, dan nasional sehingga dapat tumbuh hingga 7% pada akhir tahun 2024.

Skenario akselerasi pembangunan wilayah Jawa Tengah untuk mencapai pertumbuhan 7% pada tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 4. 7
Akselerasi Pembangunan Wilayah Jawa Tengah sesuai Direktif Presiden



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Kabupaten Tegal sebagai salah satu bagian dalam pembangunan system kawasan tersebut harus mampu bersinergi dengan kabupaten/kota lainnya sebagai satu kesatuan system yang utuh. Selain itu berbagai kebijakan pusat, provinsi dan Kabupaten Tegal juga harus sinkron mulai dari kebijakan perencanaan hingga kebijakan penganggarannya.

Melalui Perpres 79 tahun 2019 tersebut, setidaknya terdapat 15 program/kegiatan strategis yang lokusnya berada di Kabupaten Tegal. Meskipun secara umum sumber pendanaan kelimabelas program/kegiatan tersebut berasal dari APBN, namun bukan berarti Pemerintah Kabupaten Tegal menjadi pasif. Justru sebaliknya Pemerintah Kabupaten Tegal harus lebih aktif. Oleh karena itu tantangan kedepan terkait perpres 79 tahun 2019 di Kabupaten Tegal ialah bagaimana seluruh proyek atau program/kegiatan strategis tersebut dapat berjalan dengan lancar. Berbagai permasalahan pra-pelaksanaan proyek harus dapat teridentifikasi semua dan dapat dipecahkan sebelum proyek dilaksanakan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tegal juga

harus punya konsep/skenario yang jelas agar setelah proyek selesai manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Tidak berhenti pada pembangunan fisiknya saja, namun pemanfaatan dan kemanfaatannya juga harus terkonsep dengan jelas. Adapun rincian program/kegiatan strategis Perpres 79 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Daftar Lampiran Proyek di Kabupaten Tegal
(Lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2019)

NO	No. Urut	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMSI NILAI INVESTASI	SUMBER DANA	LOKASI	KEWENANGAN
1	6	Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Jimat dan Sungai Rambut	100	APBN	Kecamatan Warureja	Pemerintah Provinsi --> (PUSDATARU) - Balai PSDA
2	10	Pengembangan Sumber Air Baku SPAM Perkotaan	300	APBN	Seluruh Wilayah Kabupaten	561k84, Ji4
3	11	Pembangunan Bendungan Jatinegara	1500	APBN	Kecamatan Jatinegara	Pemerintah Pusat --> Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
4	13	Optimalisasi Waduk Cacaban	400	APBN	Kecamatan Kedungbanteng dan Jatinegara	Pemerintah Pusat --> Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
5	15	Pengendalian Banjir Sistem Sungai Cacaban	150	APBN	Kec. Suradadi, Kec, Kedungbanteng	Pemerintah Provinsi --> (PUSDATARU) - Balai PSDA
6	16	Pembangunan Sarpras Konservasi SDA Sungai Pemali (Tegal dan Brebes)	150	APBN	Kec. Margasari	Pemerintah Provinsi --> (PUSDATARU) - Balai PSDA
7	18	Peningkatan Jalan Akses Kaligua - Guci	50	APBN	Kec. Bumijawa	DPU Binamarga Jateng dan DPU Kab Tegal
8	23	Peningkatan Jalan Yomani - Guci	60	APBN	Kec. Lebaksiu, Balapulang, Bojong dan Bumijawa	Pemerintah Kabupaten --> DPU Kab Tegal
9	24	Peningkatan Jalan dan Perlengkapan Jalan Ketanggungan - Prupuk	60	APBN	Kec. Margasari	Pemerintah Pusat --> Kementerian PUPR (Balai Pengelola Jalan Nasional Wilayah IX)
10	34	Fasilitas Pengembangan Industri Klaster Logam	100	APBN	Kec. Kramat	Pemerintah Kabupaten --> Dinas Perinaker Kab Tegal
11	38	Revitalisasi Pasar Adiwerna, Balamoa, Guci, Bumijawa	80	APBN	Kec. Adiwerna, Bojong, Bumijawa dan Pangkah	Pemerintah Kabupaten --> Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab Tegal, Dinas Perkimtaru
12	39	Pembangunan Pasar Ikan dan Balai Benih Ikan (BBI)	50	APBN	Kec, Lebaksiu dan Balapulang	Pemerintah Kabupaten --> Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab Tegal
13	46	Pengembangan Pertanian Bawang Putih	30	APBN	Kec. Bojong dan Bumijawa	Pemerintah Kabupaten --> Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab Tegal
14	47	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	150	APBN	Kec. Kramat	Pemerintah Provinsi --> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng
JUMLAH			3180			
SKALA KAWASAN						
15	6	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah	62,5	APBN	Seluruh Wilayah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten --> Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal
JUMLAH			62,5			

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.2.4.3. Covid-19 Dalam Perspektif Kabupaten Tegal

Isu Covid-19 beberapa tahun kedepan masih akan mewarnai berbagai lini kehidupan social-ekonomi masyarakat di Kabupaten Tegal. Dalam hal perekonomian masyarakat di Kabupaten Tegal, berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal, dari skala besar hingga kecil melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Banyak pelaku usaha mengalami gangguan rantai pasok baik di level domestik maupun internasional (ekspor/impor), serta penurunan drastis permintaan akan barang-barang non-*esensial* (*durable*), yang selanjutnya bisa mengganggu neraca keuangan perusahaan bahkan bisa berujung kebangkrutan. Hal tersebut memaksa banyak perusahaan merumahkan bahkan mem-PHK karyawannya. Setidaknya dari laporan yang ada, sudah ada 161 karyawan dirumahkan dan 461 karyawan di-PHK. Bahkan disinyalir sudah ada ribuan karyawan asal Kabupaten Tegal dari berbagai skala industri yang di-PHK namun tidak dilaporkan. Pada sektor (perdagangan) informal, pelaku usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi mengalami dampak yang cukup berat dari berkurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrem kehilangan mata pencaharian. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek *online*, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang sebagian besar beroperasi di Kecamatan Slawi dan Adiwerna dengan jumlah tidak kurang dari 2.765 orang dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%. Bahkan ada risiko kenaikan harga kebutuhan pokok karena distribusinya terganggu. Selain itu sektor-sektor di Kabupaten Tegal yang juga diperkirakan terpuak dengan kondisi ini

diantaranya industri pariwisata (perhotelan, agen perjalanan, bisnis hiburan, dan usaha kuliner), industri manufaktur khususnya yang padat karya dan bergantung pada ekspor-impor, dan sektor konstruksi.

Beberapa akumulasi efek covid-19 diberbagai lini kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal yang paling krusial antara lain pengangguran, anjloknya pendapatan, peningkatan angka kemiskinan, melebarnya angka ketimpangan, tingginya utang masyarakat bersamaan dengan penerimaan yang anjlok, serta produksi yang menurun bahkan hilang secara permanen serta bisnis gulung tikar.

Ada beberapa hal yang dirasa bisa lebih mempanjang kasus covid-19 di Kabupaten Tegal jika tidak segera diantisipasi dan dicarikan solusi secara tepat. Hal tersebut berkaitan dengan perilaku masyarakat yang sangat ditentukan oleh latar belakang sosial, budaya dan religi. Merujuk fakta kondisi di Kabupaten Tegal saat ini, protokol kesehatan dalam berbagai aktifitas masyarakat kurang dipedomani, jalanan masih padat, kerumunan masih banyak dijumpai, pergerakan manusia dari dan ke zona merah cukup massive bahkan tidak terpantau dan sulit bisa dicegah. Sementara jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut maka pandemi covid-19 akan semakin lama berlangsung, akibatnya resesi ekonomi (skala mikro) masih akan berlangsung. Sektor-sektor ekonomi besar-kecil semakin lama akan semakin lumpuh. Akan lebih banyak lagi tambahan karyawan di-PHK bahkan perusahaan gulung tikar. Sementara keberhasilan pencegahan dan penanggulangan wabah dari sisi kesehatan belum bisa diukur dengan jelas. Untuk itu kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menangani pandemik ini sangat menentukan kecepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca krisis.

4.2.4.4. Penentuan Isu Strategis Kabupaten Tegal

Penentuan isu strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 dilakukan berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan yang ada, isu internasional, isu dan kebijakan nasional yang ada, isu regional dan isu local Kabupaten Tegal sendiri yang mempengaruhi pembangunan pada periode 2019-2024. Selain itu juga dilakukan *focus group discussion* dengan Tokoh Masyarakat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik pertanian, perkotaan dan pesisir di Kabupaten Tegal. Dari hasil olah data informasi dan curah pendapat dari berbagai pihak yang menjadi narasumber, maka dihasilkan prioritas isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

a. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah daerah yang saat ini masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan pengangguran yang keduanya saat ini menjadi satu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kemiskinan sendiri merupakan permasalahan dan isu multidimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencarian yang layak serta berkelanjutan. Melalui sinergitas kebijakan tersebut, dalam lingkup regional jawa tengah tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2019 yang sebesar 7,64 % berada pada urutan 10 terendah dari 35

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, atau satu tingkat dibawah Kota Tegal yang berada pada posisi 9 terendah dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,47%. Namun dengan adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 telah merubah tren kemiskinan di Kabupaten Tegal yang sudah menurun menjadi meningkat secara riil ditahun 2020 maupun beberapa tahun kedepan. Setidaknya persentase penduduk miskin ditahun 2020 telah naik dan mencapai 8,14%. Ironisnya, umumnya sebagian besar penduduk yang rentan miskin tersebut bekerja di sektor informal. Padahal kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi covid-19. Sebagian besar pekerja informal mengandalkan upah harian. Apabila penanganan pandemi berlangsung lama, periode pembatasan dan penurunan mobilitas orang akan semakin panjang. Akibatnya, golongan rentan miskin dan hampir miskin yang bekerja di sektor informal yang mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan mata pencaharian dan akhirnya jatuh kedalam jurang kemiskinan.

Merujuk pada beberapa kondisi diatas maka kebijakan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 harus dapat mengantisipasi fenomena tersebut. Setidaknya pemerintah Kabupaten Tegal beberapa tahun kedepan harus punya skenario yang mampu memberi pijakan kepada seluruh masyarakat khususnya kepada masyarakat yang rentan miskin di Kabupaten Tegal agar tidak jatuh dibawah garis kemiskinan. Beberapa scenario terkait penanggulangan kemiskinan dampak covid-19 harus lebih baik dan efektif ketimbang apa yang sudah dilakukan saat ini. Beberapa kebijakan seperti jaring pengaman sosial harus lebih tepat sasaran dan tepat guna. Stimulus kebijakan ekonomi terhadap sektor informal harus lebih nyata dan dominan.

Berkaitan dengan pengangguran, fenomena pengangguran di Kabupaten Tegal cukup unik dan perlu dikaji lebih mendalam. Idealnya penurunan angka kemiskinan berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran. Namun kenyataannya di Kabupaten Tegal disaat angka kemiskinan mengalami penurunan, angka pengangguran justru meningkat. Tentu saja hal ini perlu diwaspadai dan mendapat perhatian khusus apalagi disaat kondisi pandemi covid-19 saat ini telah banyak merusak struktur ekonomi wilayah. Hasilnya angka pengangguran di Kabupaten Tegal tahun 2020 naik menjadi 9,82%.

Pada masa pandemi ini, banyak sector usaha dari skala besar hingga kecil mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan karena turunnya permintaan pasar yang menyebabkan rendahnya produktivitas usaha (perusahaan). Daya jual produk usaha yang melemah tersebut menjadikan perusahaan kesulitan dalam membayar gaji karyawannya sehingga banyak tenaga kerja asal Kabupaten Tegal yang akhirnya dirumahkan bahkan di-PHK sebagaimana telah dijelaskan pada isu sebelumnya. Potensi pengangguran tersebut belum termasuk pelaku sector informal yang bangkrut atau kehilangan usahanya karena lemahnya daya beli masyarakat di era pandemi ini.

Dengan melihat kondisi saat ini, isu pengangguran Kabupaten Tegal bisa dikatakan cukup kompleks. Selain fenomena pengangguran penduduk Kabupaten Tegal yang belum diketahui bentuk dan perilakunya, pemerintah Kabupaten Tegal harus bisa meningkatkan produktifitas masyarakat didalam era krisis pandemi covid-19.

Tantangan isu pengangguran dalam era dampak pandemi lebih kepada bagaimana masyarakat dengan segala keterbatasan saat ini namun tetap mampu produktif secara

ekonomi. Setidaknya dalam era krisis ini transformasi bentuk usaha digital harus menjadi *guideline* khusus. Digitalisasi ekonomi masyarakat mulai skala kecil hingga besar perlu difasilitasi. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat disemua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu di-manage dan dikembangkan keterkaitan hulu hilirnya (*supply chain management*). Digitalisasi semua sektor usaha khususnya pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan harus dikembangkan. Jika merujuk istilah saat ini boleh kita sebut sebagai pertanian 4.0, perdagangan 4.0, dan industri pengolahan 4.0.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

✓ Kualitas Tenaga Kerja

Tantangan isu ketenagakerjaan kedepan adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Dengan kata lain tantangan ini menitik beratkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja kedepan. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tingkat penyerapan lapangan kerja dimasa pasca krisis berpotensi tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK. Dengan keterbatasan sumber daya perusahaan saat krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal tersebut memunculkan seleksi yang lebih ketat kedepannya. Perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja yang memiliki produktifitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (*multi tasking*). Oleh karena itu perubahan lanskap atau kualifikasi tenaga kerja bisa jadi suatu keniscayaan. Tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah disektor formal akan tersingkir secara otomatis. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait ketenagakerjaan pascakrisis antara lain:

- Tingkat penyerapan tenaga kerja dimasa pasca krisis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK, atau dengan kata lain *supply* tenaga kerja jauh melebihi *demand* tenaga kerja itu sendiri;
- Dengan keterbatasan sumber daya (ekonomi) perusahaan pasca krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktifitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (*multi tasking*). Karena itu kualifikasi tenaga kerja akan semakin meningkat;
- Lapangan usaha yang berkembang di era pascapandemi adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi dalam artian digitalisasi maupun mesinisasi. Sehingga peran manusia akan mulai berkurang porsinya dalam proses produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu transformasi tenaga kerja diarahkan pada proses *entrepreneurship*.

Dengan melihat tantangan dalam sektor ketenagakerjaan tersebut, untuk mengantisipasi isu SDM sektor tenaga kerja kedepan Pemerintah Kabupaten Tegal harus memiliki konsep dan pembentukan tenaga kerja yang kompeten dan produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri maupun mampu bersaing dalam seleksi penyerapan lapangan kerja kedepan. Selain itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tantangan pengembangan tenaga kerja kedepan ialah bagaimana tenaga kerja harus memiliki 10 soft skill era Revolusi Industri Generasi Keempat selain juga memiliki *hard skill* penguasaan teknologi.

✓ **Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Isu kualitas Pendidikan masyarakat kedepan akan menjadi lebih berat ketimbang sebelumnya. Wabah covid-19 menjadi salah satu penyebabnya. Dalam kondisi Kabupaten Tegal mulai menata pengelolaan Pendidikan yang lebih berkualitas, seketika terganggu akibat wabah covid-19. Sistem belajar mengajar mempunyai keterbatasan dan kendala akibat perubahan pola pembelajaran tatap muka menjadi non-tatap muka. Sementara pembelajaran non-tatap muka belum ditemukan bentuk yang efektif mulai dari prosesnya hingga evaluasinya. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan mutu Pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu tantangan Pendidikan kedepan (*new normal*) ialah harus syarat perbaikan ekosistem pendidikan agar tidak lagi bergantung pada sekolah (Pendidikan Era 4.0). Selain sistem, kualitas tenaga pengajar dalam mengimplementasikan Pendidikan Era 4.0 harus ditingkatkan. Jika dirangkum dari berbagai sumber, setidaknya ada 4 kompetensi yang perlu dimiliki dimiliki oleh pengajar. Pertama keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Merupakan kemampuan memahami suatu masalah, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga dapat dielaborasi dan memunculkan berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah. Pengajar diharapkan mampu meramu pembelajaran dan mengeksplor kompetensi ini kepada peserta didik. Kedua Keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan ini tidak luput dari kemampuan berbasis teknologi informasi, sehingga pengajar dapat menerapkan kolaborasi dalam proses pengajaran. Ketiga, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Diharapkan ide-ide baru dapat diterapkan pengajar dalam proses pembelajaran sehingga memacu siswa untuk beripikir kreatif dan inovatif. Misalnya dalam mengerjakan tugas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Keempat, literasi teknologi dan informasi. Pengajar diharapkan mampu memperoleh banyak referensi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi guna menunjang proses belajar mengajar.

Tantangan lainnya yang timbul yaitu terkait sarana prasarana yang memadai. Misalnya peserta didik dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki laptop/*smartphone* tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar. Kita juga harus memastikan setidaknya internet tersedia secara merata. Maka kebijakan ke depan sudah seharusnya memperhatikan beberapa hal tersebut

✓ **Kualitas Kesehatan Masyarakat**

Isu kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal masih sangat diwarnai efek pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal. Pada 02 Oktober 2020 secara akumulasi sudah terdapat 358 orang positif covid-19. Dari 358 orang tersebut 34 orang meninggal dunia, 216 orang sembuh, 30 orang masih dirawat di rumah sakit, dan sisanya 78 orang menjalani isolasi mandiri. Namun kondisi tersebut berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Hingga 23 Maret 2021 secara akumulasi sudah terdapat 5.092 orang positif covid-19. Dari 5.092 orang tersebut 215 orang meninggal dunia, 4.746 orang sembuh, 33 orang masih dirawat di rumah sakit, dan sisanya 98 orang menjalani isolasi mandiri. Kondisi ini memberikan pukulan cukup telak terhadap efektifitas penanganan covid-19 di Kabupaten Tegal. Dengan kondisi yang belum bisa dipastikan kapan wabah akan berakhir, kesiapan sektor kesehatan kedepan harus lebih kuat. Kesiapan tenaga Kesehatan dari segi jumlah, kualitas, dan protokol keselamatan pelayanan kesehatan harus diutamakan. Sarana prasarana harus mencukupi setidaknya untuk menghadapi puncak kasus yang mungkin masih dapat terus meningkat.

Berbagai permasalahan sektor kesehatan, memunculkan tantangan tersendiri dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Ada beberapa tantangan Kesehatan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tegal antara lain:

- Adanya wabah ini menyaratkan masyarakat untuk mampu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian protokol kesehatan rutin di era *new normal*;
- Pemanfaatan teknologi dalam sector kesehatan kedepan bisa menjadi suatu kebutuhan. Rasa cemas masyarakat untuk datang secara langsung ke fasilitas kesehatan, membuat pelayanan kesehatan membutuhkan teknologi yang bisa mendukung masyarakat agar dapat berkonsultasi dengan dokter secara virtual. Pemerintah Kabupaten Tegal harus mampu menyediakan layanan Kesehatan online yang terinterasi dengan berbagai fasilitas layanan Kesehatan;
- Belajar dari proses dan kondisi penanganan pandemi covid-19 secara umum, maka system kesehatan harus lebih dikuatkan. Kesiapan dan penanganan menghadapi pandemi lainnya harus lebih baik. Mengingat pandemi itu bisa terjadi kapan saja.
- Penanganan dan pengelolaan limbah medis khususnya covid-19 harus dilakukan secara tepat dan aman.

✓ Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender

Isu kesetaraan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Tegal masih menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Beberapa poin yang perlu mendapat perhatian terutama terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemberian kesempatan yang sama dalam berbagai aktifitas pembangunan.

c. Pemulihan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sector ekonomi adalah yang paling mendapatkan tekanan dari dampak pandemi covid-19. Kondisi ini memaksa seluruh pelaku usaha termasuk pelaku usaha di Kabupaten Tegal harus berupaya dengan segala cara agar tetap dapat bertahan. Namun disisi lain rusaknya struktur perekonomian secara luas justru berpotensi bagi semua pelaku usaha bisa mengambil peran pelaku usaha lainnya. Siapa yang *survive*, yang paling cepat pulih dan *inovatif* akan bisa merebut *market share* sebanyak-banyaknya.

Seperti yang kita ketahui bahwa sektor unggulan Kabupaten Tegal terdiri atas sektor industri pengolahan, pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) dan perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor).

Dalam hal industri pengolahan, Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan industri pengolahan logam dan pengolahan makan/minuman. Dalam kondisi masih terdampak covid-19 saat ini banyak sektor industri pengolahan yang sudah dan terancam gulung tikar akibat tidak mampu beradaptasi. Ini bisa menjadi ancaman sekaligus peluang bagi pelaku industri pengolahan di Kabupaten Tegal jika mampu *survive* dan *inovatif*. Kondisi saat ini memang sebagian besar permintaan produk industri manufaktur mengalami penurunan yang tajam. Maka dari itu pemerintah daerah bagaimana caranya harus mampu menyelamatkan eksistensi industri pengolahan yang ada untuk saat ini. Bersamaan dengan itu industri manufaktur harus diarahkan agar bisa melihat peluang produk industri manufaktur apa yang tingkat permintaannya tetap tinggi bahkan meningkat ditengah wabah covid-19 ini. Dengan melihat peluang

tersebut maka pelaku usaha lokal perlu dibantu dan difasilitasi agar bisa menghasilkan produk yang lebih terdiversifikasi sesuai permintaan pasar (berorientasi ekspor), khususnya yang ada keterkaitan (*interlinkage*) dengan sektor primer lokal. Industri pengolahan lokal harus mampu menciptakan nilai tambah (*value added creation*) produk-produk sektor primer lokal sekaligus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang ditinggalkan oleh industri ditempat lain. Atau minimal untuk saat ini peran sektor industri lokal yang ada tidak diambil oleh pelaku dari luar.

Untuk sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat. Dalam masa pandemi covid-19, permintaan produk pertanian khususnya pangan naik signifikan baik lingkup nasional bahkan global. Melalui modernisasi pertanian yang fokus pada produk kebutuhan pasar, diharapkan produk pertanian Kabupaten Tegal mampu mengambil bagian dalam pemenuhan permintaan produk pangan. Ketersediaan pangan saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tegal dan masih memiliki cadangan. Namun ada kecenderungan penurunan daya dukung pangan sampai 2024.

Transformasi sektor pertanian tidak boleh dianggap hanya sebatas mekanisasi (penerapan teknologi) saja. Namun transformasi pertanian modern juga mempunyai konsep bahwa petani sebagai pelaku utama perlu didorong untuk mampu menguasai hulu hingga hilir. Paradigma mereka harus dilatih agar tidak hanya selesai memproduksi hasil pertanian saja, namun juga bisa memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan sekaligus memasarkannya. Melalui konsep seperti ini, tenaga kerja baru dapat terserap sekaligus menjadi salah satu solusi pengangguran akibat wabah covid-19 khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Tegal. Untuk itu transformasi pertanian modern di Kabupaten Tegal minimal harus memuat 2 (dua) unsur perubahan utama yaitu penguasaan teknologi dan paradigma hulu-hilir yang didukung dengan perlindungan bahkan perluasan lahan pertanian produktif.

Untuk sektor perdagangan, digitalisasi perdagangan diseluruh skala bisnis harus mulai diaplikasikan. Saat ini transaksi tatap-muka disemua lini perdagangan mulai bergeser ke system online. Selain dapat meningkatkan manfaatkan ekonomi lainnya khususnya jasa kurir, sistem *online* juga dapat meluaskan pasar tidak hanya skala lokal bahkan menjangkau pasar internasional. Oleh karena itu pelaku usaha perdagangan harus mampu menguasai dan menjalankan mekanisme system online tersebut.

Disisi lain, era pandemi saat ini dengan segala keterbatasan mobilitas, Industri kreatif mempunyai peluang yang cukup besar. Misalnya dalam pendidikan, kita bisa menjual jasa mengajar online melalui *Skype, Zoom, Microsoft Teams*, dll. Juga disektor-sektor yang lain, baik fotografi, design dan editing, dan lain sebagainya. Untuk itu tantangannya ialah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dari industry kreatif itu sendiri.

Selain ketiga sektor tersebut, potensi lokal yang diprediksi mampu mengangkat perekonomian masyarakat ialah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata saat ini mempunyai tantangan yang cukup berat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dampak covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Beberapa tantangan yang cukup strategis dalam pengembangan pariwisata antara lain:

- Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti

mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara. Oleh karena itu tantangannya ialah bagaimana membangun pariwisata yang terintegrasi atau terkolaborasi dengan sektor lainnya khususnya terkait pelestarian budaya local untuk menjadi atraksi baru;

- Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah yang ditunjang akses jalan tol trans Jawa dan dengan kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata;
- Dalam kondisi pandemi covid-19 seperti ini, mobilitas masyarakat sangat dibatasi, hal ini mberpengaruh pada penurunan jumlah wisatawan baik local maupun mancanegara. Selain itu meskipun destinasi-obyek wisata bisa dibuka, namun syarat-syarat protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat. Untuk itu tantangan agar pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai standard menjadi suatu hal yang wajib diwujudkan;
- Untuk mengantisipasi geliat sektor pariwisata yang masih minim, maka pelaku usaha pariwisata perlu difasilitasi agar dapat melakukan diversifikasi usaha lain minimal sampai pandemi berakhir.

Dalam masa pasca dampak pandemi covid-19, suka tidak suka, mau tidak mau, era digital makin terakselerasi dengan cepat, terlebih dengan kondisi ini semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat. Untuk itu tantangannya ialah bagaimana menciptakan kolaborasi antara pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya serta kearifan lokal yang saling mendukung. Sebagai contoh, penjualan paket wisata *online* yang didalamnya terdapat banyak menu-menu jasa tambahan yang bisa dipilih calon pengunjung seperti jasa *fotografi*, jasa *tour guide* dan lain sebagainya.

Selain dapat dikolaborasikan, budaya dan kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai benteng identitas lokal Kabupaten Tegal. Era globaliasi memungkinkan masuknya budaya luar secara bebas. Masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang kuat, maka dapat merusak bahkan mengganti budaya atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tegal. Paling sederhana, Kabupaten Tegal mempunyai sejarah dan warna yang kuat dalam budaya perwayangan dan keagamaan. Namun lambat laut budaya tersebut mulai ditinggalkan khususnya oleh generasi muda yang lebih condong kebarat-baratan. Bahkan persepsi anak muda sekarang bahwa jika ada orang terutama generasi muda menyukai wayang dianggap kampungan. Padahal seni budaya wayang justru dihargai bahkan dikembangkan di negara barat seperti Belanda dan Perancis. Untuk itu tantangan budaya kedepan ialah bagaimana menguatkan kearifan lokal agar dapat berfungsi untuk:

- membentengi dari pengaruh dalam budaya luar yang tidak sesuai dengan adat ketimuran;
- menyerap dan memfilter budaya asing;
- memberikan arah pada pengembangan budaya.

d. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup

✓ Pemerataan Infrastruktur Dasar

Berbagai aktifitas sosial-ekonomi dapat berjalan lancar jika didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, sanitasi dan energi. Kondisi saat ini, infrastruktur jalan yang memadai jumlahnya masih sangat terbatas atau baru mencapai sekitar 50% dari total 958,32 km. Oleh karena itu pemerintah desa dengan segala sumberdayanya harus mampu mengambil peran dalam upaya peningkatan kualitas jalan tersebut sesuai kewenangannya. Selain itu terdapat Kegiatan Strategis Nasional yang berlokasi di Kabupaten Tegal antara lain pembangunan infrastruktur jalan Tol Trans Jawa, dan pembangunan jalur ganda kereta api, dengan lintasan sebagai berikut:

- Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Boyolali, Semarang, Sragen, Karanganyar serta Kota Semarang, Surakarta, Pekalongan, dan Salatiga berupa pembangunan infrastruktur transportasi ruas jalan Tol Trans – Jawa.
- Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Purwodadi, Blora, serta Kota Pekalongan dan Semarang berupa Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api.

Pemenuhan layanan air bersih yang merata masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk itu kualitas pengelolaannya masih butuh akselerasi. Pengelolaan air bersih saat ini untuk perpipaan terbagi menjadi 2 (dua) pengelolaan SPAM PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM Pamsimas untuk wilayah perdesaan, Untuk wilayah perkotaan saat ini sebagian besar sudah terlayani oleh SPAM PDAM, Namun saat ini menghadapi kendala yaitu terbatasnya sumber air baku di mana *idle capacity* SPAM PDAM tersisa tidak lebih dari 50 Liter/Detik. Sedangkan untuk SPAM PAMSIMAS saat ini telah ada di 120 Desa yang tentu saja masih dibutuhkan perluasan jaringan pemenuhan air bersih. Secara keseluruhan kebutuhan air (domestik, industri dan pertanian) tidak sebanding dengan kebutuhan atau terjadi defisit 682 juta m³/tahun. Beberapa daerah mempunyai daya dukung air yang rendah seperti Kec. Slawi, Bumijawa, Jatinegara terancam kekeringan dimusim kemarau di kecamatan yang DD Air rendah. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi sampai 2024.

Dalam perspektif infrastruktur yang lebih luas, Kabupaten Tegal mempunyai tantangan yang cukup berat dalam hal penataan kota. Hingga kini, perkembangan perkotaan Kabupaten Tegal cenderung sporadic (*leap frog*) dan belum mempunyai bentuk yang jelas. Bisa dikatakan belum memiliki ikon perkotaan layaknya kota-kota yang ter-*design* dengan jelas. Untuk itu penataan kota menjadi isu yang cukup strategis kedepan, minimal Kabupaten Tegal memiliki icon perkotaan melalui penataan wajah kota Slawi.

Untuk mendukung penataan kota yang *representative*, pengelolaan sampah dan sanitasi wilayah harus berkualitas. Penanganan sampah meliputi penanganan persampahan rumah tangga baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pelayanan persampahan di perkotaan saat ini hanya mampu mencapai 25% yang terangkut ke TPAS Penujah, sedangkan 75% dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Pelayanan persampahan di perkotaan hanya mampu melayani untuk kawasan komersial, perkantoran, perumahan, taman dan jalan. Sedangkan di wilayah perdesaan 100% masih dikelola mandiri oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam

pengelolaan sampah antara lain: Manajemen dan kualitas pengelolaan sampah yang belum baik dari hulu ke hilir (*waste management*), keterbatasan alat angkut, keterbatasan alat pengolahan/pemrosesan sampah pada TPAS, serta terbatasnya lahan TPAS Penujah. Dari sisi volume sampah masih ada kesenjangan antara produksi sampah dengan volume sampah yang terangkut. Dari data terakhir 2020 baru 47,29% dari total produksi sampah yang terangkut. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah *idlle capacity* IPLT Penujah sudah mencapai 0%, perlu dilakukan upaya revitalisasi atau ekstensifikasi IPLT Penujah disamping upaya pengurangan dan pengelolaan sampah sebelum dibuang ke TPAS.

Untuk sanitasi, cakupan layanan untuk *on site system* sebesar 65% dari total penduduk Kabupaten Tegal, yaitu terdiri atas *sistem on site individual* (tangki septik) mencakup 63,85% dan sistem *on site* komunal (MCK, MCK++) mencakup 1,15%. Sedangkan cakupan layanan *off site system* di Kabupaten Tegal saat ini belum ada. Untuk itu sanitasi juga masih menjadi tantangan dalam penataan perkotaan. Sanitasi secara umum juga berkaitan dengan permukiman kumuh. Cakupan pelayanan permukiman kumuh masih sangat rendah. Untuk itu upaya penyediaan lingkungan sehat bagi masyarakat khususnya perkotaan perlu difokuskan pada penyediaan RTLH dan sanitasi sehat terutama jamban

Dalam hal konsep pengembangan wilayah, berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai; 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhturi, Dukuhwaru, dan Balapulang yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 buah dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, Bojong, Jatinegara yang memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus; dan 4) Kecamatan Pagerbarang dan Kedungbanteng di mana perkembangan keduanya masih tergolong lambat. Untuk itu tantangan dalam pengembangan wilayah secara umum adalah bagaimana menyejajarkan perkembangan wilayah di Kecamatan Pagerbarang dan Kedung Banteng agar sejajar dengan kecamatan lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan secara merata, ada kendala yang dirasa cukup mengganggu. Hal tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam pengembangan infrastruktur wilayah antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk itu perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

✓ **Kesehatan Lingkungan Hidup**

Kesehatan lingkungan hidup menjadi factor utama yang mempengaruhi kehidupan social masyarakat. Lingkungan sehat tidak hanya berkaitan erat dengan derajat kesehatan masyarakat namun juga mempengaruhi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini manfaat lingkungan hidup dan manfaat ekonomi cenderung saling mengeliminasi. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya maka fungsi lingkungan hidup selalu dikorbankan.

Sebagai wilayah yang didominasi perekonomian berada pada sektor industri pengolahan dan pertanian, potensi ancaman degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Tegal sudah mulai nyata. Limbah industri yang toksik yang tidak tertangani dapat memperburuk

kondisi lingkungan sekitar atau bisa menimbulkan kerusakan pada ekosistem lingkungan yang lain bahkan menimbulkan penyakit pada makhluk hidup yang terpapar. Sebagai contoh di Kecamatan Adiwerna sumber air tanah sudah mulai tercemari. Limbah industri keluarga, misalnya pewarna pakaian yang merupakan mata pencaharian pokok masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Adiwerna dibuang lewat saluran air selokan langsung tanpa melalui proses pengolahan. Hal ini diperparah dengan limbah pengolahan logam dan peleburan aki yang berada tak jauh dari pemukiman warga telah mencemari ratusan sumur warga desa Pesarean. Air yang semula jernih tiba-tiba berubah warna dan beraroma tidak sedap, berminyak dan terasa lengket.

Selain pencemaran air, isu penurunan kesehatan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal juga dipengaruhi oleh pencemaran udara yang cukup *massive*. Aktifitas pencemaran udara yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah turunnya kualitas udara akibat pengolahan batu gamping atau kapur di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari. Aktifitas pembakaran dan debu ukuran mikro dalam pengolahan batu gamping banyak berterbangan di udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA.

Dari beberapa masalah kesehatan lingkungan di atas, jika tidak ditangani dan diantisipasi ke depan, maka skala kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya akan semakin luas. Oleh karena itu tantangan pembangunan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan hidup.

e. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

✓ Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani.

Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, pemerintah dihadapkan pada suatu dilema yang cukup menghambat. Disaat prinsip kehati-hatian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kualitas layanan publik harus tetap dijaga. Perubahan sistem kerja ASN di era *new normal* sangat dinamis. Jika terdapat kasus covid-19 terkonfirmasi di lingkungan kerja ASN, maka dalam seketika sistem kerja berubah dari "*work in office*" menjadi "*work at home*". Kondisi ini menuntut *mindset* budaya kerja yang masih menitikberatkan pada hierarki pangkat dan jabatan harus mulai diubah. Dalam keadaan yang normal, di mana seluruh situasi dan kondisi dapat berjalan tanpa hambatan, pelaksanaan program kerja berdasarkan hierarki ini masih dapat diterima, akan tetapi dalam situasi pandemi covid-19 ini, maka pegawai dari semua eselon wajib berani mengambil inisiatif sebagai konsekuensi berkurangnya intensitas bertemu secara langsung di lapangan atau ruangan kerja di kantor. Setiap pegawai dituntut untuk berpikir sebagai manajer, ikut memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Alih-alih mempertahankan tingkat kepangkatan atau strata kelembagaan, sebaiknya tata kerja lebih dikembangkan berbasis jejaring atau

kerjasama antar instansi dan pejabat. Ada beberapa tantangan terkait pemerintahan di *era new normal* antara lain:

- Dalam pola pikir yang baru, semua pegawai harus mulai mengembangkan kecakapan berpikir lateral dan keberanian membuat eksperimen dengan tolok ukur resiko dan manfaat yang jelas;
- Budaya kerja yang masih menitikberatkan pada hierarki pangkat dan jabatan adalah pola pikir yang harus mulai diubah. Semua pegawai dari semua eselon wajib berani mengambil inisiatif dan tata kerja lebih dikembangkan berbasis jejaring atau kerjasama antar instansi dan pejabat;
- Mendorong *mindset* lama ke *mindset* baru bagi ASN;
- Mendukung kesiapan ASN dalam membangun budaya berteknologi; dan
- Dalam keadaan di mana kondisi moneter dunia saat ini sedang berada dalam ancaman resesi, maka perlu dilakukan sejumlah langkah pengamanan, khususnya terhadap neraca anggaran pemerintah daerah. Secara teknis, hal tersebut dapat berupa pembatasan kegiatan yang berbiaya besar, pengurangan pos-pos yang semula bersifat melibatkan pengumpulan massa, dan sebagainya;
- Mendorong semangat kepemimpinan yang berbudaya.

Secara keseluruhan masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal. Setidaknya terdapat delapan aspek yang perlu dibenahi yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, *e-goverment* sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal.

Selain beberapa penjelasan sebelumnya, fungsi pemerintahan juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan hidup masyarakatnya. Keamanan dan kenyamanan tersebut terutama berkaitan dengan bencana alam dan sosial. Sebagai daerah yang berada pada jalur rawan bencana, Kabupaten Tegal perlu melakukan upaya-upaya antisipatif dalam kesiapsiagaan bencana (mitigasi) di samping kesiapan penanggulangan kedaruratan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Peta rawan bencana Kabupaten Tegal dapat digambarkan sebagai wilayah rawan bencana banjir di kawasan Pantura (Suradadi, Warureja, Kramat), rawan bencana kekeringan (Suradadi, Warureja, Kedungbanteng), rawan bencana kebakaran lahan (Pagerbarang, Balapulung, Lebaksu), rawan bencana puting beliung (Kedungbanteng, Tarub), serta rawan bencana tanah bergerak dan tanah longsor (Pangkah, Bojong, Bumijawa). Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, tantangan kebencanaan kedepan ialah bagaimana menciptakan Desa Tangguh Bencana dan penyediaan *early warning system* cuaca dan iklim.

Selain bencana alam, isu bencana sosial juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi saat ini, baik internasional, nasional, hingga lokal, stabilitas dan keamanan wilayah banyak dirusak melalui penyebaran berita *hoax* yang dapat memunculkan gesekan dimasyarakat. Kondisi masyarakat yang sedang tertekan secara ekonomi semakin mempermudah mereka mempercayai informasi tanpa diperiksa dahulu kebenarannya. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka pelaksanaan pembangunan yang sudah sangat berat akibat pandemi covid-19 ini akan semakin sulit mencapai tujuannya.

✓ **Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi**

Saat ini Kabupaten Tegal sedang menghadapi dua peristiwa besar yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu masa revolusi industri 4.0 dan pandemi covid-19. Kedua peristiwa tersebut mempunyai dampak yang luas pada kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal. Perubahan itu termasuk perubahan budaya, perubahan cara kerja dan perubahan berpemerintahan (*era new normal*). Selain itu, sebagaimana RPJPD tahap IV yang menekankan pada **Akselerasi Proses Inovasi**. Untuk menjawab tantangan tersebut maka optimalisasi kelitbangan dan difusi teknologi informasi mempunyai peranan penting.

Aktifitas kelitbangan harus mampu memberikan nilai tambah inovasi pada tiap aktifitas pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sasaran pembangunan khususnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi local. Akselerasi inovasi dan perubahan tersebut dapat diantisipasi melalui serangkaian proses kelitbangan yang relevan yang menghasilkan produk-produk baru, proses baru, dan jasa baru, yang kemudian akhirnya dapat dijadikan strategi utama dalam merespon perubahan dan tantangan yang ada. Oleh karena itu hasil kelitbang bisa memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Beberapa kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dengan mendasarkan hasil kelitbangan. Selain itu berbagai kebijakan pemerintah juga dapat dievaluasi melalui aktifitas kelitbangan, sehingga kebijakan-kebijakan yang kurang relevan saat ini bisa digantikan dengan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

Namun tantangan kelitbangan saat ini di Kabupaten ialah kita belum memiliki SDM Kelitbangan yang mumpuni, sementara tantangan kelitbangan kedepan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan kedepan ialah dengan melakukan kerjasama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses *transfer knowledge*, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada.

Peranan teknologi informasi dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan pandemi covid-19 ialah bisa menjadi katalis sekaligus akselerator. Difusi teknologi informasi harus masuk di berbagai aktifitas sosial ekonomi dan pemerintahan. Adanya difusi tersebut menjadi satu prasyarat utama Kabupaten Tegal bisa melaju ke arah *smart city*. Adapun *smart city* terdiri dari 6 (enam) pilar yaitu *Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy*, dan *Smart Environment*. Namun dengan melihat kondisi saat ini maka tantangan TI untuk menuju *smart city* yang paling relevan direspon saat ini ialah berkaitan dengan pengembangan dan penguatan *Smart Economy* dan *Smart Governance*. Untuk itu infrastruktur TI harus disiapkan berkaitan dengan pengembangan dan penguatan tersebut.

✓ **Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah**

Kerjasama dan kondusifitas menjadi salah satu pintu keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Berbagai aktifitas pembangunan dapat mencapai tujuannya jika dilakukan atas dasar kerjasama yang efektif dari seluruh *stakeholder*. Apalagi dalam perspektif pembangunan yang sifatnya kawasan maka kerjasama yang baik mutlak menjadi kunci keberhasilannya. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan kawasan Bregasmalang, kabupaten tegal beserta seluruh kabupaten/kota yang tergabung didalamnya harus bekerjasama secara simultan, efektif dan sinergi satu dengan yang

lainnya. Ada beberapa isu pembangunan Kabupaten Tegal terkait pembangunan kawasan bregasmalang yang memerlukan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitarnya antara lain Kerjasama SPAM Bregas, Kerjasama TPA Regional, Kerjasama Kawasan Industri Brebes. Dengan adanya kerjasama yang efektif dan sinergi yang baik diharapkan seluruh kabupaten/kota dalam kawasan Bregasmalang dapat mendapatkan manfaat tumbuhnya ekonomi wilayah.

Selain kerjasama yang baik, untuk mewujudkan tujuan pembangunan maka harus didukung oleh kondusifitas wilayah yang baik. Berbagai potensi gangguan keamanan harus dapat diantisipasi dan dimimalisir agar tidak mengganggu jalannya pembangunan yang ada. Apalagi dengan pesatnya teknologi informasi yang ada, maka arus informasi semakin cepat menyebar tanpa terfilter terlebih dahulu. Informasi-informasi *hoax* menjadi ancaman yang mampu menggerakkan masa dan menciptakan gangguan keamanan wilayah. Apalagi dalam beberapa tahun kedepan akan dilaksanakan pesta demokrasi Pilkada dan Pilpres yang berdasarkan pengalaman yang telah lalu mampu menimbulkan perpecahan dan friksi dimasyarakat yang menjurus pada disintegrasi bangsa. Untuk itu kondusifitas wilayah menjadi isu penting kedepan.

✓ **Mitigasi Risiko Pembangunan**

Setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan suatu pembangunan tidak tercapai. Untuk itu setiap aktifitas pembangunan khususnya yang prioritas harus dapat mengenali risiko yang mungkin dihadapi serta mencari alternatif atas suatu risiko yang mungkin muncul. Jika suatu risiko atas suatu aktivitas pembangun dapat dinilai dan diantisipasi secara dini maka dapat mengakselerasi tingkat capaian target suatu pembangunan. Untuk itu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko menjadi kunci penting. Oleh karena itu mitigasi risiko pembangunan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi isu umum pembangunan di Kabupaten Tegal

4.2.5. Keterkaitan Isu Strategis KLHS, Isu Strategis dan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Global

Isu strategis Kabupaten Tegal didesain dengan mempertimbangkan isu strategis provinsi, nasional dan global. Dengan demikian, pelaksanaan isu strategis dalam penjabaran visi dan misi Kabupaten Tegal tidak terlepas dari isu-isu strategis yang ada. Berikut disajikan keterkaitan isu strategis dan isu strategis provinsi dan isu strategis nasional dan isu strategis global.

Tabel 4. 8
Keterkaitan Isu Strategis KLHS, Isu Strategis dan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Global

No	Tujuan TPB	ISU KLHS	Isu Strategis	Isu Provinsi	Isu Nasional (RPJMN)
				(RPJMD)	
1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 (TPB 1): Mengurangi Kemiskinan terutama dibidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial	Penekanan laju kemiskinan dan pengangguran, Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran	Penanggulangan Kemiskinan	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 (TPB 8): Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak terutama di bidang pengurangan terbuka dan setengah penganggur			Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 (TPB 2): Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan terutama di bidang ketersediaan pangan utama (beras dan asupan kalori diatas 1.400 kkal/kap/hari)	Kualitas derajat kesehatan masyarakat	Pemulihan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan; Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan TIK	Kedaulatan pangan dan energi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Tujuan TPB	ISU KLHS	Isu Strategis	Isu Provinsi (RPJMD)	Isu Nasional (RPJMN)
4	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 (TPB 8): Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak terutama pertumbuhan PDRB	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha		Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 (TPB 8): Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak terutama peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara			Kedaulatan pangan dan energi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 (TPB 2): Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan terutama dibidang penurunan AKI, AKB dan AKABA	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia; dan Kualitas derajat kesehatan masyarakat	Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Tujuan TPB	ISU KLHS	Isu Strategis	Isu Provinsi	Isu Nasional (RPJMN)
				(RPJMD)	
7	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 (TPB 2): Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan terutama di bidang peningkatan APK dan APM PAUD, SD, dan SMP				Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 (TPB 2): Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan terutama penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Kualitas derajat kesehatan masyarakat; dan Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 15 (TPB 15): Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem daratan terutama konservasi lahan kritis				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
10	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12 (TPB 12): Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan terutama dalam pengelolaan sampah	Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA	Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
11	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6 (TPB 6): Menjamin ketersediaan serta			Kesenjangan Wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

No	Tujuan TPB	ISU KLHS	Isu Strategis	Isu Provinsi (RPJMD)	Isu Nasional (RPJMN)
	pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua terutama untuk akses air minum layak dan sanitasi				Ekonomi dan Pelayanan Dasar
12	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9 (TPB 9): membangun infrastruktur yg tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi terutama jalan dalam kondisi baik				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
13	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10 (TPB 10): mengurangi kesenjangan intra dan antar negara terutama pengembangan desa mandiri				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
14	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 (TPB 11): menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan terutama penyediaan rumah layak huni serta penanganan mitigasi dan tanggap darurat bencana		Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan TIK: Sub-Isu Bencana Alam dan Sosial dan Kerjasama dan Kondusivitas	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
15	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13 (TPB 13): mengatasi langkah segera	Keamanan dan ketertiban wilayah; dan Keberlanjutan pembangunan			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No	Tujuan TPB	ISU KLHS	Isu Strategis	Isu Provinsi (RPJMD)	Isu Nasional (RPJMN)
	untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya terutama penanganan mitigasi dan tanggap darurat bencana	dengan daya dukung lingkungan dan SDA			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
16	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 (TPB 16): perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh terutama reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintah yang baik			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
17	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 17 (TPB 17): mengurangi kesenjangan intra dan antar negara terutama peningkatan pertumbuhan ekspor produk non migas		Bukan Kewenangan Kabupaten		

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.2.6. Keterkaitan ISU Tahap IV RPJPD dan Isu Strategis Kabupaten Tegal 2019-2024

Tabel 4. 9

Keterkaitan Isu Strategis KLHS, Isu Strategis dan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Global

No	Isu RPJPD Tahap IV	Isu Strategis Kabupaten Tegal
1	Pembangunan Gender	Kualitas Sumber Daya Manusia
2	Ekonomi Kreatif Masyarakat	Pemulihan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan
3	Kelestarian Lingkungan Hidup	Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
4	Kesenjangan Kesejahteraan, Infrastruktur Dasar dan Kualitas SDM	Kualitas Sumber Daya Manusia
		Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran
		Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
5	Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbang dan Teknologi Informasi
6	Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah	

Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Tegal, 2021

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 tidak mengubah visi dan misi kepala daerah didalamnya. Perubahan RPJMD lebih pada penyesuaian rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target indikatornya hingga program/kegiatan akibat perubahan regulasi dan asumsi ekonomi dampak covid-19, dengan tetap merujuk pada Visi Misi RPJMD sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul,
Berbudaya dan Berakhlak Mulia**
“mbangun berkah, gawe bungah”

Arti Visi:

- | | |
|-----------------|---|
| Sejahtera | : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan. |
| Mandiri | : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan berkelanjutan. |
| Unggul | : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimistis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi. |
| Berbudaya | : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal. |
| Berakhlak mulia | : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan. |

5.2. Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, *downsizing* dan *rightsizing*, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan *e-government* sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan *backlog* rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki makna pembangunan ekonomi rakyat yang kokoh dan maju yaitu adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkeadilan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Dalam konsep ekonomi, artinya masyarakat mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). *Pro-Growth Strategy* juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. *Pro-growth* selanjutnya diharapkan dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor* dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan gradasi lingkungan (*Environmental Gradient*). Penerapan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi tinggi yaitu pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ini memiliki makna peningkatan kualitas hidup manusia untuk membentuk karakter dan kualitas sumberdaya manusia yang pintar, sehat, sejahtera dan berakhlak mulia melalui penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata dan bermutu. Instrumen dasar dalam penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah perangkat ampuh dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, serta harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan lintas sektor. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi tujuan utama dalam implementasi Misi keempat ini, dengan sasaran antara lain peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan pembangunan gender serta peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan atas hasil pengkajian kelitbangan untuk dapat diterapkan dalam rangka mendukung program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi pada upaya peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja/organisasi merupakan satu kesatuan kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Misi ini memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

Perumusan visi dan misi merupakan penjabaran atau implementasi isu-isu strategis yang telah disusun di Bab IV. Keterkaitan antara visi dan misi dengan isu strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Isu Strategis

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”		
No	Misi	Isu Strategis
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani rakyat.	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi.
2	Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
3	Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Pemulihan Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”		
No	Misi	Isu Strategis
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kualitas Sumber Daya Manusia
		Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbang dan Teknologi Informasi
		Menekan Laju Angka Kemiskinan dan Pengangguran
5	Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbang dan Teknologi Informasi

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

5.3. Program Unggulan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;

Mewujudkan sebuah pelayanan yang mudah cepat dan transparan kepada masyarakat, melalui pelayanan satu pintu, diwujudkan dengan menciptakan satu pusat sistem layanan terpadu, merupakan muara dari berbagai sistem pelayanan yang tersebar di berbagai instansi dalam sebuah *mall* pelayanan publik berbasis digital.

2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;

Sebuah program penumbuhan wirausaha dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan hanya membuat barang dan jasa tetapi mengembangkan keterampilan menciptakan transaksi untuk membuat nilai tambah, dan menumbuhkan kemampuan menakar peluang bisnis beserta dengan risikonya, dengan mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang serta Pengembangan Wilayah;

Strategi yang akan dilakukan adalah pemeliharaan jalan antara lain dengan cara pendayagunaan mandor jalan dan unit reaksi cepat penambalan jalan untuk mengantisipasi secara cepat setiap kerusakan jalan yang terjadi dan pemilihan jenis konstruksi jalan yang lebih tahan terhadap kerusakan serta mulai melengkapi jalan dengan konstruksi drainase. Selain itu dilakukan pengembangan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kawasan yang progresif. Strategi yang dilakukan adalah mempersiapkan prasyarat *project-project* dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang.

4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;

Upaya pengurangan luas Kawasan kumuh merupakan upaya kolaboratif baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa dan para pihak swasta. Upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan Bantuan RTLH melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Upaya Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa RTLH. Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten adalah dengan Program Kampung Ora Kumuh. Diharapkan Dana Desa dari Pemerintah Desa juga fokus pada penanganan kumuh. Dengan upaya kolaborasi ini kawasan kumuh akan tuntas ditangani dengan cepat.

5. Penanganan Dampak Covid-19;

Penanganan dampak covid-19 tetap perlu dilakukan dalam periode perencanaan pasca tahun 2020. Penanganan dampak covid-19 dilakukan terhadap penanganan lanjutan covid-19 (kuratif) berupa upaya penjaminan kualitas kesehatan publik. Penanganan lanjutan covid-19 dilakukan dengan menjamin setiap penduduk Tegal yang terinfeksi atau berpotensi terinfeksi. Pemulihan sosial pasca covid-19 dilakukan melalui upaya pemenuhan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*). Sementara pemulihan ekonomi pasca covid-19 dilakukan melalui kebijakan khususnya terkait stimulus ekonomi masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan. Transformasi ekonomi wilayah potensial melalui digitalisasi ekonomi, kolaborasi ekonomi hingga inovasi implementasi budaya kerja baru (*new normal*).

6. Penataan Kota Slawi;

Secara jaringan infrastruktur transportasi, Kota Slawi terdiri dari 9 koridor utama. Penataan Kota Slawi selain harus memberikan makna pada kota (*city branding*), juga harus memperhatikan 3 aspek yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Aspek Aksesibilitas meliputi jaringan jalan, jaringan, drainase dan prasarana sarana utilitas (PSU). Aspek Amenitas meliputi kelengkapan jalan seperti jalur, rabu, parking area dan taman untuk menambah keindahan dan identitas sebuah koridor. Sedangkan aspek atraksi meliputi kelengkapan dan atraksi serta aktifitas manusia untuk mengisi ruang – ruang yang telah disediakan. Pada RPJMD perubahan penataan kota slawi akan fokus pada 2 Koridor, yaitu koridor 1 dan 2 yang lebih diwarnai sebagai pusat pemerintah dan ruang publik. Diharapkan dengan Penataan Kota Slawi akan dapat memberikan kemanfaatan pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga Kota Slawi.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, penanganan sampah dilakukan dengan penyediaan armada, TPS, TPS Terpadu dan Pembuatan TPA baru dengan sistem *sanitary landfill*, sedangkan pengurangan sampah dilakukan dengan upaya pengurangan sampah difokuskan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan untuk mengurangi beban sampah yang dibuang ke TPA. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik dan anorganik melalui pendekatan 3R yaitu *reduse*, *reuse* dan *recycle* adalah hal yang harus segera dilaksanakan agar dilakukan dengan

penyelenggaraan, salah satunya dengan Program Desa Merdeka Sampah. Program Desa Merdeka sampah merupakan program yang didesain sebagai bantuan keuangan kepada desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga akan mengurangi timbulan sampah.

8. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Dalam penguatan integritas, seluruh aspek perlu dikuatkan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. penekanan dalam penguatan integritas pemerintahan adalah bagaimana bisa *smart* dalam berpemerintahan. Penguatan seluruh aspek integritas harus bermuatan *smart*. Oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi salah satu prasyarat akselerasi penguatan integritas ini antara lain dalam penerapan *e-office* dalam aspek tata kerja pemerintahan.

9. Pembinaan Olahraga, Pemberdayaan Pemuda dan Pelestarian Budaya;

Pembinaan olahraga diarahkan dengan memberikan sebesar besarnya kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka mewujudkan cita-citanya menjadi olahragawan yang andal dan profesional, yang bisa menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Tegal. Program ini dilakukan dengan upaya memberikan perhatian kepada olahragawan serta memberikan insentif dan penghargaan kepada atlet yang layak sesuai prestasinya. Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk mengoptimalkan kepeloporan pemuda dan pengembangan pemuda kreatif. Sementara pelestarian budaya diarahkan pada upaya pelestarian, pemajuan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, permainan tradisional, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa dan ritus, hingga cagar budaya.

5.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif melayani Rakyat.

Misi I memiliki tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP Kabupaten.
- c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya Opini BPK.

d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sarannya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

2. Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.

Misi II memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap dengan indikator sarannya yaitu Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap dan Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak.
- b. Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan dengan indikator sarannya Rasio Konektivitas Kabupaten.
- c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sarannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Misi III memiliki tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dengan indikator sasaran Laju PDRB sektor Pertanian.
- b. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Industri.
- c. Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dengan indikator sasaran Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.
- d. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Perdagangan.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Misi IV memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :
 - 1) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan.
 - 3) Meningkatnya Pemberdayaan Gender dengan indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

- 4) Meningkatkan Produktivitas Pemuda dengan indikator sasaran Wirausaha Muda Berbasis Kinerja Bisnis.
 - b. Menekan Laju Kemiskinan. Tujuan ini dapat diukur dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin. Tujuan ini memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :
 - 1) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
 - 2) Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.
- 5. Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal.**

Misi V memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Tujuan ini dapat diukur dengan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakan yang dapat diukur dengan indikator Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan.
- b. Menurunnya Resiko Bencana. Tujuan ini dapat diukur dengan Indeks Risiko Bencana. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana dengan indikator sasaran Indeks Kapasitas Daerah.
- c. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan sasaran indikator Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan.

Berikut ini perbandingan tujuan, sasaran, indikator, dan target RPJMD Kabupaten Tegal Sebelum dan Setelah Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Perbandingan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Sebelum dan Setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
I	MISI I: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat					
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
1.1			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
					Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
1.2			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten
1.3			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini BPK
1.4			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
II	MISI II: Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan					
2	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan			Indeks Williamson	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan
2.1			Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Wilayah Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap
					Persentase Infrastruktur Permukiman Layak	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak
2.2			Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	-			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-
3.1			Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	-	Indeks Kualitas Air	-
					Indeks Kualitas Udara	-

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
III	MISI III: Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan					
4	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
4.1			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)	-
4.2			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Laju PDRB Sektor Industri
4.3			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten
4.4			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan
IV	MISI IV: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
5	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
					Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	-
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5.1			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Indeks Pendidikan
5.2			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
5.3			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) -
			Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	-	Total Fertility Rate (TFR)	-
5.4			Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Kota Layak Pemuda Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis
6	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Menekan Laju Kemiskinan			Indeks Gini	Persentase Penduduk Miskin
6.1			Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Indek Kedalaman Kemiskinan
						Indek Keparahan Kemiskinan
6.2			Menurunnya Pengangguran	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
V	Misi V: Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal					
7	Mewujudkan Kerukunan Hidup dalam Masyarakat	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan
7.1			Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan
8	Menurunnya Resiko Bencana	Menurunnya Resiko Bencana			Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
8.1			Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks Kapasitas Daerah
9	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			Indeks Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
9.1			Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (<i>Tangible dan Intangible</i>) Dilestarikan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018-2021 dan Realisasi Tahun 2020

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET	REALISASI	TARGET
							2020	2020	2021
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	45,25	50,1	63,69	64,19
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	75,00	78,61	78,21	80,46
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,58	2,75	2,20	2,3
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	60,10	63,61	61,36	65,61
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	70,00	72,12	72,24	74,24

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET	REALISASI	TARGET
							2020	2020	2021
2	Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah		Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,260	0,258	N/A	0,254
			Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Wilayah Mantap	Persen; Tahunan	70,17	77,73	80,04	82,12
				Persentase Infrastruktur Permukiman Layak	Persen; Tahunan	71,45	80,09	82,12	83,78
			Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Perhubungan	Skor; Tahunan	67,11	74,23	75,20	75,25
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	53,78	64,28	55,05	55,13
			Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	Indeks Kualitas Air	Persen; Tahunan	61,00	72,00	31.11	31,15
				Indeks Kualitas Udara	Persen; Tahunan	77,00	77,50	84.99	85,12
3	Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,40	5,48	-1,46	3,20

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET	REALISASI	TARGET
							2020	2020	2021
			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	1,35	0,5	2,18	2,33
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen; Tahunan	121,38	122,02	N/A	122,66
			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; tahunan	6,02	6,09	-0,46	1,45
				Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah; Tahunan	487	587	137
			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan		Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah; Tahunan	1.052.487	1.152.587	466.531
				Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	5,95	6,02	-4,2	2,56
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	66,44	68,03	68,39	68,73	
			Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,05	69,30	69,25	69,70	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,76	86,85	86,85	86,94	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET	REALISASI	TARGET
							2020	2020	2021
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,70	6,75	6,98	7,13
				Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,34	12,37	12,67	12,82
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,14	71,19	71,60	69,73
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,05	69,30	69,25	69,70
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,76	86,85	71,40	86,94
			Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio; Tahunan	2,47	2,44	2,24	2,40
			Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Kota Layak Pemuda	Level; Tahunan	proses	proses	Utama	Utama
				Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi	Kali; Tahunan	5,00	6,00	N/A	7,00
		Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan		Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,311	0,307	0,307	0,303
			Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,94	7,01	8,14	8,41
			Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	8,45	7,45	9,82	10,42

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET	REALISASI	TARGET
							2020	2020	2021
5	Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal	Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahunan	80,66	82,66	82,66	84,66
			Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahunan	80,66	82,66	82,66	84,66
		Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	184,41	181,98	183,00	177,71
			Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,58	0,62	0,60	0,72
		Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Indeks Kebudayaan	Indeks; tahunan	60,00	62,34	N/A	64,73
			Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (<i>Tangible dan Intangible</i>) Dilestarikan	Indeks; tahunan	21,40	22,50	N/A	24,50

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 5.4.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
I	MISI I: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat								
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	63,69	64,69	65,19	65,69	65,69
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	78,21	82,15	84,83	86,2	86,2
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,2	2,4	2,5	2,6	2,6
1.2		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	61,36	65,68	68,08	70,61	70,61
1.3		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.4		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	72,12	76,42	78,31	80,56	80,56

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
II	MISI II: Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan								
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	70,17	77,73	80,04	82,12	82,12
2.1		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	71,45	80,09	82,12	83,78	83,78
			Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Persen; Tahunan	67,11	74,23	79,41	84,80	84,80
2.2		Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,20	75,30	75,40	75,50	75,50
2.3		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,05	55,33	55,48	55,83	55,83
III	MISI III : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan								
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	-1,46	3,59-5,20	4,20-5,35	4,85-5,45	4,85-5,45
3.1		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2,18	2,75	2,87	3,23	3,23

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
3.2		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; tahunan	-0,46	1,56	2,74	3,78	3,78
3.3		Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Jumlah; Tahunan	1,85	1,99	2,23	2,33	2,33
3.4		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	-4,20	2,75	3,23	4,56	4,56
IV	MISI IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,39	69,43	70,13	70,83	70,83
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85	87,03	87,12	87,21	87,21
4.1		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,546	0,556	0,558	0,560	0,560
4.2		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	0,794	0,801	0,802	0,804	0,804
4.3		Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,25	70,16	70,8	71,4	71,4
4.4		Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	100	300	400	500	500

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
5	Menekan Laju Kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,14	8,45-8,12	8,35-8,05	8,25-7,89	8,25-7,89
5.1		Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	1,08	0,98	0,82	0,78	0,78
			Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,19	0,15	0,12	0,10	0,10
5.2		Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	9,82	10,21-9,42	10,12-9,14	9,85-8,85	9,85-8,85
V	Misi V: Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal								
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	80,00	86,00	88,00	90,00	90,00
6.1		Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahunan	82,66	86,66	88,66	90,66	90,66
7	Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	183	177,71	174,62	172,12	172,12
7.1		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,60	0,72	0,80	0,89	0,89

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; tahunan	44,74	55,27	63,16	73,69	73,69
8.1		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	Indeks; tahunan	57,50	65,50	70,50	75,50	75,50

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, rumusan strategi ditentukan melalui:

- 1) Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
- 2) Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 3) Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
- 4) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
- 5) Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
- 6) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka
Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia					
No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi
I	MISI I: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat				
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK
				Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		
II	MISI II: Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan				
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap	Percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan
			Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
III	MISI III: Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan				
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Pemulihan dan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal berkelanjutan
			Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	
			Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata	

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia					
No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi
				terhadap PAD Kabupaten	
			Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	
IV	MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi				
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Penguatan kualitas dan Produktifitas SDM serta Pengarusutamaan gender
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
			Meningkatnya Produktifitas Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis	
5	Menekan laju kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Penguatan ekonomi warga miskin dan rentan miskin dampak covid-19
			Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Perluasan Lapangan Kerja dan Transformasi Tenaga Kerja
V	MISI V: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal				
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Presentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Penguatan kondusivitas wilayah, kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana serta pelestarian budaya dan kearifan lokal
7	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah	
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Adapun penjelasan masing-masing rumusan strategi pembangunan jangka menengah diatas adalah sebagai berikut:

6. 1.1 Rumusan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Adapun penjelasan masing-masing rumusan strategi pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan integritas adalah salah satu hal yang sangat penting. Upaya penguatan integritas dimaksud antara lain melalui penanaman pemahaman bahwa mewujudkan proses layanan yang cepat, mudah dan transparan serta bebas dari KKN saat ini bukan lagi sebagai sekadar kewajiban namun telah menjelma menjadi suatu kebutuhan bagi suatu unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi layanan.

Dalam penguatan integritas, seluruh aspek perlu dikuatkan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Aspek Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat dan cepat. Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Aspek Penguatan Akuntabilitas merupakan perwujudan tanggung jawab instansi dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Terakhir adalah Aspek Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi.

Yang menjadi penekanan dalam penguatan integritas pemerintahan adalah bagaimana bisa *smart* dalam berpemerintahan. Penguatan seluruh aspek integritas harus bermuatan *Smart*. Oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi salah satu prasyarat akselerasi penguatan integritas ini.

b. Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan

Strategi ini menekankan pada 2 (dua) komponen utama yaitu komponen percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah; dan komponen peningkatan kesehatan lingkungan hidup. Adapun penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut:

b. 1. Percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah menjadi satu kesatuan yang mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan suatu wilayah. Pemerataan infrastruktur dasar difokuskan pada pemerataan pelayanan lingkungan permukiman yang layak, pemenuhan sarana air bersih serta jaringan jalan sebagai salah satu penunjang aksesibilitas wilayah. Aksesibilitas wilayah yang dimaksud adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas yang baik akan melancarkan interaksi masyarakat antar wilayah sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya. Oleh karena itu pemerataan aksesibilitas menekankan pada dua

hal penting yaitu layanan jaringan jalan dan transportasi (perhubungan) yang baik secara menyeluruh hingga pelosok pedesaan.

b. 2. Peningkatan kesehatan lingkungan hidup

Kesehatan lingkungan menjadi kunci kelancaran berbagai aktifitas pembangunan. Peningkatan kesehatan lingkungan di Kabupaten Tegal menekankan pada 3 (tiga) aspek yaitu Aspek jenis pencemaran, stakeholders, dan kewilayahan. Aspek jenis pencemaran menekankan pada upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara, maupun tanah atau lingkungan permukiman baik itu berupa limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas. Aspek stakeholder menekankan pada penciptaan keterlibatan masyarakat dalam menyetatkan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah. Dalam mewujudkan **Semboyan Merdeka Sampah**, partisipasi dan persepsi/paradigma masyarakat mulai dibangun dari yang sebelumnya sebatas mengumpulkan sampah menjadi proaktif dalam pengelolaan sampah hulu-hilir baik melalui manajemen bank sampah atau melalui konsep 3 R (*Reuse, Recycle, Reduce*) sebelum menuju Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS). Adapun aspek kewilayahan menekankan pada prioritas wilayah yang perlu segera ditangani baik itu yang sifatnya administratif maupun kawasan.

c. Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal Berkelanjutan

Strategi ini menekankan pada 4 (empat) komponen utama dengan tetap menekankan pada aspek keberlanjutan yaitu komponen Percepatan transformasi dan hilirisasi sektor pertanian dan ketahanan pangan **berkelanjutan**; Pemulihan dan hilirisasi Industri Lokal dan Iklim investasi **berkelanjutan**; Pemulihan dan pengembangan Kolaborasi usaha pariwisata era tatanan baru **berkelanjutan**; dan Percepatan transformasi Perdagangan, Koperasi dan UKM Era tatanan baru **berkelanjutan**. Adapun penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut:

c. 1. Percepatan Transformasi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Meskipun pertanian menjadi salah satu sektor basis di Kabupaten Tegal, namun sektor ini belum mampu memberikan kesejahteraan pada petani. Oleh karena itu transformasi dan hilirisasi sektor pertanian menjadi poin penting. Aspek transformasi menekankan pada efektifitas dan produktivitas pertanian. Transformasi ini tidak hanya sebatas mekanisasi (alat) namun juga cara/teknik yang produktif dan ramah lingkungan. Petani harus mengenal dan mampu menggunakan teknologi serta mampu berinovasi dan mencoba sesuatu teknik bertani yang baru yang lebih produktif dan ramah lingkungan. Mekanisasi dilakukan dengan fasilitasi alat dan mesin pertanian, serta pelatihan dan pendampingannya. Sementara penumbuhkembangan teknologi dan inovasi dilakukan dengan menjalankan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang adaptif dan menjawab kebutuhan di lapangan. Setelah itu paradigma pertanian akan digeser agar bisa menguasai hulu-hilir. Karena itu penguasaan pengolahan dan pemasaran produk pertanian menjadi faktor penting dalam strategi hilirisasi sektor pertanian. Disisi yang lain, sektor pertanian sangat terkait dengan kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan. Permasalahan kemandirian pangan secara umum ialah bahwa masyarakat terlalu tergantung

pada suatu jenis pangan tertentu dan kurang variatif. Oleh karena itu strategi kemandirian pangan ditekankan selain pada peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan diversifikasi pangan masyarakat.

c. 2. Pemulihan dan Hilirisasi Industri Lokal dan Iklim Investasi Berkelanjutan

Industri merupakan sektor yang cukup parah terdampak covid-19 di Kabupaten Tegal. Dengan pemulihan sektor industri yang merupakan sektor basis dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Tegal. Pemulihan dilakukan melalui serangkaian fasilitasi / stimulus usaha industri dari industri skala kecil hingga industri skala besar. Sedangkan untuk pengembangannya dilakukan melalui hilirisasi industri. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan baku sekaligus untuk menarik investasi. Sasaran utamanya adalah industri pengolahan logam agar bisa menghasilkan produk yang lebih variatif dan bernilai tambah. Untuk itu fasilitasi kerjasama yang berbentuk *supply-demand* dengan perusahaan besar perlu diwujudkan. Selain industri konvensional, industri kreatif juga menjadi penekanan strategi ini. Berbagai bentuk industri kreatif bisa dikembangkan. Untuk itu fasilitasi pelatihan, permodalan, dan iklim usaha yang kondusif menjadi poin yang penting. Dalam pemulihan dan pengembangan industri tersebut yang tetap diperhatikan ialah terkait aspek keberlanjutannya yang memuat aspek lingkungan dan kontinuitas usaha industri lokal.

c. 3. Pemulihan dan Pengembangan Kolaborasi Usaha Pariwisata Era Tatanan Baru Berkelanjutan

Dalam kondisi sektor pariwisata yang sedang tertekan akibat covid-19, maka berbagai usaha pariwisata perlu dipulihkan. Pariwisata bisa pulih jika kunjungan wisatawan mulai normal bahkan meningkat. Untuk itu daya tarik wisata harus ditingkatkan melalui pengembangan obyek dan destinasi wisata yang telah ada maupun penciptaan obyek dan destinasi wisata baru, pemasaran daya tarik obyek dan destinasi wisata yang lebih efektif, serta mengembangkan pariwisata kreatif. Untuk memperkuat produktifitas sektor pariwisata, diperlukan juga kolaborasi pariwisata dengan seni-budaya dan sejarah lokal. Untuk menyakinkan wisatawan akan keamanan obyek dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tegal, maka protokol kesehatan kedepan harus menjadi bagian wajib setiap aktifitas usaha pariwisata. Selain itu konsep pengembangan pariwisata berbasis lingkungan perlu jadi dasar dan dikembangkan sehingga dapat berjalan seiringan antara peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

c. 4. Percepatan Transformasi Perdagangan, Koperasi dan UKM Era Tatanan Baru Berkelanjutan

Sektor Perdagangan dan UKM merupakan sektor yang cukup terimbas dampak covid-19 di Kabupaten Tegal. Dengan segala pembatasan sosial yang ada telah merusak jejaring *supply* dan *demand* seluruh aktifitas perdagangan dan UKM di Kabupaten Tegal. Rusaknya jejaring tersebutlah yang kemudian merusak rantai produksi hingga pemasaran pada setiap aktifitas perdagangan dan UKM yang ada. Untuk menyambung kembali jejaring *supply-demand* tersebut, transformasi ekonomi digital pada aktifitas perdagangan dan UKM mutlak menjadi suatu kebutuhan. Setiap pelaku perdagangan dan UKM harus bergegas bertransformasi masuk ke digitalisasi perdagangan dan UKM. Untuk itu Proses transisi transformasi tersebut harus didukung dan diakselerasi oleh sistem yang tepat. Disamping itu

fungsi koperasi dalam mendukung transformasi khususnya aspek permodalan harus lebih efektif dan proaktif. Sistem koperasi tidak boleh lagi sama dengan kondisi sebelumnya. Proses pengajuan modal harus bisa diakses dari mana saja dengan syarat yang lebih mudah namun valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain transformasi diatas, pelaku perdagangan dan UKM juga harus terbiasa dalam menerapkan protokol kesehatan disetiap aktifitasnya. Setidaknya untuk meyakinkan konsumen akan keamanan bertransaksi agar geliat ekonomi perdagangan dan UKM mulai tumbuh kembali secara bertahap dan berkelanjutan.

d. Penguatan Kualitas dan Produktifitas SDM serta Pengarusutamaan gender

Strategi ini menekankan pada 4 (empat) komponen utama yaitu komponen Penguatan mutu dan transformasi pendidikan era tatanan baru; Penguatan mutu dan transformasi layanan kesehatan era tatanan baru; Percepatan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup keluarga berencana; dan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Wirausaha Muda dan Olahraga. Adapun penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut:

d. 1. Penguatan Mutu dan Transformasi Pendidikan Era Tatanan Baru

Pendidikan menjadi kunci kualitas SDM suatu wilayah. Semakin tinggi mutu layanan pendidikan maka akan menghasilkan SDM yang berkualitas pula. Di era pandemi ini, pendidikan mendapatkan tantangan yang begitu besar. Dinamika buka tutup sekolah menjadi wajar di Kabupaten Tegal. Sementara belajar jarak jauh juga belum ditemukan konsep dan bentuk yang paling efektif dan ideal. Kondisi ini membuat mutu layanan pendidikan menjadi tidak terjamin. Untuk itu pendidikan juga harus mampu beradaptasi dan bertransformasi dengan kondisi saat ini. Tidak boleh hanya pembelajaran tatap muka saja yang bisa dijamin kualitasnya, namun jika sewaktu-waktu diperlukan pembelajaran jarak-jauh tetap dijamin kualitasnya. Untuk itu harus dikonsep format pendidikan yang non- tatap muka yang lebih efektif dan berkualitas. Belajar jarak jauh memang masih banyak kekurangan di sana-sini. Namun untukantisipasi kejadian serupa di masa depan, maka harus ada evaluasi untuk menemukan format dan konsep belajar yang paling efektif diberbagai keadaan. Setidaknya dalam aspek ini harus menekankan pada beberapa poin penting, yaitu:

- 1) Tenaga pendidikan dan kependidikan harus kompeten dan mampu menjamin mutu pendidikan baik sistem tatap muka maupun non-tatap muka;
- 2) Protokol kesehatan akan menjadi syarat berlangsungnya belajar mengajar dalam situasi apapun;
- 3) Seluruh peserta didik harus dapat mengakses layanan pendidikan khususnya dalam format non-tatap muka;
- 4) Sistem pembelajaran non-tatap muka harus menjadi salah satu opsi konsep yang baku, bukan hanya konsep sementara;
- 5) Sarana dan prasarana pendukung transformasi pendidikan harus terpenuhi secara bertahap.

d. 2. Penguatan Mutu dan Transformasi Layanan Kesehatan Era Tatanan Baru

Pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal dapat mencerminkan kesiapan sektor kesehatan dalam mengahapi wabah. Dengan jumlah kasus covid-19 yang bisa dibilang masih bertambah, menunjukkan bahwa sektor kesehatan di Kabupaten Tegal masih kurang optimal dalam menghadapi pandemi. Bahkan fasilitas kesehatan telah menjadi salah satu tempat infeksi covid-19. Untuk itu mutu

standard pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Protokol kesehatan harus wajib diberlakukan disetiap layanan fasilitas kesehatan. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan. Hal yang tidak kalah penting, transformasi layanan digital kesehatan harus mulai dikembangkan di Kabupaten Tegal. Saat era digital sekarang ini, komunikasi dan konsultasi pasien dan dokter tidak boleh terbatas oleh ruang bahkan waktu. Untuk itu layanan kesehatan online harus menjadi salah satu penekanan strategi sektor kesehatan kedepan.

d. 3. Percepatan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Berencana

Ukuran keadilan saat ini mulai berkembang dan mengarah berdasarkan gender. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan di Kabupaten Tegal. Untuk mendukung akselerasi pengarusutamaan gender, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender. Untuk melaksanakan hal tersebut maka ada beberapa hal yang perlu dikuatkan terlebih dahulu antara lain ketersediaan data perencanaan yang terpilah gender dan kelembagaan yang khususnya meliputi organisasi hingga sumberdaya manusianya. Jika data dan kelembagaan sudah kuat maka kebijakan pangarusutamaan gender dapat terlaksana dengan baik hingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mengingat masih terbatasnya sumberdaya yang ada, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan gender yang berkualitas maka tingkat kelahiran penduduk khususnya keluarga miskin perlu dikendalikan,

d. 4. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Wirausaha Muda dan Olahraga

Dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak tenaga kerja asal Kabupaten Tegal di PHK. Bisa menjadi suatu keniscayaan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja pasca krisis tidak akan sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK. Dengan kata lain *supply* tenaga kerja jauh melebihi *demand* tenaga kerja itu sendiri. Adapun persaingan lapangan kerja kedepan hampir dipastikan semakin tinggi. Oleh karena itu alternatif sektor lapangan kerja informal harus lebih dikuatkan. Masyarakat harus mampu melangkah untuk menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Berbagai peluang wirausaha harus mampu diambil sesuai dengan kondisi dan potensinya masing-masing. Untuk itu langkah awal yang harus dilakukan ialah untuk memunculkan minat wirausaha masyarakat terutama yang terdampak covid-19. Jika minat wirausaha sudah berkembang kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi dan pendampingan mulai dari permodalan, pelatihan dan pemasaran. Wirausaha yang terbentuk harus tetap didampingi hingga produktif dan mandiri. Selain itu sebagai pendukung penciptaan produktifitas pemuda dan kesehatan masyarakat, maka pembudayaan olah raga di masyarakat perlu diwujudkan dengan dukungan berbagai sarana dan prasarana pendukungnya

e. Penguatan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin Dampak Covid-19

Pandemi covid-19 telah memunculkan kemiskinan baru. Dalam kondisi yang serba sulit ini, cukup sulit untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal. Untuk itu strategi kemiskinan saat ini ialah untuk menekan laju kemiskinan yang cukup cepat. Berbagai kebijakan harus fokus pada pemberian layanan kebutuhan

hidup dasar warga miskin sekaligus menjaga warga rentan miskin agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Oleh karena itu berbagai layanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial harus mampu meng-*cover* tidak hanya warga miskin namun juga warga rentan miskin hingga keadaan normal kembali. Bersamaan itu pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan rentan miskin juga perlu ditingkatkan. Sebagai pendukung gotong royong ekonomi perlu dibudayakan. Setidaknya hingga sikap saling bantu ekonomi khususnya kepada keluarga miskin muncul dan berkembang dikehidupan masyarakat.

f. Perluasan Lapangan Kerja dan Transformasi Tenaga Kerja

Tantangan tenaga kerja akibat pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal cukup besar. Kedepan lanskap dan standar kualifikasi tenaga kerja mulai berubah. Untuk itu transformasi tenaga kerja di Kabupaten Tegal harus mampu menciptakan tenaga kerja dengan kualifikasi yang tinggi. Tenaga kerja harus dibentuk agar memiliki 10 *soft skill* era Revolusi Industri Generasi Keempat dan memiliki *hard skill* penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi menjadi sangat penting mengingat lapangan usaha yang berkembang di era pascapandemi adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Selain sentuhan pada sisi *supply*, strategi kebijakan tenaga kerja juga harus menyentuh sisi *demand*. Dalam artian sisi lapangan kerja perlu diperluas. Berbagai kerjasama perluasan lapangan kerja harus menjadi prioritas dari sisi *demand*. Daya tarik dan kemudahan investasi yang mampu membuka lapangan kerja perlu ditingkatkan. Untuk itu strategi kebijakannya harus menekankan pada aspek proaktif untuk menarik investasi masuk sebesar-besarnya khususnya investasi yang dapat membuka lapangan kerja.

g. Penguatan Kondusivitas Wilayah, Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Serta Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal

Strategi ini menekankan pada 3 (tiga) komponen utama yaitu Penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat; Penguatan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana; dan Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal. Adapun penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut:

g. 1. Penguatan Kerukunan dan Toleransi di Masyarakat

Untuk menjamin kelancaran berbagai aktifitas pembangunan di Kabupaten Tegal, kondusivitas wilayah harus terjaga. Kerukunan dan toleransi dimasyarakat perlu dikuatkan. Di era pandemi maupun pascapandemi, potensi gesekan dimasyarakat bisa cukup nyata. Pembatasan aktifitas tidak terkecuali aktifitas keagamaan dapat memunculkan friksi dimasyarakat. Selain itu dengan melemahnya ekonomi masyarakat, banyaknya pengangguran, serta terbatasnya lapangan pekerjaan dapat meningkatkan kriminalitas. Untuk itu penguatan kelembagaan dan komunikasi FKUB perlu diperkuat. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan dimasyarakat secara umum, seluruh stakeholder harus terlibat didalamnya. Bentuk kesadaran bahwa keamanan dan kenyamanan hidup merupakan tanggung jawab bersama harus mulai muncul di masyarakat. Berbagai potensi gangguan keamanan harus dapat dideteksi secara dini agar tidak berkembang. Untuk itu perlu didukung sarana, prasarana dan SDM pendukung keamanan yang cukup dan kuat.

g. 2. Penguatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Tegal mempunyai potensi bencana yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Risiko kebakaran, tanah longsong, banjir, gempa, gunung merapi, kekeringan menjadi jenis bencana yang cukup serius jika tidak diantisipasi. Mitigasi risiko bencana Kabupaten Tegal harus dilakukan sedini mungkin. Bersamaan dengan itu kualitas penanggulangan bencana harus ditingkatkan. Respon dan penanganan saat terjadi bencana maupun pasca bencana juga harus ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu peran serta masyarakat dibarengi dengan peningkatan kapasitas relawan terlatih dalam penyelenggaraan kebencanaan menjadi salah satu kunci penting keberhasilan selain kerjasama yang baik antara BPNB, BPBD Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Sekitar dengan mengoptimalkan ases sumberdaya yang ada. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung menjadi syarat utama yang mendukung kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal.

g. 3. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Kabupaten Tegal mempunyai kekayaan budaya dan kearifan lokal yang harus dilestarikan. Tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, kekayaan budaya dan kearifan lokal juga mampu membendung pengaruh buruk budaya luar yang semakin cepat masuk di era globalisasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Untuk itu budaya dan kearifan lokal harus dikenalkan dan diajarkan sejak dini mulai dari lingkungan sekolah. Berbagai even-even seni budaya lokal perlu diselenggarakan untuk lebih mengenalkan budaya dan kearifan lokal dimasyarakat. Untuk itu konsep pelestarian budaya dan kearifan lokal tidak hanya sebatas menyimpan dalam suatu tempat seperti museum, namun lebih dari itu pelestarian budaya dan kearifan lokal harus disimpan dalam setiap diri masyarakat Kabupaten Tegal.

6. 1.2 Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Pembangunan di Kabupaten Tegal didesain melakukan pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) merupakan upaya untuk menjadikan isu-isu pengarusutamaan sebagai perspektif, sebagai cara pandang dan cara bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Program dan kegiatan dalam pengarusutamaan (*mainstreaming*) tidak harus selalu eksplisit memuat nomenklatur isu-isu pengarusutamaan (*mainstreaming*) namun dapat secara implisit mendukung terwujudnya isu-isu pengarusutamaan (*mainstreaming*). Isu-isu pengarusutamaan dalam pembangunan di Kabupaten Tegal yaitu:

a. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) didesain sebagai perspektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender memberi ruang yang cukup bagi konstruksi gender laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, pengawasan dan manfaat dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam bentuk Gender *Analisis Pathway* (GAP), Gender *Budget Statement* (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.

b. Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (*stunting*).

Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/*stunting* yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi konvergensi *stunting* sebagai penjabaran Renstra dan Renja. Perangkat Daerah yang terlibat aktif dalam pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (*stunting*) terutama Dinkes (Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan); Dis Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketahanan Pangan dan Produksi Pangan berkelanjutan); DP3AP2KB (Keluarga Sejahtera); Disdikbud (PAUD); Disperkim (Sanitasi); DLH (Sanitasi); Dispermades (Kebijakan Desa); Bappeda dan Litbang (Aksi Konvergensi *Stunting*) DPUPR (infrastruktur, sanitasi); Dinsos (kemiskinan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial); DKP (perikanan); Disperinaker (perindustrian, tenaga kerja); Disdakop UKM (Perdagangan, koperasi, UMKM).

c. Pengarusutamaan inovasi

Kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan didesain dengan menerapkan dengan inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mendesain inovasi-inovasi sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang diimplementasikan. Agar inovasi yang ditetapkan memiliki daya ungkit dan dampak pembangunan yang memadai, inovasi didesain melalui pemenuhan instrumen yang sesuai dengan kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi daerah. Kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi didesain sebagai upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun pembangunan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas diantaranya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), kependudukan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial. Perspektif pembangunan berkelanjutan mewarnai perencanaan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renja.

e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi

Kelompok inklusi merupakan anggota masyarakat yang memiliki karakteristik khas dan seringkali berada pada posisi yang marjinal dalam pembangunan. Kelompok inklusi ini antara lain difabel, lansia, pemuda, masyarakat miskin/tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain yang masih marjinal. Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah didesain dengan perspektif memuliakan kelompok inklusi dalam membuka ruang akses, peran, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi perspektif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kebijakan, rencana, program urusan-urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Integrasi SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah diterapkan melalui penetapan indikator kinerja SPM sebagai indikator kinerja *outcome* program pembangunan. Komitmen pengarusutamaan SPM diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di dalam Renstra dan Renja.

g. Pengarusutamaan Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko pembangunan merupakan salah satu sistem agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Mitigasi risiko pembangunan merupakan tugas melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Dalam melakukan mitigasi risiko dilakukan identifikasi potensi risiko dalam Register Risiko. Register Risiko merupakan identifikasi potensi risiko yang paling mungkin terjadi atau kebijakan rencana program yang memiliki risiko paling tinggi. Dari Register Risiko disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). RTP disusun dengan memperhatikan Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan RPJMD dijadikan dasar dalam menentukan tahapan dan prioritas secara bertahap yang mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya sebagai suatu rangkaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk itu maka analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan juga menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas pembangunan. Selanjutnya, tema dan arah kebijakan yang telah dirumuskan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya.

Perumusan strategi dan arah kebijakan harus mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Sebagaimana didalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwa perumusan strategi merupakan pemecahan masalah pokok dan arah kebijakan merupakan pemecahan permasalahan penyebab dari suatu masalah pokok, maka keduanya harus punya benang merah yang jelas.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
I	MISI I: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat					
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten		
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK		
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		
II	MISI II: Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan					
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap	Percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup
			Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten		
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
III	MISI III: Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan					
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Pemulihan dan transformasi ekonomi	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan,

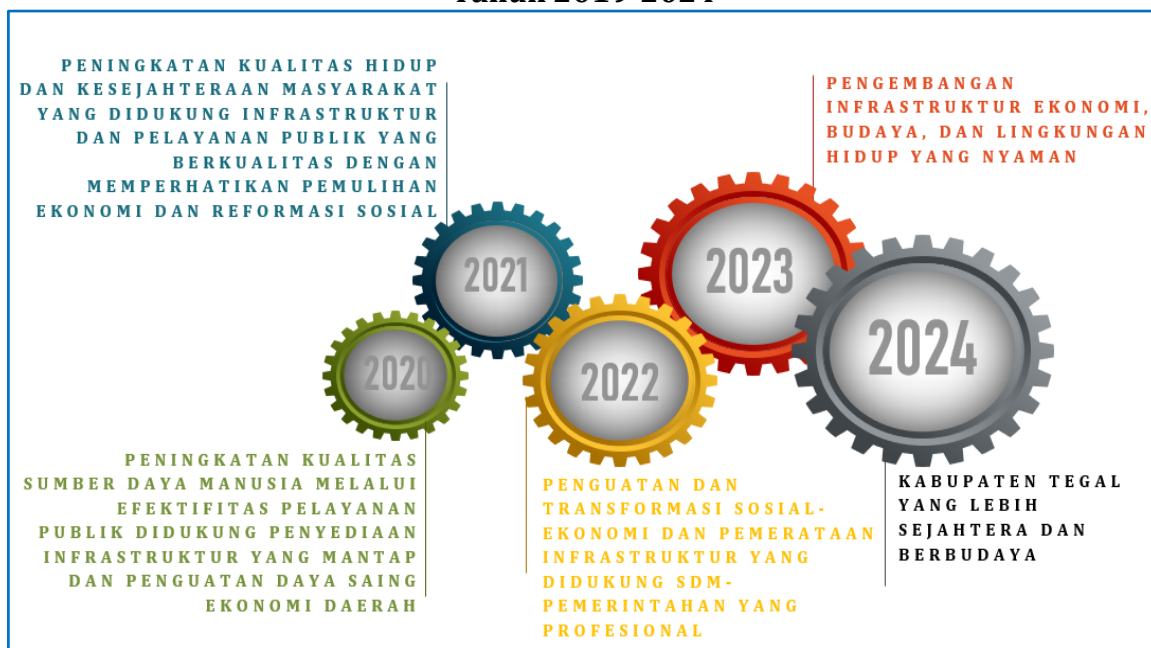
No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
	Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	berbasis sumberdaya lokal Berkelanjutan	industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan
			Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten		
			Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan		
IV	MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi					
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Penguatan kualitas dan Produktifitas SDM serta Pengarusutamaan gender	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender
			Meningkatnya Produktifitas Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis		
5	Menekan laju kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Penguatan ekonomi warga miskin dan rentan miskin dampak covid-19	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
			Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Perluasan Lapangan Kerja dan Transformasi Tenaga Kerja	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja
V	MISI V: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal					
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Presentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Penguatan kondusivitas wilayah, kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana serta pelestarian budaya dan kearifan lokal	Peningkatan kualitas keamanan dan nyaman hidup masyarakat
7	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah		
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan		Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa arah kebijakan harus dapat memecahkan masalah dari suatu masalah pokok, maka perlu disusun suatu tahapan pelaksanaan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Tahapan ini yang kemudian menjadi prioritas RKPD pada tahun berkenaan. Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, maka perlu juga disusun fokus atau tema pembangunan tahunan sebagai dasar menentukan prioritas arah kebijakan tahunan yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 6. 1
Tema Tahunan Pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal
Tahun 2019-2024



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Adapun penjelasan masing-masing tema adalah sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2020)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2020 adalah “**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DIDUKUNG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MANTAP DAN PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH**”. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan difokuskan pada pembangunan pondasi SDM yang berkualitas sebagai dasar. Sebagai penunjangnya maka secara bersamaan kualitas dan efektifitas pelayanan publik juga ditingkatkan tidak terkecuali pemerataan layanan infrastruktur kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu daya saing ekonomi daerah juga dikuatkan terutama potensi ekonomi lokal yang basis maupun yang berpotensi sebagai sektor basis ekonomi kedepan. Berdasarkan hal tersebut maka prioritas kebijakan tahun 2020 antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial
- 2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan
- 5) Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif
- 6) Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2021)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2021 adalah “**PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DENGAN MEMPERHATIKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL**”.

Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan mempunyai empat penekanan yaitu pemulihan, layanan dasar, layanan publik dan transformasi/reformasi sosial. Kebijakan pemulihan diarahkan agar daya beli masyarakat meningkat dan investasi dapat berkembang untuk membuka lapangan kerja. Untuk memperkuat konsumsi / daya beli masyarakat khususnya golongan masyarakat miskin dan rentan miskin maka akselerasi belanja bantuan sosial serta modifikasi belanja perlindungan sosial perlu diperkuat efektifitasnya. Bersamaan ini juga diharapkan masyarakat kelas menengah keatas juga bisa melakukan *recovery*. Untuk memulihkan ekonomi dalam lingkup yang lebih besar, maka arus investasi harus dapat ditarik sebanyak mungkin. Untuk itu kebutuhan infrastruktur dasar dan penggerak investasi harus disiapkan. Layanan dasar perlu diperkuat khususnya kesehatan sebagai langkah preventif, antisipatif dan solutif atas suatu dinamika kasus covid-19 di Kabupaten Tegal.

Kebijakan transformasi / reformasi sosial menekankan pada adaptasi *tatanan baru* pada seluruh aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Untuk itu protokol kesehatan dan implementasi teknologi informasi menjadi poin utama. *Start up* bisnis, wirausaha khususnya yang berkaitan dengan industri kreatif menjadi salah satu ukuran transformasi ekonomi ini. Dan untuk mendukung itu semua perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan publik.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2021 antara lain:

- 1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan
 - b) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - c) Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran
 - d) Difusi produk kelitbang dalam pembangunan yang inovatif
 - e) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - f) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
- 2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b) Penataan ruang kota dan permukiman

- 3) **Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan;** fokus kebijakan pada:
 - a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif **ramah lingkungan**
 - b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan **ramah lingkungan**
 - c) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif **ramah lingkungan**
 - d) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
 - e) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
 - f) Perlindungan Konsumen dan Pengendalian stabilitas harga
 - g) Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital
 - h) Penyehatan dan pengembangan koperasi
 - i) Pemulihan dan pengembangan UMKM
 - 4) **Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru;** fokus kebijakan pada:
 - a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
 - c) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
 - 5) **Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender;** fokus kebijakan pada:
 - a) Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
 - b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - 6) **Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin;** fokus kebijakan pada:
 - a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
 - 7) **Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja;** fokus kebijakan pada:
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja
- c. **Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2022)**

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2022 adalah “**PENGUATAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL - EKONOMI DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR YANG DIDUKUNG SDM-PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL**”. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan difokuskan pada penguatan sosial-ekonomi yang baru pulih akibat dampak covid-19 sekaligus menjadi tindak lanjut dari arah kebijakan tahun sebelumnya. Oleh karena itu berbagai kebijakan tahun 2021 masih mewarnai ditahun 2022 dengan penekanannya pada aspek penguatan. Pembangunan infrastruktur dasar mulai

diakselerasi dan ruang kota mulai ditata dalam kerangka yang berkelanjutan. Untuk mendukung percepatan penguatan transformasi tersebut maka perlu didukung SDM dan tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2022 antara lain:

- 1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan
 - b) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - c) Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran
 - d) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
 - e) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - f) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
- 2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b) Penataan ruang kota dan permukiman
 - c) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
- 3) Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi **ramah lingkungan**; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif **ramah lingkungan**
 - b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan **ramah lingkungan**
 - c) Penguatan dan diversifikasi pangan
 - d) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif **ramah lingkungan**
 - e) Penguatan dan pengembangan destinasi wisata **ramah lingkungan**
 - f) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
 - g) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
 - h) Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital
 - i) Penyehatan dan pengembangan koperasi
 - j) Pemulihan dan pengembangan UMKM
- 4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
 - c) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
- 5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
 - b) Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
 - c) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda

- 6) **Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
 - c) Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat
- 7) **Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2023)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2023 adalah “**PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG NYAMAN**”. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan tahun 2023 diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun skala besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata.

Pembangunan dan pengembangan obyek/destinasi wisata mulai digerakkan khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka eco-tourism menjadi tema pembangunan pariwisata.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2023 antara lain:

- 1) **Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:**
 - a) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - b) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
 - c) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - d) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
- 2) **Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b) Penataan ruang kota dan permukiman
 - c) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
 - d) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
 - e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- 3) **Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi **ramah lingkungan**; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif **ramah lingkungan**

- b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan **ramah lingkungan**
 - c) Penguatan dan diversifikasi pangan
 - d) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif **ramah lingkungan**
 - e) penguatan dan pengembangan destinasi wisata **ramah lingkungan**
 - f) Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
 - g) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
 - h) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
 - i) Pemulihan dan pengembangan UMKM
- 4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:**
- a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b) Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
 - c) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
 - d) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
- 5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:**
- a) Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
 - b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - c) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat
- 6) Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:**
- a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
 - c) Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat
- 7) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:**
- a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
 - c) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja
- 8) Peningkatan kualitas keamanan dan nyaman hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:**
- a) Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
 - b) Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
 - c) Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar

9) Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:

- a) Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
- b) Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2024)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2024 adalah “**KABUPATEN TEGAL YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERBUDAYA**”. Arah kebijakan periode terakhir RPJMD 2019-2024 ini ditujukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat dibandingkan kondisi sebelum periode RPJMD 2019-2024. Kesejahteraan yang dimaksudkan minimal diukur dari kondisi ekonomi masyarakat yang meningkat, lingkungan yang lebih nyaman baik dari aspek lingkungan hidup maupun keamanan lingkungan bermasyarakat, akses layanan infrastruktur dasar yang lebih baik, serta kuatnya benteng budaya dan kearifan lokal.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2024 antara lain:

1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:

- a) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat

2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:

- a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
- b) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
- c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

3) Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi **ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:**

- a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif **ramah lingkungan**
- b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan **ramah lingkungan**
- c) penguatan dan pengembangan destinasi wisata **ramah lingkungan**
- d) Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
- e) Pemulihan dan pengembangan UMKM

4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
- b) Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
- c) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK

5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
- b) Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
- c) Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
- d) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
- e) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat

- 6) Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
- 7) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
- 8) Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
 - b) Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
 - c) Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
- 9) Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
 - b) Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

Adapun rangkuman prioritas arah kebijakan dan fokus kebijakannya yang kemudian dijadikan pedoman penyusunan prioritas RKPD dapat dilihat pada kedua tabel berikut ini:

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Tema/Fokus: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DIDUKUNG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MANTAP DAN PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Tema/Fokus: PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DENGAN MEMPERHATIKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL	Tema/Fokus: PENGUATAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL-EKONOMI DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR YANG DIDUKUNG SDM PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	Tema/Fokus: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG NYAMAN	Tema/Fokus: KABUPATEN TEGAL YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERBUDAYA
Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:
1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial	1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
4. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan	4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru
5. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender
6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin
	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja
			8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat	8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat
			9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 6.4
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Fokus Kebijakan Tahunan RPJMD
Kabupaten Tegal Tahun 2021-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	2021	2022	2023	2024
MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat								
Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan	✓	✓		
				Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja			Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran	✓	✓		
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			Difusi produk kelitbang dalam pembangunan yang inovatif	✓	✓	✓	
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah			Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	✓	✓	✓	
				Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem	✓	✓	✓	
MISI 2: Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan								
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan			Penataan ruang kota dan permukiman	✓	✓	✓	
				Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi			✓	✓
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan		✓	✓	
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan			✓	✓
MISI 3: Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan								
Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Pemulihan dan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local berkelanjutan	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan	✓	✓	✓	✓
				Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan			Penguatan dan diversifikasi pangan		✓	✓	
				Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan	✓	✓	✓	
	Meningkatnya Produktifitas Pariwisata			penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan		✓	✓	✓
				Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata			✓	✓
	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan			Pengembangan SDM pariwisata kreatif	✓	✓	✓	
				Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru	✓	✓	✓	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	2021	2022	2023	2024
				Perlindungan Konsumen dan Pengendalian stabilitas harga	✓			
				Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital	✓	✓		
				Penyehatan dan pengembangan koperasi	✓	✓		
				Pemulihan dan pengembangan UMKM	✓	✓	✓	✓
MISI 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi								
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Penguatan kualitas dan Produktifitas SDM serta Pengarusutamaan gender	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat			Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK			✓	✓
				Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK	✓	✓	✓	✓
				Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru	✓	✓	✓	
		Peningkatan Pelayanan Pengarusutamaan Gender	✓	✓		✓		
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak		✓		✓	
			Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana			✓	✓	
			Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda	✓	✓	✓	✓	
Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat					✓	✓		
Menekan laju kemiskinan	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Penguatan ekonomi warga miskin dan rentan miskin dampak covid-19	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin	✓	✓	✓	✓
				Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin	✓	✓	✓	✓
				Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat		✓	✓	
	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Perluasan Lapangan Kerja dan Transformasi Tenaga Kerja	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	✓	✓	✓	✓
				Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan			✓	✓
				Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja	✓	✓	✓	
MISI 5: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal								
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Penguatan kondusivitas wilayah, kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana serta pelestarian budaya dan kearifan lokal	Peningkatan kualitas keamanan dan nyaman hidup masyarakat	Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama			✓	✓
				Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah			✓	✓
Menurunnya Resiko Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana			Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar				✓
Meningkatkan Pestaerian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatnya Pestaerian dan Pewarisan Kebudayaan	Optimalisasi Pestaerian Budaya dan Kearifan Lokal	Optimalisasi Pestaerian Budaya dan Kearifan Lokal	Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah			✓	✓
				Pestaerian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya			✓	✓

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

6.3. Sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD 2019-2024

Perubahan RPJMD 2019-2024 didesain sebagai respons terhadap penetapan RPJMN 2020-2024. Karena itu dalam RPJMD maupun dokumen perencanaan yang lebih spesifik memuat indikasi kegiatan dan kebijakan strategis dalam Renstra Perangkat Daerah terkait. Berikut disajikan sinkronisasi RPJMN dan rencana indikasi implementasinya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 6.5
Sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2019-2024

RPJMN 2020-2024 (Agenda)	Visi Misi Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab V)	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Misi 3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.	Isu 3. Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan IKM agro (kayu) dan IKM logam	Dinass Perinaker
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Sarpras Pasar	Disdakop UKM
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan OW, Duta Wisata	Disporapar
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pengembangan usaha produktif UMKM (makan Disdakop UKM minum, kerajinan bambu); <i>Start up</i> Wirausaha Muda; <i>Co working space</i> ; Pelatihan <i>market place</i>	Disporapar
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan pangan; Desa Rawan Pangan	Dis Tan dan KP
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Misi 4. Meningkatkan kualitas	Isu 1. Menekan Laju Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Dinsos

RPJMN 2020-2024 (Agenda)	Visi Misi Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab V)	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.	dan Pengangguran	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabsos PMKS, Difabel, anak terlantar, PGOT	Dinsos
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Verval DTKS, pelatihan anak jalanan	Dinsos
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Optimalisasi APBDesa untuk Program Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Permasdes
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi BUMDesa; Pengembangan Kawasan Perdesaan	Dinas Permasdes
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan ketrampilan kerja produktif	Dinas Perinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Job fair	Dinas Perinaker
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Misi 2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.	Isu 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan dan jembatan; Pelebaran jalan dan jembatan; Pemeliharaan jalan dan jembatan;	DPU

RPJMN 2020-2024 (Agenda)	Visi Misi Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab V)	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan gedung pemerintah; Sertifikat Laik Fungsi gedung pemerintah;	Disperkim taru
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang	Disperkim taru
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Misi 2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.	Isu 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan sarpras TPA, TPST, TPS 3R	DLH
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pembangunan RTLH; Penataan Kawasan kumuh	Disperkim taru
				Program Penanggulangan Bencana	Dokumen rencana mitigasi bencana; SOP tanggap darurat bencana; Pelatihan mitigasi bencana; Gladi posko; Sekolah aman bencana; Operasional Tim Reaksi Cepat
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu	Isu 2. Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyelenggaraan KBM, Penyediaan Sarpras Pendidikan; Yuh Sekolah Maning	Disdikbud

RPJMN 2020-2024 (Agenda)	Visi Misi Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab V)	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	pengetahuan dan teknologi.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Vaksinasi covid 19, Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Dinkes
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Penyediaan Alkon; KIE	DP3AP2KB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pemberdayaan Tri Bina (BKB, BKL, BKR); Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera/ UPPKS	DP3AP2KB
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pembinaan organisasi pemuda; Wirausaha Pemuda	Disporapar
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat	Isu 5. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diseminasi informasi publik;	Diskominfo
	Misi 5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal		Program Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan e-government; penyelenggaraan e-office; Pengelolaan Pusat Data	Diskominfo
			Program Pencatatan Sipil	Penatausahaan dokumen adminduk (KTP, KK, Akta-Akta)	Disdukcapil
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sinkronisasi perencanaan Pusat-Daerah-Perangkat Daerah	Bappeda dan Litbang
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penatausahaan keuangan daerah; Pengelolaan Aset Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD

RPJMN 2020-2024 (Agenda)	Visi Misi Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab V)	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat	Isu 5. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penerimaan CPNS, Diklat CPNS	BKD
	Misi 5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal; Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu; Pendampingan dan asistensi	Inspektora t
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan inovasi teknologi	Bappeda dan Litbang

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sinkronisasi dan implementasi RPJMN ke dalam RPJMD diwadahi sampai level indikasi program. Untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci, diperlukan gambaran hingga ke level indikasi kegiatan dan kebijakan strategis dalam Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian dapat diperoleh informasi sinkronisasi RPJMN-RPJMN-Renstra Perangkat Daerah.

6.4. Sinkronisasi RPJMD dengan SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk itu pemerintah daerah wajib melaksanakan SPM sebagaimana diamanatkan dalam PP no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pelaksanaan SPM dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.6
Sinkronisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan RPJMD 2019-2024

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab	
								2021	2022	2023	2024			
1	Bidang Urusan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	11	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,86	79,87	79,88	79,89	79,9	79,9	DINAS DIKBUD	
		Pendidikan Dasar	12a	Jumlah warga Negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar jenjang SD/MI		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,03	100	100	100	100	100	100	DINAS DIKBUD
			12b	Jumlah warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Jenjang SMP/MTs		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS DIKBUD

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab	
							2021	2022	2023	2024			
		Pendidikan Kesetaraan	13	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,26	97,27	97,28	97,29	97,29	DINAS DIKBUD
2	Bidang Urusan Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	21	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	22	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	23	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024		
		Pelayanan kesehatan balita	24	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		73,70	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	25	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		38,90	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	26	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		15,40	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	27	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		33,60	77,00	56,00	57,00	58,00	58,00	DINAS KESEHATAN

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024		
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	28	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	29	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	210	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	211	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,10	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	DINAS KESEHATAN

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024		
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	212	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,50	95,00	95,00	98,00	98,00	98,00	DINAS KESEHATAN
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	31	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	63,32	63,32	65,55	67,78	70,00	DPU
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	32	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	94,37	95,17	95,57	95,97	96,37	96,37	DPU
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	41	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	100	100	100	100	DINAS PERKIMTAH

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab	
							2021	2022	2023	2024			
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	42	Jumlah Warga Negara yang terkena rekolasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni									
5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	51	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	83,00	86,00	87,00	88,00	90,00	90,00	SATPOL PP
		Pelayanan informasi rawan bencana	52	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79	82	88	90	100	100	SATPOL PP
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	53	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan		Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan	65	68,25	71,66	75,25	79,01	79,01	BPBD

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024		
		terhadap bencana		pengecehan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		bencana yang mempeloleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana							
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	54	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,38	1,45	1,52	1,6	1,68	1,68	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	55	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22,26	23,37	24,54	25,77	27,06	27,06	BPBD
6	Bidang Urusan Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang	56	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas	29,39	34,61	62,62	81,15	100	100	DINAS SOSIAL

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab	
							2021	2022	2023	2024			
		disabilitas di luar panti		memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	57	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	58	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									
		Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	59	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social di luar panti									
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	510	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	97,99	98,75	99,21	100,00	100,00	100		DINAS SOSIAL

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

6.5. Sinkronisasi RPJMD dengan TPB/SDG's/KLHS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut NO ONE LEFT BEHIND. Kebijakan TPB diamanatkan dalam Perpres No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan yang menjadi substansi utama kajian KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Rekomendasi KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memuat beberapa hal antara lain: rehabilitasi kawasan pesisir dan DAS; pengelolaan limbah B3; pengendalian alih fungsi lahan; upaya konservasi air (defisit air), upaya perbaikan lingkungan pada kawasan rawan bencana. Rekomendasi KLHS tersebut menjadi salah satu acuan utama Perangkat Daerah dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Adapun kebijakan tindak lanjut rekomendasi KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.7

Tindaklanjut Rekomendasi KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No	Rekomendasi KLHS	Tindaklanjut RPJMD dan Renstra
1	Konservasi Kawasan Pesisir	Dilaksanakan melalui penanaman mangrove di kawasan pesisir dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan mangrove pesisir
2	Upaya Konservasi Air (defisit air)	Dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati seperti: konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, penanaman pohon pada daerah lahan kritis.
3	Konservasi DAS	Dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati seperti : konservasi daerah aliran sungai, pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan DAS, penanaman pohon pada daerah lahan kritis, perlindungan sempadan sungai
4	Pengelolaan Limbah B3	<i>Clean Up</i> Lahan Terkontaminasi B3, Kerjasama dengan BPPT dalam pengelolaan Limbah B3.
5	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang
6	Upaya Perbaikan Lingkungan pada Kawasan Rawan Bencana	Penanaman Pohon di Daerah Longsor, Normalisasi Sungai, Perbaikan Drainase, dan penguatan kapasitas mitigasi bencana

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 sebagaimana terdapat pada RAD SDG's Kabupaten Tegal maka target kinerja program RPJMD dalam pencapaian tujuan TPB/SDG's dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.8
Sinkronisasi RPJMD 2019-2024 dengan TPB/SDG's

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
1	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	32,44	49,35	66,25	83,15	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	29,39	34,61	62,62	81,15	100,00	100	DINAS SOSIAL

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	97,99	98,75	99,21	100,00	100,00	100	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISPERMASDES
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	21,58	22,32	21,79	21,89	22	22	DINAS P3AP2KB
2	Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan,	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	1.964.378	1.964.378	2.003.862	2.023.900	2.044.139	2.044.139	DKPP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
	mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan		Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	13.608.184	13.608.184	13.881.708	14.020.525	14.160.730	14.160.730	DKPP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	2.730.262	2.743.913	2.764.493	2.792.138	2.825.643	2.825.643	DKPP
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	145.642.227	146.698.838	148.291.680	150.431.397	153.024.735	153.024.735	DKPP
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	5.478.639	5.484.118	5.492.344	5.503.329	5.517.087	5.517.087	DKPP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	131.189.142	131.320.332	131.517.312	131.780.347	132.109.798	132.109.798	DKPP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi daging (kg)	11.284.734	11.397.581	11.511.557	11.626.673	11.742.939	11.742.939	DINAS TAN KP
			Produksi Telur (kg.)	10.760.493	10.868.098	10.976.779	11.086.547	11.197.412	11.197.412	DINAS TAN KP
			Produksi Susu (kg.)	604.664	610.711	616.818	622.986	629.216	629.216	DINAS TANKP
			Persentase Penanganan Organisme	89,80	89,85	89,90	89,93	90,00	90,00	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Pengganggu Tanaman (OPT)							
			Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	63,00	64,00	65,00	67,00	70,00	70,00	DINAS TAN KP
			Luas Lahan Pertanian Organik	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	DINAS TAN KP
			Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	62,72	62,72	62,98	63,24	63,50	63,50	DINAS TAN KP
			Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	15,51	15,51	16,98	19,45	22,01	22,01	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanaman	1,52	1,58	1,62	1,66	1,70	1,70	DINAS TAN KP
			Akseibilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	2,60	3,00	3,34	3,70	4,11	4,11	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Luas Lahan Sawah Lestari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	DINAS TAN KP
			Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	0,00	1,00	1,5	2,00	2,5	2,5	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	31,37	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	100	2 Jenis	100	100	100	100	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	0	33	27	20	20	100	DINAS TAN KP
			Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	0,00	2,45	2,51	2,57	2,64	11,94	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	72,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90	76	80	83	85	85	DINAS TANKP
3	Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,092	0,094	0,096	0,098	0,100	0,10	DINAS KESEHATAN
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	88,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,90	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	77,00	56,00	57,00	58,00	58,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,10	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,50	95,00	95,00	98,00	98,00	98,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Cakupan balita stunting	12,50	12,40	12,30	12,20	12,00	12,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	100	100	100	100	100	100	RSUD dr SOESELO
			Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo	78,46 (AA)	88.5 (AA)	82 (AA)	86 (AA)	90 (AA)	90 (AA)	RSUD dr SOESELO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	100	100	100	100	100	100	RSUD SURADADI
			Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi	74,06 (A)	100	76,16 (A)	77,26 (A)	78,36 (A)	78,36 (A)	RSUD SURADADI
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	83,00	86,20	89,60	93,10	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	30	100	36,00	39,00	42,00	42	DINAS KESEHATAN
			Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	95,4	95,5	96	96	96	95,8	DINAS KESEHATAN
4	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,86	79,87	79,88	79,89	79,9	79,9	DINAS DIKBUD
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,26	97,27	97,28	97,29	97,29	DINAS DIKBUD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,03	100	100	100	100	100	DINAS DIKBUD
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS DIKBUD
			Rata-rata Nilai Kelulusan SD	77.47	75	76	77	78	78	DINAS DIKBUD
			Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	70.86	72.11	73.36	74.5	75.75	75.75	DINAS DIKBUD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	DINAS DIKBUD
		PROGRAM PENDIDIK DAN	Rasio Guru Kelas PAUD	23,00	20,00	22,00	15,00	16,00	16,00	DINAS DIKBUD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		TENAGA KEPENDIDIKAN								
			Rasio Guru Kelas TK	3,16	4,00	4,61	5,82	7,03	7,03	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Kelas SD	19:11	1.70	1.40	1.30	1.20	1.20	DINAS DIKBUD
			Guru Mapel PAI	3.00	3.20	2.40	1.90	1.40	1.40	DINAS DIKBUD
			Guru Mapel PJOK	2.90	3.10	2.40	1.90	1.40	1.40	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel SMP	04:38	07:44	20:19	00:11	04:03	04:03	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel Paket A	06:14	00:00	06:14	06:14	06:14	06:14	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel Paket B	22:44	22:44	22:44	22:44	22:44	22:44	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel Paket C	18:14	12:07	18:14	18:11	18:14	18:14	DINAS DIKBUD
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	100	100	100	100	100	100	DINAS DIKBUD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
5	Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	26,84	27,00	28,00	29,00	30,00	30,00	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	20,00	55,00	40,00	50,00	60,00	60,00	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	50,00	22,42	64,00	67,00	70,00	70,00	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR	67,8	68,94	69,14	69,34	69,54	69,54	DINAS P3AP2KB
			Persentase kebutuhan ber-KB	15,27	13,96	14,87	14,67	14,47	14,47	DINAS P3AP2KB

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			yang tidak terpenuhi (unmeet need)							
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,28	2,40	2,24	2,22	2,22	2,22	DINAS P3AP2KB
6	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	58,86	60,10	61,33	62,57	63,80	63,80	DPU
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	63,32	63,32	65,55	67,78	70,00	DPU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	58,42	61,42	61,79	62,15	62,52	62,52	DPU
7	Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua									
8.	Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	78,33	78,33	85	90	95	95	DISPORAPAR

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
	inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua		Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	69,00	148,00	79,00	84,00	89,00	89	DISPORAPAR
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase DTW yang dipromosikan	78,33	78,33	85,00	90,00	95,00	95,00	DISPORAPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	50	100	65	80	95	95,00	DISPORAPAR
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar direhabilitasi	50,00	61,54	65,38	76,92	88,46	88,46	DINAS DAGKOP UKM
			Persentase pasar e-ritribusi	7,69	26,92	46,15	65,38	84,62	84,62	DINAS DAGKOP UKM

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase Sarana dan Prasaran Pendistribusian yang terkelola dengan baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS DAGKOP UKM
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS DAGKOP UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Laju Nilai Ekspor	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS DAGKOP UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi bermitra	1,04	2,34	3,64	4,94	6,23	6,23	Disdagkop UMKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	2,63	3,68	4,21	4,73	5,26	5,26	DINAS DAGKOP UKM

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kumulatif; IKU OPD	35000,00	240133,00	160000,00	161600,00	310000,00	631600
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,073	0,109	0,135	0,161	0,187	0,187	DINAS PORAPAR
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,067	0,069	0,071	0,073	0,076	0,076	DINAS PORAPAR
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100	100	DISPERINAKER
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	37.990,000	39.438,000	40.737,000	42.410,000	44.326,000	44.326,000	DISPERINAKER

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	3,70	4,60	5,50	6,40	6,70	6,70	DISPERINAKEP
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	17,82	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DISPERINAKEP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	0,00	28,57	42,86	57,14	71,43	71,43	DINAS PMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	DINAS PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu	100	79,00	100,00	100,00	100,00	100	DINAS PMPTSP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan	61,28	64,28	67,28	70,28	73,28	73,28	DINAS PMPTSP
9	Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	65,00	72,50	72,50	73,44	87,50	87,50	BAPPEDA DAN LITBANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	0,3	10	60	91,11	100	100	DPU
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	76,88	78,00	79,12	80,24	81,36	81,36	DPU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Rasio bangunan yang memiliki IMB	6,50	7,49	8,01	8,57	9,15	9,15	DPU
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	81,11	82,50	84,00	85,50	87,50	87,50	DPU
			Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	88,05	89,50	91,00	92,00	93,50	93,50	DPU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	79,93	87	88	89	90	90	DPU
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	55,23	60,23	65,23	70,23	80,23	80,23	DISPERMASDES
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	60,00	60,00	70,00	80,00	100,00	100,00	DISPERINAKER
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISPERINAKER

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	DISPERINAKER
10.	Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Adiwerna	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76	4,76	KECAMATAN ADIWERNA
			Persentase desa Maju Kecamatan Adiwerna	9,52	9,52	9,52	14,29	14,29	14,29	KECAMATAN ADIWERNA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	0,00	0,00	5,00	9,52	9,52	9,52	KECAMATAN BALAPULANG
			Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	5,00	5,00	9,52	9,52	15,00	15,00	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	12,00	12,00	0,12	0,18	0,18	0,18	KECAMATAN BOJONG

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase desa maju Kecamatan Bojong	0,29	0,29	0,29	0,35	0,35	0,35	KECAMATAN BOJONG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Bumijawa	0,00	0,00	0,00	5,56	11,11	11,11	KECAMATAN BUMIJAWA
			Persentase desa maju Kecamatan Bumijawa	11,11	11,11	16,67	22,22	37,78	37,78	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhwaru	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN DUKUHTURI
			Persentase desa maju Kecamatan Dukuhwaru	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhturi	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	5,56	KECAMATAN DUKUHWARU
			Persentase desa maju Kecamatan Dukuhturi	5,56	5,56	5,56	11,11	16,67	16,67	KECAMATAN DUKUHWARU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Jatinegara	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	KECAMATAN JATINEGARA
			Persentase desa maju Kecamatan Jatinegara	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN JATINEGARA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
			Persentase desa maju Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Kramat	0,00	0,00	5,26	5,26	5,26	5,26	KECAMATAN KRAMAT
			Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Kramat	16,00	16,00	16,00	26,00	26,00	26,00	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Lebaksiu	7,69	7,69	7,69	7,69	15,38	15,38	KECAMATAN LEBAKSIU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase desa Maju Kecamatan Lebaksiu	15,00	15,00	15,00	23,00	23,00	23,00	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Margasari	8,00	8,00	8,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN MARGASARI
			Persentase desa maju Kecamatan Margasari	46,00	46,00	46,00	54,00	62,00	62,00	KECAMATAN MARGASARI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	KECAMATAN PAGERBARANG
			Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang	8,00	8,00	16,00	24,00	30,00	30,00	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Pangkah	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN PANGKAH
			Persentase desa Maju Kecamatan Pangkah	4,00	4,00	4,00	9,00	9,00	9,00	KECAMATAN PANGKAH

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Slawi	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	40,00	KECAMATAN SLAWI
			Persentase desa maju Kecamatan Slawi	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Suradadi	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	KECAMATAN SURADADI
			Persentase desa maju Kecamatan Suradadi	9,00	9,00	18,00	18,00	18,00	18,00	KECAMATAN SURADADI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Talang	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26	KECAMATAN TALANG
			Persentase desa maju Kecamatan Talang	0,00	0,00	5,26	5,26	0,11	0,11	KECAMATAN TALANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN TARUB

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase desa maju Kecamatan Tarub	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Warureja	0,00	0,00	8,00	8,00	17,00	17,00	KECAMATAN WARUREJA
			Persentase desa/kelurahan Maju Kecamatan Warureja	17,00	17,00	17,00	25,00	33,00	33,00	KECAMATAN WARUREJA
11	Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	100	100	100	100	DINAS PERKIMTAH
			Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	13,06	15,4	17,98	20,79	23,6	23,6	DINAS PERKIMTAH
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	35,47	198,01	45,72	50,48	55,97	55,97	DINAS PERKIMTAH
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU perumahan	83,31	83,90	84,50	85,10	85,70	85,70	DINAS PERKIMTAH
12	Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase penguatan cadangan pangan	26,50	27,00	28,50	30,00	32,50	32,50	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	52,00	DINAS TAN KP
13.	Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai	3,70	3,70	7,41	11,11	14,81	14,81	DLH
			Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1,08	5,77	9,76	16,84	18,60	18,60	DLH

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penanganan Limbah B3	60,00	60,00	62,50	65,00	67,00	67,00	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	94,37	95,17	95,57	95,97	96,37	96,37	DPU
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	47,29	54,69	52,08	54,18	56,28	56,28	DLH
			Persentase Pengurangan Sampah	14,00	15,31	17,92	23,15	29,00	29,00	DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	78,00	80,00	82,00	83,00	85,00	85,00	DPU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
14	Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing	11,11	33,33	55,56	77,78	100,00	100,00	DKPP
15	Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	0	33,33	34,72	37,50	38,89	38,89	DLH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	30,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00	DLH

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
	keanekaragaman hayati	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
16	Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	25,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	DINAS KOMINFO
			Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	16,67	54,17	70,83	85,42	100,00	100,00	DINAS KOMINFO
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00	55,00	65,00	75,00	85,00	85,00	DINAS KOMINFO

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	20,00	25,00	30,00	50,00	80,00	80,00	DINAS KOMINFO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Adiwerna	76,37	77,62	78,87	79,87	80,87	80,87	KECAMATAN ADIWERNA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	79,29	80,54	81,79	82,79	83,79	83,79	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bojong	79,62	80,87	82,12	83,12	84,12	84,12	KECAMATAN BOJONG

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PELAYANAN PUBLIK								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bumijawa	87,53	88,78	90,03	91,03	92,03	92,03	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhwaru	79,37	80,62	81,87	82,87	83,87	83,87	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	77,44	78,69	79,94	80,94	81,94	81,94	KECAMATAN DUKUHWARU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Jatinegara	79,70	80,95	82,20	83,20	84,20	84,20	KECAMATAN JATINEGARA

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kedungbanteng	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00	KECAMATAN KEDUNGABANTENG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kramat	78,98	80,23	81,48	82,48	83,48	83,48	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Lebaksiu	77,25	80,00	81,25	82,25	83,25	83,25	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Margasari	77,40	78,65	79,90	80,90	81,90	81,90	KECAMATAN MARGASARI

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pagerbarang	77,63	78,88	80,13	81,13	82,13	82,13	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pangkah	78,74	79,99	81,24	82,24	83,24	83,24	KECAMATAN PANGKAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Slawi	79,67	80,92	82,17	83,17	84,17	84,17	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Suradadi	79,76	81,01	82,26	83,26	84,26	84,26	KECAMATAN SURADADI

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Talang	73,20	74,45	75,70	76,70	77,70	77,70	KECAMATAN TALANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	80,55	81,80	83,05	84,05	85,05	85,05	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Warureja	77,40	78,65	79,90	80,90	81,90	81,90	KECAMATAN WARUREJA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00	DISDUKCAPIL

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	91,67	92,00	94,00	96,00	98,00	98,00	DISDUKCAPIL
			Perekaman KTP elektronik	99,68	99,72	99,74	99,76	99,80	99,80	DISDUKCAPIL
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	21,80	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	DISDUKCAPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran	93,10	94,00	95,50	96,00	96,50	96,50	DISDUKCAPIL
			Persentase penduduk ber akta kematian	68,54	69,29	70,04	70,79	71,54	71,54	DISDUKCAPIL

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA DAN LITBANG
			Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	75,00	86,00	75,00	80,00	85,00	85,00	BAPPEDA DAN LITBANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	50,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN ADIWERNA
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	35,00	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN BOJONG

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	35,00	50,00	68,00	84,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhwaru	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	50,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN DUKUHWARU
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATINEGARA
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	30,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	35,00	50,00	68,00	89,00	95,00	95,00	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MARGASARI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN PANGKAH

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN SURADADI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN TALANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN WARUREJA

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPKAD
			Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPKAD
			Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	14,09	14,81	15,06	15,15	15,27	15,27	BAPPENDA
			Rasio Piutang Pajak Daerah	66,26	90,00	95,00	98,90	99,10	99,10	BAPPENDA
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	62,50	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	BPKAD
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	91,70	91,00	92,00	92,00	92,00	92,00	INSPEKTORAT

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	INSPEKTORAT
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	39,02	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	16,67	4,20	16,67	16,67	16,67	16,67	INSPEKTORAT
			Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	60,41	60,00	66,66	70,83	75,00	75,00	INSPEKTORAT
			Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	81,25	85,00	85,41	89,58	93,75	93,75	INSPEKTORAT
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	BKD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	87,97	91,50	94,77	95,42	96,08	96,08	BKD
			Persentase jabatan jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	35,76	38,79	41,82	44,85	47,88	47,88	BKD
			Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	110,04	224,96	259,85	288,10	318,87	318,87	BKD
			Rasio pegawai fungsional (%)	9,87	14,40	15,28	15,68	16,23	16,23	BKD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	93,50	92,94	93,26	92,69	93,05	93,05	BKD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	47,49	65,01	70,00	75,01	80,00	80,00	BKD
			Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	33,40103814	37,10259301	40	45,00563698	50	50	BKD
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,79	6,4	8,3	8,49	9,67	9,67	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,01	0.010	0.0120	0.0130	0.0140	0.0140	DINAS P3AP2KB

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80,42	84,66	86,66	88,66	90,66	90,66	BADAN KESBANGPOL
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	85	100	100	100	100	100,00	BADAN KESBANGPOL
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani	97	100	100	100	100	100,00	BADAN KESBANGPOL
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN ADIWERNA

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN BOJONG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru	75	75	80	85	90	90,00	KECAMATAN DUKUHURI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhhuri	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN DUKUHWARU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN JATINEGARA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	81	81	82	83	84	84,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	70	70	75	80	85	85,00	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN MARGASARI

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN PANGKAH
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN SURADADI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN TALANG

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja	82,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	KECAMATAN WARUREJA
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan trantibun yang tertangani	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90	SATPOL PP
			Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	83	86	87	88	90	90	SATPOL PP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79	82	88	90	100	100	SATPOL PP
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65	68,25	71,66	75,25	79,01	79,01	BPBD
			Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	1,38	1,45	1,52	1,6	1,68	1,68	BPBD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22,26	23,37	24,54	25,77	27,06	27,06	BPBD
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
17	Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan									

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

6.6. Sinkronisasi RPJMD dengan amanat Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Provinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregasmalang).

Perubahan RPJMD 2019-2024 didesain sebagai respons terhadap Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Provinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregasmalang). Upaya sinkronisasi RPJMD 2019-2024 terhadap implementasi Perpres dimaksud dapat dicermati dalam tebal berikut.

Tabel 6.9
Sinkronisasi RPJMD 2019-2024 dengan Perpres No. 79 Tahun 2019

PERPRES 79 TAHUN 2019	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Jimat dan Sungai Rambut	Isu 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU
Pengembangan Sumber Air Baku SPAM Perkotaan		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kerjasama dg Perguruan Tinggi untuk Study Potensi Sumber Air Permukaan maupun Air Dalam	Diperkintaru
Pembangunan Bendungan Jatinegara		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Sertifikasi Teknis Kelayakan Teknis oleh Komite Bendungan; Apprasal/Penentuan Harga; Pembebasan lahan; Penganggaran; Lelang	DPU
Optimalisasi Waduk Cacaban			PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN: Pekerjaan Normalisasi Bibir Waduk (P = 880.00 m'); Pekerjaan Pembuatan Dermaga dan Lansekap; Pekerjaan Pembuatan Pujasera; Pekerjaan Pembuatan Gardu Pandang; Pekerjaan Pembuatan Toilet dan Mushola; Pekerjaan Pembuatan Playground dan Landskip	
Pengendalian Banjir Sistem Sungai Cacaban	Isu 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DED (2017) oleh Pemda Tegal; Review DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU

PERPRES 79 TAHUN 2019	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
Pembangunan Sarpras Konservasi SDA Sungai Pemali (Tegal dan Brebes)			DED (2016) oleh Pemda Tegal; Review DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU
Peningkatan Jalan Akses Kaligua - Guci		Program Penyelenggaraan Jalan	Koordinasi lintas sektor	DPU
Peningkatan Jalan Yomani - Guci			DED (2020); Koordinasi Anggaran (2021); Konstruksi (2022)	DPU
Peningkatan Jalan dan Perlengkapan Jalan Ketanggungan - Prupuk			Pelebaran Jalan menjadi 12 meter; Pemasangan Guardriil pada Tepi Saluran Irigasi; Penertiban Bangunan Liar yang berada pada Tanah PSDA	DPU
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah		Program Pengembangan Perumahan	Verivikasi, validasi, rekomendasi, pembangunan	Disperkimtaru
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		
Fasilitasi Pengembangan Industri Klaster Logam	Isu 3. Pemulihan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Revitalisasi Penataan Kawasan; Peremajaan Bangunan; Pengembangan Fasilitas	Disperinaker
Revitalisasi Pasar Adiwerna, Balamoa, Guci, Bumijawa		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembahasan dg Kemendag Bln Februari 2020; Peninjauan Lap oleh Kemendag Bln Februari 2020; Telah mengirimkan Semua Dokumen 2020; Koordinasi dg PPMU Prop Jateng	Disdakop UKM
Pembangunan Pasar Ikan dan Balai Benih Ikan (BBI)		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	FS (2021); DED (2021); LARAP (2021); Dok Lingkungan (2022); Pembebasan Lahan	DKPP

PERPRES 79 TAHUN 2019	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
			(2022); Konstruksi (2023)	
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Koordinasi lintas sektor	DKPP
Pengembangan Pertanian Bawang Putih		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	FS (2022); DED (2022) Dok Lingkungan (2022); Konstruksi (2023)	Dis Tan dan KP

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Perpres Nomor 79 Tahun 2019 didesain sebagai instrumen quick wins untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di Jawa Tengah. Dari 14 project yang berlokasi di Kabupaten Tegal, telah dialirkan indikasi programnya dalam RPJMD dan indikasi kegiatan/kebijakan strategisnya dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah. Dengan demikian implementasi Perpres 79 Tahun 2019 telah menjadi arus utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

6.7. Rencana Aksi Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Covid-19

Perubahan RPJMD 2019-2024 dilakukan antara lain sebagai respons covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi kesehatan, sosial dan ekonomi menjadi agenda pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan diturunkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Berikut disajikan dukungan implementasi program dan kegiatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca covid-19.

Tabel 6.10
Rencana Aksi Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Covid-19

Strategi Penanggulangan Covid-19	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/ Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
Penanganan lanjutan Pasca Covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan; Peningkatan kapasitas tracing dan testing dan vaksin; Peningkatan sarana dan prasana	Dinkes
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam penanganan Covid 19	Dinkes

Strategi Penanggulangan Covid-19	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/ Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemenuhan Alat Pelindung Diri, obat-obatan, & Alat Kesehatan	Dinkes
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Promkes Adaptasi Kebiasaan Baru; Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan covid -19	Dinkes
	Pengelolaan BLUD RSUD Dr. Soeselo	Penyediaan dan pengelolaan Lab. PCR; Penyediaan layanan medis covid -19 dan <i>vaksinasi</i> ; Penyediaan layanan farmasi covid -19; Penyediaan APD	RSUD dr. Soeselo
	Pengelolaan Blud Rsud Suradadi	Penyediaan layanan medis covid -19 dan <i>vaksinasi</i> ; Penyediaan layanan farmasi covid-19; Penyediaan APD	RSUD Suradadi
Pemulihan Sosial Pasca Covid-19	Program Pemberdayaan Sosial	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Dinsos
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabsos PMKS, Difabel, anak terlantar, PGOT ; Jaring Pengaman Sosial (JPS)	Dinsos
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Verval DTKS, pelatihan anak jalanan	Dinsos
	Program Penanganan Bencana	Oeprasional Gugus Tugas Covid-19; Satu Data Penanganan Covid-19	Dinsos
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Optimalisasi APBDesa untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Pasca Covid-19	Dispermasdes
Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pengembangan IKM agro (kayu) dan IKM logam	Disperinaker
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Sarpras Pasar; Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar	Disdakop UKM

Strategi Penanggulangan Covid-19	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/ Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan OW, Duta Wisata; Pengembangan Desa Wisata	Disporapar
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pengembangan usaha produktif UMKM (makan minum, kerajinan bambu); <i>Start up Wirausaha Muda; Co working space; Pelatihan market place</i>	Disdakop UKM
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cadangan pangan; Desa Rawan Pangan	Dis Tan dan KP
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan ketrampilan kerja produktif	Disperinaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	<i>Job fair</i>	Disperinaker
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemberdayaan Tri Bina (BKB, BKL, BKR); Pemberdayaan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera/ UPPKS	DP3AP2KB

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Penanganan pasca covid-19 diprioritaskan pada penanganan lanjutan pasca covid-19, pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial pasca covid-19. Implementasi penanganan pasca covid-19 ini diintegrasikan dengan Renstra masing-masing Perangkat Daerah dan mulai diimplementasikan sejak RKPDP 2021.

6.8. Strategi dan Arah Pengembangan Wilayah

A. Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan. Memperhatikan kondisi geografis wilayah dan kawasan strategis di regional maupun di dalam wilayah Kabupaten Tegal. Kabupaten secara regional telah ditetapkan bagian dari kawasan strategis propinsi Bregasmalang yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang, dimana kawasan ini dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah.

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten serta industri menengah dan besar di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten;
- 2) pengembangan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten;
- 3) pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat;
- 4) pengembangan kawasan minapolitan di bagian utara wilayah Kabupaten;
- 5) pengembangan sistem pelayanan perkotaan didukung infrastruktur wilayah yang terpadu;
- 6) pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian;
- 7) pemantapan pelestarian kawasan lindung;
- 8) pengembangan kawasan pariwisata; dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

B. Pengembangan Struktur Ruang

Berdasarkan rencana pengembangan struktur ruang, secara hirarki sistem perkotaan Kabupaten Tegal telah ditetapkan menjadi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kecamatan Slawi dan Adiwerna, dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu seluruh Ibukota Kecamatan dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat pusat kegiatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan jaringan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA), sistem jaringan prasarana lainnya (SPAM, SPAL, Persampahan).

Strategi pengembangan struktur ruang ini dilakukan melalui Pengembangan sistem perkotaan yang terpadu dan saling bersinergi antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan melalui:

- 1) menyusun dan menetapkan rencana rinci pengembangan sistem pelayanan perkotaan.
- 2) mengoptimalkan fungsi PKL, dan PPK dalam penyediaan ruang bagi sektor informal dan RTH.
- 3) mengembangkan kawasan permukiman dengan menyediakan prasarana dasar dan penyediaan RTH serta pengembangan komunitas dalam permukiman.
- 4) merevitalisasi perdagangan dan jasa dengan penyediaan pasar tradisional bersih yang menampung komoditas lokal.
- 5) menetapkan lingkungan siap bangun guna penyediaan perumahan yang tersebar di PKL, dan PPK.
- 6) Menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan.
- 7) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang menghubungkan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Sedangkan strategi Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian, dilakukan melalui:

- 1) Mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi industri, pertanian dan pariwisata;
- 2) Mengembangkan prasarana telematika, yang lebih luas jangkauan pelayanannya hingga menjangkau daerah terisolir;
- 3) Mengembangkan prasarana pengairan dan pendukungnya;
- 4) Mengembangkan kembali embung-embung/ waduk lapangan;
- 5) Menyediakan prasarana energi pada wilayah pelosok dengan pengembangan mikrohidro; dan
- 6) Mengembangkan prasarana lingkungan dengan mendukung Sistem Penyediaan Air Minum regional dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional.

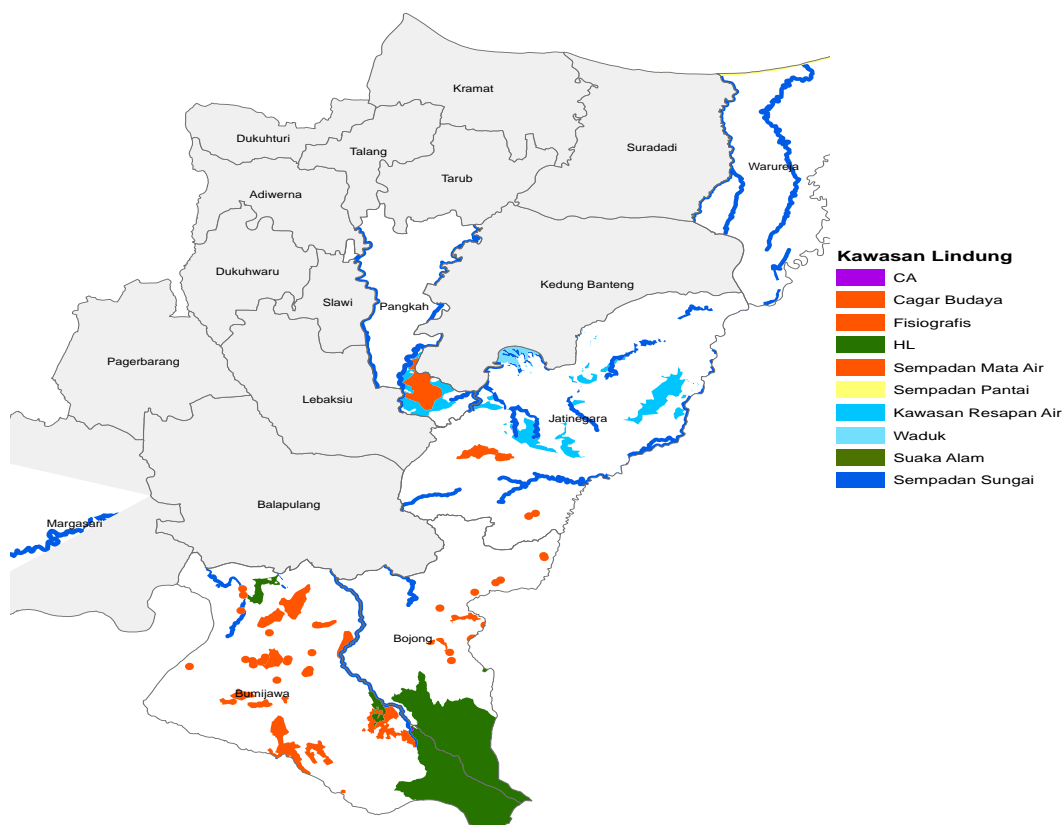
C. Pengembangan Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam serta sumber daya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Di kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari: Kawasan hutan lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan mata air).

Fokus pengembangan kawasan lindung adalah Pemantapan pelestarian kawasan lindung dengan strategi meliputi:

- 1) menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
- 2) mempertahankan fungsi lindung secara ketat dan melarang alih fungsi pada kawasan lindung;
- 3) mengembangkan prasarana dan sarana peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
- 4) mencegah kegiatan penambangan liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan; dan
- 5) mengembalikan rona alam melalui proses reklamasi pada lahan paska penambangan.

Gambar 6.2
Peta Pengembangan Kawasan Lindung



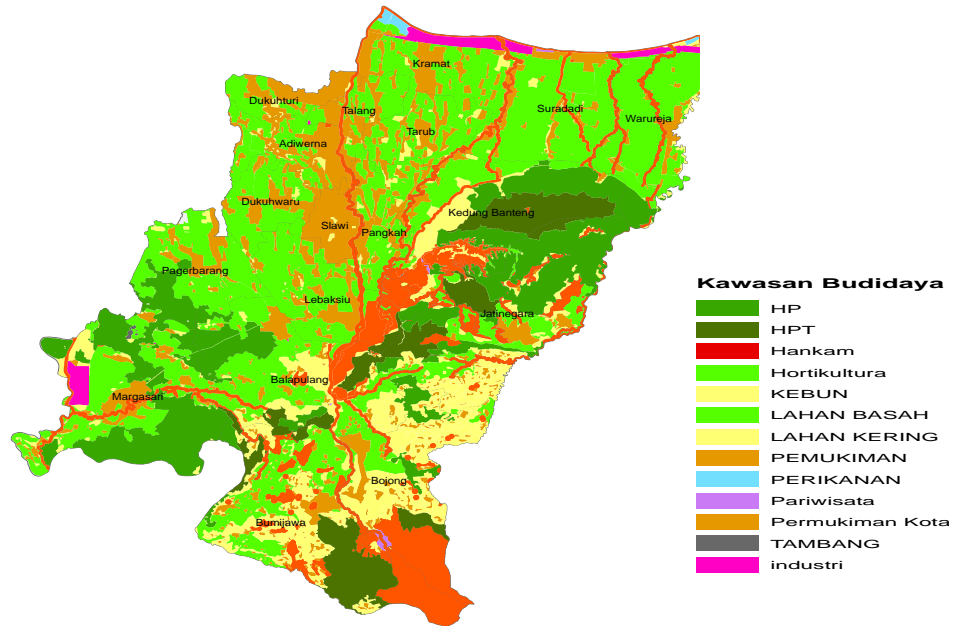
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

D. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai. Meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan lainnya.

Untuk mendukung kebijakan kedaulatan pangan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 telah ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 41.296 Ha (47% dari luas wilayah Kabupaten Tegal). Dalam Perda RTRW pengembangan wilayah untuk permukiman penduduk sampai dengan Tahun 2032 dialokasikan 15.951 Ha, sedangkan kondisi eksisting permukiman saat ini adalah 14.093 Ha. Alokasi pengembangan permukiman saat ini hanya terkonsentrasi di perkotaan, sedangkan di perdesaan pengembangannya belum optimal.

Gambar 6.3
Peta Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Alokasi pengembangan wilayah untuk industri berada di wilayah pantura dan margaayu seluas 1.214 Ha, Namun kondisi eksiting lahan yang dialokasikan untuk industri khususnya di Pantura merupakan permukiman dan lahan tambak masyarakat, sehingga apabila masyarakat ingin melakukan investasi di bidang industri dapat dilakukan di lokasi tersebut.

Tabel 6.11
Kawasan Budidaya dan Lindung

KAWASAN	LUAS (Ha)	KAWASAN	LUAS (Ha)
A. KAWASAN BUDIDAYA	86.200	B. KAWASAN LINDUNG	12.226
Hankam	63	Cagar Alam	10
Hortikultura	786	Cagar Budaya	11
Hutan Produksi	14.770	Fisiografis	1.588
Hutan Produksi Terbatas	6.520	Hutan Lindung	2.753
Industry	1.214	Kawasan Resapan Air	1.571
Kebun	3.966	Sempadan Mata Air	315
Lahan Sawah Basah	35.946	Sempadan Pantai	234
Lahan Sawah Kering	6.629	Sempadan Sungai	5.206
Pariwisata	87	Suaka Alam	13
Permukiman Desa	7.275	Waduk	524
Perikanan	237		
Permukiman Kota	8.676		
Pertambangan	33		

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

E. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis di Kabupaten Tegal terdiri dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK):

- 1) Kawasan Strategis Provinsi, terdiri dari:
 - Kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebis, Kota, Tegal, Slawi, dan Pemalang) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - Kawasan Panas Bumi Guci dan Baturaden dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi;
 - Daerah Aliran Sungai kritis lintas Kabupaten/ Kota terletak di DAS Pemali dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - Kawasan Gunung Slamet dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- 2) Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri dari:
 - kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi; kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna, kawasan Industri Pantura dan Margasari, Kawasan Agropolitan (Kecamatan Bojong; dan Kecamatan Bumijawa) Kawasan Minapolitan terdiri (Perikanan tangkap Waduk Cacaban, dan Perikanan budidaya di Kecamatan Lebaksiu dan Balapulang), Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Brebes terletak di Kecamatan Pagerbarang dan Margasari; Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Pemalang terletak di Kecamatan Warureja dan Jatinegara; dan Wilayah perbatasan dengan Kota Tegal terletak di Kecamatan Kramat, Kecamatan Talang dan Kecamatan Dukuhturi. Kawasan Perdagangan dan Jasa Mejasem Raya di Kecamatan Kramat; serta Kawasan Perdagangan dan Jasa Balamoa di Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Tarub;
 - kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial dan budaya, meliputi: kawasan Semedo di Kecamatan Kedungbanteng; dan Kawasan Pesarean Kecamatan Adiwerna.

F. Pengembangan Kawasan Perdesaan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu dilakukan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Desa-desanya yang berbatasan ini dapat terdiri atas desa dalam kecamatan yang berbeda.

Kajian eksploratif memunculkan deliniasi pengelompokan desa dengan tema tertentu sesuai dengan kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Jumlah desa dalam suatu tema Kawasan Perdesaan disusun dengan mempertimbangkan dampak positif yang signifikan dalam mendukung pemajuan desa dan kabupaten.

Pendekatan (ancangan) pemajuan desa melalui pengelompokan desa secara tematik ini tidak dilakukan hanya untuk suatu kelompok desa tertentu, melainkan digunakan untuk membangun seluruh desa, tidak ada satu desapun yang terlepas dari pengelompokan secara tematik tersebut.

Dalam memajukan desa dengan pendekatan kawasan ini, keterkaitan antara pengembangan kelompok desa dan kelurahan merupakan pertimbangan penting, sesuai dengan amanat undang-undang Penataan Ruang. Dengan demikian sejumlah 281 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Tegal merupakan suatu kesatuan yang maju secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengelompokan desa dalam Kawasan Perdesaan dilakukan dalam kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Artinya, tema dikemas dalam bentuk yang cukup unik dan tajam agar memiliki daya ungkit yang tinggi.

Kawasan I, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Suradadi, Kramat dan Warureja, diberi tema yang mengangkat keserasian hamparan kebun melati dan industri di sepanjang pesisir utara kabupaten Tegal. Dengan profil seperti itu kawasan perdesaan ini diberi nama "Industri di Lautan Melati".

Kawasan II, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Talang, Pangkah, Adiwerna, Dukuhturi dan Tarub, mengangkat tema keserasian antara kegiatan persawahan padi dengan sentra industri kecil di sekitarnya yang berpotensi mengeluarkan limbah. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama "Langkah Adituri" yang diambil dari singkatan kata Talang, Pangkah, Adiwerna, Tarub dan Dukuhturi.

Kawasan III, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng dan Pangkah, merupakan perpaduan antara infrastruktur pertanian berupa waduk dengan segenap sistem pemasokan air, digabung dengan pelestarian warisan bumi yang berpotensi sebagai eduwisata. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama "Warisan Bumi Lestari".

Kawasan IV, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Balapulang, Lebaksiu, Dukuhwaru, Slawi dan Pangkah, memiliki keunikan tersendiri. Di kawasan ini terdapat pusat pemerintahan kabupaten Tegal. Taman Teknologi Pertanian juga berlokasi di kawasan ini. Dengan demikian kawasan ini merupakan pendorong inovasi kawasan perdesaan. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama "Handayani Inovasi".

Kawasan V, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Margasari, Balapulang dan Pagerbarang, merupakan sentra budidaya yang cukup lengkap meliputi tanaman pangan, peternakan termasuk sentra penanaman pohon sebagai bahan baku bangunan. Industri sandang juga mulai dimulai di sini, sehingga tema kawasan perdesaannya adalah perpaduan antara kegiatan-kegiatan tadi. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama "Sapa Papa", yang merupakan singkatan dari kata Sandang, Pangan, Papan dan Pakan.

Kawasan VI, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Balapulang, Bumijawa dan Bojong, memiliki ciri pertanian yang khusus. Budidaya tanaman obat berpusat di sini, bahkan dilengkapi dengan klinik jamu. Selain budidaya tanaman berkhasiat obat, di kawasan ini juga terdapat potensi pemanfaatan air untuk kegiatan terapi. Dengan ciri-

ciri tersebut, ditambah dengan lingkungan alam yang menarik, kawasan ini bertepatan kesehatan alami dan pariwisata. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Sehat Alami”.

Untuk membuat gerakan pembangunan Kawasan Perdesaan ini menjadi efisien, masing-masing Kawasan Perdesaan Tematik kemudian dibagi menjadi beberapa sub-kawasan untuk kepentingan kemudahan pengelolaan.

Karena sebagian besar wilayah kabupaten Tegal merupakan kawasan perdesaan, ditambah dengan pusat pemerintahan kabupaten berada di kawasan perdesaan, maka Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dijadikan “cross cutting issues” yang sangat strategis.

Karena kawasan perdesaan mencakup seluruh desa di kabupaten Tegal, program-program penting pembangunan kabupaten Tegal perlu digerakkan melalui Kawasan Perdesaan Tematik.

Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Tematik, program penting pembangunan kabupaten dijadikan program generik, sehingga seluruh kawasan perdesaan wajib melaksanakannya, sedangkan program yang sesuai dengan tema kawasan perdesaan dilaksanakan sebagai program spesifik.

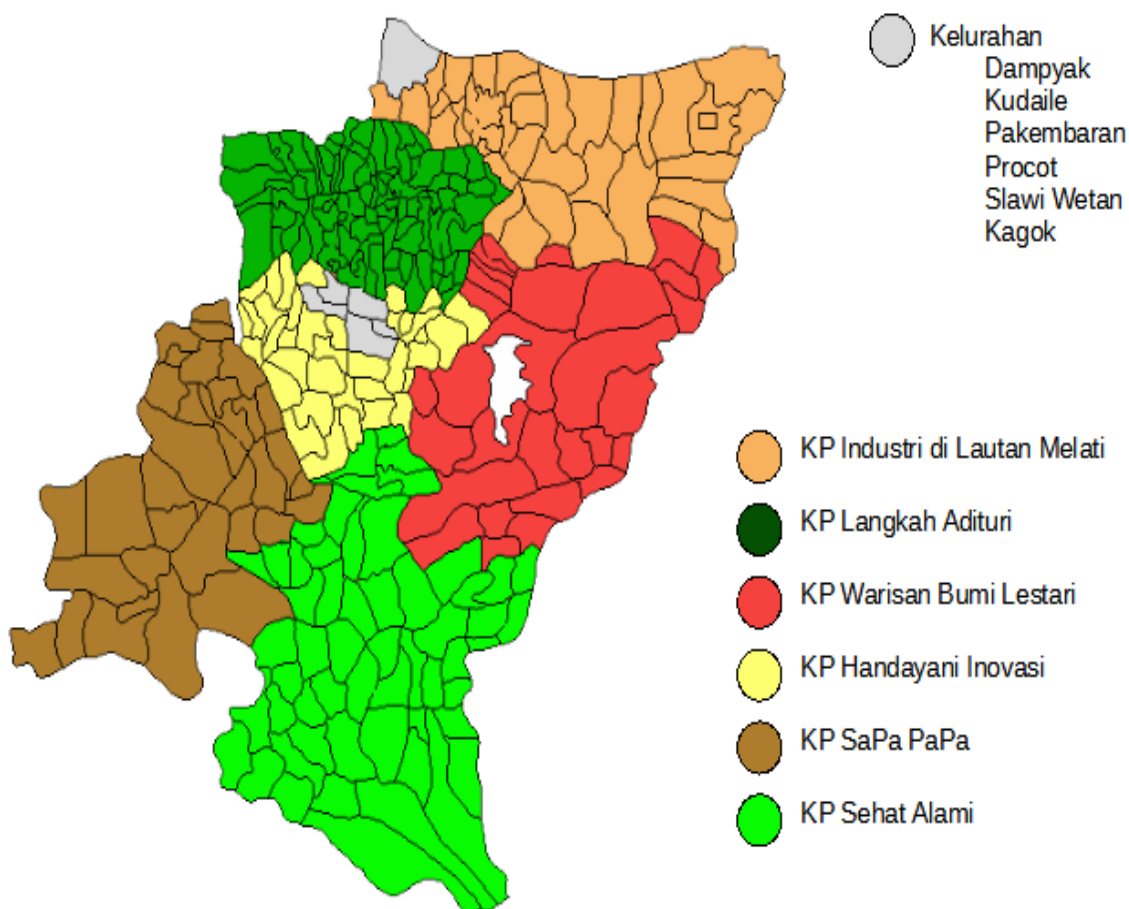
Program penting yang dapat dilaksanakan sebagai program generik adalah sebagai berikut:

Sistem pengelolaan sampah, Kegiatan ramah lingkungan, Penumbuhan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), Peningkatan akses telekomunikasi, Jalan lingkar kawasan, Transportasi lingkar kawasan, termasuk penataan transportasi tertentu, Ruang publik terbuka, Pusat belajar masyarakat, termasuk balai pertemuan warga, fasilitas kesehatan masyarakat, Pengukuran daya dukung lingkungan, Peningkatan skor SDG, termasuk penanganan stunting, dan Pelaksanaan Permendes tentang prioritas pembangunan desa.

Program spesifik Kawasan Perdesaan Tematik disusun sesuai dengan tema kawasan dan disepakati oleh desa-desa anggota kawasan.

Pembangunan kawasan perkotaan yang juga merupakan program pembangunan kabupaten diserasikan dengan pembangunan tata ruang dan pendukung pembangunan secara komplementer.

Gambar 6.4
Delineasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tegal



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal tahun 2021

G. Pengembangan Kawasan Strategis Bregasmalang

Kawasan strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebes, Kota, Tegal, Slawi, dan Pemalang) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebes, Kota, Tegal, Slawi, dan Pemalang Tahun 2016 – 2036. Dimana tujuan dari penataan ruang kawasan strategis Bregasmalang adalah ***Terwujudnya kawasan perkotaan Bregasmalang yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, transportasi, pertanian, dan perikanan dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan.*** Sedangkan kebijakan penataan ruang Kawasan Strategis Bregasmalang adalah :

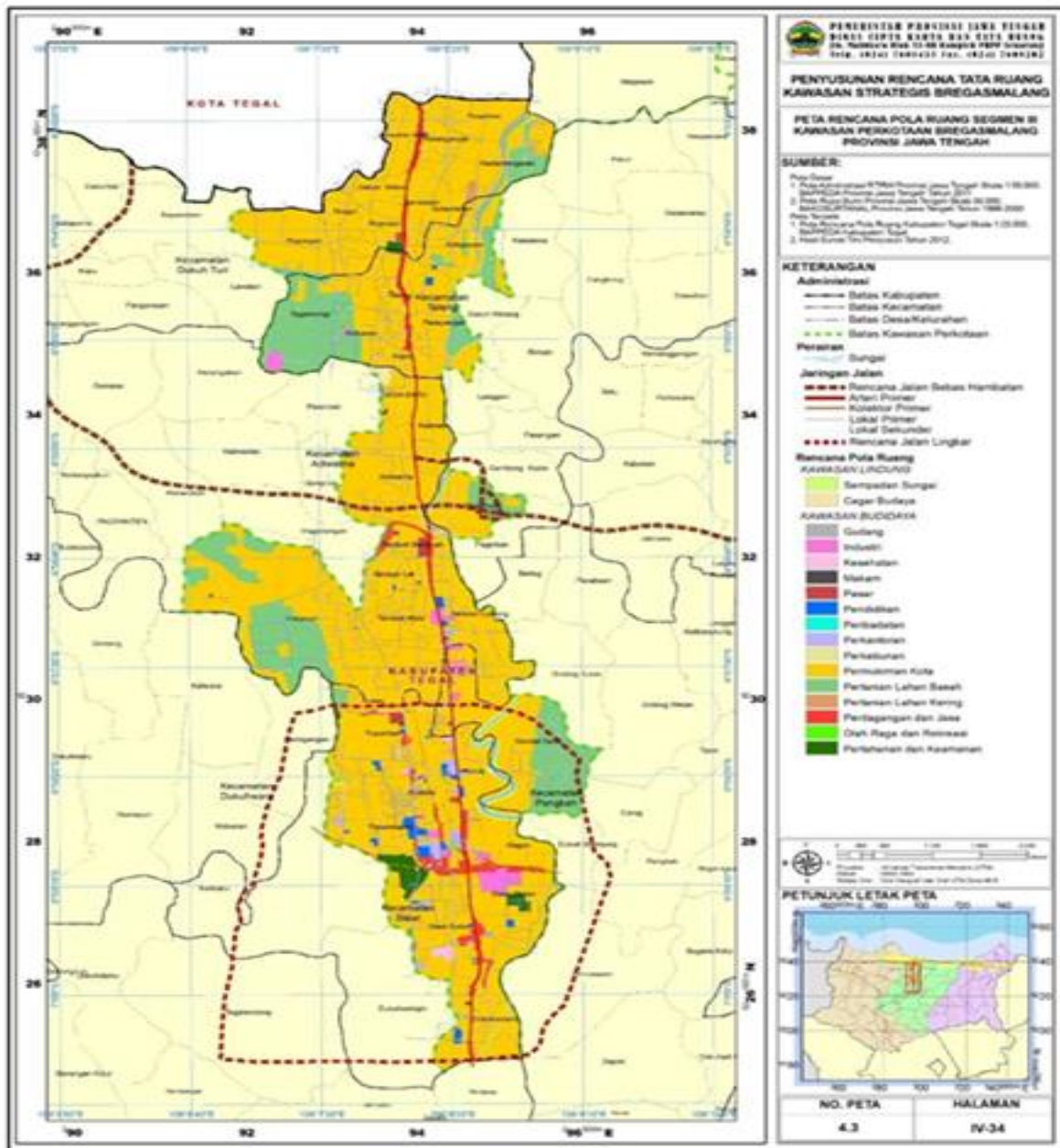
- 1) Pemantapan peran antar kawasan;
- 2) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi;
- 3) Peningkatan prasarana dan sarana sumberdaya air;
- 4) Peningkatan prasarana dan sarana sumberdaya energi;
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana telekomunikasi;

- 6) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan;
- 7) Perwujudan kegiatan perdagangan dan jasa yang mampu menjadi pengumpul dan pendistribusi produk komoditas ekonomi wilayah bregasmalang;
- 8) Pengembangan kegiatan dan kawasan industri;
- 9) Perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- 10) Peningkatan pengelolaan kawasan pantai yang produktif dan ramah lingkungan; dan
- 11) Pencegahan dan penanggulangan bencana.

Luas wilayah kawasan strategis Bregasmalang 24.786 Ha, sedangkan wilayah Kabupaten Tegal yang masuk dalam wilayah kawasan strategis Bregasmalang adalah sekitar 7.675 Ha meliputi 8 Kecamatan dan 49 Desa/Kelurahan. Berdasarkan pembagian wilayah Perencanaan Kawasan Strategis Bregasmalang, maka wilayah Kabupaten Tegal masuk dalam 3 wilayah perkotaan yaitu:

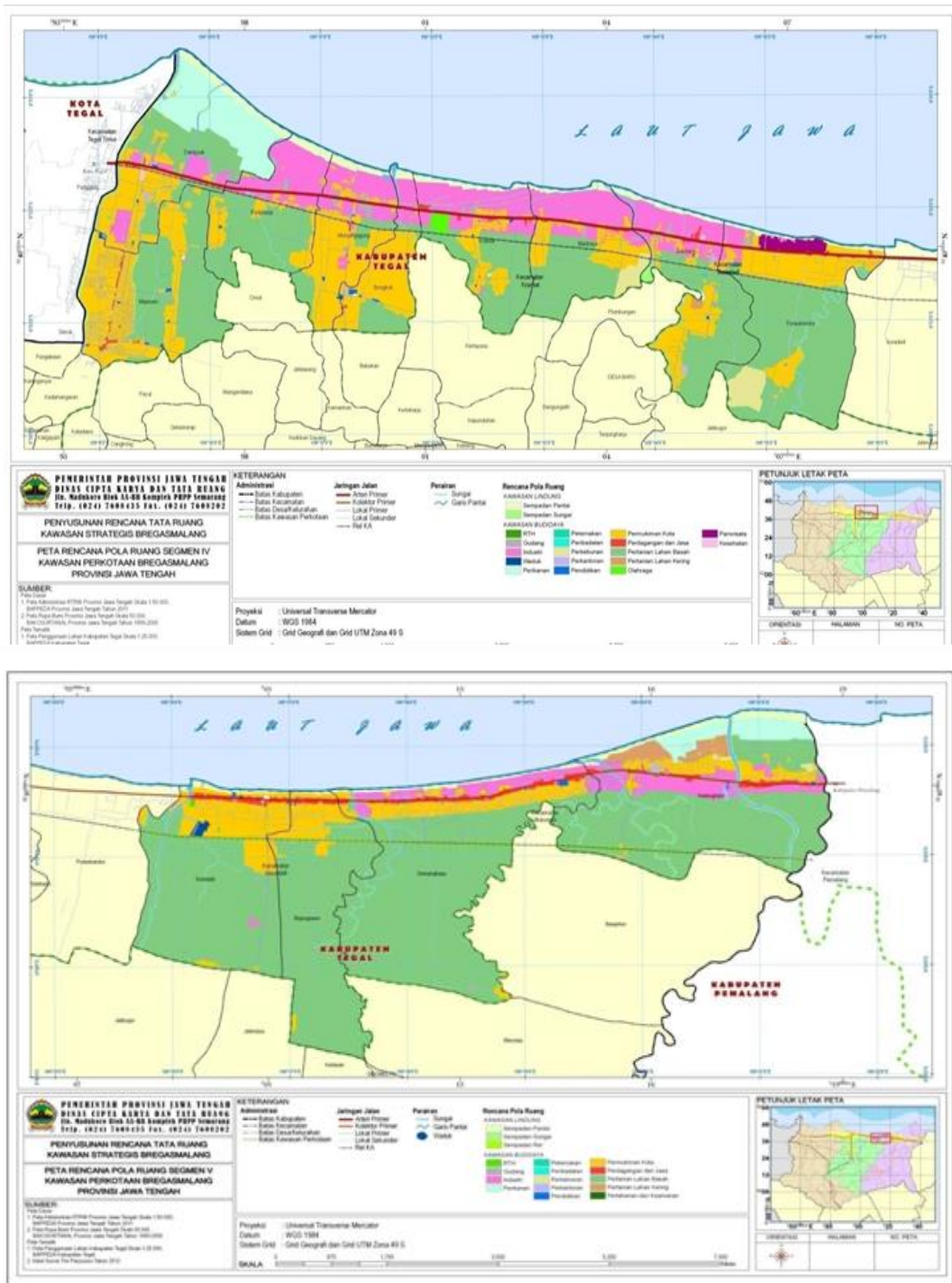
- 1) Kawasan Perkotaan Inti 3 yang meliputi wilayah Kecamatan Slawi, sebagai perkotaan di Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang dan Wilayah Perkotaan Kecamatan Dukuhturi. Sedangkan untuk arah pengembangannya antara lain:
 - pemantapan peran kawasan perkotaan Slawi sebagai PKL;
 - pengembangan kawasan industri kecil dan/atau mikro;
 - pengembangan pasar tradisional hasil industri rumah tangga;
 - pengembangan terminal penumpang tipe B; dan
 - pengembangan terminal barang.
- 2) Kawasan Perkotaan Penyangga I yang meliputi wilayah Kecamatan Kramat dan Sebagian Suradadi yang sejajar dengan Jalur arteri Primer Jalan Pantura. Sedangkan untuk arah pengembangannya antara lain:
 - pengotimalan kawasan peruntukan industri; dan
 - pengembangan kawasan perikanan budidaya.
- 3) Kawasan Perkotaan Penyangga II yang meliputi wilayah Sebagian Wilayah Kecamatan Suradadi dan Sebagian wilayah Kecamatan Warureja yang sejajar dengan Jalur arteri Primer Jalan Pantura. Sedangkan untuk arah pengembangannya antara lain:
 - pengotimalan kawasan peruntukan industri;
 - pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap; dan
 - pengembangan wisata pantai.

Gambar 6.5
Peta Kawasan Perkotaan Inti I Bregasmalang



Sumber : RTR Kawasan Strategis Bregasmalang Tahun 2016 - 2032

Gambar 6.4
Peta Kawasan Perkotaan Penyangga I dan II Bregasmalang



Sumber : RTR Kawasan Strategis Bregasmalang Tahun 2016 – 2032

6.9. Pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah

Pelaksanaan program unggulan kepala daerah merupakan realisasi janji politik kepada masyarakat. Diawal masa jabatan bupati/wakil bupati telah menghadapi kendala yang mengganggu pelaksanaan program unggulan tersebut terutama akibat adanya pandemi covid-19. Untuk itu dalam Perubahan RPJMD program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal periode 2019-2024 kembali ditekankan dengan formulasi penyesuaian kondisi terkini. Adapun pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.12
Pelaksanaan Program Unggulan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal
Tahun 2019-2024

No	Program Unggulan	Aktivitas Utama	Lokus Program
1	Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima	Pelayanan publik satu pintu secara digital	Wilayah Perkotaan Slawi
2	Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat	Penumbuhan Wirausaha Pemuda dilakukan melalui : Pendampingan, pemajuan, kolaborasi Penyedia Layanan Pengembangan Usaha (PLPU)	Kabupaten Tegal
		Perluasan Lapangan Kerja dilakukan melalui : kolaborasi oleh UMKM di Pusat Perdagangan strategis seperti : Taman Rakyat Slawi Ayu (TRASA), Kawasan Pariwisata, Alun -Alun Hanggawana	Kota Slawi, Obyek Wisata Guci, Obyek Wisata Purwahamba Indah, Obyek Wisata Cacaban, Obyek Wisata Pasar Slumpring Cempaka, Obyek Wisata Sindang Kemadu
		Investasi Pro Rakyat dilakukan melalui : Forum Bisnis dan Penyediaan Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Margasari, Kecamatan Warureja, Kecamatan Kramat
3	Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang serta Pengembangan Wilayah	Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang melalui : Penyediaan Prasarana Jalan seperti PJU, Drainase dan sarana Keselamatan Lalu Lintas serta Tim Reaksi Cepat Pemeliharaan Jalan.	Lokasi Seluruh Kabupaten Tegal terutama kawasan perbatasan seperti Kecamatan Warureja, Kecamatan dukuhturi, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bumijawa; kawasan perkotaan seperti : Kecamatan Slawi, Kecamatan Adiwerna

No	Program Unggulan	Aktivitas Utama	Lokus Program
		Pengembangan Wilayah dilakukan melalui Implementasi Perpres 79 Tahun 2019	Pasar (Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Pangkah) SPAM (Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi) BBI (Kecamatan Lebaksiu) Jalan Ruas Yomani-Guci (Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Balapulang Kecamatan Bojong), Embung (Kecamatan Jatinegara), Optimalisasi Cacaban (Kecamatan Kedungbanteng)
4	Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin	Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dilakukan melalui : Program Kampung Ora Kumuh	Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat, Kecamatan Tarub, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Slawi, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Lebaksiu
		Penataan Rumah Sehat bagi Warga Miskin dilakukan melalui : melalui program RTLH	Seluruh wilayah Kabupaten Tegal terutama Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat, Kecamatan Tarub, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Slawi, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Lebaksiu
5	Penanganan Dampak Covid-19	Penanganan Dampak Covid-19 melalui : Penanganan Lanjutan pasca covid-19, Jaminan Sosial, Jaminan Ekonomi	Seluruh kabupaten Tegal

No	Program Unggulan	Aktivitas Utama	Lokus Program
6	Penataan Kota Slawi	Penataan Kota Slawi dilakukan melalui 3 aspek yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi.	Koridor 1 meliputi : Jalan Menteri Supeno 1 dan 2, Jln Gajah Mada, Jalan Juanda dan Kawasan Alun-alun Slawi. Koridor 2 meliputi : Jln Dr. Soetomo, Letjen. Sugiono dan Brigjen. Katamso
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan melalui Program Merdeka Sampah	Semua Kecamatan, untuk tahap awal, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Balapulang, kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kramat, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Slawi, Kecamatan Talang, Kecamatan Tarub
8	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain melalui penerapan e-office	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
9	Pembinaan Olahraga, Pemberdayaan Pemuda dan Pelestarian Budaya	Pembinaan Olahraga melalui Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tegal
		Pemberdayaan Pemuda melalui pengoptimalan kepeloporan pemuda dan pengembangan pemuda kreatif	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tegal
		Pelestarian Budaya melalui pelestarian, pemajuan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tegal

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

6.10. Program Pembangunan Daerah

Adapun Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.13
Misi, Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2020-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat	Mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional		Indeks Reformasi Birokrasi			Opini; Tahunan	45,25	50,1	63,69	55,1		Inspektorat, BPKAD, BP2D
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat			Persen; Tahunan	75	78,61	78,21	80,46		Setda, Disdukcapil, BKD, BPBD, 18 Kecamatan, Sek. DPRD
				Program Pelayanan Pencatatan Sipil							428.400	Dinas Dukcapil
					persentase penduduk 0-18 tahun ber akta kelahiran	Persen; Tahunan; IKU OPD	69,46	80	81	85		
					persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	14,73	20	20	25		
				Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk							474.300	Dinas Dukcapil
					Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,09	90	91	92		
					Persentase Penduduk ber KTP-el	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,43	90	91,5	92		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase anak memiliki KIA	Persen; Tahunan; IKU OPD	1,85	40	35	50		
			SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)			Skor; Tahunan	2,58	2,75	2,2	3		Dinas Kominfo
				Program Teknologi Informatika dan Persandian							14.203.813	Dinas Kominfo
					Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		147	272	270	300		
		Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten			Nilai; Tahunan	57,61	61,61	61,36	63,61		Setda, Bappeda dan Litbang, Set. DPRD, Inspektorat
				Program Perencanaan dan Penganggaran Program							1.224.000	Bappeda dan Litbang
					Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan		99	100	100	100		
				Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan							867.000	Bappeda dan Litbang
					Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan		82	85	85	86		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target		83,01	85	85	85		
				Program Bina Organisasi							1.198.500	Bagian Organisasi Setda
					Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	57,61	59,61	59,61	61,61		
					Persentase IKM Kabupaten	Persen; Tahunan; IKU OPD	71,28	72,53	72,53	73,78		
					Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	37,41	39,41		
				Program Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian							153.000	Inspektorat
					Persentase OPD yang tercapai IKUnya	Persen; Tahunan; IKU OPD	57,01	59,23	59,23	60		
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK			Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP		BPKAD, BP2D, Dispermasdes
				Program Pengawasan Intern dan Penanganan Pengaduan Masyarakat							1.285.000	Inspektorat

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase penyelesaian LHP	Persen; Tahunan; IKU OPD	90	91	91	91		
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							2.700.000	BPKAD
					Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	Persen; Tahunan; IKU OPD	50	60	60	70		
				Program Akuntansi dan Pelaporan							647.700	BPKAD
					Persentase Ketepatan waktu Perda Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	100	100		
					Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	100	100		
				Program Pajak PBB dan BPHTB							2.993.700	BP2D
					Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	Persen; Tahunan; IKU OPD		100	100	100		
				Program Penataan Desa							663.000	Dinas Permasdes

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	Persen; Tahunan; IKU OPD	50,15	58	58	64		
				Program Administrasi Pemerintahan Desa							805.000	Dinas Permasdes
					Persentase Desa Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa	Persen; Tahunan; IKU OPD	15	25	25	50		
		Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah	Indeks Profesionalitas ASN			Skor; Tahunan	70	72,12	72,24	74,24		BKD
				Program Pendidikan dan Pelatihan ASN							3.240.648	BKD
					persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL		62,76	5,62	5,62	5,62		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL		4,27	4,34	4,34	4,34		
					persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/ Prajabatan sesuai dengan peraturan		100	100	100	100		
				Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN							1.800.360	BKD
					persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi		85	95,5	95,5	95,5		
					persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi		21,07	2,77	2,77	2,77		
					persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya		24,77	13,68	13,68	13,68		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan	Meningkatkan konektivitas antar wilayah		Indeks Williamson			Persen; Kumulatif	2,6	2,58	N/A	2,54		DPU, Disperkimtaru
		Meningkatnya infrastruktur Wilayah yang mantap	Persentase infrastruktur wilayah mantap			Persen; Tahunan	70,17	77,73	80,04	82,12		DPU
			Persentase infrastruktur permukiman layak			Persen; Tahunan	71,45	80,09	82,12	83,78		Disperkimtaru, DLH
				Program Jalan							123.700.000	
					Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif;	62,42	70,02	70,02	75,02		
					Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 0,5-1)	Persen; Kumulatif;	30	40	40	45		
				Program Jembatan							20.900.000	DPU
					Proporsi jembatan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif;	67,11	73,51	73,51	79,11		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Tata Perumahan & Permukiman							17.106.420	Dinas Perkimtaru
					Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Kumulatif;	86,23	88	88	89		
					Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Kumulatif;	88,7	90	90	93		
					Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Kumulatif;	23	15,4	15,4	15,4		
					Persentase Penanganan Rumah Tidk Layak Huni (RTLH)	Kumulatif;	12,1	15	15	18		
				Program Tata Ruang dan Pertanahan							4.666.500	Dinas Perkimtaru
					Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen; Tahunan	85	86	86	87		
				Program Tingkat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)							26.876.000	DLH
					Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen; Tahunan	50	60,35	60,35	70,75		
					Persentase Limbah B3 ditangani	Persen; Tahunan	50	60,35	60,35	70,75		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
		Meningkatnya Sistem jaringan/ konektivitas perhubungan	Rasio konektivitas perhubungan			Skor; Tahunan	67,11	74,23	75,2	75,25		Dishub
				Program Lalu Lintas							2.336.800	
					Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	Persen; Tahunan	34,49	43	43	54		Dishub
					Persentase Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Persen; Tahunan	58,33	20	20	40		Dishub
					Persentase Pelanggaran Kendaraan Bermotor Umum	Persen; Tahunan	38,92	35	35	30		Dishub
					Persentase Lokasi Titik Parkir	Persen; Tahunan	57	62	62	67		
				Program Keselamatan Jalan							9.756.300	
					Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Persen; Tahunan	32	34	34	36		Dishub
					Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	Persen; Tahunan	45,15	56,57	56,57	67		Dishub

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase Fatalitas Korban Kecelakaan	Persen; Tahunan	4,17	4	4	3,8		
				Program Angkutan							2.907.000	
					Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen; Tahunan	29,41	31	31	33		Dishub
					rasio ijin trayek angkutan pedesaan/perkotaan	Persen; Tahunan	66	76	76	80		Dishub
					Persentase Kepemilikan Kendaraan Wajib Uji	Persen; Tahunan	77,8	80	80	82		Dishub
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Persen; Tahunan	53,78	64,28	55,05	55,13		DLH
		Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	Indeks Kualitas Air			Persen; Tahunan	61	72	31,11	31,15		DLH
			Indeks Kualitas Udara			Persen; Tahunan	77	77,5	84,99	85,12		
				Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup							4.309.500	DLH
					indeks kualitas air	Persen; Tahunan	61	72	72	74		
					indeks kualitas udara	Persen; Tahunan	77	77,5	77,5	78		
					indeks ketutupan lahan	Persen; Tahunan	59,21	59,21	59,21	59,21		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan						663.000	DLH	
					Persentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen; Tahunan	100	100	100	100		
Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan	Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata		Pertumbuhan ekonomi			Persen; Tahunan	5,4	5,48	-1,46	3,2	Disperinaker, Disdakop dan UKM, Dis Tan KP, DKPP	
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor pertanian dan perikanan	Laju PDRB Sektor Pertanian			Persen; Tahunan	1,35	0,5	2,18	2,33	Dinas Tan KP	
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)			Persen; Tahunan	121,38	122,02	N/A	122,66	DKPP	
				Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian						4.635.000	Dinas Tan KP	
					Indeks Pertanaman	Skor; Tahunan	1,5	1,54	1,54	1,58		
				Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura						2.103.000	Dinas Tan KP	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Pertumbuhan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Persen; Tahunan	1,32	1,2	1,2	1,25		
					Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan	Persen; Tahunan	-1,3	0,1	0,1	0,15		
					Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Perkebunan	Persen; Tahunan	1,18	1	1	1,1		
					Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Holtikultura	Persen; Tahunan	1,32	1,2	1,2	1,25		
				Program Perikanan Tangkap							2.275.620	DKPP
					Jumlah produksi perikanan tangkap	Nilai; Tahunan	1.551.423	1.566.937	1.566.937	1.582.606		
					Nilai produksi perikanan tangkap	Nilai; Tahunan	14.459.278	14.603.871	14.603.871	14.749.909		
				Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan							1.173.000	DKPP
					Jumlah produksi perikanan budidaya	Nilai; Tahunan	2.047.818	2.068.296	2.068.296	2.088.979		
					Nilai produksi perikanan budidaya	Nilai; Tahunan	50.961.889	87.682.222	87.682.222	88.559.044		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Nilai; Tahunan	4.399.411	4.443.405	4.443.405	4.487.839		
					Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Nilai; Tahunan	219.200.656	221.392.663	221.392.663	223.606.589		
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor industri	Laju PDRB sektor Industri			Persen; tahunan	6,02	6,09	-0,46	1,45		Disperinaker
				Program Peningkatan Layanan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka							6.337.750	Dinas Perinaker
					Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen; Tahunan;	7	7,9	7,9	7,9		
					cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,25	4,95	4,95	5		
				Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan							459.000	Dinas Perinaker
					Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro	Persen; Tahunan;	7	7,4	7,4	7,4		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara			Jumlah; Tahunan	487	587	137	150		Dinas Parpora
			Jumlah Wisatawan Nusantara			Jumlah; Tahunan	1.052.487	1.152.587	466.351	552.687		Dinas Parpora
				Program Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata							1.550.400	Dinas Parpora
					Jumlah Kunjungan Wisnu dan wisman	Jumlah; Tahunan	1.052.487	1.052.587	1.052.587	1.052.687		
					Rata-rata lama kunjungan wisata	Persen; Tahunan	0,9	0,08	0,08	0,09		
				Program Obyek dan Sarana Wisata							6.677.940	Dinas Parpora
					Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik	Persen; Tahunan	22,22	66,67	66,67	66,67		
					Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Persen; Tahunan	70	75	75	80		
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Perdagangan	Laju PDRB sektor Perdagangan			Persen; Tahunan	5,95	6,02	-4,2	2,56		Dinas Dag Kop & UKM

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Perdagangan							2.232.100	Dinas Dagkop UKM
					Persentase Pedagang tertib niaga	Persen; Tahunan	18,73	20	20	40		
				Program Pengelolaan Pasar							7.524.500	Dians Dagkop UKM
					Jumlah pasar yang merujuk SNI	Jumlah; Tahunan	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM),			Nilai; Tahunan	66,44	68,03	68,39	68,73		Disdikbud, Dinkes
			Indeks pemberdayaan Gender (IDG)			Nilai; Tahunan	69,05	69,3	69,25	69,7		Dinas P3AP2KB
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Nilai; Tahunan	86,76	86,85	86,85	86,94		Dinas P3AP2KB
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah			Tahun; Tahunan	6,7	6,75	6,98	7,13		Disdikbud, Dis Arpus
			Harapan Lama Sekolah			Tahun; Tahunan	12,34	12,37	12,67	12,82		Disdikbud, Dis Arpus

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Pendidikan Dasar							143.144.802	Dinas Dikbud
					Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	Persen; Tahunan	0,14	0,14	0,14	0,13		
					Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	Persen; Tahunan	0,13	0,13	0,13	0,12		
				Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal							2.590.650	Dinas Dikbud
					APM PAUD	Persen; Tahunan	24,17	25,21	25,21	25,89		
					Angka partisipasi PNFI	Persen; Tahunan	31,24	32,95	32,95	34,65		
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup			Tahun; Tahunan	71,14	71,19	71,19	69,73		Dinkes, RSUD Dr. Soselo, RSUD Suradadi
				Program Kesehatan Masyarakat							45.046.000	Dinas Kesehatan
					Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen; Tahunan	35	40	40	50		
					Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan	80	81	81	82		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Persen; Tahunan	10	11	11	12		
		Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)			Nilai; Tahunan	69,05	69,3	69,25	69,7		Dinas P3AP2KB
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Nilai; Tahunan	86,76	86,85	71,4	86,94		Dinas P3AP2KB
				Program Pemberdayaan Perempuan							681.750	Dinas P3AP2KB
					Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/ APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Persen; Tahunan	70	72	72	73		
				Program Perlindungan Anak							707.000	
					Capaian Pemenuhan Hak Anak	Persen; Tahunan	50	55	55	60		
		Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk										
			Total Fertility Rate (TFR)				2,47	2,44	2,24	2,4		Dinas P3AP2KB
				Program Keluarga Berencana							3.273.275	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Persen; Tahunan	69,14	69,81	69,81	70,21		
		Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Kota Layak Pemuda			Level; Tahunan	proses	proses	utama	utama		Dinas Parpora
			Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi			Kali; Tahunan	5	6	N/A	7		Dinas Parpora
				Prgm Pemuda dan Olahraga							8.213.040	Dinas Parpora
					Persentase Wirausaha Pemuda	Persen; Tahunan	0,01	0,3	0,3	0,6		
					Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen; Tahunan	100	100	100	100		
					Persentase Atlet yang Berprestasi	Persen; Tahunan	65	70	70	75		
	Menurunkan kesenjangan kemiskinan		Indeks Gini			Persen; Tahunan	0,311	0,307	0,307	0,303		Dinsos, Dispermasdes, Disperinaker, DPMPSTSP
		Menurunkan angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin			Persen; Tahunan	7,94	7,01	8,14	8,41		Dinsos, Dispermasdes
				Program Rehabilitasi Sosial							1.800.335	Dinas Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	Persen; Tahunan	83,34	84,34	84,34	85,34		
				Program Pemberdayaan Sosial							1.018.444	Dinas Sosial
					Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	Persen; Tahunan	89,08	90,08	90,08	91,08	-	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							909.000	Dinas Sosial
					Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen; Tahunan	80,91	82,46	82,46	90,48	-	
				Program Penanganan Fakir Miskin							934.250	Dinas Sosial
					Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin	Persen; Tahunan	96,64	97,87	97,87	98,89	-	
				Program Pengembangan Desa							4.080.000	Dinas Permasdes

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	Persen; Tahunan	35 Bumdes	25	25	30		
					Persentase Pengembangan Desa	Persen; Tahunan	195 Kerjasama Desa dan 13 Kerjasama Antar Desa	100	100	100		
					Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	Persen; Tahunan	0 Pengembangan Kawasan Pedesaan.	50	50	62,5		
				Program Pemberdayaan Masyarakat							780.000	Dinas Permasdes
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Persen; Tahunan	10	25	25	50		
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	Persen; Tahunan	5	25	25	50		
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka			Persen; Tahunan	8,45	7,45	9,82	10,42		Disperinaker, DPMPPTSP
				Program Penanaman Modal							712.139	Dinas PMPTSP
					Nilai Investasi PMA	Rp (000.000); Tahunan;	480.800	500.000	500.000	520.000		
					Jumlah Investor PMA	Pemohon;Tahun	3	5	5	7		
					Nilai Investasi PMDN	Rp (000.000); Tahunan;	1.073.862	850.000	850.000	875.000		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Jumlah Investor PMDM	Pemohon; Tahun	7.257	7.457	7.457	7.657		
				Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja							4.745.000	Dinas Perinaker
					AKAN	Jumlah, Tahunan	653	660	660	672		
					AKAD	Jumlah, Tahunan	231	246	246	261		
					AKL	Jumlah, Tahunan	120	140	140	159		
Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal	Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Indeks; Tahunan	80,66	82,66	82,66	84,66		Kesbangpol
		Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Indeks; Tahunan	80,66	82,66	82,66	84,66		Kesbangpol; Satpol PP
				Program Penegakan Perundang-undangan Daerah							525.300	Satpol PP
					Persentase penyelesaian penegakan perda	Persen; Tahunan	76	80	80	82		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Ketentraman dan Ketertiban Umum							1.590.750	Satpol PP
					Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen; Tahunan	70	74	74	76		
				Program Kesbangpol							989.400	Kesbangpol;
					Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif	Persen; Tahunan	60,4	0	0	0		
					Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	Persen; Tahunan	60,4	0	0	0		
					Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	Persen; Tahunan	70,4	0	0	0		
					Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	Persen; Tahunan	65,59	0	0	0		
					Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades	Persen; Tahunan	76,6	0	0	0		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat	Persen; Tahunan	0	0	0	0		
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana		Indeks Risiko Bencana			Angka; Tahunan	184,81	181,98	183	177,71		BPBD
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan indek resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah			Angka; Tahunan	0,58	0,62	0,6	0,72		BPBD
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana							1.168.920	BPBD
					Persentase masyarakat siap siaga bencana	Persen; Tahunan	1.72	02.44	02.44	2.51		
				Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana							744.600	BPBD
					Persentase layanan penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	Persen; Tahunan	85.71	90.19.00	90.19.00	94.67		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana							1.152.600	BPBD
					Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen; Tahunan	13,59	21,74	21,74	29,89		
	Meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan		Indeks Kebudayaan			Indeks; tahunan	60	62,34	N/A	64,73		Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan	Persentase cagar budaya (<i>tangible dan intangible</i>) dilestarikan			Indeks; tahunan	21,4	22,5	N/A	24,5		Disdikbud
				Program Kebudayaan							1.938.000	Dinas Dikbud
					Persentase seni dan kesenian yang dibina	Persen; Tahunan	78,5	79,61	79,61	80,12		
					Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi	Persen; Tahunan	21,4	22,5	22,5	24,5		
					Persentase tradisi yang dikembangkan	Persen; Tahunan	50	55	55	57,5		

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 6.14
Misi, Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2022-2024

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat												
Tujuan: 1.1 Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		63,69	64,59		65,19		65,69		65,69		
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,68	3,1		3,25		3,4		3,4		
	Indeks Kepuasan Masyarakat		78,61	82,15		84,83		86,2		86,2		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan Informasi	Persen; Tahunan	40,62	50,00	370.000	60,00	380.000	75,00	400.000	75,00	1.500.000	Kominfo SP
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Persen; Tahunan	25,00	50,00	1.800.000	75,00	1.900.000	100,00	2.000.000	100,00	7.500.000	Kominfo SP
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Persen; Tahunan	16,67	70,83		85,42		100,00		100,00		Kominfo SP
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Persen; Tahunan	20,00	30,00	1.500.000	50,00	1.500.000	80,00	1.500.000	80,00	6.000.000	Kominfo SP

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen; Tahunan	45,00	65,00		75,00		85,00		85,00		Kominfo SP
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen; Tahunan	38,15	52,36	120.000	59,47	130.000	66,57	140.000	66,57	500.000	Kominfo SP
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Adiwerna
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Balapulang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Bojong
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Bumijawa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	180.000	Kecamatan Dukuhwaru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Dukuhturi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Jatinegara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Kedungbanteng

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Kramat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Lebaksiu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	39.624	100	39.624	100	39.624	100	158.496	Kecamatan Margasari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Pagerbarang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Pangkah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Slawi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Suradadi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Talang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Tarub
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Warureja

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju berkembang Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Adiwerna
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Balapulang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Bojong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan maju dan berkembang Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Bumijawa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	191.500	80	226.000	100	248.000	100	794.500	Kecamatan Dukuhwaru
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Dukuhturi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Jatinegara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan maju dan berkembang Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Kedungbanteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Kramat

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Lebaksiu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	35.300	80	35.300	100	35.300	100	141.200	Kecamatan Margasari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Pagerbarang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Pangkah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Slawi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan maju dan berkembang Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Suradadi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Talang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	60.000	80	60.000	100	60.000	100	377.750	Kecamatan Tarub
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Warureja
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rata-rata kinerja OPD rumpun pemerintahan kesra (LKjIP)	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72,53	75,03	2.542.709	76,28	2.568.137	77,53	2.593.818	77,53	10.222.198	Setda

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Persentase pelayanan publik OPD rumpun pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	37,41	41,41		43,41		45,41		45,41		Setda
	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017										Setda
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi											Setda
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri 18 Tahun 2020 tentang LPPD	35	68	5463948,5	89	5518587,98 ₅	100	5573773,86 ₅	100	21966160,3 ₅	Dispermades
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	15	30	130000	40	131300	50	132613	50	539633	Disdukcapil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	91,67	94	155000	96	156550	98	158115,5	98	727838,5	Disdukcapil
	Perekaman KTP elektronik	Persen; Tahunan; IKU OPD	99,68	99,74		99,76		99,8		99,8		Disdukcapil
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen; Tahunan; IKU OPD	21,18	60		70		80		80		Disdukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	93,1	95,5	145000	96	146450	96,5	147914,5	96,5	535826,5	Disdukcapil
	Persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan; IKU OPD	68,5	70,0		70,8		71,5		71,5		Disdukcapil
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten		63,61	67,61		70,61		73,61		73,61		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00	1.456.000	100,00	1.478.000	100,00	1.488.000	100,00	5.868.000	Bappeda dan Litbang
	Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	85,00	87,00		88,00	573000,00	90,00	578000,00	90,00	578000,00	Bappeda dan Litbang
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen; Tahunan; IKU PD	100,00	100,00	2.275.000	100,00	2.350.000	100,00	2.450.000	100,00	9.246.000	Bappeda dan Litbang
	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	Persen; Tahunan; IKU PD	85,00	90,00		92,00		95,00		95,00		Bappeda dan Litbang
	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen; Tahunan; IKU PD	85,00	90,00		92,00		97,00		97,00		Bappeda dan Litbang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	155.000	Kecamatan Adiwerna
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Balapulang
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Bojong
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Bumijawa
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	100	7.500	100	10.000	100	10.000	100	10.000	Kecamatan Dukuhwaru

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Dukuhturi
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Jatinegara
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Kedungbanteng
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Kramat
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Lebaksiu
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	5.200	78	5.200	80	5.200	80	5.200	Kecamatan Margasari
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Pagerbarang
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Pangkah
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Slawi
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Suradadi
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Talang
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Tarub
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Warureja

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	1.377.270	100	1.446.315	100	1.515.642	100	1.515.642	Setda
	Persentase Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	1	3		3		4		4		Setda
	Persentase Tingkat Standarisasi LPSE terpenuhi		12	12		12		12		12		Setda
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	24.507.256	100	24.507.256	100	24.507.256	100	98.029.024	Setwan
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Dukungan Produk Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	65,00	73,44	1.707.595	87,50	1.712.595	92,50	1.707.595	92,50	5.966.631	Bappeda dan Litbang
Sasaran 1.1.3: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK		WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		70,00	80,00	2.878.500	85,00	2.907.285	95,00	2.936.358	95,00	11.572.143	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih		100	100	2.948.195	100	2.977.677	100	3.007.454	100	11.852.331	BPKAD
	presentase hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang Tertagih		100	100		100		100		100		BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang telah mengelola Barang Milik Daerah yang baik dan benar	Persen	50,00	80,00	3.600.000	90,00	2.626.000	95,00	2.720.000	95,00	11.546.000	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan nilai LAKE LKD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	45,00	65,00	429.250	75,00	433.543	85,00	437.878	85,00	1.725.670	Perpustakaan dan Arsip
	Peningkatan jumlah Perangkat Daerah bernilai LAKI Cukup	Jumlah; Tahunan	0,00	10,00		12,00		14,00		14,00		Perpustakaan dan Arsip

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persen; Tahunan:	91,70	92,00	764.420	92,00	764.420	92,00	764.420	92,00	3.057.680	Inspektorat
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Itprov	Persen; Tahunan:	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Inspektorat
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Itkab	Persen; Tahunan:	23,77	60,00		70,00		80,00		80,00		Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penerapan SPIP Secara efektif	Persen; Tahunan:	5	20	712.000	30	712.000	50	712.000	0,5	2.848.000	Inspektorat
	Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	Persen; Tahunan:	2,00	8,30		8,30		12,50		12,50		Inspektorat
	Persentase Pemenuhan IKU OPD	Persen; Tahunan:	59,53	70,00		90,00		90,00		90,00		Inspektorat
Sasaran 1.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah	Indeks Profesionalistas ASN		72,12	76,42		78,31		80,56		80,56		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	Persen, Tahunan	0,12	0,48	4.550.000	0,18	4.600.000	0,15	4.260.000	0,15	17.910.000	BKD
	Persentase jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	Persen, Tahunan	53,82	57,50		59,30		62,10		62,10		BKD
	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	Persen, Tahunan	427,93	239,96		264,61		293,12		293,12		BKD
	Rasio pegawai fungsional (%)	Persen, Tahunan	9,64	15,28		15,68		16,23		16,23		BKD

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Persen, Tahunan	93,50	93,26		92,69		93,05		93,05		BKD
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20/jam	Persen; kumulatif; PP no.11 tahun 2017	47,50	70,00	2.775.000	75,00	2.785.000	80,00	2.795.000	80,00	11.118.000	BKD
	Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejening sesuai dengan tupoksi jabatan	Persen; Tahunan; PP no.11 tahun 2017	33,40	40,00		45,00		50,00		50,00		BKD
MISI 2: Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan												
Tujuan 2.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang berwawasan lingkungan	Persentase Infrastruktur wilayah mantap berwawasan lingkungan			78,15		79,65		81,23		81,23		
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum		64,82	74,46		78,35		83,6		83,6		
	Persentase Infrastruktur Permukiman Layak		89,45	93,76		95,26		97,23		97,23		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/492 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	60	61,33	18.100.000	61,95	18.100.000	62,57	18.100.000	63,8	62.231.125	DPU

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	61,09	85,09	3.655.000	97,09	3.910.000	109,09	4.170.000	109,09	15.120.000	DPU
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Persen; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. 490,15 Km jalan harus berdainase;277,95 Km jalan yang berdrainase.	94,77	95,97	24.580.000	96,37	24.580.000	96,37	24.580.000	96,37	98.320.000	DPU
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase Lingkungan yang tertata					P1					0	DPU
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Persentase; Kumulatif; Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan	13,89199255	23,8919925 5	64.925.000	28,89199255	37.425.000	33,89199255	35.425.000	33,89199255	194.200.00 0	DPU
	Rasio bangunan yang memiliki IMB	Persentase; Kumulatif										DPU
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio penyedia jasa konstruksi yang Sesuai Standar Teknis	Persen; Kumulatif; PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	0	20	1.500.000	30	1.750.000	40	2.000.000	40	6.200.000	DPU
	Rasio tenaga konstruksi yang memiliki sertifikast kompetensi	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	0	100		100		100		100		DPU

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km.	81,11	83	144.600.00 0	85	144.600.00 0	87,5	144.600.00 0	87,5	542.712.43 5	DPU
	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen; Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal; Jumlah Jembatan 454 unit;; 29 % kondisi jembatan rusak (ringan s/d berat)	88,05	91		92		93,5		93,5		DPU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persen; Tahunan	86	88	600.000	89	625.000	90	650.000	90	2.450.000	Perkimtaru
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang; Tahun	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	Perkimtaru
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Pengendalian pemanfaatan tanah negara ?										0	Perkimtaru
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	89,8	90	500900	90,25	568000	90,75	768600	90,75	2029634	Dinsos
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa	55,23	65,23	3848100	70,23	3886581	80,23	3925446,81	80,23	15470127,8 1	Dispermades

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD	69,39501779	70,8185053 4	303000	71,53024911	306030	72,24199288	309090,3	72,24199288	1218120,3	Dispermades
Sasaran 2.1.2.Meningkatnya Sistem jaringan/konektivitas perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten		75,34	76,87		76,98		77,24		77,24		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan rasio kejadian kecelakaan lalu lintas	Persen; Tahun/ Triwulan; Data	0,65	0,55	15300066	0,5	15606100	0,45	15898196	0,45	61.804.462	Dishub
	Konektivitas transportasi	Persen, Tahun, Data	75,2	75,3		75,4		75,5		75,5	0	Dishub
	Kinerja lalu lintas kabupaten	Satuan mobil penumpang (smp) /jam; tahun data	0,43	0,47		0,5		0,52		0,52		Dishub
Sasaran 2.1.3.Meningkan Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH		64,28	65,78		66,28		68,28		68,28		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	Dokumen	4	6	5.450.000	5	5.975.000	5	6.650.000	5	20.242.470	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan/area yang dilakukan upaya pengendalian pencemaran dan/ kerusakan melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan	m2, Kumulatif	25.64 / 5900 m2	50 / 14356m2	5.450.000	62.37 / 14356m2	5.975.000	62.37 / 14356m2	6.650.000		20.242.470	DLH

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	Persen, Tahunan	1	20	350.000	30	350.000	50	400.000	50	1.150.000	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Luas Lahan yang terkontaminasi Pencemaran Limbah B3	m2, Kumulatif	25.64 / 5900 m2	50 / 14356m2	50.000	62.37 / 14356m2	50.000	62.37 / 14356m2	50.000	62.37 / 14356m2	200.000	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	94,37	95,57	100.000	95,97	100.000	96,37	100.000	96,37	400.000	DPU
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	34,01	50,00	53.920.000	60,00	115.340.00 0	75,00	53.170.000	75,00	237.585.37 3	DLH
	Persentase Pengurangan Sampah	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	18,03	22,00		24,00		25,00		25,00		DLH
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio ketersediaan sarpras persampahan	Jumlah, Penting, UU No. 18 Tahun 2008	0	82,00	18.166.000	83,00	19.696.000	85,00	17.376.000	85,00	55.988.000	DPU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Persen, Tahunan	25	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	200.000	DLH
	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Persen, Tahunan	34	45		50		55		55		DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Peningkatan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli lingkungan hidup	Jumlah, Kumulatif	25	35	100.000	40	100.000	45	100.000	45	350.000	DLH

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah, Tahun	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	200.000	DLH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah peningkatan kinerja masyarakat peduli lingkungan hidup	Jumlah, Kumulatif	12	20	270.000	25	270.000	30	270.000	30	1.080.000	DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen, Tahunan	90,00	90,00	125.000	90,00	125.000	90,00	150.000	90,00	450.000	DLH
MISI 3: Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan												
Tujuan 3.1. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi			3,5		4,2		4,9		4,9		
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Porduktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian		0,5	0,7		0,8		1		1		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	1.964.378	2.003.862	450.000	2.023.900	500.000	2.044.139	550.000	2.044.139	1.893.250	DKPP
	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Ribu Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	13.608.184	13.881.708		14.020.525		14.160.730		14.160.730		DKPP
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing	Persen; Tahun	11,11111111	55,55555556	170.000	77,77777778	190.000	100	210.000	100	720.000	DKPP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.730.262	2.764.493	470.000	2.792.138	490.000	2.825.643	510.000	2825643	1.901.250	DKPP

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Ribu Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	145.642.227	148.291.680		150.431.397		153.024.735		153.024.735		DKPP
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	5.478.639	5.492.344	270.000	5.503.329	290.000	5.517.087	310.000	5.517.087	1120000	DKPP
	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Ribu Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	131189142,4	131517312	0	131780346,7	0	132109797,5	0	132109797,5	0	DKPP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi daging (kg)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	11.284.734	11.511.557	170.000	11.626.673	210.000	11.742.939	250.000	11.742.939	690.000	DKPP
	Produksi Telur (kg.)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	10.760.493	10.976.779		11.086.547		11.197.412		11.197.412		DKPP
	Produksi Susu (kg.)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	604.664	616.818		622.986		629.216		629.216		DKPP
	Persentase Penanganan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahun	89,80	89,90		89,93		90,00		90,00		TanKP
	Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Persen; Tahun	63,00	68,00		72,00		75,00		75,00		TanKP
	Luas Lahan Pertanian Organik	Persen; Tahun	2,00	2,00		2,00		5,00		5,00		TanKP
	Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Persen; Tahun	62,72	62,98		63,24		63,50		63,50		TanKP
	Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Persen; Tahun	15,51	16,98		19,45		22,01		22,01		TanKP

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanaman	Indeks; Akumulatif; IKU OPD	1,52	1,62	100.000.00 0	1,66	100.000.00 0	1,70	100.000.00 0	1,70	400.000.00 0	TanKP
	Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	Persen; Tahun	2,60	3,34		3,70		4,11		4,11		TanKP
	Luas Lahan Sawah Lestari	Persen; Tahun	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		TanKP
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahunan; IKU OPD	< 2,5	< 2,5	90.000	< 2,5	100.000	< 2,5	120.000	< 2,5	390.000	TanKP
	Rasio Penggunaan Agnesia Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	2		3		4		4		TanKP
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	Persen ; Tahunan;	31,37254902	5,60224089 6	345.000	5,602240896	365.000	5,602240896	385.000	5,602240896	1.420.000	DKPP
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Ternak (KTT) meningkat status kelembagaannya.	Kelompok/Tahunan/Renstra Disnak Provinsi Jateng.	2 kelompok	2 kelompok	100.000	2 kelompok	100.000	2 kelompok	100.000	10 kelompok	400.000	DKPP
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	Persen; Tahun	150	27		20		20		100	-	TanKP
	Pertumbuhan Pos Penyuluh Desa (Posludhes)	Persen; Tahun	70	13		11		10		57		TanKP
	Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	Persen; Tahun	628	2,51		2,57		2,64		11,94		TanKP
	Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut Ke Madya	Persen; Tahun	614	1,94		1,93		1,92		9,77		TanKP

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Indeks Gapoktan yang bermitra dengan BUMP	Persen; Tahun	7	7		7		7		7		TanKP
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penguatan cadangan pangan					P1					0	TanKP
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase penguatan cadangan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2 010	210	228	222.200	238	224.422	245	226.666	245	893.288	TanKP
	Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2 010	48	50		51		52		52		TanKP
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2 010	72	84	37.768	87	38.146	90	38.527	90	151.836	TanKP
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2 010	90	80	65.650	83	66.307	85	66.970	85	263.926	TanKP
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Porduktifi tas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri		6,09	6,24		6,31		6,38		6,38		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Pembangunan Industri dengan Rencana Pembangunan Industri	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00	1.000.000	100,00	1.200.000	100,00	1.500.000	100,00	4.150.000	Perinaker
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan komitmen perolehan IUI	Persen, Bulan	100,00	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00	100.000	Perinaker
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Industri yang terverifikasi	Persen, Bulan	100,00	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	200.000	Perinaker

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten		1,85	1,99		2,23		2,33		2,33		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	Persen; Tahunan	100	100	7.000.000	100	7.500.000	100	8.000.000	100	28.960.000	Porapar
	Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Unit; Tahunan	75,00	85,00		90,00		95,00		95,00		Porapar
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase DTW yang dipromosikan	Persen; Tahunan	75,00	85,00	1.000.000	90,00	1.250.000	95,00	1.500.000	95,00	3.800.000	Porapar
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikasi	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikasi	10	20	500.000	25	600.000	26	700.000	25	1.900.000	Porapar
Sasaran 3.1.5. Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan		6,02	6,16		6,24		6,31		6,31		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar direhabilitasi	Persentase, Tahunan; Permendagri No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern	50,00	65,38	2.500.000	76,92	2.500.000	88,46	2.500.000	88,46	11.907.781	Disdagkop UMKM
	Persentase pasar e- retribusi	Persen; Tahunan	7,69	46,15		65,38		84,62		84,62		Disdagkop UMKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pedagang Tertib Ukur	Persentase, data tahunan	27,95385227	35,0086195 5	150.000	50,00663042	200.000	60,00530434	250.000	60,00530434	750.000	Disdagkop UMKM

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil	Persen; Tahunan: Kemendag	<9%	<9%	95.000	<9%	120.000	<9%	120.000	<9%	395.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	Persen; Tahun	2	2	150.000	2	220.000	2	250.000	2	810.305	Disdagkop UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Laju Nilai Ekspor	Persen; Tahun	1	1	-	1	30.000	1	35.000	1	92.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam yang terfasilitasi	Persen; Tahun	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	200.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	Persen; Tahun	72,9	17,3120728 9	60.000	17,76765376	70.000	18,22323462	80.000	18,22323462	260.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	Persen; Kumulatif	9	17,72	569.358	26,07	580.000	35,18	587.000	35,18	2.303.716	Disdagkop UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi bermitra	Persen; Tahun	1,038961039	3,63636363 6	52.000	4,935064935	54.000	6,233766234	55.000	6,233766234	204.386	Disdagkop UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	Persen; Kegiatan	2,628811777	4,20609884 3	90.000	4,731861199	100.000	5,257623554	100.000	5,257623554	290.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kegiatan	0	1,05152471 1	160.000	2,628811777	235.000	4,206098843	310.000	4,206098843	945.133	Disdagkop UMKM
MISIS 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi												
Tujuan 4.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	IPM			69,43		70,13		70,83		70,83		
	IPG			87,03		87,12		87,21		87,21		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan		0,546	0,556		0,558		0,56		0,56		
PROGRAM PENGELOLA PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasai dalam PAUD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	25,21	26,56	200.333.07 8	27,48	202.336.40 9	29,43	204.359.77 3	29,43	805.378.84 1	Disdikbud
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	32,95	36,35		38,05		39,75		39,75		Disdikbud
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan dasar	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	99,96	100		100		100		100		Disdikbud
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan menengah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	65,60	75,50		78,80		82,10		85,40		Disdikbud
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	46,75	53,77		56,11		58,45		60,79		Disdikbud
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	52,84	54,72		55,45		56,34		56,34		Disdikbud
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	5,26	5,26	1.206.950	5,26	1.219.020	5,26	1.231.210	5,26	4.852.179	Disdikbud
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Kelas, SD, PAUD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	1 : 0,3	1 : 0,3	181.800	1 : 0,3	183.618	1 : 0,3	185.454	1 : 0,3	730.872	Disdikbud
	Rasio Guru Mapel, SD, SMP, PAUD dan Dikmas	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	1 : 1 : 32	1 : 1 : 31		1 : 1 : 30		1 : 1 : 29		1 : 1 : 28		Disdikbud
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	200.000	Disdikbud

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	48,00	52,00	530.250	54,00	535.553	56,00	540.908	56,00	2.131.711	Perpustakaan dan Arsip
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		0,794	0,801		0,802		0,804		0,804		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Persen; Tahunan	46,00	75,00	122.264.08 2	100,00	123.486.72 3	100,00	124.721.59 0	100,00	491.525.94 1	Dinas Kesehatan
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,10	0,11		0,12		0,13		0,13		Dinas Kesehatan
	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen; Tahunan; SPM bidang Kesehatan	96,00	98,00		99,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	96,00	98,00		99,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	98,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Cakupan balita stunting	Persen; Tahunan	20,00	18,00		16,00		14,00		14,00		Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan balita	Persen, tahunan, SPM bidang Kesehatan	95,35	97,00		99,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	70,00	80,00		85,00		90,00		90,00		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persen, tahunan, SPM bidang Kesehatan								0,00		Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	40,00	50,00		55,00		60,00		60,00		Dinas Kesehatan
	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	87,50	95,00		97,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	75,00	78,00		79,00		80,00		80,00		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	55,00	65,00		70,00		75,00		75,00		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	60,00	70,00		75,00		80,00		80,00		Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	55,00	65,00		70,00		75,00		75,00		Dinas Kesehatan
	Cakupan desa UCI	Persen, tahunan	94,00	96,00		98,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persen, tahunan, SPM bidang Kesehatan	86,00	90,00		95,00		95,00		95,00		Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	86,00	90,00		95,00		95,00		95,00		Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen, tahunan, SPM bidang Kesehatan	97,00	97,00		98,00		99,00		99,00		Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	97,00	97,00		98,00		99,00		99,00		Dinas Kesehatan
	Persentase desa STBM	Persen, Tahunan	2,00	7,00		9,00		10,00		10,00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo		100	100	165000	100	165000	100	165000	100	165.000	RSUD Soeselo
	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo		100	100	137990863,5	100	144890406,7	100	152134927	100	152134927	RSUD Soeselo
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi		100	100	800000	100	750000	100	700000	100	700.000	RSUD Suradadi
	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi		100	100	22500000	100	23000000	100	23500000	100	23500000	RSUD Suradadi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	Persen; Tahunan	100,00	100,00	219.448	100,00	231.392	100,00	244.532	100,00	843.960	Dinas Kesehatan
	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	Persen; Tahunan	59,00	69,00		83,00		93,00		100,00		Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan produk industri rumah tangga (PIRT) pangan yang tersertifikasi	Persen, Tahunan	100	100	592.477	100	651.724	100	716.897	100	2.499.712	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	Persen, Tahunan	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan; Indikator Kinerja program promosi kesehatan	82	84	48.998.971	85	49.488.961	85	49.983.851	85	196.985.61 6	Dinas Kesehatan
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		69,3	70,16		70,8		71,4		71,4		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Kategori, Tahunan, APBD	21,00	26,00	225.000	28,00	230.000	30,00	235.000	30,00	890.000	P3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio, Tahunan, Data SIMPONI	5,16	6,37	485.524	6,35	485.524	6,32	485.524	6,32	1.942.096	P3AP2KB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	Persen, Tahunan, Laporan Kunjungan	0,04	0,06	125.000	0,07	150.000	0,08	200.000	0,08	575.000	P3AP2KB
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	Persen, tahunan, laporan SIGA	72,00	76,00	27.000	78,00	28.000	80,00	30.000	90,00	110.000	P3AP2KB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Persen, Tahunan, Data Evaluasi KLA	55,00	64,00	250.000	67,00	350.000	70,00	300.000	70,00	1.050.000	P3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen, Tahunan, Data Simfoni PPPA	60	80	699.000	90	819.000	100	982.000	100	2.911.000	P3AP2KB

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate/mCPR)	Persen, bulanan, Laporan Dalap Kab	69,04	69,14	3.539.173	69,34	4.125.134	69,54	4.236.194	69,54	12.219.648	P3AP2KB
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen; Tahun	14,06	13,86		13,76		13,66		13,66		P3AP2KB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka kelahiran Total)	Dokumen; Tahunan; BPS	2,43	2,37	195.000	2,33	225.000	2,30	300.000	2,30	896.000	P3AP2KB
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Kualitas Pemuda	Pertumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja		200	400		500		600		600		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan penyadaran pemuda	Persen; Tahunan	5,00	10,00	2.350.000	12,00	2.350.000	15,00	2.350.000	15,00	8.400.000	Porapar
	Persentase kelompok kewirausahaan pemuda dibina	Persen; Tahunan	15,00	25,00		30,00		35,00		35,00		Porapar
	Persentase peningkatan organisasi pemuda yang aktif	Persen; Tahunan	10,00	20,00		25,00		30,00		30,00		Porapar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlit yang berprestasi		62	75	15000	80	15000	85	15000	85	60000	Porapar
Tujuan 4.2. Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Indeks Gini			0,299		0,295		0,289		0,289		
Sasaran 4.2.1. Menekan Laju Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin		8,14	8,41		8,3		8,21		8,21		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	32,44	66,25	956300	83,15	1075425	100,00	1146300	100,00	3581025	Dinsos
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019	25,16	47,01	2003750	65,57	2230235	100,00	2488569	100,00	10007956	Dinsos
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	83,28	99,21	957010,931	100	926982,731	100	1112068,89 1	100	4156062,55 3	Dinsos
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	100	100000	100	100000	100	100000	100	300000	Dinsos
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100	100	934250	100	943592,5	100	953028,425	100	3755870,92 5	Dispermades
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	Persen ; bulanan ; Laporan Dalap Kab	20.84	21,05	195.800	22,00	215.380	22.05	261.000	22.05	850.180	P3AP2KB

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Sasaran 4.2.2. Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka		9,82	10,21		9,54		8,45		8,45		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen, Tahun	0	40	50.000	60	50.000	100	50.000	100	150.000	Perinaker
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Produktivitas Tenaga Kerja	Persen, Tahun	3,70	5,50	832.000	6,40	1.248.000	6,70	1.664.000	6,70	4.160.000	Perinaker
	Persentase Tenaga Kerja yang berkompeten	Persen, Bulan	3,70	5,50		6,40		6,70		6,70		Perinaker
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	AKAN	Jumlah Orang, Tahunan	660,00	350,00	200.000	500,00	220.000	700,00	240.000	700,00	770.000	Perinaker
	AKAD	Jumlah Orang, Tahunan	246,00	375,00		500,00		700,00		700,00		Perinaker
	AKL	Jumlah Orang, Tahunan	140	625		800		1000		1000		Perinaker
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Hubungan Industrial	Satuan, Bulan	59,53	80,00	275.000	90,00	300.000	90,00	325.000	90,00	1.150.000	Perinaker
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan	Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009	100	100	120.000	100	132.000	100	145.200	100	497.200	Perinaker
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Investasi di kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	39,69	3,23	200.000	3,13	210.000	3,03	220.000	3,03	755.000	DPMPPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Persen; Tahunan	1,00	1,33	500.000	1,00	500.000	1,25	525.000	1,25	1.775.000	DPMPPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Perijinan	Nilai	78	80	660.000	81	710.000	82	715.000	82	2.667.400	DPMPPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persentase	61,28	67,28	330.000	70,28	490.580	73,28	419.567	73,28	1.390.147	DPMPPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase frekuensi Peningkatan Update data	Persentase	6,00	10,00	100.000	12,00	100.000	15,00	100.000	15,00	375.000	DPMPPTSP

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	persentase izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha yang terfasilitasi	Persen; Tahunan;	76,20	80,00	500.000	82,00	550.000	84,00	600.000	84,00	2.100.000	Perkimtaru
MISI 5: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal												
Tujuan 5.1. Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			86,66		88,66		90,66		90,66		
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kerukunan Kerukunan Hidup Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		82,66	86,66		88,66		90,66		90,66		
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase masyarakat memiliki karakter kebangsaan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,66	86,66	404.000	88,66	408.040	90,66	412.120	90,66	6.876.047	Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/WakilBupati dan Persentase Pengguna Hak Pilih Pilkades.	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017		0	1.848.798	Gubernur/Wakil Gubernur 74%, Bupati/WakilBup ati 71 % dan Persentase Pengguna Hak Pilih PilkadaS 80 %	2.757.118	Persentase Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif 65 %, Presiden/Wa kil Presiden 65%	3.320.684	Persentase Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif 65 %, Presiden/Wa kil Presiden 65%	9.534.250	Kesbangpol
	Persentase Bantuan Partai politik			100		100		100		100		
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Terbina	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,00	90,00	202.000	100,00	204.020	100,00	206.060	100,00	812.080	Kesbangpol

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	85,00	90,00	151.500	93,00	153.015	95,00	154.545	81,00	609.060	Kesbangpol
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Adiwerna
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Balapulang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Bojong
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Bumijawa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	78.000	100	84.000	100	90.000	100	299.000	Kecamatan Dukuhwaru

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Dukuhturi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Jatinegara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Kedungbante ng
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Kramat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Lebaksiu

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Margasari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Pagerbarang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Pangkah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Slawi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Suradadi

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Talang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Tarub
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Warureja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik SARA yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97,00	98,00	156.550	99,00	158.116	100,00	159.697	100,00	629.363	Kesbangpol
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Adiwerna yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Adiwerna
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Balapulang yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Balapulang
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Bojong yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Bojong
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Bumijawa yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Bumijawa

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Dukuhwaru yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	30.000	100	30.000	100	80.000	Kecamatan Dukuhwaru
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Dukuhturi yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Dukuhturi
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Jatinegara yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Jatinegara
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Kedungbanteng yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Kedungbante ng
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Kramat yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Kramat
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Lebaksiu yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Lebaksiu
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Margasari yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	21700	100	21700	100	21700	100	86.800	Kecamatan Margasari
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Pagerbarang yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Pagerbarang
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Pangkah yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Pangkah
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Slawi yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Slawi

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Suradadi yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Suradadi
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Talang yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Talang
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Tarub yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	75.000	Kecamatan Tarub
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Warureja yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Warureja
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	presentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	80,00	86,00	859.922	88,00	868.521	90,00	877.207	90,00	3.457.058	Satpol PP
	Presentase perda dan perkada yg ditegakkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	70,00	75,00		77,00		80,00		80,00		Satpol PP
Tujuan 5.2. Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			174,62		172,12		171,84		171,84		
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah		0,6	0,8		0,89		0,9		0,9		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020	66	82	1100000	90	1150000	100	1200000	100	4500000	Satpol PP
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	85.71	99.15	2.722.960	100.00	2.750.190	100.00	2.777.691	100.00	10.946.841	BPBD

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	100	400		500		600		600		BPBD
	Persentase warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	100	400		500		600		600		BPBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	100	309913	100	313012,13	100	650000	100	1582838,13	Dinsos
Tujuan 5.3. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan			66,08		68,52		70		70		
Sasaran 5.3.1. Meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan	Cakupan Kelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Kemajuan Kebudayaan		22,5	26,5		27		28,56		28,56		
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	400.000	disdikbud
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	76,15	87,58	1.054.188	91,39	1.064.729	95,2	1.075.377	99,01	4.238.044	disdikbud
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase seni dan kesenian yang dibina	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	67,15	77,23	300.000	80,59	300.000	83,95	300.000	87,31	1.200.000	disdikbud

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah yang terdokumentasikan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	68,79	79,11	100.000	82,55	100.000	85,99	100.000	89,43	350.000	disdikbud
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen; Tahunan; Permendagri No.18 Tahun 2020	45,83	52,70	1.881.630	54,99	1.900.446	57,28	1.919.451	59,57	7.564.527	disdikbud
Program Pengelolaan Permuseum	Persentase museum yang dikelola	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	100	100	340.000	100	350.000	100	360.000	100	1.375.000	disdikbud

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dalam RPJMD terdiri dari urusan dan program prioritas pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Bab ini memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2019-2024 sebagaimana tabel berikut, dilanjutkan dengan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lima tahun ke depan.

Tabel 7.1.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024

NO	URAIAN	Tahun		
		2022	2023	2024
1	PENDAPATAN DAERAH	2.754.588.635.000	2.757.091.565.000	2.761.290.092.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	436.952.832.000	439.455.762.000	443.052.070.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	133.365.000.000	134.823.500.000	137.333.600.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.110.767.200	27.155.197.000	28.241.405.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.758.000.000	13.758.000.000	13.758.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	263.719.064.800	263.719.065.000	263.719.065.000
1.2	Pendapatan Transfer	2.165.806.003.000	2.165.806.003.000	2.166.408.222.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.984.603.809.000	1.984.603.809.000	1.985.206.028.000
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	30.110.971.000	30.110.971.000	30.713.190.000
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.112.675.840.000	1.112.675.840.000	1.112.675.840.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	463.620.414.000	463.620.414.000	463.620.414.000
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	18.742.708.000	18.742.708.000	18.742.708.000
1.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0	0	0
1.2.1.6	Dana Desa	359.453.876.000	359.453.876.000	359.453.876.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	181.202.194.000	181.202.194.000	181.202.194.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	181.202.194.000	181.202.194.000	181.202.194.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	0	0
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	151.829.800.000	151.829.800.000	151.829.800.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	151.829.800.000	151.829.800.000	151.829.800.000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Lain-lain Pendapatan	0	0	0
2	BELANJA	2.802.714.366.000	2.807.046.290.000	2.904.712.700.000
2.1	Belanja Operasi	1.842.233.606.000	1.857.233.606.000	1.975.860.970.000
2.1.1	Belanja Pegawai	1.174.730.222.000	1.194.730.222.000	1.214.730.222.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.497.784.000	595.497.784.000	574.125.148.000
2.1.3	Belanja Hibah	63.227.600.000	63.227.600.000	183.227.600.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.778.000.000	3.778.000.000	3.778.000.000

NO	URAIAN	Tahun		
		2022	2023	2024
2.2	Belanja Modal	445.867.524.000	434.949.154.000	413.628.570.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	504.613.236.000	504.863.530.000	505.223.160.000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	15.947.576.000	16.197.870.000	16.557.500.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	488.665.660.000	488.665.660.000	488.665.660.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	(48.125.731.000)	(49.954.725.000)	(143.422.608.000)
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	90.625.731.000	89.954.725.000	143.422.608.000
3.1.1	SiLPA	90.625.731.000	89.954.725.000	90.922.608.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	60.000.000.000
3.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah			2.500.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	42.500.000.000	40.000.000.000	10.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	0	
	Pembiayaan Netto	48.125.731.000	49.954.725.000	143.422.608.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)			

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 7.2.

Target dan Realisasi Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	NON URUSAN						122.133.242		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah						122.133.242		Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
		Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	
		Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						816.869.952		
1	PENDIDIKAN						200.679.130		Dinas Dikbud
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal						2.565.000		Dinas Dikbud
		APM PAUD	Jumlah siswa PAUD usia 0-6 dibagi jumlah penduduk usai 0-6	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	24,17	25,21		26,77	
		Angka partisipasi PNFI	Jumlah partisipasi PNFI dibagi jumlah penduduk usia PNFI	Persen; Tahunan; IKU OPD	31,24	32,95		97,25	
	Program Pendidikan Dasar						143.001.800		Dinas Dikbud

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan kota dibagi jumlah seuruh APS SD/MI se-Kabupaten dan kota dikali seratus Persen	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,14	0,14		0,04	
		Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	Jumlah capaian kinerja APS SMP/Ts se-Kabupaten dan kota dibagi jumlah seuruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan kota dikali seratus Persen	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,13	0,13		0,86	
	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						19.417.000		Dinas Dikbud
		Rasio Guru:Kelas	Jumlah guru dibagi jumlah kelas (ideal 1:1)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	1:0,3	1:0,35		1:1,29	
		Rasio Guru:Mapel	Jumlah guru dibagi jumlah mapel (ideal 1:1:24 jam beban mengajar)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	1:1:32	1:1:31		1:1:25,73	
	Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan						35.695.330		Dinas Dikbud
		Persentase Sarana dan Prasarana SD baik	Jumlah Sarana Prasarana SD baik dibagi jumlah sarana prasarana SD(prioritas Ruang Kelas dan MCK)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	91,65	93,65		99,92	
		Persentase Sarana dan Prasarana SMP baik	Jumlah Sarana Prasarana SMP baik dibagi jumlah sarana prasarana SMP(prioritas Ruang Kelas dan MCK)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	87,21	89,21		99,05	
2	KESEHATAN						363.691.183		Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						6.450.000		Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa UCI	Jumlah Desa dengan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) minimal 80% (dengan kriteria Bayi usia 0 s.d 12 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu : HB.0 (1 kali),DPT-HB Hib (3 kali) Polio (4 kali) dan Campak atau MR (1 Kali)) dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%	Persen, Tahunan, Referensi : UU Kes No.36 th 2009, PMK No.12 th 2017	100%	94%		0,94	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%'	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Resntra Kemenkes	10,07%	40%		15%	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100%	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Resntra Kemenkes	51,48%	55%		75%	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
			Jumlah penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100%	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Resntra Kemenkes	20,91%	60%		75%	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif prevevtif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Renstra Kemenkes	28,05%	55%		85,41%	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun waktu 1 tahun dibagi target sasaran orang terduga TBC pada kurun waktu 1 tahun yang sama x 100 %	Persen; Tahunan; referensi SPM	67%	86%		57,11%	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun 1 tahun dibagi dengan estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama kali 100%	Persen; Tahunan; referensi SPM	97%	97%		90,52%	
		Angka penemuan kasus baru kusta	Jumlah kasus baru Kusta pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tertentu kali 100.000	Per 100.000 pddk; Tahunan; referensi SDGs	14,9 per 100.000 pddk	12 per 100.000 pddk		11 per 100.000 pddk	
		Angka kesakitan DBD	Jumlah penderita DBD pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk dalam tahun tertentu kali 100.000	Per 100.000 pddk; Tahunan; referensi Permendagri 86/2017, Renstra Dinkes propinsi	5, 25 /100.00 pddk	< 45 per 100.000 pddk		23,58	
	Program Kesehatan Masyarakat						44.600.000		Dinas Kesehatan
		Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa yang telah mencapai akses 100% disuatu wilayah dalam periode waktu tertentu dibagi jumlah Desa seluruhnya dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi RPJMN, RPJMD Prov.	0,3%	2,0%		1,39%	
		Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) strata utama dan paripurna dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes prov	80%	81%		95,37%	
		Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif mandiri dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes prov	10%	11%		34,49%	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh anak usia pendidikan dasar dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK no. 4 tahun 2019	99%	100%		111,14%	
		Cakupan penduduk memiliki jaminan kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 100%		82,62%	85%		91,43%	
	Program Pelayanan Kesehatan						119.701.313		Dinas Kesehatan
		Cakupan Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan dibagi Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan dikali 100%	%; Tahunan; Referensi : Renstra Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.1 Tahun 2012, Permenkes No.75 Thun 2014 , Permenkes N0.56 Tahun 2014	100%	100%		105,40%	
		Persentase Puskesmas dan Labkesda yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas dan Labkesda yang terakreditasi dibagi jumlah Puskesmas dan Labkesda dikali 100%	%; Tahunan; Referensi : Renstra Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.46 Tahun 2015, Permenkes No.42 Tahun 2016, Kepmenkes No.298 Tahun 2008	100%	100%		100,00%	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Cakupan pelayanan perijinan di bidang kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan dibagi jumlah fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan yang mengajukan rekomendasi perijinan dan memenuhi persyaratan diterbitkannya rekomendasi perijinan dikali 100%	%; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Kab. Tegal 2014-2019 dan Regulasi yang mengatur perijinan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan	100%	100%		100,00%	
		Persentase pencapaian standar mutu akreditasi puskesmas	Setiap Puskesmas mencapai nilai minimal standar mutu akreditasi puskesmas sesuai regulasi yang berlaku	Persen; Tahunan; Referensi : Renstra Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.46 Tahun 2015, Permenkes No.42 Tahun 2016	30%	38%		38,00%	
		Rata-rata jumlah Pengunjung WKJ Kalibakung setiap bulan	Jumlah Pengunjung WKJ Kalibakung dalam setahun dibagi 12	Angka, Tahunan; Renstra Dinkes Kab. Tegal 2014-2019	240	250		250	
		Persentase Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah sampel dikali 100%	Persen, Tahunan	100%	100%		96,67%	
		Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di puskesmas	Jumlah dan jenis obat perbekalan kesehatan yang tersedia dipuskesmas dibagi jumlah kebutuhan dikali 100 %	Persen; Tahunan; referensi Keputusan Menteri Kesehatan no 1121 tahun 2008 tentang Teknis Pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar	99,01%	100%		100,00%	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar	Jumlah puskesmas yang telah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar dibagi jumlah puskesmas kali 100 %	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	100%	68%		68,00%	
		Cakupan Pelayanan Penyimpanan dan Pendistribusian Obat di Gudang Farmasi sesuai standar	Jumlah puskesmas yang terlayani pendistribusian obat di Gudang Farmasi sesuai standar dibagi jumlah puskesmas dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	100%	100%		100,00%	
	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan						9.245.000		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar dibagi Jumlah ibu seluruh hamil dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	100%	96%		93,27%	
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jjumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dibagi jumlah seluruh ibu bersalin dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	96%	98%		98,23%	
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah seluruh bayi baru lahir dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	100%	100%		99,01%	
		Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh balita dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	100%	90%		73,71%	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Cakupan remaja mendapat pelayanan konseling	Jumlah remaja mendapat pelayanan konseling dibagi jumlah seluruh remaja dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Prov	40%	45%		72,12%	
		Pelayanan kesehatan usia lanjut	Jumlah masyarakat usia 60 tahun ke atas mendapat pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar dibagi jumlah seluruh warga negara usia 60 tahun ke atas dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	33,7%	75%		79,48%	
		Cakupan balita stunting	Jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Prov	24%	20,0%		7,80%	
		Cakupan puskesmas yang mempunyai tenaga kesehatan strategis	Jumlah Puskesmas yang mempunyai tenaga kesehatan strategis dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Prov	52%	59%		87,26%	
	Program BLUD RSUD dr. Soeselo						131.419.870		
	Program Pelayanan Medis dan Mutu Etika								RSUD dr Soeselo
		Persentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan	Persentase terpenuhi pelayanan medis sesuai standar	Persen; Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumhaskitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017,Permenkes 129 tahun 2008	73,20	75%		77,00%	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase mutu dan etika sesuai standar	Persentase terpenuhi mutu dan etika sesuai standar	Persen; PB IDI 221 tahun 2002, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	71,80	75%		70,00%	
	Program Pelayanan Keperawatan dan Asuhan Keperawatan								RSUD dr Soeselo
		Persentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	Persentase terpenuhi pelayanan keperawatan sesuai standar	Persen; Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumahsakitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017,Permenkes 129 tahun 2008	74,30	75%		75,00%	
		Persentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	Persentase terpenuhi asuhan keperawatan sesuai standar	Persen; PP PPNI tahun 2018, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	72,20	75%		75,00%	
	Program Penunjang								RSUD dr Soeselo
		Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	Persentase penunjang medis sesuai standaryang terpenuhi	Persen; Tahunan; Permenkes no129/MENKES/SK/III/2008; Permenkes no 56 tahun 2014	79,1%	80%		96,49%	
		Persentase penunjang non medis sesuai standar	rata-rata akumulasi Persentase standar pelayanan minimal, pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Persen; Tahunan; Permenkes nomor 56 tahun 2016	90%	90%		92,01%	
	Program Tata Usaha								RSUD dr Soeselo

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase pemenuhan Urusan Umum dan Kehumasan, Kepegawaian dan Diklat	Terpenuhinya pengelolaan urusan Umum dan kehumasan, pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan	Laporan Capaian Kegiatan	100%	100%		100,00%	
	Program Keuangan								RSUD dr Soeselo
		Persentase Dokumen Keuangan	pelaporan pendapatan harian, bulanan dan triwulan, Klaim BPJS, Lampiran RBA , pengajuan SPJ, Pembuatan SPD, Penghitungan anggaran kas, pembayaran gaji PNS dan BLUD, Laporan realisasi anggaran, arus kas, realisasi pengeluaran, pendapatan, neraca, CaLK, SAP, SAK, Audit laporan keuangan	Dokumen keuangan	100%	100%		100,00%	
	Program Perencanaan dan Rekam Medis								RSUD dr Soeselo
		Persentase Pengelolaan Rekam Medis dan Sistem Informasi	Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi rekam medis dan pemenuhan sumber daya sistem informasi	Dokumen Rekam Medis	100%	100%		100,00%	
		Persentase dokumen Perencanaan	Persentase pemenuhan dokumen LKjIP, Profil RS, Rencana Strategis OPD/ Rencana Strategi Bisnis BLUD Rumah Sakit, Rencana Bisnis Anggaran BLUD, Proposal kegiatan bersumber APBN dan/atau APBD provinsi, Rencana Kerja OPD, Pelaksanaan Forum OPD, POK , Penetapan Kinerja RS, Data dukung LKPJ Bupati, Data dukung LPPD	Dokumen Perencanaan	100%	100%		100,00%	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan						52.275.000		RSUD Suradadi

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Rata-rata Persentase pelayanan medis dan keperawatan sesuai standar perumhaskitan	Persentase terpenuhi pelayanan medis dan keperawatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes 56 Tahun 2014, Permenkes 4 Tahun 2018, Kepmenkes 129 Tahun 2008, Permenkes 34 Tahun 2017, Perpres 77 Tahun 2015	87,50	88,50		97,30	
		Rata-rata Persentase penunjang medis dan non medis sesuai dengan standar pelayanan dan sarana prasarana rumah sakit	Persentase penunjang medis dan non medis yang terpenuhi sesuai standar	Persen; Tahunan; Kepmenkes 129 Tahun 2008, Permenkes 56 Tahun 2014	85,00	86,00		97,50	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						167.275.000		DPU, Dinas Perkimtaru
	Program Jalan						133.700.000		DPU
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan seluruhnya	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	62,42	70,02		68,77	
		Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 0,5-1)	Panjang jalan yang memiliki drainasi (Km) dibagi panjang seluruh jalan kabupaten (KM) dikali seratus Persen	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	30,00	40,00		58,41	
	Program Jembatan						10.900.000		DPU
		Proporsi jembatan dalam kondisi baik	Jembatan kondisi baik dibagi jembatan seluruhnya	Persen; Kumulatif	67,11	75,11		68,69	
	Program Sumber Daya Air						18.100.000		DPU
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali 100 %	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	56,39	60,00		58,86	
	Program Pertanahan dan Tata Ruang						4.575.000		Dinas Perkimtaru

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Jumlah realisasi RTRW dibanding jumlah rencana peruntukan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	85,00	86,00			
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						71.196.000		Dinas Perkimtaru
	Program Tata Perumahan & Permukiman						16.771.000		Dinas Perkimtaru
		Cakupan Akses Layanan Air Minum	Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Kumulatif;	86,23	88,00		86,23	
		Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Persen; Kumulatif;	88,70	90,00		88,70	
		Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Persen; Kumulatif;	77,00	60,00		32,47	
		Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen; Kumulatif;	12,10	15,00		12,00	
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU	Persen; Kumulatif;	51,34	52,34		52,34	
	Program Bangunan Gedung						54.425.000		Dinas Perkimtaru
		Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Persen; Kumulatif;	66,67	68,77		66,67	
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						9.412.769		Satpol PP, Kesbangpol, BPBD
	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah						515.000		Satpol PP
		Persentase penyelesaian penegakan perda	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dibagi jumlah pelanggaran PERDA dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	76,00	80,00		80,00	
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum						1.575.000		Satpol PP

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah patroli siaga per tahun dibagi target patroli siaga per tahun dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU; SPM	70,00	74,00		74,00	
	Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran						4.076.769		Satpol PP
		Rasio Linmas per RT	Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten dibagi jumlah RT dalam satu kabupaten	Persen; Tahunan; IKU	1,00	1,07		1,06	
		Persentase Linmas Terlatih	Jumlah satuan linmas terlatih dibagi jumlah linmas dalam satu kabupaten dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU	7,00	8,00		0,07	
		Persentase Kasus Kebakaran Tertangani	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (RTR) dibagi jumlah kebakaran dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	58%	66%		79%	
	Program Kesbangpol						970.000		Kesbangpol
		Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif	Jumlah pemilih pemilu legislatif yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih pemilu legislatif	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	60,40	0		0	
		Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	Jumlah pemilih pemilu Presiden yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih pemilu Presiden	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	60,40	0		0	
		Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	Jumlah pemilih pemilu Gubernur yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih pemilu Gubernur	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	70,40	0		0	
		Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	Jumlah pemilih pemilu Bupati yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih pemilu Bupati	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	65,59	0		0	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades	Jumlah pemilih pemilu Pilkades yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih pemilu Pilkades	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	76,60	0		0	
		Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat	Jumlah konfil SARA dalam masyarakat (>50% kecamatan) dibagi jumlah konflik SARA)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0	0		12	
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana						1.146.000		BPBD
		Persentase masyarakat siap siaga bencana	Jumlah masyarakat yang dibina dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pembinaan	Persen; Tahunan; SPM	8,60	12,20		8,80	
		Persentase dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian, pemetaan, dan informasi wilayah rawan bencana yang dapat disusun dibagi dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian, pemetaan, dan informasi wilayah rawan bencana yang harus disusun	Persen; Tahunan; SPM	20,00	44,00		20,00	
	Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana						730.000		BPBD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	Jumlah kegiatan penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik dibagi jumlah kejadian bencana	Persen; Tahunan; SPM	85.71	90.19		90,00	
		Persentase dokumen penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana	Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun dibagi Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang harus disusun	Persen; Tahunan; SPM	30.00	50.00		50,00	
	Program Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana						1.130.000		BPBD
		Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah kegiatan penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibagi jumlah kerusakan infrastruktur dan perumahan pasca bencana	Persen; Tahunan; SPM	13.59	21.74		15,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian dan pemetaan penanganan pasca bencana yang dapat disusun dibagi Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian dan pemetaan penanganan pasca bencana yang harus disusun	Persen; Tahunan; SPM	33,33	58,33		40,00	
6	SOSIAL						4.615.870		Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial						1.782.510		Dinas Sosial
		Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	Jumlah Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	83,34	84,34		78,49	
	Program Pemberdayaan Sosial						1.008.360		Dinas Sosial
		Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	89,08	90,08		90,08	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						900.000		Dinas Sosial
		Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	80,91	82,46		79,08	
	Program Penanganan Fakir Miskin						925.000		Dinas Sosial
		Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Cakupan Penanganan Fakir Miskin	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	96,64	97,87		145,60	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						104.530.899		
1	TENAGA KERJA						5.245.000		Dinas Perinaker
	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja						4.745.000		Dinas Perinaker
		AKAN	Jumlah Angkatan Kerja antar Negara	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	653,00	660,00		193,00	
		AKAD	Jumlah Angkatan Kerja antar Daerah	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	231,00	246,00		1.020,00	
		AKL	Jumlah Angkatan Kerja Lokal	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	120,00	140,00		1.493,00	
	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial						500.000		Dinas Perinaker
		Persentase penyelesaian hubungan industrial	Jumlah penyelesaian kasus dibagi jumlah kasus	Persen, Tahunan, IKU OPD	40,00	50,00		100,00	
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.375.000		Dinas P3AP2KB
	Program Pemberdayaan Perempuan						675.000		Dinas P3AP2KB
		Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	jumlah skor kelembagaan dan pelaksanaan PUG yang telah dipenuhi dibagi Skor kesetaraan dan keadilan Gender (1000) dikali seratus Persen	Persen, Tahunan, IKU OPD	70,00	72,00		94,00	
	Program Perlindungan Anak						700.000		Dinas P3AP2KB
		Capaian Pemenuhan Hak Anak	Jumlah skor hak hak anak yang telah dipenuhi dibagi Skor pemenuhan hak anak (1000) dikali seratus Persen	Persen, Tahunan, IKU OPD	50,00	55,00		50,00	
3	PANGAN						810.000		Dinas Tan KP
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						810.000		Dinas Tan KP

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase penguatan cadangan pangan	Cadangan Pangan Kabupaten dibagi 100 dikali 100%	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010	229,00	210,00		267,00	
		Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Jumlah Realisasi dibandingkan Target dikali 100 dibagi 3 dikalikan 100%	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010	50,00	48,00		48,00	
		Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah pangan aman konsumen dibanding jumlah pangan diawal dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	93,00	72,00		61,50	
		Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase AKG dikali Bobot Masing -masing kelompok pangan	Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010	81,20	81,00		86,50	
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Bencana tertangani dibanding jumlah bencana dikali 100%	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010	93,00	72,00		100,00	
4	PERTANAHAN								Dinas Perkimtaru
	Program Pertanahan								Dinas Perkimtaru
		Persentase luas lahan bersertifikat	Jumlah luas lahan bersertifikat dibagi jumlah luas wilayah dikali seratus Persen	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	52,22	57,37		87,00	
5	LINGKUNGAN HIDUP						31.161.000		DLH
	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)						26.036.000		DLH
		Persentase sampah terangkut ke TPA	Jumlah sampah terangkut dibagi dengan jumlah sampah	Persen; Tahunan; IKU OPD	50,00	60,35		59,75	
		Persentase Limbah B3 ditangani	Limbah B3 ditangani dibagi Limbah B3	Persen; Tahunan; IKU OPD	50,00	60,35		50,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup						4.285.000		DLH
		indeks kualitas air	Nilai indeks kualitas air	nilai; Tahunan; IKU OPD	61,00	72,00		31,11	
		indeks kualitas udara	Nilai indeks kualitas udara	nilai; Tahunan; IKU OPD	77,00	77,50		84,99	
		indeks ketutupan lahan	Nilai indeks ketutupan lahan	nilai; Tahunan; IKU OPD	59,21	59,21		55,55	
	Program Tata Lingkungan						290.000		DLH
		Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persen; Tahunan; IKU OPD	65	55			
	Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan						550.000		DLH
		Persentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		50,00	
6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1.750.000		Dinas Dukcapil
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil						420.000		Dinas Dukcapil
		Persentase penduduk 0-18 tahun ber akta kelahiran	Jumlah penduduk ber akta kelahiran ditahun bersangkutan dibagi Jumlah penduduk di tahun bersangkutan dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	69,46	80,00		93,11	
		Persentase penduduk ber akta kematian	Jumlah penduduk meninggal dan memperoleh akta kematian ditahun bersangkutan dibagi Jumlah kematian di tahun bersangkutan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	14,73	20,00		68,54	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk						465.000		Dinas Dukcapil
		Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Jumlah KK tercetak/Jumlah KK x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,08%	90,00%		92%	
		Persentase Penduduk ber KTP-el	Jumlah Cetak/Belum cetak x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,43%	90,00%		99,63%	
		Persentase anak memiliki KIA	Jumlah penerbitan KIA di bagi Jumlah anak wajib KIA x 100 %	Persen; Tahunan; IKU OPD	1,85%	40,00%		21,18%	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan						865.000		Dinas Dukcapil
		Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	Jumlah Inovasi Pelayanan Kependudukan yang terlaksana dibagi jumlah Inovasi x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	20%	30%		50%	
		Persentase OPD/ Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Jumlah OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan dibagi jumlah OPD/Instansi x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	9,28%	25%		6,38%	
		Persentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan	Jumlah Pelayanan SIAK / Jumlah Penduduk	Persen; Tahunan; IKU OPD	85%	85%		85%	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						5.990.000		Dispermasdes
	Program Penataan Desa						650.000		Dispermasdes
		Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	Jumlah Aparatur pemerintahan desa yang dilatih atau difasilitasi dibanding jumlah total aparatur Pemerintahan Desa	Persentase. Kumulatif. Permendagri 112 Tahun 2014 dan Permendagri 83 Tahun 2015	50,15	58		65,00	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa					117 (hasil Pilkades 2019)	690.000		Dinas Permasdes

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyusun RKPDes, APBDes, LPPDesa dan Aset Desa tepat waktu dan benar dibandingkan dengan jumlah seluruh desa	Persen; Kumulatif; IKU OPD	15,00	25,00		75,00	
	Program Pengembangan Desa					85,00	4.000.000		Dinas Permasdes
		Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	Persentase Bumdes tumbuh dan berkembang	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.	35 Bumdes	25,00		101,00	
		Persentase Pengembangan Desa	Persentase Kerjasama Desa	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.	195 Kerjasama Desa dan 13 Kerjasama Antar Desa	100,00		0	
		Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaaan	0 Pengembangan Kawasan Pedesaan.	50,00		1,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat						650.000		Dinas Permasdes

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Jumlah KPMD,Posyandu,kelompok PKK RW,Kelompok PKK RT yang aktif dibanding dengan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada	Permendagri no 18 th 2018 ttg Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	10,00	25,00		50,00	
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	Jumlah Kelompok UED-SP,UP2K-PKK,CPPD,Pasar Desa,KUB dan Pokmas TTG yang berdaya atau aktif dibanding jumlah kelompok yang ada	Permendagri Nomor:6 Th 1998 ttg Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP)	5,00	25,00		50,00	
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						8.294.299		Dinas P3AP2KB
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera						5.053.433		Dinas P3AP2KB
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,28	0,26		0,12	
		Persentase Ketahanan keluarga	Persentase keluarga ikut kelompok kegiatan ber-KB dibagi keluarga ikut kelompok kegiatan dikali 100	Persen, Tahunan, IKU OPD	45,00	48,00		63,02	
	Program Keluarga Berencana						3.240.866		Dinas P3AP2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur dikali seratus Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	69,14	69,81		67,73	
9	PERHUBUNGAN						13.665.000		Dinas Perhubungan
	Program Lalu Lintas						1.250.000		Dinas Perhubungan

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia kali 100 %	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	34,49	40,00		10,68	
		Persentase Perijinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Jumlah Rekomendasi Ijin Andalalin dibagi target rekomendasi Ijin Andalalin kali 100	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	58,33	20,00		0	
		Persentase Pelanggaran Operasional Lalu Lintas	Jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang ditindak dibagi jumlah kendaraan diperiksa kali 100	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	38,92	35,00		5,45	
		Presentase Lokasi Titik Parkir	Jumlah lokasi titik parkir tahun n dibagi target lokasi titik parkir dikali 100	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	60,00	68,00		13,60	
	Program Angkutan						2.850.000		Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Jumlah Halte /terminal tahun n dibagi jumlah kebutuhan halte/ terminal kali 100	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	29,41	31,00		7,75	
		Rasio Ijin Trayek	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah angkutan umum pedesaan/perkotaan dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	66,00	76,00		0	
		Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan wajib uji tahun ke n dibagi jumlah kendaraan wajib uji	laporan dan monev, Permendagri No. 86/2017	77,80	80,00		59,29	
	Program Keselamatan Jalan						9.565.000		Dinas Perhubungan
		Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Jumlah angka kematian korban kecelakaan dibanding kendaran per 10.000	Persen; Tahunan; IKU OPD	32,00	35,00		0	
		Persentase Fatalitas Korban Kecelakaan	Jumlah Korban meninggal dunia dibanding jumlah kendaraan teregistrasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	4,17	4,00		0	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	jumlah LPJU pada tahun n dibagi jumlah LPJU yang seharusnya tersedia dikali seratus Persen	laporan dan monev, IKU OPD	45,15	56,57		74,51	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMASI						1.432.000		Dinas Kominfo
	Desiminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media						1.432.000		Dinas Kominfo
		Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	jumlah KIM dibagi jumlah desa yang ada dalam kab dikali seratus	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	10,00	33,00		0	
		Kualifikasi tingkat KIP Badan Publk	Skor perolehan KIP Badan Publik	Skor; Tahunan;	41,60	45,00		83,96	
		Indeks SPBE	Pengukuran tingkat maturitas SPBE berdasarkan pada domain tatakelola SPBE, kebijakan internal, dan layanan SPBE (indeks 0-5)	Indeks; Tahunan	2,58	2,75		3,11	
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						1.520.000		Dinas Dagkop UKM
	Program Koperasi						590.000		Dinas Dagkop UKM
		Persentase Koperasi aktif	koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT dan melaksanakan kegiatan usaha untuk melayani anggota dibagi jumlah koperasi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,37	0,38		0,58	
	Program Usaha Mikro Kecil Menengah						930.000		Dinas Dagkop UKM

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		UMKM yang kompetitif dan mandiri	Jumlah UMKM yang telah mendapatkan ijin, pelatihan dan fasilitasi modal dibagi jumlah UMKM dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	5,26	5,80		7,16	
13	PENANAMAN MODAL DAERAH						1.563.000		Dinas PMPTSP
	Program Pengendalian						480.000		Dinas PMPTSP
		Persentase Kepatuhan Perusahaan	Jumlah perusahaan yang patuh perijinan dibanding jumlah perusahaan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	46,73	61,28		60,00	
	Program Penanaman Modal						703.000		Dinas PMPTSP
		Nilai Investasi PMA	jumlah nilai investasi berskala internasional (PMA)	Rp (000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	480.800.000	500.000.000		291.626.116.163,00	
		Jumlah Investor PMA	jumlah pemohon asing	Pemohon;Tahun	3	5		5,00	
		Nilai Investasi PMDN	jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp (000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.073.862.531.863	850.000.000		9.073.688.922.252,00	
		Jumlah Investor PMDN	jumlah investor dalam negeri	Pemohon;Tahun	7.257	7.457		11.046,00	
	Program Perizinan						380.000		Dinas PMPTSP
		Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Indeks; Tahunan; IKU OPD	77,61	78,00		82,23	
14	PEMUDA DAN OLAHRAGA						8.052.000		Dinas Parpora
	Program Pemuda dan Olahraga						8.052.000		Dinas Parpora
		Persentase Wirausaha Pemuda	jumlah wirausaha muda dibagi jumlah seluruh wirausaha dikali seratus Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,10	0,30		0,28	
		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi pemuda dikali seratus Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00		100,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Jumlah Atlet yang Berprestasi	jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat Propinsi dalam satu tahun	Atlet; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	65,00	70,00		61,00	
15	STATISTIK						2.554.787		Dinas Kominfo
	Program statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK						2.554.787		Dinas Kominfo
		Persentase dokumen data sektoral statistik daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persentase sheet data yang dipublikasikan dibagi target sheet data yang dipublikasikan (2000 sheet) dikali seratus	Persen; Tahunan;	0	20,00		26,84	
		Laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh pengunjung SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	selisih jumlah pengunjung SDS / open data dibagi jumlah pengunjung SDS / open data tahun lalu dikali seratus	Persen; Tahunan	10,00	10,00		66,40	
		Standarisasi LPSE	Standarisasi LPSE	Level; Tahunan	15	17,0		15,0	
16	PERSANDIAN						14.203.813		Dinas Kominfo
	Program Teknologi Informatika dan Persandian						14.203.813		Dinas Kominfo
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai kematangan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) (skor 0-500)	Nilai;Tahunan	147,00	272,00		262,00	
17	KEBUDAYAAN						1.865.000		Dinas Dikbud
	Program Kebudayaan						1.865.000		Dinas Dikbud
		Persentase seni dan kesenian yang dibina	Jumlah seni dan kesenian yang dibina dibagi jumlah seni dan kesenian seluruhnya dikali 100	Satuan, Tahunan	78,50	79,61		79,96	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji	Jumlah Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji dibagi jumlah benda cagar budaya dan situs budaya seluruhnya dikali 100	Satuan, Tahunan	21,40	22,50		23,78	
		Persentase tradisi yang dikembangkan	Jumlah tradisi yang dikembangkan dibagi jumlah tradisi yang ada dikali 100.	Satuan, Tahunan	50,00	55,00		50,00	
18	PERPUSTAKAAN						3.900.000		Dinas Arpus
	Program Perpustakaan						3.900.000		Dinas Arpus
		Persentase peningkatan pemustaka	Persentase kenaikan jumlah pemustaka perpustakaan se Kabupaten Tegal dari data awal 2018 sebanyak 31.243 orang (target tahun ke 5 sebanyak 62.486 orang)	Persen; Tahunan; IKU OPD	31.243 orang	20% (37.492 orang)		20% (20.898 orang)	
		Persentase peningkatan koleksi judul	Persentase jumlah penambahan koleksi judul buku dibanding dengan target selama 5 tahun (target 12.500 judul)	Persen; Tahunan; IKU OPD	23.000 judul	20% (2500 judul)		20% (2.451 judul)	
		Persentase peningkatan perpustakaan berbasis TIK	Persentase jumlah perpustakaan berbasis TIK dibanding dengan target selama 5 tahun (150 perpustakaan)	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	20% (40 Perpus)		20% (20 Perpus)	
19	KEARSIPAN						1.150.000		Dinas Arpus
	Program Kearsipan						1.150.000		Dinas Arpus
		Peningkatan nilai LAKE LKD	Nilai yang diperoleh dari Audit Kearsipan Eksternal oleh ANRI	Nilai, Tahunan, IKU OPD	39,00	45,00		73,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Peningkatan jumlah Perangkat daerah dan BUMD bernilai LAKI Cukup	Jumlah perangkat daerah dan BUMD yang memenuhi kriteria Cukup sesuai standar Audit Kearsipan Internal	OPD dan BUMD, Tahunan, IKU OPD	0	9,62% (5 OPD)		0	
		Peningkatan Pemerintah desa dan Ormas bernilai LAKE Cukup	Jumlah pemerintah desa dan Ormas yang memenuhi kriteria Cukup sesuai standar Audit Kearsipan Eksternal	Desa dan Ormas, Tahunan, IKU OPD	0	16,67% (2 Desa)		0	
	URUSAN PILIHAN						39.390.500		
1	PARIWISATA						8.312.000		Dinas Parpora
	Program Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata						1.765.000		Dinas Parpora
		Jumlah Kunjungan Wisnu dan Wisman	jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten dan kota dibagi jumlah kunjungan wisata yang direncanakan dikali seratus Persen	Angka; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.052.487	1.152.587		466.668,00	
		Rata-rata lama kunjungan wisata	rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Hari; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,90	0,08		0,08	
	Program Obyek dan Sarana Wisata						6.547.000		Dinas Parpora
		Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarpras dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarpras yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	22,22	66,67		66,67	
		Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Jumlah Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Jasa Usaha Pariwisata (TDUP) dalam satu tahun	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	70,00	75,00		24,00	
2	PERTANIAN						11.312.500		Dinas Tan KP, DKPP

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura						2.050.000		Dinas Tan KP
		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan	Jumlah PDRB sub sektor tanaman pangan tahun n dikurangi PDRB sub sektor tanaman pangan tahun n-1 dibagi PDRB sub sektor tanaman pangan tahun n-1	Persen Tahunan; IKU OPD	(1,30)	0,10		1,71	
		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perkebunan	Jumlah PDRB sub sektor perkebunan tahun n dikurangi PDRB sub sektor perkebunan tahun n-1 dibagi PDRB sub sektor perkebunan tahun n-1	Persen Tahunan; IKU OPD	1,18	5,30		-2,28	
		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Hortikultura	Jumlah PDRB sub sektor hortikultura tahun n dikurangi PDRB sub sektor hortikultura tahun n-1 dibagi PDRB sub sektor hortikultura tahun n-1	Persen Tahunan; IKU OPD	1,32	1,00		1,74	
		Luas Lahan Pertanian Padi Organik	Luas lahan pertanian padi organik yang mendapatkan sertifikat organik dari LSO	Hektar, Tahunan, IKU OPD	2,00	2,00		0	
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian						4.635.000		Dinas Tan KP
		Indekertanaman	luas lahan yang ditanami padi dalam 1 tahun / luas baku lahan	Indeks; Akumulatif; IKU OPD	1,50	1,54		1,52	
		Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman OPT)	Luas serangan OPT Utama yang Tertangani / Luas serangan OPT Utama	Persen; Tahunan; IKU OPD	92,31	89,80		99,20	
		Rasio Serangan OPT	Luas Serangan OPT Utama/Luas Tanam Padi	Persen; Tahunan; angka maksimal; IKU OPD	<3	<3		0,90	
		Persentase lahan terakomodir pupuk bersubsidi	luas lahan yang terakomodir bantuan pupuk bersubsidi / Luas Lahan Pertanian Kab. Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	90,00	91,00		100,76	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Luas Lahan Sawah Lestari yang dipertahakan	Luas Lahan LP2B yang telah ditetapkan	Persen; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	
		Jumlah layanan Perlindungan Tanaman	Penyediaan Agen Pengendali Hayati (APH) untuk perlindungan tanaman	Liter, Tahunan, IKU OPD	515,00	1.000,00		0	
		Rasio Unit Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) per desa	Jumlah UPJA/Jumlah Desa	Persen; Akumulasi; IKU OPD	54,77	59,36		54,77	
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Penyuluhan Pertanian						1.428.000		Dinas Tan KP
		Persentase Posluhdes	Jumlah Posluhdes/Jumlah Desa	Persen; Akumulatif;	27,18	30,66		30,66	
		Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya / jumlah kelompok tani	Persen; Tahunan;	18,00	5,00		5,00	
		Persentase petani yang terlatih pertahun	Jumlah petani yang dilatih(dibina) / Jumlah Petani	Persen; Tahunan;	2,50	2,50		0	
	Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian						1.750.000		Dinas Tan KP
		Jumlah Pelaku Usaha Industri Pengolahan Pertanian	Jumlah kelompok yang berhasil dibina dalam pengolahan hasil-hasil pertanian	Persen IKU OPD	na	5,00		2,00	
		Persentase adopsi teknologi tepat guna	Jumlah petani yang menerapkan teknologi tepat guna / jumlah anggota kelompok tani penerima demplot teknologi tepat guna	Persen; Tahunan;	6,00	6,00		0	
		Persentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian	Jumlah Bibit yang disalurkan/ jumlah kebutuhan bibit di masyarakat	Persen, akumulasi	30,00	35,00		0	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Penyediaan Sistem Informasi Pertanian	- SI LP2B, SI Penyebaran Komoditas Tan Pangan, SI Penyebaran Komoditas Hortik, SI Pemasaran Hasil	Jumlah jenis SI; IKU OPD	1,00	1,00		1,00	
		Tingkat Kunjungan Masyarakat di TTP	Jumlah kunjungan masyarakat umum di TTP untuk mengenal pertanian	Jumlah, IKU OPD	10.000,00	5.000,00		0	
	Program Peternakan						1.449.500		DKPP
		Jumlah produksi daging	Jumlah produksi daging (kg) meliputi jumlah produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, unggas dan aneka ternak lainnya	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.057.415	10.157.989	11.284.738		
		Jumlah produksi telur	Jumlah produksi telur (kg) meliputi jumlah produksi telur ayam ras, buras, puyuh dan unggas lainnya	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.258.158	10.360.740	10.760.493		
		Jumlahg produksi susu	Jumlah produksi susu segar (Kg.) meliputi jumlah produksi susu sapi dan kambing	Kilogram ; Tahunan, IKU Program	713.890	724.599	604.664		
3	PERDAGANGAN						9.660.000		Dinas Dagkop UKM
	Program Perdagangan						2.210.000		Dinas Dagkop UKM
		Persentase Pedagang tertib niaga	Jumlah Kelompok/ Pedagang yang mendapat pembinaan tertib ukur dan tertib niaga	Persen; Tahunan; IKU OPD	18,73	20,00		24,00	
	Program Pengelolaan Pasar						7.450.000		Dinas Dagkop UKM
		Jumlah pasar yang merujuk SNI	Pasar yang tertib, aman, bersih, dan dilengkapi sarana sesuai SNI Pasar Rakyat	Persen; Tahunan; SNI	1 Pasar	1 Pasar		0	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
4	PERINDUSTRIAN						6.725.000		Dinas Perinaker
	Program Peingkatan Layanan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka						6.275.000		Dinas Perinaker
		Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7,00	7,90		-0,46	
		Cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pengrajin dikali 100%	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,25	4,95		4,66	
	Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan						450.000		Dinas Perinaker
		Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7,00	7,40		-0,46	
5	TRANSMIGRASI								Dinas Perinaker
	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja						200.000		Dinas Perinaker
		Persentase transmigran yang ditempatkan	jumlah transmigran ditempatkan (tidak kembali dalam kurun 1 tahun) dibagi jumlah transmigrasi ditempatkan dikali seratus	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00		0	
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN						3.381.000		DKPP
	Program Perikanan Tangkap						2.231.000		DKPP
		Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (kg) meliputi jumlah hasil tangkapan ikan di laut dan perairan umum daratan	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	1.551.423,00	1.566.937		1.964.377,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Nilai produksi perikanan tangkap	Nilai produksi perikanan tangkap (Rp.000) meliputi jumlah nilai produksi perikanan hasil tangkapan di laut dan perairan umum daratan	Rupiah; Tahunan ; IKU Program	14.459.278	14.603.871		13.608.183,00	
	Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan						1.150.000		DKPP
		Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	2.047.818	2.068.296		2.730.262,00	
		Nilai produksi perikanan budidaya	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp; Tahunan; Permendagri 86/2017	86.814.081	87.682.222		145.642.227,00	
		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	4.514.145	4.559.286		5.478.639,00	
		Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Rp; Tahunan; Permendagri 86/2017	171.409.044	173.123.134		131.189.142,40	
	URUSAN PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN						83.633.566		
1	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						54.713.566		Setda, Set. DPRD, Kecamatan
	Sekretariat Daerah						23.545.000		
	Program Bina Umum / Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian						12.870.000		Bagian Umum Setda
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai Standar dan Administrasi Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai Standar dan Administrasi Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu	IKU OPD	100%	100%		76%	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	Program Bina Keuangan / Manajemen Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah						735.000		Bagian Keuangan Setda
		Persentase OPD Rumpun Keuangan Daerah tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persentase OPD Rumpun Keuangan Daerah tercapai LKJIP OPD kategori BB	IKU OPD	35,41	37,41		33,33	
		Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terselesaikan	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terselesaikan	IKU OPD	92,00	93,00		93,00	
		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perencanaan perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perencanaan perangkat Daerah	IKU OPD	100%	100%		97,00	
	Program Bina Pemerintah Desa						150.000		Bagian Pemdes Setda
		Persentase pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dibanding jumlah pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		50,00	
		Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41		0,04	
	Program Bina Pemerintahan						1.055.000		Bagian Pemerintahan Setda
		Persentase kerjasama Daerah yang terealisasi	Jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah yang terealisasi dibanding jumlah kerjasama Daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase Layanan Publik sesuai dengan SPM	Jumlah layanan publik yang sesuai dengan SPM dibanding jumlah layanan publik	Persen; Tahunan; IKU OPD	92,00	93,00		93,00	
		Persentase IKM Kecamatan	Persentase IKM Kecamatan	Persen; Tahunan;	71,28	72,53		72,53	
		Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41		38,00	
	Program Bina Bagian Layanan Pengadaan						675.000		Balada Setda
		Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line (e-procurement)	Jumlah layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line (e-procurement) dibanding jumlah layanan pengadaan barang / jasa	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	
		Persentase lelang tepat waktu		Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	
	Program Bina Perekonomian						325.000		Bagian Perekonomian Setda
		Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah capaian LKJIP OPD kategori B dibagi Jumlah OPD rumpun perekonomian	Persen, Kumulatif, IKU OPD	35,41	37,41		18,18	
		Persentase peraturan rumpun perekonomian yang diimplementasikan	Jumlah peraturan yang diimplementasikan dibagi jumlah peraturan	Persen, Kumulatif, IKU OPD	92,00	93,00		93,00	
	Program Bina Kesejahteraan Rakyat						3.390.000		Bagian Kesra Setda
		Persentase pemenuhan pelayanan sosial keagamaan	Jumlah pemenuhan pelayanan kegiatan sosial keagamaan yang terfasilitasi dibanding jumlah kegiatan sosial keagamaan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	
		Persentase OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41		19,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	Program Bina Hubungan Masyarakat dan Protokoler						2.045.000		Bagian Humas dan Protokol Setda
		Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	Jumlah kebijakan strategis yang diinformasikan kepada masyarakat dibanding jumlah kebijakan strategis Pemerintah Daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	
		Persentase OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41		100,00	
	Program Bina Organisasi						1.175.000		Bagian Organisasi Setda
		Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	57,61	59,61		61,36	
		Persentase IKM Kabupaten	Persentase IKM Kabupaten	Persen; Tahunan; IKU OPD	71,28	72,53		80,80	
		Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41		100,00	
	Program Bina Hukum						1.000.000		Bagian Hukum Setda
		Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Jumlah pembentukan Perda yang terselesaikan dibanding jumlah pembentukan Perda yang dibahas	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum HAM yang terfasilitasi	Jumlah penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi dibanding jumlah penyelesaian permasalahan hukum	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	Program Bina Pembangunan						125.000		Bagian Pembangunan Setda
		Persentase OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41		18,18	
		Persentase Rumusan Kebijakan Rumpun Pembangunan yang difasilitasi	Jumlah rumusan kebijakan Bagian Pembangunan yang difasilitasi dibanding jumlah rumusan Bagian Pembangunan dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	
	Sekretariat DPRD						15.540.000		
	Program Layanan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran						5.990.000		Set DPRD
		Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	Jumlah Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	Persen; Tahunan; permendagri 86 2017	52,31	100,00		90,00	
	Program Layanan Fungsi Pengawasan dan Kerjasama						9.550.000		Set DPRD
		Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	Jumlah Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	Persen, Tahunan, permendagri 86 tahun 2017	54,22	100,00		90,00	
	Kecamatan						15.628.566		
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Adiwerna						550.800		Kec Adiwerna

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	16	16	-	16,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	5	5		5,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang						470.000		Kec. Balapulang
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0		10	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	17	17		9	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	3	3		0	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong						515.000		Kec. Bojong
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0		2	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	15	15		10	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	2		0	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bumijawa						568.250		Kec. Bumijawa
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	0		0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	15	16		16,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	2		2,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhturi						508.026		Kec. Dukuhturi
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	17	15	-	15,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	3		3,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru						527.000		Kec. Dukuhwaru
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	7	6	-	7,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	3	4		3,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara						477.500		Kec. Jatinegara
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	16	16	-	16,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	1		1,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kedungbanteng						418.290		Kec. Kedungbanteng
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	8	8	-	8,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	2		2,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kramat						1.530.550		Kec. Kramat
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	8	7 -		7,00	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	6	5 -		5,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	5	7		7,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu						550.800		Kec. Lebaksiu
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0 -		0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	13	9 -		12,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	6		3,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Margasari						550.000		Kec. Margasari
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0 -		0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	11	11 -		9,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	2		1,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang						530.000		Kec. Pagerbarang
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0 -		0	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	13	13	-	13,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0		0	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah						550.000		Kec. Pangkah
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	20	19	-	20,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	3	4		3,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Slawi						5.840.750		Kec.Slawi
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	0	-	0	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	4	5		100,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Suradadi						521.050		Kec. Suradadi
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	8	7	-	7,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	3	4		4,00	
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Talang						449.500		Kec Talang

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	17	17	-	17,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	2		2,00	
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Tarub							550.000	Kec Tarub
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	19	17	-	17,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	3		3,00	
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Warureja							521.050	Kec Warureja
		Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	
		Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	11	9	-	9,00	
		Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	3		2,00	
2	PENGAWASAN							2.205.000	Inspektorat
	Program Pengawasan Internal dan Penanganan Pengaduan Masyarakat							1.285.000	Inspektorat
		Persentase penyelesaian LHP	Jumlah penyelesaian LHP dibagi jumlah LHP dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	90,00	91,00		170,00	
	Program Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian							100.000	Inspektorat

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase OPD yang tercapai IKUnya	jumlah OPD tercapai IKU dibagi IKU OPD	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	57,01	59,23		30,00	
	Program Pembangunan Budaya Integritas						520.000		Inspektorat
		Persentase OPD berpredikat WBK/WBBM	jumlah OPD berpredikat WBK/WBBM dibagi Jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	16,67	18,42		4,16	
	Program Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan						300.000		Inspektorat
		Persentase APIP memiliki Sertifikasi Keahlian	Persentase APIP memiliki Sertifikasi Keahlian	Persen; Tahunan; IKU OPD	2,33	6,98		6,40	
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						7.650.000		Bappeda dan Litbang
	Program Perencanaan dan Penganggaran Program						1.200.000		Bappeda dan Litbang
		Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Jumlah dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya disusun dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	99,00	100,00		100,00	
	Program Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur						2.600.000		Bappeda dan Litbang
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur	Jumlah dokumen perencanaan daerah rumpun ekbangtur dibagi jumlah dokumen perencanaan OPD rumpun ekbangtur	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97,00	97,00		97,00	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial						3.000.000		Bappeda dan Litbang
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Pemkesos	Jumlah dokumen perencanaan daerah rumpun pemkesos dibagi jumlah dokumen perencanaan OPD rumpun pemkesos	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97,00	97,00		97,00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan						850.000		Bappeda dan Litbang
		Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	Rata-rata deviasi rencana dan realisasi fisik keuangan kegiatan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82,00	85,00		85,00	
		Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	Jumlah indikator pembangunan sesuai target dibanding jumlah indikator pembangunan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	83,01	85,00		85,00	
4	KEUANGAN						9.785.000		BPKAD, BP2D
	Program Anggaran						1.160.000		BPKAD
		Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	Jumlah APBD tepat waktu dibagi jumlah APBD-P	Persen; Tahunan: IKU OPD	100%	100%		100%	
		Persentase kualitas DPA yang asesuaian ketentuan	Jumlah DPA yang sesuai dibagi jumlah DPA	Persen; Tahunan: IKU OPD	65%	70%		70%	
	Program Perbendaharaan						680.000		BPKAD
		Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	Jumlah SP2D tepat waktu dibagi jumlah SP2D	Persen; Tahunan: IKU OPD	100%	100%		100%	
		Persentase ketersediaan Dana Kasda terhadap anggaran Kas	Jumlah ketersediaan dana/kas dibanding jumlah kebutuhan anggaran kas	Persen; Tahunan: IKU OPD	100%	100%		100%	
	Program Akuntansi dan Pelaporan						635.000		BPKAD
		Persentase Ketepatan waktu Perda Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	ketepatan waktu penyusunan pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Persen; Tahunan: IKU OPD	100%	100%		100%	
		Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Jumlah OPD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan: IKU OPD	100%	100%		100%	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						2.650.000		BPKAD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	Jumlah telah OPD mengelola BMD baik dan benar dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan: IKU OPD	50%	60%		65%	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Operasional Pendapatan						475.000		BP2D
		Persentase perencanaan, monev dan pelaporan pendapatan	Perencanaan pendapatan PAD dan Monev realisasi PAD	Persen; Tahunan: IKU OPD	100,00	100,00		75%	
	Program Pajak PBB dan BPHTB						3.360.000		BP2D
		Persentase Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	Pendataan dan penetapan pajak daerah sebagai landasan penagihan pajak daerah	Persen; Tahunan: IKU OPD	100,00	100,00		98%	
	Program Pajak Non PBB dan BPHTB						825.000		BP2D
		Persentase Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih	penagihan pajak daerah yang telah ditetapkan	Persen; Tahunan: IKU OPD	100,00	100,00		97,85%	
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.540.000		Bappeda dan Litbang
	Program Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data						1.540.000		Bappeda dan Litbang
		Persentase jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah kelitbangan yang dihasilkan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		30,00	
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						7.740.000		BKD
	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN						2.640.000		BKD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	jumlah PNS mengikuti diklatpim dan mendapat STTPL dibanding jumlah JPT dan Administrator dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	62,76	5,62		2,17	
		Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL	jumlah Pejabat Fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapat sertifikat/STTPL dibanding jumlah pejabat fungsional non pendidikan/ pengawasan dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,27	4,34		4,82	
		Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan sesuai dengan peraturan	jumlah CPNS mengikuti lat.dasar/prajabatan dibanding jumlah CPNS dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00		100,00	
	Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN						1.900.000		BKD
		Persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi	jumlah JPT, administrator dan pengawas pada instansi pemerintah terisi dibanding jumlah jabatan dikali seratus	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	85,00	95,50		87,97	
		Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	jumlah jabatan fungsional non guru/kesehatan terisi dibanding formasi jabatan fungsional non guru/kesehatan dikali seratus	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	21,07	2,77		2,59	
		Persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya	jumlah JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya dibanding jumlah JPT dan Administrasi dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	24,77	13,68		6,61	
	Program mutasi dan Pengelolaan Data ASN						2.700.000		BKD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp. (000)		
		Persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	jumlah SIM kepegawaian yang terintegrasi dibanding jumlah SIM yang seharusnya ada dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; IKU OPD	25,00	16,67		16,67	
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN						500.000		BKD
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	jumlah PNS mendapatkan hukuman disiplin dibanding jumlah kasus kepegawaian yang masuk dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; IKU OPD	0,54	0,52		0,12	
	TOTAL						1.166.558.159		

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 7.3

Target Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tegal Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab	
							2020		2021				
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)		
	NON URUSAN												
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%		5.959.500				6.019.095	Dinas Dikbud
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%							
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%		8.114.500				10.303.950	Dinas Kesehatan
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%							
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan RSUD dr. Soeselo	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%		131.570.840				138.144.853	RSUD dr. Soeselo
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%							

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020			2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
	Program Pelayanan Medis dan Mutu Etika	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										RSUD dr Soeselo
			Persentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan	Persentase terpenuhi pelayanan medis sesuai standar	Persen; Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumhaskitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017,Permenkes 129 tahun 2008	73,20	75%	77,00%	78%			
			Persentase mutu dan etika sesuai standar	Persentase terpenuhi mutu dan etika sesuai standar	Persen; PB IDI 221 tahun 2002, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	71,80	75%	70,00%	78%			
	Program Pelayanan Keperawatan dan Asuhan Keperawatan											RSUD dr Soeselo
			Persentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	Persentase terpenuhi pelayanan keperawatan sesuai standar	Persen; Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumhaskitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017,Permenkes 129 tahun 2008	74,30	75%	75,00%	78%			
			Persentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	Persentase terpenuhi asuhan keperawatan sesuai standar	Persen; PP PPNI tahun 2018, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	72,20	75%	75,00%	78%			
	Program Penunjang											RSUD dr Soeselo
			Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	Persentase penunjang medis sesuai standaryang terpenuhi	Persen; Tahunan; Permenkes no129/MENKES/SK/II/2008; Permenkes no 56 tahun 2014	79,1%	80%	96,49%	81%			
			Persentase penunjang non medis sesuai standar	rata-rata akumulasi Persentase standar pelayanan minimal, pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Persen; Tahunan; Permenkes nomor 56 tahun 2016	90%	90%	92,01%	92%			
	Program Tata Usaha											RSUD dr Soeselo
			Persentase pemenuhan Urusan Umum dan Kehumasan, Kepegawaian dan Diklat	Terpenuhinya pengelolaan urusan Umum dan kehumasan, pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan	Laporan Capaian Kegiatan	100%	100%	100,00%	100%			
	Program Keuangan											RSUD dr Soeselo

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Persentase Dokumen Keuangan	pelaporan pendapatan harian, bulanan dan triwulan, Klaim BPJS, Lampiran RBA, pengajuan SPJ, Pembuatan SPD, Penghitungan anggaran kas, pembayaran gaji PNS dan BLUD, Laporan realisasi anggaran, arus kas, realisasi pengeluaran, pendapatan, neraca, CaLK, SAP, SAK, Audit laporan keuangan	Dokumen keuangan	100%	100%		100,00%	100%		
	Program Perencanaan dan Rekam Medis											RSUD dr Soeselo
			Persentase Pengelolaan Rekam Medis dan Sistem Informasi	Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi rekam medis dan pemenuhan sumber daya sistem informasi	Dokumen Rekam Medis	100%	100%		100,00%	100%		
			Persentase dokumen Perencanaan	Persentase pemenuhan dokumen LKJIP, Profil RS, Rencana Strategis OPD/ Rencana Strategi Bisnis BLUD Rumah Sakit, Rencana Bisnis Anggaran BLUD, Proposal kegiatan bersumber APBN dan/atau APBD provinsi, Rencana Kerja OPD, Pelaksanaan Forum OPD, POK, Penetapan Kinerja RS, Data dukung LKPJ Bupati, Data dukung LPPD	Dokumen Perencanaan	100%	100%		100,00%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan RSUD Suradadi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	6.222.500	100%	100%	57.553.650	RSUD Suradadi
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan							-				

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Rata-rata Persentase pelayanan medis dan keperawatan sesuai standar perumahsakitan	Persentase terpenuhi pelayanan medis dan keperawatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes 56 Tahun 2014, Permenkes 4 Tahun 2018, Kepmenkes 129 Tahun 2008, Permenkes 34 Tahun 2017, Perpres 77 Tahun 2015	87,50	88,50		97,30	89,50		
			Rata-rata Persentase penunjang medis dan non medis sesuai dengan standar pelayanan dan sarana prasarana rumah sakit	Persentase penunjang medis dan non medis yang terpenuhi sesuai standar	Persen; Tahunan; Kepmenkes 129 Tahun 2008, Permenkes 56 Tahun 2014	85,00	86,00		97,50	87,00		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	3.120.000	100%	100%	3.182.400	DPU
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	2.010.000	100%	100%	2.050.200	Dinas Perkimtaru
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020			2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kesbangpol	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	545.593	100%	100%	556.505	Kesbangpol
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Satpol PP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	2.552.700	100%	100%	2.603.754	Satpol PP
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	2.515.000	100%	100%	2.565.300	Dinas Sosial
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas P3AP2KB	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	2.036.732	100%	100%	2.057.099	Dinas P3AP2KB

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	952.000	100%	100%	971.040	DLH
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Dukcapil	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	5.276.922	100%	100%	6.276.922	Dinas Dukcapil
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Permasdes	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.185.000	100%	100%	1.208.700	Dinas Permasdes
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.791.500	100%	100%	1.827.330	Dinas Perhubungan
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Kominfo	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	2.548.500	100%	100%	2.548.500	Dinas Kominfo
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas PM dan PTSP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.338.000	100%	100%	1.364.760	Dinas PMPTSP
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Arpus	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.023.060	100%	100%	1.043.521	Dinas Arpus

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas KPP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.846.500	100%	100%	1.883.430	DKPP
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Parpora	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	2.486.000	100%	100%	2.505.888	Dinas Parpora
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Tan KP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.781.000	100%	100%	1.816.620	Dinas Tan KP
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Dag Kop UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	3.771.381	100%	100%	3.846.809	Dinas Dagkop UKM
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Dinas Perinaker	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.165.000	100%	100%	1.188.300	Dinas Perinaker
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dewan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	4.920.000	100%	100%	5.018.400	Sekretariat DPRD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%			
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Adiwerna	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	449.200	100%	100%	449.200	Kecamatan Adiwerna
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Balapulang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	530.000	100%	100%	502.000	Kecamatan Balapulang
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Bojong	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	485.000	100%	100%	485.000	Kecamatan Bojong
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Bumiawa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	389.500	100%	100%	450.000	Kecamatan Bumiawa
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Dukuhhuri	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	491.974	100%	100%	466.800	Kecamatan Dukuhhuri
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Dukuhwaru	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	473.000	100%	100%	458.000	Kecamatan Dukuhwaru
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Jatinegara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	478.250	100%	100%	453.250	Kecamatan Jatinegara

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Kedungbanteng	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	450.000	100%	100%	450.000	Kecamatan Kedungbanteng
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Kramat dan Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	529.500	100%	100%	529.500	Kecamatan Kramat
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Lebaksiu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	449.200	100%	100%	478.950	Kecamatan Lebaksiu
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Margasari	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	450.000	100%	100%	461.710	Kecamatan Margasari
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Perencanaan Kec. Pagerbarang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	470.000	100%	100%	490.000	Kecamatan Pagerbarang
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Pangkah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	450.000	100%	100%	515.000	Kecamatan Pangkah
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kec. Slawi dan Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.869.250	100%	100%	1.869.250	Kecamatan Slawi

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Suradadi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	470.760	100%	100%	478.950	Kecamatan Suradadi
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Talang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	550.500	100%	100%	550.500	Kecamatan Talang
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Tarub	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	450.000	100%	100%	450.000	Kecamatan Tarub
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Kec. Warureia	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	441.500	100%	100%	450.000	Kecamatan Warureja
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.103.000	100%	100%	1.125.060	BPBD
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.817.000	100%	100%	1.853.340	Inspektorat
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Bappeda dan Litbang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.513.250	100%	100%	1.543.515	Bappeda dan Litbang

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%			
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan BPKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	44.293.000	100%	100%	45.178.860	BPKAD
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	4.444.500	100%	100%	4.533.390	BP2D
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan BKD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Umum Kepegawaian	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%	1.000.000	100%	100%	1.020.000	BKD
			Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Perencanaan dan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100%	100%		100%	100%		
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							633.175.082			641.916.144	
1	PENDIDIKAN							200.679.130			206.711.952	Dinas Dikbud
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal	Program Pengelolaan Pendidikan						2.565.000			2.590.650	Dinas Dikbud

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab
							2020		2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	
			APM PAUD	Jumlah siswa PAUD usia 0-6 dibagi jumlah penduduk usai 0-6	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	24,17	25,21	26,77	25,89		
			Angka partisipasi PNFI	Jumlah partisipasi PNFI dibagi jumlah penduduk usia PNFI	Persen; Tahunan; IKU OPD	31,24	32,95	97,25	34,65		
	Program Pendidikan Dasar							143.001.800		143.144.802	Dinas Dikbud
			Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan kota dibagi jumlah seuruh APS SD/MI se-Kabupaten dan kota dikali seratus Persen	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,14	0,14	0,04	0,13		
			Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	Jumlah capaian kinerja APS SMP/Ts se-Kabupaten dan kota dibagi jumlah seuruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan kota dikali seratus Persen	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,13	0,13	0,86	0,12		
	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan							19.417.000		19.611.170	Dinas Dikbud
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru:Kelas	Jumlah guru dibagi jumlah kelas (ideal 1:1)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	1:0,3	1:0,35	1:1,29	1:0,4		
			Rasio Guru:Mapel	Jumlah guru dibagi jumlah mapel (ideal 1:1:24 jam beban mengajar)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	1:1:32	1:1:31	1:1:25,73	1:1:30		
	Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kurikulum						35.695.330		41.365.330	Dinas Dikbud
			Persentase Sarana dan Prasarana SD baik	Jumlah Sarana Prasarana SD baik dibagi jumlah sarana prasarana SD(prioritas Ruang Kelas dan MCK)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	91,65	93,65	99,92	95,65		
			Persentase Sarana dan Prasarana SMP baik	Jumlah Sarana Prasarana SMP baik dibagi jumlah sarana prasarana SMP(prioritas Ruang Kelas dan MCK)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	87,21	89,21	99,05	91,21		
2	KESEHATAN							179.996.313		179.340.504	Dinas Kesehatan,
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							6.450.000		8.262.235	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah sampel dikali 100%	Persen, Tahunan	100%	100%	96,67%	100%		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di puskesmas	Jumlah dan jenis obat perbekalan kesehatan yang tersedia dipuskesmas dibagi jumlah kebutuhan dikali 100 %	Persen; Tahunan; referensi Keputusan Menteri Kesehatan no 1121 tahun 2008 tentang Teknis Pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar	99,01%	100%		100,00%	100%		
			Persentase Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar	Jumlah puskesmas yang telah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar dibagi jumlah puskesmas kali 100 %	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	100%	68%		68,00%	100%		
			Cakupan Pelayanan Penyimpanan dan Pendistribusian Obat di Gudang Farmasi sesuai standar	Jumlah puskesmas yang terlayani pendistribusian obat di Gudang Farmasi sesuai standar dibagi jumlah puskesmas dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	100%	100%		100,00%	100%		
			Cakupan Desa UCI	Jumlah Desa dengan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) minimal 80% (dengan kriteria Bayi usia 0 s.d 12 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu : HB.0 (1 kali),DPT-HB Hib (3 kali) Polio (4 kali) dan Campak atau MR (1 Kali)) dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%	Persen, Tahunan, Referensi : UU Kes No.36 th 2009, PMK No.12 th 2017	100%	94%		0,94	95%		
			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%'	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Resntra Kemenkes	10,07%	40%		15%	45%		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab
							2020		2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100%	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Resntra Kemenkes	51,48%	55%	75%	60%		
				Jumlah penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100%	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Resntra Kemenkes	20,91%	60%	75%	65%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif prevevtif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Renstra Kemenkes	28,05%	55%	85,41%	60%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun waktu 1 tahun dibagi target sasaran orang terduga TBC pada kurun waktu 1 tahun yang sama x 100 %	Persen; Tahunan; referensi SPM	67%	86%	57,11%	90%		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun 1 tahun dibagi dengan estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama kali 100%	Persen; Tahunan; referensi SPM	97%	97%	90,52%	97%			
			Angka penemuan kasus baru kusta	Jumlah kasus baru Kusta pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tertentu kali 100.000	Per 100.000 pddk; Tahunan; referensi SDGs	14,9 per 100.000 pddk	12 per 100.000 pddk	11 per 100.000 pddk	11,75 per 100.000 pddk			
			Angka kesakitan DBD	Jumlah penderita DBD pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk dalam tahun tertentu kali 100.000	Per 100.000 pddk; Tahunan; referensi Permendagri 86/2017, Renstra Dinkes propinsi	5, 25 /100.00 pddk	< 45 per 100.000 pddk	23,58	< 44 per 100.000 pddk			
			Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa yang telah mencapai akses 100% disuatu wilayah dalam periode waktu tertentu dibagi jumlah Desa seluruhnya dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi RPJMN, RPJMD Prov.	0,3%	2,0%	1,39%	4,0%			
	Program Kesehatan Masyarakat							44.600.000		45.046.000	Dinas Kesehatan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) strata utama dan paripurna dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes prov	80%	81%	95,37%	82%			
			Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif mandiri dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes prov	10%	11%	34,49%	12%			
			Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh anak usia pendidikan dasar dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK no. 4 tahun 2019	99%	100%	111,14%	100%			
			Cakupan penduduk memiliki jaminan kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 100%		82,62%	85%	91,43%	90%			
	Program Pelayanan Kesehatan							119.701.313		117.485.269	Dinas Kesehatan	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Cakupan Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan dibagi Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan dikali 100%	%; Tahunan; Referensi : Renstra Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.1 Tahun 2012, Permenkes No.75 Thun 2014 , Permenkes N0.56 Tahun 2014	100%	100%	105,40%	100%			
			Persentase Puskesmas dan Labkesda yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas dan Labkesda yang terakreditasi dibagi jumlah Puskesmas dan Labkesda dikali 100%	%; Tahunan; Referensi : Renstra Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.46 Tahun 2015, Permenkes No.42 Tahun 2016, Kepmenkes No.298 Tahun 2008	100%	100%	100,00%	100%			
			Cakupan pelayanan perijinan di bidang kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan dibagi jumlah fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan yang mengajukan rekomendasi perijinan dan memenuhi persyaratan diterbitkannya rekomendasi perijinan dikali 100%	%; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Kab. Tegal 2014-2019 dan Regulasi yang mengatur perijinan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan	100%	100%	100,00%	100%			
			Persentase pencapaian standar mutu akreditasi puskesmas	Setiap Puskesmas mencapai nilai minimal standar mutu akreditasi puskesmas sesuai regulasi yang berlaku	Persen; Tahunan; Referensi : Renstra Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.46 Tahun 2015, Permenkes No.42 Tahun 2016	30%	38%	38,00%	42%			
			Rata-rata jumlah Pengunjung WKJ Kalibakung setiap bulan	Jumlah Pengunjung WKJ Kalibakung dalam setahun dibagi 12	Angka, Tahunan; Renstra Dinkes Kab. Tegal 2014-2019	240	250	250	260			
	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						9.245.000		8.547.000	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar dibagi Jumlah ibu seluruh hamil dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	100%	96%	93,27%	97%			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab
							2020		2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	
			Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dibagi jumlah seluruh ibu bersalin dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	96%	98%	98,23%	99%		
			Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah seluruh bayi baru lahir dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	100%	100%	99,01%	100%		
			Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh balita dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	100%	90%	73,71%	91%		
			Cakupan remaja mendapat pelayanan konseling	Jumlah remaja mendapat pelayanan konseling dibagi jumlah seluruh remaja dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Prov	40%	45%	72,12%	47,25%		
			Pelayanan kesehatan usia lanjut	Jumlah masyarakat usia 60 tahun ke atas mendapat pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar dibagi jumlah seluruh warga negara usia 60 tahun ke atas dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	33,7%	75%	79,48%	77%		
			Cakupan balita stunting	Jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Prov	24%	20,0%	7,80%	19%		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan puskesmas yang mempunyai tenaga kesehatan strategis	Jumlah Puskesmas yang mempunyai tenaga kesehatan strategis dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	Persen; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Prov	52%	59%	87,26%	69%		
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							167.275.000		167.366.500	DPU, Dinas Perkimtaru
	Program Jalan							133.700.000		123.700.000	DPU
		Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan seluruhnya	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	62,42	70,02	68,77	75,02		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 0,5-1)	Panjang jalan yang memiliki drainasi (Km) dibagi panjang seluruh jalan kabupaten (KM) dikali seratus Persen	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	30,00	40,00	58,41	45,00		
	Program Jembatan							10.900.000		20.900.000	DPU
		Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	Jembatan kondisi baik dibagi jembatan seluruhnya	Persen; Kumulatif	67,11	75,11	68,69	79,91		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab
							2020		2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	
	Program Sumber Daya Air							18.100.000		18.100.000	DPU
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali 100 %	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	56,39	60,00	58,86	62,00		
	Program Pertanahan dan Tata Ruang							4.575.000		4.666.500	Dinas Perkimtaru
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Jumlah realisasi RTRW dibanding jumlah rencana peruntukan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	85,00	86,00		87,00		
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							71.196.000		73.531.420	Dinas Perkimtaru
	Program Tata Perumahan & Permukiman							16.771.000		17.106.420	Dinas Perkimtaru
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Akses Layanan Air Minum	Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Kumulatif;	86,23	88,00	86,23	89,00		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Persen; Kumulatif;	88,70	90,00	88,70	93,00		
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Persen; Kumulatif;	77,00	60,00	32,47	45,00		
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen; Kumulatif;	12,10	15,00	12,00	18,00		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU	Persen; Kumulatif;	51,34	52,34	52,34	53,34		
	Program Bangunan Gedung							54.425.000		56.425.000	Dinas Perkimtaru
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Persen; Kumulatif;	66,67	68,77	66,67	70,34		
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							9.412.769		10.303.739	Satpol PP, Kesbangpol, BPBD
	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah							515.000		525.300	Satpol PP

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian penegakan perda	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dibagi jumlah pelanggaran PERDA dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	76,00	80,00	80,00	82,00			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum							1.575.000		1.590.750	Satpol PP	
			Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah patroli siaga per tahun dibagi target patroli siaga per tahun dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU; SPM	70,00	74,00	74,00	76,00			
	Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran							4.076.769		4.876.769	Satpol PP	
			Rasio Linmas per RT	Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten dibagi jumlah RT dalam satu kabupaten	Persen; Tahunan; IKU	1,00	1,07	1,06	1,08			
			Persentase Linmas Terlatih	Jumlah satuan linmas terlatih dibagi jumlah linmas dalam satu kabupaten dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU	7,00	8,00	0,07	10,00			
		Program Kebakaran	Persentase Kasus Kebakaran Tertangani	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (RTR) dibagi jumlah kebakaran dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	58%	66%	79%	74%			
	Program Kesbangpol							970.000		989.400	Kesbangpol	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif	Jumlah pemilih pemilu legislatif yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih pemilu legislatif	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	60,40	0	0	0			
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	Jumlah pemilih pemilu Presiden yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih pemilu Presiden	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	60,40	0	0	0			
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	Jumlah pemilih pemilu Gubernur yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih pemilu Gubernur	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	70,40	0	0	0			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	Jumlah pemilih pemilu Bupati yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih pemilu Bupati	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	65,59	0		0	0		
			Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades	Jumlah pemilih pemilu Pilkades yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih pemilu Pilkades	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	76,60	0		0	0		
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat	Jumlah konflik SARA dalam masyarakat (>50% kecamatan) dibagi jumlah konflik SARA)	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0	0		12	0		
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana						1.146.000			1.168.920	BPBD
			Persentase masyarakat siap siaga bencana	Jumlah masyarakat yang dibina dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pembinaan	Persen; Tahunan; SPM	8,60	12,20		8,80	12,55		
			Persentase dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian, pemetaan, dan informasi wilayah rawan bencana yang dapat disusun dibagi dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian, pemetaan, dan informasi wilayah rawan bencana yang harus disusun	Persen; Tahunan; SPM	20,00	44,00		20,00	64,00		
	Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana							730.000			744.600	BPBD
			Persentase penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	Jumlah kegiatan penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik dibagi jumlah kejadian bencana	Persen; Tahunan; SPM	85,71	90,19		90,00	94,67		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Persentase dokumen penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana	Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun dibagi Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang harus disusun	Persen; Tahunan; SPM	30,00	50,00	50,00	100,00			
	Program Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana							1.130.000		1.152.600		BPBD
			Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah kegiatan penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibagi jumlah kerusakan infrastruktur dan perumahan pasca bencana	Persen; Tahunan; SPM	13,59	21,74	15,00	29,89			
			Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian dan pemetaan penanganan pasca bencana yang dapat disusun dibagi Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian dan pemetaan penanganan pasca bencana yang harus disusun	Persen; Tahunan; SPM	33,33	58,33	40,00	75,00			
6	SOSIAL							4.615.870		4.662.029		Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial							1.782.510		1.800.335		Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	Jumlah Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	83,34	84,34	78,49	85,34			
	Program Pemberdayaan Sosial							1.008.360		1.018.444		Dinas Sosial

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab
							2020		2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	89,08	90,08	90,08	91,08		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							900.000		909.000	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	80,91	82,46	79,08	82,92		
	Program Penanganan Fakir Miskin							925.000		934.250	Dinas Sosial
			Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Cakupan Penanganan Fakir Miskin	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	96,64	97,87	145,60	98,89		
		Program Penanganan Bencana									
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlwan									
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							104.530.899		109.830.992	
1	TENAGA KERJA							5.245.000		5.255.000	Dinas Perinaker
	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja						4.745.000		4.745.000	Dinas Perinaker
			AKAN	Jumlah Angkatan Kerja antar Negara	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	653,00	660,00	193,00	672,00		
			AKAD	Jumlah Angkatan Kerja antar Daerah	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	231,00	246,00	1.020,00	261,00		
			AKL	Jumlah Angkatan Kerja Lokal	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	120,00	140,00	1.493,00	159,00		
	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Program Hubungan Industrial						500.000		510.000	Dinas Perinaker
			Persentase penyelesaian hubungan industrial	Jumlah penyelesaian kasus dibagi jumlah kasus	Persen, Tahunan, IKU OPD	40,00	50,00	100,00	55,00		
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.375.000		1.388.750	Dinas P3AP2KB
	Program Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						675.000		681.750	Dinas P3AP2KB

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	jumlah skor kelembagaan dan pelaksanaan PUG yang telah dipenuhi dibagi Skor kesetaraan dan keadilan Gender (1000) dikali seratus Persen	Persen, Tahunan, IKU OPD	70,00	72,00	94,00	73,00			
	Program Perlindungan Anak							700.000		707.000	Dinas P3AP2KB	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Pemenuhan Hak Anak	Jumlah skor hak hak anak yang telah dipenuhi dibagi Skor pemenuhan hak anak (1000) dikali seratus Persen	Persen, Tahunan, IKU OPD	50,00	55,00	50,00	60,00			
		Program Perlindungan Khusus Anak										
3	PANGAN							810.000		866.700	Dinas Tan KP	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							810.000		866.700	Dinas Tan KP	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase penguatan cadangan pangan	Cadangan Pangan Kabupaten dibagi 100 dikali 100%	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010	229,00	210,00	267,00	219,00			
			Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Jumlah Realisasi dibandingkan Target dikali 100 dibagi 3 dikalikan 100%	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010	50,00	48,00	48,00	49,00			
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah pangan aman konsumen dibanding jumlah pangan diawal dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	93,00	72,00	61,50	76,00			
			Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase AKG dikali Bobot Masing -masing kelompok pangan	Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010	81,20	81,00	86,50	81,50			
			Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Bencana tertangani dibanding jumlah bencana dikali 100%	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010	93,00	72,00	100,00	76,00			
4	PERTANAHAN										Dinas Perkimtaru	
	Program Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan									Dinas Perkimtaru	
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	Jumlah luas lahan bersertifikat dibagi jumlah luas wilayah dikali seratus Persen	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	52,22	57,37	87,00	59,52			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab
							2020		2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	
5	LINGKUNGAN HIDUP						31.161.000			32.215.700	DLH
	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)						26.036.000			26.876.000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sampah terangkut ke TPA	Jumlah sampah terangkut dibagi dengan jumlah sampah	Persen; Tahunan; IKU OPD	50,00	60,35	59,75	70,75		
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 ditangani	Limbah B3 ditangani dibagi Limbah B3	Persen; Tahunan; IKU OPD	50,00	60,35	50,00	70,75		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup						4.285.000			4.309.500	DLH
			indeks kualitas air	Nilai indeks kualitas air	nilai; Tahunan; IKU OPD	61,00	72,00	31,11	74,00		
			indeks kualitas udara	Nilai indeks kualitas udara	nilai; Tahunan; IKU OPD	77,00	77,50	84,99	78,00		
			indeks ketutupan lahan	Nilai indeks ketutupan lahan	nilai; Tahunan; IKU OPD	59,21	59,21	55,55	59,21		
	Program Tata Lingkungan						290.000			367.200	DLH
			Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persen; Tahunan; IKU OPD	65	55		50		
	Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan						550.000			663.000	DLH
			Peresentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	50,00	100,00		
6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1.750.000			1.785.000	Dinas Dukcapil
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil					420.000			428.400	Dinas Dukcapil

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Persentase penduduk 0-18 tahun ber akta kelahiran	Jumlah penduduk ber akta kelahiran ditahun bersangkutan dibagi Jumlah penduduk di tahun bersangkutan dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	69,46	80,00	93,11	85,00			
			Persentase penduduk ber akta kematian	Jumlah penduduk meninggal dan memperoleh akta kematian ditahun bersangkutan dibagi Jumlah kematian di tahun bersangkutan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	14,73	20,00	68,54	25,00			
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk								465.000	474.300	Dinas Dukcapil
			Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Jumlah KK tercetak/Jumlah KK x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,08%	90,00%	92%	92,00%			
			Persentase Penduduk ber KTP-el	Jumlah Cetak/Belum cetak x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,43%	90,00%	99,63%	92,00%			
			Persentase anak memiliki KIA	Jumlah penerbitan KIA di bagi Jumlah anak wajib KIA x 100 %	Persen; Tahunan; IKU OPD	1,85%	40,00%	21,18%	50,00%			
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								865.000	882.300	Dinas Dukcapil
			Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	Jumlah Inovasi Pelayanan Kependudukan yang terlaksana dibagi jumlah Inovasi x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	20%	30%	50%	40%			
			Persentase OPD/ Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Jumlah OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan dibagi jumlah OPD/Instansi x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	9,28%	25%	6,38%	40%			
			Persentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan	Jumlah Pelayanan SIAK / Jumlah Penduduk	Persen; Tahunan; IKU OPD	85%	85%	85%	87%			
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									5.990.000	6.328.000	Dispermasdes
	Program Penataan Desa	Program Penataan Desa								650.000	663.000	Dispermasdes

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	Jumlah Aparatur pemerintahan desa yang dilatih atau difasilitasi dibanding jumlah total aparatur Pemerintahan Desa	Persentase. Kumulatif. Permendagri 112 Tahun 2014 dan Permendagri 83 Tahun 2015	50,15	58	10,68	64			
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa					117 (hasil Pilkades 2019)	690.000			805.000	Dinas Permasdes
			Persentase Desa Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyusun RKPDes, APBDes, LPPDesa dan Aset Desa tepat waktu dan benar dibandingkan dengan jumlah seluruh desa	Persen; Kumulatif; IKU OPD	15,00	25,00	0	50,00			
	Program Pengembangan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat					85,00	4.000.000		125,00	4.080.000	Dinas Permasdes
			Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	Persentase Bumdes tumbuh dan berkembang	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.	35 Bumdes	25,00	101,00	30,00			
			Persentase Pengembangan Desa	Persentase Kerjasama Desa	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.	195 Kerjasama Desa dan 13 Kerjasama Antar Desa	100,00		0	100,00		
			Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaaan	0 Pengembangan Kawasan Pedesaan.	50,00		1,00	62,50		
	Program Pemberdayaan Masyarakat							650.000			780.000	Dinas Permasdes

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Jumlah KPMD, Posyandu, kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT yang aktif dibanding dengan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada	Permendagri no 18 th 2018 ttg Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	10,00	25,00		50,00	50,00		
			Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	Jumlah Kelompok UED-SP, UP2K-PKK, CPPD, Pasar Desa, KUB dan Pokmas TTG yang berdaya atau aktif dibanding jumlah kelompok yang ada	Permendagri Nomor:6 Th 1998 ttg Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP)	5,00	25,00		50,00	50,00		
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.294.299			8.377.242	Dinas P3AP2KB
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							5.053.433			5.103.967	Dinas P3AP2KB
		Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,28	0,26		0,12	0,25		
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Ketahanan keluarga	Persentase keluarga ikut kelompok kegiatan ber-KB dibagi keluarga ikut kelompok kegiatan dikali 100	Persen, Tahunan, IKU OPD	45,00	48,00		63,02	52,00		
	Program Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						3.240.866			3.273.275	Dinas P3AP2KB
			Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur dikali seratus Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	69,14	69,81		67,73	70,21		
9	PERHUBUNGAN							13.665.000			15.000.100	Dinas Perhubungan
	Program Lalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						1.250.000			2.336.800	Dinas Perhubungan
			Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia kali 100 %	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	34,49	40,00		10,68	50,00		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Persentase Perijinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Jumlah Rekomendasi Ijin Andalalin dibagi target rekomendasi Ijin Andalalin kali 100	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	58,33	20,00		0	40,00		
			Persentase Pelanggaran Operasional Lalu Lintas	Jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang ditindak dibagi jumlah kendaraan diperiksa kali 100	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	38,92	35,00		5,45	30,00		
			Persentase Lokasi Titik Parkir	Jumlah lokasi titik parkir tahun n dibagi target lokasi titik parkir dikali 100	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	60,00	68,00		13,60	76,00		
	Program Angkutan							2.850.000			2.907.000	Dinas Perhubungan
			Persentase Layanan Angkutan Darat	Jumlah Halte /terminal tahun n dibagi jumlah kebutuhan halte/ terminal kali 100	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	29,41	31,00		7,75	33,00		
			Rasio Ijin Trayek	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah angkutan umum pedesaan/perkotaan dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	66,00	76,00		0	80,00		
			Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan wajib uji tahun ke n dibagi jumlah kendaraan wajib uji	laporan dan monev, Permendagri No. 86/2017	77,80	80,00		59,29	82,00		
	Program Keselamatan Jalan							9.565.000			9.756.300	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Jumlah angka kematian korban kecelakaan dibanding kendaraan per 10.000	Persen; Tahunan; IKU OPD	32,00	35,00		0	38,00		
			Persentase Fatalitas Korban Kecelakaan	Jumlah Korban meninggal dunia dibanding jumlah kendaraan teregistrasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	4,17	4,00		0	3,80		
			Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	jumlah LPJU pada tahun n dibagi jumlah LPJU yang seharusnya tersedia dikali seratus Persen	laporan dan monev, IKU OPD	45,15	56,57		74,51	67,00		
10	KOMUNIKASI DAN INFORMASI							1.432.000			1.432.000	Dinas Kominfo
	Desiminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media							1.432.000			1.432.000	Dinas Kominfo
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	jumlah KIM dibagi jumlah desa yang ada dalam kab dikali seratus	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	10,00	33,00		0	55,00		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Kualifikasi tingkat KIP Badan Publik	Skor perolehan KIP Badan Publik	Skor; Tahunan;	41,60	45,00	83,96	50,00			
		Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Pengukuran tingkat maturitas SPBE berdasarkan pada domain tatakelola SPBE, kebijakan internal, dan layanan SPBE (indeks 0-5)	Indeks; Tahunan	2,58	2,75	3,11	3,00			
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									1.520.000	1.535.200	Dinas Dagkop UKM
	Program Koperasi									590.000	595.900	Dinas Dagkop UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT dan melaksanakan kegiatan usaha untuk melayani anggota dibagi jumlah koperasi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,37	0,38	0,58	0,42			
	Program Usaha Mikro Kecil Menengah									930.000	939.300	Dinas Dagkop UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	UMKM yang kompetitif dan mandiri	Jumlah UMKM yang telah mendapatkan izin, pelatihan dan fasilitasi modal dibagi jumlah UMKM dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	5,26	5,80	7,16	7,10			
13	PENANAMAN MODAL DAERAH									1.563.000	3.586.660	Dinas PMPTSP
	Program Pengendalian	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								480.000	489.600	Dinas PMPTSP
			Persentase Kepatuhan Perusahaan	Jumlah perusahaan yang patuh perijinan dibanding jumlah perusahaan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	46,73	61,28	60,00	64,28			
	Program Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal								703.000	717.060	Dinas PMPTSP
			Nilai Investasi PMA	jumlah nilai investasi berskala internasional (PMA)	Rp (000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	480.800.000	500.000.000	291.626.116.163	520.000.000			
			Jumlah Investor PMA	jumlah pemohon asing	Pemohon; Tahun	3	5	5,00	7			
			Nilai Investasi PMDN	jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp (000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.073.862.531.863	850.000.000	9.073.688.922.252	875.000.000			
			Jumlah Investor PMDN	jumlah investor dalam negeri	Pemohon; Tahun	7.257	7.457	11,046	7.657			
	Program Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal								380.000	2.380.000	Dinas PMPTSP

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Indeks; Tahunan; IKU OPD	77,61	78,00	82,23	79,00			
14	PEMUDA DAN OLAHRAGA									8.052.000	8.213.040	Dinas Parpora
	Program Pemuda dan Olahraga									8.052.000	8.213.040	Dinas Parpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Wirausaha Pemuda	jumlah wirausaha muda dibagi jumlah seluruh wirausaha dikali seratus Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,10	0,30	0,28	0,60			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi pemuda dikali seratus Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00			
			Jumlah Atlet yang Berprestasi	jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat Propinsi dalam satu tahun	Atlet; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	65,00	70,00	61,00	75,00			
15	STATISTIK									2.554.787	2.554.787	Dinas Kominfo
	Program statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								2.554.787	2.554.787	Dinas Kominfo
			Persentase dokumen data sektoral statistik daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persentase sheet data yang dipublikasikan dibagi target sheet data yang dipublikasikan (2000 sheet) dikali seratus	Persen; Tahunan;	0	20,00	26,84	40,00			
			Laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh pengunjung SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	selisih jumlah pengunjung SDS / open data dibagi jumlah pengunjung SDS / open data tahun lalu dikali seratus	Persen; Tahunan	0	10,00	66,40	20,00			
			Standarisasi LPSE	Standarisasi LPSE	Level; Tahunan	10,00	17,00	15,0	17,00			
16	PERSANDIAN									14.203.813	14.203.813	Dinas Kominfo
	Program Teknologi Informatika dan Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pngamanan Informasi								14.203.813	14.203.813	Dinas Kominfo
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai kematangan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) (skor 0-500)	Nilai;Tahunan	147,00	272,00	262,00	300,00			
17	KEBUDAYAAN									1.865.000	1.938.000	Dinas Dikbud

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab
							2020		2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	
	Program Kebudayaan						1.865.000			1.938.000	Dinas Dikbud
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase seni dan kesenian yang dibina	Jumlah seni dan kesenian yang dibina dibagi jumlah seni dan kesenian seluruhnya dikali 100	Satuan, Tahunan	78,50	79,61	79,96	80,12		
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji	Jumlah Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji dibagi jumlah benda cagar budaya dan situs budaya seluruhnya dikali 100	Satuan, Tahunan	21,40	22,50	23,78	24,50		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tradisi yang dikembangkan	Jumlah tradisi yang dikembangkan dibagi jumlah tradisi yang ada dikali 100.	Satuan, Tahunan	50,00	55,00	50,00	57,50		
18	PERPUSTAKAAN						3.900.000			3.978.000	Dinas Arpus
	Program Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan					3.900.000			3.978.000	Dinas Arpus
			Persentase peningkatan pemustaka	Persentase kenaikan jumlah pemustaka perpustakaan se Kabupaten Tegal dari data awal 2018 sebanyak 31.243 orang (target tahun ke 5 sebanyak 62.486 orang)	Persen; Tahunan; IKU OPD	31.243 orang	20% (37.492 orang)	20% (20.898 orang)	40% (43740 orang)		
			Persentase peningkatan koleksi judul	Persentase jumlah penambahan koleksi judul buku dibanding dengan target selama 5 tahun (target 12.500 judul)	Persen; Tahunan; IKU OPD	23.000 judul	20% (2500 judul)	20% (2.451 judul)	40% (5000 judul)		
			Persentase peningkatan perpustakaan berbasis TIK	Persentase jumlah perpustakaan berbasis TIK dibanding dengan target selama 5 tahun (150 perpustakaan)	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	20% (40 Perpus)	20% (20 Perpus)	40% (80 perpus)		
19	KEARSIPAN						1.150.000			1.173.000	Dinas Arpus
	Program Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip					1.150.000			1.173.000	Dinas Arpus
			Peningkatan nilai LAKE LKD	Nilai yang diperoleh dari Audit Kearsipan Eksternal oleh ANRI	Nilai, Tahunan, IKU OPD	39,00	45,00	73,00	55,00		
			Peningkatan jumlah Perangkat daerah dan BUMD bernilai LAKI Cukup	Jumlah perangkat daerah dan BUMD yang memenuhi kriteria Cukup sesuai standar Audit Kearsipan Internal	OPD dan BUMD, Tahunan, IKU OPD	0	9,62% (5 OPD)	0	17,31% (9 OPD)		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Peningkatan Pemerintah desa dan Ormas bernilai LAKE Cukup	Jumlah pemerintah desa dan Ormas yang memenuhi kriteria Cukup sesuai standar Audit Kearsipan Eksternal	Desa dan Ormas, Tahunan, IKU OPD	0	16,67% (2 Desa)	0	33,33% (4 Desa)			
	URUSAN PILIHAN											
								39.390.500			39.687.800	
1	PARIWISATA							8.312.000			8.228.340	Dinas Parpora
	Program Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata	Program Pemasaran Pariwisata						1.765.000			1.550.400	Dinas Parpora
			Jumlah Kunjungan Wisnu dan Wisman	jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten dan kota dibagi jumlah kunjungan wisata yang direncanakan dikali seratus Persen	Angka; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.052.487	1.152.587	466.668,00	1.252.687			
			Rata-rata lama kunjungan wisata	rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Hari; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,90	0,08	0,08	0,09			
	Program Obyek dan Sarana Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						6.547.000			6.677.940	Dinas Parpora
			Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarpras dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarpras yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	22,22	66,67	66,67	66,67			
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Jumlah Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Jasa Usaha Pariwisata (TDUP) dalam satu tahun	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	70,00	75,00	24,00	80,00			
2	PERTANIAN							11.312.500			11.457.490	Dinas Tan KP, DKPP
	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura							2.050.000			2.103.000	Dinas Tan KP
			Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan	Jumlah PDRB sub sektor tanaman pangan tahun n dikurangi PDRB sub sektor tanaman pangan tahun n-1 dibagi PDRB sub sektor tanaman pangan tahun n-1	Persen Tahunan; IKU OPD	(1,30)	0,10	1,71	0,15			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab
							2020		2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	
			Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perkebunan	Jumlah PDRB sub sektor perkebunan tahun n dikurangi PDRB sub sektor perkebunan tahun n-1 dibagi PDRB sub sektor perkebunan tahun n-1	Persen Tahunan; IKU OPD	1,18		-2,28	1,10		
			Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Hortikultura	Jumlah PDRB sub sektor hortikultura tahun n dikurangi PDRB sub sektor hortikultura tahun n-1 dibagi PDRB sub sektor hortikultura tahun n-1	Persen Tahunan; IKU OPD	1,32	1,00	1,74	1,10		
			Luas Lahan Pertanian Padi Organik	Luas lahan pertanian padi organik yang mendapatkan sertifikat organik dari LSO	Hektar, Tahunan, IKU OPD	2,00	2,00	0	2,00		
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					4.635.000			4.635.000	Dinas Tan KP
			Indek Pertanaman	luas lahan yang ditanami padi dalam 1 tahun / luas baku lahan	Indeks; Akumulatif; IKU OPD	1,50	1,54	1,52	1,58		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Luas serangan OPT Utama yang Tertangani / Luas serangan OPT Utama	Persen; Tahunan; IKU OPD	92,31	89,80	99,20	89,85		
			Rasio Serangan OPT	Luas Serangan OPT Utama/Luas Tanam Padi	Persen; Tahunan; angka maksimal; IKU OPD	<3	<3	0,90	<3		
			Persentase lahan terakomodir pupuk bersubsidi	luas lahan yang terakomodir bantuan pupuk bersubsidi / Luas Lahan Pertanian Kab. Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	90,00	91,00	100,76	92,00		
			Luas Lahan Sawah Lestari yang dipertahakan	Luas Lahan LP2B yang telah ditetapkan	Persen; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00		
			Jumlah layanan Perlindungan Tanaman	Penyediaan Agen Pengendali Hayati (APH) untuk perlindungan tanaman	Liter, Tahunan, IKU OPD	515,00	1.000,00	0	1.000,00		
			Rasio Unit Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) per desa	Jumlah UPJA/Jumlah Desa	Persen; Akumulasi; IKU OPD	54,77	59,36	54,77	61,48		
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian					1.428.000			1.456.000	Dinas Tan KP
			Persentase Posluhdes	Jumlah Posluhdes/Jumlah Desa	Persen; Akumulatif;	27,18	30,66	30,66	34,15		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya / jumlah kelompok tani	Persen; Tahunan;	18,00	5,00	5,00	5,00			
			Persentase petani yang terlatih pertahun	Jumlah petani yang dilatih(dibina) / Jumlah Petani	Persen; Tahunan;	2,50	2,50	0	2,50			
	Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								1.750.000	1.785.000	Dinas Tan KP
			Jumlah Pelaku Usaha Industri Pengolahan Pertanian	Jumlah kelompok yang berhasil dibina dalam pengolahan hasil-hasil pertanian	Persen IKU OPD	na	5,00	2,00	5,00			
			Persentase adopsi teknologi tepat guna	Jumlah petani yang menerapkan teknologi tepat guna / jumlah anggota kelompok tani penerima demplot teknologi tepat guna	Persen; Tahunan;	6,00	6,00	0	6,00			
			Persentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian	Jumlah Bibit yang disalurkan/ jumlah kebutuhan bibit di masyarakat	Persen, akumulasi	30,00	35,00	0	40,00			
			Penyediaan Sistem Informasi Pertanian	- SI LP2B, SI Penyebaran Komoditas Tan Pangan, SI Penyebaran Komoditas Hortik, SI Pemasaran Hasil	Jumlah jenis SI; IKU OPD	1,00	1,00	1,00	1,00			
			Tingkat Kunjungan Masyarakat di TTP	Jumlah kunjungan masyarakat umum di TTP untuk mengenal pertanian	Jumlah, IKU OPD	10.000,00	5.000,00	0	5.000,00			
	Program Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								1.449.500	1.478.490	DKPP
			Jumlah produksi daging	Jumlah produksi daging (kg) meliputi jumlah produksi daging sapi,kerbau, kambing, domba, unggas dan aneka ternak lainnya	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.057.415	10.157.989	11.284.734	10.259.569	-		
			Jumlah produksi telur	Jumlah produksi telur (kg) meliputi jumlah produksi telur ayam ras, buras, puyuh dan unggas lainnya	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.258.158	10.360.740	10.760.493	10.464.347			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Jumlah produksi susu	Jumlah produksi susu segar (Kg.) meliputi jumlah produksi susu sapi dan kambing	Kilogram ; Tahunan, IKU Program	713.890	724.599	604.664	735.468			
3	PERDAGANGAN									9.660.000	9.756.600	Dinas Dagkop UKM
	Program Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting								2.210.000	2.232.100	Dinas Dagkop UKM
			Persentase Pedagang tertib niaga	Jumlah Kelompok/ Pedagang yang mendapat pembinaan tertib ukur dan tertib niaga	Persen; Tahunan; IKU OPD	18,73	20,00	24,00	40,00			
	Program Pengelolaan Pasar									7.450.000	7.524.500	Dinas Dagkop UKM
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang merujuk SNI	Pasar yang tertib, aman, bersih, dan dilengkapi sarana sesuai SNI Pasar Rakyat	Persen; Tahunan; SNI	1 Pasar	1 Pasar	0	1 Pasar			
4	PERINDUSTRIAN									6.725.000	6.796.750	Dinas Perinaker
	Program Peingkatan Layanan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								6.275.000	6.337.750	Dinas Perinaker
			Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7,00	7,90	-0,46	7,90			
			Cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pengrajin dikali 100%	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,25	4,95	4,66	5			
	Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan									450.000	459.000	Dinas Perinaker
			Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7,00	7,40	-0,46	7,40			
5	TRANSMIGRASI											Dinas Perinaker
	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi										Dinas Perinaker

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab	
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target		Rp. (000)
			Persentase transmigran yang ditempatkan	jumlah transmigran ditempatkan (tidak kembali dalam kurun 1 tahun) dibagi jumlah transmigrasi ditempatkan dikali seratus	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00	0	100,00			
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN									3.381.000	3.448.620	DKPP
	Program Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap								2.231.000	2.275.620	DKPP
			Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (kg) meliputi jumlah hasil tangkapan ikan di laut dan perairan umum daratan	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	1.551.423,00	1.566.937	1.964.377,00	1.582.606			
			Nilai produksi perikanan tangkap	Nilai produksi perikanan tangkap (Rp.000) meliputi jumlah nilai produksi perikanan hasil tangkapan di laut dan perairan umum daratan	Rupiah; Tahunan ; IKU Program	14.459.278	14.603.871	13.608.183,00	14.749.909			
	Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan								1.150.000	1.173.000	DKPP
			Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	2.047.818	2.068.296	2.730.262,00	2.088.979			
			Nilai produksi perikanan budidaya	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp; Tahunan; Permendagri 86/2017	86.814.081	87.682.222	145.642.227,00	88.559.044			
			Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	4.514.145	4.559.286	5.478.639,00	4.604.879			
			Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Rp; Tahunan; Permendagri 86/2017	171.409.044	173.123.134	131.189.142,40	174.854.366			
	URUSAN PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN									83.633.566	84.972.258	
1	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN									54.713.566	55.616.100	Setda, Set. DPRD, Kecamatan
	Sekretariat Daerah									23.545.000	24.015.900	
	Program Bina Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan								125.000	127.500	Bagian Pembangunan Setda
			Persentase OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	18,18	39,41			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Persentase Rumusan Kebijakan Rumpun Pembangunan yang difasilitasi	Jumlah rumusan kebijakan Bagian Pembangunan yang difasilitasi dibanding jumlah rumusan Bagian Pembangunan dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	100,00		
	Program Bina Perekonomian							325.000			331.500	Bagian Perekonomian Setda
			Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah capaian LKJIP OPD kategori B dibagi Jumlah OPD rumpun perekonomian	Persen, Kumulatif, IKU OPD	35,41	37,41		18,18	39,41		
			Persentase peraturan rumpun perekonomian yang diimplementasikan	Jumlah peraturan yang diimplementasikan dibagi jumlah peraturan	Persen, Kumulatif, IKU OPD	92,00	93,00		93,00	94,00		
	Program Bina Bagian Layanan Pengadaan							675.000			688.500	Balada Setda
			Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line (e- procurement)	Jumlah layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line (e-procurement) dibanding jumlah layanan pengadaan barang / jasa	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	100,00		
			Persentase lelang tepat waktu		Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	100,00		
	Program Bina Pemerintah Desa	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat						150.000			153.000	Bagian Pemes Setda
			Persentase pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dibanding jumlah pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		50,00	100,00		
			Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41		0,04	39,41		
	Program Bina Pemerintahan							1.055.000			1.076.100	Bagian Pemerintahan Setda
			Persentase kerjasama Daerah yang terealisasi	Jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah yang terealisasi dibanding jumlah kerjasama Daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	100,00		
			Persentase Layanan Publik sesuai dengan SPM	Jumlah layanan publik yang sesuai dengan SPM dibanding jumlah layanan publik	Persen; Tahunan; IKU OPD	92,00	93,00		93,00	94,00		
			Persentase IKM Kecamatan	Persentase IKM Kecamatan	Persen; Tahunan;	71,28	72,53		72,53	73,78		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	38,00	39,41			
	Program Bina Kesejahteraan Rakyat							3.390.000		3.457.800		Bagian Kesra Setda
			Persentase pemenuhan pelayanan sosial keagamaan	Jumlah pemenuhan pelayanan kegiatan sosial keagamaan yang terfasilitasi dibanding jumlah kegiatan sosial keagamaan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00			
			Persentase OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	19,00	39,41			
	Program Bina Organisasi							1.175.000		1.198.500		Bagian Organisasi Setda
			Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	57,61	59,61	61,36	61,61			
			Persentase IKM Kabupaten	Persentase IKM Kabupaten	Persen; Tahunan; IKU OPD	71,28	72,53	80,80	73,78			
			Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	100,00	39,41			
	Program Bina Hukum							1.000.000		1.020.000		Bagian Hukum Setda
			Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Jumlah pembentukan Perda yang terselesaikan dibanding jumlah pembentukan Perda yang dibahas	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00			
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum HAM yang terfasilitasi	Jumlah penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi dibanding jumlah penyelesaian permasalahan hukum	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Program Bina Umum / Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Program Administrasi Umum						12.870.000		13.127.400		Bagian Umum Setda
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai Standar dan Administrasi Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai Standar dan Administrasi Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu	IKU OPD	100%	100%	76%	100%			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
	Program Bina Keuangan / Manajemen Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah							735.000			749.700	Bagian Keuangan Setda
			Persentase OPD Rumpun Keuangan Daerah tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persentase OPD Rumpun Keuangan Daerah tercapai LKJIP OPD kategori BB	IKU OPD	35,41	37,41		33,33	39,41		
			Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terselesaikan	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terselesaikan	IKU OPD	92,00	93,00		93,00	94,00		
			Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perencanaan perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perencanaan perangkat Daerah	IKU OPD	100%	100%		97,00	100%		
	Program Bina Hubungan Masyarakat dan Protokoler							2.045.000			2.085.900	Bagian Humas dan Protokol Setda
			Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	Jumlah kebijakan strategis yang diinformasikan kepada masyarakat dibanding jumlah kebijakan strategis Pemerintah Daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00	100,00		
			Persentase OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori BB	Jumlah OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori B dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41		100,00	39,41		
								15.540.000			15.850.800	
	Program Layanan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						5.990.000			6.109.800	Set DPRD
			Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	Jumlah Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	Persen, Tahunan, permendagri 86 2017	52,31	100,00		90,00	100,00		
	Program Layanan Fungsi Pengawasan dan Kerjasama	Program Layanan dan Administrasi Keuangan						9.550.000			9.741.000	Set DPRD
			Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	Jumlah Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	Persen, Tahunan, permendagri 86 tahun 2017	54,22	100,00		90,00	100,00		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020			2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
	Kecamatan							15.628.566			15.749.400	
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Adiwerna	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Adiwerna						550.800			550.800	Kec Adiwerna
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-	
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	16	16	-	16,00	15	-	
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	5	5	-	5,00	6	-	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Balapulang						470.000			498.000	Kec. Balapulang
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	10	0	-	
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	17	17	-	9	16	-	
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	3	3	-	0	4	-	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Bojong						515.000			515.000	Kec. Bojong
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	2	0	-	
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	15	15	-	10	15	-	
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	2	-	0	2	-	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bumijawa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Bumijawa						568.250			550.000	Kec. Bumijawa
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	0	-	0	0	-	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							2020			2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	Realisasi	
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	15	16	-	16,00	15	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	2		2,00	3			
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhturi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Dukuhturi							508.026			533.200	Kec. Dukuhturi
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-		
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	17	15	-	15,00	14	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	3		3,00	4			
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Dukuhwaru							527.000			542.000	Kec. Dukuhwaru
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-		
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	7	6	-	7,00	6	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	3	4		3,00	4			
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Jatinegara							477.500			502.500	Kec. Jatinegara
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-		
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	16	16	-	16,00	16	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	1		1,00	1			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020			2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kedungbanteng	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kedungbanteng					418.290			550.000	Kec. Kedungbanteng	
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0 -	0	0	-		
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	8	8 -	8,00	8	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	2	2,00	2			
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kramat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Adiwerna					1.530.550			1.530.550	Kec. Kramat	
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	8	7 -	7,00	6	-		
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	6	5 -	5,00	5	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	5	7	7,00	8			
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lebaksiu					550.800			521.050	Kec. Lebaksiu	
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0 -	0	0	-		
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	13	9 -	12,00	9	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	6	3,00	6			
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Margasari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Margasari					550.000			550.000	Kec. Margasari	
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0 -	0	0	-		
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	11	11 -	9,00	10	-		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020			2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	2		1,00	3		
								530.000			510.000	Kec. Pagerbarang
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Adiwerna										
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-	
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	13	13	-	13,00	13	-	
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0		0	0		
								550.000			485.000	Kec. Pangkah
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Pangkah										
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-	
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	20	19	-	20,00	17	-	
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	3	4		3,00	6		
								5.840.750			5.840.750	Kec.Slawi
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Slawi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Slawi										
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-	
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	0	-	0	0	-	
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	4	5		100,00	5		
								521.050			521.050	Kec. Suradadi
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Suradadi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Adiwerna										
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							2020			2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	Realisasi	
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	8	7	-	7,00	7	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	3	4		4,00	4			
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Talang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Talang							449.500			449.500	Kec Talang
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-		
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	17	17	-	17,00	17	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	2	2		2,00	2			
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Tarub	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Tarub							550.000			550.000	Kec Tarub
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-		
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	19	17	-	17,00	17	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	3		3,00	3			
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Warureja	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Warureja							521.050			550.000	Kec Warureja
			Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	0	0	-	0	0	-		
			Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	11	9	-	9,00	7	-		
			Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	1	3		2,00	5			
2	PENGAWASAN								2.205.000			2.274.400	Inspektorat
	Program Pengawasan Internal dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							1.285.000			1.285.000	Inspektorat
			Persentase penyelesaian LHP	Jumlah penyelesaian LHP dibagi jumlah LHP dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	90,00	91,00		170,00	91,00			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020			2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
	Program Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan							300.000			306.000	Inspektorat
			Persentase APIP memiliki Sertifikasi Keahlian	Persentase APIP memiliki Sertifikasi Keahlian	Persen; Tahunan; IKU OPD	2,33	6,98		30,00	11,63		
	Program Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						100.000			153.000	Inspektorat
			Persentase OPD yang tercapai IKUnya	jumlah OPD tercapai IKU dibagi IKU OPD	Jumlah; Tahunan; IKU OPD	57,01	59,23		4,16	60,00		
	Program Pembangunan Budaya Integritas							520.000			530.400	Inspektorat
			Persentase OPD berpredikat WBK/WBBM	jumlah OPD berpredikat WBK/WBBM dibagi Jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	16,67	18,42		6,40	21,00		
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							7.650.000			7.803.000	Bappeda dan Litbang
	Program Perencanaan dan Penganggaran Program	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						1.200.000			1.224.000	Bappeda dan Litbang
			Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Jumlah dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya disusun dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	99,00	100,00		100,00	100,00		
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan							850.000			867.000	Bappeda dan Litbang
			Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	Rata-rata deviasi rencana dan realisasi fisik keuangan kegiatan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82,00	85,00		85,00	86,00		
			Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	Jumlah indikator pembangunan sesuai target dibanding jumlah indikator pembangunan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	83,01	85,00		85,00	85,00		
	Program Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur	Program Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah						2.600.000			2.652.000	Bappeda dan Litbang

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur	Jumlah dokumen perencanaan daerah rumpun ekbangtur dibagi jumlah dokumen perencanaan OPD rumpun ekbangtur	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97,00	97,00	97,00	97,00			
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						3.000.000			3.060.000	Bappeda dan Litbang
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Pemkesos	Jumlah dokumen perencanaan daerah rumpun pemkesos dibagi jumlah dokumen perencanaan OPD rumpun pemkesos	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97,00	97,00	97,00	97,00			
4	KEUANGAN							9.785.000			9.555.950	BPKAD, BP2D
	Program Anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						1.160.000			1.160.000	BPKAD
			Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	Jumlah APBD tepat waktu dibagi jumlah APBD-P	Persen; Tahunan: IKU OPD	100%	100%	100%	100%			
			Persentase kualitas DPA yang sesuai ketentuan	Jumlah DPA yang sesuai dibagi jumlah DPA	Persen; Tahunan: IKU OPD	65%	70%	70%	75%			
	Program Perbendaharaan							680.000			737.550	BPKAD
			Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	Jumlah SP2D tepat waktu dibagi jumlah SP2D	Persen; Tahunan: IKU OPD	100%	100%	100%	100%			
			Persentase ketersediaan Dana Kasda terhadap anggaran Kas	Jumlah ketersediaan dana/kas dibanding jumlah kebutuhan anggaran kas	Persen; Tahunan: IKU OPD	100%	100%	100%	100%			
	Program Akuntansi dan Pelaporan							635.000			647.700	BPKAD
			Persentase Ketepatan waktu Perda Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	ketepatan waktu penyusunan pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Persen; Tahunan: IKU OPD	100%	100%	100%	100%			
			Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Jumlah OPD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan: IKU OPD	100%	100%	100%	100%			
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengendalian Barang Milik Daerah						2.650.000			2.700.000	BPKAD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung jawab
							2020		2021			
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
			Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	Jumlah telah OPD mengelola BMD baik dan benar dibagi jumlah OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	50%	60%	65%	70%			
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Operasional Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						475.000		484.500	BP2D	
			Persentase perencanaan, monev dan pelaporan pendapatan	Perencanaan pendapatan PAD dan Monev realisasi PAD	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	75%	100,00			
	Program Pajak PBB dan BPHTB							3.360.000		2.993.700	BP2D	
			Persentase Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	Pendataan dan penetapan pajak daerah sebagai landasan penagihan pajak daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	98%	100,00			
	Program Pajak Non PBB dan BPHTB							825.000		832.500	BP2D	
			Persentase Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih	penagihan pajak daerah yang telah ditetapkan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	97,85%	100,00			
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.540.000		1.570.800	Bappeda dan Litbang	
	Program Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah						1.540.000		1.570.800	Bappeda dan Litbang	
			Persentase jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah kelitbangan yang dihasilkan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	30,00	100,00			
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							7.740.000		8.152.008	BKD	
	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						2.640.000		3.240.648	BKD	
			Persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	jumlah PNS mengikuti diklatpim dan mendapat STTPL dibanding jumlah JPT dan Administrator dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	62,76	5,62	2,17	5,62			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				OPD Penanggung jawab
							2020		2021		
							Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	
			Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL	jumlah Pejabat Fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapat sertifikat/STTPL dibanding jumlah pejabat fungsional non pendidikan/ pengawasan dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,27	4,34	4,82	4,34		
			Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan sesuai dengan peraturan	jumlah CPNS mengikuti lat.dasar/prajabatan dibanding jumlah CPNS dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah						1.900.000		1.800.360	BKD
			Persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi	jumlah JPT, administrator dan pengawas pada instansi pemerintah terisi dibanding jumlah jabatan dikali seratus	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	85,00	95,50	87,97	95,50		
			Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	jumlah jabatan fungsional non guru/kesehatan terisi dibanding formasi jabatan fungsional non guru/kesehatan dikali seratus	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	21,07	2,77	2,59	2,77		
			Persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya	jumlah JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya dibanding jumlah JPT dan Administrasi dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	24,77	13,68	6,61	13,68		
	Program mutasi dan Pengelolaan Data ASN							2.700.000		2.489.600	BKD
			Persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	jumlah SIM kepegawaian yang terintegrasi dibanding jumlah SIM yang seharusnya ada dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; IKU OPD	25,00	16,67	16,67	16,67		
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN							500.000		621.400	BKD
			Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	jumlah PNS mendapatkan hukuman disiplin dibanding jumlah kasus kepegawaian yang masuk dikali 100 Persen	Persen; Tahunan; IKU OPD	0,54	0,52	0,12	0,52		
	TOTAL							1.119.510.659		1.198.186.494	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sedangkan penjabaran program prioritas seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024, tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 7.4.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
XX	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.348.243.698		1.412.243.562		1.424.635.764		4.185.123.023	SEMUA OPD		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	663.016.233	100	663.016.233	100	676.276.558	100	2.002.309.024	DINAS DIKBUD		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	7.276.416	100	8.004.058	100	8.804.463	100	24.084.937	DINAS KESEHATAN		
		Persentase capaian kinerja mutu puskesmas	Jumlah persentase capaian kinerja puskesmas dibagi jumlah puskesmas (29 Puskesmas) dikali 100%	Persen, tahunan	38,00	46,00	85.000.000	50,00	85.000.000	54,00	87.550.000	100	257.550.000	DINAS KESEHATAN		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	26.975.560	100	26.975.560	100	27.784.827	100	81.735.947	RSUD dr SOESELO		
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo		Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007	78,46 (AA)	82 (AA)	137.990.864	86 (AA)	137.990.864	90 (AA)	142.130.589	90 (AA)	418.112.316	RSUD dr SOESELO		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	5.838.651	100	5.838.651	100	6.013.811	100	17.691.113	RSUD SURADADI		
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi		Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007	74,06 (A)	76,16 (A)	22.075.000	77,26 (A)	22.075.000	78,36 (A)	22.737.250	78,36 (A)	66.887.250	RSUD SURADADI		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	16.705.624	100	16.705.624	100	16.705.624	100	50.116.872	DPU		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Perkimtaru	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	6.746.556	100	6.746.556	100	6.948.953	100	20.442.065	DINAS PERKIMTARU		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Satpol PP	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	6.466.849	100	6.466.849	100	6.660.854	100	19.594.552	SATPOL PP		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan BPBD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	2.979.735	100	2.979.735	100	3.069.127	100	9.028.597	BPBD		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	2.574.754	100	2.574.754	100	2.651.997	100	7.801.505	DINAS SOSIAL		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.602.809	100	3.845.369	100	4.109.026	100	11.557.204	DINAS P3AP2KB		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	5.030.614	100	5.030.614	100	5.181.532	100	15.242.760	DLH		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	7.177.448	100	7.177.448	100	7.392.771	100	21.747.667	DISDUKCAPIL		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pemasdes	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.544.587	100	3.544.587	100	3.650.925	100	10.740.099	DISPERMASDES		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	4.187.563	100	4.187.563	100	4.313.190	100	12.688.316	DISHUB		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.464.617	100	3.464.617	100	3.568.556	100	10.497.790	DINAS KOMINFO		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.338.753	100	3.338.753	100	3.438.916	100	10.116.422	DINAS PMPTSP		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	5.345.834	100	5.345.834	100	5.506.209	100	16.197.877	DISPORAPAR		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Arpus	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.090.980	100	3.090.980	100	3.183.709	100	9.365.669	DINAS ARPUS		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DKPP	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	4.295.970	100	4.295.970	100	4.424.849	100	13.016.789	DKPP		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Tan KP	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	12.870.403	100	12.870.403	100	13.256.515	100	38.997.321	DINAS TAN KP		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, Tahunan, Permendagri no 90/2019	100	100	9.055.921	100	9.055.921	100	9.327.599	100	27.439.441	DINAS DAGKOP UKM		
		Presentase pemenuhan layanan penunjang pemerintahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	9.118.556	100	9.118.556	100	9.392.113	100	27.629.225	DISPERINAKER		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah dibanding jumlah Administrasi Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah di kali 100	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	19.910.274	100	19.910.274	100	20.507.582	100	60.328.130	SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai standar dan Administrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu dibanding jumlah pemenuhan sarana prasarana kantor dan rumah jabatan dan administrasi layanan kepegawian dikali 100	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100		100		100		100	-	SEKRETARIAT DAERAH		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Komponen	Rerata Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai, tahunan Praturan Menteri PANRB 14/2017 IKU OPD	80,83	82,15		84,83		86,20		86,20	-	SEKRETARIAT DAERAH		
		Predikat Nilai SAKIP Komponen	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB	Nilai, tahunan, peraturan Menteri PANRB 12/2015 ; IKU OPD	61,36	65,68		68,08		70,61		70,61	-	SEKRETARIAT DAERAH		
		Nilai Reformasi Birokrasi Komponen	Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB dari Kementerian PANRB	Nilai, tahunan Peraturan Menteri PANRB 26/2020 IKU OPD	63,69	64,69		65,19		65,69		65,69	-	SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat	Persentase terpublikasinya informasi kegiatan dan kebijakan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017; IKU OPD	100	100		100		100		100	-	SEKRETARIAT DAERAH		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokol sesuai SOP	Kegiatan seremonial pimpinan yang terfasilitasi layanan keprotokol	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017, IKU OPD	100	100		100		100		100	-	SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum nilai SAKIP B (Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang memperoleh nilai SAKIP B (Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	80,00	82,50		85,00		85,50		85,50		SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang sesuai standard (IKM Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum nilai IKM Baik dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum Indeks Reformasi Birokrasi CC (Cukup Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	-	25,00		50,00		75,00		75,00	-	SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	6.542.252	100	6.542.252	100	6.738.520	100	19.823.024	SEKRETARIAT DPRD		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Pimpinan DPRD	Jumlah layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pimpinan DPRD yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pimpinan DPRD	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	31.910.638	100	31.910.638	100	32.867.957	100	96.689.233	SEKRETARIAT DPRD		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda & Litbang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	4.038.694	100	4.038.694	100	4.159.855	100	12.237.243	BAPPEDA DAN LITBANG		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BPKAD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	167.565.710	100	230.595.373	100	213.960.880	100	612.121.963	BPKAD		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BAPPENDA	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	10.721.943	100	10.721.943	100	11.043.601	100	32.487.487	BAPPENDA		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	3.929.301	100	3.929.301	100	4.047.180	100	11.905.782	BKD		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	12.215.000	100	12.215.000	100	12.581.450	100	37.011.450	INSPEKTORAT		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Adiwerna	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.255.237	100	1.255.237	100	1.292.894	100	3.803.368	KECAMATAN ADIWERNA		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Balapulang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.621.213	100	1.621.213	100	1.669.849	100	4.912.275	KECAMATAN BALAPULANG		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.503.829	100	1.503.829	100	1.548.944	100	4.556.602	KECAMATAN BOJONG		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bumijawa	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.502.735	100	1.502.735	100	1.547.817	100	4.553.287	KECAMATAN BUMIJAWA		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhturi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.422.186	100	1.422.186	100	1.464.852	100	4.309.224	KECAMATAN DUKUHTURI		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.520.637	100	1.520.637	100	1.566.256	100	4.607.530	KECAMATAN DUKUHWARU		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.509.779	100	1.509.779	100	1.555.072	100	4.574.630	KECAMATAN JATINEGARA		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.102.398	100	1.102.398	100	1.135.470	100	3.340.266	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kramat	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.187.995	100	2.187.995	100	2.253.635	100	6.629.625	KECAMATAN KRAMAT		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Lebaksiu	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.154.942	100	1.154.942	100	1.189.590	100	3.499.474	KECAMATAN LEBAKSIU		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Margasari	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.806.774	100	1.806.774	100	1.860.977	100	5.474.525	KECAMATAN MARGASARI		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.469.007	100	1.469.007	100	1.513.077	100	4.451.091	KECAMATAN PAGERBARANG		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.321.891	100	1.321.891	100	1.361.548	100	4.005.330	KECAMATAN PANGKAH		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Slawi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	6.181.969	100	6.181.969	100	6.367.428	100	18.731.366	KECAMATAN SLAWI		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Suradadi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.457.340	100	1.457.340	100	1.501.060	100	4.415.740	KECAMATAN SURADADI		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Talang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.629.057	100	1.629.057	100	1.677.929	100	4.936.043	KECAMATAN TALANG		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.406.524	100	1.406.524	100	1.448.720	100	4.261.768	KECAMATAN TARUB		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Warureja	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.576.011	100	1.576.011	100	1.623.291	100	4.775.313	KECAMATAN WARUREJA		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.010.065	100	2.010.065	100	2.070.367	100	6.090.497	BADAN KESBANGPOL		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							691.494.582		683.075.161		703.814.515		2.078.384.258		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							281.520.196		284.385.398		292.606.705		858.512.299	DINAS DIKBUD	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						247.572.563		249.998.289		257.498.237		755.069.089	DINAS DIKBUD		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD di bagi jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%.	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	79,86	79,88			79,89			79,90			DINAS DIKBUD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten bersangkutan dikali 100%.	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	97,25	97,27			97,28			97,29			DINAS DIKBUD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD di bagi jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	107,03	100,00			100,00			100,00			DINAS DIKBUD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD di bagi jumlah anak usia 3-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	105,99	100,00			100,00			100,00			DINAS DIKBUD	
		Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Proporsi jumlah nilai ujian terhadap jumlah mapel ujian SD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	77,47	76,00			77,00			78,00			DINAS DIKBUD	
		Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Proporsi jumlah nilai ujian terhadap jumlah mapel ujian SMP	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	70,86	73,36			74,5			75,75			DINAS DIKBUD	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						140.000		141.400			145.642		427.042	DINAS DIKBUD	

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Proporsi jam tatap muka muatan lokal terhadap jumlah jam tatap muka per minggu	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		DINAS DIKBUD
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						33.807.633		34.145.709		34.859.826		102.813.168	DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Kelas PAUD	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	23	22		15		16		16,00		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Kelas TK	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	3,16	4,61		5,82		7,03		7,03		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Kelas SD	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	19,11	1,40		1,30		1,20		1,20		DINAS DIKBUD
		Guru Mapel PAI	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	3,00	2,40		1,90		1,40		1,40		DINAS DIKBUD
		Guru Mapel PJOK	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	2,90	2,40		1,90		1,40		1,40		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel SMP	Perbandingan jumlah guru dikali jam wajib mengajar terhadap jumlah rombel	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	27,19	27,85		26,01		24,17		24,17		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel Paket A	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	1,26	1,26		1,26		1,26		1,26		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel Paket B	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,95	0,95		0,95		0,95		0,95		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel Paket C	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,76	0,76		0,76		0,76		0,76		DINAS DIKBUD
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								50.000		51.500		101.500	DINAS DIKBUD
		Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Proporsi sekolah yang berijin operasional terhadap jumlah sekolah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		DINAS DIKBUD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						-		50.000		51.500		101.500	DINAS DIKBUD
		Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Proporsi penggunaan bahasa Tegal dalam pembelajaran disekolah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	50	60		65		70		70		DINAS DIKBUD
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN						169.721.933		171.419.153		175.066.345		516.207.431	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						148.057.566		149.538.142		152.528.904		450.124.612	DINAS KESEHATAN
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi jumlah penduduk di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	0,092	0,096		0,098		0,100		0,100		DINAS KESEHATAN
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi dibagi jumlah RS di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	88,90	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah ibu hamil di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	93,30	98,00		99,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	98,20	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	99,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	73,70	91,00		92,00		93,00		93,00		DINAS KESEHATAN		
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	38,90	55,00		60,00		65,00		65,00		DINAS KESEHATAN		
		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	15,40	30,00		35,00		40,00		40,00		DINAS KESEHATAN		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	33,60	56,00		57,00		58,00		58,00		DINAS KESEHATAN		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	10,100	30,00		35,00		40,00		40,00		DINAS KESEHATAN		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita DM di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	74,50	79,00		80,00		81,00		81,00		DINAS KESEHATAN		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	57,30	70,00		75,00		80,00		80,00		DINAS KESEHATAN		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah terduga TBC di kabupaten kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	57,10	70,00		75,00		80,00		80,00		DINAS KESEHATAN		
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikali	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	90,50	95,00		98,00		98,00		98,00		DINAS KESEHATAN		
		Cakupan balita stunting	Jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	12,50	12,30		12,20		12,00		12,00		DINAS KESEHATAN		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (selain rumah sakit) yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	42,00	63,00		90,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						100.000		101.000		104.030		305.030	DINAS KESEHATAN		
		Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah rekomendasi perijinan praktik tenaga kesehatan dibagi jumlah pengajuan perijinan praktik tenaga	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	Jumlah puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	83,00	89,60		93,10		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						795.000		802.950		827.039		2.424.989	DINAS KESEHATAN
		Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	Jumlah sarana produksi pangan industri rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh sarana produksi pangan industri rumah tangga	Persen; Tahunan; IKU OPD	30,00	36,00		39,00		42,00		42,00		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi persyaratan perijinan dibagi jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mengajukan ijin dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						20.769.367		20.977.061		21.606.372		63.352.800	DINAS KESEHATAN
		Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) strata sehat utama ditambah sehat paripurna dibagi jumlah rumah tangga yang dipantau dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	95,40	95,60		95,70		95,80		95,80		DINAS KESEHATAN
1.03	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						215.103.077		199.814.108		204.185.748		619.102.933	DPU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						6.000.000		6.060.000		6.241.800		18.301.800	DPU		
		Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang irigasi kewenangan kabupaten dikali 100%	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/492 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 DI; Luas 9.281 Ha; Panjang Sal.	58,86	61,33			62,57			63,80		63,80	DPU	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						6.611.202		6.677.314		6.877.633		20.166.149	DPU		
		Cakupan Akses Layanan Air Minum	Jumlah penduduk yang terakses layanan air minum dibagi jumlah penduduk kabupaten dikali 100%	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	61,09	65,55			67,77		70,00		70,00	DPU		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						14.166.000		14.307.660		17.376.000		45.849.660	DPU		
		Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah Sarpras eksisting dibandingkan dengan Jumlah Sarpras Standar/Ideal sesuai Ketentuan	Jumlah; Kumultif; UU No. 18 Tahun 2008	78,00	82,00			83,00		85,00		85,00	DPU		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.749.320		2.776.813		6.930.000		12.456.133	DPU		
		Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga Yang terakses Jaringan Sanitasi baik Individu maupun Komunal dibandingkan dengan Jumlah Rumah	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	94,37	95,57			95,97		96,37		96,37	DPU		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						11.050.000		11.160.500		11.495.315		33.705.815	DPU		
		Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Panjang Jalan yang berdrainase dibandingkan dengan panjang jalan kewenangan Kab.	Persen; kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. 490,15 Km jalan harus berdrainase; 277,95 Km jalan yang berdrainase.	58,42	61,79			62,15		62,52		62,52	DPU		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						43.026.555		43.456.821		35.640.000		122.123.376	DPU		
		Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Jumlah bangunan negara yang sesuai standar teknis dibagi dengan jumlah bangunan negara di kabupaten dikali 100%	Persentase; Kumulatif; Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan	76,88	79,12			80,24		81,36		81,36	DPU		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Rasio bangunan yang memiliki IMB	Jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB dibagi jumlah bangunan gedung di Kabupaten Tegal	Persentase; Kumulatif; Data Perumahan Kabupaten Tegal & Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, Permen PUPR No 2 Tahun 2020	6,50	8,01		8,57		9,15		9,15		DPU		
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						45.900.000		28.900.000		8.000.000		82.800.000	DPU		
		Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	panjang koridor jalan yang ditata dibagi dengan panjang koridor di wilayah perkotaan Slawi (Koridor 1 dan 2)	Persen, Kumulatif: IKU OPD	0,30	60,00		91,11		100,00		100,00		DPU		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						84.000.000		84.840.000		109.000.000		277.840.000	DPU		
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kondisi Baik (B) dan Sedang (S) dibagi dengan panjang jalan kewenangan Kab.	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km.	81,11	84,00		85,50		87,50		87,50		DPU		
		Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Jumlah Jembatan kondisi Baik (B) dan Sedang (S) dibagi dibandingkan dengan jumlah jembatan kewenangan Kab.	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal; Jumlah Jembatan 454 unit	88,05	91,00		92,00		93,50		93,50		DPU		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						1.000.000		1.010.000		2.000.000		4.010.000	DPU
		Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih dibandingkan jumlah penyedia jasa konstruksi yang terdaftar pada tahun	Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019	0	80,00		80,00		80,00		80,00		DPU
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						600.000		625.000		625.000		1.850.000	DPU
		Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Jumlah permohonan ITR yang sesuai dengan peruntukan ruang dibanding jumlah ITR yang diajukan	Persen; Tahunan: IKU OPD	79,93	88,00		89,00		90,00		90,00		DPU
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						17.040.000		18.790.000		20.196.000		56.026.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						225.000		250.000		275.000		750.000	DINAS PERKIMTARU
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit korban bencana yang ditangani pada tahun n dibanding jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun	Persentase; Tahunan; PermenPUPR No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020	100	100		100		100		100		DINAS PERKIMTARU
		Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin pada tahun n dibagi jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten pada tahun n dikali 100%	Persentase; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		100		DINAS PERKIMTARU
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						4.600.000		5.200.000		5.356.000		15.156.000	DINAS PERKIMTARU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal	35,47	45,72		50,48		55,97		55,97		DINAS PERKIMTARU		
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						11.215.000		12.225.000		13.250.000		36.690.000	DINAS PERKIMTARU		
		Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang tertangani dibandingkan dengan Jumlah RTLH	Persentase; Kumulatif; Perbup Kab. Tegal No 1/2020	13,06	17,98		20,79		23,60		23,60		DINAS PERKIMTARU		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						1.000.000		1.115.000		1.315.000		3.430.000	DINAS PERKIMTARU		
		Persentase ketersediaan PSU perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU dibanding dengan jumlah lingkungan perumahan yang ada	Persentase; Kumulatif; IKU OPD	83,31	84,50		85,10		85,70		85,70		DINAS PERKIMTARU		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN						4.210.300		4.252.403		5.491.779		13.954.482			
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						683.811		690.650		1.577.207		2.951.668	SATPOL PP		
		Presentase gangguan trantibun yang tertangani	Jumlah pengaduan yg ditangani / jumlah pengaduan pelanggaran yg masuk X 100 %	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	82,00	86,00		88,00		90,00		90,00		SATPOL PP		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Presentase pelanggaran perda dan perkada yg diselesaikan	Jumlah perda / perkada yg memuat sanksi yg ditegakkan / jumlah keseluruhan perda/ perkada yg memuat sanksi (yang ditetapkan dalam 5 tahun terakhir	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	83,00	87,00		88,00		90,00		90,00		SATPOL PP		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.609.413		2.635.507		2.714.572		10.543.069	BPBD		
		Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yg memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	65,00	71,66		75,25		79,01		79,01		BPBD		
		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti pembinaan penanggulangan bencana / Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	1,38	1,52		1,6		1,68		1,68		BPBD		
		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	22,26	24,54		25,77		27,06		27,06		BPBD		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						917.076		926.247		1.200.000		3.043.323	SATPOL PP		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah pelayanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dlm tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yg dibentuk dan atau di bawah pembinaan perangkat daerah pemadam kebakaran/ jumlah kejadian kebakaran dikab/kota x 100 %	Persen; Tahunan; permendagri 18 tahun 2020	79,00	88,00		90,00		100,00		100,00		SATPOL PP
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3.899.076		4.414.099		6.267.938		14.581.113	DINAS SOSIAL
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						438.335		442.718		1.146.300		2.027.353	DINAS SOSIAL
		Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Jumlah PSKS yang dibina dan diberdayakan dibagi jumlah seluruh PSKS	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	32,44	66,25		83,15		100,00		100,00		DINAS SOSIAL
01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						100.000		100.000		103.000		303.000	DINAS SOSIAL
		Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang	Persentase penangan warga migran korban tindak kekerasan/ perdagangan orang dibagi jumlah korban	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						2.003.750		2.023.788		2.488.569		6.516.107	DINAS SOSIAL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial dibagi jumlah target penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019	29,39	62,62		81,15		100,00		100,00		DINAS SOSIAL
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						957.011		966.581		1.112.069		3.035.661	DINAS SOSIAL
		Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Jumlah Penyandang PPKS (Fakir Miskin dan Anak Terlantar) yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial dasar dibagi Jumlah seluruh PPKS	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	97,99	99,21		100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						309.913		313.012		650.000		1.272.925	DINAS SOSIAL
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						90.067		568.000		768.000		1.426.067	DINAS SOSIAL
		Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas taman makam pahlawan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	89,80	90,00		90,25		90,75		90,75		DINAS SOSIAL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						80.636.953		83.958.148		89.643.351		254.238.452	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1.099.308		1.309.320		2.250.100		4.658.728,0	DISPERINAKER
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					50.000		50.000		50.500		150.500	DISPERINAKER	
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	perbandingan jumlah kegiatan yang dilaksanakan terhadap jumlah total kegiatan yang ada di RTKD	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	100	100		100		100		100		DISPERINAKER
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					732.000		739.320		1.664.000		3.135.320	DISPERINAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja = PDRB Harga Konstan dibagi Jumlah penduduk bekerja	Rasio; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	37.990	40.737		42.410		44.326		44.326		DISPERINAKER
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persentase TK Berkompeten = Jumlah TK bersertifikasi dibagi Jumlah tenaga kerja	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	3,70	5,50		6,40		6,70		6,70		DISPERINAKER
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					108.518		220.000		226.600		555.118	DISPERINAKER	
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Jumlah AKAD, AKAN, AKL dibanding jumlah pencari dikali 100 Persen	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	17,82	30,00		35,00		40,00		40,00		DISPERINAKER
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					208.790		300.000		309.000		817.790	DISPERINAKER	
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	7,08	7,78		8,13		8,48		8,48		DISPERINAKER
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						628.950		1.061.978		1.200.026		2.890.954	DINAS P3AP2KB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						87.400		225.109		254.373		566.882	DINAS P3AP2KB
		Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD dibagi jumlah seluruh belanja operasi APBD X 100%)	Kategori, Tahunan, APBD	26,84	28,00		29,00		30,00		30,00		DINAS P3AP2KB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						323.950		431.064		487.102		1.242.116	DINAS P3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan termasuk TPPO dibagi jumlah penduduk perempuan	Rasio, Tahunan, Data SIMPONI	6,79	8,30		8,49		9,67		9,67		DINAS P3AP2KB
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						-		28.250		31.922		60.172	DINAS P3AP2KB
		Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	Jumlah Keluarga mendapat pelayanan konseling dibanding jumlah keluarga kali 100	Persen, Tahunan, Laporan Kunjungan	0,04	0,06		0,07		0,08		0,08		DINAS P3AP2KB
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						97.380		110.039		124.344		331.763	DINAS P3AP2KB
		Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	Jumlah lembaga yang memberikan data gender dan anak dibagi jumlah keseluruhan lembaga X 100%	Persen; Tahunan; laporan SIGA	20,00	40,00		50,00		60,00		60,00		DINAS P3AP2KB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						-		131.668		148.785		280.453	DINAS P3AP2KB
		Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Jumlah nilai pemenuhan 24 indikator KLA dibagi 1000 dikali 100	Persen, Tahunan, IKU OPD	50,00	64,00		67,00		70,00		70,00		DINAS P3AP2KB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						120.220		135.848		153.500		409.568	DINAS P3AP2KB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi dibagi jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	Persen; Tahunan; Data Simfoni PPPA	0,0076	0.0120		0.0130		0.0140		0.0140		DINAS P3AP2KB
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						316.921		328.874		338.741		984.536	DINAS TAN KP
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						222.200		224.422		231.155		677.777	DINAS TAN KP
		Persentase penguatan cadangan pangan	Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten / Standar Cadangan Beras Kabupaten	Persen; Tahunan; Permentan No. 11/2018, Permendagri 18 Tahun 2020	26,5	28,5		30		32,5		32,5		DINAS TAN KP
		Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	48	50		51		52		52		DINAS TAN KP
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						37.768		38.146		39.290		115.204	DINAS TAN KP
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Daerah Rawan Pangan tertangani dibanding Jumlah Daerah Rawan Pangan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	72,00	90,00		90,00		90,00		90,00		DINAS TAN KP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN						56.953		66.307		68.296		191.555	DINAS TANKP
		Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi / Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	90,00	80,00		83,00		85,00		85,00		DINAS TANKP
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						10.800.000		11.100.000		11.000.000		32.900.000	DINAS PERKIMTARU
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						9.800.000		10.100.000		9.500.000		29.400.000	DINAS PERKIMTARU
		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas bidang tanah yang dibebaskan untuk pembangunan oleh Pemda dibagi dengan rencana luas lahan untuk pembangunan oleh pemda	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PERKIMTARU
		Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	Jumlah aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat dibagi dengan jumlah total lahan yang dimiliki oleh pemerintah	Persen; Kumulatif; IKU OPD	55,95	77,97		88,98		97,00		97,00		DINAS PERKIMTARU
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						500.000		500.000		500.000		1.500.000	DINAS PERKIMTARU
		Persentase implementasi redistribusi tanah	jumlah tahapan implementasi redistribusi tanah dibanding jumlah tahapan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0,00	30,00		60,00		100,00		100,00		DINAS PERKIMTARU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
2.10.05	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						500.000		500.000		1.000.000		2.000.000	DINAS PERKIMTARU
		Persentase Tanah yang tertata	Jumlah tanah yang tertata (teridentifikasi kepemilikan, nilai, penggunaan) dibagi jumlah tanah keseluruhan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0	33,33		66,66		100,00		100,00		DINAS PERKIMTARU
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						18.322.816		14.687.820		14.872.820		47.883.456	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						405.000		300.000		320.000		1.025.000	DLH
		Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	Jumlah Dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup yang tersusun dibagi total keseluruhan dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup yang dibutuhkan periode RPJMD	Persen; Kumulatif; IKU OPD	11,11	55,56		77,78		100,00				DLH
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						150.000		585.000		300.000		1.035.000	DLH
		Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai	Jumlah titik lokasi yang mengalami peningkatan status mutu air dibagi jumlah seluruh titik lokasi pengambilan sampel uji	Persen; Kumulatif; IKU OPD	3,70	7,41		11,11		14,81		14,81		DLH
		Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Jumlah luas lahan terkontaminasi yang dilakukan upaya pengendalian dibagi jumlah seluruh lahan yang terkontaminasi	Persen; Kumulatif; IKU OPD	1,08	9,76		16,84		18,6		18,6		DLH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						2.147.820		2.127.820		2.127.820		6.403.460	DLH		
		Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	Jumlah areal RTH yang dikelola dibagi dengan total jumlah RTH	Persen, Tahunan; IKU OPD	0	34,72		37,50		38,89		38,89		DLH		
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						225.000		350.000		275.000		850.000	DLH		
		Persentase Penanganan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dibagi Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan rincian teknis penyimpanan limbah B3	Persen, Tahunan; IKU OPD	60,00	62,50		65,00		67,00		67,00		DLH		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						130.000		130.000		130.000		390.000	DLH		
		Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dibagi jumlah pelaku usaha yang diawasi	Persen, Tahunan; IKU OPD	30	40		45		50		50		DLH		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						100.000		125.000		125.000		350.000	DLH		
		Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Masyarakat / Lembaga/ Komunitas yang Peduli Lingkungan Hidup pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah Kelompok Masyarakat / Lembaga/ Komunitas yang Peduli Lingkungan Hidup pada tahun penetapan Perubahan RPJMD (2021)	Jumlah; Kumulatif; IKU OPD	5,00	15,00			17,00		20,00		20,00	DLH		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						150.000		150.000		150.000		450.000	DLH		
		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat pada tahun berjalan dibagi jumlah kinerja masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan penilaian	Jumlah; Kumulatif; IKU OPD	20,00	20,00			22,00		24,00		24,00	DLH		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						43.224		45.000		45.000		133.224	DLH		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus PPLH yang diadakan masyarakat	Persen; Tahunan; IKU OPD	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		DLH		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						14.971.772		10.875.000		11.400.000		37.246.772	DLH		
		Persentase Sampah yang Tertangani	Jumlah Sampah yang terangkut dibagi jumlah timbulan	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	47,29	57,31		59,92		71,00		71,00		DLH		
		Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah sampah yang berkurang dibagi dengan jumlah timbulan	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	14,00	17,92		23,15		29,00		29,00		DLH		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.343.977		3.377.417		3.478.739		10.200.133	DISDUKCAPIL		
2.13.03	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						3.068.977		3.099.667		3.192.657		9.361.301	DISDUKCAPIL		
		Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Jumlah KK tercetak/Jumlah KK x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	91,67	94,00		96,00		98,00		98,00		DISDUKCAPIL		
		Perekaman KTP elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk 17 tahun keatas dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	99,68	99,74		99,76		99,80		99,80		DISDUKCAPIL		
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	21,80	60,00		70,00		80,00		80,00		DISDUKCAPIL		
02.13.02	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						145.000		146.450		150.844		442.294	DISDUKCAPIL		
		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	93,10	95,50		96,00		96,50		96,50		DISDUKCAPIL		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase penduduk berakta kematian	Jumlah penduduk meninggal yang sudah memiliki akta kematian dibagi jumlah kematian dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	68,54	70,04		70,79		71,54		71,54		DISDUKCAPIL
02.13.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						130.000		131.300		135.239		396.539	DISDUKCAPIL
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi jumlah OPD dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	15,00	30,00		40,00		50,00		50,00		DISDUKCAPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						8.078.000		12.044.050		13.421.472		33.543.522	DISPERMASDES
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						1.970.000		4.200.000		4.600.000		10.770.000	DISPERMASDES
		Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	Jumlah Desa yang memiliki sarana pemerintahan Desa (balai Desa bobot:40%, kantor Desa bobot 40% kantor BPD dan lembaga Desa bobot 20%) yang baik dibagi jumlah Desa	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa	55,23	65,23		70,23		80,23		80,23		DISPERMASDES
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						75.000		100.000		125.000		300.000	DISPERMASDES
		Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama dibagi jumlah Desa	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang	69,40	70,82		71,53		72,24		72,24		DISPERMASDES
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						5.128.000		6.830.000		7.755.000		19.713.000	DISPERMASDES

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Jumlah Desa yang tertib dan baik dalam administrasi pengelolaan keuangan (bobot 50) dan asset Desa (bobot 50)	Persen; Tahunan; Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri 18 Tahun 2020	35,00	68,00		89,00		100,00		100,00		DISPERMASDES		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						905.000		914.050		941.472		2.760.522	DISPERMASDES		
		Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah KPMD, Posyandu, kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT yang aktif dibanding dengan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DISPERMASDES		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						8.438.457		9.849.486		11.149.871		29.437.814	DINAS P3AP2KB		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						193.338		272.010		307.371		772.719	DINAS P3AP2KB		
		TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur (antara umur 15-49 tahun).	Dokumen; Tahunan; BPS	2,28	2,24		2,22		2,22		2,22		DINAS P3AP2KB		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						7.269.657		8.375.204		9.456.830		25.101.691	DINAS P3AP2KB		
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR	Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi jumlah PUS X 100%	Persen, bulanan, Laporan Dalap Kab	67,80	69,14		69,34		69,54		69,54		DINAS P3AP2KB		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi jumlah PUS X 100%	Persen; Tahun; IKU OPD	15,27	14,87		14,67		14,47		14,47		DINAS P3AP2KB		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						975.462		1.202.272		1.385.670		3.563.404	DINAS P3AP2KB
		Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui BKB, BKR, BKL dibagi jumlah sasaran (keluarga) dikali 100%	Persen; bulanan; Laporan Dalap Kab	21,58	21,79		21,89		22,00		22,00		DINAS P3AP2KB
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						15.300.066		15.606.100		16.074.283		46.980.449	DISHUB
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						15.300.066		15.606.100		16.074.283		46.980.449	DISHUB
		Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Perencanaan Lalu Lintas yang disusun dibanding dokumen yang dibutuhkan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0,00	30,00		60,00		100,00		100,00		DISHUB
		Persentase Rekomendasi Andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan dibanding jumlah pemohon dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	20,00	60,00		80,00		100,00		100,00		DISHUB
		Persentase perlintasan KA yang telah di lakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlintasan KA yang telah di lakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dibanding jumlah perlintasan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	32,80	38,00		38,00		38,00		38,00		DISHUB
		Persentase Simpang APILL Standar	Jumlah Simpang APILL Standar dibanding jumlah jumlah APILL dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0,00	33,33		66,67		100,00		100,00		DISHUB
		Persentase Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas	Jumlah Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas dibanding jumlah tempat pengamanan pengaturan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DISHUB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase Lokasi Titik Parkir Berizin	Jumlah Lokasi Titik Parkir Berizin dibanding jumlah seluruh titik parkir dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	65,33	82,00		90,33		100,00		100,00		DISHUB		
		Persentase Juru Parkir Berizin	Jumlah Juru Parkir Berizin dibanding seluruh juru parkir dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	73,60	80,60		85,60		100,00		100,00		DISHUB		
		Rasio fasilitasi penerbitan ijin trayek	Jumlah fasilitasi penerbitan ijin trayek yang dikeluarkan dibanding jumlah ijin trayek dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	76,00	85,00		87,00		90,00		90,00		DISHUB		
		Persentase Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan	Jumlah Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan dibanding Jumlah Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan yang dikeluarkan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	35,00	25,00		20,00		20,00		20,00		DISHUB		
		Persentase layanan terminal angkutan jalan	Jumlah sarana dan prasarana terminal angkutan jalan type c yang ada dibanding jumlah sarana prasarana terminal type c terstandar dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	31,00	35,00		37,00		39,00		39,00		DISHUB		
		Persentase Kepemilikan Uji Kendaraan angkutan umum	Jumlah Kepemilikan Uji Kendaraan angkutan umum dibanding seluruh angkutan umum dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	77,80	82,00		84,00		87,00		87,00		DISHUB		
		Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Jalan	Jumlah jalan memiliki Perlengkapan Jalan dibanding seluruh jalan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	34,49	65,00		77,00		90,00		90,00		DISHUB		
		Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	Jumlah Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum) dibanding jumlah kebutuhan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	57,00	78,00		89,00		100,00		100,00		DISHUB		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						3.300.000		3.318.000		3.545.000		10.163.000	DINAS KOMINFO
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.500.000		1.500.000		1.545.000		4.545.000	DINAS KOMINFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebara informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	20,00	30,00		50,00		80,00		80,00		DINAS KOMINFO
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.800.000		1.818.000		2.000.000		5.618.000	DINAS KOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK-nya dibagi total seluruh OPD dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	25,00	50,00		75,00		100,00		100,00		DINAS KOMINFO
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Jumlah perangkat daerah yang disediakan akses internet oleh kominfo dibagi total seluruh OPD dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	16,67	70,83		85,42		100,00		100,00		DINAS KOMINFO
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah seluruh layanan publik dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	45,00	65,00		75,00		85,00		85,00		DINAS KOMINFO
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						865.304		873.457		1.183.500		2.922.261	DINAS DAGKOP UKM
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						50.000		50.000		51.500		151.500	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam yang terfasilitasi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam dibagi dengan jumlah permohonan izin usaha simpan pinjam dikali seratus persen	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		100		DINAS DAGKOP UKM

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						40.000		40.400		80.000		160.400	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	Jumlah Koperasi Predikat Sehat dan cukup sehat dibagi dengan Jumlah koperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	15,72	17,31		17,77		18,22		18,22		DINAS DAGKOP UKM
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						490.304		495.207		587.000		1.572.511	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang memiliki sertifikat dibagi seluruh jumlah SDM koperasi keseluruhan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	5,82	17,72		26,07		35,18		35,18		DINAS DAGKOP UKM
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						35.000		35.350		55.000		125.350	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Koperasi bermitra	Jumlah Koperasi yang bermitra dibagi seluruh jumlah koperasi non KSP dikali 100%	Persen; Kumulatif; IKU OPD	1,04	3,64		4,94		6,23		6,23		DINAS DAGKOP UKM
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						90.000		90.900		100.000		280.900	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	Jumlah UMKM yang bermitra dibagi jumlah seluruh UMKM binaan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,63	4,21		4,73		5,26		5,26		DINAS DAGKOP UKM
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						160.000		161.600		310.000		631.600	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0,00	1,05		2,63		4,21		4,21		DINAS DAGKOP UKM
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						1.417.252		1.431.425		1.626.486		4.475.163	DINAS PMPTSP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						170.357		172.061		220.000		562.418	DINAS PMPTSP
		Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	Jumlah lokasi yang memiliki profil investasi dibagi jumlah lokasi potensial	Persen; Kumulatif; IKU OPD;	0,00	42,86		57,14		71,43		71,43		DINAS PMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						316.250		319.413		328.995		964.657	DINAS PMPTSP
		Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Jumlah calon investor yg berkomitmen tahun n di-1 kurangi jumlah calon investor yang berkomitmen tahun dibagi jumlah calon investor yg berkomitmen tahun n-1 dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD;	100,00	20,00		20,00		20,00		20,00		DINAS PMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						536.311		541.674		557.924		1.635.909	DINAS PMPTSP
		Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu	Jumlah perizinan yang ditetapkan sesuai batas waktu dibagi jumlah pengusul	Persen; Tahunan; IKU OPD;	100	100		100		100		100		DINAS PMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						330.000		333.300		419.567		1.082.867	DINAS PMPTSP
		Persentase Kepatuhan Perusahaan	Jumlah perusahaan yang patuh tahun n - jumlah calon perusahaan yang patuh tahun n-1 dibagi jumlah perusahaan yang patuh tahun n-1 dikali 100	Persen; Kumlatif; IKU OPD;	61,28	67,28		70,28		73,28		73,28		DINAS PMPTSP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						64.334		64.977		100.000		229.311	DINAS PMPTSP
		Persentase data layanan yang termanfaatkan	Jumlah jenis layanan yang termanfaatkan dibagi jumlah jenis layanan yang dilayani x 100	Persen; Kumlatif; IKU OPD;	6,29	9,38		11,46		13,54		13,54		DINAS PMPTSP
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						6.323.769		6.344.269		6.751.982		19.420.020	DINAS PORAPAR
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						2.050.000		2.070.500		2.350.000		6.470.500	DINAS PORAPAR
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,073	0,135		0,161		0,187		0,187		DINAS PORAPAR
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi sosial kemasyarakatan di	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,067	0,071		0,073		0,076		0,076		DINAS PORAPAR
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						4.273.769		4.273.769		4.401.982		12.949.520	DINAS PORAPAR
		Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga tk. Provinsi/nasional	Medali; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	61,00	70,00		75,00		80,00		80,00		DINAS PORAPAR
		Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Jumlah Cabor yang dibina dibagi Jumlah Cabang Olahraga di Kabupaten Tegal	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	75,00	83,33		91,67		100,00		100,00		DINAS PORAPAR
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						120.000		130.000		140.000		390.000	DINAS KOMINFO

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						120.000		130.000		140.000		390.000	DINAS KOMINFO		
		Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	Jumlah kebutuhan data statistik yang tersedia dibagi jumlah seluruh kebutuhan data statistik dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	38,15	52,36		59,47		66,57		66,57		DINAS KOMINFO		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						224.109		350.000		400.000		974.109	DINAS KOMINFO		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					224.109		350.000		400.000		974.109	DINAS KOMINFO			
		Tingkat keamanan Informasi	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	40,62	50,00		60,00		75,00		75,00		DINAS KOMINFO		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.140.000		1.155.900		1.190.577		3.486.477	DINAS DIKBUD		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					620.000		626.200		644.986		1.891.186	DINAS DIKBUD			
		Persentase tradisi yang dikembangkan	Proporsi tradisi yang dikembangkan terhadap jumlah tradisi yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	61,11	65,11		67,11		69,11		69,11		DINAS DIKBUD		
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					70.000		70.700		72.821		213.521	DINAS DIKBUD			
		Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	Proporsi seni dan kesenian yang dibina terhadap jumlah seni dan kesenian yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	54,55	76,77		87,88		100,00		100,00		DINAS DIKBUD		
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					90.000		91.800		94.554		276.354	DINAS DIKBUD			
		Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	Proporsi sumber sejarah yang terdokumentasi terhadap jumlah	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	76,47	78,10		78,43		78,76		78,76		DINAS DIKBUD		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						310.000		316.200		325.686		951.886	DINAS DIKBUD
		Terlestarikannya Cagar Budaya	Terlestarikannya cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang terdata dikali 100 %	Persen; Tahunan; Permendagri No.18 Tahun 2020	45,83	49,83		51,83		53,83		53,83		DINAS DIKBUD
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						50.000		51.000		52.530		153.530	DINAS DIKBUD
		Persentase museum yang terkelola	Proporsi jumlah museum yang dikelola terhadap jumlah museum yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	65,00	67,50		68,75		70,00		70,00		DINAS DIKBUD
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						468.024		535.553		551.619		1.555.196	DINAS ARPUS
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						468.024		535.553		551.619		1.555.196	DINAS ARPUS
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Survei/kajian kegemaran membaca masyarakat (variabel Permendagri No 18 Tahun 2020)	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	47,91	52,00		54,00		56,00		56,00		DINAS ARPUS
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	9,088	11,00		11,50		12,00		12,00		DINAS ARPUS
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						450.000		454.500		468.135		1.372.635	DINAS ARPUS
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						450.000		454.500		468.135		1.372.635	DINAS ARPUS
		Peningkatan nilai LAKE LKD	Nilai audit Kearsipan yang dikeluarkan oleh ANRI setiap tahun	Persen; Tahunan; PERKA ANRI 6/2019	73,00	87,00		89,00		91,00		91,00		DINAS ARPUS
		Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup	Jumlah PD yang diaudit oleh Dinas Arpus tata kelola kearsipannya setiap tahun dibagi jumlah seluruh PD Kabupaten Tegal dikali 100%	Persen; Kumulatif;	0,00	20,83		25,00		29,17		29,17		DINAS ARPUS

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						25.924.628		27.387.914		29.010.941		82.323.484	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3.330.104		3.363.405		3.523.314		10.216.823	DKPP
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						759.538		767.133		790.147		2.316.819	DKPP
		Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Jumlah produksi perikanan tangkap (kg) meliputi jumlah hasil tangkapan ikan di laut dan di perairan umum daratan (PUD) di wilayah Kab. Tegal.	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020 Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	1.964.378	2.003.862		2.023.900		2.044.139		2.044.139		DKPP
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Nilai produksi perikanan tangkap (Rp.000) meliputi jumlah nilai produksi perikanan hasil tangkapan di laut dan di perairan umum daratan (PUD) di wilayah Kab. Tegal.	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	13.608.184	13.881.708		14.020.525		14.160.730		14.160.730		DKPP
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						2.193.469		2.215.404		2.281.866		6.690.738	DKPP
		Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Jumlah hasil produksi perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan air tawar dan payau (tambak) di wilayah Kabuapten Tegal	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.730.262	2.764.493		2.792.138		2.825.643		2.825.643		DKPP
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Nilai hasil produksi perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan air tawar dan payau (tambak) di wilayah Kabuapten Tegal	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	145.642.227	148.291.680		150.431.397		153.024.735		153.024.735		DKPP
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						145.144		146.595		210.000		501.739	DKPP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari <i>destructive fishing</i>	Jumlah perairan umum daratan (PUD) yang bebas desduktrive fishing dibagi jumlah total	Persen; Kumulatif; IKU OPD	11,11	55,56		77,78		100		100		DKPP
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						231.953		234.273		241.301		707.526	DKPP
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan meliputi pengasapan, pemindangan, penggaraman dan pengolahan hasil perikanan lainnya.	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	5.478.639	5.492.344		5.503.329		5.517.087		5.517.087		DKPP
		Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Nilai hasil produksi pengolahan hasil perikanan meliputi pengasapan, pemindangan, penggaraman dan pengolahan hasil perikanan lainnya.	Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	131.189.142	131.517.312		131.780.347		132.109.798		132.109.798		DKPP
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						6.880.000		8.149.040		9.138.894		24.167.934	DISPORAPAR
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						4.980.000		5.549.040		6.438.894		16.967.934	DISPORAPAR
		Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	Jumlah DTW yang ditetapkan dibagi jumlah seluruh DTW yang beroperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	78,33	85,00		90,00		95,00		95,00		DISPORAPAR
		Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dibagi jumlah usaha pariwisata dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	69,00	79,00		84,00		89,00		89,00		DISPORAPAR
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						1.000.000		1.500.000		1.500.000		4.000.000	DISPORAPAR

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase DTW yang dipromosikan	Jumlah DTW yang dipromosikan dibagi jumlah seluruh DTW yang beroperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	78,33	85,00		90,00		95,00		95,00		DISPORAPAR		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						900.000		1.100.000		1.200.000		3.200.000	DISPORAPAR		
		Persentase SDM Pariwisata yang dibina	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina dibagi jumlah SDM pariwisata dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	50	65		80		95		95		DISPORAPAR		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11.874.980		11.992.730		12.349.512		36.217.222			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.058.596		1.069.182		1.101.258		3.229.036	DINAS TANKP		
		Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Rasio (%) luas serangan OPT yang tertangani / Luas Serangan OPT	Persen; Kumulatif; IKU OPD	89,80	89,90		89,93		90,00		90,00		DINAS TAN KP		
		Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Rasio (%) alokasi pupuk bersubsidi dibandingkan usulan dalam RDKK	Persen; Tahun, Permendagri 18 Th. 2020	63,00	65,00		67,00		70,00		70,00		DINAS TAN KP		
		Luas Lahan Pertanian Organik	Luas pengembangan pertanian organik yang telah bersertifikat	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,00	2,00		2,00		5,00		5,00		DINAS TAN KP		
		Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Luas Layanan alsintan pra panen / luas tanam komoditas pangan utama (padi)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	62,72	62,98		63,24		63,50		63,50		DINAS TAN KP		
		Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Luas Layanan alsintan pasca panen / luas panen komoditas pangan utama (padi)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	15,51	16,98		19,45		22,01		22,01		DINAS TAN KP		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Produksi daging (kg)	Jumlah produksi daging meliputi daging ternak besar (Sapi, Kerbau), ternak kecil (Kambing, Domba), Unggas dan aneka ternak lainnya di Kabupaten Tegal	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	11.284.734	11.511.557		11.626.673		11.742.939		11.742.939		DINAS TAN KP		
		Produksi Telur (kg.)	Jumlah produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya di kabupaten Tegal	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	10.760.493	10.976.779		11.086.547		11.197.412		11.197.412		DINAS TAN KP		
		Produksi Susu (kg.)	Jumlah produksi susu segar meliputi susu sapi dan susu kambing di wilayah Kabupaten Tegal.	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	604.664	616.818		622.986		629.216		629.216		DINAS TANKP		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						10.058.374		10.158.958		10.463.726		30.681.058	DINAS TAN KP		
		Indeks pertanaman	Luas lahan yang ditanami padi dalam 1 tahun / luas baku lahan	Indeks; Tahunan; IKU OPD	1,52	1,62		1,66		1,70		1,70		DINAS TAN KP		
		Akseibilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	Panjang Jalan Usaha Tani : Luas Lahan Pertanian	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,60	3,34		3,70		4,11		4,11		DINAS TAN KP		
		Luas Lahan Sawah Lestari	Luas LP2B : Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan 36.088 Ha dan akan dipertahankan sampai akhir periode perencanaan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS TAN KP		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT						288.250		291.133		299.866		879.249	DINAS TAN KP		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase Ternak terkontrol status kesehatannya	Jumlah Ternak peternakan rakyat terkontrol status kesehatannya dibagi proyeksi jumlah ternak peternakan rakyat yang sakit	Persen ; Tahunan; IKU OPD	31,37	5,60		5,60		5,60		5,60		DINAS TAN KP
		Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	Jumlah pengawasan peredaran produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utruh dan Halal) di wilayah Kabupaten Tegal yang dilakukan secara rutin dibagi jumlah pengawasan yang seharusnya dikali 100 Persen	Persen ; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		100		DINAS TAN KP
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						90.000		90.900		93.627		274.527	DINAS TAN KP
		Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Rasio luas serangan OPT / Luas Tanam Komoditas pangan utama (padi)	Persen; Tahunan; IKU OPD	< 2,5	< 2,5		< 2,5		< 2,5		< 2,5		DINAS TAN KP
		Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	Rasio luas tanam padi yang mengaplikasikan APH / Luas Tanam pada tahun n	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	1,5		2		2,5		2,5		DINAS TAN KP
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						379.760		382.558		391.034		1.153.352	DINAS TAN KP
		Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	Jumlah Penyuluh swadaya yang akan ditingkatkan pengetahuannya terhadap dasar-dasar penyuluhan pertanian / jumlah seluruh penyuluh swadaya. Jumlah penyuluh swadaya 150 orang)	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	27		20		20		100		DINAS TAN KP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Penuhban Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	100*(X-X)/X. Jumlah Kel. Tani Kelas Pemula kondisi awal:	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	2,51		2,57		2,64		11,94		DINAS TAN KP
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2.915.000		2.948.950		3.037.419		8.901.369	DINAS DAGKOP UKM
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						20.000		20.000		20.600		60.600	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi	Jumlah rekomendasi izin usah dibagi jumlah pengajuan permohonan usaha dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100,00	100,0		100,00		100,00		100,00		DINAS DAGKOP UKM
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						2.500.000		2.500.000		2.575.000		7.575.000	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Pasar direhabilitasi	Jumlah pasar yang direhabilitasi dibagi jumlah pasar seluruh dikabupaten tegal dikali 100 persen	Permendagri No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern	50,00	65,38		76,92		88,46		88,46		DINAS DAGKOP UKM
		Persentase pasar e-ritribusi	Jumlah pasar yang sudah menggunakan e-ritribusi dibagi jumlah seluruh pasar di kabupaten tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	7,69	46,15		65,38		84,62		84,62		DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang dikelola dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana pengelola pasar dibagi total pengelola pasar keseluruhan	Persen; Tahun; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS DAGKOP UKM
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						95.000		95.950		98.829		289.779	DINAS DAGKOP UKM

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil	Standar deviasi koefisien harga antar waktu dibagi harga rata-rata tahunan dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	<9%	<9%			<9%		<9%		DINAS DAGKOP UKM			
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						-		30.000		30.900		60.900	DINAS DAGKOP UKM		
		Persentase Laju Nilai Ekspor	Jumlah selisih Nilai Ekspor tahun berjalan di banding Jumlah nilai ekspor tahun sebelumnya dikali 100	Persen; Tahun; IKU OPD	1,00	1,00			1,00		1,00			DINAS DAGKOP UKM		
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						150.000		151.500		156.045		457.545	DINAS DAGKOP UKM		
		Persentase Pedagang Tertib Ukur	Jumlah UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) milik pedagang yang telah ditera/tera ulang dibagi jumlah total UTTP yang dimiliki pedagang dikali 100%	Persentase; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	27,95	35,01			50,01		60,01		60,01	DINAS DAGKOP UKM		
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						150.000		151.500		156.045		457.545	DINAS DAGKOP UKM		
		Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	Jumlah nilai penjualan produk dalam negeri tahun berjalan dikurangi nilai penjualan tahun sebelumnya dibagi nilai penjualan tahun sebelumnya dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	2,00	2,00			2,00		2,00			DINAS DAGKOP UKM		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						852.009		860.529		886.345		2.598.883	DISPERINAHER		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						800.000		808.000		832.240		2.440.240	DISPERINAHER		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persen; Kumulatif; Permendagri 18/2019	60,00	70,00		80,00		100,00		100,00		DISPERINAKEK
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						17.929		18.108		18.652		54.689	DISPERINAKEK
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah rekotek IUI yang dikeluarkan dibagi jumlah pemohon dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2019	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DISPERINAKEK
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						34.080		34.421		35.453		103.954	DISPERINAKEK
		Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	Jumlah industri yang masuk Sii nas dibagi Total Jumlah Industri	Persen; Kumulatif; Permendagri 18/2019	20,00	60,00		80,00		100,00		100,00		DISPERINAKEK
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						72.535		73.260		75.458		221.254	DISPERINAKEK
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						72.535		73.260		75.458		221.254	DISPERINAKEK
		Transmigran yang ditempatkan	Penempatan Transmigran sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009	100	100		100		100		100		DISPERINAKEK
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						50.768.538		51.476.223		53.020.510		155.265.271	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						34.820.538		35.368.743		36.429.806		106.619.087	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						34.047.306		34.587.779		35.625.412		104.260.497	SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	70,00	75,03		80,00		85,00		85,00		SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra yang memperoleh nilai IKM Baik dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	79,00	84,00		89,00		94,00		94,00		SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase Indeks RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	Jumlah OPD Rumpun Pemerintahan Kesra nilai RB B dibagi jumlah OPD rumpun Pemerintahan Kesra	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	0,00	25,00		50,00		75,00		75,00		SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Jumlah pembentukan Perda yang terselesaikan sampai Raperda dibanding jumlah pembentukan Perda yang dibahas	Persen; Tahunan: Permendagri 120/2018	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00				
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM yang terfasilitasi sampai dengan pengadilan tingkat pertama	Persen; Tahunan: Permendagri 12 Tahun 2014	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00				
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						773.232		780.964		804.393		2.358.590	SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang memperoleh nilai SAKIP B (Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	80,00	82,50		85,00		87,50		87,50		SEKRETARIAT DAERAH		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	Jumlah OPD rumpun perekonomian pembangunan nilai IKM sesuai standard baik dibagi jumlah OPD rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	67,00	80,00		90,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020;	0,00	25,00		50,00		75,00		75,00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa terselesaikan dibagi dengan jumlah pengadaan barang jasa yang masuk tahun n	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH	
		Level Tingkat Marutitas UKPBJ terpenuhi	Level Maturitas UKPBJ Setelah berkas ajuan peningkatan level disetujui oleh LKPP	Level; Tahunan: Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019	1	3		3		3		4		SEKRETARIAT DAERAH	
		Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	tolak ukur pedoman tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan LPSE Setelah berkas ajuan peningkatan level disetujui oleh LKPP	Tingkat Standardisasi LPSE, Tahunan, Perka LKPP 9 Tahun 2015; IKU OPD	12	14		15		16		16		SEKRETARIAT DAERAH	
4.02	SEKRETARIAT DPRD							15.948.000		16.107.480		16.590.704		48.646.184	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							15.948.000		16.107.480		16.590.704		48.646.184	SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	95	100		100		100		100		SEKRETARIAT DPRD		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							19.388.850		19.582.739		20.722.365		59.693.954		
5.01	PERENCANAAN							3.084.500		3.115.345		3.938.000		10.137.845	BAPPEDA DAN LITBANG	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							1.199.500		1.211.495		1.488.000		3.898.995	BAPPEDA DAN LITBANG	
		Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Jumlah dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya disusun dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		BAPPEDA DAN LITBANG		
		Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi dikali	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	75,00	75,00		80,00		85,00		85,00		BAPPEDA DAN LITBANG		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							1.885.000		1.903.850		2.450.000		6.238.850	BAPPEDA DAN LITBANG	

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah substansi renja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan Renstra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dinilai x 100	Persen; Tahunan; IKU PD	91,22	91,56		91,77		91,98		95,00		BAPPEDA DAN LITBANG		
		Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah substansi renja bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan Renstra bidang Perekonomian dan SDA dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Perekonomian dan SDA yang dinilai x 100	Persen; Tahunan; IKU PD	92,88	93,12		93,17		93,23		93,23		BAPPEDA DAN LITBANG		
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah substansi renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan Renstra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang	Persen; Tahunan; IKU PD	93,02	93,24		93,45		93,59		93,59		BAPPEDA DAN LITBANG		
5.02	KEUANGAN							8.575.184		8.660.936		8.408.036		25.644.156		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							2.576.740		2.602.507		2.680.583		7.859.830	BPKAD	
		Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		100		BPKAD		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	SP2D diterbitkan tepat waktu	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		100		BPKAD
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	Perda APBD dan Perbup Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		100		BPKAD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						3.474.277		3.509.020		2.720.000		9.703.297	BPKAD
		Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	Laporan BMD sesuai dengan laporan keuangan dan disusun sebelum penyusunan LKPD	Persen; Tahunan; Permendagri 19/2016	62,50	70,00		75,00		80,00		80,00		BPKAD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						2.524.167		2.549.409		3.007.454		8.081.029	BAPPENDA
		Rasio PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah APBD Non Migas dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	14,09	15,06		15,15		15,27		15,27		BAPPENDA
		Rasio Piutang Pajak Daerah	Jumlah piutang tertagih dibagi jumlah piutang dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	66,26	95,00		98,90		99,10		99,10		BAPPENDA
		Rasio Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah dibagi jumlah PAD dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	30,63	30,52		30,68		31,00		31,00		BAPPENDA
5.03	KEPEGAWAIAN						4.000.000		4.040.000		4.161.200		12.201.200	BKD
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						4.000.000		4.040.000		4.161.200		12.201.200	BKD
		Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	Jumlah ASN mendapatkan hukuman disiplin dibanding jumlah ASN dikali 100	Persen, Tahunan; IKU OPD	0,12	0,12		0,11		0,11		0,10		BKD
		Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	Jumlah jabatan struktural terisi dibanding jumlah formasi jabatan struktural dikali	Persen, Tahunan; IKU OPD	87,97	94,77		95,42		96,08		96,08		BKD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	Jumlah jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi dibanding jumlah jabatan struktural dan formasi jabatan fungsional (non guru/non kesehatan) dikali seratus	Persen, Tahunan; IKU OPD	35,76	41,82		44,85		47,88		47,88		BKD
		Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	Jumlah pegawai PT dan Menengah dibanding jumlah pegawai pendidikan SLTA kebawah	Persen, Tahunan; IKU OPD	110,04	259,85		288,10		318,87		318,87		BKD
		Rasio pegawai fungsional (%)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan nakes) dibanding jumlah seluruh pegawai (diluar guru dan nakes) (%)	Persen, Tahunan; IKU OPD	9,87	15,28		15,68		16,23		16,23		BKD
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Jumlah Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (diluar guru dan nakes) dibanding jumlah seluruh jabatan fungsional tidak termasuk guru dan nakes	Persen, Tahunan; IKU OPD	93,50	93,26		92,69		93,05		93,05		BKD
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.410.395		2.434.499		2.507.534		7.352.428	BKD
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						2.410.395		2.434.499		2.507.534		7.352.428	BKD
		Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis 20 jam/tahun dibanding jumlah PNS dikali seratus	Persen; Kumulatif; PP no.11 tahun 2017	47,49	70,00		75,01		80,00		80,00		BKD
		Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	Jumlah PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan dibagi seluruh PNS dikali 100	Persen; Tahunan; PP no.11 tahun 2017	33,40	40,00		45,01		50,00		50,00		BKD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.318.771		1.331.959		1.707.595		4.358.325	BAPPEDA DAN LITBANG
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.318.771		1.331.959		1.707.595		4.358.325	BAPPEDA DAN LITBANG	
		Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah kelitbangan yang dihasilkan	Persen; Tahunan; IKU OPD	65,00	72,50		73,44		87,50		87,50		BAPPEDA DAN LITBANG
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						1.476.240		1.491.002		1.535.732		4.502.975	INSPEKTORAT
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						1.476.240		1.491.002		1.535.732		4.502.975	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					764.240		771.882		795.039		2.331.161	INSPEKTORAT	
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi HP	Persen; Tahunan; IKU OPD	91,70	92,00		92,00		92,00		92,00		INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi HP	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi HP	Persen; Tahunan; IKU OPD	39,02	60,00		70,00		80,00		80,00		INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					712.000		719.120		740.694		2.171.814	INSPEKTORAT	
		Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	Jumlah PD Berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Internal dibagi jumlah seluruh PD	Persen; Tahunan; IKU OPD	16,67	16,67		16,67		16,67		16,67		INSPEKTORAT
		Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	Jumlah PD memenuhi target IKU dibagi jumlah seluruh PD	Persen; Tahunan; IKU OPD	60,41	66,66		70,83		75,00		75,00		INSPEKTORAT
		Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	Jumlah PD yang menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dibagi Jumlah seluruh PD	Persen, Tahunan, PP 8 Tahun 2006	81,25	85,41		89,58		93,75		93,75		INSPEKTORAT

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
7	UNSUR KEWILAYAHAN						11.337.174		9.321.824		9.349.824		30.008.822	KECAMATAN
7.01	KECAMATAN						11.337.174		9.321.824		9.349.824		30.008.822	KECAMATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN ADIWERNA
		IKM Kecamatan Adiwerna	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	76,37	78,87		79,87		80,87		80,87		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN BALAPULANG
		IKM Kecamatan Balapulang	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	79,29	81,79		82,79		83,79		83,79		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN BOJONG
		IKM Kecamatan Bojong	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	79,62	82,12		83,12		84,12		84,12		KECAMATAN BOJONG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN BUMIJAWA
		IKM Kecamatan Bumijawa	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	87,53	90,03		91,03		92,03		92,03		KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		45.000		45.000		135.000	KECAMATAN DUKUHTURI
		IKM Kecamatan Dukuhwaru	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	79,37	81,87		82,87		83,87		83,87		KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN DUKUHWARU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		IKM Kecamatan Dukuhturi	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	77,44	79,94		80,94		81,94		81,94		KECAMATAN DUKUHWARU		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN JATINEGARA		
		IKM Kecamatan Jatinegara	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	79,70	82,20		83,20		84,20		84,20		KECAMATAN JATINEGARA		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		
		IKM Kecamatan Kedungbanteng	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	82,00	84,00		85,00		86,00		86,00		KECAMATAN KEDUNGBANTENG		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN KRAMAT		
		IKM Kecamatan Kramat	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	78,98	81,48		82,48		83,48		83,48		KECAMATAN KRAMAT		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN LEBAKSIU		
		IKM Kecamatan Lebaksiu	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	77,25	81,25		82,25		83,25		83,25		KECAMATAN LEBAKSIU		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		39.624		39.624		124.248	KECAMATAN MARGASARI		
		IKM Kecamatan Margasari	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	77,40	79,90		80,90		81,90		81,90		KECAMATAN MARGASARI		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN PAGERBARANG		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		IKM Kecamatan Pagerbarang	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	77,63	80,13		81,13		82,13		82,13		KECAMATAN PAGERBARANG		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN PANGKAH		
		IKM Kecamatan Pangkah	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	78,74	81,24		82,24		83,24		83,24		KECAMATAN PANGKAH		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN SLAWI		
		IKM Kecamatan Slawi	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	79,67	82,17		83,17		84,17		84,17		KECAMATAN SLAWI		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN SURADADI		
		IKM Kecamatan Suradadi	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	79,76	82,26		83,26		84,26		84,26		KECAMATAN SURADADI		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN TALANG		
		IKM Kecamatan Talang	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	73,20	75,70		76,70		77,70		77,70		KECAMATAN TALANG		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN TARUB		
		IKM Kecamatan Tarub	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	80,55	83,05		84,05		85,05		85,05		KECAMATAN TARUB		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN WARUREJA		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		IKM Kecamatan Warureja	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	77,40	79,90		80,90		81,90		81,90		KECAMATAN WARUREJA		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN ADIWERNA		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Adiwerna	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		4,76		4,76		4,76		KECAMATAN ADIWERNA		
		Persentase desa Maju Kecamatan Adiwerna	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	9,52	9,52		14,29		14,29		14,29		KECAMATAN ADIWERNA		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN BALAPULANG		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	5,00		9,52		9,52		9,52		KECAMATAN BALAPULANG		
		Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	5,00	9,52		9,52		15,00		15,00		KECAMATAN BALAPULANG		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN BOJONG		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	12,00	0,12		0,18		0,18		0,18		KECAMATAN BOJONG		
		Persentase desa maju Kecamatan Bojong	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,29	0,29		0,35		0,35		0,35		KECAMATAN BOJONG		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN BUMIJAWA		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase desa mandiri Kecamatan Bumijawa	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		5,56		11,11		11,11		KECAMATAN BUMIJAWA		
		Persentase desa maju Kecamatan Bumijawa	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	11,11	16,67		22,22		37,78		37,78		KECAMATAN BUMIJAWA		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		226.000		248.000		594.000	KECAMATAN DUKUHTURI		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		10,00		10,00		10,00		KECAMATAN DUKUHTURI		
		Persentase desa maju Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	10,00	10,00		10,00		20,00		20,00		KECAMATAN DUKUHTURI		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN DUKUHWARU		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhturi	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		5,56		5,56		5,56		KECAMATAN DUKUHWARU		
		Persentase desa maju Kecamatan Dukuhturi	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	5,56	5,56		11,11		16,67		16,67		KECAMATAN DUKUHWARU		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN JATINEGARA		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Jatinegara	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	6,00		6,00		6,00		6,00		KECAMATAN JATINEGARA		
		Persentase desa maju Kecamatan Jatinegara	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	6,00	12,00		12,00		12,00		12,00		KECAMATAN JATINEGARA		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		Persentase desa mandiri Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,10		0,10		0,10		0,10		KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		Persentase desa maju Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		0,10		0,10		0,10		KECAMATAN KEDUNGBANTENG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.391.753		1.090.000		1.090.000		3.571.753	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Kramat	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	5,26		5,26		5,26		5,26		KECAMATAN KRAMAT
		Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Kramat	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	16,00	16,00		26,00		26,00		26,00		KECAMATAN KRAMAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase desa mandiri Kecamatan Lebaksiu	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	7,69	7,69		7,69		15,38		15,38		KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase desa Maju Kecamatan Lebaksiu	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	15,00	15,00		23,00		23,00		23,00		KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		35.300		35.300		190.600	KECAMATAN MARGASARI
		Persentase desa mandiri Kecamatan Margasari	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	8,00	8,00		15,00		15,00		15,00		KECAMATAN MARGASARI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase desa maju Kecamatan Margasari	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	46,00	46,00		54,00		62,00		62,00		KECAMATAN MARGASARI		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN PAGERBARANG		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		8,00		8,00		8,00		KECAMATAN PAGERBARANG		
		Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	8,00	16,00		24,00		30,00		30,00		KECAMATAN PAGERBARANG		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN PANGKAH		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Pangkah	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		4,00		4,00		4,00		KECAMATAN PANGKAH		
		Persentase desa Maju Kecamatan Pangkah	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	4,00	4,00		9,00		9,00		9,00		KECAMATAN PANGKAH		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						5.088.469		5.030.000		5.030.000		15.148.469	KECAMATAN SLAWI		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Slawi	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	20,00		20,00		40,00		40,00		KECAMATAN SLAWI		
		Persentase desa maju Kecamatan Slawi	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	60,00	60,00		80,00		80,00		80,00		KECAMATAN SLAWI		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN SURADADI		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase desa mandiri Kecamatan Suradadi	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		9,00		9,00		9,00		KECAMATAN SURADADI		
		Persentase desa maju Kecamatan Suradadi	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	9,00	18,00		18,00		18,00		18,00		KECAMATAN SURADADI		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN TALANG		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Talang	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		0,00		5,26		5,26		KECAMATAN TALANG		
		Persentase desa maju Kecamatan Talang	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	5,26	60.000	5,26		0,11		0,11		KECAMATAN TALANG		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		60.000		60.000		240.000	KECAMATAN TARUB		
		Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2	0,00	0,00		5,00		5,00		5,00		KECAMATAN TARUB		
		Persentase desa maju Kecamatan Tarub	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2	20,00	20,00		25,00		25,00		25,00		KECAMATAN TARUB		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN WARUREJA		
		Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Warureja	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	8,00		8,00		17,00		17,00		KECAMATAN WARUREJA		
		Persentase desa/kelurahan Maju Kecamatan Warureja	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	17,00	17,00		25,00		33,00		33,00		KECAMATAN WARUREJA		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN BOJONG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BOJONG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN DUKUHTURI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	75	80		85		90		90		KECAMATAN DUKUHURI		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN DUKUHWARU		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhuturi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHWARU		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN JATINEGARA		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN JATINEGARA		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	81	82		83		84		84		KECAMATAN KEDUNGBANTENG		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN KRAMAT		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN KRAMAT		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN LEBAKSIU		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	70	75		80		85		85		KECAMATAN LEBAKSIU		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		21.700		21.700		73.400	KECAMATAN MARGASARI		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN MARGASARI		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN PAGERBARANG		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN PAGERBARANG		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN PANGKAH		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN PANGKAH		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN SLAWI		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN SLAWI		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN SURADADI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN TALANG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN TALANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		25.000		25.000		80.000	KECAMATAN TARUB
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN TARUB
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82	83		84		85		85		KECAMATAN WARUREJA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						100.000		20.000		20.000		140.000	KECAMATAN ADIWERNA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						100.016		20.000		20.000		140.016	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						42.450		20.000		20.000		82.450	KECAMATAN BOJONG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BOJONG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						39.594		20.000		20.000		79.594	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						45.377		84.000		90.000		219.377	KECAMATAN DUKUHTURI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						22.597		20.000		20.000		62.597	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHWARU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						61.935		20.000		20.000		101.935	KECAMATAN JATINEGARA
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN JATINEGARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.878		20.000		20.000		102.878	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80	82		83		84		84		KECAMATAN KEDUNGBANTENG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						58.152		20.000		20.000		98.152	KECAMATAN KRAMAT

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100			100		100		KECAMATAN KRAMAT	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						20.000		20.000		20.000	60.000	KECAMATAN LEBAKSIU	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100			100		100		KECAMATAN LEBAKSIU	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						57.063		20.000		20.000	97.063	KECAMATAN MARGASARI	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100			100		100		KECAMATAN MARGASARI	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						69.972		20.000		20.000	109.972	KECAMATAN PAGERBARANG	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100			100		100		KECAMATAN PAGERBARANG	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						46.181		20.000		20.000	86.181	KECAMATAN PANGKAH	

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN PANGKAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						112.849		20.000		20.000		152.849	KECAMATAN SLAWI
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN SLAWI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						20.000		20.000		20.000		60.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN SURADADI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						56.620		20.000		20.000		96.620	KECAMATAN TALANG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN TALANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						53.265		20.000		20.000		93.265	KECAMATAN TARUB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		Target	Rp. (000)	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN TARUB
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						68.003		20.000		20.000		108.003	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN WARUREJA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	50,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	70,0		90,000		100,00		100,00		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN BOJONG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN BOJONG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		84,000		100,00		100,00		KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						40.000		10.000		10.000		60.000	KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhwaru	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	50,0		60,000		70,00		70,00		KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhhuri	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	50,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN DUKUHWARU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN JATINEGARA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN JATINEGARA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN KEDUNGBANTEN G
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN KEDUNGBANTEN G

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	30,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN KRAMAT
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		95,00		95,00		KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		5.200		5.200		40.400	KECAMATAN MARGASARI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	50,00	89,0		100,000		100,00		100,00		KECAMATAN MARGASARI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN PAGERBARANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN PANGKAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN SLAWI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN SLAWI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN SURADADI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN TALANG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN TALANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN TARUB
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN TARUB
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN WARUREJA
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						3.960.452		2.517.769		7.256.121		13.734.342	BADAN KESBANGPOL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						3.960.452		2.517.769		7.256.121		13.734.342	BADAN KESBANGPOL
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					408.040		408.040		420.281		6.859.784	BADAN KESBANGPOL	
		Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Survey kepada masyarakat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,42	86,66		88,66		90,66		90,66		BADAN KESBANGPOL
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.078.790		1.609.578		3.320.684		9.587.842	BADAN KESBANGPOL	
		Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	Jumlah parpol yang menyelenggarakan pendidikan politik dibagi jumlah parpol di kali 100,	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		BADAN KESBANGPOL
		Persentase lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik	jumlah lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik dibagi seluruh sma/smk dan PT	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	35,40		53,10		70,80		70,80		BADAN KESBANGPOL
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					180.264		204.020		210.141		774.689	BADAN KESBANGPOL	
		Persentase Ormas yang Terbina	Pembinaan Ormas secara optimal	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,00	90,00		100,00		100,00		100,00		BADAN KESBANGPOL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						156.550		158.116		162.859		711.120	BADAN KESBANGPOL
		Persentase Konflik yang tertangani	Jumlah konflik yang tertangani di bagi dengan kejadian konflik di kali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97,00	100,00		100,00		100,00		100,00		BADAN KESBANGPOL
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						136.808		138.015		3.142.155		3.553.786	BADAN KESBANGPOL
		Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	Jumlah gangguan yang tertangani dibagi jumlah gangguan di kali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		BADAN KESBANGPOL
TOTAL PAGU							2.288.101.130		2.292.182.760		2.389.489.540		7.839.317.252	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020-2021 dan Realisasi Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi	Target	Realisasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah Koordinator
		Awal 2018	2020	2020	2021		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	45,25	50,10	63,69	64,19	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00	78,61	78,61	80,46	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
3.	SPBE	2,58	2,75	2,2	2,3	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
4.	Nilai SAKIP Kabupaten	60,10	63,61	63,61	65,61	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
5.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini; Tahunan	Inspektorat
6.	Indeks Williamson	0,260	0,258	N/A	0,254	Persen; Kumulatif	Sekretariat Daerah
7.	Pertumbuhan Ekonomi	5,40	5,48	-1,46	3,20	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
8.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,44	68,03	68,39	68,73	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
9.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,05	69,30	69,25	69,70	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,76	86,85	71,40	86,94	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
11.	Rata-Rata Lama Sekolah	6,70	6,75	6,98	6,77	Tahun; Tahunan	Sekretariat Daerah
12.	Harapan Lama Sekolah	12,34	12,37	12,67	12,40	Tahun; Tahunan	Sekretariat Daerah
13.	Angka Harapan Hidup	71,14	71,19	71,60	71,24	Tahun; Tahunan	Sekretariat Daerah
14.	Indeks Gini	0,311	0,307	NA	0,303	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
15.	Persentase Penduduk Miskin	7,94	7,01	8,14	8,41	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,45	7,45	9,82	10,42	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
17.	Indeks Risiko Bencana	184,41	181,98	N/A	177,71	Angka; Tahunan	Sekretariat Daerah
18.	Indeks Kebudayaan	60,00	62,34	N/A	64,73	Angka; Tahunan	Sekretariat Daerah

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 8.2.
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Realisasi 2020	Target Capaian			Satuan	Perangkat Daerah Koordinator
			2022	2023	2024		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	63,69	64,69	65,19	65,69	Opini; Tahunan	Sekretariat Daerah
2.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,61	82,15	84,83	86,2	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	2,40	2,50	2,60	Skor; Tahunan	Sekretariat Daerah
4.	Nilai SAKIP Kabupaten	63,61	67,61	70,61	73,61	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
5.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini; Tahunan	Sekretariat Daerah
6.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	72,12	76,42	78,31	80,56	Skor; Tahunan	Sekretariat Daerah
7.	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	72,31	77,26	79,68	81,36	Angka; Kumulatif	Sekretariat Daerah
8.	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	72,88	78,80	81,66	83,59	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
9.	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	74,88	76,93	78,02	79,15	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
10.	Rasio Konektivitas Kabupaten	75,20	75,30	75,40	75,50	Skor; Tahunan	Sekretariat Daerah
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,05	55,33	55,48	55,83	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
12.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,46	3,59 -5,20	4,2 - 5,35	4,85-5,45	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
13.	Laju PDRB Sektor Pertanian	2,18	2,69 - 3,25	2,78 - 3,46	2,95 - 3,35	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
14.	Laju PDRB Sektor Industri	-0,46	1,50 - 3,56	2,72 -3,68	3,75 - 5,23	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
15.	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	1,85	1,99	2,23	2,33	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Realisasi 2020	Target Capaian			Satuan	Perangkat Daerah Koordinator
			2022	2023	2024		
16.	Laju PDRB Sektor Perdagangan	-4,20	2,56 - 3,92	2,95 - 4,48	4,50 - 5,65	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
17.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,39	69,43	70,13	70,83	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
18.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,85	87,03	87,12	87,21	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
19.	Indeks Pendidikan	0,546	0,556	0,558	0,560	Tahun; Tahunan	Sekretariat Daerah
20.	Indeks Kesehatan	0,794	0,801	0,802	0,804	Tahun; Tahunan	Sekretariat Daerah
21.	Wirausaha muda Produktif Berbasis Kinerja Bisnis	200	400	500	600	Orang; Tahunan	Sekretariat Daerah
22.	Persentase Penduduk Miskin	8,14	8,45 - 8,12	8,35 - 8,05	8,25 - 7,89	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
23.	Indek Kedalaman Kemiskinan	1,08	0,98	0,82	0,78	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
24.	Indek Keparahan Kemiskinan	0,19	0,15	0,12	0,10	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
25.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,82	10,21-9,42	10,12-9,14	9,85-8,85	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
26.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	82,66	86,66	88,66	90,66	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
27.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan	82,66	86,66	88,66	90,66	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
28.	Indeks Risiko Bencana	183,00	174,62	172,12	171,84	Angka; Tahunan	Sekretariat Daerah
29.	Indeks Kapasitas Daerah	0,60	0,8	0,89	0,9	Angka; Tahunan	Sekretariat Daerah
30.	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	44,74	55,27	63,16	73,69	Indeks; tahunan	Sekretariat Daerah
31.	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	57,50	65,50	70,50	75,50	Indeks; tahunan	Sekretariat Daerah

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya

Tabel 8.3.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020-2021 dan Realisasi 2020

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,60	6,75	6,75	6,77
2.		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,34	12,37	12,37	12,40
3.		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	60	62,34	62,34	64,73
4.		Persentase cagar budaya (<i>tangible dan intangible</i>) dilestarikan	Persen	21,4	22,50	22,50	24,50
5.	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran Hidup		52,00	52,00	47,00
6.		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran Hidup		7,47	7,47	7,10
7.		Angka Kematia Balita (AKABA)	per 1.000 kelahiran Hidup		7,97	7,97	7,57
8.		Persentase Desa STBM	Persen		2,00	2,00	4,00
9.	RSUD dr Soeselo	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi Standar Akreditasi RS versi SNARS	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
10.		Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Persen	50,00	60,00	60,00	70,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
11.		<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	Persen	75-85	75-85	75-85	75-85
12.		<i>Average Length of Stay (ALOS)</i>	Hari	3-12 Hari	3-12 Hari	3-12 Hari	3-12 Hari
13.		<i>Net Death Rate (NDR)</i>	Persen	≤ 0,24	≤ 0,24	≤ 0,24	≤ 0,24
14.		<i>Cost Recovery Ratio (CRR)</i>	Persen	95,00	100,00	100,00	100,00
15.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	RSUD Suradadi	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	Persen	56,58	66,00	66,00	68,00
17.		<i>Net Death Rate (NDR)</i>	Persen	14,18	15,00	15,00	14,00
18.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	79,49	77,00	77,00	79,00
19.	Dinas Pekerjaan Umum	Persentase Infrastruktur Wilayah Mantap	Persen	59,98	64,82	64,82	69,24
20.		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	62,42	70,02	70,02	75,02
21.		Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 0,5-1)	Persen	30,00	40,00	40,00	45,00
22.		Proporsi jembatan dalam kondisi baik	Persen	67,11	75,11	75,11	79,91
23.		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	56,39	60,00	60,00	62,00
24.		Proporsi jembatan dalam kondisi baik	Persen	67,11	75,11	75,11	79,91
25.		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	56,39	60,00	60,00	62,00
26.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	Persentase Infrastruktur Permukiman Layak	Persen	85,00	86,00	86,00	87,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
27.		Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen	86,23	88,00	88,00	89,00
28.		Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Persen	88,70	90,00	90,00	93,00
29.		Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Persen	77,00	60,00	60,00	45,00
30.		Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	12,10	15,00	15,00	18,00
31.		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU	Persen	51,34	52,34	52,34	53,34
32.		Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Persen	66,67	68,77	68,77	70,34
33.		Persentase luas lahan besertifikat	Persen	52,22	57,37	57,37	59,52
34.	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80,66	82,66	82,66	84,66
35.	Kesbangpol	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80,66	82,66	82,66	84,66
36.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Angka	184,41	181,98	181,98	177,71
37.		Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0,58	0,62	0,62	0,72
38.	Dinas Sosial	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	Persen	82,18	83,34	83,34	85,44
39.		Persentase Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	Persen	89,08	90,08	90,08	91,00
40.		Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	79,96	82,24	82,24	82,92
41.		Persentase Cakupan Layanan Kemiskinan	Persen	95,18	97,87	97,87	98,89

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
42.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender	Persen	70,00	72,00	72,00	73,00
43.		Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Persen	50,00	55,00	55,00	60,00
44.		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,28	0,26	0,26	0,25
45.		Persentase Ketahanan Keluarga	Persen	45,00	48,00	48,00	52,00
46.		Persentase pemakaian Kontrasepsi (CPR)	Persen	69,14	69,81	69,81	70,21
47.	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen	50,00	60,35	60,35	70,75
48.		Persentase Limbah B3 ditangani	Persen	50,00	60,35	60,35	70,75
49.		Indeks kualitas air	Nilai	61,00	72,00	72,00	74,00
50.		Indeks kualitas udara	Nilai	77,00	77,50	77,50	78,00
51.		Indeks ketutupan lahan	Nilai	59,21	59,21	59,21	59,21
52.		Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persen	65,00	55,00	55,00	50,00
53.		Peresentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
54.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk 0-18 tahun ber akta kelahiran	Persen	69,46	80,00	80,00	85,00
55.		Persentase penduduk ber akta kematian	Persen	14,73	20,00	20,00	25,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
56.		Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen	89,08	90,00	90,00	92,00
57.		Persentase Penduduk ber KTP-el	Persen	89,43	90,00	90,00	92,00
58.		Persentase anak memiliki KIA	Persen	1,85	40,00	40,00	50,00
59.		Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	Persen	20	30	30	40
60.		Persentase OPD/ Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	9,28	25	25	40
61.		Persentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan	Persen	85	85	85	87
62.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	Persen	50,15	58	58	64
63.		Persentase Desa Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa	Persen	15,00	25,00	25,00	50,00
64.		Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	BUMDes	35 Bumdes	25,00	25,00	30,00
65.		Persentase Pengembangan Desa	Kerjasama Desa	195 Kerjasama Desa dan 13 Kerjasama antar Desa	100,00	100,00	100,00
66.		Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	Persen	0	50,00	50,00	62,50

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
67.		Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Persen	10,00	25,00	25,00	50,00
68.		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	Persen	5,00	25,00	25,00	50,00
69.	Dinas Perhubungan	Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	Persen	34,49	40,00	40,00	50,00
70.		Persentase Perijinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Persen	58,33	20,00	20,00	40,00
71.		Persentase Pelanggaran Operasional Lalu Lintas	Persen	38,92	35,00	35,00	30,00
72.		Presentase Lokasi Titik Parkir	Persen	60,00	68,00	68,00	76,00
73.		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	29,41	31,00	31,00	33,00
74.		Rasio Ijin Trayek	Persen	66,00	76,00	76,00	80,00
75.		Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum	laporan dan monev	77,80	80,00	80,00	82,00
76.		Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Persen	32,00	35,00	35,00	38,00
77.		Persentase Fatalitas Korban Kecelakaan	Persen	4,17	4,00	4,00	3,80
78.		Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	laporan dan monev	45,15	56,57	56,57	67,00
79.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,58	2,75	2,75	3,00
80.		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	147,00	272,00	272,00	300,00
81.		Kualifikasi tingkat KIP Badan Publik	Skor	41,60	45,00	45,00	50,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
82.		Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	Persen	10,00	33,00	33,00	55,00
83.		Persentase dokumen data sektoral statistik daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS)/Open Data	Persen	0	20,00	20,00	40,00
84.		Laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh pengunjung SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persen	0	10,00	10,00	20,00
85.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laju Nilai Investasi PMA	Persen	-15,25	3,84	3,84	7,54
86.		Investor PMA	Pemohon	3	5	5	7
87.		Laju Nilai Investasi PMDN	Persen	10,14	30,00	30,00	26,00
88.		Investor PMDN	Pemohon	7.257	7.457	7.457	7.657
89.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Minat Baca Berpengaruh ke Akademik	Persen	50,00	60,00	60,00	65,00
90.		Persentase penumbuhan perpustakaan (Jumlah seluruh Perpustakaan s.d Tahun 2018 =709)	Persen	1,00 (7 Perpus)	1,00 (7 Perpus)	1,00 (7 Perpus)	1,00 (7 Perpus)
91.		IKM Aspek Kearsipan daerah	Persen	50,00	60,00	60,00	65,00
92.		Nilai LAKE LKD	Persen	40,00	45,00	45,00	55,00
93.		Nilai LAKI Perangkat Daerah dan BUMD	Persen	40,00	45,00	45,00	55,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
94.		Nilai LAKE Desa dan Ormas	Persen	40,00	45,00	45,00	55,00
95.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah Wisata Mancanegara	Jumlah	487	587	137	687
96.		Jumlah Wisata Nusantara	Jumlah	1.052.487	1.052.587	466.531	1.052.687
97.		Kota Layak Pemuda	Level	Proses	Proses	Utama	Proses
98.		Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah	5,00	6,00	6,00	7,00
99.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan	Persen	(1,30)	0,10	0,10	0,15
100.		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perkebunan	Persen	1,18	1,00	1,00	1,10
101.		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Hortikultura	Persen	1,32	1,00	1,00	1,10
102.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kilogram	1.551.423	1.566.937	1.566.937	1.582.606
103.		Nilai produksi perikanan tangkap	Rupiah	14.459.278	14.603.871	14.603.871	14.749.909
104.		Jumlah produksi perikanan budidaya	Kilogram	2.047.818	2.068.296	2.068.296	2.088.979
105.		Nilai produksi perikanan budidaya	Rp	86.814.081	87.682.222	87.682.222	88.559.044
106.		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Kg	4.514.145	4.559.286	4.559.286	4.604.879
107.		Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Rp	171.409.044	173.123.134	173.123.134	174.854.366
108.		Jumlah produksi daging	Kilogram	10.057.415	10.157.989	10.157.989	10.259.569
109.		Jumlah produksi telur	Kilogram	10.258.158	10.360.740	10.360.740	10.464.347
110.		Jumlah produksi susu	Kilogram	713.890	724.599	724.599	735.468
111.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Pedagang tertib niaga	Persen	18,73	20,00	20,00	40,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
112.		Jumlah pasar yang merujuk SNI	Persen	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar
113.		Persentase Koperasi aktif	Persen	0,37	0,38	0,38	0,42
114.		UMKM yang kompetitif dan mandiri	Persen	5,26	5,80	5,80	7,10
115.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen	7,00	7,90	7,90	7,90
116.		Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan	Persen	7,00	7,40	7,40	7,40
117.		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta / TK	37,35	37,99	37,99	39,43
118.		Persentase transmigran yang ditempatkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
119.	Sekretariat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Persen		78,61	78,61	80,46
120.		Nilai SAKIP Kabupaten	Persen	60,10	63,61	63,61	65,61
121.	Sekretariat DPRD	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	Persen	52,31	100,00	100,00	100,00
122.		Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	Persen	54,22	100,00	100,00	100,00
123.	Kecamatan Adiwerna	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	23,80	23,8	23,8	28,57
124.	Kecamatan Balapulang	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	0,00	0,00	0,00	10,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
125.	Kecamatan Bojong	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	11,76	11,76	11,76	11,76
126.	Kecamatan Bumijawa	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	5,56	11,11	11,11	16,67
127.	Kecamatan Dukuhturi	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	5,55	5,55	5,55	16,66
128.	Kecamatan Dukuhwaru	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	30,00	40,00	40,00	40,00
129.	Kecamatan Jatinegara	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	5,88	5,88	5,88	5,88
130.	Kecamatan Kedungbanteng	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	20,00	20,00	20,00	20,00
131.	Kecamatan Kramat	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	26,32	36,84	36,84	42,11
132.	Kecamatan Lebaksiu	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	13,33	40,00	40,00	40,00
133.	Kecamatan Margasari	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	15,38	15,38	15,38	15,38
134.	Kecamatan Pagerbarang	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
135.	Kecamatan Pangkah	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	13,04	17,39	17,39	26,09
136.	Kecamatan Slawi	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	80	100	100	100
137.	Kecamatan Suradadi	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	27,27	36,36	36,36	36,36
138.	Kecamatan Talang	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	10,53	10,53	10,53	10,53
139.	Kecamatan Tarub	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	5,00	15,00	15,00	15,00
140.	Kecamatan Warureja	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahun	8,33	25,00	25,00	41,67
141.	Inspektorat	Maturitas SPIP	Level	3,00	3,10	3,10	3,20
142.		Kapabilitas APIP	Level	3 DC (3 Elemen)	3 DC (3 Elemen)	3 DC (3 Elemen)	3 DC (2 Elemen)
143.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	95,37	96,58	96,58	96,88
144.		Indeks Kelitbangan	Poin	63,70	78,72	78,72	83,29
145.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan APBD	Persen	100	100	100	100
146.		Persentase kualitas DPA yg sesuai ketentuan	Persen	65	70	70	75

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
147.		Persentase OPD yg telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen	100	100	100	100
148.		Persentase Ketepatan waktu Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persen	100	100	100	100
149.		Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	Persen	100	100	100	100
150.		Persentase Ketersediaan dana Kasda terhadap kebutuhan anggaran kas	Persen	100	100	100	100
151.		Persentase OPD yg telah melakukan pengelolaan BMD yang baik dan benar	Persen	50	60	60	70
152.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase perencanaan, monev dan pelaporan pendapatan	Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00
153.		Persentase Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00
154.		Persentase Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih	Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00
155.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor	70,00	72,12	72,12	74,24
156.		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,00	0,58	0,58	0,61
157.		Nilai Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,98	82,25	82,25	82,50
158.		Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD	Nilai	70,73	72,00	72,00	74,00

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 8.4.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021-2024

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,98	7,03	7,05	7,07	7,07
2.		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67	12,73	12,76	12,79	12,79
3.		Persentase Kinerja Akses Layanan Pendidikan	Persen	97,53	94,29	94,29	94,30	94,30
4.		Persentase Kinerja Mutu Layanan Pendidikan	Persen	74,58	77,34	79,13	80,94	80,94
5.		Persentase Seni dan Kesenian yang dikembangkan	Persen	60,59	67,46	70,80	74,34	74,34
6.	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,60	71,53	71,61	71,69	71,69
7.		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran Hidup	104	67	63	60	60
8.		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran Hidup	6,9	6,8	6,7	6,6	6,6
9.		Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 kelahiran Hidup	7,7	7,6	7,5	7,4	7,4
10.		Persentase Desa STBM	Persen	1,39	7,00	9,00	10,00	10,00
11.		Cakupan Balita Stunting	Persen	12,5	12,3	12,2	12,0	12,0
12.	RSUD dr Soeselo	Nilai IKM RSUD dr. Soeselo	Persen	70,67	85	87	89	89
13.		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	Persen	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
14.		Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Grade	A (78,46)	AA (82)	AA (86)	AA (90)	AA (90)
15.	RSUD Suradadi	Nilai IKM RSUD Suradadi	Persen	78,21	80,00	82,00	83,00	83,00
16.		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	Persen	97,40	100	100	100	100
17.		Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD Suradadi	Grade	A (74,06)	A (76,26)	A (77,36)	A (78,46)	A (78,46)
18.	Dinas Pekerjaan Umum	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen	71,76	80,09	82,12	83,78	83,78
19.		Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap	Persen	58,86	61,33	62,57	63,80	63,80
20.		Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap	Persen	83,10	84,60	86,04	87,26	87,26
21.		Persentase Infrastruktur Keciptakarya yang Mantap	Persen	58,45	72,42	79,52	82,25	82,25
22.		Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompetitif	Persen	0,00	60,00	80,00	80,00	80,00
23.		Persentase Kepatuhan terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan	Persen	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
24.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Persen	74,88	76,93	78,02	79,15	79,15
25.		Persentase Infrastruktur Perumahan yang Layak	Persen	93,32	93,80	94,04	94,36	93,80
26.		Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Persen	24,26	31,85	35,82	39,78	39,78

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
27.		Persentase Penatagunaan Tanah yang Digunakan Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Persen	51,98	84,10	100,00	100,00	100,00
28.	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	82,66	86,66	88,66	90,66	90,66
29.		Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	82,66	86,66	88,66	90,66	90,66
30.	Kesbangpol	Persentase Masyarakat Yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	80,86	83,58	86,265	88,275	88,275
31.		Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Persen	81,35	84,02	86,91	90,37	90,37
32.		Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Politik	Persen	80,37	83,14	85,62	86,18	86,18
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Angka	0,60	0,72	0,80	0,89	0,89
34.		Persentase Kinerja Penanggulangan Bencana	Persen	46,08	71,17	75,18	78,96	78,96
35.	Dinas Sosial	Indeks kedalaman kemiskinan	Angka	1,08	0,82	0,78	0,78	0,78
36.		Indeks keparahan kemiskinan	Angka	0,19	0,15	0,12	0,1	0,1
37.		Indeks kesejahteraan sosial	Angka	74,22	83,75	90,00	98,46	98,46
38.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (Indikator APE)	Persen	94	75	76	77	77,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
39.		Persentase pencapaian pemenuhan hak anak(KLA)	Persen	50	64	67	70	75,00
40.		Persentase perempuan di Lembaga Legislatif	Persen	24	25	25	25	0,22
41.		Persentase cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persen	100	100	100	100	60,00
42.		skor kabupaten layak anak	Skor	500	640	670	700	71,41
43.		Laju pertumbuhan penduduk(LPP)	Persen	1,32	1,27	1,24	1,2	1,2
44.		Persentase wanita yang pernah kawin usia 15-19 tahun	Persen	1,32	1,12	1,02	0,92	0,92
45.		Persentase peserta KB aktif	Persen	67,8	69,14	69,34	69,54	69,54
46.		persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera di kecamatan	Persen	11	44	61	80	80
47.	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,05	55,33	55,48	55,83	55,83
48.		Indeks Kualitas Air (IKA)	Persen	31.11	31.20	31.25	32.01	32.01
49.		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	84.99	85.82	86.24	86.66	86.66
50.		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Persen	50.55	50.56	50.57	50.57	50.57
51.		Nilai Status Pencemaran Air Sungai	Persen	7.08	6.90	6.85	6.80	6.80
52.		Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara	Persen	85.97	87.01	87.53	88.05	88.05
53.		Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	Persen	9.76	9.77	9.78	9.78	9.78
54.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80,95	83	84	85	85

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
55.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	64	69	75	82	82
56.		Persentase Desa tertib Laporan LPPDes	Persen	50	75	100	100	100
57.		Persentase Penataan infrastruktur Pemerintah Desa yang Baik	Persen	3	23	26	29	29
58.		Indeks Desa Membangun dan Klasifikasi Desa Maju dan Mandiri	Persen	50	60	75	100	100
59.	Dinas Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Persen	42,78	61,72	79,00	98,33	98,33
60.		Rasio Ijin Trayek	Persen	76	85	87	90	90
61.		Persentase Penurunan Rasio Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	44,9	58	63,5	69	69
62.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik dengan aman	OPD	8	24	26	48	48
63.		Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks	2	2	2,4	2,5	2,5
64.		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	2	2,1	2,2	2,4	2,4
65.		Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks	2,8	2,9	2,9	3	3
66.		Indeks Manajemen SPBE	Indeks	NA	2	2,1	2,3	2,3
67.		Nilai KIP Badan Publik	Skor	83,96	87	88	90	90
68.		Indeks Keamanan Informasi	Indeks	262	320	360	380	380
69.		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
70.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laju Pertumbuhan IKM bidang PTSP	Persen	78	2,56	3,85	5,13	5,13
71.		IKM bidang PTSP	Nilai	78	80	81	82	82
72.		Nilai Investasi PMA (Rp)	Rp	500 M	540 M	560 M	580 M	580 M
73.		Nilai Investasi PMDN (Rp)	Rp	850 M	900 M	925 M	950 M	950 M
74.		Nilai Minat investasi PMA	Rp	884 M	980 M	1,029 T	1.080 T	1,080 T
75.		Nilai Minat Investasi PMDN	Rp	1,308 T	1,450 T	1,522 T	1,598 T	1,598 T
76.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	IKM Bidang Perpustakaan	Skor	78,43	78,65	78,75	78,9	78,9
77.		Status Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Status	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
78.		Status Hasil Pengawasan Kearsipan ANRI	Status	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
79.		Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Skor	73	76,2	77,4	78,6	78,6
80.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Persen	1,85	1,99	2,23	2,25	2,25
81.		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	466.668	21,43	42,86	64,29	64,29
82.		Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis	Orang	200	400	500	600	600
83.		Pencapaian Kota Layak Pemuda	Skor	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
84.		Laju Peningkatan prestasi olahraga	Persen	61 Medali	14,75	22,95	39,34	39,34
85.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Persen	2,18	2,75	2,87	3,23	3,23

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
86.		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan	Persen	0,10	0,20	0,25	0,25	0,25
87.		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perkebunan	Persen	1,00	1,15	1,20	1,30	1,30
88.		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Hortikultura	Persen	1,00	1,20	1,30	1,40	1,40
89.		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	Persen; Tahunan					
90.		Skor Pola Pangan Harapan	Angka	80,4	80,41	80,52	80,63	80,63
91.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	Persen	1,52	1,57	1,62	1,67	1,67
92.		Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen; Kumulatif	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
93.		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen; Kumulatif	0,50	0,75	1,00	1,20	3,45
94.		Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Persen; Kumulatif	0,10	0,15	0,20	0,25	0,700
95.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen	-4,20	2,75	3,23	4,56	4,56
96.		Laju PDRB Sub Sektor Jasa Keuangan	Persen	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
97.		Indek Kinerja Koperasi dan UMKM	Persen	0	4,0	5,54	7,1	7,1
98.		Indek Kinerja Sektor Perdagangan	Persen	0	10,01	12,98	15,95	15,95
99.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	Persen	-0,91	4,56	5,40	6,56	4,56

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
100.		Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	Persen	60	70	80	100	70
101.		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,82	10,21-9,42	10,12-9,14	9,85-8,85	9,85-8,85
102.		Persentase laju tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Persen	17,82	68,35	96,41	124,47	124,47
103.		Persentase penyelesaian hubungan industrial	Persen	50	55	65	70	70
104.	Sekretariat Daerah	Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	64,69 (6.6)	66,69 (1.5)	67,69 (1.5)	68,69 (1.5)	68,69 (1.5)
105.		Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	78,61 (4,59)	82,50 (2.47)	83,50 (1.19)	84,50 (1.18)	84,50 (1.18)
106.		Peningkatan Nilai SAKIP	Nilai	63,61 (3.51)	65,00 (-0.61)	66,00 (1.0)	67,00 (1.0)	67,00 (1.0)
107.		Peningkatan Nilai LPPD	Nilai	3,2 (0)	3,4 (0.1)	3,5 (0.1)	3,6 (0.1)	3,6 (0.1)
108.	Sekretariat DPRD	Persentase rencana tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembetulan perkara dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD yang baik	Persen	90	100	100	100	100
109.		Persentase integrasi rencana tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD	Persen	90	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
110.	Kecamatan Adiwerna	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Adiwerna	Persen	76,37	1,25	1	1	80,87
111.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Adiwerna	Persen	50	18	21	11	100
112.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Adiwerna	Persen	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76
113.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Adiwerna	Persen	14,29	0,00	0,00	0,00	14,29
114.	Kecamatan Balapulang	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Balapulang	Persen	79,29	1,25	1	1	83,79
115.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Balapulang	Persen	35	20	20	10	100
116.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Balapulang	Persen	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00
117.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Balapulang	Persen	5,00	5,00	0,00	5,00	15,00
118.	Kecamatan Bojong	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Bojong	Persen	79,62	1,25	1	1	84,12
119.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Bojong	Persen	35	18	21	11	100
120.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Bojong	Persen	0,00	0,00	5,88	0,00	17,65
121.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Bojong	Persen	29,41	0,00	5,88	0,00	35,29
122.	Kecamatan Bumijawa	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Bumijawa	Persen	87,53	1,25	1	1	92,03

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
123.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Bumijawa	Persen	35	18	16	16	100
124.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Bumijawa	Persen	0,00	0,00	5,56	5,56	11,11
125.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Bumijawa	Persen	5,56	5,56	5,56	5,56	27,78
126.	Kecamatan Dukuhturi	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Dukuhturi	Persen	77,44	1,25	1	1	81,94
127.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Dukuhturi	Persen	50	18	21	11	100
128.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Dukuhturi	Persen	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
129.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Dukuhturi	Persen	5,56	0,00	5,56	5,56	16,67
130.	Kecamatan Dukuhwaru	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Dukuhwaru	Persen	79,37	1,25	1	1	83,87
131.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Dukuhwaru	Persen	35	10	10	10	70
132.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Dukuhwaru	Persen	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
133.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Dukuhwaru	Persen	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
134.	Kecamatan Jatinegara	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Jatinegara	Persen	79,70	1,25	1	1	84,20

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
135.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Jatinegara	Persen	35	18	21	11	100
136.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Jatinegara	Persen	0,00	5,88	0,00	5,88	11,76
137.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Jatinegara	Persen	5,88	5,88	0,00	5,88	17,65
138.	Kecamatan Kedungbanteng	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Kedungbanteng	Persen	82,00	1	1	1	86,00
139.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Kedungbanteng	Persen	35	18	21	11	100
140.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Kedungbanteng	Persen	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
141.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Kedungbanteng	Persen	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
142.	Kecamatan Kramat	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Kramat	Persen	78,98	1,25	1	1	83,48
143.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Kramat	Persen	30	18	21	11	100
144.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Kramat	Persen	0,00	5,26	0,00	0,00	5,26
145.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Kramat	Persen	15,79	0,00	10,53	0,00	26,32
146.	Kecamatan Lebaksiu	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Lebaksiu	Persen	77,25	1,25	1	1	83,25

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
147.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Lebaksiu	Persen	35	18	21	6	95
148.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Lebaksiu	Persen	6,67	0,00	6,67	0,00	13,33
149.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Lebaksiu	Persen	13,33	0,00	6,67	0,00	20,00
150.	Kecamatan Margasari	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Margasari	Persen	77,40	1,25	1	1	81,90
151.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Margasari	Persen	50	18	21	11	100
152.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Margasari	Persen	7,69	0,00	7,69	0,00	15,38
153.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Margasari	Persen	46,15	0,00	7,69	7,69	61,54
154.	Kecamatan Pagerbarang	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Pagerbarang	Persen	77,63	1,25	1	1	82,13
155.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Pagerbarang	Persen	35	18	21	11	100
156.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Pagerbarang	Persen	0,00	7,69	7,69	7,69	7,69
157.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Pagerbarang	Persen	0,00	0,00	4,35	0,00	30,77
158.	Kecamatan Pangkah	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Pangkah	Persen	78,74	1,25	1	1	83,24

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
159.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Pangkah	Persen	35	18	21	11	100
160.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Pangkah	Persen	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35
161.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Pangkah	Persen	4,35	0,00	4,35	0,00	8,70
162.	Kecamatan Slawi	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Slawi	Persen	79,67	1,25	1	1	84,17
163.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Slawi	Persen	35	18	21	11	100
164.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Slawi	Persen	0,00	20,00	0,00	20,00	40,00
165.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Slawi	Persen	40,00	0,00	20,00	0,00	80,00
166.	Kecamatan Suradadi	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Suradadi	Persen	79,76	1,25	1	1	84,26
167.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Suradadi	Persen	35	18	21	11	100
168.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Suradadi	Persen	0,00	0,00	9,09	0,00	9,09
169.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Suradadi	Persen	9,09	9,09	0,00	0,00	18,18
170.	Kecamatan Talang	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Talang	Persen	73,2	1,25	1	1	77,70

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
171.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Talang	Persen	35	18	21	11	100
172.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Talang	Persen	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
173.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Talang	Persen	0,00	5,26	0,00	5,26	10,53
174.	Kecamatan Tarub	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Tarub	Persen	80,55	1,25	1	1	85,05
175.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Tarub	Persen	35	18	21	11	100
176.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Tarub	Persen	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
177.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Tarub	Persen	20,00	0,00	5,00	0,00	25,00
178.	Kecamatan Warureja	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Warureja	Persen	77,40	1,25	1	1	81,90
179.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Warureja	Persen	35	18	21	11	100
180.		Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Warureja	Persen	0,00	8,33	0,00	8,33	16,67
181.		Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Warureja	Persen	8,33	0,00	8,33	8,33	33,33
182.	Inspektorat	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
183.		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3	3,075	3,075	3,1	3,1
184.		Level Kapabilitas APIP	Level	3 DC (3 elemen)	3 DC (2 elemen)	3 DC (1 elemen)	3 DC (1 elemen)	3 penuh

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
					2022	2023	2024	
185.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	96,58	97,18	97,58	98,08	98,08
186.		Indek Kelitbangan dan Pengelolaan Data	Poin	78,72	87,40	91,18	94,70	94,70
187.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang baik dan tepat waktu	Persen	50	60	70	80	80
188.		Persentase Pengelolaan BMD yang baik dan tepat waktu	Persen	60	70	75	80	80
189.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
190.		Prosentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
191.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Indeks Sistem Merit	Indeks, Tahunan	0,54	0,70	0,75	0,80	0,80
192.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai, Tahunan	76,90	83,50	84,83	80,56	80,56
193.		Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	Persen, Tahunan	38,28	44,39	47,29	50,18	50,18
194.		Persentase ASN yang Memenuhi Syarat Kompetensi	Persen, Tahunan	71,19	74,10	76,50	75,50	75,50
195.		Indeks Sistem Merit	Indeks, Tahunan	0,54	0,70	0,75	0,80	0,80
196.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai, Tahunan	76,90	83,50	84,83	80,56	80,56

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, yang merupakan indikator program prioritas pembangunan daerah. Berikut ini realisasi indikator kinerja daerah tahun 2020 dan target indikator tahun 2021.

Tabel 8.5.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2021 dan Realisasi Tahun 2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	45,25	50,10	63,69	55,10
2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	60,10	63,61	63,61	65,61
3	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,260	0,258	N/A	0,254
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,40	5,48	-1,46	5,53
6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	66,44	68,03	68,39	68,73
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,05	69,30	69,25	69,70
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,76	86,85	71,40	86,94
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,70	6,75	6,98	6,77
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,34	12,37	12,67	12,40
11	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,14	71,19	71,60	71,24
12	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,311	0,307	NA	0,303
13	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	7,94	7,01	8,14	6,64
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	8,45	7,45	9,82	7,20
15	Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	184,41	181,98	N/A	177,71
16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	60,00	62,34	N/A	64,73

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
B	Aspek Pelayanan Umum					
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
	PENDIDIKAN					
1.	APM PAUD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	24,17	25,21	25,21	25,89
2.	Angka partisipasi PNFI	Persen; Tahunan; IKU OPD	31,24	32,95	32,95	34,65
3.	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,14	0,14	0,14	0,13
4.	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,13	0,13	0,13	0,12
5.	Rasio Guru : Kelas	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	1:0,3	1:0,35	1:0,35	1:0,4
6.	Rasio Guru : Mapel	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	1:1:32	1:1:31	1:1:31	1:1:30
7.	Persentase Sarana dan Prasarana SD baik	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	91,65	93,65	93,65	95,65
8.	Persentase Sarana dan Prasarana SMP baik	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	87,21	89,21	89,21	91,21
	KESEHATAN					
9.	Cakupan Desa UCI	Persen, Tahunan, Referensi : UU Kes No.36 th 2009, PMK No.12 th 2017	100	94	94	95
10.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Resntra Kemenkes	10,07	40	40	45
11.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Resntra Kemenkes	51,48	55	55	60

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
12.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Renstra Kemenkes	20,91	60	60	65
13.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ; Tahunan; referensi SPM, Renstra Kemenkes	28,05	55	55	60
14.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberculosis</i> (TBC)	Persen; Tahunan; referensi SPM	67	86	86	90
15.	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persen; Tahunan; referensi SPM	97	97	97	97
16.	Angka penemuan kasus baru kusta	Per 100.000 pddk; Tahunan; referensi SDGs	14,9 per 100.000 pddk	12 per 100.000 pddk	12 per 100.000 pddk	11,75 per 100.000 pddk
17.	Angka kesakitan DBD	Per 100.000 pddk; Tahunan; referensi Permendagri 86/2017, Renstra Dinkes Provinsi	5,25 /100.00 pddk	< 45 per 100.000 pddk	< 45 per 100.000 pddk	< 44 per 100.000 pddk
18.	Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen; Tahunan; referensi RPJMN, RPJMD Provinsi	0,3	2,0	2,0	4,0
19.	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes Provinsi	80	81	81	82
20.	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes Provinsi	10	11	11	12
21.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen; Tahunan; referensi PMK no. 4 th 2019	99	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
22.	Cakupan penduduk memiliki jaminan kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 100	82,62	85	85	90
23.	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan	Persen; Tahunan Referensi : Renstra Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.1 Tahun 2012, Permenkes No.75 Tahun 2014, Permenkes N0.56 Tahun 2014	100	100	100	100
24.	Persentase Puskesmas dan Labkesda yang terakreditasi	Persen; Tahunan Referensi : Renstra Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.46 Tahun 2015, Permenkes No.42 Tahun 2016, Kepmenkes No.298 Tahun 2008	100	100	100	100
25.	Cakupan pelayanan perijinan di bidang kesehatan	Persen; Tahunan referensi Renstra Dinkes Kab. Tegal 2014-2019 dan Regulasi yang mengatur perijinan	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
		fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan				
26.	Persentase pencapaian standar mutu akreditasi puskesmas	Persen; Tahunan Referensi : Renstra Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.46 Tahun 2015, Permenkes No.42 Tahun 2016	30	38	38	42
27.	Rata-rata jumlah Pengunjung WKJ Kalibakung setiap bulan	Angka, Tahunan; Renstra Dinkes Kab. Tegal 2014-2019	240	250	250	260
28.	Persentase Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Persen, Tahunan	100	100	100	100
29.	Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	Persen; Tahunan; referensi Keputusan Menteri Kesehatan no 1121 tahun 2008 tentang Teknis Pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar	99,01	100	100	100
30.	Persentase Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Sesuai Standar	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan	100	68	68	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
		Kefarmasian di Puskesmas				
31.	Cakupan Pelayanan Penyimpanan dan Pendistribusian Obat di Gudang Farmasi sesuai standar	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	100	100	100	100
32.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	100	96	96	97
33.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	96	98	98	99
34.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	100	100	100	100
35.	Pelayanan kesehatan balita	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	100	90	90	91
36.	Cakupan remaja mendapat pelayanan konseling	Persen; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Prov	40	45	45	47,25
37.	Pelayanan kesehatan usia lanjut	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 4 th 2019	33,7	75	75	77
38.	Cakupan balita stunting	Persen; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Provinsi	24	20,0	20,0	19
39.	Cakupan puskesmas yang mempunyai tenaga kesehatan strategis	Persen; Tahunan; referensi Renstra Dinkes Prov	52	59	59	69

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
40.	Persentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan	Persen; Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumahsakitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017, Permenkes 129 tahun 2008	73,20	75	75	78
41.	Persentase mutu dan etika sesuai standar	Persen; PB IDI 221 tahun 2002, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	71,80	75	75	78
42.	Persentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	Persen; Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumahsakitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017, Permenkes 129 tahun 2008	74,30	75	75	78
43.	Persentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	Persen; PP PPNI tahun 2018, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	72,20	75	75	78
44.	Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	Persen; Tahunan; Permenkes no129/MENKES/SK/II/2008; Permenkes no 56 tahun 2014	79,1	80	80	81
45.	Persentase penunjang non medis sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes nomor 56 tahun 2016	90	90	90	92

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
46.	Persentase pemenuhan Urusan Umum dan Kehumasan, Kepegawaian dan Diklat	Laporan Capaian Kegiatan	100	100	100	100
47.	Persentase Dokumen Keuangan	Dokumen keuangan	100	100	100	100
48.	Persentase Pengelolaan Rekam Medis dan Sistem Informasi	Dokumen Rekam Medis	100	100	100	100
49.	Persentase dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	100	100	100	100
50.	Rata-rata persentase pelayanan medis dan keperawatan sesuai standar perumahsakit	Persen; Tahunan; Permenkes 56 Tahun 2014, Permenkes 4 Tahun 2018, Kepmenkes 129 Tahun 2008, Permenkes 34 Tahun 2017, Perpres 77 Tahun 2015	87,50	88,50	88,50	89,50
51.	Rata-rata persentase penunjang medis dan non medis sesuai dengan standar pelayanan dan sarana prasarana rumah sakit	Persen; Tahunan; Kepmenkes 129 Tahun 2008, Permenkes 56 Tahun 2014	85,00	86,00	86,00	87,00
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
52.	Persentase Infrastruktur Wilayah Mantap	Persen; Tahunan	59,98	64,82	64,82	69,24
53.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	62,42	70,02	70,02	75,02
54.	Persentase Jalan yang memiliki Drainase/ Saluran Pembuangan air (minimal 0,5-1)	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	30,00	40,00	40,00	45,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
55.	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen; Kumulatif	67,11	75,11	75,11	79,91
56.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	56,39	60,00	60,00	62,00
57.	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	85,00	86,00	86,00	87,00
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
58.	Persentase Infrastruktur Permukiman Layak	Persen; Tahunan	87,64	89,45	89,45	91,65
59.	Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Kumulatif;	86,23	88,00	88,00	89,00
60.	Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Persen; Kumulatif;	88,70	90,00	90,00	93,00
61.	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Persen; Kumulatif;	77,00	60,00	60,00	45,00
62.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen; Kumulatif;	12,10	15,00	15,00	18,00
63.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU	Persen; Kumulatif;	51,34	52,34	52,34	53,34
64.	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Persen; Kumulatif;	66,67	68,77	68,77	70,34
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
65.	Persentase penyelesaian penegakan perda	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	76,00	80,00	80,00	82,00
66.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen; Tahunan; IKU; SPM	70,00	74,00	74,00	76,00
67.	Rasio Linmas per RT	Persen; Tahunan; IKU	1,00	1,07	1,07	1,08
68.	Persentase Linmas Terlatih	Persen; Tahunan; IKU	7,00	8,00	8,00	10,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
69.	Persentase Kasus Kebakaran Tertangani	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	58	66	66	74
70.	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	60,40	0	0	0
71.	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	60,40	0	0	0
72.	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	70,40	0	0	0
73.	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	65,59	0	0	0
74.	Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	76,60	0	0	0
75.	Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0	0	0	0
76.	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,58	0,62	0,62	0,72
77.	Persentase masyarakat siap siaga bencana	Persen; Tahunan; SPM	1,72	2,44	2,44	2,51
78.	Persentase dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persen; Tahunan; SPM	20.00	44.00	44.00	64.00
79.	Persentase penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	Persen; Tahunan; SPM	85.71	90.19	90.19	94.67
80.	Persentase dokumen penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana	Persen; Tahunan; SPM	30.00	50.00	50.00	100.00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
81.	Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen; Tahunan; SPM	13,59	21,74	21,74	29,89
82.	Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen; Tahunan; SPM	33,33	58,33	58,33	75,00
	SOSIAL					
83.	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	83,34	84,34	84,34	85,34
84.	Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	89,08	90,08	90,08	91,08
85.	Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	80,91	82,46	82,46	82,92
86.	Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	96,64	97,87	97,87	98,89
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
	TENAGA KERJA					
87.	AKAN	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	653,00	660,00	660,00	672,00
88.	AKAD	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	231,00	246,00	246,00	261,00
89.	AKL	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	120,00	140,00	140,00	159,00
90.	Presentase penyelesaian hubungan industrial	Persen, Tahunan, IKU OPD	40,00	50,00	50,00	55,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
91.	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Persen, Tahunan, IKU OPD	70,00	72,00	72,00	73,00
92.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	Persen, Tahunan, IKU OPD	50,00	55,00	55,00	60,00
	PANGAN					
93.	Persentase penguatan cadangan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.14 0/12/2010	229,00	210,00	210,00	219,00
94.	Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.14 0/12/2010	50,00	48,00	48,00	49,00
95.	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	93,00	72,00	72,00	76,00
96.	Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/ OT.140/12/2010	81,20	81,00	81,00	81,50
97.	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.14 0/12/2010	93,00	72,00	72,00	76,00
	PERTANAHAN					
98.	Persentase luas lahan besertifikat	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	52,22	57,37	57,37	59,52

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
	LINGKUNGAN HIDUP					
99.	Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen; Tahunan;	50,00	60,35	60,35	70,75
100.	Persentase Limbah B3 ditangani	Persen; Tahunan;	50,00	60,35	60,35	70,75
101.	Indeks kualitas air	Nilai; Tahunan; IKU OPD	61,00	72,00	72,00	74,00
102.	Indeks kualitas udara	nilai; Tahunan; IKU OPD	77,00	77,50	77,50	78,00
103.	Indeks ketutupan lahan	nilai; Tahunan; IKU OPD	59,21	59,21	59,21	59,21
104.	Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persen; Tahunan; IKU OPD	65	55	55	50
105.	Persentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
106.	Persentase penduduk 0-18 tahun ber akta kelahiran	Persen; Tahunan; IKU OPD	69,46	80,00	80,00	85,00
107.	Persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	14,73	20,00	20,00	25,00
108.	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,08	90,00	90,00	92,00
109.	Persentase Penduduk ber KTP-el	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,43	90,00	90,00	92,00
110.	Persentase anak memiliki KIA	Persen; Tahunan; IKU OPD	1,85	40,00	40,00	50,00
111.	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	Persen; Tahunan; IKU OPD	20	30	30	40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
112.	Persentase OPD/ Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Persen; Tahunan; IKU OPD	9,28	25	25	40
113.	Persentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan	Persen; Tahunan; IKU OPD	85	85	85	87
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
114.	Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	Persentase; Kumulatif Permendagri 112 Tahun 2014 dan Permendagri 83 Tahun 2015	50,15	58	58	64
115.	Persentase Desa Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa	Persen; Kumulatif; IKU OPD	15,00	25,00	25,00	50,00
116.	Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015	35 Bumdes	25,00	25,00	30,00
117.	Persentase Pengembangan Desa	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa	195 Kerjasama Desa dan 13 Kerjasama Antar Desa	50,00	50,00	62,50
118.	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan		50,00	50,00	62,50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
		Permen Desa, PDT dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan				
119.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Permendagri no 18 th 2018 ttg Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	10,00	25,00	25,00	50,00
120.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	Permendagri Nomor:6 Th 1998 ttg Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP)	5,00	25,00	25,00	50,00
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
121.	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio; Tahunan	2,47	2,44	2,44	2,40
122.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,28	0,26	0,26	0,25
123.	Persentase Ketahanan keluarga	Persen, Tahunan, IKU OPD	45,00	48,00	48,00	52,00
124.	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	69,14	69,81	69,81	70,21
	PERHUBUNGAN					
125.	Rasio Konektivitas Perhubungan	Skor; Tahunan	51,14	53,34	53,34	58,24
126.	Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	34,49	40,00	40,00	50,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
127.	Persentase Perijinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	58,33	20,00	20,00	40,00
128.	Persentase Pelanggaran Operasional Lalu Lintas	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	38,92	35,00	35,00	30,00
129.	Presentase Lokasi Titik Parkir	Persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	60,00	68,00	68,00	76,00
130.	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	29,41	31,00	31,00	33,00
131.	Rasio Ijin Trayek	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	66,00	76,00	76,00	80,00
132.	Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum	laporan dan monev, Permendagri No. 86/2017	77,80	80,00	80,00	82,00
133.	Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Persen; Tahunan; IKU OPD	32,00	35,00	35,00	38,00
134.	Persentase Fatalitas Korban Kecelakaan	Persen; Tahun; IKU OPD	4,17	4,00	4,00	3,80
135.	Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	laporan dan monev, IKU OPD	45,15	56,57	56,57	67,00
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI					
136.	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	10,00	33,00	33,00	55,00
137.	Kualifikasi tingkat KIP Badan Publk	Skor; Tahunan	41,60	45,00	45,00	50,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
138.	Indeks SPBE	Indeks; Tahunan	2,58	2,75	2,75	3,00
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						
139.	Persentase Koperasi aktif	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,37	0,38	0,38	0,42
140.	UMKM yang kompetitif dan mandiri	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	5,26	5,80	5,80	7,10
PENANAMAN MODAL DAERAH						
141.	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	46,73	61,28	61,28	64,28
142.	Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	Indeks; Tahunan; IKU OPD	77,61	78,00	78,00	79,00
PEMUDA DAN OLAHRAGA						
143.	Persentase Wirausaha Pemuda	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,10	0,30	0,30	0,60
144.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00
145.	Jumlah Atlet yang Berprestasi	Atlet; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	65,00	70,00	70,00	75,00
STATISTIK						
146.	Persentase dokumen data sektoral statistik daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persen; Tahunan;	0	20,00	20,00	40,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
147.	Laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh pengunjung SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persen; Tahunan	0	10,00	10,00	20,00
148.	Standarisasi LPSE	Level; Tahunan	10,00	17,00	17,00	17,00
PERSANDIAN						
149.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai; Tahunan	147,00	272,00	272,00	300,00
KEBUDAYAAN						
150.	Persentase seni dan kesenian yang dibina	Persen, Tahunan	78,50	79,61	79,61	80,12
151.	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/ direhabilitasi dan dikaji	Persen, Tahunan	21,40	22,50	22,50	24,50
152.	Persentase tradisi yang dikembangkan	Satuan, Tahunan	50,00	55,00	55,00	57,50
PERPUSTAKAAN						
153.	Persentase peningkatan pemustaka	Persen; Tahunan; IKU OPD	31.243 orang	20 (37.492 orang)	20 (37.492 orang)	40 (43740 orang)
154.	Persentase peningkatan koleksi judul	Persen; Tahunan; IKU OPD	23.000 judul	20 (2500 judul)	20 (2500 judul)	40 (5000 judul)
155.	Persentase peningkatan perpustakaan berbasis TIK	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	20 (40 Perpus)	20 (40 Perpus)	40 (80 perpus)
KEARSIPAN						
156.	Peningkatan nilai LAKE LKD	Nilai, Tahunan, IKU OPD	39,00	45,00	45,00	55,00
157.	Peningkatan jumlah Perangkat daerah dan BUMD bernilai LAKI Cukup	Persen, Tahunan, IKU OPD	0	9,62 (5 OPD)	9,62 (5 OPD)	17,31 (9 OPD)
158.	Peningkatan Pemerintah desa dan Ormas bernilai LAKE Cukup	Persen, Tahunan, IKU OPD	0	16,67 (2 Desa)	16,67 (2 Desa)	33,33 (4 Desa)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
	PARIWISATA					
159.	Jumlah Kunjungan Wisnu dan wisman	Angka; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.052.487	1.052.587	1.052.587	1.052.687
160.	Rata-rata lama kunjungan wisata	Hari; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,90	0,08	0,08	0,09
161.	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	22,22	66,67	66,67	66,67
162.	Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	70,00	75,00	75,00	80,00
	PERTANIAN					
163.	Luas Lahan Pertanian Padi Organik	Hektar, Tahunan, IKU OPD	2,00	2,00	2,00	2,00
164.	Indek Pertanaman	Indeks; Akumulatif; IKU OPD	1,50	1,54	1,54	1,58
165.	Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman OPT)	Persen; Tahunan; IKU OPD	92,31	89,80	89,80	89,85
166.	Rasio Serangan OPT	Persen; Tahunan; angka maksimal; IKU OPD	<3	<3	<3	<3
167.	Persentase lahan terakomodir pupuk bersubsidi	Persen; Tahunan; IKU OPD	90,00	91,00	91,00	92,00
168.	Luas Lahan Sawah Lestari yang dipertahakan	Persen, IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
169.	Jumlah layanan Perlindungan Tanaman	Liter, Tahunan, IKU OPD	515,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
170.	Rasio Unit Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) per desa	Persen; Akumulasi; IKU OPD	54,77	59,36	59,36	61,48
171.	Persentase Posluhdes	Persen; Akumulatif;	27,18	30,66	30,66	34,15
172.	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Persen; Tahunan;	18,00	5,00	5,00	5,00
173.	Persentase petani yang terlatih pertahun	Persen; Tahunan;	2,50	2,50	2,50	2,50
174.	Jumlah Pelaku Usaha Industri Pengolahan Pertanian	Persen, Tahunan, IKU OPD	na	5,00	5,00	5,00
175.	Persentase adopsi teknologi tepat guna	Persen; Tahunan;	6,00	6,00	6,00	6,00
176.	Persentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian	Persen, akumulasi	30,00	35,00	35,00	40,00
177.	Penyediaan Sistem Informasi Pertanian	Jumlah jenis SI; IKU OPD	1,00	1,00	1,00	1,00
178.	Tingkat Kunjungan Masyarakat di TTP	Jumlah, IKU OPD	10.000	5.000	5.000	5.000
179.	Jumlah produksi daging	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.057.415	10.157.989	10.157.989	10.259.569
180.	Jumlah produksi telur	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.258.158	10.360.740	10.360.740	10.464.347
181.	Jumlah produksi susu	Kilogram ; Tahunan, IKU Program	713.890	724.599	724.599	735.468
	PERDAGANGAN					
182.	Persentase Pedagang tertib niaga	Persen; Tahunan; IKU OPD	18,73	20,00	20,00	40,00
183.	Jumlah pasar yang merujuk SNI	Persen; Tahunan; SNI	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar
	PERINDUSTRIAN					
184.	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7,00	7,90	7,90	7,90

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
185.	cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,25	4,95	4,95	5
186.	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7,00	7,40	7,40	7,40
	TRANSMIGRASI					
187.	Persentase transmigran yang ditempatkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00
	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
188.	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	1.551.423	1.566.937	1.566.937	1.582.606
189.	Nilai produksi perikanan tangkap	Rupiah; Tahunan; IKU Program	14.459.278	14.603.871	14.603.871	14.749.909
190.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	2.047.818	2.068.296	2.068.296	2.088.979
191.	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp; Tahunan; Permendagri 86/2017	86.814.081	87.682.222	87.682.222	88.559.044
192.	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	4.514.145	4.559.286	4.559.286	4.604.879
193.	Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Rp; Tahunan; Permendagri 86/2017	171.409.044	173.123.134	173.123.134	174.854.366

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
	URUSAN PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN					
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
	Sekretariat Daerah					
194.	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai Standar dan Administrasi Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu	Persen, Tahunan, IKU OPD	100	100	100	100
195.	Persentase OPD rumpun keuangan daerah tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen, Tahunan, IKU OPD	35,41	37,41	37,41	39,41
196.	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terselesaikan	Persen, Tahunan, IKU OPD	92,00	93,00	93,00	94,00
197.	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perencanaan perangkat Daerah	Persen, Tahunan, IKU OPD	100	100	100	100
198.	Persentase pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
199.	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	37,41	39,41
200.	Persentase kerjasama Daerah yang terealisasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
201.	Persentase Layanan Publik sesuai dengan SPM	Persen; Tahunan; IKU OPD	92,00	93,00	93,00	94,00
202.	Persentase IKM Kecamatan	Persen; Tahunan;	71,28	72,53	72,53	73,78
203.	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	37,41	39,41
204.	Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line (<i>e-procurement</i>)	Persen; Tahun; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
205.	Persentase lelang tepat waktu	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
206.	Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen, Kumulatif, IKU OPD	35,41	37,41	37,41	39,41

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
207.	Persentase peraturan rumpun perekonomian yang diimplementasikan	Persen, Kumulatif, IKU OPD	92,00	93,00	93,00	94,00
208.	Persentase pemenuhan pelayanan sosial keagamaan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
209.	Persentase OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	37,41	39,41
210.	Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
211.	Persentase OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	37,41	39,41
212.	Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	Persen; Tahun; IKU OPD	57,61	59,61	59,61	61,61
213.	Persentase IKM Kabupaten	Persen; Tahun; IKU OPD	71,28	72,53	72,53	73,78
214.	Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	37,41	39,41
215.	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
216.	Persentase penyelesaian permasalahan hukum HAM yang terfasilitasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
217.	Persentase OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	37,41	39,41
218.	Persentase Rumusan Kebijakan Rumpun Pembangunan yang difasilitasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sekretariat DPRD					
219.	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	Persen, Tahunan, Permendagri 86 2017	52,31	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
220.	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	Persen, Tahunan, permendagri 86 tahun 2017	54,22	100,00	100,00	100,00
	Kecamatan Adiwerna					
221.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
222.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	16	16	16	15
223.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	5	5	5	6
	Kecamatan Balapulang					
224.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
225.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	17	17	17	16
226.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	3	3	3	4
	Kecamatan Bojong					
227.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
228.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	15	15	15	15
229.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	2	2	2	2
	Kecamatan Bumijawa					
230.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	1	1	1	1
231.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	16	15	15	15
232.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	1	2	2	2
	Kecamatan Dukuhturi					
233.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
234.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	17	15	15	14
235.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	1	3	3	4
	Kecamatan Dukuhwaru					
236.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
237.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	7	6	6	6
238.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	3	4	4	4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
	Kecamatan Jatinegara					
239.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
240.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	16	16	16	16
241.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	1	1	1	1
	Kecamatan Kedungbanteng					
242.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
243.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	8	8	8	8
244.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	2	2	2	2
	Kecamatan Kramat					
245.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
246.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	14	12	12	11
247.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	5	7	7	8
	Kecamatan Lebaksiu					
248.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
249.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	13	9	9	9
250.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	2	6	6	6
	Kecamatan Margasari					
251.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
252.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	11	11	11	10
253.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	2	2	2	3
	Kecamatan Pagerbarang					
254.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
255.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	13	13	13	13
256.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
	Kecamatan Pangkah					
257.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
258.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	20	19	19	17

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
259.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	3	4	4	6
	Kecamatan Slawi					
260.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
261.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	1	0	0	0
262.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	4	5	5	5
	Kecamatan Suradadi					
263.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
264.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	8	7	7	7
265.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	3	4	4	4
	Kecamatan Talang					
266.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
267.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	17	17	17	17
268.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	2	2	2	2
	Kecamatan Tarub					
269.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
270.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	19	17	17	17
271.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	1	3	3	3
	Kecamatan Warureja					
272.	Desa Tertinggal	Jumlah; Tahunan	0	0	0	0
273.	Desa Berkembang	Jumlah; Tahunan	11	9	9	7
274.	Desa Mandiri	Jumlah; Tahunan	1	3	3	5
	PENGAWASAN					
275.	Persentase penyelesaian LHP	Jumlah; Tahunan	90,00	91,00	91,00	91,00
276.	Persentase OPD yang tercapai IKUnya	Jumlah; Tahunan	57,01	59,23	59,23	60,00
277.	Persentase OPD berpredikat WBK/WBBM	Jumlah; Tahunan	16,67	18,42	18,42	21,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
278.	Persentase APIP memiliki Sertifikasi Keahlian	Jumlah; Tahunan	2,33	6,98	6,98	11,63
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
279.	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	99,00	100,00	100,00	100,00
280.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97,00	97,00	97,00	97,00
281.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Pemkesos	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97,00	97,00	97,00	97,00
282.	Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82,00	85,00	85,00	86,00
283.	Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	83,01	85,00	85,00	85,00
	KEUANGAN					
284.	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	Persen; Tahunan: IKU OPD	100	100	100	100
285.	Persentase kualitas DPA yang sesuai ketentuan	Persen; Tahunan: IKU OPD	65	70	70	75
286.	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	Persen; Tahunan: IKU OPD	100	100	100	100
287.	Persentase ketersediaan Dana Kasda terhadap anggaran Kas	Persen; Tahunan: IKU OPD	100	100	100	100
288.	Persentase Ketepatan waktu Perda Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persen; Tahunan: IKU OPD	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
289.	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen; Tahunan: IKU OPD	100	100	100	100
290.	Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	Persen; Tahunan: IKU OPD	50	60	60	70
291.	Persentase perencanaan, monev dan pelaporan pendapatan	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00
292.	Persentase Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00
293.	Persentase Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
294.	Indikator Kelitbangan dan Pengelolaan Data	Persen; Tahunan; IKU OPD	63,70	78,72	78,72	83,29
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
295.	Persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	62,76	5,62	5,62	5,62
296.	Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,27	4,34	4,34	4,34
297.	Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan sesuai dengan peraturan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00
298.	Persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	85,00	95,50	95,50	95,50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
299.	Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	21,07	2,77	2,77	2,77
300.	Persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	24,77	13,68	13,68	13,68
301.	Persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	25,00	16,67	16,67	16,67
302.	Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	Persen; Tahunan; IKU OPD	0,54	0,52	0,52	0,52
C	Aspek Daya Saing					
303.	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan	Persen Tahunan; IKU OPD	(1,30)	0,10	0,10	0,15
304.	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perkebunan	Persen Tahunan; IKU OPD	1,18	1,05	1,05	1,10
305.	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Hortikultura	Persen Tahunan; IKU OPD	1,32	1,00	1,00	1,10
306.	Nilai Investasi PMA	Rp (000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	480.800.000	500.000.000	500.000.000	520.000.000
307.	Jumlah Investor PMA	Pemohon; Tahun	3	5	5	7
308.	Nilai Investasi PMDN	Rp (000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.073.862.531.863	850.000.000	850.000.000	875.000.000
309.	Jumlah Investor PMDN	Pemohon; Tahun	7.257	7.457	7.457	7.657
310.	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks; Tahunan	80,66	82,66	82,66	84,66

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 8.6.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2021-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	63,69	64,69	65,19	65,69	Sekretariat Daerah
2.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	78,61	82,15	84,83	86,2	Sekretariat Daerah
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,2	2,40	2,50	2,60	Sekretariat Daerah
4.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61	67,61	70,61	73,61	Sekretariat Daerah
5.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Daerah
6.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	72,12	76,42	78,31	80,56	Sekretariat Daerah
7.	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	72,31	77,26	79,68	81,36	Sekretariat Daerah
8.	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	72,88	78,80	81,66	83,59	Sekretariat Daerah
9.	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Persen; Tahunan	74,88	76,93	78,02	79,15	Sekretariat Daerah
10.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,20	75,30	75,40	75,50	Sekretariat Daerah
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,05	55,33	55,48	55,83	Sekretariat Daerah
12.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	-1,46	3,50	4,20	4,90	Sekretariat Daerah
13.	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2,18	2,75	2,87	3,23	Sekretariat Daerah
14.	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; Tahunan	-0,46	1,56	2,74	3,78	Sekretariat Daerah
15.	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Persen; Tahunan	1,85	1,99	2,23	2,33	Sekretariat Daerah
16.	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	-4,20	2,75	3,23	4,56	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
17.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,39	69,43	70,13	70,83	Sekretariat Daerah
18.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85	87,03	87,12	87,21	Sekretariat Daerah
19.	Indeks Pendidikan	Tahun; Tahunan	0,546	0,556	0,558	0,560	Sekretariat Daerah
20.	Indeks Kesehatan	Tahun; Tahunan	0,794	0,801	0,802	0,804	Sekretariat Daerah
21.	Wirausaha muda Produktif Berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	200	400	500	600	Sekretariat Daerah
22.	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,14	8,21	8,11	8,05	Sekretariat Daerah
23.	Indek Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	1,08	0,98	0,82	0,78	Sekretariat Daerah
24.	Indek Keparahan Kemiskinan		0,19	0,15	0,12	0,10	Sekretariat Daerah
25.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	9,82	9,53	9,24	8,45	Sekretariat Daerah
26.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	82,66	86,66	88,66	90,66	Sekretariat Daerah
27.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan	Persen; Tahunan	82,66	86,66	88,66	90,66	Sekretariat Daerah
28.	Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	183,00	174,62	172,12	171,84	Sekretariat Daerah
29.	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,60	0,8	0,89	0,9	Sekretariat Daerah
30.	Persenstase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen; tahunan	44,74	55,27	63,16	73,69	Sekretariat Daerah
31.	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	Persen; tahunan	57,50	65,50	70,50	75,50	Sekretariat Daerah
B	Aspek Pelayanan Umum						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	79,86	79,88	79,89	79,9	DIKBUD
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	97,25	97,27	97,28	97,29	DIKBUD
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	107,03	100	100	100	DIKBUD
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	105,99	100,00	100,00	100,00	DIKBUD
5.	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	77.47	76	77	78	DIKBUD
6.	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	70.86	73.36	74.5	75.75	DIKBUD
7.	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	5,00	5,00	5,00	5,00	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
8.	Rasio Guru Kelas PAUD	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	23	22	15	16	DIKBUD
9.	Rasio Guru Kelas TK	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	3,16	4,61	5,82	7,03	DIKBUD
10.	Rasio Guru Kelas SD	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	19:11	1.40	1.30	1.20	DIKBUD
11.	Rasio Guru Mapel PAI	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	3.00	2.40	1.90	1.40	DIKBUD
12.	Rasio Guru Mapel PJOK	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	2.90	2.40	1.90	1.40	DIKBUD
13.	Rasio Guru Mapel SMP	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	04:38	20:19	00:11	04:03	DIKBUD
14.	Rasio Guru Mapel Paket A	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	00:00	00:00	12:00	00:00	DIKBUD
15.	Rasio Guru Mapel Paket B	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	22:44	22:44	22:44	22:44	DIKBUD
16.	Rasio Guru Mapel Paket C	Angka; Tahunan; Permendagri 86/2017	09:05	15:09	18:11	00:15	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
17.	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	100	100	DIKBUD
18.	Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	50	60	65	70	DIKBUD
19.	Persentase pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
20.	Persentase pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik PAUD	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
21.	Persentase pendidik (guru pendidikan anak usia dini) memenuhi kualitas	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
22.	Persentase tenaga kependidikan (kepala satuan pendidikan anak usia dini) memenuhi kualitas	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
23.	Persentase pemenuhan jumlah pendidik pada pendidikan anak usia dini	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud	100	100	100	100	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
		Nomor 32 Tahun 2018					
24.	Persentase jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
25.	Persentase pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
26.	Persentase pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik SD	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
27.	Persentase pendidik (guru kelas dan mata pelajaran) memenuhi kualitas	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
28.	Persentase tenaga kependidikan (kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya) pelajaran memenuhi kualitas	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
29.	Persentase pemenuhan jumlah pendidik pada sekolah dasar	Persen; Tahunan; SPM;	100	100	100	100	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
		Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018					
30.	Persentase jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
31.	Persentase pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
32.	Persentase pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik SMP	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
33.	Persentase pendidik (guru mata pelajaran) memenuhi kualitas	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
34.	Persentase tenaga kependidikan (kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya) pelajaran memenuhi kualitas	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
35.	Persentase pemenuhan jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
36.	Persentase jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
37.	Persentase pemenuhan perlengkapan	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
38.	Persentase pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
39.	Persentase pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
40.	Persentase pendidik (tutor pendidikan kesetaraan) memenuhi kualitas	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud	100	100	100	100	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
		Nomor 32 Tahun 2018					
41.	Persentase tenaga kependidikan (kepala satuan pendidikan kesetaraan dan tenaga penunjang lainnya) pelajaran memenuhi kualitas	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
42.	Persentase pemenuhan jumlah pendidik pada pendidikan kesetaraan	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
43.	Persentase jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan	Persen; Tahunan; SPM; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018	100	100	100	100	DIKBUD
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN						
44.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	0,092	0,096	0,098	0,100	DINKES
45.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	88,90	100,00	100,00	100,00	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
46.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	93,30	98,00	99,00	100,00	DINKES
47.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	98,20	100,00	100,00	100,00	DINKES
48.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	99,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
49.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	73,70	91,00	92,00	93,00	DINKES
50.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	38,90	55,00	60,00	65,00	DINKES
51.	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	15,40	30,00	35,00	40,00	DINKES
52.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	33,60	78,00	79,00	80,00	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
53.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	10,100	30,00	35,00	40,00	DINKES
54.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	74,50	79,00	80,00	81,00	DINKES
55.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	57,30	70,00	75,00	80,00	DINKES
56.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	57,10	70,00	75,00	80,00	DINKES
57.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	90,50	95,00	98,00	98,00	DINKES
58.	Cakupan balita stunting	Persen; Tahunan	12,50	12,30	12,20	12,00	DINKES
59.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	Persen; Tahunan	42,00	63,00	90,00	100,00	DINKES
60.	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
61.	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	Persen; Tahunan	83,00	89,60	93,10	100,00	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
62.	Cakupan produk industri rumah tangga (PIRT) pangan yang tersertifikasi	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
63.	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
64.	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen, tahunan, indikator kinerja program promosi kesehatan	95,40	95,60	95,70	95,80	DINKES
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
65.	Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	61,09	65,55	67,77	70,00	DIN PERKIMTARU
66.	Rasio ketersediaan sarpras persampahan	Persen, Penting, UU No. 18 Tahun 2008	0	82,00	83,00	85,00	DLH
67.	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	94,37	95,57	95,97	96,37	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
68.	Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Persen; kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. 490,15 Km jalan harus berdrainase; 277,95 Km jalan yang berdrainase.	58,42	61,79	62,15	62,52	DPU
69.	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Persen; Kumulatif; Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan	76,88	79,12	80,24	81,36	DPU
70.	Rasio bangunan yang memiliki IMB	Persen; Kumulatif; Data Perumahan Kabupaten Tegal & Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan	6,50	8,01	8,57	9,15	DISPERKIMTARU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
		Bangunan, Permen PUPR No 2 Tahun 2020					
71.	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persen, Kumulatif	0,00	60,00	91,11	100,00	DISPERKIMTARU
72.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km.	81,11	84,00	85,50	87,50	DPU
73.	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal; Jumlah Jembatan 454 unit	88,05	91,00	92,00	93,50	DPU
74.	Rasio penyedia jasa konstruksi yang Sesuai Standar Teknis	Persen; Tahunan; PP 22 Tahun 2020 tentang	98,40	98,40	98,40	98,40	DPU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
		Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi					
75.	Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019	0	80,00	80,00	80,00	DPU
76.	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persen; Tahunan	86,00	88,00	89,00	90,00	DPU
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
77.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen; Tahunan; PermenPUPR No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020	100	100	100	100	DISPERKIMTARU
78.	Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Persen; Tahunan	0	100	100	100	DISPERKIMTARU
79.	Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	Hektar; Kumulatif; Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi	173,01	223,01	248,01	273,01	DISPERKIMTARU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
		Kumuh di Kabupaten Tegal					
80.	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	Persen; Kumulatif; Perbup Kab. Tegal No 1/2020	13,06	17,98	20,79	23,6	DISPERKIMTARU
81.	Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan	Persen; Kumulatif	83,31	84,50	85,10	85,90	DISPERKIMTARU
82.	Persentase Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi JDIH Kementerian PUPR Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	Persen; Tahunan; SPM; Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018	100	100	100	100	DISPERKIMTARU
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN						
83.	Persentase gangguan trantibun yang tertangani	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	80,00	86,00	88,00	90,00	SATPOL PP
84.	Persentase pelanggaran perda dan perkada yg diselesaikan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	70,00	67,00	67,00	67,00	SATPOL PP
85.	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	65	71,66	75,25	79,01	BPBD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
	bencana sesuai jenis ancaman bencana						
86.	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	1,38	1,52	1,6	1,68	BPBD
87.	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	22,26	24,54	25,77	27,06	BPBD
88.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020	66,00	82,00	90,00	100,00	SATPOL PP
89.	Persentase pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan untuk warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Persen; Tahunan; SPM Permendagri Nomor 121 Tahun 2018	100	100	100	100	SATPOL PP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
90.	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	32,44	66,25	83,15	100,00	DINSOS
91.	Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	DINSOS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
92.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019	25,16	47,01	65,57	100,00	DINSOS
93.	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	97,91	99,21	100,00	100,00	DINSOS
94.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	DINSOS
95.	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	89,80	90,00	90,25	90,75	DINSOS
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
96.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen, Tahun	100	100	100	100	DISPERINAKER
97.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Angka, Tahun	0,008	0,009	0,009	0,009	DISPERINAKER
98.	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen, Bulan	3,70	5,50	6,40	6,70	DISPERINAKER

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
99.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Persen, Tahunan	17,82	30,00	35,00	40,00	DISPERINAHER
100.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen, Bulan	7,08	7,78	8,13	8,48	DISPERINAHER
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
101.	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Persen, Tahunan, APBD	26,84	28,00	29,00	30,00	DP3AP2KB
102.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen, Tahunan, Data SIMPONI	5,16	6,37	6,35	6,32	DP3AP2KB
103.	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	Persen, Tahunan, Laporan Kunjungan	0,04	0,06	0,07	0,08	DP3AP2KB
104.	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	Persen, tahunan, laporan SIGA	50,00	60,00	65,00	70,00	DP3AP2KB
105.	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Persen, Tahunan, Data Evaluasi KLA	55,00	64,00	67,00	70,00	DP3AP2KB
106.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen, Tahunan, Data Simfoni PPPA	0.0092	0.0120	0.0130	0.0140	DP3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
107.	Persentase penguatan cadangan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 11/2018, Permendagri 18 Tahun 2020	26,5	28,5	30	32,5	DISTANKP
108.	Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/O T.140/12/2010	48	50	51	52	DISTANKP
109.	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	72,00	90,00	90,00	90,00	DISTANKP
110.	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	90,00	80,00	83,00	85,00	DISTANKP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
111.	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	DISPERKIMTARU
112.	Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	Persen Kumulatif	55,95	77,97	88,98	100,00	DISPERKIMTARU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
113.	Persentase implementasi redistribusi tanah	Persen; Kumulatif	0	30	60	100	DISPERKIMTARU
114.	Persentase Tanah yang tertata	Persen, Kumulatif	0	33,33	66,66	100,00	DISPERKIMTARU
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
115.	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	Persen; Kumulatif	11,11	55,56	77,78	100,00	DLH
116.	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	Persen, Kumulatif	3,70	7,41	11,11	14,81	DLH
117.	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Persen, Tahunan	1,08	9,76	16,84	18,60	DLH
118.	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	Persen, Tahunan	0	34,72	37,50	38,89	DLH
119.	Persentase Penanganan Limbah B3	Persen, Kumulatif	60,00	62,50	65,00	67,00	DLH
120.	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Persen, Tahunan	30	40	45	50	DLH
121.	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	Persen, Kumulatif	5	15	17	20	DLH
122.	Persentase kenaikan Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan untuk masyarakat	Persen, Kumulatif	20	20	22	24	DLH
123.	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen, Tahunan	90,00	90,00	90,00	90,00	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
124.	Persentase Sampah yang Tertangani	Persen; Tahunan; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	47,29	57,31	59,92	71,00	DLH
125.	Persentase Pengurangan Sampah	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	14,00	17,92	23,15	29,00	DLH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
126.	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	91,67	94,00	96,00	98,00	DISDUKCAPIL
127.	Perekaman KTP elektronik	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	99,68	99,74	99,76	99,80	DISDUKCAPIL
128.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	21,18	60,00	70,00	80,00	DISDUKCAPIL
129.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	93,10	95,50	96,00	96,50	DISDUKCAPIL
130.	Persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan; IKU OPD	68,54	70,04	70,79	71,54	DISDUKCAPIL
131.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	6,38 (Dengan PKS lama)	4,26	6,38	8,51	DISDUKCAPIL

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
132.	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa	55,23	65,23	70,23	80,23	DISPERMASDES
133.	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD	69,40	70,82	71,53	72,24	DISPERMASDES
134.	Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri 18 Tahun 2020 tentang LPPD	35,00	68,00	89,00	100,00	DISPERMASDES
135.	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 tahun 2018	100,00	100,00	100,00	100,00	DISPERMASDES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
		tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
136.	TFR (Angka kelahiran Total)	Dokumen; Tahunan; BPS	2,43	2,37	2,33	2.30	DP3AP2KB
137.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence Rate</i>) CPR	Persen, bulanan, Laporan Dalap Kab	69,04	69,14	69,34	69,54	DP3AP2KB
138.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	Persen; Tahun	14,06	13,86	13,76	13,66	DP3AP2KB
139.	Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	Persen ; bulanan ; Laporan Dalap Kab	20.84	21,05	22,00	22.05	DP3AP2KB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
140.	Persentase penurunan rasio kejadian kecelakaan lalu lintas	Persen; Tahun/ Triwulan; Data	0,65	0,55	0,5	0,45	DISHUB
141.	Konektivitas transportasi	Persen, Tahun, Data	75,2	75,3	75,4	75,5	DISHUB
142.	Kinerja lalu lintas kabupaten	Satuan mobil penumpang	0,43	0,47	0,5	0,52	DISHUB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
		(smp) /jam; tahun data					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
143.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Persen; Tahunan	20,00	30,00	50,00	80,00	DISKOMINFO
144.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen; Tahunan	45,00	65,00	75,00	85,00	DISKOMINFO
145.	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Persen; Tahunan	25,00	50,00	75,00	100,00	DISKOMINFO
146.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Persen; Tahunan	16,67	70,83	85,42	100,00	DISKOMINFO
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
147.	Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam yang terfasilitasi	Persen; Tahun	100	100	100	100	DISDAGKOP UKM
148.	Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	Persen; Tahun	15,72	17,31	17,77	18,22	DISDAGKOP UKM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
149.	Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	Persen; Kumulatif	5,82	17,72	26,07	35,18	DISDAGKOP UKM
150.	Persentase Koperasi bermitra	Persen; Tahun	1,04	3,64	4,94	6,23	DISDAGKOP UKM
151.	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	Persen; Kegiatan	2,63	4,21	4,73	5,26	DISDAGKOP UKM
152.	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kegiatan	0,00	1,05	2,63	4,21	DISDAGKOP UKM
153.	Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam yang terfasilitasi	Persen; Tahun	100	100	100	100	DISDAGKOP UKM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
154.	Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	Persen; Tahunan	0,00	42,86	57,14	71,43	DPMPTSP
155.	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Persen; Tahunan	100,00	20,00	20,00	20,00	DPMPTSP
156.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perijinan	Nilai, Tahunan	78	80	81	82	DPMPTSP
157.	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persen; Tahunan	61,28	67,28	70,28	73,28	DPMPTSP
158.	Persentase data layanan yang termanfaatkan	Persen; Tahunan	100,00	9,38	11,46	13,54	DPMPTSP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
159.	Persentase peningkatan penyadaran pemuda	Persen; Tahunan	0,80	0,84	0,86	0,86	DINAS PORAPAR
160.	Persentase kelompok kewirausahaan pemuda dibina	Persen; Tahunan	13,00	18,00	19,00	20,00	DINAS PORAPAR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
161.	Persentase peningkatan organisasi pemuda yang aktif	Persen; Tahunan	40,00	60,00	70,00	80,00	DINAS PORAPAR
162.	Jumlah Atlit yang berprestasi	Angka; Tahunan	62,00	75,00	80,00	85,00	DINAS PORAPAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
163.	Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	Persen; Tahunan	38,15	52,36	59,47	66,57	DISKOMINFO
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
164.	Tingkat keamanan Informasi	Persen; Tahunan	45,00	50,00	60,00	75,00	DISKOMINFO
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
165.	Persentase tradisi yang dikembangkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	61.11	65.11	67.11	69.11	DIKBUD
166.	Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	54,55	76,77	87,88	100,00	DIKBUD
167.	Persentase Sejarah yang Terdokumentasikan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	76,47	78.10	78.43	78.76	DIKBUD
168.	Persentase terlestariannya Cagar Budaya	Persen; Tahunan; Permendagri No.18 Tahun 2020	45,83	49.83	51.83	53.83	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
169.	Persentase museum yang dikelola	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	65,00	67,50	68,75	70,00	DIKBUD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
170.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	47,91	52,00	54,00	56,00	DISARPUS
171.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	9,088	11,00	11,50	12,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
172.	Peningkatan nilai LAKE LKD	Persen; Tahunan; PERKA ANRI 6/2019	73,00	87,00	89,00	91,00	DISARPUS
173.	Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup	Persen; Kumulatif	0,00	20,83	25,00	29,17	DISARPUS
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
174.	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	1.964.378	2.003.862	2.023.900	2.044.139	DKPP
175.	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Ribu Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	13.608.184	13.881.708	14.020.525	14.160.730	DKPP
176.	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.730.262	2.764.493	2.792.138	2.825.643	DKPP
177.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Ribu Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	145.642.227	148.291.680	150.431.397	153.024.735	DKPP
178.	Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing	Persen; Tahun	11,11	55,56	77,78	100	DKPP
179.	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Kilogram; Tahunan; Manual	5.478.639	5.492.344	5.503.329	5.517.087	DKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
		IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng					
180.	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Ribu Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	131.189.14 2	131.517.312	131.780.347	132.109.798	DKPP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
181.	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	Persen; Tahunan	78,33	90	95	100	DISPORAPAR
182.	Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Unit; Komlatif	138,00	148,00	153,00	158,00	DISPORAPAR
183.	Persentase DTW yang dipromosikan	Persen; Tahunan	78,33	90	95	100	DISPORAPAR
184.	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikasi	Orang; Tahunan	2	8	11	14	DISPORAPAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
185.	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahun	89,80	89,90	89,93	90,00	DISTANKP
186.	Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Persen; Tahun, Permendagri 18 Th. 2020	63,00	65,00	67,00	70,00	DISTANKP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
187.	Luas Lahan Pertanian Organik	Persen; Tahun	2,00	2,00	2,00	5,00	DISTANKP
188.	Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Persen; Tahun	62,72	62,98	63,24	63,50	DISTANKP
189.	Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Persen; Tahun	15,51	16,98	19,45	22,01	DISTANKP
190.	Produksi daging (kg)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	11.284.734	11.511.557	11.626.673	11.742.939	DKPP
191.	Produksi Telur (kg.)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	10.760.493	10.976.779	11.086.547	11.197.412	DKPP
192.	Produksi Susu (kg.)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	604.664	616.818	622.986	629.216	DKPP
193.	Indeks pertanaman	Indeks; IKU OPD	1,52	1,62	1,66	1,70	DISTANKP
194.	Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	Km/ha; Tahun	2,60	3,34	3,70	4,11	DISTANKP
195.	Persentase Luas Lahan Sawah Lestari	Persen; Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	DISTANKP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
196.	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	Persen ; Tahunan;	31,37	5,60	5,60	5,60	DKPP
197.	Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH (Jenis)	Jenis ; Tahunan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	DKPP
198.	Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahunan; IKU OPD	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	DISTANKP
199.	Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	1,5	2	2,5	DISTANKP
200.	Jumlah Kelompok Tani Ternak (KTT) meningkat status kelembagaannya.	Kelompok/Tahunan/Renstra Disnak Provinsi Jateng.	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	DKPP
201.	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	Persen; Tahunan	0	27	20	20	DISTANKP
202.	Pertumbuhan Pos Penyuluh Desa (Posluhdes)	Persen; Tahun	0	13	11	10	DISTANKP
203.	Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	Persen; Tahun	0	2,51	2,57	2,64	DISTANKP
204.	Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut Ke Madya	Persen; Tahun	0	1,94	1,93	1,92	DISTANKP
205.	Jumlah Gapoktan yang bermitra dengan BUMP	Gapoktan; Tahun	7 Gapoktan	5	5	5	DISTANKP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
206.	Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100,00	100,0	100,00	100,00	DISDAGKOP UKM
207.	Persentase Pasar direhabilitasi	Persentase, Tahunan; Permendagri No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern	50,00	65,38	76,92	88,46	DISDAGKOP UKM
208.	Persentase pasar e-ritribusi	Persen: Tahunan	7,69	46,15	65,38	84,62	DISDAGKOP UKM
209.	Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang dikelola dengan baik	Persen; Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDAGKOP UKM
210.	Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil	Persen; Tahunan: Kemendag	<9%	<9%	<9%	<9%	DISDAGKOP UKM
211.	Persentase Laju Nilai Ekspor	Persen; Tahun	1,00	1,00	1,00	1,00	DISDAGKOP UKM
212.	Persentase Pedagang Tertib Ukur	Persentase, data tahunan	27,95	35,01	50,01	60,01	
213.	Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	Persen; Tahun	2,00	2,00	2,00	2,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
214.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2019	60,00	70,00	80,00	100,00	Disperinnaker
215.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen, Bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	Disperinnaker
216.	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	Persen, Bulan	20,00	60,00	80,00	100,00	Disperinnaker
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
217.	Transmigran yang ditempatkan	Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009	100	100	100	100	DISPERINAKER
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
218.	Rata-rata kinerja OPD rumpun pemerintahan kesra (LKjIP)	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	71,03	75,03	76,28	77,53	SETDA
219.	Persentase pelayanan publik OPD rumpun pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM)	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	37,41	41,41	43,41	45,41	SETDA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
220.	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	SETDA
221.	Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	SETDA
222.	Persentase Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	1	3	3	4	SETDA
223.	Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	Level: Tahunan	12	14	15	16	SETDA
	SEKRETARIAT DPRD						
224.	Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	100	100	SET. DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PERENCANAAN						
225.	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA DAN LITBANG
226.	Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	85,00	87,00	88,00	90,00	BAPPEDA DAN LITBANG

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
227.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen; Tahunan; IKU PD	100,00	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA DAN LITBANG
228.	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	Persen; Tahunan; IKU PD	85,00	90,00	92,00	95,00	BAPPEDA DAN LITBANG
229.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen; Tahunan; IKU PD	85,00	90,00	92,00	97,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	KEUANGAN						
230.	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100	100	100	BPKAD
231.	Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100	100	100	BPKAD
232.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100	100	100	BAPENDA
233.	Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	Persen; Tahunan; Permendagri 19/2016	62,50	70,00	75,00	80,00	BAPENDA
234.	Rasio PAD terhadap PDRB non Migas	Persen, Tahunan	1,16	1,26	1,31	1,36	BAPENDA
235.	Rasio Piutang Pajak Daerah	Persen, Tahunan	14%	10	8	6	BAPENDA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
236.	Rasio Pajak Daerah	Persen, Tahunan	30,63	30,52	30,68	31,00	BAPENDA
	KEPEGAWAIAN						
237.	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	Persen, Tahunan	0,12	0,12	0,12	0,12	BKD
238.	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	Persen, Tahunan	57,12	57,50	59,29	62,10	BKD
239.	Persentase jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	Persen, Tahunan	57,12	57,50	59,29	62,10	BKD
240.	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	Persen, Tahunan	110,04	239,96	264,61	293,12	BKD
241.	Rasio pegawai fungsional (%)	Persen, Tahunan	9,64	15,28	15,68	16,23	BKD
242.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Persen, Tahunan	93,50	93,26	92,69	93,05	BKD
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
243.	Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20/jam	Persen; komulatif; PP no.11 tahun 2017	47,50	70,00	75,00	80,00	BKD
244.	Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	Persen; Tahunan; PP no.11 tahun 2017	33,40	40,00	45,00	50,00	BKD
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
245.	Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	65,00	73,44	87,50	92,50	BAPPEDA DAN LITBANG
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
	INSPEKTORAT DAERAH						
246.	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persen; Tahunan:	91,70	92,00	92,00	92,00	INSPEKTORAT
247.	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	Persen; Tahunan:	100,00	100,00	100,00	100,00	INSPEKTORAT
248.	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	Persen; Tahunan:	23,77	60,00	70,00	80,00	INSPEKTORAT
249.	Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	Persen; Tahunan:	2,00	8,30	8,30	12,50	INSPEKTORAT
250.	Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	Persen; Tahunan:	59,53	70,00	90,00	90,00	INSPEKTORAT
251.	Persentase Perangkat Daerah menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	Persen; Tahunan:	81,25	89,58	93,75	100,00	INSPEKTORAT
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
252.	IKM Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	76,37	78,87	79,87	80,87	Kecamatan Adiwerna
253.	IKM Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	79,29	81,79	82,79	83,79	Kecamatan Balapulang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
254.	IKM Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	79,62	82,12	83,12	84,12	Kecamatan Bojong
255.	IKM Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	87,53	90,03	91,03	92,03	Kecamatan Bumijawa
256.	IKM Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	79,37	81,87	82,87	83,87	Kecamatan Dukuhturi
257.	IKM Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	77,44	79,94	80,94	81,94	Kecamatan Dukuhwaru
258.	IKM Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	79,7	82,2	83,2	84,2	Kecamatan Jatinegara
259.	IKM Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82,21	84,71	85,71	86,71	Kecamatan Kedungabnteng
260.	IKM Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	78,98	81,48	82,48	83,48	Kecamatan Kramat
261.	IKM Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	88	90,5	91,5	92,5	Kecamatan Lebaksiu
262.	IKM Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	77,4	79,9	80,9	81,9	Kecamatan Margasari
263.	IKM Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	77,63	80,13	81,13	82,13	Kecamatan Pagerbarang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
264.	IKM Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	78,74	81,24	82,24	83,24	Kecamatan Pangkah
265.	IKM Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	79,67	82,17	83,17	84,17	Kecamatan Slawi
266.	IKM Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	79,76	82,26	83,26	84,26	Kecamatan Suradadi
267.	IKM Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	73,2	75,7	76,7	77,7	Kecamatan Talang
268.	IKM Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,55	83,05	84,05	85,05	Kecamatan Tarub
269.	IKM Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	77,4	79,9	80,9	81,9	Kecamatan Warureja
270.	Persentase desa/ kelurahan maju Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	9,52	19,05	23,81	28,57	Kecamatan Adiwerna
271.	Persentase desa/ kelurahan maju Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	5,00	15,00	20,00	25,00	Kecamatan Balapulang
272.	Persentase desa/ kelurahan maju Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	29,41	41,18	47,06	52,94	Kecamatan Bojong
273.	Persentase desa/ kelurahan maju Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	5,56	16,67	22,22	27,78	Kecamatan Bumijawa

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
274.	Persentase desa/ kelurahan maju Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0,00	20,00	30,00	40,00	Kecamatan Dukuhturi
275.	Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	5,56	16,67	22,22	27,78	Kecamatan Dukuhwaru
276.	Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	6,67	17,65	23,53	29,41	Kecamatan Jatinegara
277.	Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0,00	20,00	30,00	40,00	Kecamatan Kedungabnteng
278.	Persentase desa/ kelurahan maju Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	15,79	26,32	31,58	36,84	Kecamatan Kramat
279.	Persentase desa/ kelurahan maju Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	20,00	33,33	40,00	46,67	Kecamatan Lebaksiu
280.	Persentase desa/ kelurahan maju Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	53,85	69,23	76,92	84,62	Kecamatan Margasari
281.	Persentase desa/ kelurahan maju Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0,00	15,38	23,08	30,77	Kecamatan Pagerbarang
282.	Persentase desa/ kelurahan maju Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	4,35	13,04	17,39	21,74	Kecamatan Pangkah
283.	Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	40,00	80,00	100,00	100,00	Kecamatan Slawi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
284.	Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	9,09	27,27	36,36	45,45	Kecamatan Suradadi
285.	Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0,00	10,53	15,79	21,05	Kecamatan Talang
286.	Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	Kecamatan Tarub
287.	Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	8,33	25,00	25,00	33,33	Kecamatan Warureja
288.	Persentase desa/ kelurahan mandiri Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	9,52	19,05	23,81	28,57	Kecamatan Adiwerna
289.	Persentase desa/ kelurahan mandiri Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	5,00	15,00	20,00	25,00	Kecamatan Balapulang
290.	Persentase desa/ kelurahan mandiri Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	29,41	41,18	47,06	52,94	Kecamatan Bojong
291.	Persentase desa/ kelurahan mandiri Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	5,56	16,67	22,22	27,78	Kecamatan Bumijawa
292.	Persentase desa/ kelurahan mandiri Kecamatan Dukuwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0,00	20,00	30,00	40,00	Kecamatan Dukuhturi
293.	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	5,56	16,67	22,22	27,78	Kecamatan Dukuwaru

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
294.	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	6,67	17,65	23,53	29,41	Kecamatan Jatinegara
295.	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0,00	20,00	30,00	40,00	Kecamatan Kedungabnteng
296.	Persentase desa/ kelurahan mandiri Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	15,79	26,32	31,58	36,84	Kecamatan Kramat
297.	Persentase desa/ kelurahan mandiri Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	20,00	33,33	40,00	46,67	Kecamatan Lebaksiu
298.	Persentase desa/ kelurahan mandiri Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	53,85	69,23	76,92	84,62	Kecamatan Margasari
299.	Persentase desa/ kelurahan mandiri Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0,00	15,38	23,08	30,77	Kecamatan Pagerbarang
300.	Persentase desa/ kelurahan mandiri Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	4,35	13,04	17,39	21,74	Kecamatan Pangkah
301.	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	40,00	80,00	100,00	100,00	Kecamatan Slawi
302.	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	9,09	27,27	36,36	45,45	Kecamatan Suradadi
303.	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0,00	10,53	15,79	21,05	Kecamatan Talang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
304.	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	Kecamatan Tarub
305.	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	8,33	25,00	25,00	33,33	Kecamatan Warureja
306.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Adiwerna
307.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Balapulang
308.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Bojong
309.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Bumijawa
310.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Dukuhturi
311.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Dukhuturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Dukuhwaru
312.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Jatinegara
313.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Kedungabnteng

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
314.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Kramat
315.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Lebaksiu
316.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Margasari
317.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Pagerbarang
318.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Pangkah
319.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Slawi
320.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Suradadi
321.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Talang
322.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Tarub
323.	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	0	0	0	Kecamatan Warureja

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
324.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Adiwerna
325.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Balapulang
326.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Bojong
327.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Bumijawa
328.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Dukuhhuri
329.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhhuri	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Dukuhwaru
330.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Jatinegara

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
331.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Kedungbanteng
332.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Kramat
333.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Lebaksiu
334.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Margasari
335.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Pagerbarang
336.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Pangkah
337.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Slawi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
338.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Suradadi
339.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Talang
340.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Tarub
341.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Warureja
342.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Adiwerna
343.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Balapulang
344.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Bojong
345.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Bumijawa
346.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	Kecamatan Dukuhturi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
347.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Dukuhwaru
348.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Jatinegara
349.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Kedungbanteng
350.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Kramat
351.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Lebaksiu
352.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Margasari
353.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Pagerbarang
354.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Pangkah
355.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Slawi
356.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Suradadi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
357.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Talang
358.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Tarub
359.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	78	80	Kecamatan Warureja
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
360.	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,42	86,66	88,66	90,66	BADAN KESBANGPOL
361.	Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	BADAN KESBANGPOL
362.	Persentase lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	35,40	53,10	70,80	BADAN KESBANGPOL
363.	Persentase Ormas yang Terbina	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,00	90,00	95,00	100,00	BADAN KESBANGPOL
364.	Persentase Konflik yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN KESBANGPOL
365.	Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN KESBANGPOL

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	2022	2023	2024	Perangkat Daerah Koordinator
C	Aspek Daya Saing						
1.	Persentase peningkatan Investasi di kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	39,69	3,23	3,13	3,03	DPMPTSP
2.	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Persen; Tahunan	1,00	1,33	1,00	1,25	DPMPTSP
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perijinan	Nilai; Tahunan	78	80	81	82	DPMPTSP
4.	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persentase	61,28	67,28	70,28	73,28	DPMPTSP
5.	Persentase frekuensi Peningkatan Update data	Persentase	6,00	10,00	12,00	15,00	DPMPTSP
6.	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,42	86,66	88,66	90,66	BADAN KESBANGPOL

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

BAB IX PENUTUP

Perubahan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan RPJPD tahap keempat yaitu tahapan **Akselerasi Proses Inovasi**. RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dra. Umi Azizah dan Sabilillah Ardie, B.Sc. dalam Pemilukada tahun 2018. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal dijabarkan lagi kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, indikasi kebutuhan pendanaan rencana program prioritas dan penetapan target kinerja sasaran, target kinerja program serta target kinerja daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, mengacu pada indikator program pembangunan Provinsi Jawa Tengah (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023), serta mengacu pada indikasi Program Utama yang telah ditentukan dalam Pembangunan Jangka Menengah (PJM II dan PJM III) RTRW Kabupaten Tegal. Sehingga Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan RPJPD, RPJMN, RPJM Provinsi, dan RTRW Kabupaten Tegal.

Perubahan RPJMD menjadi pedoman dan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan selama 5 (lima) tahun. Karena pembangunan di Kabupaten Tegal hanya dapat dilaksanakan secara optimal dengan dukungan semua elemen, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tegal berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD sesuai kapasitasnya.

Dengan penyusunan dan penetapan RPJMD diharapkan visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”** sesuai dengan semangat **“mbangun berkah, gawe bungah”** dalam RPJMD dan visi **“Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”** dalam RPJPD dapat diwujudkan.

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH